



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

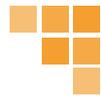


**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2022**

RKPD

PROVINSI JAWA TENGAH

2023



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.5. Sistematikan.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Kondisi Geografi	II-1
2.1.2. Kondisi Demografi	II-4
2.1.3. Kondisi Perekonomian	II-7
2.1.4. Kondisi Kemiskinan.....	II-30
2.1.5. Kondisi Sumber Daya Manusia.....	II-41
2.1.6. Kondisi Pangan dan Energi.....	II-81
2.1.7. Kondisi Infrastruktur Wilayah	II-103
2.1.8. Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penagugulangan Bencana	II-152
2.1.9. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah	II-181
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2021	II-204
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-205
a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-205
1. Urusan Pendidikan	II-205
2. Kesehatan	II-205
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-206
4. Penataan Ruang	II-207
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-208
6. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-208
7. Sosial	II-209
b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-209
1. Tenaga Kerja	II-209
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-210
3. Pangan	II-210
4. Pertanahan	II-210
5. Lingkungan Hidup	II-211
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-211
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-211
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-212

9. Perhubungan	II-212
10. Komunikasi dan Informatika	II-213
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-213
12. Penanaman Modal	II-214
13. Kepemudaan dan Olahraga	II-215
14. Statistik	II-215
15. Persandian	II-215
16. Kebudayaan	II-216
17. Perpustakaan	II-216
18. Kearsipan	II-216
c. Urusan Pilihan	II-216
1. Perikanan dan Kelautan	II-216
2. Pariwisata	II-217
3. Pertanian	II-217
4. Kehutanan	II-218
5. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-218
6. Perdagangan	II-219
7. Perindustrian	II-219
8. Transmigrasi	II-220
d. Unsur Pendukung Pemerintahan	II-220
1. Perencanaan	II-220
2. Keuangan	II-221
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-221
4. Penelitian dan Pengembangan	II-222
e. Unsur Pengawasan Pemerintahan	II-222
f. Unsur Pemerintahan Umum.....	II-222
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-222
a. Penanggulangan Kemiskinan	II-222
b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	II-223
c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	II-224
d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	II-225
e. Kedaulatan pangan dan energi.....	II-225
f. Kesenjangan wilayah	II-226
g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	II-226
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Dinamika Perekonomian Global	III-1
3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-2
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	III-5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7

3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-17
3.2.4	Sumber Pendanaan Lainnya	III-19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-6
4.3	Inovasi Daerah	IV-35
1.	Inovasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah	IV-35
2.	Inovasi Masyarakat	IV-38
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1	Kebijakan Umum	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	V-1
5.1.2	Kebijakan Penataan Ruang	V-3
5.1.2.1	Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	V-3
5.1.2.2	Kebijakan Pengeloaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	V-4
5.1.2.3	Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis.....	V-5
5.2	Arah Pengembangan Perwilayahan.....	V-6
5.2.1	Integrasi Antar Wilayah Pengembangan	V-13
5.2.1.1	Integrasi WP dalam <i>Quick Win</i> Kawasan Industri (KI) Kendal	V-13
5.2.1.2	Integrasi WP dalam <i>Quick Win</i> Kawasan Wisata Brobudur	V-23
5.2.1.3	Integrasi WP dalam <i>Quick Win</i> Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.....	V-30
5.2.2	Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi	V-40
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
6.1	Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023.....	VI-1
6.2	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-3
A.	Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	VI-3
1.	Pendidikan	VI-4
2.	Kesehatan	VI-5
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VI-7
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	VI-10
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	VI-11
6.	Sosial	VI-12
B.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	VI-13
1.	Tenaga Kerja	VI-13
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VI-15
3.	Pangan	VI-16
4.	Pertanahan	VI-16

5. Lingkungan Hidup	VI-17
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	VI-19
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	VI-20
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	VI-20
9. Perhubungan	VI-21
10. Komunikasi dan Informatika	VI-23
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	VI-24
12. Penanaman Modal	VI-25
13. Kepemudaan dan Olahraga	VI-26
14. Statistik	VI-27
15. Persandian	VI-27
16. Kebudayaan	VI-27
17. Perpustakaan	VI-28
18. Kearsipan	VI-28
C. Urusan Pilihan	VI-29
1. Perikanan dan Kelautan	VI-29
2. Pariwisata	VI-30
3. Pertanian	VI-31
4. Kehutanan	VI-33
5. Energi dan Sumber Daya Mineral	VI-35
6. Perdagangan	VI-36
7. Perindustrian	VI-38
8. Transmigrasi	VI-39
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	VI-39
1. Sekretariat Daerah	VI-39
2. Sekretariat DPRD	VI-42
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	VI-43
1. Perencanaan	VI-43
2. Keuangan	VI-43
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	VI-44
4. Pendidikan dan Pelatihan	VI-45
5. Penelitian dan Pengembangan	VI-45
6. Pengelolaan Penghubung	VI-45
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	VI-46
G. Unsur Pemerintahan Umum	VI-46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama.....	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VII-3
7.3 Indikator Kinerja Daerah.....	VII-20
7.4 Indikator Kinerja Program	VII-41
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah	II-3
Tabel	2.2 Suhu Udara dan Kelembapan Udara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-4
Tabel	2.3 Curah Hujan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-4
Tabel	2.4 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-5
Tabel	2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-6
Tabel	2.6 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Semester I 2022 (%).....	II-9
Tabel	2.7 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (%)	II-10
Tabel	2.8 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah)	II-10
Tabel	2.9 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah)	II-11
Tabel	2.10 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Semester I 2022 (%).....	II-13
Tabel	2.11 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (%)	II-13
Tabel	2.12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah).....	II-14
Tabel	2.13 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 – Semester I 2022 (%	II-15
Tabel	2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (%).....	II-15
Tabel	2.15 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021 di Provinsi Dalam Wilayah Setara.....	II-17
Tabel	2.16 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (Rupiah).....	II-17

Tabel 2.17	PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2021 (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019 – 2021 di Provinsi Wilayah Setara	II-18
Tabel 2.18	Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2020 – 2021 (September) di Provinsi Wilayah Setara	II-21
Tabel 2.19	Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi JawaTengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2021	II-23
Tabel 2.20	Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-23
Tabel 2.21	Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)	II-24
Tabel 2.22	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)	II-25
Tabel 2.23	Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)	II-26
Tabel 2.24	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-26
Tabel 2.25	Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021	II-27
Tabel 2.26	Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-28
Tabel 2.27	Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021	II-28
Tabel 2.28	Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-29
Tabel 2.29	Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-30
Tabel 2.30	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-31
Tabel 2.31	Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2021 (September)	II-34
Tabel 2.32	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2020 – 2021	II-40
Tabel 2.33	Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2020 – 2021 Di Wilayah Setara	II-40
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2020-2021	II-42
Tabel 2.35	Tingkat Partisipasi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-46

Tabel	2.36	Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-47
Tabel	2.37	Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-49
Tabel	2.38	Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-53
Tabel	2.39	Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-56
Tabel	2.40	Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2021.....	II-57
Tabel	2.41	Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-58
Tabel	2.42	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2020 (%).....	II-59
Tabel	2.43	Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-59
Tabel	2.44	Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2021	II-60
Tabel	2.45	Kondisi Sarpras Panti Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-61
Tabel	2.46	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah	II-63
Tabel	2.47	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-64
Tabel	2.48	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-66
Tabel	2.49	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)	II-67
Tabel	2.50	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 (%)	II-67
Tabel	2.51	Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%).....	II-69
Tabel	2.52	Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-70
Tabel	2.53	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021.....	II-70
Tabel	2.54	Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2017-2021	II-72
Tabel	2.55	TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (%).....	II-73
Tabel	2.56	Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-74
Tabel	2.57	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-75

Tabel	2.58	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-75
Tabel	2.59	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (%).....	II-76
Tabel	2.60	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-76
Tabel	2.61	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-77
Tabel	2.62	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-77
Tabel	2.63	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-78
Tabel	2.64	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 - 2021	II-78
Tabel	2.65	Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-79
Tabel	2.66	Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional	II-179
Tabel	2.67	Koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021	II-80
Tabel	2.68	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Orang).....	II-81
Tabel	2.69	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2017–2021.....	II-85
Tabel	2.70	Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021	II-86
Tabel	2.71	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-87
Tabel	2.72	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-87
Tabel	2.73	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah	II-89
Tabel	2.74	Realisasi Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang Tahun 2016-2021	II-91
Tabel	2.75	Data Luasan Abrasi dan Akresi di Jawa Tengah Tahun 2016-2021	II-91
Tabel	2.76	Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Jawa Tengah	II-92
Tabel	2.77	Poklahasr yang di Fasilitas Kelembagaan Menjadi Koperasi	II-92
Tabel	2.78	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	II-93
Tabel	2.79	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-96
Tabel	2.80	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-97
Tabel	2.81	Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2016-2021	II-99

Tabel 2.82	Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021	II-100
Tabel 2.83	Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021.....	II-101
Tabel 2.84	Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah.....	II-101
Tabel 2.85	Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah	II-103
Tabel 2.86	Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Per 8 April 2022.....	II-104
Tabel 2.87	Update Status RDTR Di Kabupaten/Kota Per 8 April 2022.....	II-108
Tabel 2.88	Rata – Rata Luasan RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah	II-112
Tabel 2.89	Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2021	II-113
Tabel 2.90	Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-114
Tabel 2.91	Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-114
Tabel 2.92	Kondisi Lebar Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-116
Tabel 2.93	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-116
Tabel 2.94	Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-117
Tabel 2.95	Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2021	II-118
Tabel 2.96	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2021	II-120
Tabel 2.97	Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-122
Tabel 2.98	Perbandingan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Jawa Tengah	II-124
Tabel 2.99	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-124
Tabel 2.100	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Sampai Dengan Tahun 2021 Di Provinsi Jawa Tengah.....	II-125
Tabel 2.101	Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021	II-127
Tabel 2.102	Jumlah Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Studi Keandalan	II-127
Tabel 2.103	Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-130

Tabel 2.104	Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-130
Tabel 2.105	Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2021	II-132
Tabel 2.106	Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2021	II-134
Tabel 2.107	Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-135
Tabel 2.108	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-136
Tabel 2.109	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2016-2021	II-136
Tabel 2.110	Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2021	II-137
Tabel 2.111	Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-138
Tabel 2.112	Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-139
Tabel 2.113	Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-140
Tabel 2.114	Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi	II-142
Tabel 2.115	Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2017 – 2021.....	II-143
Tabel 2.116	Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (Online) Tahun 2017 – 2021.....	II-144
Tabel 2.117	Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah	II-145
Tabel 2.118	Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-145
Tabel 2.119	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-147
Tabel 2.120	Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2021	II-150
Tabel 2.121	Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2021	II-150
Tabel 2.122	Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 202	II-151
Tabel 2.123	Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah	II-151
Tabel 2.124	Peningkatan Luas Daerah Bebas Genangan Akibat Banjir (Ha) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-153
Tabel 2.125	Penurunan Luasan Daerah Genangan Akibat Banjir (Ha) di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-153

Tabel 2.126	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah	II-154
Tabel 2.127	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2021.....	II-155
Tabel 2.128	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-155
Tabel 2.129	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-156
Tabel 2.130	Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2021	II-160
Tabel 2.131	Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2021	II-161
Tabel 2.132	Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2021	II-162
Tabel 2.133	Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.134	Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.135	Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah	II-166
Tabel 2.136	Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar di Jawa Tengah Tahun 2021	II-169
Tabel 2.137	Jumlah Data Timbulan Limbah Infeksius Covid-19 Tahun 2021	II-169
Tabel 2.138	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2017 – 2021	II-170
Tabel 2.139	uas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-171
Tabel 2.140	Data Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang Menurun Daya Dukungnya.....	II-172
Tabel 2.141	Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-173
Tabel 2.142	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-173
Tabel 2.143	Jumlah Pengelola Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan di Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021	II-174
Tabel 2.144	Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-174
Tabel 2.145	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-175
Tabel 2.146	Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-175

Tabel 2.147	Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-176
Tabel 2.148	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-177
Tabel 2.149	Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2021.....	II-180
Tabel 2.150	Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2016 – 2021	II-181
Tabel 2.151	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2021	II-181
Tabel 2.152	Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-187
Tabel 2.153	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021	II-188
Tabel 2.154	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2021.....	II-189
Tabel 2.155	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2021.....	II-191
Tabel 2.156	Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-192
Tabel 2.157	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021	II-192
Tabel 2.158	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.159	Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian	II-196
Tabel 2.160	Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng.....	II-197
Tabel 2.161	Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021.....	II-200
Tabel 2.162	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021.....	II-201
Tabel 2.163	Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-201
Tabel 2.164	Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-202
Tabel 2.165	Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-202
Tabel 2.166	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-203
Tabel 2.167	Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023	II-204
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023.....	III-6

Tabel	3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021.....	III-9
Tabel	3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021 (%).....	III-10
Tabel	3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	III-11
Tabel	3.5	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021	III-13
Tabel	3.6	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	III-17
Tabel	3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021.....	III-18
Tabel	3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	III-18
Tabel	3.9	Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	III-19
Tabel	3.10	Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	III-20
Tabel	3.11	Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	III-22
Tabel	3.12	Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022	III-24
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023.....	IV-1
Tabel	4.2	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-20
Tabel	4.3	Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	IV-22
Tabel	5.1	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2021	V-13
Tabel	5.2	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2023	V-15
Tabel	5.3	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2021.....	V-17
Tabel	5.4	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2023.....	V-18
Tabel	5.5	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2021	V-20
Tabel	5.6	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2023	V-21
Tabel	5.7	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2021	V-23
Tabel	5.8	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2023.....	V-25

Tabel	5.9	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2021	V-27
Tabel	5.10	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2023	V-28
Tabel	5.11	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2021	V-31
Tabel	5.12	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2023	V-32
Tabel	5.13	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2021	V-34
Tabel	5.14	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2023	V-36
Tabel	5.15	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2021	V-38
Tabel	5.16	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2023	V-39
Tabel	6.1	Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VI-3
Tabel	6.2	Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VI-48
Tabel	6.3	Implementasi Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2023	VI-59
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VII-2
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VII-3
Tabel	7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VII-20
Tabel	7.4	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	VII-41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023	I-4
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen	I-11
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c) Tahun 2015 – Semester I 2022 (%).....	II-8
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2020	II-5
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Bulan Juli 2022 (%).....	II-19
Gambar 2.4	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (September).....	II-20
Gambar 2.5	Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021	II-21
Gambar 2.6	Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (%).....	II-31
Gambar 2.7	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2021	II-32
Gambar 2.8	Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%).....	II-33
Gambar 2.9	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-34
Gambar 2.10	Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021	II-36
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-37
Gambar 2.12	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-37
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II-38
Gambar 2.14	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-39
Gambar 2.15	Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2021 dengan Wilayah Setara	II-41

Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-42
Gambar 2.17	Perkembangan Indikator UHH Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-43
Gambar 2.18	Perkembangan Indikator HLS Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-44
Gambar 2.19	Perkembangan Indikator RLS Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-45
Gambar 2.20	Perkembangan Indikator Pengeluaran Per Kapita Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-46
Gambar 2.21	APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.22	APM SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.23	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)	II-50
Gambar 2.24	AKI per 100.000 KH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-50
Gambar 2.25	AKB per 1.000 KH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-51
Gambar 2.26	AKABA per 1.000 KH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-54
Gambar 2.27	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-54
Gambar 2.28	Angka Prevalensi <i>Stunting</i> Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2021	II-54
Gambar 2.29	Angka Prevalensi <i>Stunting</i> Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021	II-54
Gambar 2.30	IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2021	II-65
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – Februari 2022 (%)	II-73
Gambar 2.32	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-82
Gambar 2.33	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-82
Gambar 2.34	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Ton)	II-83
Gambar 2.35	Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Ton)	II-83

Gambar 2.36	Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Ton)	II-84
Gambar 2.37	Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Ton)	II-84
Gambar 2.38	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	II-85
Gambar 2.39	Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-88
Gambar 2.40	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-88
Gambar 2.41	Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah	II-94
Gambar 2.42	Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021 (GWh).....	II-96
Gambar 2.43	Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2021	II-97
Gambar 2.44	Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah	II-99
Gambar 2.45	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah	II-102
Gambar 2.46	Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan	II-103
Gambar 2.47	Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-121
Gambar 2.48	Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah	II-130
Gambar 2.49	Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR)	II-137
Gambar 2.50	Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah.....	II-141
Gambar 2.51	Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah	II-144
Gambar 2.52	Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang	II-146
Gambar 2.53	Apron, Terminal dan <i>Runway</i> Bandara Dewadaru Karimunjawa	II-148
Gambar 2.54	Bandara Tunggal Wulung Kabupaten Cilacap	II-148
Gambar 2.55	Peta Jaringan <i>Loop</i> Rel Kereta Api di Jawa Tengah	II-149
Gambar 2.56	Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (%).....	II-152
Gambar 2.57	Persentase Daerah Bebas Genangan Banjir Pada Daerah Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (%).....	II-154

Gambar 2.58	Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m ³) Tahun 2017 - 2021	II-157
Gambar 2.59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-158
Gambar 2.60	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021	II-159
Gambar 2.61	Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Tahun 2021	II-160
Gambar 2.62	Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020	II-161
Gambar 2.63	Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020	II-162
Gambar 2.64	Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah	II-178
Gambar 2.65	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	II-182
Gambar 2.66	Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit)	II-183
Gambar 2.67	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-184
Gambar 2.68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 - 2021	II-184
Gambar 2.69	Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2019 - 2021	II-185
Gambar 2.70	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE Tahun 2019 – 2021	II-186
Gambar 2.71	Indeks Domain Layanan SPBE Tahun 2019 – 2021	II-186
Gambar 2.72	Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-189
Gambar 2.73	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)	II-190
Gambar 2.74	Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-194
Gambar 2.75	Nilai Aspek IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021	II-199
Gambar 2.76	Jumlah Kasus Konflik Bernuansa SARA di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021	II-200
Gambar 4.1	Pengembangan Biogas di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.....	IV-37
Gambar 4.2	Launching Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Petani	IV-38
Gambar 4.3	Kampung Marketer di Kabupaten Purbalingga	IV-39
Gambar 4.4	Fast Pyrolysis untuk Penanganan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Minyak dari Kabupaten Banjarnegara.....	IV-40
Gambar 4.5	Bioreaktor Kapal Selam.....	IV-41

Gambar 4.6	Drone Pertanian Tipe Penyemprot	IV-42
Gambar 5.1	Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah	V-2
Gambar 5.2	Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Jawa Tengah	V-3
Gambar 5.3	Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Jawa Tengah	V-4
Gambar 5.4	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah	V-6
Gambar 5.5	Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa – Bali	V-7
Gambar 5.6	Kebijakan Pengembangan Sistem Perwilayahan	V-9
Gambar 5.7	Quick Wins Dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Jawa Tengah Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019	V-10
Gambar 5.8	Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah	V-11
Gambar 5.9	Konsep Penguatan Konektivitas Jawa Tengah	V-12
Gambar 5.10	Sebaran Proyek Strategis Nasional Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Di Provinsi Jawa Tengah	V-12
Gambar 5.11	Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur	V-14
Gambar 5.12	Arah Pengembangan Wilayah Banglor	V-18
Gambar 5.13	Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti	V-21
Gambar 5.14	Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung	V-24
Gambar 5.15	Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten	V-28
Gambar 5.16	Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang	V-32
Gambar 5.17	Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb	V-35
Gambar 5.18	Arah Pengembangan Wilayah Petanglong	V-38
Gambar 5.19	Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten	V-28
Gambar 5.20	Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang	V-32

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Penyusunan dokumen RKPD secara tahunan merupakan mandat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; serta

Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 serta mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 adalah mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*); kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan; sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing; serta sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu dengan tetap mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda setiap tahunnya serta dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 sebagai tahun terakhir dalam tahapan tahunan RPJMD diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Arah kebijakan pembangunan tersebut diprioritaskan pada upaya untuk pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE); pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Rencana pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan untuk menuntaskan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta dinamika lingkungan strategis saat ini yang mempengaruhi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, kedaulatan pangan dan energi, kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Penyusunan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan capaian pembangunan tahun 2021, proyeksi pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada sektor pangan dan energi, pengetatan keuangan global yang mengakibatkan kenaikan inflasi global, kondisi *triple challenges* (inflasi tinggi, suku bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat),

serta krisis pangan dan energi. Selain itu, RKPD Tahun 2023 diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), serta dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah dan mensinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Jawa Tengah.

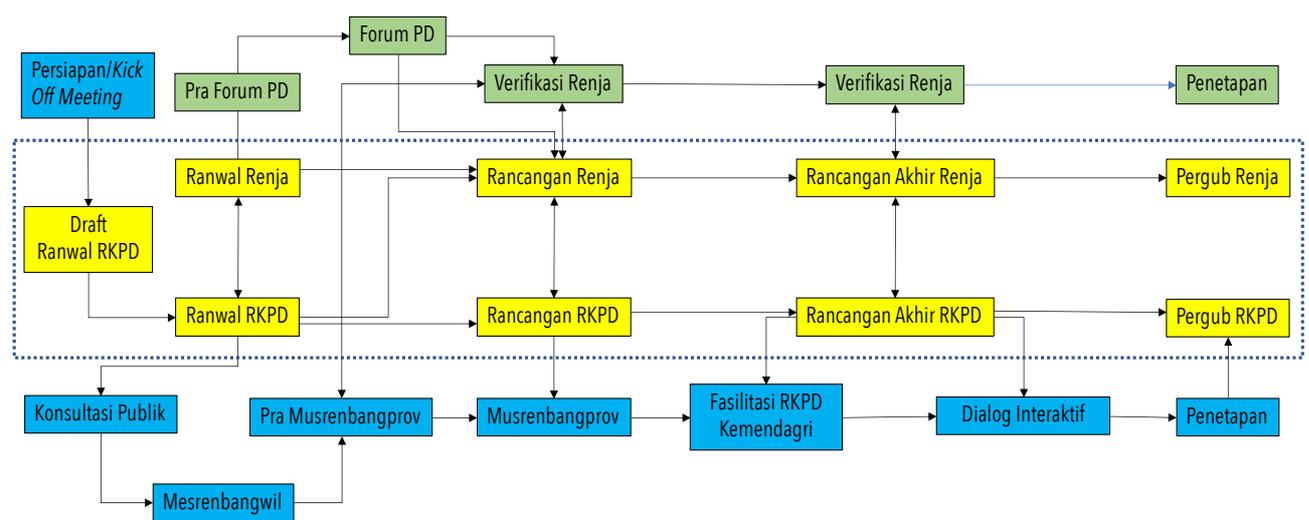
Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih; serta (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follows priority programme* dan *programme follows result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 meliputi: (1) Persiapan yaitu *Kick Off Meeting*, penyampaian Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023; (2) Konsultasi Publik sekaligus Pembukaan Masa Musrenbang; (3) Pra Forum dan Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Wilayah/Rakortekbang; (5) Pra Musrenbang Provinsi/*Desk* Verifikasi Rencana Kerja (Renja); (6) Musrenbang Provinsi; (7) Fasilitasi RKPD Tahun 2023 oleh Kemendagri; (8); Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk Dialog Interaktif Eksekutif dan Legislatif; dan (9) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.1
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

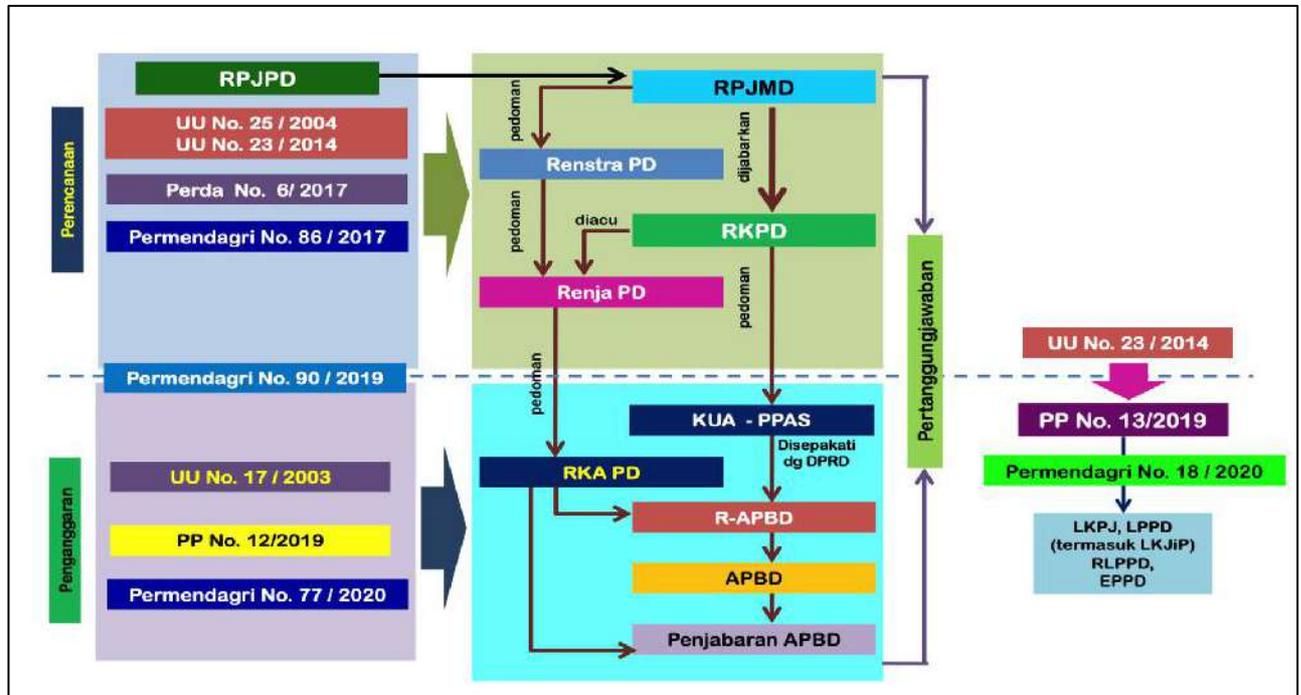
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan

penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun dalam upaya pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungan dengan RKPD Tahun 2022, serta keselarasan dengan dinamika kebijakan nasional terutama kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Salah satu kebijakan nasional yang berdampak terhadap perencanaan dan penganggaran di daerah adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya. Dampak yang paling berpengaruh adalah perubahan arsitektur perencanaan pembangunan daerah dari empat level (tujuan, sasaran, program, kegiatan) menjadi lima level (tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan). Dengan perubahan tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD dan RKPD. Penyesuaian terhadap arsitektur perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah dengan melakukan perubahan *cascading* yang menghasilkan perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai perubahan indikator kinerja dan targetnya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerangka logis dalam proses perencanaan. Oleh karena

itu, arsitektur perencanaan dalam RKPD Tahun 2023 merupakan hasil penyesuaian *cascading* dan merupakan keberlanjutan dari RKPD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022.

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencegahan *Stunting*, Pangan dan Gizi, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Pengurangan Risiko Bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023; dan
3. Menjadi acuan penyelesaran prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I**, Narasi RKPD Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2021 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2021; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dalam RPJMD.
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2023.
- BAB VIII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, terdiri dari:
- 1) Indikator Kinerja Utama Daerah;
 - 2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 3) Urusan wajib berkaitan pelayanan dasar;
 - 4) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - 5) Urusan pilihan;
 - 6) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - 7) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - 8) Unsur pemerintahan umum.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah juga dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Secara administrasi wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan secara ekonomi posisi Provinsi Jawa Tengah sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya).

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

c. Kondisi Geologis

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemanang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmar*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak,

Toseki), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Hidrologi

Selanjutnya dari kondisi hidrologi, Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km²) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km²). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.

Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km ²)
1	Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
		Jratun Seluna	9.576,01
		Bengawan Solo	19.778,00
		Progo Opak Serang	3.238,89
		Serayu Bogowonto	7.344,61
		Citanduy	4.450,44
2	Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
		Bodri Kuto	1.647,40
3	Kabupaten/Kota	Wisio Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Klimatologi

Suhu udara di Jawa Tengah tahun 2021 rata-rata mencapai 28,33°C, dengan suhu minimum sebesar 22,85°C dan maksimum sebesar 33,84°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata mencapai 83 persen, dengan kelembaban minimum sebesar 60 persen, dan maksimum sebesar 96,58 persen.

Sementara itu banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan sebanyak 694 mm³ dan lama hujan adalah 27 hari.

Tabel 2.2.

Suhu Udara dan Kelembapan Udara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Uraian	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Suhu Udara (°C)	22,85	28,33	33,84
Kelembaban Udara (%)	60,00	83,00	96,58

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.3.

Curah Hujan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	273	24	Juli	15	7
Februari	694	27	Agustus	65	8
Maret	122	7	September	199	15
April	131	10	Oktober	119	8
Mei	205	17	November	349	15
Juni	134	10	Desember	173	8

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan proyeksi interim data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Badan Pusat Statistik sebanyak 36.742.501 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 18.472.627 jiwa dan wanita sebanyak 18.269.874 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen atau rata-rata 296 ribu jiwa per tahun jika dibandingkan tahun 2020. Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 1.992.685 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.963.824 jiwa, dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.789.630 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kota Magelang sebanyak 121.610 jiwa, diikuti dengan Kota Salatiga sebanyak 193.525 jiwa, dan Kota Tegal sebanyak 275.781 jiwa. Dan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten/kota diketahui bahwa Kabupaten Cilacap memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 1,29 persen diikuti dengan Kabupaten Banjarnegara sebesar 1,18 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 1,14 persen, dan Kabupaten Wonosobo sebesar 1,12 persen. Sedangkan Kota Magelang dan Kota Surakarta menjadi wilayah yang memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0,09 persen.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
		Laki - laki	Perempuan		
Kabupaten					
1	Cilacap	990.372	973.452	1.963.824	101,74
2	Banyumas	900.919	888.711	1.789.630	101,37
3	Purbalingga	509.854	497.940	1.007.794	102,39
4	Banjarnegara	521.576	505.290	1.026.866	103,22
5	Kebumen	690.026	671.887	1.361.913	102,70
6	Purworejo	387.047	386.541	773.588	100,13
7	Wonosobo	451.881	434.732	886.613	103,94
8	Magelang	657.708	647.804	1.305.512	101,53
9	Boyolali	538.343	531.904	1.070.247	101,21
10	Klaten	630.845	636.427	1.267.272	99,12
11	Sukoharjo	456.063	455.540	911.603	100,11
12	Wonogiri	523.867	525.425	1.049.292	99,70
13	Karanganyar	468.107	470.701	938.808	99,45
14	Sragen	490.067	493.574	983.641	99,29
15	Grobogan	733.374	727.499	1.460.873	100,81
16	Blora	443.309	442.838	886.147	100,11
17	Rembang	325.753	322.013	647.766	101,16
18	Pati	663.744	667.239	1.330.983	99,48
19	Kudus	425.320	427.123	852.443	99,58
20	Jepara	597.802	590.708	1.188.510	101,20
21	Demak	611.951	600.426	1.212.377	101,92
22	Semarang	528.526	531.518	1.059.844	99,40
23	Temanggung	399.500	394.903	794.403	101,16
24	Kendal	517.987	507.033	1.025.020	102,16
25	Batang	407.397	399.608	807.005	101,95
26	Pekalongan	495.409	481.095	976.504	102,98
27	Pemalang	752.565	731.644	1.484.209	102,86
28	Tegal	815.615	792.996	1.608.611	102,85
29	Brebes	1.010.236	982.449	1.992.685	102,83
Kota					
1	Magelang	60.264	61.346	121.610	98,24
2	Surakarta	257.171	265.557	522.728	96,84
3	Salatiga	95.601	97.924	193.525	97,63
4	Semarang	819.785	836.779	1.656.564	97,97
5	Pekalongan	155.701	152.609	308.310	102,03
6	Tegal	139.142	136.639	275.781	101,83
	Jawa Tengah	18.472.627	18.269.874	36.742.501	101,11

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Sementara itu kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.129 jiwa/km². Wilayah terpadat penduduknya adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.872 jiwa/km², diikuti dengan Kota Tegal sebanyak 7.996 jiwa/km², dan Kota Pekalongan sebanyak 6.857 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Blora dengan kepadatan penduduk sebanyak 494 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebanyak 576 jiwa/km², dan Kabupaten Rembang sebanyak 639 jiwa/km². Melihat kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa wilayah kota lebih padat dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Selain itu sebaran penduduk di Jawa Tengah umumnya terkonsentrasi di wilayah kota, perkotaan, dan pusat-pusat kota baik kabupaten ataupun kota. Hal tersebut dilihat juga dari sebaran kawasan permukiman dimana kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran, Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Selanjutnya jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia di tahun 2021 maka diketahui bahwa penduduk Jawa Tengah masih berada pada fase bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,62 juta orang dan non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 8,44 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 32,94 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 32 penduduk usia non produktif.

Tabel 2.5.

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1.374.032	1.309.133	2.683.165
5-9	1.378.930	1.318.015	2.696.945
10-14	1.424.814	1.343.621	2.768.435
15-19	1.447.267	1.359.213	2.806.480
20-24	1.466.458	1.386.707	2.853.165
25-29	1.470.891	1.403.810	2.874.701
30-34	1.458.059	1.408.160	2.866.219
35-39	1.415.339	1.383.813	2.799.152
40-44	1.366.351	1.367.928	2.734.279
45-49	1.270.917	1.292.679	2.563.596
50-54	1.162.885	1.201.287	2.364.172

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55-59	1.008.711	1.052.051	2.060.762
60-64	831.996	865.034	1.697.030
65-69	631.046	663.550	1.294.596
70-74	398.314	437.576	835.890
75+	366.617	477.297	843.914
Jawa Tengah	18.472.627	18.269.874	36.742.501

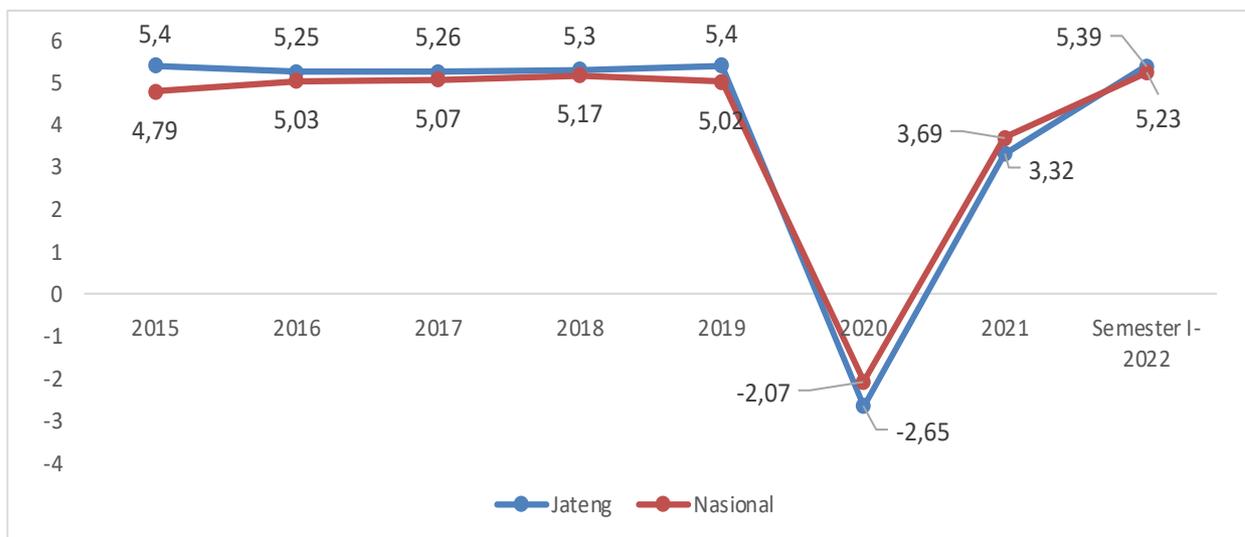
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Kondisi demografi tersebut dapat menggambarkan bahwa sumber daya manusia dapat menjadi modal dasar pembangunan dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk Jawa Tengah yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perluantisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, serta angka kriminalitas.

2.1.3. Kondisi Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen (*c-to-c*) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Kemudian tahun 2022 semester I, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,39 persen (*c-to-c*) diatas capaian nasional sebesar 5,23 persen (*c-to-c*). Jika dilihat secara *year on year (y-o-y)* pada semester I – 2022 capaian ekonomi Jawa Tengah (5,44 persen) masih lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 5,66 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.2.

**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c)
Tahun 2015 – Semester I 2022 (%)**

Pada tahun 2021, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Kontruksi yaitu 7,37 persen, disusul oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95 persen. Hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan yang mencatat pertumbuhan negatif yaitu -0,64 persen. Pertumbuhan yang signifikan juga ditunjukkan pada semester I-2022. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 70,70 persen, Jasa lainnya sebesar 16,48 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,97 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 4,41 persen; 4,81 persen; dan 3,56 persen. Lapangan usaha transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sangat signifikan sejalan dengan semakin menurunnya kasus Covid-19 dan semakin dibukanya pembatasan perjalanan, serta tertanganinya kasus Covid-19 dengan program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah.

Tabel 2.6.**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Semester I 2022 (%)**

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sem I-2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,36	2,48	0,81	4,81
Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80	4,4	-3,66
Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,19	-3,74	2,32	4,41
Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79	5,95	9,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,42	2,29	5,87	1,60
Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76	7,37	-1,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,98	-3,80	5,8	3,56
Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15	3,3	70,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,14	-7,98	5,92	13,97
Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65	6,04	3,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03	1,66	1,60
Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28	2,15	5,28
Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19	3,07	4,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31	-0,64	-2,91
Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24	0,07	2,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19	0,18	3,65
Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01	0,53	16,48
PDRB	5,25	5,26	5,30	5,41	-2,65	3,32	5,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Struktur PDRB Jawa Tengah yang ditunjukkan dari distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2021 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 34,31 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,86 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75 persen. Demikian juga kondisi tersebut pada triwulan II-2022 menunjukkan ketiga lapangan usaha tersebut masih mendominasi PDRB Jawa Tengah. Kontribusi Industri Pengolahan masih terbesar pada PDRB yaitu sebesar 34,14 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,52 persen.

Tabel 2.7.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,13	14,39	14,06	13,53	14,30	13,86	13,52
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,55	2,55	2,48	2,45	2,58	2,38
C	Industri Pengolahan	34,69	34,58	34,41	34,44	34,52	34,31	34,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,29	10,48	10,73	10,81	10,55	11,12	10,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,48	13,58	13,64	13,74	13,49	13,75	13,56
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,11	3,12	3,22	2,21	2,26	4,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,09	3,11	3,20	2,99	3,06	3,44
J	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,34	3,47	3,64	4,26	4,29	4,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,98	2,96	2,89	2,98	3,02	3,06
L	Real Estate	1,67	1,69	1,69	1,68	1,71	1,67	1,64
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,40	0,42	0,40	0,4	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,87	2,82	2,73	2,68	2,70	2,52	2,51
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,41	4,49	4,58	4,74	4,55	4,35
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,86	0,87	0,89	0,90	1,01	0,97	0,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,56	1,59	1,63	1,53	1,48	1,61
PDRB		100						

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, diketahui bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 997.317,10 miliar rupiah meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 965.225,71 miliar rupiah. Dan pada triwulan II-2022 nilai PDRB ADHK mencapai sebesar 261.401,31 miliar rupiah.

Tabel 2.8.
Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116.331,12	118.450,17	121.554,48	123.150,02	126.110,20	127.128,60	32.534,95
B. Pertambangan dan Penggalian	19.367,60	20.356,48	20.855,98	21.557,12	21.385,27	22.326,16	5.091,75
C. Industri Pengolahan	295.960,84	308.770,22	322.143,29	338.470,98	325.617,67	333.156,60	86.783,45

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
D. Pengadaan Listrik dan Gas	928,11	976,55	1.028,92	1.085,27	1.104,73	1.170,51	309,30
E. Pengadaan Air, Pengelo-laan Sampah, Limbah & Daur Ulang	589,81	628,21	658,88	687.508,14	703.223,81	744.504,03	186,56
F. Konstruksi	86.589,00	92.762,02	98.393,74	103.262,32	99.380,71	106.701,15	25.169,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	121.970,81	129.133,51	136.581,24	144.729,67	139.233,05	147.313,38	38.001,96
H. Transportasi dan Pergudangan	28.097,07	29.867,33	32.121,01	34.848,59	23.564,63	24.342,19	11.555,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.633,47	28.350,13	30.660,79	33.442,26	30.773,74	32.595,12	9.562,56
J. Informasi dan Komunikasi	35.742,56	40.485,50	45.500,91	50.789,28	58.739,21	62.288,94	15.865,33
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	23.533,41	24.749,92	25.635,54	26.533,03	27.106,15	27.555,91	6.927,55
L. Real Estate	15.831,48	16.856,96	17.797,50	18.782,40	18.730,35	19.133,49	5.013,77
M,N. Jasa Perusahaan	3.032,33	3.296,65	3.609,30	3.989,82	3.702,92	3.816,62	1.011,93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.720,44	23.304,54	24.137,86	25.033,50	24.687,07	24.528,68	6.473,79
P. Jasa Pendidikan	31.479,47	33.674,58	36.286,32	39.040,75	38.948,07	38.974,99	9.935,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.929,49	7.525,67	8.187,91	8.738,37	9.454,46	9.471,68	2.392,73
R,S,T,U. Jasa lainnya	13.362,35	14.561,84	15.937,47	17.375,66	15.984,26	16.068,57	4.585,71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	849.099,35	893.750,29	941.091,14	991.516,54	965.225,71	997.317,10	261.401,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Apabila berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) diketahui bahwa nilai PDRB tahun 2021 adalah sebesar 1.420.799,91 miliar rupiah meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 1.347.922,69 miliar rupiah. Dan pada triwulan II-2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar 385.116,23 miliar rupiah.

Tabel 2.9.

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164.512,01	168.806,52	178.352,88	184.130,94	192.610,19	196.876,47	52.075,71
B. Pertambangan dan Penggalian	27.479,90	29.938,77	32.321,26	33.727,39	33.082,14	36.660,13	9.164,34
C. Industri Pengolahan	377.237,31	405.586,12	436.424,70	468.374,05	464.609,13	487.445,10	131.455,80

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
D. Pengadaan Listrik dan Gas	988,65	1.128,08	1.225,34	1.294,44	1.309,17	1.377,81	364,67
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	659,34	706,83	743,87	790,46	855,45	915,06	232,65
F. Konstruksi	111.884,55	122.936,71	136.153,70	147.205,58	142.205,67	158.056,34	39.069,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	146.523,16	159.276,19	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	52.234,65
H. Transportasi dan Pergudangan	33.786,51	36.449,00	39.583,09	43.834,35	30.262,62	32.092,97	15.896,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.658,31	36.204,67	39.498,49	43.634,69	40.359,71	43.513,47	13.238,80
J. Informasi dan Komunikasi	33.075,35	39.125,73	43.963,89	49.587,27	57.428,84	60.910,56	15.553,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	31.865,32	34.964,64	37.488,38	39.403,66	40.267,89	42.959,77	11.787,83
L. Real Estate	18.172,33	19.836,97	21.450,33	22.920,25	23.010,53	23.741,78	6.319,58
M,N. Jasa Perusahaan	3.957,05	4.465,11	5.021,62	5.712,08	5.417,73	5.650,01	1.557,92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.233,11	33.086,00	34.653,13	36.431,29	36.457,41	35.853,14	9.663,31
P. Jasa Pendidikan	46.454,03	51.741,34	56.951,69	62.396,85	63.862,38	64.584,46	16.750,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.307,25	10.258,53	11.283,42	12.275,40	13.658,16	13.800,24	3.542,48
R,S,T,U. Jasa lainnya	16.522,48	18.283,30	20.201,31	22.176,97	20.664,88	20.963,55	6.208,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.087.316,68	1.172.794,52	1.268.261,17	1.360.960,13	1.347.922,69	1.420.799,91	385.116,23

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 semua komponen mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 31,29 persen, diikuti Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 29,81 persen, dan Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 29,14 persen. Pada semester I-2022, Ekspor Luar Negeri masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 30,45 persen. Sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat masih terkonstruksi masing-masing sebesar -2,54 persen dan -0,45 persen.

Tabel 2.10.**Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Semester I 2022 (%)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sem I 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,56	4,62	4,69	4,62	-1,42	1,82	5,22
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,61	4,43	7,62	10,90	-2,98	1,25	4,63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,58	3,07	2,98	3,98	-4,30	0,83	-2,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,99	7,50	7,68	4,85	-6,98	6,86	-0,45
Perubahan Inventori	49,25	4,97	4,66	-5,13	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	-3,02	13,54	12,02	4,92	-7,90	29,14	30,45
Impor Luar Negeri	-4,37	9,58	32,61	-9,33	-17,65	31,29	11,61
Net Ekspor Antar Daerah	2,80	0,60	49,00	-11,75	-23,13	29,81	9,29
Total	5,28	5,26	5,31	5,41	-2,65	3,32	5,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Struktur PDRB Jawa Tengah dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 60,14 persen, dan diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,76 persen. Bahkan selama kurun waktu tahun 2016-2021 perekonomian Jawa Tengah menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jawa Tengah sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Demikian juga kondisi pada triwulan II-2022 yang menunjukkan struktur yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi dengan angka sebesar 61,21 persen, diikuti dengan komponen PMTB sebesar 29,01 persen.

Tabel 2.11.**Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (%)**

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	TW II -2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,79	60,67	60,29	60,33	60,96	60,14	61,21
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,12	1,14	1,21	1,20	1,18	1,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,06	8,04	7,78	7,59	7,29	7,18	5,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,72	31,27	32,62	32,99	30,98	31,76	29,01
Perubahan Inventori	0,67	0,91	1,36	0,83	0,95	0,84	1,00

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	TW II -2022
Ekspor Luar Negeri	8,51	9,08	9,77	9,44	8,77	11,18	12,66
Impor Luar Negeri	12,35	13,72	18,53	14,97	11,65	14,41	16,10
Net Ekspor Antar Daerah	2,47	2,62	5,57	2,58	1,49	2,13	4,98
Total	100,00						

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.12.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Triwulan II 2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW II - 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	660.998,58	711.586,51	764.808,38	821.948,11	822.095,50	854.472,69	235.746,89
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12.256,98	13.168,41	14.491,86	16.443,21	16.224,64	16.784,70	4.796,54
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	87.589,15	94.261,56	98.717,17	103.209,51	98.359,80	101.975,11	23.028,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	333.977,42	366.766,47	413.749,15	449.486,05	417.815,40	451.292,70	11.171,29
Perubahan Inventori	7.307,46	10.618,21	17.201,59	11.362,19	12.797,37	11.936,47	3.870,05
Ekspor Luar Negeri	92.562,66	106.463,04	123.867,81	128.554,84	118.335,36	158.820,64	48.768,68
Impor Luar Negeri	134.238,54	160.854,81	234.981,44	203.947,07	157.157,39	204.712,54	61.995,01
Net Ekspor Antar Daerah	26.872,96	30.785,14	70.600,26	35.170,50	20.129,72	30.230,17	19.187,19
Total PDRB	1.087.316,68	1.172.794,52	1.268.454,78	1.362.457,38	1.348.600,40	1.420.799,91	385.116,23

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan dan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021 terjadi di Provinsi DIY yaitu sebesar 5,53 persen (*c-to-c*). Provinsi Banten yang sebelumnya di tahun 2020 mengalami kontraksi terparah yaitu -3,38 persen, pada tahun 2021 telah tumbuh sebesar 4,44 persen (*c-to-c*). Pada semester I tahun 2022 Provinsi Jawa Barat tumbuh paling besar yaitu 5,65 persen (*c-to-c*) dan yang terendah adalah provinsi DIY yaitu sebesar 4,04 persen (*c-to-c*). Jika dilihat dari struktur perekonomian Indonesia, perekonomian Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 56,55 persen. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2016 – semester I-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2016 – Semester I 2022 (%)

No	Provinsi	Tahun						Semester I-2022
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Banten	5,53	5,75	5,98	5,90	-3,38	4,44	5,34
2	Jawa Barat	5,67	5,29	5,64	5,07	-2,44	3,74	5,65
3	DKI Jakarta	5,85	6,20	6,17	5,96	-2,36	3,56	5,11
4	Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65	3,32	5,39
5	DIY	5,05	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53	4,04
6	Jawa Timur	5,55	5,72	5,65	5,54	-2,39	3,57	5,49
	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,23

Sumber: BPS, 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 juga telah mengalami perbaikan. Hampir semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Hanya Kabupaten Kudus yang masih berkontraksi sebesar -1,98 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Semarang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,16 persen, diikuti oleh Kabupaten Batang sebesar 4,88 persen, dan Kabupaten Boyolali serta Kabupaten Jepara dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,63 persen. Kabupaten Cilacap yang sebelumnya di tahun 2020 mengalami kontraksi terdalam sebesar -10,36 persen, di tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,15 persen.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (%)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Cilacap	5,06	2,58	3,05	2,33	-10,36	2,15
2	Kab. Banyumas	6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65	4,00
3	Kab. Purbalingga	4,78	5,37	5,42	5,65	-1,23	3,19
4	Kab. Banjarnegara	5,41	5,65	5,67	5,60	-1,32	3,26
5	Kab. Kebumen	4,97	5,15	5,52	5,58	-1,46	3,71
6	Kab. Purworejo	5,12	5,27	5,38	5,45	-1,66	3,38
7	Kab. Wonosobo	5,13	4,14	5,06	5,61	-1,66	3,68
8	Kab. Magelang	5,37	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48
9	Kab. Boyolali	5,30	5,80	5,72	5,96	-1,24	4,63
10	Kab. Klaten	5,14	5,34	5,47	5,57	-1,18	3,82
11	Kab. Sukoharjo	5,71	5,76	5,79	5,92	-1,70	3,82
12	Kab. Wonogiri	5,23	5,32	5,41	5,14	-1,41	3,35
13	Kab. Karanganyar	5,37	5,77	5,98	5,93	-1,87	3,57
14	Kab. Sragen	5,74	5,97	5,75	5,90	-1,81	3,75
15	Kab. Grobogan	4,46	5,85	5,83	5,37	-1,59	3,78
16	Kab. Blora	23,53	5,98	4,41	4,05	-4,66	3,68

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Kab. Rembang	5,23	6,98	5,89	5,20	-1,49	3,85
18	Kab. Pati	5,46	5,67	5,72	5,86	-1,15	3,38
19	Kab. Kudus	2,52	3,21	3,24	3,10	-3,53	-1,98
20	Kab. Jepara	5,02	5,39	5,85	6,02	-1,94	4,63
21	Kab. Demak	5,05	5,82	5,40	5,36	-0,23	2,62
22	Kab. Semarang	5,27	5,65	5,79	5,59	-2,67	3,63
23	Kab. Temanggung	4,98	5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34
24	Kab. Kendal	5,53	5,78	5,77	5,69	-1,53	3,89
25	Kab. Batang	4,98	5,55	5,72	5,39	-1,29	4,88
26	Kab. Pekalongan	5,16	5,44	5,76	5,35	-1,89	3,54
27	Kab. Pemasang	5,38	5,61	5,70	5,80	-0,66	4,19
28	Kab. Tegal	5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46	3,72
29	Kab. Brebes	5,08	5,65	5,22	5,86	-0,59	2,33
30	Kota Magelang	5,17	5,42	5,46	5,44	-2,45	3,20
31	Kota Surakarta	5,32	5,70	5,75	5,78	-1,74	4,01
32	Kota Salatiga	5,22	5,58	5,84	5,88	-1,68	3,33
33	Kota Semarang	5,84	6,70	6,52	6,86	-1,61	5,16
34	Kota Pekalongan	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
35	Kota Tegal	5,44	5,95	5,87	5,77	-2,25	3,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi wilayah yang setara di Indonesia tahun 2021, hampir semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif kecuali Provinsi Bali yang mengalami kontraksi sebesar -2,47 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah provinsi yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 sebesar 3,2 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi setara. Dan dari sisi perubahan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 – 2021, Jawa Tengah berada pada kelompok wilayah provinsi dengan rentang nilai perubahan -8,07 sampai -0,82 poin yang terdiri dari 11 provinsi. Dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan perubahan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 – 2021, maka diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah berada dalam satu kelompok dengan rentang nilai yang sama dengan 8 provinsi lain yaitu Bali, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Tabel 2.15.

**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 dan Perubahan Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2019-2021 di Provinsi Dalam Wilayah Setara**

Wilayah Setara Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021		Wilayah Setara Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021	
Provinsi	PE (%)	Perubahan (Poin)	Provinsi
Bali	-2,47	(8,07)	Bali
Kepulauan Riau	3,43	(1,06)	DI Yogyakarta
Banten	4,44	(0,82)	Banten
Kalimantan Timur	2,48	(1,40)	Kepulauan Riau
DI Yogyakarta	5,53	(2,26)	DKI Jakarta
Jawa Tengah	3,32	(3,00)	Sulawesi Barat
Jawa Barat	3,74	(2,04)	Jawa Tengah
Sulawesi Barat	2,56	(2,91)	Kalimantan Utara
Jawa Timur	3,57	(1,96)	Jawa Timur
DKI Jakarta	3,56	(2,26)	Sulawesi Selatan
Kep. Bangka Belitung	5,05	(2,22)	Kalimantan Timur
Rata-Rata	3,2	(2,55)	Rata-Rata

Sumber: BPS, 2022 (hasil analisis)

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 38,59 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 38,59 juta rupiah per kapita per tahun. Sementara itu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 38,67 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2021 sebesar 27,14 juta rupiah.

Tabel 2.16.

PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2016	31.961.950	24.959.490
2017	34.234.310	26.088.910
2018	36.770.960	27.287.370
2019	39.217.680	28.575.950
2020	38.597.520	27.636.718
2021	38.669.110	27.143.420

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Apabila dibandingkan dengan wilayah setara di Indonesia dari sisi PDRB ADHK per kapita tahun 2021, diketahui bahwa PDRB ADHK per kapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang sebesar 27,14 juta rupiah lebih tinggi dari rata-rata PDRB ADHK per kapita wilayah setara yang sebesar 22,84 juta rupiah. Sedangkan dari sisi pertumbuhan PDRB ADHK per kapita tahun 2019-2021, diketahui bahwa perubahan PDRB ADHK per kapita Jawa Tengah lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan wilayah setara, dimana perubahan Jawa Tengah sebesar -1,43 persen, dan rata-rata pertumbuhan wilayah setara sebesar -0,088 persen. Dengan melihat dua variabel pembanding yaitu PDRB ADHK per kapita tahun 2021 dan pertumbuhannya dari tahun 2019-2021, maka 3 provinsi berada pada kelompok yang setara Provinsi Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat.

Tabel 2.17.

PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2021 (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019 – 2021 di Provinsi Wilayah Setara

Wilayah Setara Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2021		Wilayah Setara Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019-2021	
Provinsi	PDRB ADHK Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Provinsi
Nusa Tenggara Timur	13,09	0,50	Jawa Barat
Maluku	17,02	1,89	DI Yogyakarta
Nusa Tenggara Barat	17,71	1,24	Kalimantan Selatan
Maluku Utara	25,10	(1,28)	Sulawesi Barat
Sulawesi Barat	22,88	(1,43)	Jawa Tengah
Bengkulu	23,53	1,27	Sulawesi Tenggara
Gorontalo	24,65	(1,39)	Kalimantan Barat
Aceh	25,36	(0,07)	Sumatera Barat
DI Yogyakarta	28,90	1,11	Jambi
Kalimantan Barat	25,81	(0,18)	Sumatera Utara
Jawa Tengah	27,14	(1,69)	Lampung
Rata-Rata	22,84	(0,90)	Sulawesi Utara
		(0,088)	Rata-Rata

Sumber: BPS, 2022 (hasil analisis)

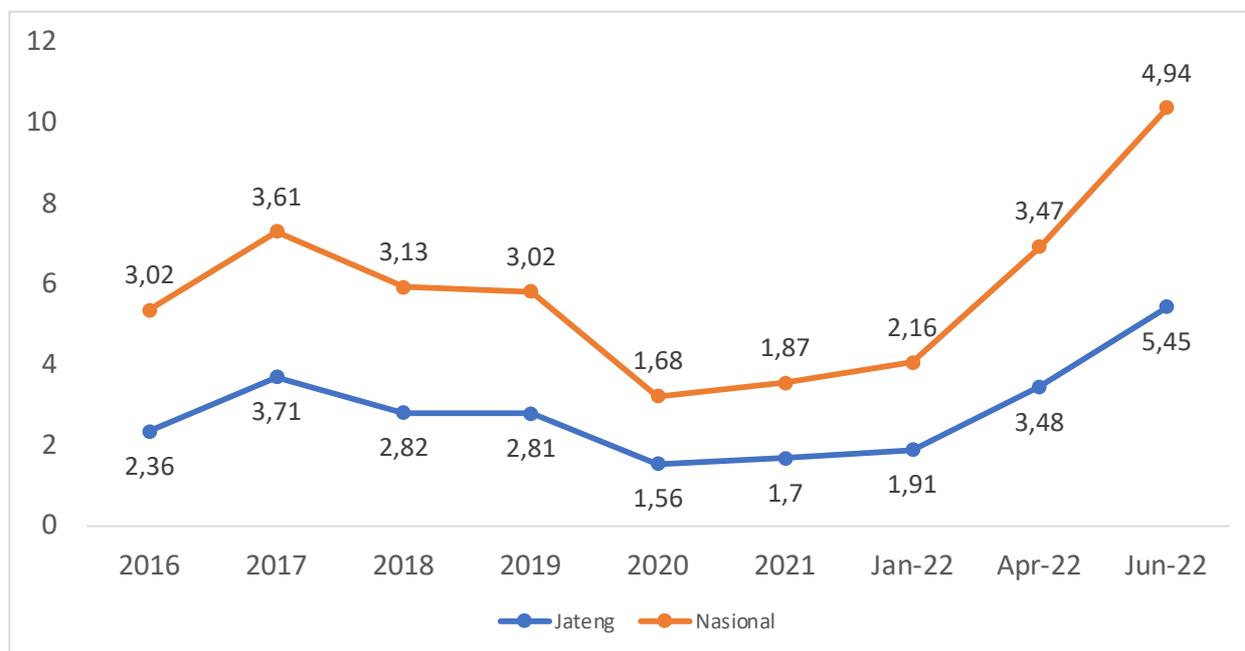
c. Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember tahun 2021 terhadap Desember 2020)

sebesar 1,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,08 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,06 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Laju inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi suplay yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara. Di samping itu adanya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Laju inflasi Indonesia bulan Juni 2022 sebesar 4,94 persen (*y-o-y*) sedangkan Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 5,45 persen (*y-o-y*).

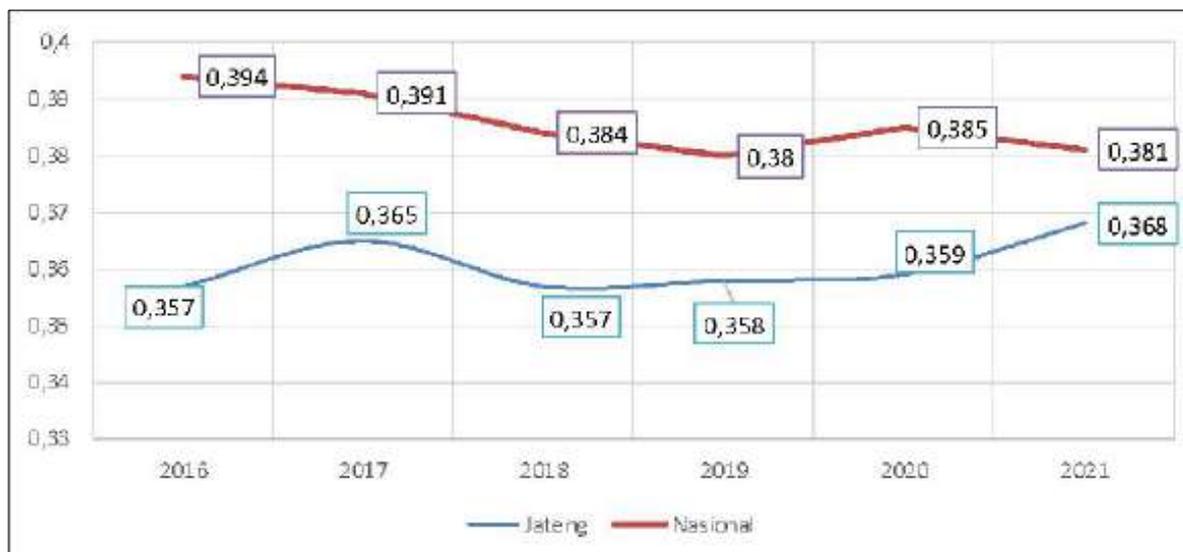


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.3.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – Bulan Juli 2022 (%)

d. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0 -1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 (September) perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif dari 0,357 di tahun 2016 menjadi 0,368 di tahun 2021.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.4.

Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (September)

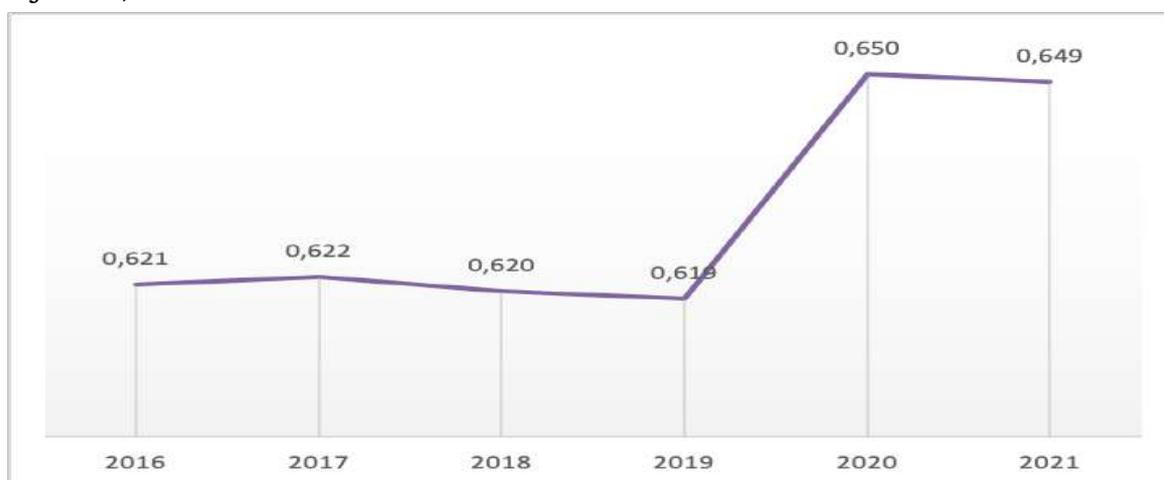
Jika melihat Indeks Gini tahun 2021 periode September pada seluruh Provinsi di Indonesia, dapat diketahui bahwa Jawa Tengah setara dengan 10 provinsi lainnya yang berada pada rentang yang sama dengan Jawa Tengah, yaitu Indeks Gini dengan rentang diatas 0,366. Capaian Indeks Gini Jawa Tengah masih lebih baik dibanding rata-rata capaian wilayah yang setara, dengan capaian 0,368, sedangkan rata-ratanya 0,393. Apabila dilihat dari perubahan Indeks Gini tahun 2020 – 2021 periode September, Jawa Tengah setara dengan 10 provinsi lainnya yang berada pada rentang yang sama, yaitu dengan perubahan Indeks Gini pada rentang di atas 0,002. Jika dilihat dari Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini di wilayah yang setara, terdapat 4 provinsi yang berada pada rentang yang sama dengan Jawa Tengah yaitu Bali, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Tabel 2.18.
Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2020-2021 (September)
Di Provinsi Wilayah Setara

Provinsi	Indeks Gini 2021 (September)	Perubahan Indeks Gini Tahun 2020 – 2021 (September)	Provinsi
Jawa Tengah	0,368	0,003	Gorontalo
Papua Barat	0,374	0,004	Aceh
Bali	0,375	0,005	Kep. Riau
Sulawesi Selatan	0,377	0,005	Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat	0,384	0,006	Riau
Sulawesi Tenggara	0,394	0,006	Bali
Papua	0,396	0,006	Sulawesi Tenggara
Jawa Barat	0,406	0,008	Jawa Barat
Gorontalo	0,409	0,009	Jawa Tengah
DKI Jakarta	0,411	0,010	Sulawesi Barat
DI Yogyakarta	0,436	0,011	DKI Jakarta
Rata – rata	0,393	0,007	Rata – rata

Sumber: BPS, 2022 (hasil analisis)

Dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah menurun yaitu dari 0,621 menjadi 0,619. Namun terjadinya pandemi Covid-19 di akhir Maret 2020 berdampak pada peningkatan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,650 atau meningkat 0,031 poin dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2021 menjadi 0,649.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.5.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021

e. Nilai Investasi

Pada tahun 2021, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Tengah cukup baik dan stabil, salah satunya didukung dengan kinerja penanaman modal di Jawa Tengah. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) tahun 2021 sebesar 52,71 triliun rupiah yang merupakan rekapitulasi realisasi investasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan rincian realisasi PMA sebesar 21,4 triliun rupiah dan realisasi PMDN sebesar 31,31 triliun rupiah. Beberapa sektor usaha PMA yang cukup dominan di bidang investasi di Jawa Tengah adalah listrik, gas dan air, industri barang dari kulit dan alas kaki dan industri tekstil. Sedangkan sektor usaha PMDN yang dominan adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri mineral non logam, perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Tingkat capaian realisasi investasi sebesar 98,5 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang sebesar 53,3 triliun rupiah. Hal demikian disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 dan kondisi perekonomian global yang cenderung kurang menguntungkan di bidang investasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghitung angka realisasi investasi UMK yang tidak dilaporkan melalui LKPM. Rencana realisasi investasi sektor UMK sebesar 7,08 triliun rupiah yang didominasi dari sektor perdagangan dan reparasi, industri lainnya, hotel dan restoran, serta industri makanan. Sehingga total realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 59,79 triliun rupiah.

Pada tahun 2021, jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 21.325 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 18.184 proyek dan PMA 3.141 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 216.473 orang. Investasi PMDN, termasuk sektor UKM menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga didukung dengan program prioritas pemerintah dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi yang berkualitas seperti pengembangan Kawasan Industri, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

Tabel 2.19.
Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN/PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Proyek				Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN	Jumlah	Pertumbuhan (%)	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
						LKPM	Non-LKPM		
2016	1.060	1.008	2.068	39,64	14,113	24,070	-	38,183	46,63
2017	955	1.403	2.358	14,02	31,673	19,866	-	51,539	34,98
2018	1.380	2.273	3.653	54,91	31,794	27,474	-	59,269	15,00
2019	1.983	3,799	5.782	58,28	40,859	18,655	-	59,503	0,39
2020	2.889	8.823	11.712	102,6	19,63	30,61	5,83	56,07	-5,8
2021	3.141	18.184	21.325	82,07	21,40	31,31	7,08	59,79	6,56

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

f. Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 juta rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.087.316.682,68	1.172.794.523,68	1.268.261.165,59	1.361.567.356,73	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38
2	Nilai Sektor Perdagangan (Juta Rp)	146.523.161,98	159.276.192,25	172.944.065,63	187.064.449,89	181.860.778,05	195.399.044,07
3	Kontribusi (%)	13,48	13,58	13,64	13,74	13,48	13,75

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Nilai ekspor non migas pada tahun 2016 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 yang merupakan dampak terjadinya pandemi

Covid-19. Nilai ekspor non migas pada tahun 2021 tercatat sebesar US\$10.257,35 juta atau lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 152,21 persen, dimana target tercatat tahun 2021 sebesar US\$ 6.739 Juta.

Sedangkan ekspor migas Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 juga selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 ekspor migas Jawa Tengah tercatat di angka US\$ 438,96 juta, sementara di tahun 2020 realisasi tercatat mencapai US\$ 384,06 juta, sehingga total ekspor Jawa Tengah US\$10.696,31 juta.

Penurunan terbesar nilai ekspor non migas pada Desember 2021 terhadap November 2021 pada sepuluh komoditas terutama terjadi pada komoditas kayu dan barang dari kayu yang turun sebesar US\$ 16,73 juta (13,25 persen). Komoditas ini memberikan peran terhadap total ekspor non migas sebesar 11,40 persen pada periode Januari – Desember 2021. Komoditas lain yang juga mengalami penurunan adalah serat stapel buatan yang turun sebesar US\$ 12,48 juta (25,97 persen); lemak dan minyak hewani/nabati turun sebesar US\$ 12,16 juta (41,15 persen); alas kaki turun US\$ 6,14 juta (5,70 persen); perabotan, lampu dan alat penerangan turun US\$ 5,98 juta (6,39 persen); barang dari kulit samak turun sebesar US\$ 4,96 juta (8,81 persen); serta pakaian dan aksesorinya (rajutan) turun US\$ 2,97 juta (2,22 persen). Sedangkan pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) naik US\$ 34,81 juta (18,00 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya naik sebesar US\$3,44 juta (10,24 persen); dan barang dari bulu unggas, bunga artifisial, dan wig naik US\$ 0,61 juta (2,65 persen). Untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.21.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor	5.389.14	5.991.37	8.260,18	8.516,70	8.088,30	10.696,31
- Migas	113.47	223.93	168,55	303,86	384,06	438,96
- Non Migas	5.275.67	5.767.44	8.091,62	8.212,84	7.704,24	10.257,35

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Nilai impor Jawa Tengah untuk migas sejak tahun 2016 berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 tercatat impor migas sebesar US\$ 3.653,80 juta, dan di tahun 2021 sebesar US\$ 4.440,52 juta. Nilai impor non migas Jawa Tengah tahun 2021 sebesar US\$ 7.341,27 juta, naik 11,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar US\$ 6.565,04 juta.

Nilai impor Desember 2021 naik sebesar US\$ 532,79 juta (69,11 persen) jika dibandingkan dengan Desember 2020. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan impor migas sebesar US\$ 438,11 juta (208,47 persen) dan

non migas meningkat sebesar US\$ 94,68 juta (16,88 persen). Meningkatnya impor komponen migas disebabkan oleh peningkatan impor hasil minyak sebesar US\$ 82,91 juta (229,71 persen), dan impor minyak mentah sebesar US\$ 355,20 juta (204,07 persen). Nilai impor non migas Jawa Tengah Desember 2021 mencapai US\$ 655,47 juta, turun US\$ 60,69 juta (8,47 persen) dibanding November 2021. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan sepuluh golongan komoditas utama diketahui bahwa penurunan terbesar dialami golongan biji dan buah mengandung minyak yang turun sebesar US\$ 26,95 juta (69,84 persen); kain rajutan turun sebesar US\$ 11,12 juta (29,75 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun sebesar US\$ 8,22 juta (13,49 persen); kapas turun sebesar US\$ 5,31 juta (10,58 persen); filament buatan turun sebesar US\$ 4,36 juta (16,37 persen); sereal turun sebesar US\$ 2,81 juta (18,75 persen); serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun sebesar US\$ 1,03 juta (1,14 persen). Sedangkan serat stapel buatan naik sebesar US\$ 4,62 juta (18,35) persen; plastik dan barang dari plastik naik US\$ 2,21 juta (3,83 persen); dan komoditas kendaraan dan bagiannya turun sebesar US\$ 1,46 juta (8,25 persen). Perkembangan impor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22.

**Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)**

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impor	8.811.04	10.658.25	14.779,38	12.567,62	8.719,80	11.781,79
- Migas	3.653.80	4.187.66	5.635.27	3.906,03	2.154,76	4.440,52
- Non Migas	5.157.24	6.470.59	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Total neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2021 rata-rata mencatatkan nilai defisit sebesar US\$ 3.395,98 juta, yang disumbang oleh neraca perdagangan migas dengan rata-rata defisit sebesar US\$ 3.724,2 juta. Sedangkan neraca perdagangan non migas tercatat surplus dengan rata-rata surplus sebesar US\$ 328,22 juta. Data realisasi sampai dengan bulan Desember 2021 menyebutkan ekspor non migas Jawa Tengah tercatat sebesar US\$ 10.257,35 juta atau tumbuh 33,14 persen (*c-to-c*), dengan tujuan ekspor ke sejumlah kawasan tradisional dan nontradisional. Secara kumulatif ekspor non migas selama Bulan Januari – Desember 2021 tercatat surplus sebesar US\$ 2.916,08 juta. Total neraca perdagangan (non migas dan migas) di tahun 2021 tercatat defisit sebesar US\$ 1.085,48 juta.

Tabel 2.23.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (Juta US\$)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor	5.389.14	5.991.37	8,260.18	8.516,70	8.088,30	10.696,31
- Migas	113.47	223.93	168.55	303,86	384,06	438,96
- Non Migas	5.275.67	5.767.44	8,091.62	8.212,84	7.704,24	10.257,35
Impor	8,811.05	10.658.25	14,779.38	12.567,62	8.719,80	11.781,79
- Migas	3.653.80	4.187.66	5.635,27	3.906,03	2.154,76	4.440,52
- Non Migas	5.157.24	6.470.59	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,27
Surplus/Defisit	(3.421,91)	(4.666.88)	(6.519,20)	(4.050,92)	(631,5)	(1.085,48)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 1.416 sertifikat, namun pada tahun 2017 dan 2018 menurun menjadi sebesar 256 dan 260 sertifikat untuk 5 jenis barang, dan ditahun 2021 menjadi 1.925 sertifikat untuk 6 jenis barang. Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri dan penerbitan sertifikat mutu barang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang
Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	1.100	1.517	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	1.416	256 sertifikat. 5 jenis barang	260 sertifikat. 5 jenis barang	2.437 sertifikat, 5 jenis barang	1.767 sertifikat, 7 jenis barang	1.925 sertifikat, 6 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sampai dengan tahun 2021 hanya tertinggal sebanyak 1 (satu) unit. Selain BPSK, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga penting. Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.25.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 - 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	18	14	14	8	4	1
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	28	58 di 35 Kab/Kota	28 di 29 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsu-men melalui BPSK kabupaten/kota (%)	62 kasus (100%)	2 Kasus (100%)	68 Kasus (100%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	1.281	2.195	1.124	3.512	2.741	1.228

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

g. Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.

**Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.087.316.682,68	1.172.794.523,68	1.268.454.783,96	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	377.237.312,37	405.586.118,97	436.477.149,74	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28
3	Kontribusi (%)	34,69	34,58	34,41	34,41	34,47	34,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 972 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.417 unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 449.090 unit usaha.

Tabel 2.27.

Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Jenis Industri	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besar	972	1.162	1.228	1.584	1.591	2.417
2	Kecil dan Menengah	449.090	472.039	325.091	327.110	327.200	912.421

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan

klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.28.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Jenis industri	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	6	6
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	6	7	7	7	7	7
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	7	6	6	6	6	6
	Jumlah klaster industri	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

h. Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2.29.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2016	2.397	326	318	13,26
2	2017	2.211	155	153	6,91
3	2018	2.246	170	169	7,52
4	2019	2.160	257	221	10,23
5	2020	1.263	0	0	0
6	2021	1.263	10	10	0,79
Jumlah		11.540	918	871	7,55

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.4. Kondisi Kemiskinan

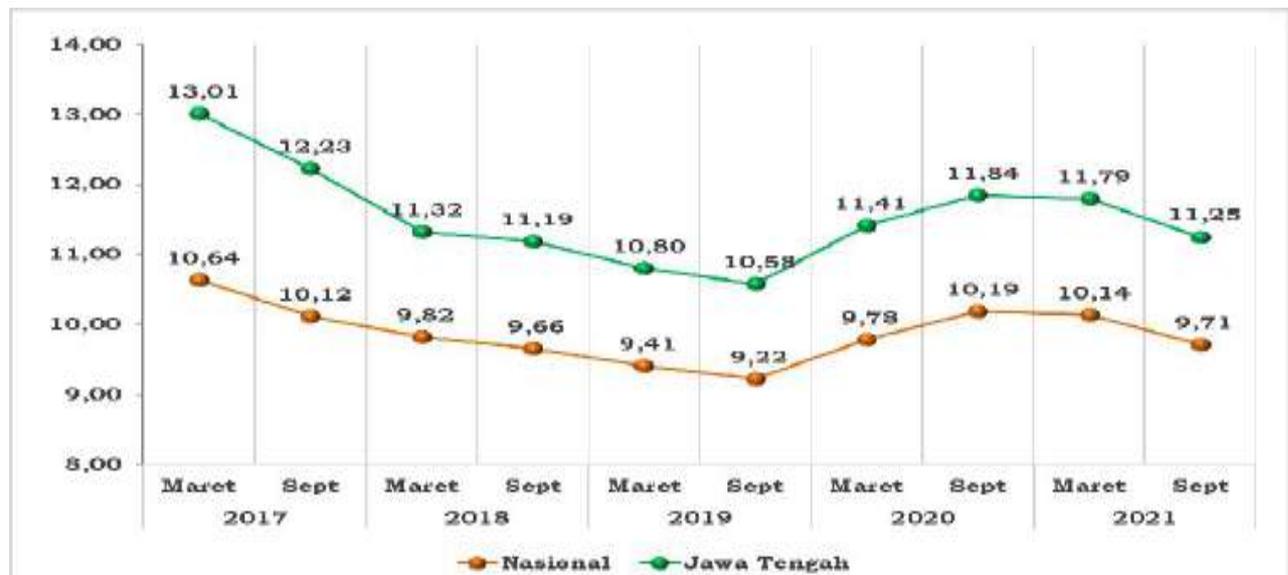
Pada bulan September 2021 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,79 persen pada bulan Maret 2021 menjadi 11,25 persen pada bulan September 2021. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Selama periode Maret – September 2021 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 10,16 persen yang sebelumnya sebesar 10,58 persen, atau berkurang sebanyak 61,24 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,07 persen pada Maret 2021 menjadi 12,44 persen pada September 2021 atau berkurang sebanyak 114,51 ribu orang.

Tabel 2.30.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		Jumlah (ribu orang)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
	September	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017-2021

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

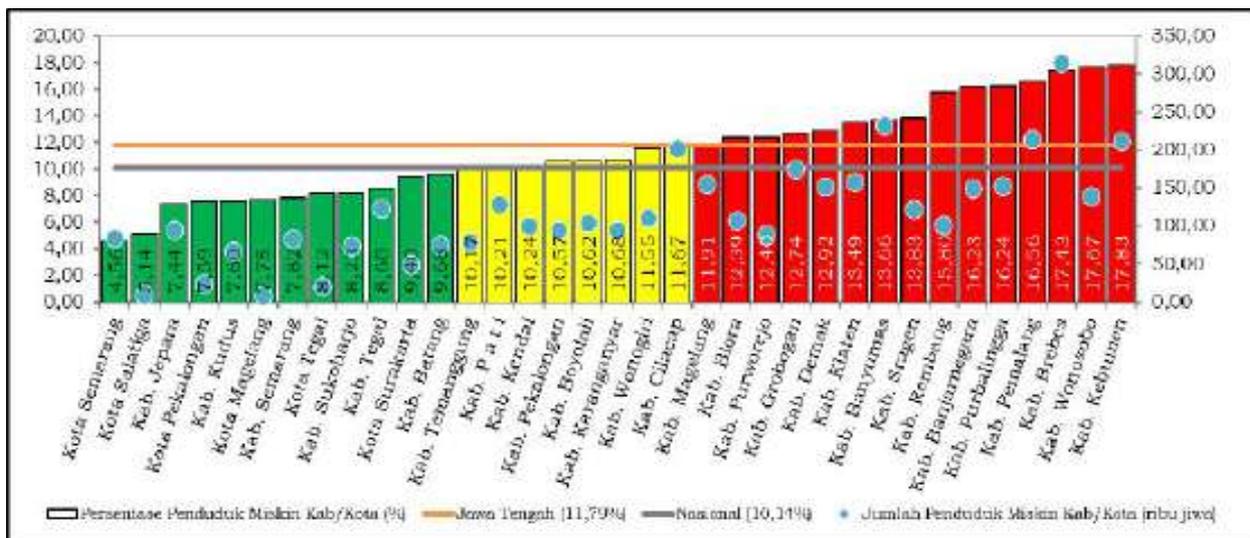


Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.6.
Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (%)

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2021 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 8 kabupaten meliputi Kabupaten Temanggung, Pati, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, dan Cilacap;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Betung, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen.

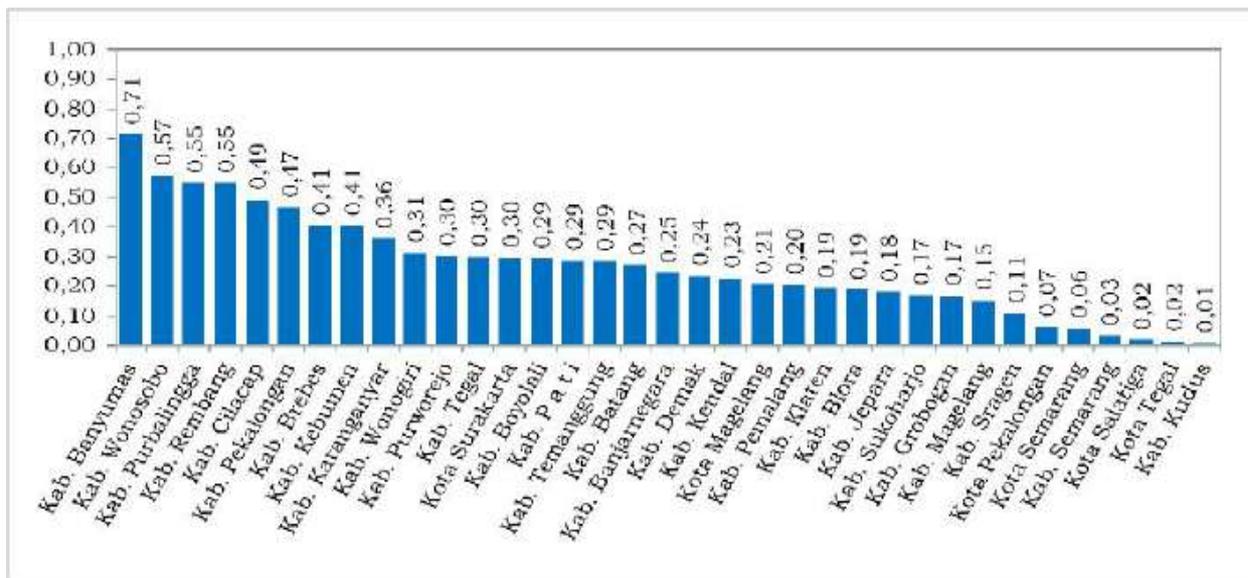


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.7.

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2021

Dilihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2017-2021) kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,71 persen. Kinerja tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017-2021 sebagaimana gambar berikut.

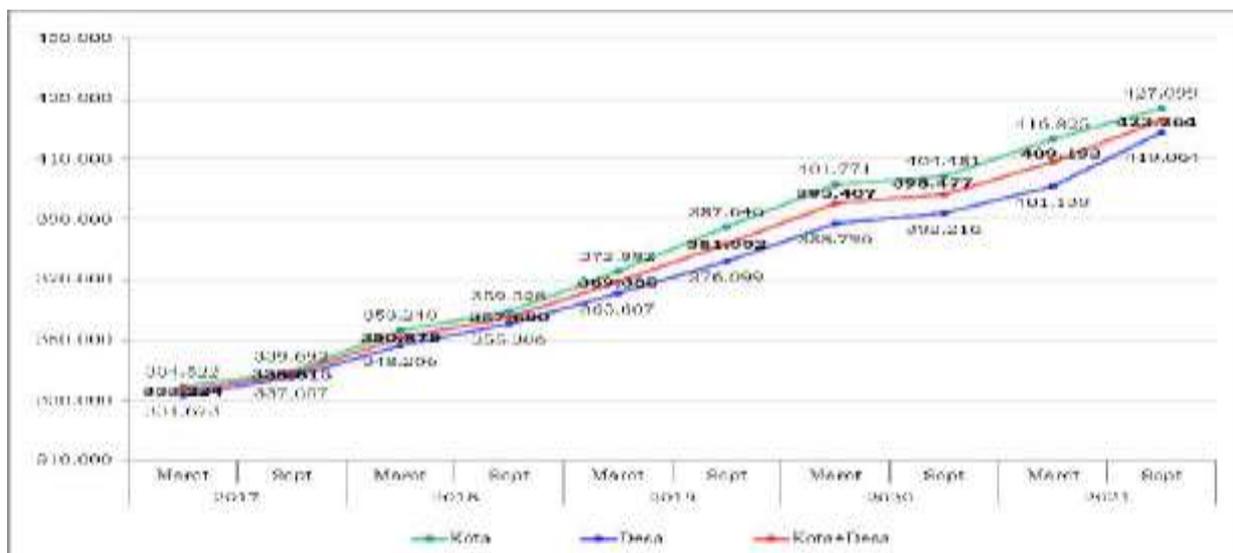


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017-2021

Gambar 2.8.

Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2021 sebesar 423.264 rupiah per kapita per bulan, meningkat 6,22 persen dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 398.477 rupiah per kapita per bulan. Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2021 sebesar 427.099 rupiah per kapita per bulan atau naik 5,60 persen dari kondisi September 2020 yang sebesar 404.451 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 6,85 persen menjadi sebesar 419.064 rupiah per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 392.216 rupiah per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 – 2021

Gambar 2.9.

Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan pada periode September tahun 2021 baik di perkotaan maupun pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Tabel 2.31.

Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2021 (September)

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi	Kontribusi (%)	Komoditi	Kontribusi (%)
Makanan	74,13	Makanan	76,00
Beras	19,61	Beras	21,25
Rokok kretek filter	9,54	Rokok kretek filter	8,86
Telur ayam ras	4,56	Telur ayam ras	4,70
Daging ayam ras	4,47	Daging ayam ras	4,04
Gula pasir	2,94	Gula pasir	2,93
Mie instan	2,61	Tempe	2,69
Tempe	2,61	Tahu	2,45
Kue Basah	2,50	Mie instan	2,35
Tahu	2,47	Kue Basah	2,26
Bawang Merah	1,95	Bawang Merah	2,05

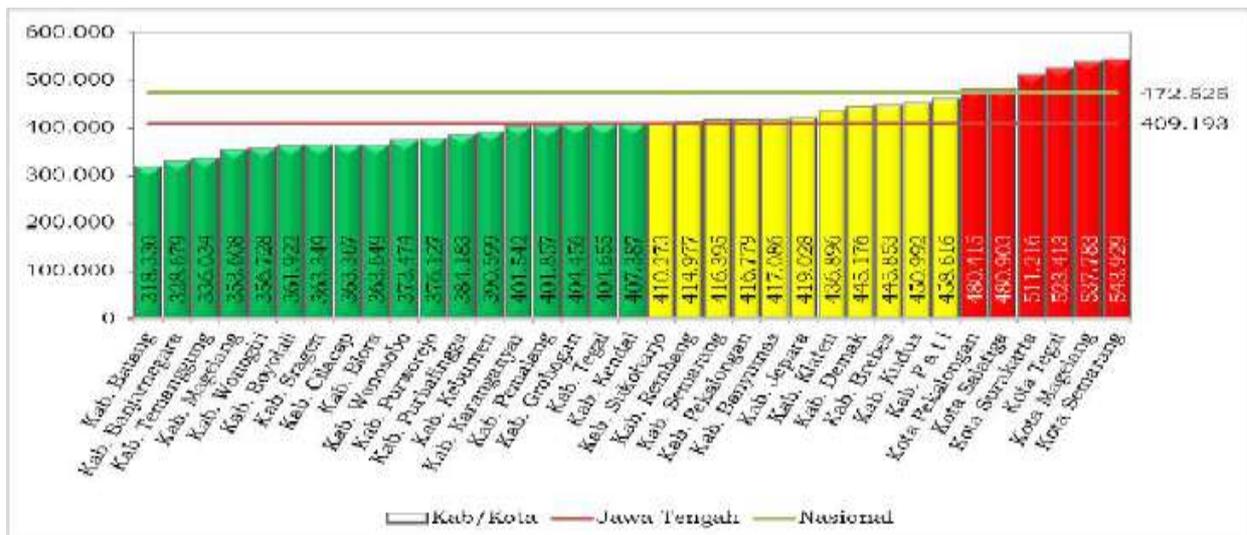
Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	Kontribusi (%)	Komoditi	Kontribusi (%)
Lainnya	20,87	Lainnya	22,43
Bukan Makanan	25,87	Bukan Makanan	24,00
Perumahan	6,79	Perumahan	7,96
Bensin	4,32	Bensin	3,85
Listrik	2,57	Listrik	1,80
Pendidikan	2,19	Pendidikan	1,19
Perlengkapan mandi	1,30	Perlengkapan mandi	1,15
Pajak kendaraan bermotor	0,74	Sabun Cuci	0,80
Kesehatan	0,72	Kesehatan	0,79
Lainnya	7,25	Lainnya	6,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 18 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Grobogan, Tegal, dan Kendal;
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 11 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Klaten, Demak, Brebes, Kudus dan Pati;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 kota, yaitu Kota Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Tegal, Magelang dan Semarang.

Kabupaten/kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar 318.330 rupiah per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 543.929 rupiah per kapita per bulan.

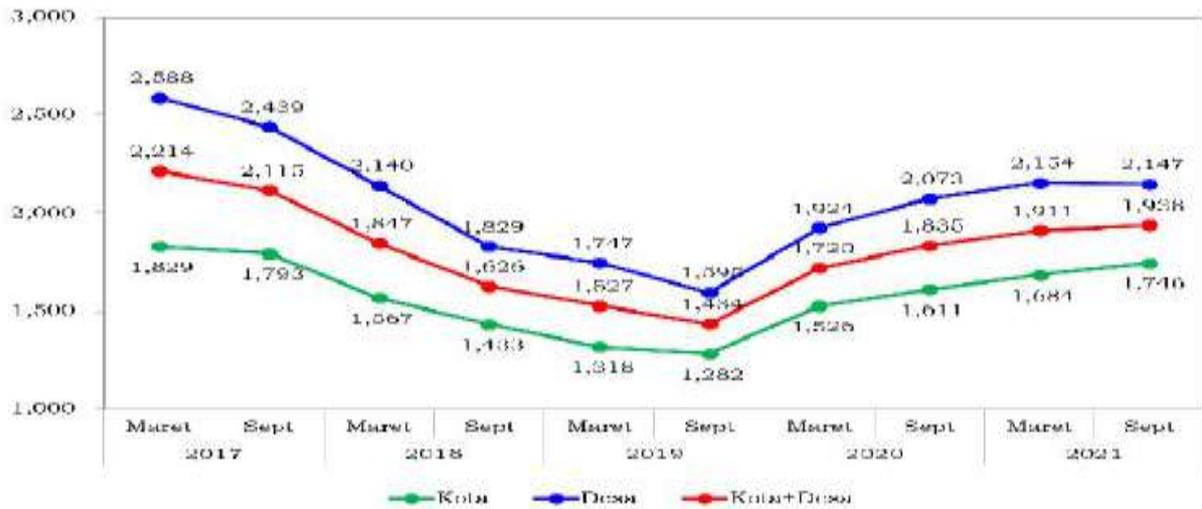


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.10.

Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019 menurun dari 2,214 menjadi 1,434 pada September 2019, namun pada September 2020 meningkat menjadi 1,835 dan meningkat kembali menjadi 1,938 pada September 2021 (naik 0,103 dibandingkan September 2020). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2021 di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,746 dari 1,611 (naik 0,135 dibandingkan September 2020) sedangkan di perdesaan mencapai sebesar 2,147 dari 2,073 (naik 0,074 dibandingkan September 2020). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

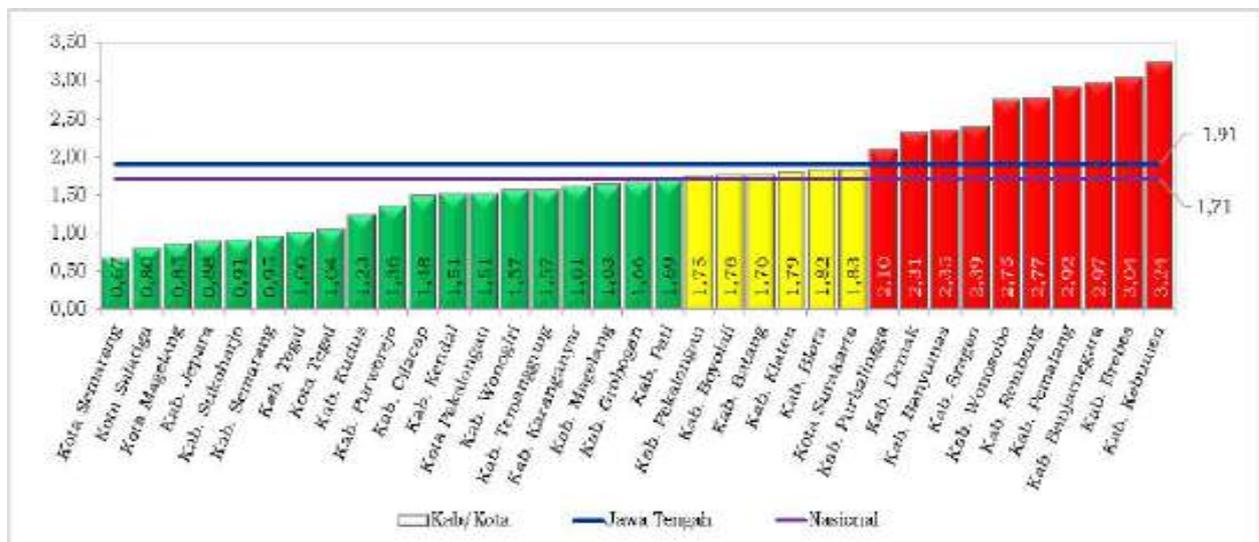


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 - 2021

Gambar 2.11.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2021, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,91 dan P1 Nasional sebesar 1,71 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,24 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,67.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

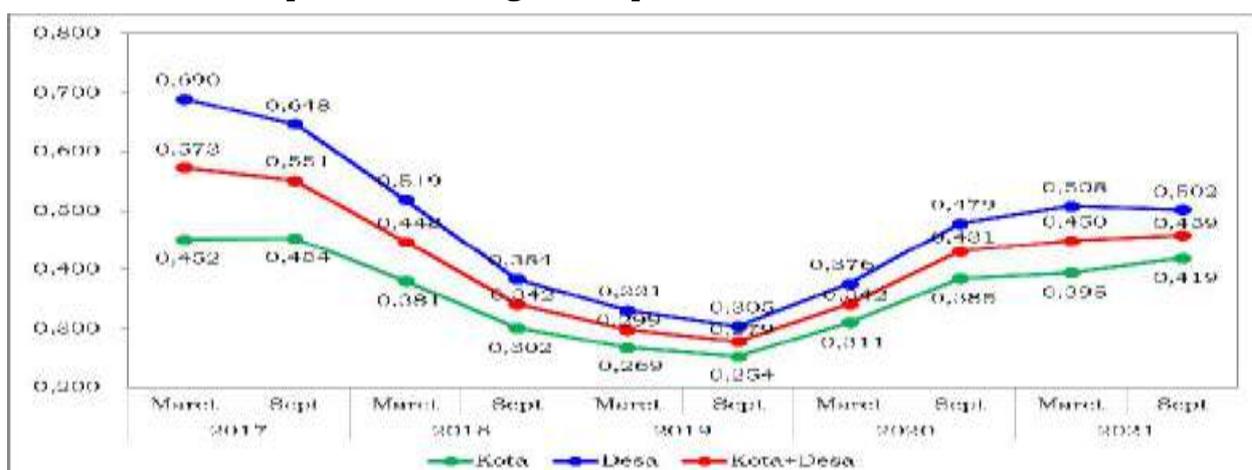
Gambar 2.12.

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi Kabupaten Purbalingga, Demak, Banyumas, Sragen, Wonosobo, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Brebes dan Kebumen;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Boyolali, Batang, Klaten, Blora dan Kota Surakarta;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Sukoharjo, Semarang, Tegal, Kudus, Purworejo, Cilacap, Kendal, Wonogiri, Temanggung, Karanganyar, Magelang, Grobogan dan Pati,

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2017 – 2019 menurun dari 0,573 menjadi 0,279, penurunan tajam terjadi pada periode September 2018 turun sebesar 0,106 poin, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,431 dan meningkat kembali pada periode September 2021 sebesar 0,459. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2021 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2021 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk daerah perkotaan sebesar 0,419 naik 0,034 poin dibandingkan September 2020. Sedangkan pada periode yang sama di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,502 naik 0,023 poin dibandingkan September 2020.

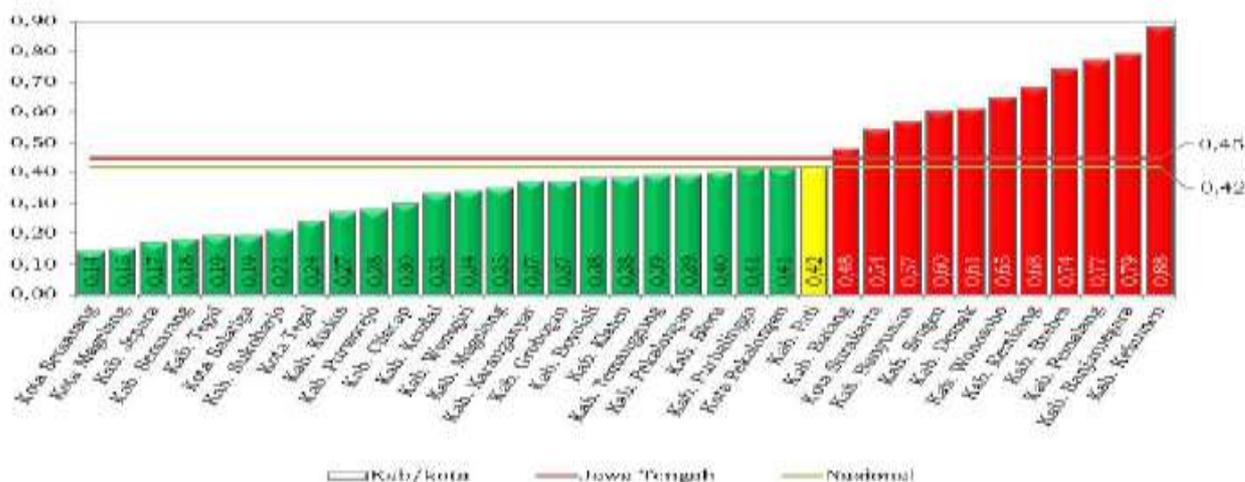


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.13.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki indeks tertinggi (0,88) dan Kota Semarang terendah (0,14).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.14.

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten/kota meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Pati;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 23 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Purbalingga.

Jika dibandingkan dengan Provinsi se Jawa-Bali, perubahan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2020 – September 2021 sebesar 0,59 persen atau menduduki urutan ke-3 dari 7 Provinsi se Jawa-Bali.

Tabel 2.32.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan
Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2020 – 2021

No.	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		September 2020		September 2021		(Ribu Org)	(%)
		(Ribu Org)	(%)	(Ribu Org)	(%)		
1	DIY	503,14	12,8	474,49	11,91	-28,65	-0,89
2	Jawa Timur	4.585,97	11,46	4.259,60	10,59	-326,37	-0,87
3	Jawa Tengah	4.119,93	11,84	3.934,01	11,25	-185,92	-0,59
4	Jawa Barat	4.188,52	8,43	4.004,86	7,97	-183,66	-0,46
5	Banten	857,64	6,63	852,28	6,5	-5,36	-0,13
6	DKI Jakarta	496,84	4,69	498,29	4,67	1,45	-0,02
7	Bali	196,92	4,45	211,46	4,72	14,54	0,27

Sumber: BPS, 2021

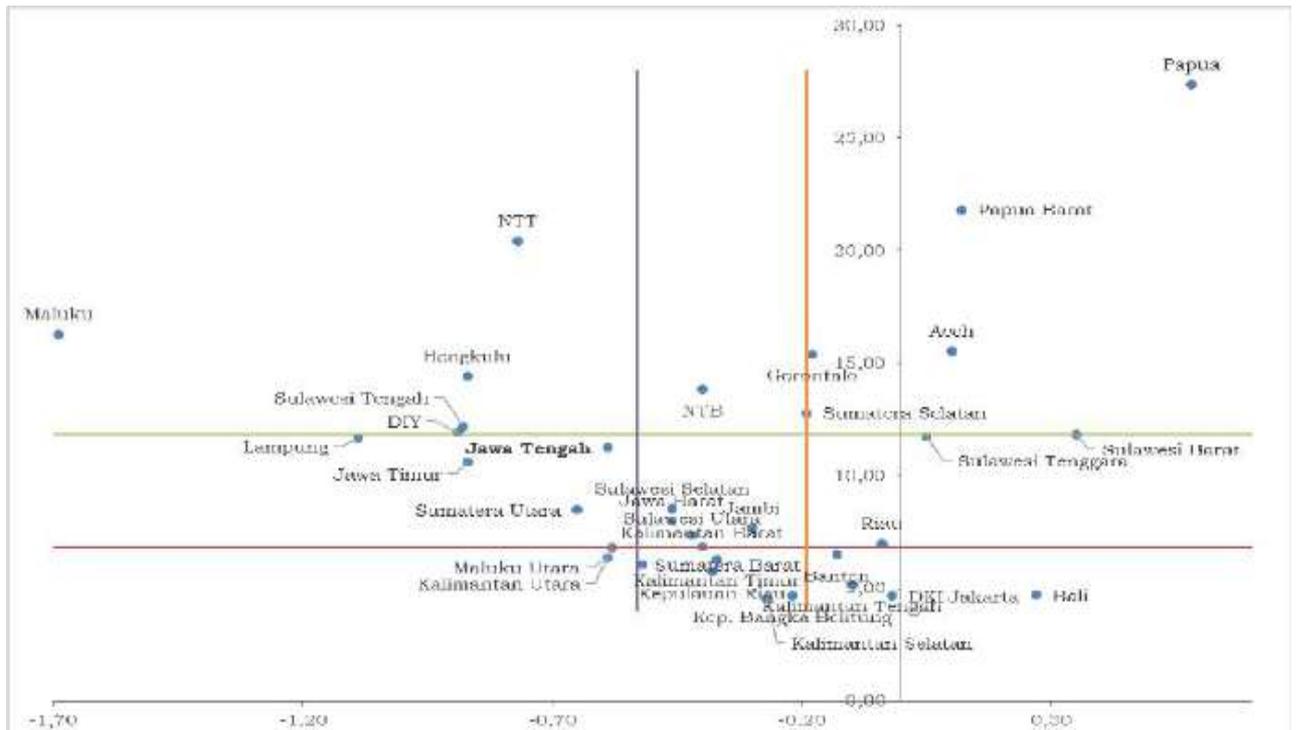
Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2021 pada rentang persentase 6,84 sampai dengan 11,86 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,25 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi 2,00 poin dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 pada rentang -0,53 sampai dengan -0,19 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,86 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara atau berada lebih rendah 0,27 poin di bawah rata-rata. Dan jika membandingkan antara persentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada 3 provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sumatra Utara dan Jawa Timur.

Tabel 2.33.
Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase
Kemiskinan Tahun 2020 – 2021 Di Wilayah Setara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (poin)	Provinsi
Kalimantan Barat	6,84	-1,69	Maluku
Riau	7,00	-1,09	Lampung
Sulawesi Utara	7,36	-0,89	DIY
Jambi	7,67	-0,88	Sulawesi Tengah
Jawa Barat	7,97	-0,87	Bengkulu
Sumatera Utara	8,49	-0,87	Jawa Timur
Sulawesi Selatan	8,53	-0,77	NTT
Jawa Timur	10,59	-0,65	Sumatera Utara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (poin)	Provinsi
Jawa Tengah	11,25	-0,59	Jawa Tengah
Lampung	11,67	-0,59	Maluku Utara
Sulawesi Tenggara	11,74	-0,58	Kalimantan Utara
Sulawesi Barat	11,85		
Rata-rata	9,25	-0,86	Rata-rata

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)



Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

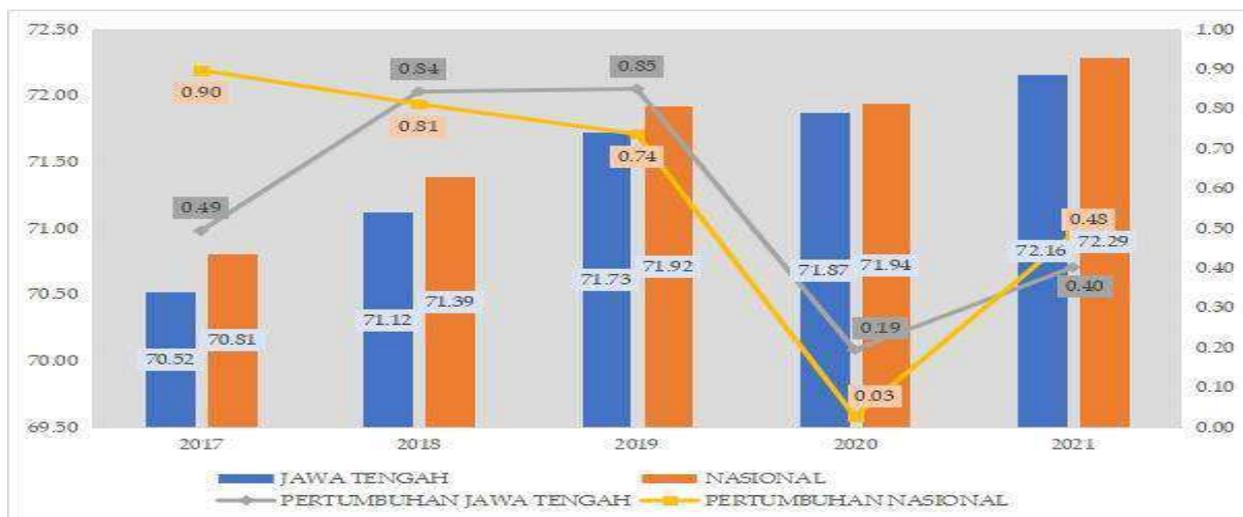
Gambar 2.15.

Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2021 dengan Wilayah Setara

2.1.5. Kondisi Sumber Daya Manusia

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.16.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2017 sebesar 69,98 menjadi 72,16 pada tahun 2021 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional yang sebesar 72,29 pada tahun 2021.

Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, sedangkan angka pertumbuhan IPM cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terdapat penurunan signifikan terhadap pertumbuhan IPM Jawa Tengah dari 0,85 menjadi 0,19. Penurunan pertumbuhan IPM disebabkan karena penurunan pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel 2.34.

Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2020-2021

Provinsi	IPM 2020	IPM 2021	Pertumbuhan IPM 2021
Bali	75.50	75.69	0.19
DIY	79.97	80.22	0.25
Banten	72.45	72.72	0.27
Jawa Tengah	71.87	72.16	0.29
DKI Jakarta	80.77	81.11	0.34
Jawa Barat	72.09	72.45	0.36
Jawa Timur	71.71	72.14	0.43
Nasional	71.94	72.29	0.35

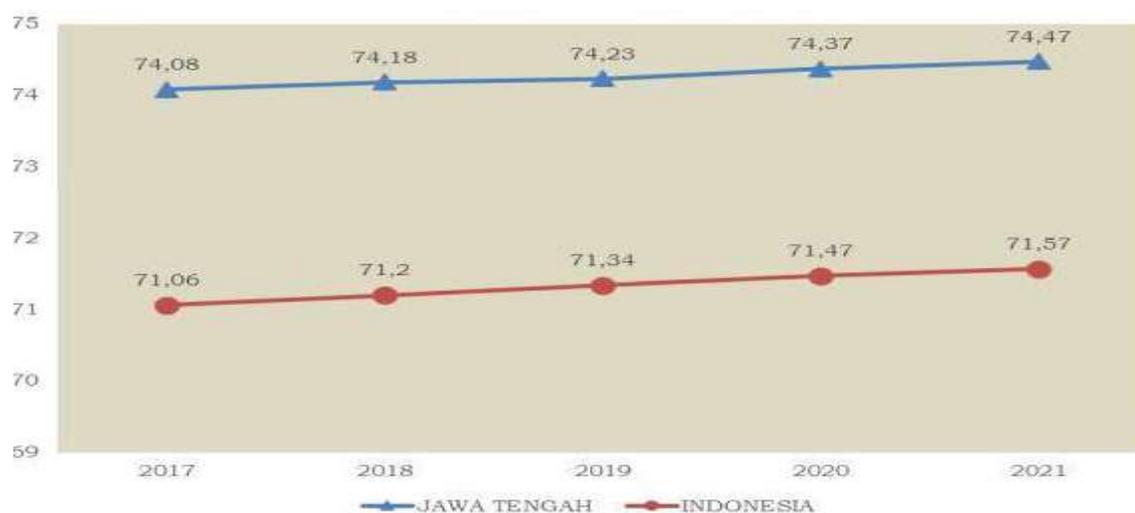
Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan IPM di Pulau Jawa dan sekitarnya pada kisaran 0,19 hingga 0,43. Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi keempat lebih baik dibandingkan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Berikut ini gambaran perkembangan indikator pembentuk IPM Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan.

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. Perkembangan UHH di Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 74,08 tahun menjadi 74,47 tahun, dan jika dibandingkan capaian nasional maka Jawa Tengah telah melampaui nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah semakin baik.

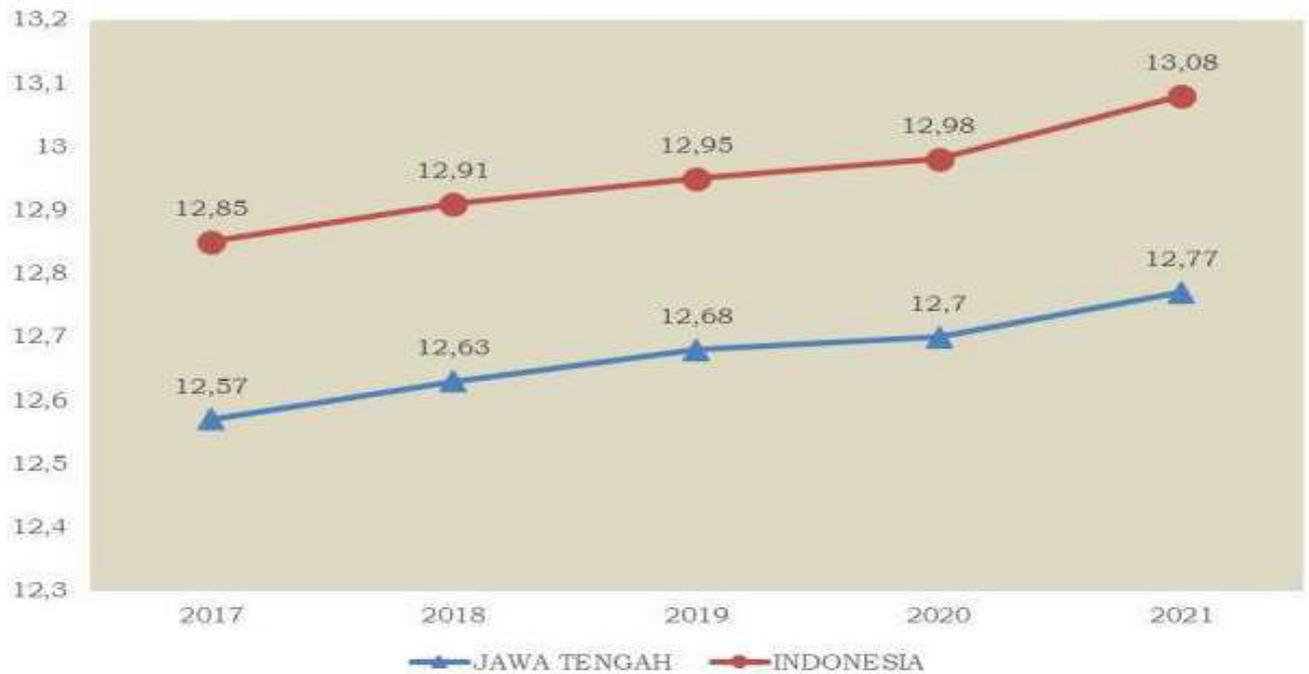


Sumber: BPS,2021

Gambar 2.17.
Perkembangan Indikator UHH Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017 - 2021

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh indikator komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional maka capaian HLS dan RLS Jawa Tengah masih di bawah angka nasional. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Capaian HLS Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada kisaran 12 hingga 13 tahun menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.



Sumber: BPS,2021

Gambar 2.18.
Perkembangan Indikator HLS Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

3) Rata-rata Harapan Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan. Rata-rata Lama Sekolah mempunyai batas maksimum 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Capaian RLS Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada kisaran 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII atau SMP Kelas I. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas belum menuntaskan wajib belajar (wajib) 12 tahun. Hal ini didukung dengan data di lapangan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah pada usia 7 hingga 18 tahun dikisaran 500.000 jiwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, diindikasikan juga terdapat cukup banyak Dewasa Tidak Sekolah (DTS) di Jawa Tengah. Penanganan terhadap persoalan tersebut telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota baik secara mandiri maupun melalui pendampingan mitra pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 juga memprioritaskan persoalan ATS tersebut menjadi salah satu isu dan prioritas pembangunan yang harus diselesaikan. Langkah awal yang

dilakukan oleh Pemprov Jateng antara lain, melakukan peningkatan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait serta Kabupaten/Kota. Selain itu, pencegahan ATS juga dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan keringanan pembiayaan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan sekolah boarding bagi siswa miskin.

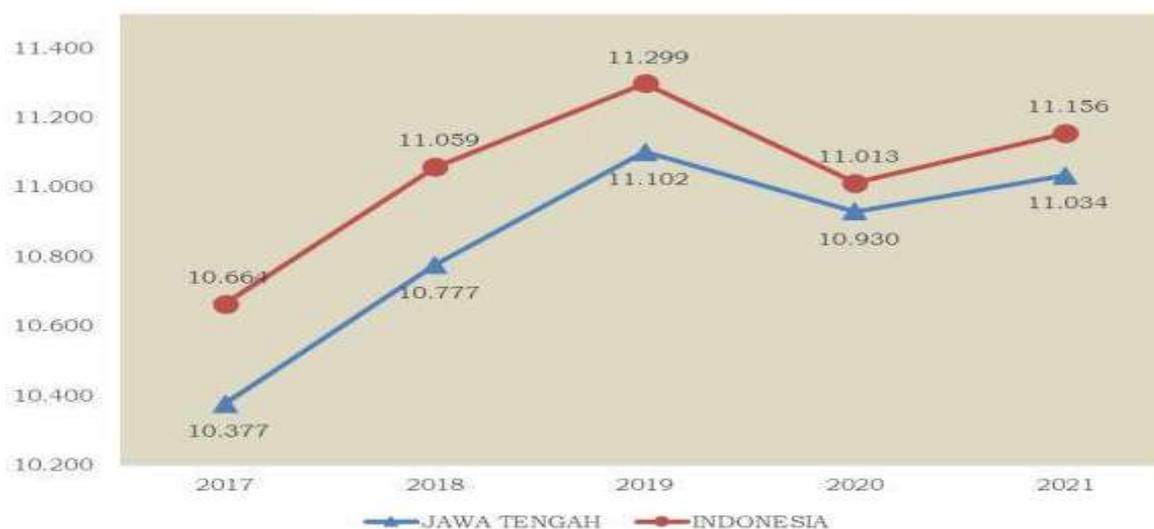


Sumber: BPS,2021

Gambar 2.19.
Perkembangan Indikator RLS Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rb/Orang/Tahun)

Kondisi berbeda ditunjukkan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan di tahun 2020 baik di Jawa Tengah maupun nasional. Pandemi Covid-19 yang melanda nasional dan Jawa Tengah khususnya sejak awal Maret 2020 telah menekan perekonomian dan berdampak pada menurunnya sebagian besar pendapatan masyarakat yang mengakibatkan penurunan pengeluaran rumah tangga. Namun pada tahun 2021 pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.



Sumber: BPS,2021

Gambar 2.20.
Perkembangan Indikator Pengeluaran Per Kapita Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

b. Pendidikan

Mewujudkan SDM yang berkualitas dapat dilaksanakan melalui pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan amanat global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan ke-4 yaitu Pendidikan Berkualitas Sepanjang Hayat Bagi Semua. Untuk dapat mencapai target TPB secara optimal, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan wajib untuk dipenuhi. Namun, upaya pemenuhan SPM bidang pendidikan menghadapi tantangan utama yaitu masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui Tingkat Partisipasi Pendidikan pada kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir dimana partisipasi pendidikan di Jawa Tengah belum mencapai 100 persen, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35.
Tingkat Partisipasi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Tahun	7-12 th	13-15 th	16-18 th
2017	99,62	95,48	68,48
2018	99,76	96,48	68,48
2019	99,77	96,11	69,65
2020	99,73	96,37	70,14
2021	99,66	96,84	70,80

Sumber: Susenas, BPS (2021)

Tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun memperlihatkan capaian yang baik yaitu di atas 90 persen, namun untuk kelompok usia 16-18 tahun masih rendah yaitu pada kisaran 65 persen hingga 70 persen. Tingkat partisipasi pendidikan sejalan dengan indikator kinerja pencapaian SPM yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Dari gambaran tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh penduduk Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan yang artinya SPM bidang pendidikan di Jawa Tengah jika diukur dari penerima layanan dasar belum mencapai 100 persen. Namun untuk pengukuran mutu minimal layanan dasar yang diukur melalui jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia telah mencapai 100 persen.

Data Susenas (diolah) menunjukkan bahwa total jumlah ATS usia 7-18 tahun pada kategori tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 555.575 orang (8,38 persen dari jumlah penduduk usia sekolah di Jawa Tengah), sedangkan kategori masih sekolah sebanyak 6.076.212 orang dari jumlah seluruh penduduk Jawa Tengah usia sekolah 7-18 tahun sebanyak 6.631.786 orang.

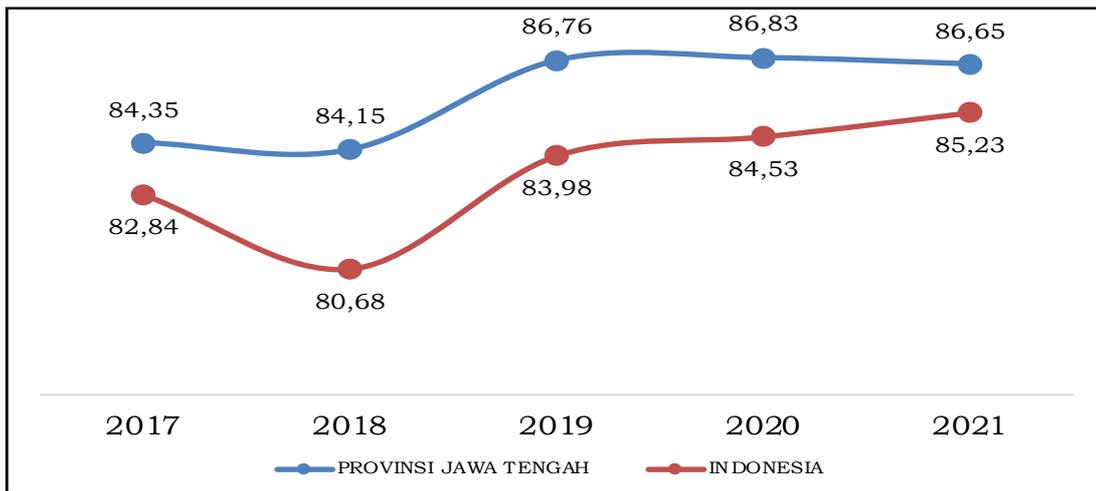
Tabel 2.36.

Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

TAHUN	Usia 7-12 th			Usia 13-15 th			Usia 16-18 th		
	Tdk/Bl m Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Bl m Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Bl m Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi
2017	12.824	3.361.86 2	-	7.080	1.609.56 8	69.116	8.501	1.212.78 1	549.718
2018	5.031	3.345.91 0	-	5.814	1.591.13 8	64.117	6.204	1.223.34 0	542.899
2019	1.688	3.367.37 8	6.075	1.821	1.591.08 9	62.577	8.253	1.173.15 8	502.951
2020	7.909	3.585.36 7	1.798	4.046	1.624.83 2	57.157	4.816	1.206.28 4	508.724
2021	10.494	3.268.07 9	656	5.340	1.615.94 0	47.390	4.715	1.192.19 3	486.980

Sumber: Susenas, BPS, diolah (2021)

Berbagai upaya telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan mutu minimal layanan pendidikan antara lain dengan meningkatkan akses pemerataan layanan pendidikan, meningkatkan distribusi dan pemerataan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan meningkatkan kompetensi siswa kejuruan melalui uji kompetensi. Partisipasi pendidikan juga dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partoisipasi Murni (APM). Perkembangan APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah dan disandingkan dengan Nasional ditunjukkan pada gambar berikut.



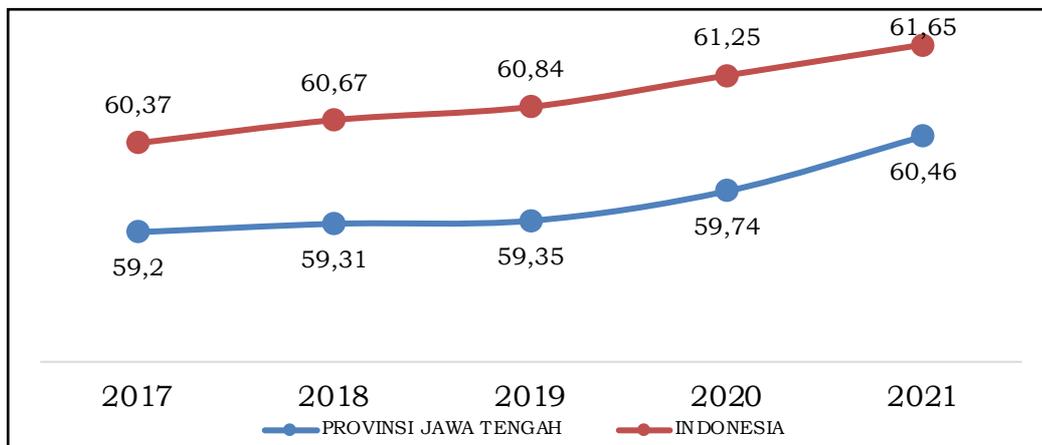
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.21.

APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Tahun 2021 APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah turun dibandingkan tahun 2020, hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid19 menuntut anak usia sekolah cenderung memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi guna membantu orang tuanya dalam mencari penghasilan terutama bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga petani dan nelayan. Namun APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah masih lebih baik jika dibandingkan dengan Nasional.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Sederajat, yang justru mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjangnya semakin baik. Meskipun APM SMA/SMK/ Sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun masih berada di bawah capaian Nasional.



Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.22.

APM SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pembangunan pendidikan yang berkualitas harus mampu menjawab tantangan dalam dunia usaha dan industri. Maka dukungan terhadap pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya penting untuk peningkatan kualitas SDM di Jawa Tengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran penting dalam pendidikan vokasi dalam menciptakan SDM yang siap bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah siswa SMK kelas III dan IV dan jumlah lulusan yang bekerja, namun jumlah lulusan yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat kondisi pandemi Covid19 menyebabkan beberapa perusahaan dan industri melakukan efisiensi tenaga kerja, sehingga lapangan pekerjaan semakin kurang. Maka wirausaha menjadi salah satu alternatif solusi terhadap kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.37.

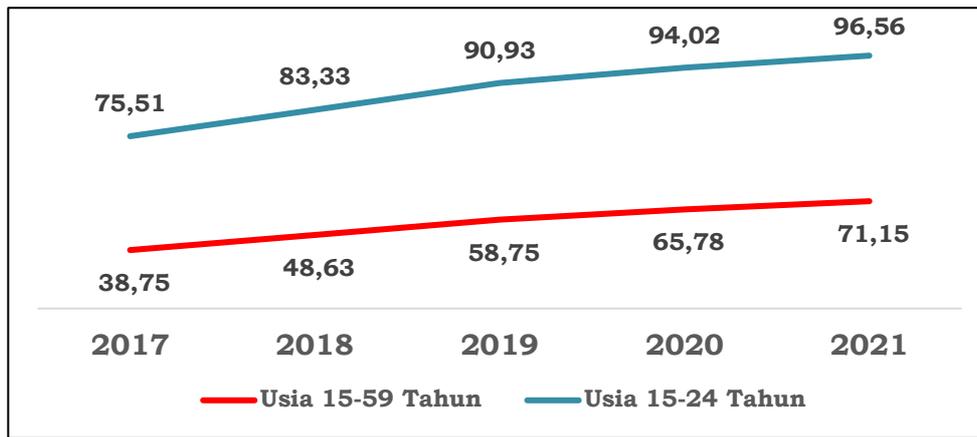
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah siswa kelas III/IV	195.354	164.231	167.751	248.065	208.194
Jumlah lulusan	194.768	164.231	167.751	248.065	208.194
- Bekerja	100.500	111.096	99.278	73.778	65.241
- Wirausaha	1.266	13.159	35.517	1.012	14.480
- Melanjutkan	55.762	22.568	1.720	31.727	18.155
- Belum bekerja	37.240	17.048	21.081	141.548	75.269

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Sarpras.

Memasuki era *society* 5.0 maka digitalisasi tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu kemampuan, pemahaman dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutlak diperlukan. Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK di Jawa Tengah jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2021

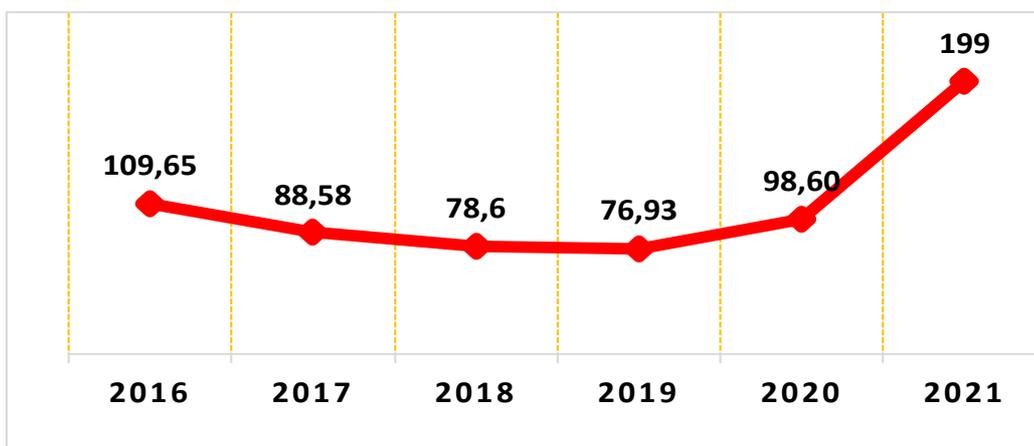
Gambar 2.23.

Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

c. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2016 – 2019 menunjukkan tren yang semakin baik dari 109,65 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada 2016 menjadi 76,93 per 100.000 KH pada tahun 2019. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Angka kematian Ibu tahun 2021 telah melaporkan kematian ibu sebanyak 1.011 kasus.

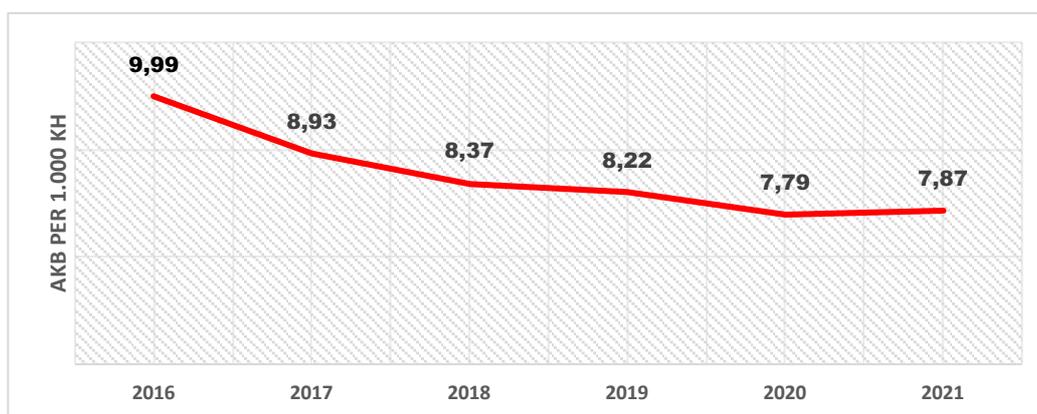


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.24.

AKI per 100.000 KH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah periode tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren membaik yaitu sebesar 9,99 per 1.000 KH pada tahun 2016 menjadi sebesar 7,79 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2020. Meskipun AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun secara absolut jumlah kasus kematian bayi di Jawa Tengah masih tinggi. Pada 2021 menunjukkan kenaikan yaitu sebesar 7,87 per 1.000 KH, tercatat sebanyak 3.997 kasus kematian bayi di wilayah Jawa Tengah. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi Covid-19.

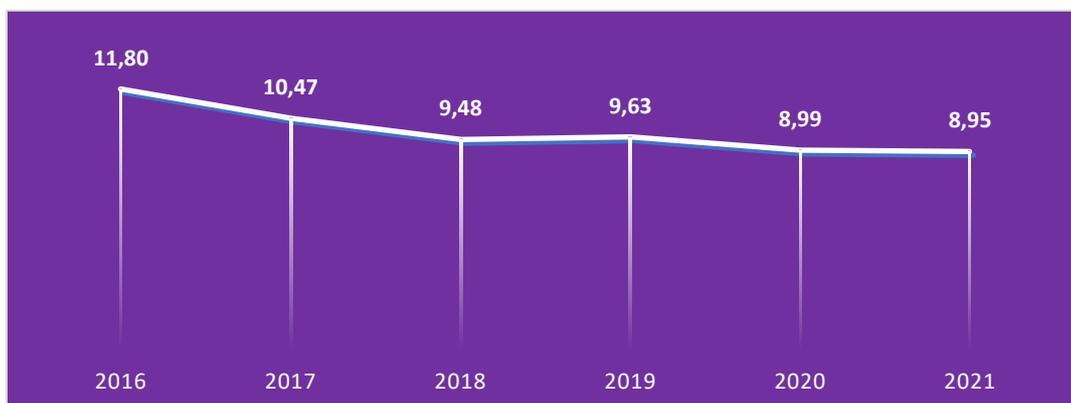


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.25.

AKB per 1.000 KH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2016 sampai dengan 2021 menunjukkan tren membaik dari 11,8 per 1.000 KH pada 2016 menjadi 8,95 per 1.000 KH pada 2021. Kenaikan terjadi pada 2019 namun kembali turun pada 2021. Secara absolut, pada 2021 dilaporkan sebanyak 4.545 kasus kematian balita. Beberapa penyebab kematian balita antara lain *pneumonia*, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.



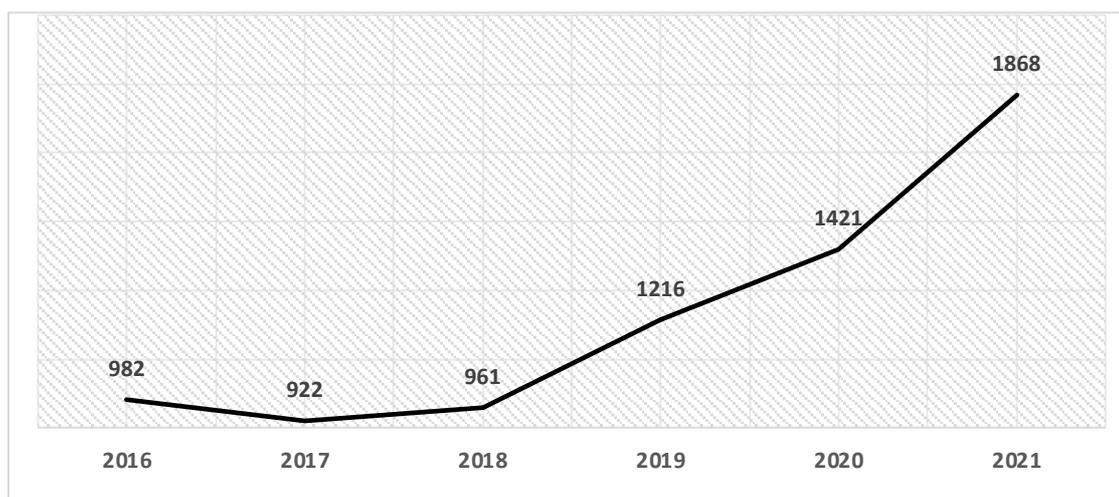
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.26.

AKABA per 1.000 KH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

2) Permasalahan Gizi

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah pada tahun 2016-2021 masih cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan. Kondisi terendah kasus gizi buruk di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 922 kasus setelah mengalami penurunan dari tahun 2016 (982 kasus). Sementara sejak tahun 2018 mengalami kenaikan berturut turut yaitu menjadi 961 kasus di tahun 2018, 1.216 kasus di tahun 2019, 1.421 kasus di tahun 2020 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 1.868 kasus di tahun 2021.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.27.

Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu *intake* zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*).

Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita *underweight* dan *wasted* sebesar 14 persen dan 6,7 persen pada 2021. Prevalensi balita *stunted* turun dari 27,67 persen pada 2019 menjadi 20,9 persen pada 2021. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus ≥ 5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek ≥ 20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek ≥ 20 persen dan prevalensi balita kurus ≥ 5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

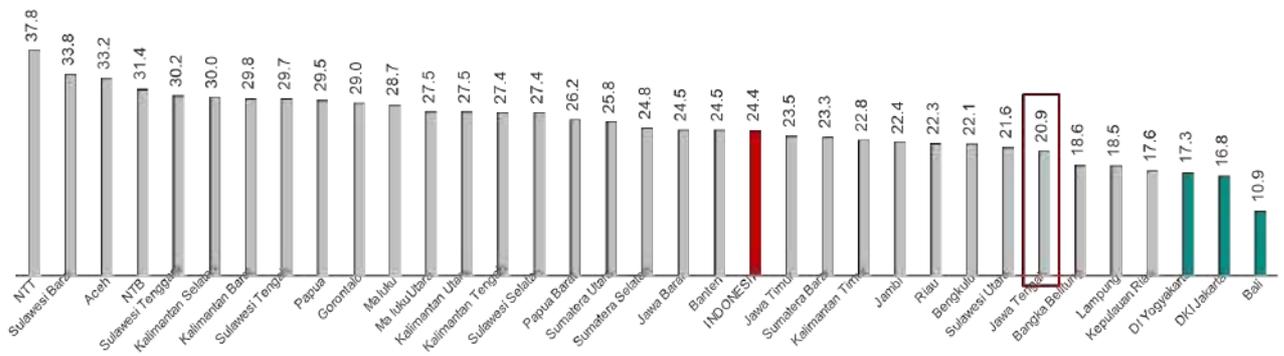
Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi *wasting* pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi *stunting* di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi *wasting* tidak lebih dari 7 persen.

Tabel 2.38.

Prevalensi *Stunting* Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	<i>Stunting</i>	Sumber
2017	28,5%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	31,2%	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia

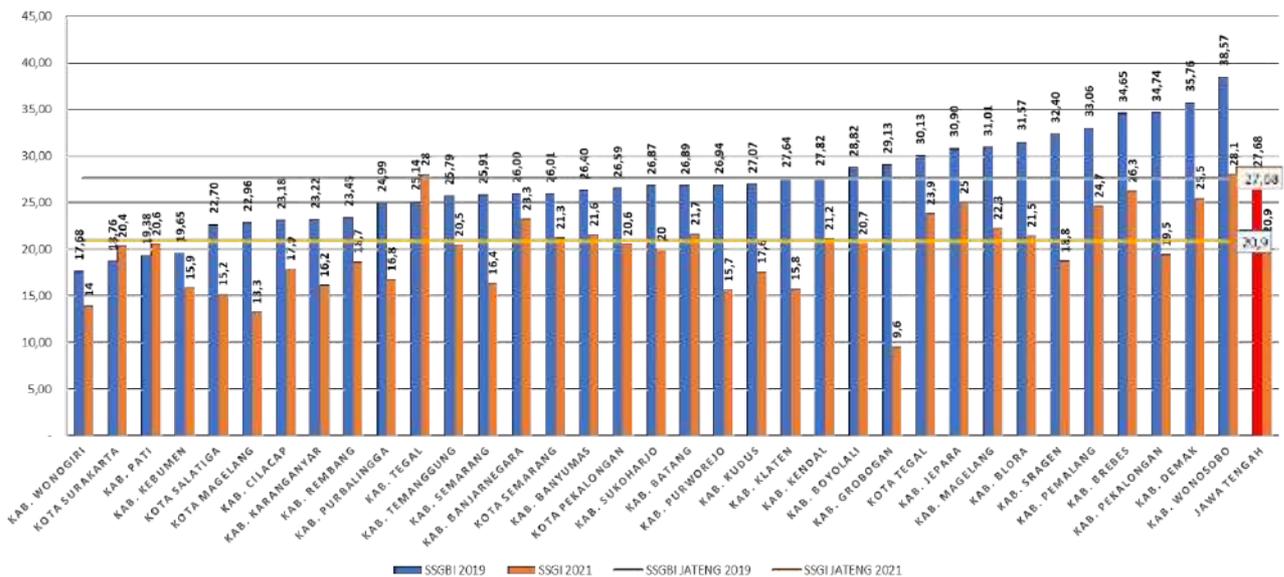
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.28.

Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2021



Gambar 2.29.

Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021

Terjadinya kondisi *stunting* secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (norma dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

3) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demogra, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu

penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (*Incidence Rate/IR DBD*) di Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020 yaitu menjadi 12,80 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 16,30 per 100.000 penduduk. Dengan penurunan kasus menyebabkan angka kematian DBD meningkat dibanding tahun 2020 yaitu dari 1,9 persen pada tahun 2020 menjadi 2,71 persen pada tahun 2021. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut angka kematian yang disebabkan oleh DBD, dimana angka kesakitan menurun, namun angka kematian meningkat. Sementara itu ancaman kenaikan kasus kematian dapat terjadi seiring dengan adanya kenaikan pula pada angka kesakitan DBD (*CFR DBD*) yaitu dari 1,9 persen di tahun 2020 menjadi 2,71 persen di tahun 2021.

Angka Kesakitan Malaria (API) mengalami kenaikan sebesar 0,024 pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 sebesar 0,009. Saat ini dari 35 Kabupaten/Kota yang mempunyai kasus Malaria hanya di Kabupaten Purworejo. Hal ini dipengaruhi adanya Migrasi Kasus dari Pendatang.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 118 persen menjadi 116,2 persen di tahun 2021, namun harapan penanganan TB mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu ditandai dengan turunnya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) dari tahun 2020 sebesar 84,5 persen menjadi sebesar 83,5 persen di tahun 2021. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakukannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu diwaspadai secara serius, mengingat terjadi lonjakan angka yang cukup besar pada tahun 2020, tercatat kasus HIV menurun dari 2.749 kasus di tahun 2020 menjadi 2.708 kasus di tahun 2021. Kasus AIDS juga menurun dari 1.549 kasus di tahun 2020 menjadi 835 kasus di tahun 2021. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanfaatan *Voluntary Conselling Test* (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.39.**Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
						Kasus HIV	Kasus AIDS
2017	21,6	1,24	0,03	121	67,77	2.033	1.296
2018	8,68	1,25	0,02	143	77,13	2.654	1.879
2019	26,21	1,4	0,012	210,8	83,93	2.704	2.316
2020	16,30	1,9	0,009	118	84,5	2.749	1.549
2021	12,80	2,71	0,024	116,2	83,5	2.708	835

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bersama adalah ditemukannya jenis *corona virus* baru yang menjadi wabah pandemi hampir diseluruh dunia. *Corona virus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *corona virus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona virus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung yakni percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui benda dan permukaan benda yang terkontaminasi percikan orang yang terinfeksi seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan.

Untuk mengurangi penyebaran kasus yang semakin banyak dan mengurangi kasus kematian akibat Covid-19, berbagai upaya promotif dan preventif terus dilakukan antara lain edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Disamping itu, penanganan kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan dengan melakukan tes Covid-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (*treatment*) di tempat karantina terpusat dan fasilitas kesehatan rujukan Covid-19. Beberapa upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat.

Vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kontribusi vaksin pada turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*), dan melindungi

masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Data menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita hipertensi mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2.543.723 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.329.052 kasus pada tahun 2021. Sementara itu diabetes mellitus mengalami tren penurunan dari 582.559 kasus pada tahun 2020 menjadi 467.365 kasus pada tahun 2021. Penyakit kanker juga perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita kanker mengalami peningkatan dari 12.702 kasus di tahun 2020 menjadi 12.886 kasus di tahun 2021.

Tabel 2.40.

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2017	247.793	635.545	7.554
2018	508.881	1.393.751	21.298
2019	490.444	2.073.852	13.256
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

4) Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 21 kabupaten/kota yang telah ODF yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen,

Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Magelang. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya belum ODF dan akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2020 terus meningkat yaitu sebanyak 5.836 desa/kelurahan ODF di tahun 2019 menjadi 6.818 desa/kelurahan ODF di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah desa/kelurahan ODF meningkat menjadi 7.162 desa kelurahan.

Tabel 2.41.

**Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021**

No	Tahun	Jumlah Kelurahan/ Desa ODF
1	2017	2.728
2	2018	3.668
3	2019	5.863
4	2020	6.818
5	2021	7.162

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

5) Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangkaantisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode 2017 sampai 2021. Tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 50,40 persen yang kemudian meningkat menjadi 65,00 persen di tahun 2018, tahun 2019 menjadi 74,90 persen, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,90 persen. Tahun 2021 Pelayanan Kesehatan Usia lanjut di Provinsi Jawa Tengah Mengalami kenaikan menjadi 70,90 persen. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

Tabel 2.42.
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2020 (%)

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
1	2017	50,40
2	2018	65,00
3	2019	74,90
4	2020	65,90
5	2021	70,90

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

d. Kesejahteraan Sosial

Evaluasi atas pembangunan kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa aspek pendataan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) masih menjadi permasalahan mendasar untuk diperbaiki. Keterlambatan proses pembaruan data mengakibatkan berbagai program kegiatan yang menggunakan sasaran penerima manfaat berbasis DTKS sering mengalami *exclusion error* (diluar DTKS tetapi mendapat bantuan) dan *inklusion error* (didalam DTKS tapi tidak mendapat bantuan). Sementara itu berdasarkan komponen DTKS tahun 2021, tantangan menentukan sasaran penerima manfaat menjadi makin rumit mengingat dari daftar kriteria yang ada tidak menunjukkan kondisi riil/status PM, sehingga masih diperlukan validasi dan verifikasi kembali ketika akan menggunakan DTKS. penting membuat terobosan dalam pengelolaan DTKS level daerah sehingga DTKS bisa menjadi *base line* data siap pakai.

Sementara itu, upaya peningkatan kesejahteraan sosial di lingkup pemerintah provinsi Jawa Tengah terus dan tetap dijalankan yaitu dalam rangka penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan data sampai dengan tahun 2021 populasi PPKS di Jawa Tengah sebesar 4,6 juta jiwa, mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 3,04 juta jiwa. Tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah PPKS dikarenakan adanya dampak Covid-19.

Tabel 2.43.
Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Populasi PPKS (Orang)	Jumlah Penanganan (Orang)	Persentase
1	2017	4.941.435	39.446	0,80
2	2018	4.045.143	60.381	1,49
3	2019	3.042.030	19.214	0,47
4	2020	3.042.030	19.214	0,47
5	2021	4.654.151	19.214	0,47

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Mengingat makin besarnya data PPKS di tahun 2021, upaya penanganan PPKS terus dilaksanakan antara lain melalui program Kartu Jateng Sejahtera, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE), penanganan PPKS dalam panti untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, dan pengemis dan gelandangan dan orang terlantar lainnya, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Evaluasi terhadap Program KJS sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa aspek keterserapan anggaran tiap tahun selalu dibawah target yang ditetapkan, mengingat penerima manfaat KJS yang telah ditetapkan terpaksa tidak bisa diterimakan dikarenakan yang bersangkutan meninggal, pindah alamat, mendapat intervensi program lain atau menjadi mampu. Dari total alokasi sebanyak 12.764 penerima manfaat, pada tahun 2021, tercatat hanya terserap sebanyak 10.904 penerima manfaat.

Upaya lain dalam penanganan PPKS adalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha sebagai dukungan dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), namun sampai dengan tahun 2021 karena berbagai permasalahan diantaranya belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan antar OPD sehingga program ini belum optimal. Total saat ini terdapat 2.838 KUBE di Jawa Tengah, sebanyak 1.093 KUBE belum mendapatkan bantuan, sedangkan sisanya 1.745 KUBE telah mendapatkan bantuan baik melalui APBN, APBD, maupun donor asing.

Tabel 2.44.
Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD	1.745
2	KUBE belum mendapatkan bantuan	1.093
3	Usulan KUBE Bantuan Pemerintah Australia (Queensland) 2021/2022	529
4	Rencana KUBE yang mendapat bantuan APBD TA 2022	30
	Total KUBE di Jawa Tengah	2.838

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk melaksanakan penanganan PPKS dalam panti yaitu kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, dan pengemis dan gelandangan dan orang terlantar lainnya, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Problem utama dalam

penanganan PPKS dalam panti adalah pemberian permakanan satu orang satu hari (SOSH) yang layak. Tahun 2021 besaran alokasi permakanan SOSH yang diberikan adalah sebesar Rp.19.000,-. Besaran ini tentu perlu ditingkat ke depan untuk menjaga asupan pemenuhan permakanan dan kecukupan gizi pada penghuni panti.

Pada sisi sarpras yang merupakan penopang utama dalam pelaksanaan SPM sosial, kondisi panti maupun gudang logistik perlu mendapat perhatian berupa rehabilitasi yang sifatnya ringan, sedang maupun berat. Dari 27 panti plus gudang logistik terdapat total 815 gedung dengan kondisi rusak ringan 162 gedung, 82 gedung rusak sedang, dan 83 rusak berat.

Tabel 2.45.

Kondisi Sarpras Panti Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	SATKER/UPT	JUMLAH GEDUNG	KONDISI TAHUN 2021				KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	24	17	-	-	7	
2	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	15	12	3	-	-	
3	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	31	6	13	8	4	
4	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	32	20	4	5	3	
5	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	9	6	3	-	-	
6	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	12	10	2	-	-	
7	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	23	7	5	7	4	
8	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	55	47	0	6	2	
9	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	16	5	7	2	2	
10	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	75	57	10	-	8	
11	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	22	15	3	3	1	
12	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	33	20	2	2	9	Pagar rusak berat 200m
13	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	43	33	3	7	-	
14	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	17	11	1	3	2	

No	SATKER/UPT	JUMLAH GEDUNG	KONDISI TAHUN 2021				KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
15	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	25	13	6	0	6	
16	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	10	3	2	3	2	
17	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	4	-	-	2	2	
18	Panti Pelayanan Sosial Sukomulyo	5	4	0	1	0	
19	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	49	32	8	1	8	
20	Panti Pelayanan Sosial Bojongbata	46	36	5	0	5	
21	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	28	4	14	10	-	
22	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	35	21	9	-	5	
23	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	16	6	6	3	1	
24	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	28	22	5	-	1	
25	Panti Pelayanan Sosial Raharjo Sragen	44	37	3	3	1	
26	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	65	35	21	3	6	
27	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	52	10	27	12	4	
28	Gudang Logistik Bencana	1	-	-	1	-	
	Total	815	489	162	82	83	0

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Hasil capaian SPM Sosial tahun 2021 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti telah mencapai 100 persen untuk semua layanan. Namun demikian masih diperlukan upaya lebih keras bagi Jawa Tengah untuk terus melaksanakan SPM sesuai ketentuan. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat empat tahapan yang perlu dilalui dalam pelaksanaan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini masih belum optimal dalam pelaksanaan empat tahapan penerapan SPM, dan

pemahaman mengenai target 100 persen yang belum sepenuhnya dipahami seluruh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.46.
Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah

Jenis Layanan	Output	Persentase Capaian
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya: 1.095 PM	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan: 1.285 PM	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya: 560	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya: 1.662	100%
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya: 100	100%

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam upaya menjangkau masyarakat miskin hingga level desa, kementerian Sosial telah menginisiasi dibentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Puskesos merupakan sebuah layanan sosialiasasi Pusat Kesejahteraan Sosial yang dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin mendapatkan/pengaduan terkait perlindungan sosial serta melakukan pengjangkauan kepada warga miskin/rentan miskin. Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Sosial telah membentuk 22 Puskesos di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan diharapkan sisanya dapat diteruskan/dibentuk oleh pemerintah daerah. tidak hanya level kabupaten/kota tetapi Puskessos juga perlu dibentuk hingga level desa.

e. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan

ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2017-2021 berada diatas Nasional dan menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat walupun terjadi penurunan IPG sebesar 0,06 poin dari tahun 2018-2019. Dan pada 2021 terjadi peningkatan IPG sebesar 0,3 poin dari tahun 2020. IPG antara laki-laki dan perempuan di Jawa Tengah semakin naik pada tahun 2021. Hal tersebut berarti kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Jawa Tengah semakin rendah.

Tabel 2.47.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

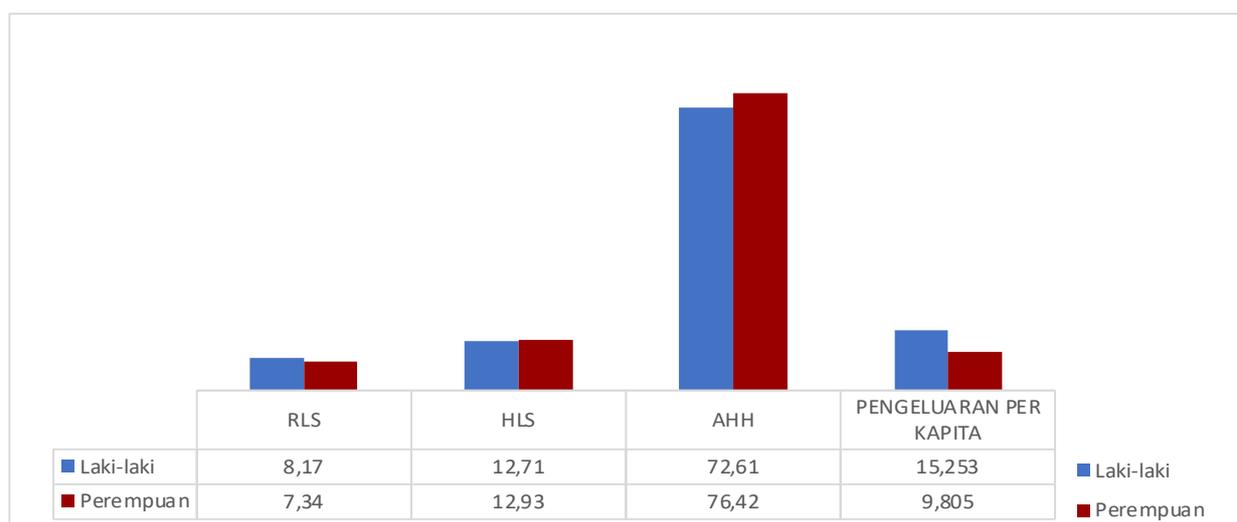
No	Tahun	IPG Prov Jateng	IPG Nasional
1	2017	91,94	90,96
2	2018	91,95	90,99
3	2019	91,89	91,07
4	2020	92,18	91,06
5	2021	92,48	91,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2021, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2021 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,42 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,61 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena *female advantages* tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021, HLS perempuan adalah 12,93 tahun dan laki-laki sebesar 12,71 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2021 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,17 tahun, sedangkan perempuan 7,34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 9,805 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 15,253 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.30.

IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2021

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah sebesar 71,64 poin pada 2021. Nilai tersebut turun 0,09 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,73. Skor IDG Jawa Tengah pada 2021 merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir. Artinya, peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik di Jawa Tengah semakin menurun. Penurunan IDG di Jawa Tengah pada 2021 terjadi pada beberapa indikator pembentuknya.

Tabel 2.48.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	IDG Prov Jateng	IDG Nasional
1	2017	75,1	71,74
2	2018	74,03	72,1
3	2019	72,18	75,24
4	2020	71,73	75,57
5	2021	71,64	76,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami tren yang terus menurun, pada tahun 2017 sebesar 75,10 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 74,03 kemudian secara berurutan terus mengalami penurunan yaitu di tahun 2019 sebesar 72,18 tahun 2020 sebesar 71,73 dan tahun 2021 sebesar 71,64. Kondisi tersebut berbeda dengan IDG Nasional yang secara konsisten terus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017 sebesar 71,74 menjadi 76,26 di tahun 2021. Penurunan IDG Jawa Tengah tahun 2021 terutama terjadi karena penurunan salah satu komponen yakni persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Keterlibatan perempuan di parlemen cenderung menurun pada kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 24 persen menurun menjadi 18,33 persen pada tahun 2021. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2017 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada tahun 2020 (21,09 persen) dan tahun 2021 (21,89 persen).

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah.

Tabel 2.49.
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017 - 2021 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2017	24	17,32
2	2018	22	17,32
3	2019	19,17	20,52
4	2020	18,80	21,09
5	2021	18,33	21,89

Sumber: BPS, 2022

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 46,97 pada tahun 2017 sampai 50,67 pada tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang juga meningkat.

Tabel 2.50.
Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2017	46,97	46,31
2	2018	47,57	47,02
3	2019	49,36	47,46
4	2020	50,20	48,76
5	2021	50,67	49,99

Sumber: BPS, 2022

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 persen perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA ke atas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 persen. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adalah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13 persen perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling

sering terjadi. Kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. Menurut data KPPPA di sektor formal, laki-laki menempati porsi sebesar 65,78 persen dan perempuan 34,22 persen. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96 persen dan perempuan 42,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah. Banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi di dibandingkan sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2017-2021 relatif stabil pada kisaran angka 34 persen. Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,29 persen setelah secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2021 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami kecenderungan naik dari tahun 2017 (36,62 persen) hingga tahun 2020 (37,26 persen) dan menurun pada tahun 2021 (37,22). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51.
Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2017	34,13	36,62
2	2018	34,28	36,70
3	2019	34,31	37,10
4	2020	34,29	37,26
5	2021	34,60	37,22

Sumber: BPS, 2022

f. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, bahkan bisa dikatakan sebagai fenomena gunung es, dimana yang tampak dipermukaan (yang terlapor dan melapor) tidak sebanding dengan kejadian yang sesungguhnya. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak. Sampai dengan tahun 2021 angka rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 8,35 per 100.000 penduduk belum mencapai target yang diharapkan sebesar 7,78 per 100.000 penduduk. Demikian halnya dengan angka rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 8,97 per 100.000 penduduk, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,22 per 100.000 penduduk. Sementara itu pada rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,11 per 100.000 penduduk lebih baik dari target (5,76) sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak sebesar 11,02 per 100.000 penduduk lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 12,44 per 100.000 penduduk. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan pemahaman terhadap masyarakat perlu untuk terus dilakukan hingga level masyarakat terbawah (desa/kelurahan) sehingga angka kasus maupun korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terus ditekan dan mencapai titik terendah.

Tabel 2.52.**Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2017	7,24	8,51	7,40	14,01
2018	8,2	8,44	5,93	12,76
2019	7,78	8,25	5,89	12,44
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02

Sumber: DP3AP2KB, 2022

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak yang perlu mendapat perhatian ekstra di masa sekarang maupun mendatang. Data per triwulan III tahun 2021 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 9.868 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Cilacap (724 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (19 kasus). Data sementara di tahun 2021 tersebut menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 12.972 kasus. Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan jika segera diikuti dengan kehamilan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian.

Tabel 2.53.**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2017	1.633	1.141	2.774
2018	1.942	1.264	3.206
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021*)	1.347	8.521	9.868

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2021

Keterangan: *) Data triwulan II tahun 2021

Upaya pemenuhan hak anak terus dilaksanakan melalui serangkaian strategi dan advokasi kepada kabupaten/kota yaitu melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sampai dengan tahun 2021 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Sehingga diharapkan ke depan program KLA tidak hanya sebatas kegiatan memperoleh penghargaan semata tetapi secara riil dapat berdampak pada pemenuhan hak anak. Kota Surakarta merupakan satu-satunya Kota di Jawa Tengah yang telah memperoleh penghargaan tertinggi kategori Utama.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dimana memberikan amanat kepada BKKBN sebagai *leading sector* dalam penanggulangan *stunting* maka memberi konsekuensi kepada urusan pengendalian penduduk dan KB di Jawa Tengah untuk turut serta terlibat dalam penanganan *stunting* di Jawa Tengah, sehingga program kegiatan tahun 2023 diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan *stunting* di Jawa Tengah.

Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian bersama pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*), angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*), dan *unmetneed* KB. TFR Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 2,09, angka ini belum sepenuhnya ideal mengingat batasan ideal TFR yang dikehendaki adalah 2,2-2,3. Angka kelahiran perlu tetap dijaga keseimbangannya untuk menjamin pasokan generasi penerus/SDM dimasa mendatang namun juga perlu diwaspadai jangan sampai angka kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan ledakan penduduk yang justru membebani negara dimasa mendatang. Sementara itu, pemakaian kontrasepsi (CPR) pada tahun 2021 sebesar 70,35, masih lebih rendah dari yang diharapkan yaitu sebesar 75,25. Sedangkan *unmetneed* Jawa Tengah pada tahun 2021 berada diangka 14,29 persen atau masih terlalu tinggi dari yang diharapkan sebesar 12,66 persen. *Unmetneed* merupakan kondisi dimana wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya), tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Kondisi TFR dan CPR yang makin menurun dan makin meningkatnya *unmetneed* perlu diwaspadai oleh Jawa Tengah agar jumlah penduduk yang sudah relatif terkendali dapat terjaga dengan baik.

Tabel 2.54.**Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2017-2021**

Tahun	CPR	TFR	Unmet Need
2017	76,89	2,3	9,94
2018	74,69	2,4	13,59
2019	73,48	2,23	13,03
2020	73,26	2,27	12,90
2021	70,35	2,09	14,29

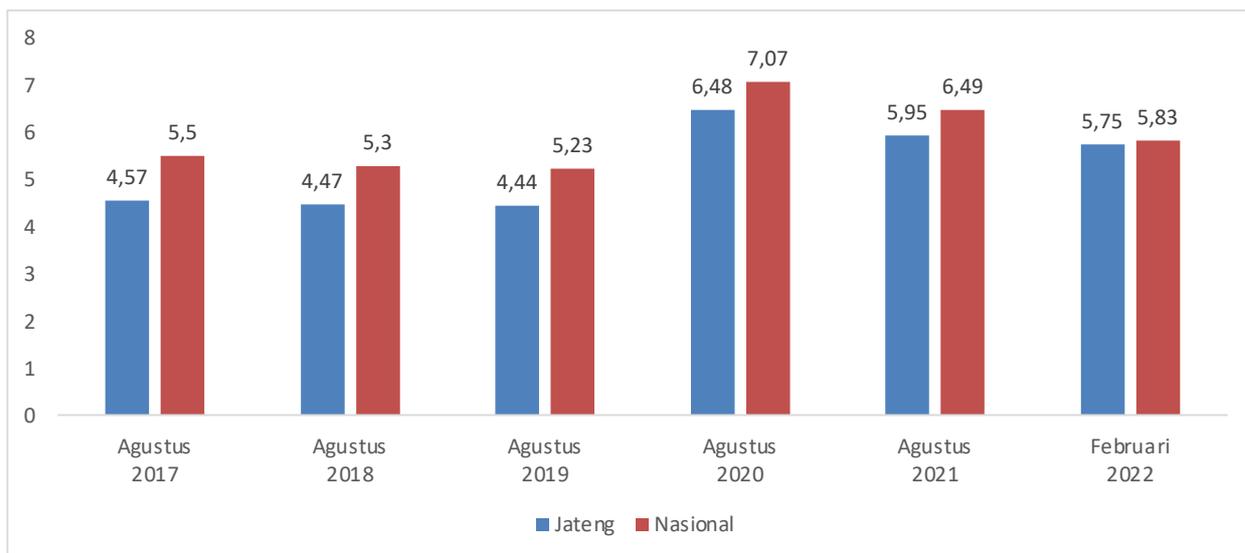
Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022

Dalam rangka integrasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana telah dilakukan inovasi melalui strategi Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana) dimana strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan keluarga menjadi *entry point* dalam intervensi program kegiatan yang dilaksanakan. Keaktifan Tribina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Bina Keluarga Lansia/BKL) menjadi motor penggerak bagi pencapaian peningkatan kualitas keluarga. Sampai dengan tahun 2021, persentase kelompok tribina yang aktif sebesar 99,21 persen lebih baik dari target yang diharapkan yaitu 85,57 persen. Namun aspek peningkatan dan penguatan kapasitas kader tri bina masih perlu ditingkatkan seiring dengan tantangan dan dinamika perkembangan masyarakat di era digital saat ini.

Selain itu pada level kebijakan yang lebih makro, integrasi kebijakan pengendalian kependudukan yang meliputi kuantitas, kualitas, pembanguan keluarga, mobilisasi (persebaran dan mobilitas penduduk) serta data dan informasi kependudukan perlu untuk terus didorong hingga level kabupaten/kota melalui penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar. Mendasarkan capaian tahun 2021, tercatat baru 9 kabupaten/kota yang sudah menyusun GDPK yaitu Kabupaten Blora, Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kota Surakarta.

h. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2021 sebesar 5,95 persen turun sebesar 0,53 poin dari kondisi TPT pada Agustus 2020 yang sebesar 6,48 persen. Bulan Februari 2022 TPT di Jawa Tengah sebesar 5,75 persen, turun sebesar 0,21 persen point dibandingkan Bulan Februari 2021. Di tingkat nasional TPT Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun sebesar 0,43 persen point dibandingkan Bulan Februari 2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Gambar 2.31.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – Februari 2022 (%)

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2021 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 10,00 persen, meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 13,20 persen. TPT terendah berasal dari lulusan SD yang sebesar 3,70 persen.

Tabel 2.55.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 – 2021 (%)

No.	Tahun	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Univ
1.	2017	2,35	4,79	7,10	11,08	5,46	3,73
2.	2018	2,14	4,62	6,50	10,60	3,64	5,47
3.	2019	2,09	4,64	6,26	9,92	3,59	5,44
4.	2020	3,70	6,40	8,41	13,20	6,46	7,01
5.	2021	3,70	6,87	7,32	10,00	5,66	5,62

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak besar pada sisi tenaga kerja tidak hanya pada tingkat pengangguran terbuka, namun terdampak juga terhadap penduduk usia kerja lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu penganggur, bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Dari jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah yang mencapai 27,01 juta, terdapat 3,97 juta orang yang terdampak Covid-19 atau sebesar

14,68 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar hampir 1,4 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,99 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang sebesar 12,25 persen.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak pandemi Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yaitu sebanyak 3,19 juta orang atau sebesar 80,47 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak pandemi Covid-19 sebanyak 377 ribu orang atau sekitar 31,06 persen terhadap total penganggur (1,21 juta orang) di Jawa Tengah. Secara umum pada semua kategori tersebut jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak pandemi Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

Tabel 2.56.

Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (rb orang)
	Laki-Laki (rb orang)	Perempuan (rb orang)	Perkotaan (rb orang)	Perdesaan (rb orang)	
Pengangguran ²⁾ Karena Covid-10	213,75	72,98	179,66	107,07	286,73
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³⁾ Karena Covid-19	41,45	64,05	62,64	42,86	105,50
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	156,32	91,13	164,41	83,04	247,45
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	1.315,69	998,14	1.449,21	864,62	2.313,83
Total	1.727,21	1.226,29	1.855,91	1097,59	2.953,50
Penduduk Usia Kerja (PUK)	13.425,69	13.828,22	14.125,80	13.128,11	27.253,91
Persentase PUK Terdampak Covid- 19 (%)	12,86	8,87	13,14	8,36	10,84

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.57.**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2017	17 186 674	26.060.000	65,95
2.	2018	17 245 548	26.340.000	69,21
3.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
4.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
5.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat, di tahun 2017 sebesar 69,11 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 68,11 persen, kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 68,85 persen, di tahun 2020 meningkat menjadi 69,43 persen dan terus meningkat menjadi 69,58 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tabel 2.58.**Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021**

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2017	26.060.000	18.010.612	69,11
2.	2018	26.340.000	18.228.952	68,81
3.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
4.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
5.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58

Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas

Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.59.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2017	309.952	210.256	67,84
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.60.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2017	45.121	1.425.903
2	2018	56.574	1.698.265
3	2019	69.866	1.781.754
4	2020	76.196	1.908.465
5	2021	83.511	2.003.518

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan penambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.61.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2017	150.832
2	2018	1.465.847
3	2019	1.378.435
4	2020	892.866
5	2021	310.785

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 1.927 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus terus menurun sejalan dengan meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga di tahun 2021, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 35 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.62.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2017	1.927	100% terselesaikan
2	2018	265	100% terselesaikan
3	2019	124	100% terselesaikan
4	2020	96	100% terselesaikan
5	2021	35	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.210.735 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.63.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah <i>NEET</i> (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2017	1.044.465	4.973.428 orang	21,00
2	2018	1.171.567	5.521.380 orang	21,21
3	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
4	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
5	2021	1.210.735	5.388.228 orang	22,47

Sumber: *Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.64.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah <i>Peraturan Perusahaan (PP)</i>	Jumlah <i>Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</i>
1	2017	4.557	820
2	2018	4.857	830
3	2019	3.967	579
4	2020	4.230	614
5	2021	4.540	661

Sumber: *Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

i. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembangunan. Jumlah pemuda Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 mengalami perkembangan fluktuatif.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah merupakan persentase angkatan kerja

yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif.

Keberhasilan pemuda tidak terlepas dari jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda. Kewirausahaan pemuda dari tahun 2017-2021 mengalami perkembangan fluktuatif. Data terkait Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65.

Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,65	7,84	7,79	7,75	Na
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	12,59	12,33	11,87	14,83	Na
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan	59,39	55,36	60,91	54,18	Na

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

*) Keterangan : Data 2021 belum dirilis

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah dapat diukur dari peringkat kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021, sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS mengalami penurunan. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66.

Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat		
	Tahun 2012	Tahun 2016	Tahun 2021
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	2	6
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	1	2	3

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2022

j. Perpustakaan

Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi

melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Peradaban yang berliterasi selalu ditandai dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan. Perpustakaan selalu menjadi transportasi literasi ketika suatu peradaban mencapai puncak keemasan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut merupakan data jenis koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.67.
Koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2021

No	Jenis Koleksi	2018		2019		2020		2021	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	142.335	294.244	138.372	276.744	138.372	276.744	138.672	277.344
2	Koleksi e-book	2.600	6.000	20.407	31.336	20.574	194.739	21.145	205.839
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	2.242	4.484	6.919	13.838	7.204	14.323	7.604	15.123
	TOTAL	147.177	304.728	165.698	321.918	166.150	485.806	167.421	498.306

Sumber: Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan perpustakaan keliling (perpusling) pada tahun 2018 sebanyak 142.335 judul, namun mengalami penurunan jumlah judul pada tahun 2019 menjadi 138.372 judul, kemudian jumlah tersebut stagnan hingga tahun 2021. Sedangkan untuk koleksi *e-book* pada tahun 2018 semula sejumlah 2.600 judul menjadi 21.145 judul pada tahun 2021.

Menurut survei yang dilakukan oleh Perpustnas pada tahun 2021 meningkatnya koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ternyata belum berbanding lurus dengan persentase koleksi yang dipinjam per tahun yang hanya berada di kisaran 13,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa

koleksi bahan Pustaka baik fisik maupun digital yang ada belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemustaka.

Sedangkan untuk pengunjung perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 mengalami penurunan. Bahkan jika dilihat dari tahun 2019 sampai 2021, terlihat tren jumlah pengunjung perpustakaan terus menurun. Kondisi ini antara lain disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana diterapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kunjungan perpustakaan mulai 2020 jumlahnya menurun.

Tabel 2.68.

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021 (Orang)**

NO	Tahun	Pengunjung
1	2017	2.572.081
2	2018	3.041.019
3	2019	3.129.890
4	2020	2.234.117
5	2021	1.906.186

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.1.6. Kondisi Pangan dan Energi

a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi NTP antara lain pendapatan, biaya operasional sarana produksi, dan pengeluaran ekonomi rumah tangga.

Pada kurun waktu tahun 2017-2021, NTP per Bulan Desember cenderung fluktuatif, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 NTP menunjukkan peningkatan, dan menurun pada tahun 2020 sebesar 4,51 poin dibandingkan dengan Desember 2019. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pada sub sektor tanaman pangan. Pada Desember 2021 kembali meningkat sebesar 103,18. Adapun bila dibandingkan dengan NTP Nasional pada periode tahun 2017-2021, NTP Jawa Tengah lebih baik pada tahun 2017 sampai 2019. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 NTP Jawa Tengah di bawah NTP nasional.



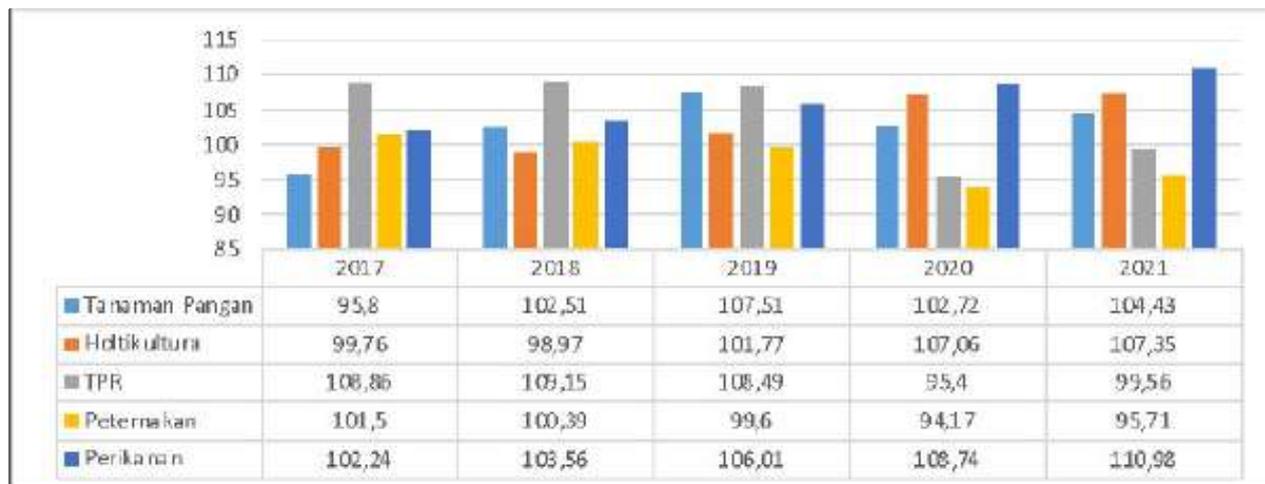
Sumber: BPS, 2022

Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.32.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2017-2021, sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor perkebunan rakyat dan peternakan mengalami penurunan pada tahun 2021.



Sumber: BPS, 2021

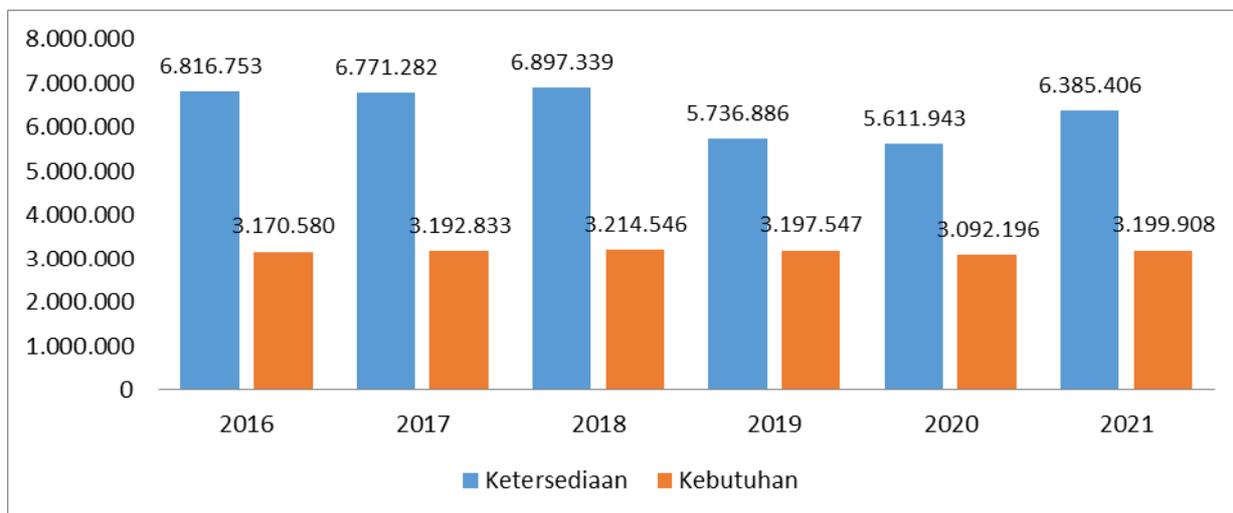
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.33.

Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

b. Pangan

Kondisi ketahanan pangan ditunjukkan dengan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, dan gula. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan beras mengalami kondisi yang fluktuatif namun secara umum ketersediaan padi di Jawa Tengah mengalami surplus.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.34.
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021 (Ton)

Pada komoditas jagung, ketersediaan pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami surplus. Produksi dan ketersediaan jagung relatif meningkat pada kurun waktu tahun 2017-2021. Sementara untuk kebutuhan jagung pada tahun 2021 meningkat drastis dibandingkan dengan kebutuhan di tahun-tahun sebelumnya pada kurun waktu 2017-2021. Perhitungan kebutuhan jagung berdasarkan konsumsi jagung pada manusia, sementara pada sisi yang lain produksi jagung lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.35.
Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021 (Ton)

Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang belum dapat terpenuhi ketersediaannya di Jawa Tengah. Pada aspek produksi, selama kurun waktu tahun 2017-2021, produksi kedelai mengalami fluktuatif dan

cenderung menurun. Sementara itu pada aspek kebutuhan relatif stabil, kecuali pada tahun 2021 kebutuhan kedelai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat beberapa kendala yang berdampak pada rendahnya produksi kedelai di Jawa Tengah antara lain rendahnya minat petani dalam budidaya kedelai, tidak stabilnya harga kedelai dibandingkan komoditas kacang-kacangan lainnya, serta perawatan dan pola budidaya kedelai yang rentan terhadap gangguan organisme gangguan tanaman.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.36.
Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021 (Ton)

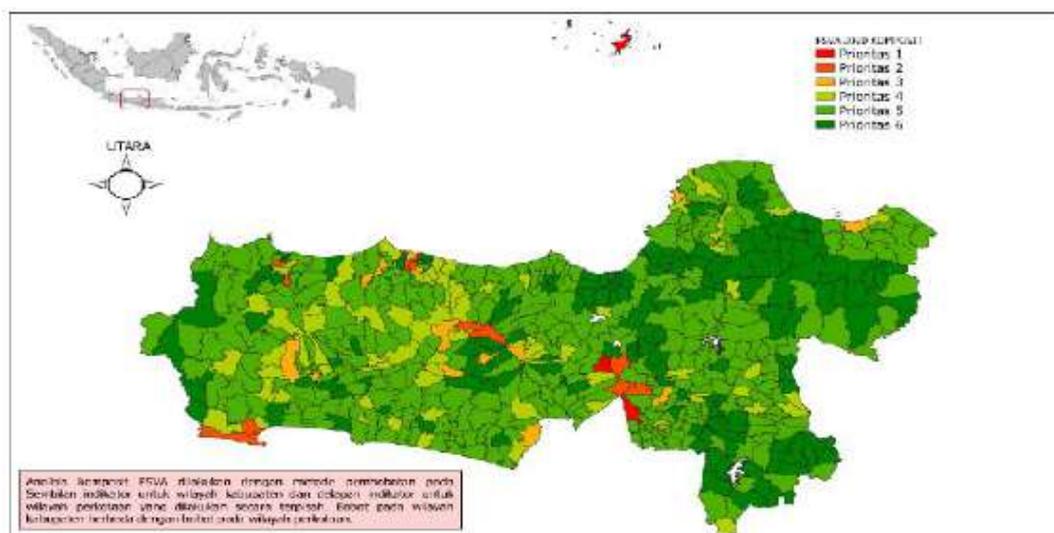


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.37.
Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021 (Ton)

Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada

prioritas 1 sampai 6. Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6. Peta FSVA tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 576 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 158 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat 315 kecamatan, kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 75 kecamatan, kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3) terdapat 13 kecamatan, kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) terdapat 12 kecamatan dan kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1) terdapat 3 kecamatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 1 sampai 5.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.38.

Peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69.

Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2017–2021

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tepung Terigu	2,72	1,59	1,18	2,12	2,57	2,07
2	Minyak Goreng	2,42	3,22	2,42	4,83	12,14	5,01
3	Daging Sapi	1,21	1,63	1,11	1,59	2,16	1,54
4	Telur Ayam Ras	6,43	6,82	4,78	7,43	9,34	6,96
5	Daging Ayam Ras	3,13	6,48	2,83	7,57	6,22	5,25

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
6	Cabai Merah Keriting	40,47	22,60	49,20	49,30	40,84	40,48
7	Bawang Merah	17,39	20,18	23,49	23,53	13,57	19,63
8	Gula Pasir Lokal	4,20	3,25	5,17	13,35	2,15	5,62
9	Kedelai	3,17	1,27	1,10	2,77	5,25	2,71
10	Jagung	8,06	3,41	3,64	5,79	-	5,23
11	Beras Termurah	4,59	3,18	1,34	0,94	-	2,51
12	Beras Medium	2,60	4,38	1,23	1,10	1,52	2,17
13	Beras Premium	2,41	2,94	0,89	0,78	1,34	1,67

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain minyak goreng, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir lokal. Jagung dan beras termurah tidak dilakukan pemantauan di tahun 2021. Beras termurah tidak dilakukan pemantauan karena definisi beras termurah tumpang tindih dengan beras medium. Sedangkan jagung tidak dilakukan pemantauan karena konsumen terbesar adalah peternak.

Selanjutnya keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai berikut.

Tabel 2.70.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021

No,	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,00	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,88	1,42	1,1	0,9	0,9
3	Pangan Hewani	24,0	19,45	17,09	20,0	20,4	21,0
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,00	0,70	0,5	0,4	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	6,87	10,00	6,4	6,1	6,3
7	Gula	2,5	2,50	2,37	2,1	2,1	2,1
8	Sayur & buah	30,0	25,71	25,71	29,5	27,1	26,0
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,80	86,41	89,6	87,1	86,7
Skor PPH Nasional		100,0	85,20	90,40	90,8	87,9	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2022

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2017 - 2021 untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi.

Standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII Tahun 2004 ditentukan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, Mulai tahun 2017, standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71.

**Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator	Ideal WNPG X	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras (Kg/Kap/Th)	97,80	99,40	94,92	95,94	88,8	88,8
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	39,20	21,85	18,99	14,69	12,2	12,8
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	58,80	40,04	30,17	34,25	32,8	33,5
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	98,10	67,22	83,34	96,22	90,8	86,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel 2.72.

**Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021**

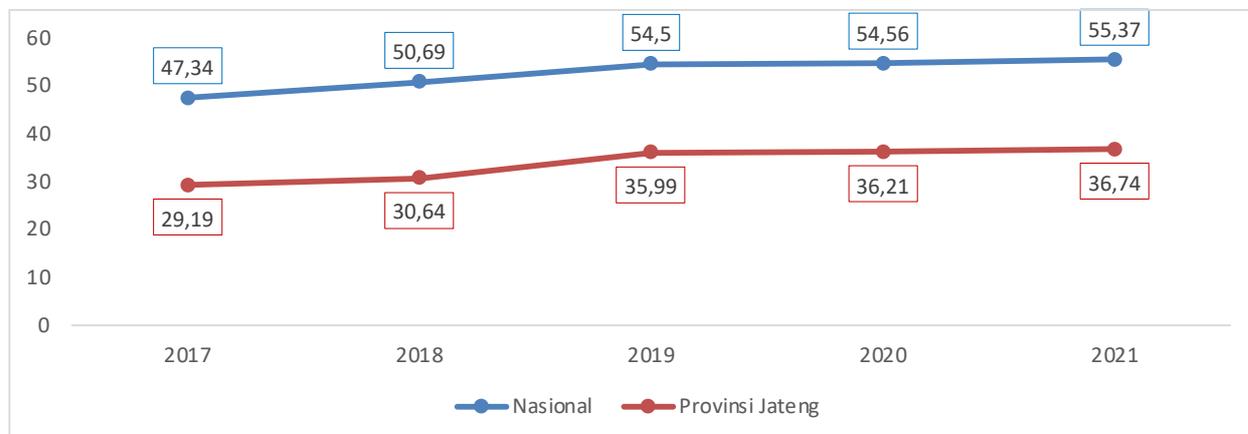
No	Kelompok Pangan	Ideal WNPG X	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	1.075,0	1.252,6	1.235,31	1.303,1	1.221,3	1.212,9
2	Umbi-umbian	129,0	37,8	61,26	47,1	37,3	40,0
3	Pangan Hewani	258,0	209,1	183,77	214,7	219,6	225,6
4	Minyak dan lemak	215,0	253,5	215,33	226,8	227,1	238,2
5	Buah/biji berminyak	64,0	47,0	30,22	20,1	19,1	17,6
6	Kacang-kacangan	108,0	73,9	125,58	68,7	66,7	67,7
7	Gula	108,0	128,1	102,02	91,8	90,4	90,0
8	Sayur & buah	129,0	110,6	110,53	127,0	116,7	111,6
9	Lain-lain	64,0	37,1	26,15	51,7	50,8	50,9
JUMLAH		2.150,0	2.149,5	2.090,17	2.151,1	2.047,8	2.054,4

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per kapita/hari, menunjukkan bahwa konsumsi beras perlu diturunkan, adapun konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, jenis konsumsi kelompok pangan hewani juga dapat diperoleh dari produk perikanan. Konsumsi kelompok pangan hewani,

khususnya ikan pada masyarakat Jawa Tengah pada periode 2017 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

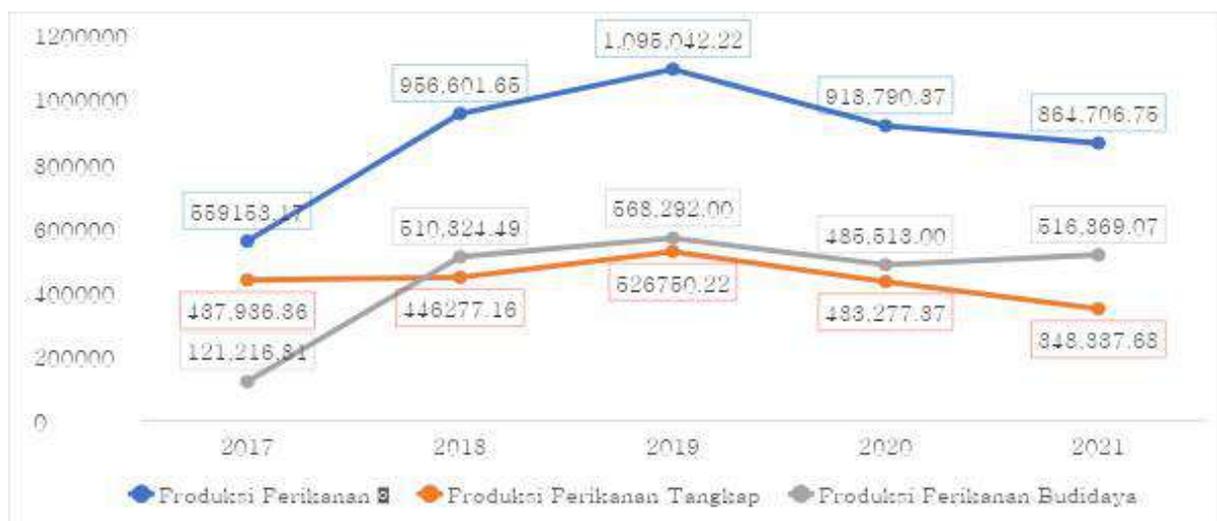


Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.39.

Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Produksi perikanan secara luas ditopang oleh perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada perikanan tangkap di Jawa Tengah terdapat 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sedangkan pada perikanan budidaya terdapat 10 (sepuluh) loka perikanan budidaya dan aktifitas masyarakat. Produksi perikanan total selama tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.40.

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Produksi perikanan tangkap, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan perikanan, PPP yang ada di Jawa Tengah secara umum memiliki kriteria yang sudah sesuai, namun seiring dengan meningkatnya jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan maka diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan, juga perbaikan atau pembangunan *breakwater* (penahan gelombang) dengan panjang yang sesuai.

Sementara dari sisi sumber daya manusianya khususnya pada nelayan terdapat jaminan resiko yang diberikan berupa Asuransi Nelayan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Dari tahun 2016 sampai dengan 2021 telah diberikan bantuan premi asuransi sebanyak 141.457 kepada nelayan dari total nelayan sebanyak 171.248 orang. Bantuan tersebut bersumber dari APBN dan APBD. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 50 klaim dengan nilai 1.216.262.959 rupiah dan pada tahun 2021 sebanyak 12 klaim dengan nilai 201.846.000 rupiah. Dari data tersebut diketahui bahwa masih ada sejumlah nelayan yang belum memiliki jaminan perlindungan.

Tabel 2.73.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		PPP TEG ALSARI	PPP KARIM UNJAWA	PPP TASIK AGUNG	PPP BAJOMULYO	PPP MORODEMAK	PPP TAWANG	PPP KLIDANGLO	PPP WONOKERTO	PPP ASEMDOYONG	PPP LARANGAN	PPP LOHGE
<i>Fasilitas</i>	<i>Standar</i>											
Tambatlabuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal/Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16,3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdapat	Perusahaan	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada

KRITERIA TEKNIS :		PPP TEG ALSARI	PPP KARIM UNJAWA	PPP TASIK AGUN G	PPP BAJO MULYO	PPP MORO DEMAK	PPP TAWANG	PPP KLIDANGLO R	PPP WONOKERTO	PPP ASEMDOYONG	PPP LARANGAN	PPP LOHGENDING
Industri Pengolahan Ikan	an / UPI mikro											
Industri Penujangan Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada perikanan budidaya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa Pemerintah Provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan, namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai serta penurunan kualitas dan kuantitas induk Nila, Lele, dan Gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Salah satu hal yang berperan penting dalam peningkatan produksi perikanan adalah lestariannya ekosistem perikanan yang ditopang dengan rehabilitasi mangrove dan Terumbu Karang Buatan (TKB). Kebijakan rehabilitasi mangrove tercantum dalam dokumen Pergub No. 24 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan realisasi rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan oleh cabang dinas kelautan di wilayah timur, wilayah barat dan wilayah selatan tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.74.**Realisasi Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang Tahun 2016-2021**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Penanaman Mangrove (Ha)	8,26	14,20	10,20	19.6	6.4	9
2.	Luas Terumbu Karang Buatan (Ha)	7,99	7,47	6,48	-	-	-
3.	Jumlah Bibit Mangrove yang ditanam (Bibit)	-	-	-	433.700	77.350	162.500
4.	Penenggelaman terumbu karang Buatan (Unit)	-	-	-	24	-	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Namun di sisi lain, masih terdapat kerusakan ekosistem di wilayah pesisir yang ditunjukkan dengan masih terjadinya abrasi dan akresi yang menyebabkan terjadi perubahan garis pantai pada pesisir Jawa Tengah, hal ini menjadi tantangan yang patut mendapat perhatian dalam pengelolaan perikanan di Jawa tengah. Berikut data luasan abrasi dan akresi di Jawa Tengah dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2.75.**Data Luasan Abrasi dan Akresi di Jawa Tengah Tahun 2016-2021**

No	Nama Kabupaten/Kota	Luasan Abrasi (Hektar)			Luasan Akresi (Hektar)		
		2013-2017	2017-2021	Perubahan (+/-)	2013-2017	2017-2021	Perubahan (+/-)
1	Kab Brebes	2.391,95	2.387,53	- 4.42	850,74	850,74	0,00
2	Kota Tegal	29,07	29,08	+ 0.01	14,26	14,26	0,00
3	Kab Tegal	68,78	68,78	0,00	43,14	43,18	+ 0.04
4	Kab Pemasang	139,16	138,85	- 0.31	168,26	168,26	0,00
5	Kab Pekalongan	39,95	40,25	+ 0.30	8,26	8,26	0,00
6	Kota Pekalongan	26,30	25,33	- 0.967	3,13	3,13	0,00
7	Kab Batang	66,35	67,32	+ 0.97	36,66	36,66	0,00
8	Kab Kendal	187,33	206,50	+ 19.17	382,95	355,54	- 27.41
9	Kota Semarang	1.919,57	1.944,32	+ 24.75	264,46	266,35	+ 1.89
10	Kab Demak	2.218,23	2.215,27	- 2.96	389,30	389,30	0,00
11	Kab Jepara	438,44	447,37	+ 8.93	73,37	93,41	+ 20.04
13	Kab Pati	360,97	360,97	0,00	200,50	200,50	0,00
14	Kab Rembang	71,78	71,18	- 0.60	166,77	177,17	+ 10.40
Total Pantura		7.957,88	8.002,76	+ 44.88	2.601,80	2.606,76	+ 4.96
1	Kab Cilacap	598,19	600,17	+ 1.98	963,06	985,30	+ 22.24
2	Kab Kebumen	40,21	40,41	+ 0.2	142,05	142,62	+ 0.57
3	Kab Purworejo	0,28	0,22	- 0.06	66,74	66,23	- 0.51

No	Nama Kabupaten/Kota	Luasan Abrasi (Hektar)			Luasan Akresi (Hektar)		
		2013-2017	2017-2021	Perubahan (+/-)	2013-2017	2017-2021	Perubahan (+/-)
4	Kab Wonogiri	9,96	10,21	+ 0.25	1,22	1,03	- 0.19
Total Pansela		648,64	651,00	+ 2.36	1.173,07	1.195,18	+ 22.11
Total Keseluruhan		8.606,52	8.653,76	+ 47.24	3.774,87	3.801,95	+ 27.08

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada pengolahan, secara umum masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi. Berikut data Unit Pengolahan Ikan yang ada di Jawa Tengah:

Tabel 2.76.
Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Jawa Tengah

No	Pelaku Usaha	Potensi
1	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan skala mikro dan kecil	8.064 Unit
2	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan skala menengah besar	166 Unit
3	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Nonpangan	100 Unit
4	Data Coldstorage	106 Unit

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sedangkan pada kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan diketahui terdapat 2.113 (Kelompok Usaha Bersama) di perikanan laut dengan rincian 1.875 KUB laut dan 238 KUB PUD (Perairan Umum Daratan), sementara pada perikanan budidaya terdapat 2.972 pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) (*data sementara dari 21 kab/kota) yang terdiri dari 206.661 RTP (Rumah Tangga Perikanan) dengan total 258.594 pembudidaya ikan, dan pada pengolahan perikanan data Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang difasilitasi menjadi koperasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.77.
Poklahsar yang di Fasilitas Kelembagaan Menjadi Koperasi

NO	NAMA KELOMPOK	KABUPATEN/ KOTA
1	Koperasi Asap Indah	Kabupaten Demak
2	Kelompok PIJARMAS	Kabupaten Demak
3	Poklahsar Bumi Kartini Mina	Kabupaten Jepara
4	Poklahsar Mina Jaya I	Kabupaten Pekalongan
5	Poklahsar Mina Jaya II	Kabupaten Pekalongan
6	Poklahsar Mina Jaya III	Kabupaten Pekalongan
7	Poklahsar Mina Jaya IV	Kabupaten Pekalongan
8	Koperasi Mina Satya Panembangan	Kabupaten Banyumas
9	Poklahsar Ummi Mandiri Panembangan	Kabupaten Banyumas

NO	NAMA KELOMPOK	KABUPATEN/ KOTA
10	Poklahsar Bunda Madani Panembangan	Kabupaten Banyumas
11	Poklahsar Berkah Momji Panembangan	Kabupaten Banyumas

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Secara umum, manajemen kelembagaan yang ada belum dapat secara optimal mewujudkan pengembangan skala usaha perikanan menjadi lebih menguntungkan yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota dan keluarganya.

c. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.78.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Indikator	Capaian
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	2,88 %
2	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	3,06 %
3	Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan (per Orang/Hari)	Rp. 616.400,89,00
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.793 orang
5	Kunjungan Wisatawan Nusantara	21.332.409 orang
6	Daya Tarik Wisata (DTW)	658 (DTW Alam 130, DTW Budaya 166 dan DTW Buatan 362)
7	SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	450 orang
8	SDM Pariwisata yang tersertifikasi	1.226 orang
9	Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia	8 Kab/Kota Kreatif

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kunjungan wisatawan 21.334.202 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 1.793 orang dengan sebaran di 10 (sepuluh) besar di Kabupaten Magelang 902 orang, Kabupaten Klaten 463 orang, Kabupaten Semarang 217 orang, Kota Semarang 77 Orang, Kota Surakarta 63 orang, Kabupaten Jepara 50 Orang, Kabupaten Pati 6 Orang, Kota Magelang 5 Orang, Kabupaten Sragen 5 Orang, dan Kabupaten Demak 3 Orang, sedangkan jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara sebesar 21.332.409 orang dengan sebaran 10 (sepuluh) besar di Kota Semarang, 2.670.281 orang, Kabupaten Klaten 1.627.714 orang, Kabupaten Banyumas

1.498.236 orang, Kabupaten Semarang 1.285.370 orang, Kabupaten Banjarnegara 1.167.841 orang, Kabupaten Purbalingga 1.061.332 orang, Kabupaten Wonosobo 1.052.729 orang, Kabupaten Rembang 871.136 orang, Kabupaten Magelang 862.955 orang, Kabupaten Demak 858.372 orang. Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia 8 Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara masih belum merata.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau terluar di Provinsi Jawa Tengah. Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga mulai tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

Gambar 2.41.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah

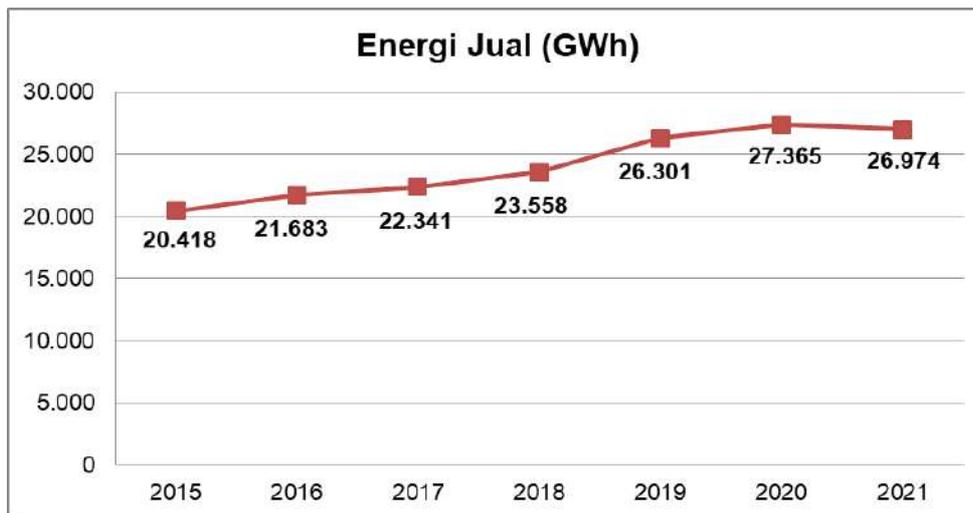
Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah terbagi menjadi 4 (empat) Sub Sistem:

- 1) Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Ungaran dan PLTGU/PLTU Tambak Lorok memasok wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes;
- 2) GITET Pedan dan GITET Kasugihan memasok wilayah Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kota Magelang (termasuk memasok DIY);
- 3) PLTU Cilacap memasok wilayah Kab. Cilacap. Kab. Banyumas. Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, dan Kab. Kebumen;
- 4) PLTD Legon Bajak 2 x 2.2 MW memasok wilayah Pulau Karimun dan Pulau Kemujan.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dan sedang dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. *Progress* pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021, yaitu:

- 1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x950 MW): *progress* 96,1 persen (per Desember 2021); Rencana COD Unit 1 pada Juli tahun 2022 dan Unit 2 pada Agustus 2022 (*estimated*);
- 2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *progress* 99,03 persen (per Desember 2021); Rencana COD Unit 5 pada Mei tahun 2022 dan Unit 6 pada September 2022 (*estimated*);
- 3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *progress* 86,22 persen (per Desember 2021); Rencana COD pada Juni tahun 2022 (*estimated*).

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26.974 GWh.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.42.

**Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 - 2021 (GWh)**

Tahun 2021 rasio elektrifikasi Jawa Tengah sebesar 99,88 persen sehingga masih terdapat 0,12 persen KK belum berlistrik. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Perkembangan rasio elektrifikasi selama tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.

Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Elektrifikasi (%)	96,30	98,52	99,88	99,88	99,88
2.	Sambungan Listrik Murah	8.338	13.092	27.225	40.173	55.280

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

Tabel 2.80.**Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.263,08	6.325,24	6.365	7.203	7.203
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.320	5.635	5.480	5.588	5.720
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,18	1,12	1,16	1,29	1,26

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa suplai energi listrik di Jawa Tengah sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan surplus, tetapi diharapkan tidak terjadi *oversupply* pembangkit listrik.

Pemenuhan kebutuhan energi Jawa Tengah masih didominasi oleh penggunaan energi fosil, yaitu sebesar 86,62 persen pada tahun 2021 yang berdampak masih tingginya emisi gas rumah kaca Jawa Tengah, namun demikian capaian positif ditunjukkan melalui peningkatan proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy (biomassa)*, gas rawa, dan panas bumi.

Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO_{2e} pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO_{2e} tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2021 sebagai berikut.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

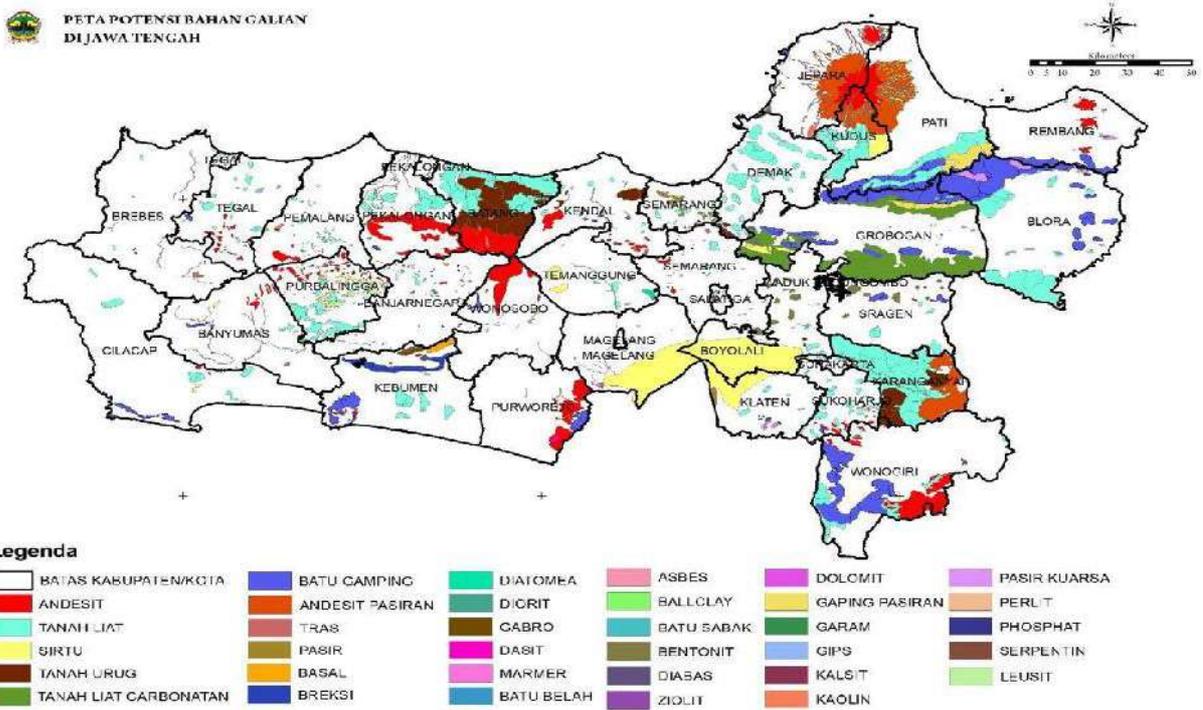
Gambar 2.43.

**Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2021**

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2021 sejumlah 2.309 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting 2.091 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting 192 desa, dan DME Mapan dengan kondisi eksisting 26 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.44.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Peningkatan aktivitas perekonomian ditengarai berpengaruh terhadap aktivitas pertambangan di Jawa Tengah yang menunjukkan kecenderungan perkembangan fluktuatif. Meskipun aktivitas pertambangan menunjukkan perkembangan fluktuatif, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016-2021.

Tabel 2.81.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luas PETI (ha)	485	484.55	489.55	133	128	85,98
Sidak PETI (obyek)	135	200	169	114	107	89
Proses Hukum (kasus)	15	34	11	9	8	23
Lokasi di Kab/Kota	29	29	29	28	26	24

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik dan setempat-setempat sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti.

Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara. tetapi juga dimungkinkan melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertibannya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut. baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi bersama Tim Terpadu telah melakukan penertiban penambangan liar. Penertiban pertambangan tanpa izin diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP). Selain itu untuk mengatasi permasalahan dalam pertambangan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan permasalahan sosial, maka perlu adanya tata cara pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*). Dengan diterapkannya GMP akan membantu industri pertambangan menjadi berkelanjutan (*sustainable mining*).

Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2016 hingga 2021 persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 41,14 persen tahun 2016 menjadi 86,20 persen tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.82.

Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Total Pemegang IUP	158	193	425	360	355	355
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	65	105	233	306	302	306
Persentase <i>Good Mining Practice</i> (%)	41,14	54,40	54,82	85,00	85,07	86,20

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2021 meningkat.

Tabel 2.83.**Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021**

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750
Jumlah pengambilan air tanah	241.303.507,5	239.481.245	267.633.695	263.724.945	269.109.632	228.463.997
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,40	3,42	3,06	3,08	3,05	3,59

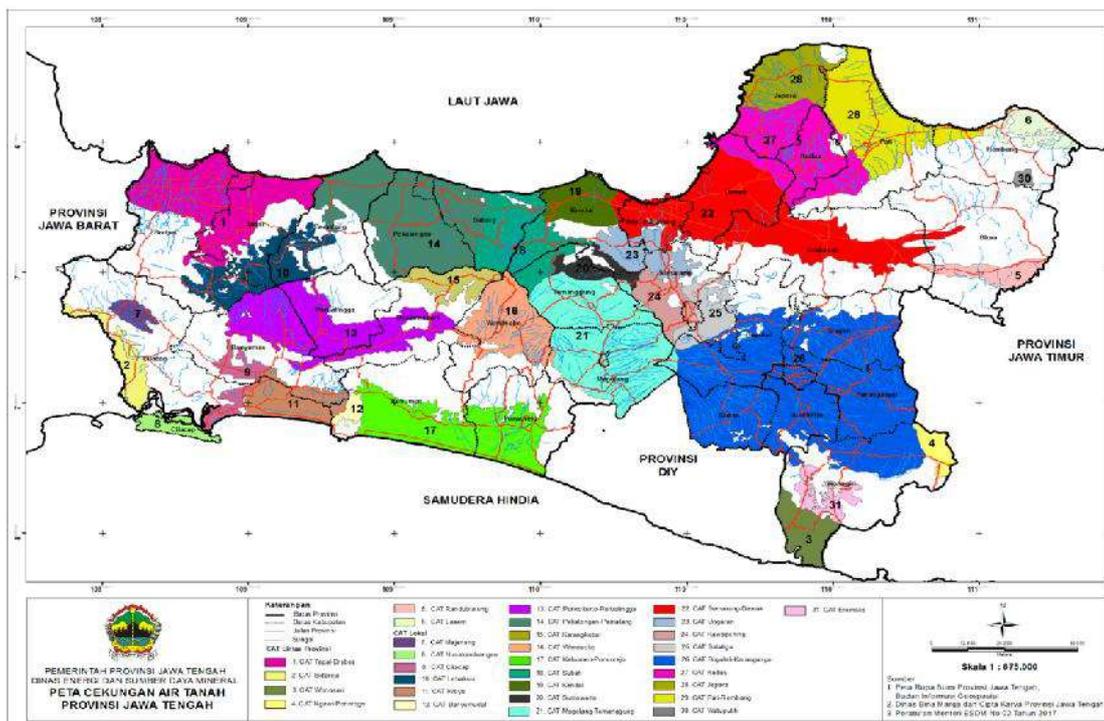
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Meskipun kecenderungan ketersediaan air tanah menurun, namun potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.37. Jawa Tengah memiliki 31 Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri dari 6 CAT merupakan lintas provinsi, 19 CAT lintas kabupaten/kota (merupakan kewenangan provinsi), dan 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota. Potensi air tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah selengkapnya ditunjukkan tabel di bawah.

Tabel 2.84.**Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah**

Jumlah CAT	Potensi Air Tanah (Juta m ³ /tahun)	
	Bebas	Tertekan
19 CAT lintas kab/kota	6.575,64	140,70
6 CAT lokal (kabupaten)	355,20	5,80
6 CAT lintas provinsi	411,15	11,30
Jumlah Total	7.341,99	157,80

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2019



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.45.

Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya visualisasi telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan sumur bor/eksplorasi, sumur resapan/dangkal, dan sumur pantau. Sumur bor/eksplorasi bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga prioritas sasaran pada daerah rawan kekeringan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dari 8.569 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 Desa/Kelurahan termasuk dalam Kelas Bahaya Tinggi kekeringan dan 2.809 Desa/Kelurahan masuk pada Kelas Bahaya Sedang kekeringan.

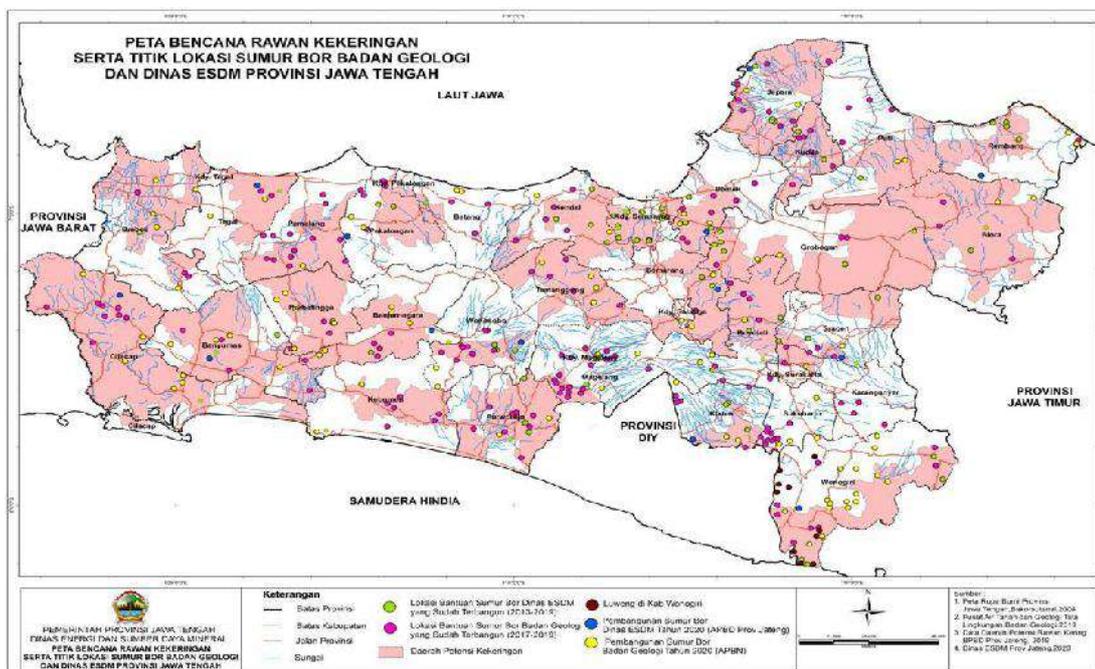
Tabel 2.85.

Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah

PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH DESA/KELURAHAN : 8.569	
KELAS BAHAYA TINGGI	7 DESA/KELURAHAN
KELAS BAHAYA SEDANG	2.809 DESA/KELURAHAN

Sumber : Katalog Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 92 unit sumur di 27 kabupaten/kota, 69 kecamatan, dan 85 desa/kelurahan, sehingga meningkatkan akses air tanah untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan. Peta sebaran lokasi bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.46.

Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan

2.1.7. Kondisi Infrastruktur Wilayah

a. Penataan Ruang

Pelayanan umum urusan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran dari RTRW.

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Namun demikian terdapat dinamika pembangunan berupa perubahan regulasi dan kebijakan. Sehingga akan dilakukan perubahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah perkembangan penyusunan RTRW pada Kabuapten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.86.

**Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
Per 8 April 2022**

No	Kabupaten	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sudah Terbit Rekom Gub/BA TKPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sebelum UU CK)	BA TKPRD Prov (Pasca UU CK)			
1	Kabupaten Cilacap						Perda 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011 - 2031 (1 April 2021)
2	Kabupaten Banyumas						
3	Kabupaten Purbalingga						Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011 - 2031 (28 Agustus 2020)
4	Kabupaten Banjarnegara						
5	Kabupaten Kebumen						
6	Kabupaten Purworejo						Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021 - 2041 (30 Juli 2021)
7	Kabupaten Wonosobo						
8	Kabupaten Magelang						

No	Kabupaten	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sudah Terbit Rekom Gub/BA TKPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sebelum UU CK)	BA TKPRD Prov (Pasca UU CK)			
9	Kabupaten Boyolali						Perda 8 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011 – 2031. (17 Juli 2019)
10	Kabupaten Klaten						Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab. Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)
11	Kabupaten Sukoharjo						Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRW Sukoharjo 2011 – 2031. (9 maret 2018)
12	Kabupaten Wonogiri						Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020 - 2040
13	Kabupaten Karanganyar						Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013 – 2032. (27 Agust 2019)
14	Kabupaten Sragen						Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011 – 2031 tanggal 5 Mei 2020
15	Kabupaten Grobogan						Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 ditetapkan 17 Des 2021
16	Kabupaten Blora						Perda 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021 - 2041 tanggal 1 April 2021
17	Kabupaten Rembang						
18	Kabupaten Pati						Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010 - 2030 tgl 1 April 2021
19	Kabupaten Kudus						Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022
20	Kabupaten Jepara						

No	Kabupaten	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sudah Terbit Rekom Gub/BA TKPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sebelum UU CK)	BA TKPRD Prov (Pasca UU CK)			
21	Kabupaten Demak						Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Demak Tahun 2011 - 2031 tanggal - 28 Feb 2020
22	Kabupaten Semarang						
23	Kabupaten Temanggung						
24	Kabupaten Kendal						Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011 - 2031 tanggal 22 Mei 2020
25	Kabupaten Batang						Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019 - 2039. (26 Des 2019)
26	Kabupaten Pekalongan						Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020 - 2040 (5 Agustus 2020)
27	Kabupaten Pemasang						Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemasang 2018 - 2038 (8 Feb 2018)
28	Kabupaten Tegal						
29	Kabupaten Brebes						Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019 - 2039. (23 Des 2019)
30	Kota Magelang						Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011 - 2031 (17 Juli 2020)
31	Kota Surakarta						Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021 - 2041 tanggal 9 Juli 2021
32	Kota Salatiga						

No	Kabupaten	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sudah Terbit Rekom Gub/BA TKPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sebelum UU CK)	BA TKPRD Prov (Pasca UU CK)			
33	Kota Semarang						Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011 - 2031
34	Kota Pekalongan						Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009 - 2029
35	Kota Tegal						Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011 - 2031 tanggal 24 Feb 2021
JUMLAH		35	28	7	35	24	24
%		100	80	20	100	68,57	68,57

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, (8 April 2022)

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah menyelesaikan Perdarevisi RTRW Kabupaten/Kota adalah sebanyak 24 Kabupaten/Kota. Selanjutnya guna percepatan pelaksanaan pembangunan Kawasan telah ditetapkan Undang undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyenggaraan Penataan Ruang, dimana dalam peraturan perundangan tersebut mengamanatkan kabupaten/kota untuk penyusunan RDTR dalam rangka mendukung kemudahan investasi dan perijinan. Berikut adalah perkembangan penyusunan RDTR pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.87.
Update Status RDTR Di Kabupaten/Kota
Per 8 April 2022

No	Kabupaten	Penyusunan	Proses Persub Atr	Proses Fasilitasi	Perda/Perkada Baru	Keterangan
KAB BANYUMAS						
1	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto					Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039
2	RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas					
3	RDTR Kecamatan Sokaraja					
KOTA SALATIGA						
1	RDTR Kota Salatiga					Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
KAB SUKOHARJO						
1	RDTR Kec Sukoharjo					Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 - 2039
2	RDTR Kec Kartasura					Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 - 2039
3	RDTR Kec Grogol					Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol

No	Kabupaten	Penyusunan	Proses Persub Atr	Proses Fasilitasi	Perda/Perkada Baru	Keterangan
						Tahun 2020 - 2039
	KAB BOYOLALI					
1	RDTR Kec Sawit					Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)
2	RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo					
	KAB SRAGEN					
1	RDTR Perkotaan Sragen					Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
2	RDTR OSS Kawasan Kota Industri Sambungmacan-Gondang					
	KAB PEMALANG					
1	RDTR Kaw Perkotaan Pemasang					proses Persub ATR
	KAB BATANG					
1	RDTR Kec Limpung					
2	RDTR Kec Tulis					Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 - 2040
3	RDTR Gringsing					
	KOTA SEMARANG					
1	RDTR Kec Tugu					belum melakukan pengajuan terkendala dengan RTRW Kota Semarang
	KAB PEKALONGAN					

No	Kabupaten	Penyusunan	Proses Persub Atr	Proses Fasilitasi	Perda/ Perkada Baru	Keterangan
1	RDTR Kec Kedungwuni					Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
	KAB PURBALINGGA					
1	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga					Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari					
	KAB JEPARA					
1	RDTR Kec Jepara					Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)
	Kab PURWOREJO					
1	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo					Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo- Kutoarjo Tahun 2022-2041
	KAB KUDUS					
1	RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo					
	KAB KLATEN					

No	Kabupaten	Penyusunan	Proses Persub Atr	Proses Fasilitasi	Perda/Perkada Baru	Keterangan
1	RDTR Kecamatan Karangdowo					
2	RDTR Kecamatan Gantiwarno					
3	RDTR Kecamatan Bayat					
	KAB. TEMANGGUNG					
1	RDTR Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh					
	KAB CILACAP					
1	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap					Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Kroya					
3	RDTR Kawasan Perkotaan Maos					
4	RDTR Kawasan Perkotaan Majenang					
5	RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur					
6	RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja					
16 Kab/Kota		32	16	14	13	13

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, (8 April 2022)

Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007, mewajibkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen. Amanat tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ruang perkotaan yang nyaman bagi masyarakat. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebesar 8,85 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan. Berikut adalah capaian rata - rata luasan RTH Publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.88.**Rata - Rata Luasan RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Capaian RTH (%)	Luas Wilayah (Ha)
1	Kota Magelang	24.22	16,060
2	Pemalang	16.72	1,118,030
3	Rembang	16.33	887,130
4	Kota Tegal	15.12	39,680
5	Wonosobo	14.41	981,410
6	Kota Surakarta	12.51	46,010
7	Blora	12.34	1,821,590
8	Grobogan	11.70	2,013,860
9	Kebumen	11.00	1,211,740
10	Banjarnegara	10.03	1,023,730
11	Kudus	9.92	425,150
12	Brebes	9.62	1,902,370
13	Magelang	9.30	1,102,930
14	Kota Salatiga	8.33	57,360
15	Temanggung	7.56	837,710
16	Batang	7.51	788,650
17	Karanganyar	7.40	775,440
18	Purworejo	7.30	1,091,490
19	Kota Semarang	6.99	373,780
20	Semarang	6.73	950,210
21	Cilacap	6.48	2,124,470
22	Kota Pekalongan	6.35	45,250
23	Klaten	6.17	658,220
24	Sukoharjo	6.15	489,120
25	Purbalingga	5.89	677,550
26	Wonogiri	5.80	1,793,670
27	Banyumas	5.79	1,335,300
28	Tegal	5.70	876,100
29	Pati	5.67	1,489,190
30	Sragen	5.57	941,540
31	Demak	5.49	900,120
32	Kendal	5.43	1,118,130
33	Boyolali	4.96	1,008,450
34	Jepara	4.88	1,059,250
35	Pekalongan	4.53	837,000

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2021

Selanjutnya seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi saat ini, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Tengah sebesar 74,34 persen. Angka ini

tentu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 30.845,20 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,80 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,27 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,94 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik dan Jalan Non Status (NS) sepanjang 109,82 km yang merupakan bagian dari Jalur JJLS Jawa Tengah. JJLS merupakan jaringan jalan strategis yang menghubungkan PKW Cilacap – Yogya, dan merupakan jaringan jalan pulau terluar negara yang berbatasan dengan Australia. JJLS di ruas Kebumen – Cilacap juga dapat berperan menjadi tanggul mitigasi penanggulangan bencana tsunami yang mengancam wilayah di sepanjang pantai selatan.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2021 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 999,483 km atau 41,56 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89.

Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2021

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	km	%	km	%	Km	%	
Nasional	606,27	39,81	796,33	52,29	111,52	7,32	8,80	0,58	1.522,92
Provinsi*)	965,61	40,15	1.219,45	50,71	219,68	9,14	0,00	0,00	2.404,74
Kabupaten/Kota*)	15.384,87	56,32	7.185,34	26,31	2.660,98	9,74	2.083,46	7,63	27.314,65
Jumlah Jateng	16.956,74	54,27	9.201,13	29,45	2.992,19	9,58	2.092,26	6,70	31.242,31
Jalan Non Status	80,88	75,65	28,94	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82
Jalan Tol	330,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71

Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik meningkat dari 89,60 persen pada tahun 2017 menjadi 90,20 persen pada tahun 2018, namun terus mengalami penurunan hingga 40,15 persen pada akhir tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90.**Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

Tahun	Kondisi							
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
2017	2.154,745	89,60	222,956	9,27	25,140	1,05	1,900	0,08
2018	2.169,076	90,20	196,145	8,16	39,520	1,64	0,000	0,00
2019	2.041,459	84,89	244,111	10,15	119,171	4,96	0,000	0,00
2020	1.852,191	77,02	312,125	12,98	240,425	10,00	0,000	0,00
2021	965,605	40,15	1.219,454	50,71	219,682	9,14	0,000	0,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91.**Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2021								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	762,50	81,23	78,49	8,36	60,51	6,45	37,20	3,96	938,69
2	Banyumas	772,26	51,21	431,48	28,61	149,78	9,93	154,49	10,24	1.508,00
3	Batang	256,39	46,41	173,38	31,39	84,51	15,30	38,13	6,90	552,42
4	Blora	458,94	37,90	317,88	26,25	117,85	9,73	316,17	26,11	1.210,84
5	Boyolali	438,45	64,67	121,85	17,97	69,33	10,23	48,37	7,13	678,00
6	Brebes	310,11	43,67	238,87	33,63	84,45	11,89	76,77	10,81	710,19
7	Cilacap	849,59	66,94	140,92	11,10	143,39	11,30	135,31	10,66	1.269,20
8	Demak	196,00	45,95	157,29	36,88	51,73	12,13	21,51	5,04	426,52
9	Grobogan	530,27	57,78	188,65	20,56	79,18	8,63	119,67	13,04	917,77
10	Jepara	247,13	28,34	520,88	59,72	102,89	11,80	1,24	0,14	872,14
11	Karanganyar	437,54	41,81	420,58	40,19	145,71	13,92	42,68	4,08	1.046,51
12	Kebumen	584,11	60,82	167,52	17,44	115,41	12,02	93,32	9,72	960,36
13	Kendal	521,66	67,72	157,54	20,45	34,88	4,53	56,25	7,30	770,33
14	Klaten	481,96	67,32	202,04	28,22	23,10	3,23	8,78	1,23	715,89
15	Kudus	334,82	52,38	254,88	39,87	37,39	5,85	12,18	1,91	639,26
16	Magelang	775,83	77,52	113,19	11,31	90,77	9,07	21,04	2,10	1.000,83
17	Pati	518,94	61,97	129,05	15,41	128,00	15,29	61,39	7,33	837,38
18	Pekalongan	384,70	57,43	139,01	20,75	50,10	7,48	96,08	14,34	669,90
19	Pemalang	441,20	57,62	81,62	10,66	79,75	10,41	163,17	21,31	765,74
20	Purbalingga	605,55	68,19	161,55	18,19	55,89	6,29	65,10	7,33	888,09
21	Purworejo	321,21	41,76	316,19	41,10	30,85	4,01	101,00	13,13	769,25
22	Rembang	443,38	68,98	97,39	15,15	15,50	2,41	86,48	13,45	642,75
23	Semarang	469,36	63,98	202,04	27,54	33,90	4,62	28,33	3,86	733,63

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2021								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
24	Sragen	800,64	78,47	65,01	6,37	86,07	8,44	68,53	6,72	1.020,25
25	Sukoharjo	142,37	23,53	394,30	65,16	66,49	10,99	1,96	0,32	605,12
26	Tegal	650,54	76,78	92,98	10,97	43,84	5,17	59,91	7,07	847,27
27	Temanggung	440,78	67,76	140,01	21,52	48,25	7,42	21,44	3,30	650,48
28	Wonogiri	1.043,76	75,86	169,02	12,28	141,91	10,31	21,20	1,54	1.375,88
29	Wonosobo	103,94	10,40	490,55	49,09	163,92	16,40	240,87	24,10	999,28
30	Kota Magelang	70,35	59,13	39,45	33,16	8,19	6,88	1,00	0,84	118,97
31	Kota Pekalongan	96,54	62,93	27,03	17,62	9,80	6,39	20,04	13,06	153,41
32	Kota Salatiga	275,67	81,69	40,70	12,06	19,24	5,70	1,85	0,55	337,46
33	Kota Semarang	726,34	86,48	49,68	5,91	33,04	3,93	30,84	3,67	839,90
34	Kota Surakarta	83,36	38,88	103,52	48,28	27,03	12,61	0,50	0,23	214,41
35	Kota Tegal	124,99	54,01	82,20	35,52	21,84	9,44	2,40	1,04	231,44
	JUMLAH	15.701,16	58,33	6.506,72	24,17	2.454,48	9,12	2.255,18	8,38	26.917,54

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2021

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2021, panjang jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥ 7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 999,483 km atau mencapai 41,56 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis.

Tabel 2.92.**Kondisi Lebar Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)
1	4 m	129,460	5,38
2	5 m	298,050	12,39
3	6 m	978,042	40,67
4	7 m	810,773	33,72
5	8 – 9 m	96,135	4,00
6	> 9 m	92,281	3,84
Total		2.404,741	100,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

c. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan pada tahun 2021 sebesar 90,32 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 88,23 persen. Sedangkan untuk perdesaan, cakupan pelayanan akses air minum pada tahun 2021 sebesar 83,42 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 81,98 persen. Untuk cakupan layanan sanitasi pada tahun 2021 sebesar 88,67 persen yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 90,72 persen karena terjadi kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan tidak ada pembangunan baru.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria.

Tabel 2.93.**Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Air Minum						
	- Perkotaan (%)	80,45	80,98	84,15	86,82	88,23	90,32
	- Perdesaan (%)	72,80	72,80	74,55	76,71	81,98	83,42
2	Sanitasi (%)	77,07	80,00	81,50	89,57	90,72	88,67

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pengelolaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelolanya dimana kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94.

Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Kab/Kota	Akses Air Minum Perkotaan	Akses AirMinum Perdesaan	Kondisi SPAM PERKOTAAN PDAM (Buku BPPW 2021)			Kondisi BPSPAM		Akses Sanitasi Air Limbah	Kondisi Sanitasi		
			Kapasitas Produksi	Idle Capacity (lt/dt)	Status Kinerja	Jmlh BPSPAM	Fungsi Baik		Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jmlh KPP
Cilacap	91,24	66,14	809,12	110,88	Sehat	165	149	89,84	Tritih Lor	Beroperasi	1
Banyumas	82,73	71,55	974,67	159,31	Sehat	192	182	88,83	Gunung Tugel	Tidak	30
Purbalingga	97,08	92,58	544,42	204,08	Sehat	167	166	93,18	-	-	2
Banjarnegara	92,89	96,19	101,84	33,17	Kurang Sehat	194	190	66,88	-	-	2
Kebumen	100,00	86,00	300,00	140,00	Sehat	179	174	93	Kali gending	Beroperasi	14
Purworejo	94,71	95,76	237,66	69,34	Sehat	222	216	87,78	Jetis	Tidak	17
Wonosobo	93,53	82,97	1.067,67	349,33	Sehat	176	176	70,09	Wono-rejo	Beroperasi	n/a
Magelang	92,08	89,51	849,09	193,51	Sehat	234	227	90,68	-	-	12
Boyolali	94,70	64,11	511,00	202,00	Sehat	187	187	98,23	Winong	Tidak	32
Klaten	93,59	92,14	512,83	-	Sehat	155	147	100,00	Jomboran	Beroperasi	50
Sukoharjo	82,39	88,00	275,43	84,57	Sehat	88	88	97,91	Mojorejo	Beroperasi	10
Wonogiri	97,45	91,29	440,13	76,13	Sehat	185	182	99,18	-	-	33
Karanganyar	88,10	71,00	659,00	12,00	Sehat	154	150	99,01	Mojo Gedang	Beroperasi	30
Sragen	82,98	68,33	765,89	163,9	Sehat	160	160	84,49	Tanggan	Beroperasi	20
Grobogan	87,12	80,23	384,00	67,00	Sehat	186	176	81,62	Ngembak	Beroperasi	n/a
Blora	93,14	72,20	192,20	95,00	Sehat	186	180	95,5	Temurejo	Beroperasi	20
Rembang	85,86	83,88	181,66	84,34	Sehat	175	163	96,11	Kerep	Beroperasi	21
Pati	84,08	68,64	305,72	102,88	Kurang Sehat	204	191	100,00	Suko-harjo	Beroperasi	22
Kudus	98,00	98,00	428,30	260,60	Sehat	87	83	100,00	Tanjungrejo	Beroperasi	50
Jepara	84,89	95,59	627,10	106,40	Kurang Sehat	88	88	72,65	Bande-ngan	Beroperasi	95
Demak	85,64	80,05	509,86	173,74	Sehat	184	174	98,15	Kali-kondang	Tidak	6
Semarang	98,45	97,45	386,00	80,00	Sehat	178	177	93,54	-	-	39
Temanggung	95,72	72,00	444,77	108,23	Sehat	199	199	88,27	Krang-gan	Konstruksi	n/a
Kendal	93,96	94,51	670,19	73,11	Sehat	154	154	84,44	-	-	13
Batang	80,96	87,44	467,79	97,21	Sehat	183	181	81	Randu Kuning	Beroperasi	4
Pekalongan	85,67	89,28	203,75	0	Sehat	188	188	61,22	Wiradesa	Konstruksi	4
Pemalang	92,83	87,01	424,78	358,63	Sehat	180	168	71,71	Pegong-soran	Beroperasi	3
Tegal	66,78	61,87	365,57	46,65	Sehat	171	163	96,92	Kedung-jati	Beroperasi	n/a
Brebes	96,23	95,37	356,75	517,25	Sehat	158	152	76,20	-	-	1
Kota Magelang	96,95	0	775,16	0	Sehat	0	0	98,11	Tegal rejo	Beroperasi	21
Kota Surakarta	94,57	0	858,98	113,81	Sehat	0	0	97,2	Putri Cempo	Beroperasi	50
Kota Salatiga	87,48	0	389,78	103,58	Sehat	0	0	93,75	Ngronggo	Tidak	n/a
Kota Semarang	95,43	0	3.965,13	0	Sehat	88	85	92,94	Tambak Lor	Beroperasi	1
Kota Pekalongan	86,97	0	356,00	157	Sehat	47	43	90,16	Degayu	Beroperasi	50
Kota Tegal	87,00	0	277,33	0	Sehat	0	0	75,27	Muara Rejo	Beroperasi	8
Jawa Tengah	90,32	83,42	20.619,37	3.523,65		5.114	4.959	88,67			

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan program prioritasnya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan *backlog* rumah.

Pengertian *backlog* berdasarkan laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (<https://ppdpp.id/konsep-backlog>) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *backlog* kepemilikan dan *backlog* kependhunian. *Backlog* kependhunian merupakan perspektif untuk konsep 1 (satu) keluarga menghuni 1 (satu) rumah, sehingga menghitung *backlog* kependhunian menggunakan rumus jumlah keluarga dikurangi dengan data jumlah rumah yang tersedia. Konsep menghuni yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah tetapi menghuni rumah yang layak baik sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga. Sedangkan untuk *backlog* kepemilikan adalah berdasarkan pada presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sehingga *backlog* kepemilikan adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah milik sendiri seperti sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga.

Tabel 2.95.

Backlog Kependhunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2021

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Backlog Milik	Backlog Huni	Backlog Milik	BacklogHuni	Backlog Milik	Backlog Huni						
1	Kab.Cilacap	32.646	22.679	33.567	27.166	33.567	27.166	34.111	23.125	22.526	17.075	29.037	73.366
2	Kab.Banyumas	29.630	10.546	35.597	20.585	35.597	20.585	33.423	24.345	44.736	30.901	47.953	33.166
3	Kab.Purbalingga	11.783	9.773	17.222	12.611	17.222	12.611	11.125	8.786	7.922	4.699	201.781	263.865
4	Kab.Banjarnegara	11.453	10.066	15.998	13.472	15.998	13.472	12.192	10.331	18.299	14.116	17.261	44.477
5	Kab.Kebumen	20.562	17.866	32.727	28.145	32.727	28.145	28.297	24.976	28.397	22.483	17.808	13.461
6	Kab.Purworejo	27.732	22.961	42.034	35.907	42.034	35.907	32.790	25.503	32.200	25.976	26.772	21.180
7	Kab.Wonosobo	10.512	7.309	17.374	13.274	17.374	13.274	16.849	12.882	16.047	11.028	16.047	11.028

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Backlog Milik	Backlog Huni	Backlog Milik	BacklogHuni	Backlog Milik	Backlog Huni						
8	Kab.Magelang	24.509	16.179	26.327	20.343	26.327	20.343	31.944	24.903	33.259	22.981	55.735	17.205
9	Kab.Boyolali	8.506	6.610	18.443	12.296	18.443	12.296	16.071	9.757	19.935	16.073	19.075	15.843
10	Kab.Klaten	27.504	21.953	46.233	37.381	46.233	37.381	43.185	39.418	38.820	32.972	51.993	45.235
11	Kab.Sukoharjo	30.408	19.762	45.826	28.524	45.826	28.524	44.202	28.604	45.798	23.418	21.852	17.398
12	Kab.Wonogiri	8.099	6.441	13.596	10.417	13.596	10.417	11.662	9.692	7.094	6.044	69.931	68.606
13	Kab.Karanganyar	9.892	3.749	15.296	11.247	15.296	11.247	32.653	24.576	24.198	16.944	19.662	17.632
14	Kab.Sragen	9.063	6.172	24.891	22.439	24.891	22.439	17.038	14.313	18.156	16.427	43.997	18.782
15	Kab.Grobogan	17.407	16.544	24.885	19.207	24.885	19.207	20.734	20.339	16.211	14.602	15.187	13.828
16	Kab.Blora	10.468	7.382	17.298	14.118	17.298	14.118	23.472	20.845	18.263	15.633	17.010	14.530
17	Kab.Rembang	8.916	6.963	9.345	7.824	9.345	7.824	7.411	5.804	9.748	8.749	43.152	43.152
18	Kab.Pati	17.879	16.568	23.240	20.447	23.240	20.447	15.515	13.516	16.547	14.479	20.426	16.820
19	Kab.Kudus	12.377	10.536	15.271	11.077	15.271	11.077	23.326	14.470	18.549	12.982	19.313	14.014
20	Kab.Jepara	18.930	16.949	31.954	26.733	31.954	26.733	20.669	18.628	27.554	24.872	29.352	26.514
21	Kab.Demak	14.617	11.867	15.832	12.934	15.832	12.934	14.634	12.565	17.955	14.195	15.795	12.717
22	Kab.Semarang	27.936	15.597	20.992	10.294	20.992	10.294	25.991	15.958	25.107	16.006	39.813	37.301
23	Kab.Temanggung	10.482	7.989	11.566	8.316	11.566	8.316	10.154	6.231	11.927	8.831	54.193	49.095
24	Kab.Kendal	21.203	19.408	27.457	22.103	27.457	22.103	24.458	20.025	20.982	17.093	26.958	23.800
25	Kab.Batang	7.402	5.774	13.732	11.734	13.732	11.734	11.414	9.762	10.986	9.387	8.698	7.601
26	Kab.Pekalongan	20.518	18.788	32.780	29.183	32.780	29.183	13.480	8.593	23.825	18.516	103.300	103.300
27	Kab.Pemalang	22.652	19.940	44.367	35.865	44.367	35.865	44.389	40.135	48.802	42.771	45.335	41.240
28	Kab.Tegal	66.837	61.195	72.469	70.231	72.469	70.231	78.245	68.920	64.604	56.942	161.943	150.751
29	Kab.Brebes	58.604	55.283	71.536	66.400	71.536	66.400	79.803	71.429	43.631	39.929	43.765	39.133
30	Kota Magelang	10.628	4.644	12.775	7.236	12.775	7.236	12.572	6.617	11.443	5.388	12.376	6.188
31	Kota Surakarta	54.313	26.496	60.653	33.446	60.653	33.446	57.627	29.602	65.282	32.914	63.665	34.427
32	Kota Salatiga	13.510	4.376	19.772	6.732	19.772	6.732	18.215	5.182	15.574	4.918	11.259	9.441
33	Kota Semarang	142.504	75.941	163.643	94.962	163.643	94.962	164.448	100.313	154.725	80.195	83.532	100.905
34	Kota Pekalongan	16.629	14.192	21.994	17.208	21.994	17.208	23.484	20.049	21.473	17.426	19.542	14.512
35	Kota Tegal	25.625	20.434	30.142	24.290	30.142	24.290	23.796	19.213	22.431	19.195	22.292	19.959
	Jumlah Total	861.738	618.932	1.127.202	844.226	1.126.837	844.148	1.079.379	809.410	1.023.008	736.159	1.495.810	1.440.472

Sumber : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT PP) Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan kepenghunian Rumah (backlog kepenghunian) cukup besar di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.

2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

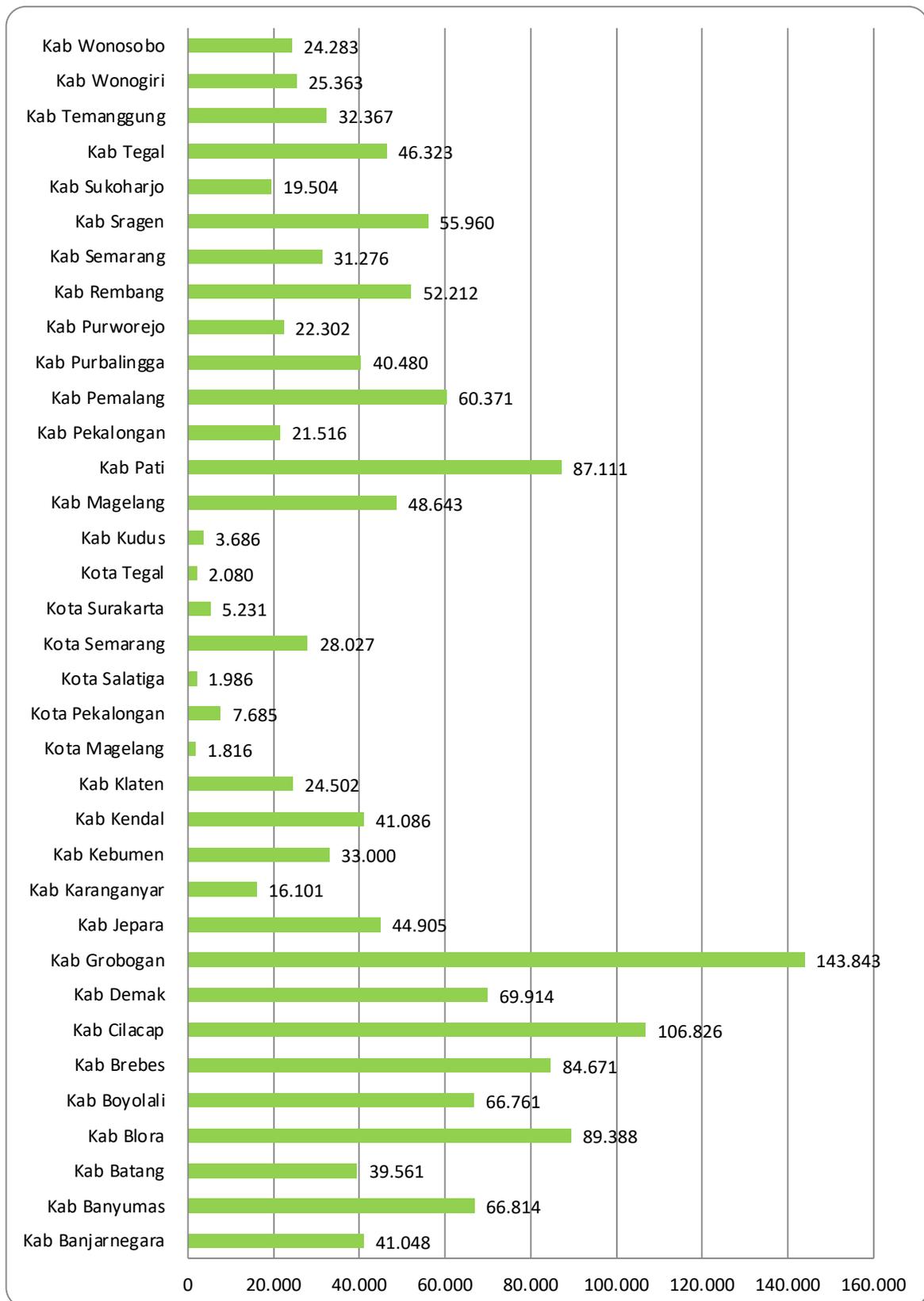
Tabel 2.96.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016–2021

Tahun	Sumber Pembiayaan				Penanganan melalui penganggaran (Unit)	Verivali lapangan
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2016	5.830	3.601	8.070	1.045	18.546	263.597
2017	12.377	19.587	30.274	704	62.942	
2018	25.087	21.691	16.841	939	64.558	
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	102.570	277.888
2020	38.781	10.298	22.883	3.268	75.230	55.949
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	56.879	63.735
Total	151.423	89.678	116.089	23.535	380.725	661.169

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2021

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, terdapat 1.582.024 unit RTLH yang menjadi *baseline* data RPJMD *by name by address* (BNBA) calon penerima bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi mulai tahun 2019. Peningkatan kualitas RTLH dari sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR dan lain-lain dari tahun 2019-2021 sebanyak 234.679 unit, sedangkan 397.572 unit merupakan hasil verifikasi dan validasi data lapangan tahun 2019 sampai dengan 2021. Sehingga secara keseluruhan baik melalui intervensi sumber pembiayaan dan verivali lapangan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, RTLH sudah tertangani sebanyak 632.251 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2021, dari *baseline* data RPJMD masih terdapat sisa RTLH yang harus ditangani sebanyak 767.107 unit rumah, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pertumbuhan data jumlah RTLH pada kurun tahun waktu tahun 2018-2021 berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) tahun 2018 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019-2021 yaitu sebanyak 845.813 unit RTLH yang 126.278 unit diantaranya telah ditangani baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH, yang menyisakan. Sehingga sesuai *baseline* data dari PBDT tahun 2015 dan pembaruan tahun 2018-2021 dari DTPFMOTM dan DTKS maka pada akhir tahun 2021 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 1.486.642 unit, dengan persebaran sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos

Gambar 2.47.
Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Cilacap	148	36	42	282	360
2	Banyumas	115	14	15	37	66
3	Purbalingga	45	6	15	244	265
4	Banjarnegara	26	9	6	9	24
5	Kebumen	31	11	8	45	64
6	Purworejo	23	6	0	42	48
7	Wonosobo	46	29	69	33	131
8	Magelang	352	20	27	321	368
9	Boyolali	12	16	14	23	53
10	Klaten	14	0	3	14	17
11	Sukoharjo	10	1	0	7	8
12	Wonogiri	37	5	21	31	57
13	Karanganyar	26	1	11	26	38
14	Sragen	49	9	2	40	51
15	Grobogan	78	36	9	284	329
16	Blora	29	20	20	31	71
17	Rembang	11	6	0	18	24
18	Pati	66	7	9	50	66
19	Kudus	56	5	173	7	185
20	Jepara	58	10	18	25	53
21	Demak	15	58	10	479	547
22	Semarang	24	5	82	38	125
23	Temanggung	72	17	11	33	61
24	Kendal	60	15	15	182	212
25	Batang	21	1	1	6	8
26	Pekalongan	7	0	0	13	13

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
27	Pemalang	16	5	5	1	11
28	Tegal	43	84	98	374	556
29	Brebes	83	40	42	101	183
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	15	7	11	7	25
32	Kota Salatiga	4	0	0	8	8
33	Kota Semarang	272	55	112	300	467
34	Kota Pekalongan	11	1	0	2	3
35	Kota Tegal	14	5	9	90	104
	TOTAL	1895	540	858	3203	4.601

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

3. Penanganan Kawasan Kumuh

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data RPJMN, di Provinsi Jawa Tengah terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 3.982,88 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 612,44 Ha. Dari hasil identifikasi dan pembaruan penetapan Kawasan Permukiman Kumuh oleh Bupati/Walikota, terdapat *updating* data Luas Kawasan kumuh di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.98.**Perbandingan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Jawa Tengah**

No	Uraian	<10 ha	10-15 ha	>15 ha	Total
1	SK s.d tahun 2019	2100,15	1207,22	3936,30	7243,67
2	SK s.d tahun 2020	2162,85	1398,76	4348,05	7909,66
3	SK s.d tahun 2021	1.594,52	1.329,29	5.104,80	8.028,61
	RPJMN 2014-2019	1028,12	612,44	2342,31	3982,88

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, kawasan permukiman kumuh terdelineasi seluas 3.004,59 ha, dengan kawasan permukiman kumuh kewenangan untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh oleh Pemerintah Provinsi (10-15 ha) seluas 474,66 ha. Akumulasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh di Jawa Tengah yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2021 tercatat mencapai 2.241,44ha, sehingga sisa kawasan permukiman kumuh RPJMD menyisakan luasan sebesar 763,15ha. Dengan demikian, capaian penanganan kumulatif sampai dengan tahun 2021 didapatkan sebesar 74,60 persen sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99.**Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

Kewenangan Penanganan	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Realisasi Tahunan (Ha)			Total s.d Tahun 2021	Sisa Kawasan Kumuh 2021 (Ha)	Capaian per Tahun (%)	Capaian Kumulatif (%)
		2019	2020	2021				
Kab/Kota(< 10 Ha)	629,01	226,46	181,21	75,39	483,06	145,95	11,99	76,80
Provinsi (10-15 Ha)	474,66	200,06	35,54	58,42	294,02	180,64	12,31	61,94
Pusat > 15 Ha	1900,92	350,58	750,33	363,45	1.464,36	436,56	19,21	77,03
TOTAL	3004,59	777,10	967,08	497,26	2.241,44	763,15	16,55	74,60

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2021

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2021 pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan
RPJMD 2018-2023 Sampai Dengan Tahun 2021
Di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	RPJMD 2018- 2023	Tahun SK	Penanganan s.d Tahun 2021	Sisa Luasan Kumuh s.d 2021			Total Sisa Luasan Kumuh s.d 2021
					< 10 Ha	10-15 Ha	> 15 Ha	
1	Kab. Cilacap	6.04	2014	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Kab. Banyumas	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kab. Purbalingga	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Kab. Banjarnegara	0.00	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kab. Kebumen	144.05	2016	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kab. Purworejo	86.17	2014	10.23	15.09	10.00	50.85	75.94
7	Kab. Wonosobo	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Kab. Magelang	15.18	2014	1.71	13.47	0.00	0.00	13.47
9	Kab. Boyolali	48.26	2014	39.30	8.96	0.00	0.00	8.96
10	Kab. Klaten	50.09	2014	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Kab. Sukoharjo	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Kab. Wonogiri	13.07	2016	10.64	0.00	2.43	0.00	2.43
13	Kab. Karanganyar	31.84	2015	25.32	4.06	2.46	0.00	6.52
14	Kab. Sragen	1.27	2015	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Kab. Grobogan	56.55	2014	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Kab. Blora	18.02	2014	0.01	7.97	10.04	0.00	18.01
17	Kab. Rembang	54.88	2017	0.49	25.66	28.73	0.00	54.39
18	Kab. Pati	46.81	2017	34.49	2.23	10.09	0.00	12.32
19	Kab. Kudus	109.87	2017	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kab. Jepara	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kab. Demak	284.92	2016	216.25	2.41	10.24	56.02	68.67
22	Kab. Semarang	236.10	2014	171.15	0.00	1.91	63.04	64.95
23	Kab. Temanggung	288.00	2017	192.99	39.10	32.49	23.42	95.01
24	Kab. Kendal	0.00	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Kab. Batang	20.25	2014	18.09	0.00	0.00	2.16	2.16
26	Kab. Pekalongan	57.33	2018	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Kab. Pemalang	732.90	2018	678.58	12.50	6.68	35.14	54.32
28	Kab. Tegal	437.78	2016	166.45	12.48	52.92	205.93	271.33

No	Kabupaten/ Kota	RPJMD 2018- 2023	Tahun SK	Penanganan s.d Tahun 2021	Sisa Luasan Kumuh s.d 2021			Total Sisa Luasan Kumuh s.d 2021
					< 10 Ha	10-15 Ha	> 15 Ha	
29	Kab. Brebes	66.80	2018	54.94	1.47	10.39	0.00	11.86
30	Kota Magelang	1.86	2018	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Kota Surakarta	0.00	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Kota Salatiga	196.56	2016	193.74	0.56	2.26	0.00	2.82
33	Kota Semarang	0.00	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Kota Pekalongan	0.00	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Kota Tegal	0.00	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3.004,59		2241.44	145.96	180.64	436.56	763.15

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, (Status: Akhir Desember 2021)

Sementara itu, sesuai dengan pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhadap keputusan Bupati/Walikota terkait penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adanya peninjauan ulang luasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh di Provinsi Jawa Tengah menjadi berkembang secara dinamis, sehingga pendataan kawasan permukiman kumuh perlu dilakukan setiap tahun.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota, sampai dengan akhir tahun 2021 perkembangan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 9.917,28 yang terdiri dari 3.004,59 Ha merupakan *baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan 6.912,69 Ha yang merupakan penambahan luasan kumuh berdasarkan pembaruan SK sampai dengan tahun 2021. Penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2021 seluas 3.479,20 Ha. Penanganan kawasan permukiman kumuh yang berada pada lokasi *baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 2.241,44 Ha dan yang berada pada lokasi penambahan kawasan kumuh seluas 1.237,76 Ha. Dengan demikian, sisa kawasan permukiman kumuh tahun 2021 masih 6.438,08 Ha, yang terdiri dari 763,15 Ha merupakan sisa *baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan 5.674,93 Ha merupakan sisa dari penambahan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021.

e. Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2021 mencapai 2.312 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1.138 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2021 sejumlah 1.000 orang berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 3.288 orang.

Tabel 2.101.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.671	1.853	1.080	750	1.138	2.312
2	Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran}	3	4	4	4	0	1
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	1.065	1.228	2.038	2.798	3.288	1.000

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

f. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2021, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 unit. Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah diperiksa keandalannya sejumlah 21 unit. Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.102.
Jumlah Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Studi Keandalan

No	Instansi	Jumlah
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	1
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
3	Dinas Sosial	1
4	Dinas Ketenagakerjaan	1
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	1
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
8	Dinas Kesehatan	1
9	Kantor Satpol PP	1
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
12	RSUD Tugurejo	1
13	RSUD KRT Wongsonegoro	1
14	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1
15	RSJD Surakarta	1
16	RSJD Soedjarwadi Klaten	1

No	Instansi	Jumlah
17	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	1
18	Dinas SDA dan Tata Ruang	1
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	1
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
21	RSUD Kelet	1
	TOTAL	21

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

g. Pertanian

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pertanian yaitu Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu izin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Berdasarkan data yang ada sampai tahun 2021 terdapat 16.553 Bidang. Pada Tahun 2021 terdapat, penetapan lokasi aktif yang terdiri dari Pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api, Pembangunan *Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU)*, Pembangunan bendungan, Pembangunan Kampus dan Pembangunan Jaringan Irigasi yang kesemuanya mempunyai batas waktu selama 2 (dua) tahun dan apabila pengadaan tanah terkendala sampai lebih dari 2 (dua) tahun maka akan dilakukan perpanjangan selama 1(satu) tahun bila belum selesai juga maka akan diperbaharui dengan izin lokasi yang baru. Umumnya kendala disebabkan (1) kesiapan instansi yang memerlukan tanah, (2) prosedur tukar menukar

Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf, tanah perhutani dan tanah negara lain yang berbeda, serta(3) kesiapan pendanaan.

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertahankan luasan Tanah Kas Desa (TKD) yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengusahakan tanah pengganti dengan luasan yang terus bertambah. Demikian juga dalam mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan dengan memberikan insentif berupa sertifikasi gratis kepada masyarakat. Diharapkan selain masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahannya, status lahannya juga lebih baik/bersertifikat. Namun hal ini masih belum didukung dengan regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan animo masyarakat petani menjadikan tanahnya sebagai LP2B. Dukungan pemerintah daerah dalam menjaga LP2B juga masih rendah, terlihat dari masih minimnya kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda Penetapan Lokasi LP2B diwilayahnya. Dalam kurun waktu 2016 – 2018 kegiatan sertifikasi lahan mendapatkan alokasi dana yang cenderung naik, namun sejak tahun 2019 – 2021 cenderung menurun karena wabah Covid-19.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat Provinsi.

h. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah, diantaranya terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

1. Perhubungan Darat

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2021 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) Namun Terminal Tipe B Nampurejo dalam proses penghapusan (Revisi SK Gub Nomor 551.22/31 Tahun 2019), dan 178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota).



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.48.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.103.

Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah terminal tipe A	18	17	17	17	19	19
2.	Jumlah terminal tipe B	24	24	24	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	78	77	151	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		120	120	118	219	221	221

Keterangan:

- Sumber Terminal Tipe A = Kementerian Perhubungan,
- Sumber Terminal Tipe B = Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,
- Sumber Terminal Tipe C = BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah,

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal berdasarkan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2018 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 8 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

Tabel 2.104.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	Ada
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan		Ada	Purwodadi	Ada
	Wanarakuti				
7	Kab. Jepara		Ada		Ada
8	Kab. Kudus	Jati	Ada		
9	Kab. Pati		Ada		Ada
	Subosukowonosraten				
10	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
11	Kab. Boyolali		Ada	Pengagung	Ada
12	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
13	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
14	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno	Ada
15	Kab. Sragen		Ada	Pilangsari	Ada
16	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Bregasmalang				
17	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
18	Kab. Tegal				Ada
19	Kota Tegal	Tegal	Ada		Ada
20	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan			Kajen	Ada
22	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Barlinmascakeb				
24	Kab. Banjarnegara		Ada	Banjarnegara	Ada
25	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
26	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada*
27	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada
28	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		Ada
	Purwomanggung				
29	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo**	Ada
30	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
31	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	Ada
32	Kota Magelang	Tidar	Ada		
33	Kab. Temanggung			Madureso	Ada

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Banglor				
34	Kab. Rembang		Ada		Ada
35	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada
J U M L A H		19 Terminal	26 Terminal	24 Terminal	27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

Terminal Kutoarjo mulai dibangun pada tahun 2021, dilanjutkan pada tahun 2022 dan masih direncanakan lanjutan pembangunannya di tahun 2023. Adapun Terminal Nampurejo dalam proses penghapusan karena sudah ada Terminal baru di Kutoarjo. Pada tahun 2020, terdapat 178 buah terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang tidak mempunyai Terminal Tipe C.

Tabel 2.105.

Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2021

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2020*	
KEDUNGSEPUR			
1.	Kab. Kendal	4	Sukorejo, Boja* , Weleri dan Kendal* (* : SK Bupati Kendal No. 231/211/2008)
2.	Kab. Demak	2	Karangawen dan Pucanggading (Mranggen)
3.	Kab. Semarang	9	Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Sruwen Tengaran, Suruh, Pos Terminal Bringin, Pos Terminal Kopeng Getasan, Palbapang dan Bandungan
4.	Kota Semarang	2	Cangkiran dan Gunungpati (SK Walikota Semarang No. 551.22/1169 Tahun 2016)
5.	Kota Salatiga	1	Tamansari
6.	Kab. Grobogan	5	Sulursari, Wirosari , Angkotdes Purwodadi, Godong dan Gubug
WANARAKUTI			
7.	Kab. Jepara	5	Welahan, Pecangaan, Jepara, Bangsri dan Kelet (SK Bupati Jepara No. 551.22/172 Tahun 2016)
8.	Kab. Kudus	4	Jetak, Kalirejo, Getas, Singocandi
9.	Kab. Pati	3	Kembang Joyo*, Juwana dan Tayu (* : SK Bupati Pati No. 551.22/2174 2016, Juwana dan Tayu belum ada SK)
SUBOSUKO WONOSRATEN			
10.	Kab. Sukoharjo	4	Sukoharjo, Bekonang, Watukelir dan Tawangarsi
11.	Kab. Boyolali	13	Karanggede , Guwo, Klewor, Nogosari, Simo, Cepogo, Ampel, Sunggingan, Randuasri, Tambak, Tamansari, Bangak dan Selo
12.	Kota Surakarta	2	Kadipiro dan Semanggi

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2020*	
13.	Kab. Karanganyar	10	Matesih, Palur , Gondangrejo, Jongke, Jambangan, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Jatipuro
14.	Kab. Wonogiri	18	Wonogiri, Ngadirojo , Baturetno, Batuwarno, Tirtomoyo, Pracimantoro, Wuryantoro, Eromoko , Giri Belah, Manyaran, Slogohimo , Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Jatisrono, Jatiroto , Sidoharjo dan Girimarto
15.	Kab. Sragen	7	Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang dan Gemolong
16.	Kab. Klaten	7	Penggung, Cawas, Teloyo, Pasar Klaten, Bendogantungan, Tulung, dan Delanggu
BREGASMALANG			
17.	Kab. Brebes	7	Ketanggungan, Brebes , Bumiayu, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan dan Losari
18.	Kab. Tegal	3	Dukuhsalam, Adiwerna dan Trayeman (SK Bupati Tegal No. 769 Tahun 2017)
19.	Kota Tegal	0	Belum ada Terminal Tipe C
20.	Kab. Pemalang	8	Belik, Moga, Comal, Randudongkal , Grosir Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan dan Warungpring
PETANGLONG			
21.	Kab. Pekalongan	5	Wiradesa, Kedungwuni, Doro, Kesesi dan Sragi
22.	Kab. Batang	5	Bandar, Bawang, Reban, Limpung, dan Blado
23.	Kota Pekalongan	0	Belum ada Terminal Tipe C
BARLINGMASCAKEB			
24.	Kab. Banjarnegara	4	Mandiraja, Karangobar, Kalibening & Banjarnegara (Angkudes)
25.	Kab. Purbalingga	4	Bukateja, Kejobong, Jompo, dan Penaruban
26.	Kab. Banyumas	3	Wangon* , Ajibarang* dan Baturaden** (*sesuai SK Bupati Banyumas No. 480/324 Tahun 2016), ** : Terminal Baturaden dikelola oleh pariwisata)
27.	Kab. Cilacap	8	Karangpucung, Sidareja, Majenang , Kawunganten, Adipala , Sampang, Wanareja dan Kroya (SK Bupati Cilacap No. 551.2/591/17/2015)
28.	Kab. Kebumen	3	Kebumen, Gombong (bus dan non bus) dan Karanggayam (Perdesaan)
PURWOMANGGUNG			
29.	Kab. Purworejo	3	Kutoarjo , Kongsis dan Terminal non bus Pasar Kutoarjo
30.	Kab. Wonosobo	4	Sawangan, Terminal Keselamatan Jalan Reco, Mendolo dan Stasiun (meliputi Pasar Induk/TPR Bhayangkara/Jl. Resimen (SK Bupati Wonosobo No. 551.21/630/2019)
31.	Kab. Magelang	6	Borobudur, Salaman, Secang , Grabag, Tegalrejo dan Bandongan
32.	Kota Magelang	1	Magersari

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2020*	
33.	Kab. Temanggung	7	Maron, Kerkop, Ngadirejo , Candiroto , Kranggan, Pingit dan Plaza
	BANGLOR		
34.	Kab. Rembang	7	Rembang, Lasem, Pamotan, Sarang, Sulang, Sumber dan Gunem (SK Bupati Rembang No. 551.4/0984/2016)
35.	Kab. Blora	4	Todanan, Kunduran, Ngawen, dan Wulung
	Jumlah se-JATENG	178	

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, 2022

Kondisi terminal Tipe B di Jawa Tengah pada tahun 2021 sebagian besar layak operasi. Untuk Terminal Nampurejo Purworejo dalam proses penghapusan dengan mulai beroperasinya Terminal Kutoarjo.

Tabel 2.106.

Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
1.	Kota Semarang	1. Penggaron	Layak Operasi	Milik Pemprov
2.	Kab. Grobogan	2. Purwodadi	Layak Operasi	Milik Pemprov
3.	Kab. Blora	3. Gagak Rimang	Layak Operasi	Milik Pemprov
4.	Kab. Demak	4. Bintoro	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
5.	Kab. Batang	5. Banyu Putih	Layak Operasi	Milik Pemprov
6.	Kab. Pekalongan	6. Kajen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7.	Kab. Temanggung	7. Madureso	Layak Operasi	Milik Pemprov
8.	Kab. Magelang	8. Drs. Prayitno	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
9.	Kab. Boyolali	9. Penggung	Layak Operasi	Milik Pemprov (2019)
10.	Kab. Sragen	10. Pilangsari	Layak Operasi	Milik Pemprov
11.	Kab. Karanganyar	11. Tegalgede	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
		12. Tawangmangu	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
12.	Kab. Wonogiri	13. Jatisrono	Layak Operasi	Milik Pemprov
		14. Baturetno	Layak Operasi	Milik Pemprov
		15. Pracimantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
		16. Purwantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
13.	Kab. Purworejo	17. Kutoarjo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov (2020)

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
		18. Nampurejo	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso, Proses Penghapusan
14.	Kab. Sukoharjo	19. Kartosuro	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
		20. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
15.	Kab. Banjar	21. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
16.	Kab. Purbalingga	22. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
17.	Kab. Brebes	23. Bumiayu	Layak Operasi	Milik Pemprov
		24. Tanjung	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sesuai dengan Sasaran Strategis (UTAMA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B tahun 2021 dengan rata-rata nilai 79,05.

b) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Kewenangan Provinsi

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2021 mencapai 25,06 persen, selalu terdapat peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2021 sebesar 9,09 persen yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.107.

Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	6,04	7,48	7,74	12,18	16,93	25,06
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	-	3,85	3,85	4,55	4,55	9,09

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.108.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rambu Jalan	2.133	280	375	600	-	478
2.	RPPJ	179	50	50	60	-	46
3.	APILL	7	-	8	6	-	2
4.	Guardrail	2.000	560	448	290	30	176
5.	Marka Jalan	80.470	15.835	12.001	102.000	-	52.444
6.	LPJU	205	263	263	513	150	174

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

c) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2021 terdapat 22.521 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 3.750 jiwa meninggal dunia, 77 orang luka berat, 25.847 orang luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 16.836.435.000,-.

Tabel 2.109.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Satuan	Jumlah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Laka Lantas	Kejadian	19.884	17.522	19.016	25.962	21.396	22.521
2.	Jumlah Korban MD	Jiwa	4.437	4.126	4.116	4.141	3.508	3.750
3.	Korban Luka Berat	Orang	200	114	97	96	48	77
4.	Korban Luka Ringan	Orang	23.699	20.495	21.679	30.555	24.495	25.847
5.	Kerugian Materiil	Rupiah (Rp.000)	14.347.32	12.351.991	14.138.632	17.858.087	14.746.525	16.836.435

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2021

Pada tahun 2021, dari 38.336 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,80 persen atau 307 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

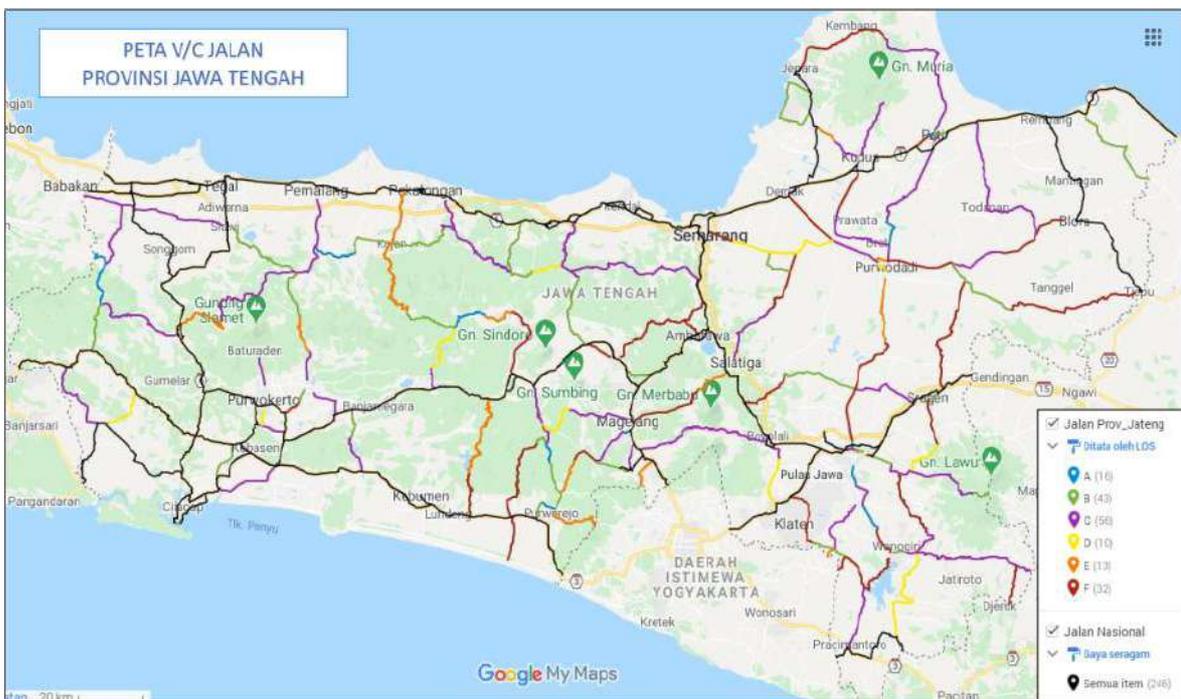
Sebagai gambaran kepadatan lalu lintas di jalan kewenangan provinsi, setidaknya terdapat 13 ruas kewenangan provinsi yang masuk dalam kriteria rawan macet jika dilihat dari aspek perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan (VCR).

Tabel 2.110.

Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2021

No.	Ruas jalan	Status	Fungsi	VCR 2020	2021		
					Kap.	Vol.	VCR
1.	Purbalingga - Bobotsari	P	K2	0,18	3.137,20	606	0,19
2.	Semarang - Godong	P	K2	0,78	2.778,44	2.142	0,77
3.	Nguter - Wonogiri	P	K2	0,41	2.874,34	1.198	0,42
4.	Sukorejo (Blimbing) - Boja - Cangkiran	P	K2	0,37	2.474,40	1.000	0,40
5.	Kudus - Margoyoso	P	K2	0,73	2.711,54	1.874	0,68
6.	Krettek - Kepil	P	K2	0,34	2.724,39	963	0,35
7.	Sukoharjo - Weru - Watu Kelir	P	K2	0,17	2.482,48	373	0,18
8.	Purwodadi - Wirosari	P	K2	0,48	2.749,73	800	0,29
9.	Patean (Kdt) - Parakan	P	K2	0,27	2.664,88	709	0,27
10.	Palur - Karanganyar	P	K2	0,14	5.232,60	725	0,14
11.	Kalimanah - Purbalingga (Bmu)	P	K2	0,36	4.005,82	1.308	0,33
12.	Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt)	P	K2	0,49	2.564,01	1.233	0,48
13.	Jati - Klambu (Ptb)	P	K2	0,40	2.567,11	1.068	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.49.

Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR)

d) Perijinan Trayek Angkutan Umum

Pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah, utamanya angkutan pariwisata relatif mengalami stagnansi selama beberapa tahun terakhir, selain merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.111.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	269	269	269	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	3.757	4.422	4.666	4.666	4.666	3.093
4.	Jumlah bus (unit)	12.686	12.689	12.737	12.737	12.737	12.737
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pelayanan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun adalah jumlah angkutan wisata (kendaraan) dan jumlah bus (unit). Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut:

1. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
2. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
3. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
4. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
5. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
6. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP dan Bandara Adi Sumarmo - Sragen oleh DAMRI namun saat ini pelayanannya dihentikan sementara.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (UTAMA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, Kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan nilai 0,23.

e) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp

pada tahun 2021 melayani penumpang sejumlah 98.173 orang yang meningkat dibandingkan tahun 2020 sejumlah 72.962 orang. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah penumpang menjadi 112.378 orang dibandingkan tahun 2020 sejumlah 98.998 orang kenaikan jumlah penumpang tersebut karena penurunan level PPKM mulai Bulan September 2021.

Tabel 2.112.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*)	90.818	68.015	75.525	75.679	72.962	98.173
2.	Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	1.498	3.939	1.796	2.725	0	0
3.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara -Karimunjawa) (orang)	82.791	82.913	103.617	102.684	98.998	112.378
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal -Karimunjawa) (orang)	3.053**)	13.853	off	off	off	off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi). Pada tahun 2020 telah dilakukan identifikasi aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah, dimana setidaknya terdapat 5 aktivitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota. Sehingga setidaknya diperlukan 10 sisi dermaga (plengsengan) untuk meningkatkan keselamatan aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan trayek lintas penyeberangan dan fasilitasi proses perijinannya.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (UTAMA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, Kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Penyeberangan Sungai) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan nilai 0,24.

Tabel 2.113.
Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Tegalsari (Kendal)	Non Permanen	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
		Desa Jatipurwo (Kendal)	Non Permanen	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Bojong (Kab. Tegal)	Non Permanen	Belum Ada
4.	Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusangawetan (Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Sudah Ada
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

f) Angkutan Umum Massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum massal yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.50.

Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utamanya pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi massal perkotaan pada wilayah aglomerasi.

Angkutan umum massal di kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2021 telah terdapat pelayanan di 6 (enam) koridor, yaitu Terminal Bawen Kabupaten Semarang – Stasiun Tawang Kota Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga, Terminal Mangkang Kota Semarang – Terminal Bahurekso Kabupaten Kendal, Terminal Tirtonadi Surakarta – Sumber Lawang Kabupaten Sragen via Sangiran, Stasiun Kutoarjo Purworejo Borobudur Kabupaten Magelang dan Terminal Penggaron Kota Semarang - Terminal Gubug Kabupaten Grobogan Via Godong. Pada 22 Agustus 2022 telah diresmikan perpanjangan Trans Jateng Koridor Kota Semarang - Kendal dari semula Terminal Mangkang hanya sampai Terminal Bahurekso diperpanjang sampai RTH Weleri, untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga dari kebutuhan jumlah koridor angkutan aglomerasi sejumlah 14 koridor, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan 8 (delapan) koridor.

Tabel 2.114.
Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)
		11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung)	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Adanya angkutan umum massal kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target tahun 2030 mencapai 32 persen). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Trans Jateng telah melayani total 12.259.450 orang, dengan jumlah penumpang setiap tahun terus mengalami kenaikan dari 724.320 orang di tahun 2017 menjadi 3.439.532 orang di tahun 2021.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (UTAMA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Kinektivitas Transportasi Nasional dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi sebagai berikut :

- Kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan nilai 0,10;
- Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng Tahun 2021 dengan rata-rata nilai 83,1.

Tabel 2.115.
Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di
Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2017 – 2021

No	Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)					Total 2017-2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Kedungsepur						
1.	Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	724.320	1.886.694	2.117.390	1.051.768	1.136.921	6.917.093
2.	Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019)	-	-	178.943	592.411	682.477	1.453.831
3	Terminal Penggaron - T. Gubug Via Godong (Okt.2021)	-	-	-	-	133.380	133.380
	Barlingmascakeb						
3.	Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018)	-	351.896	1.141.126	613.804	673.120	2.779.946
	Subosukowonosraten						
4.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	-	55.442	327.786	383.228
	Purwomanggung						
5.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	-	106.124	485.848	591.972
Total 5 Koridor		724.320	2.238.590	3.437.459	2.419.549	3.439.532	12.259.450

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam antisipasi kebijakan Pemerintah Pusat (Perpres 79 Tahun 2019 dan Perpres 109 Tahun 2020) untuk membangun kawasan industri terpadu di Brebes dan Batang, serta pembangunan kawasan pariwisata Borobudur diperlukan kajian kelayakan kebutuhan angkutan umum massal untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan industri.

g) Angkutan Umum Online

Mendasarkan Permen Perhubungan No. PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi, mengatur penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2021 telah diterbitkan 4 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

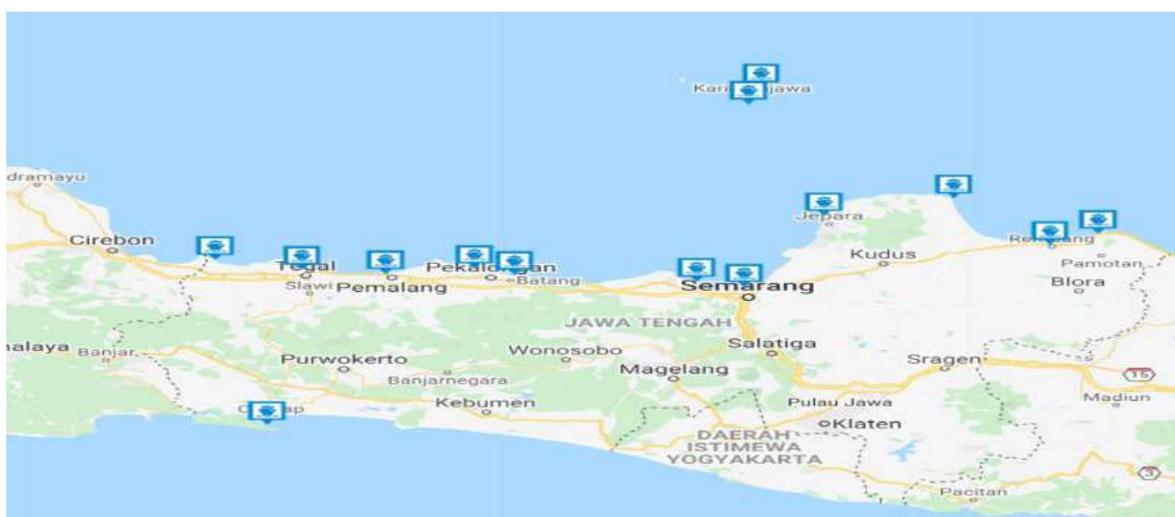
Tabel 2.116.
Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa
Khusus/Daring (Online) Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kedungsepur	266	77	1.196	405	2
2.	Bregasmalang	105	-	47	28	-
3.	Barlingmascakeb	60	12	180	219	-
4.	Subosukowonosraten	90	-	721	115	2
5.	Purwomanggung	81	-	76	235	-
6.	Petanglong	60	-	17	26	-
7.	Banglor	-	-	-	-	-
8.	Wanarakuti	-	-	23	2	-
JUMLAH		662	89	2.237	1.030	4

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2. Perhubungan Laut

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 5 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang, Juwana, dan Sluke), dan 5 Pelabuhan Pengumpan Regional dan 3 pelabuhan pengumpan lokal.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.51.
Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Tabel 2.117.
Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki dalam RIPN	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	RTRWN : Pemantapan Pel. Utama
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
3.	Tegal	Pengumpul	
4.	Batang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
5.	Sluke Rembang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
6.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	
7.	Juwana Pati	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
8.	Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Karimunjawa Jepara	Pengumpan Regional	
10.	Legon Bajak Jepara	Pengumpan Regional	
11.	Kendal	Pengumpan Regional	RTRWN : Pel. Angk. Penyeberangn Saat ini = Wil. Ker. Tanjung Emas
12.	Brebes	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
13.	Pekalongan	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
14.	Pemalang	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)

Sumber : PP 13/2017 tentang Perub. PP 26/2008 tentang RTRWN & SK Menhub. KP.432/2017 tentang RIPN

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Jumlah kunjungan kapal tahun 2021 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.634 *call*. Mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 2.663 *call*, hal ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 yang melandai mempengaruhi ekspor-impor.

Tabel 2.118.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelabuhan	9	14	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas						
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	2.001	2.791	3.410 ^{*)}	3.804	2.663	3.634
	b. GRT (GT)	15.390.022	21.819.637	24.902.093 ^{*)}	30.236.211	22.999.480	21.505.841
	c. Kargo (ton)	11.071.023	12.690.037	13.919.940 ^{*)}	14.682.120	14.185.650	4.292.136
	d. Kontainer (<i>Teus</i>)	602.473	593.575	539.158 ^{*)}	658.303	355.774	797.020
	e. Penumpang (orang)	286.106	254.947	280.142 ^{*)}	390.693	134.997	182.342

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	f. <i>Dweelling Time</i> TPKS Impor	-	5,94	4,5	4,91	3,84	3,93
	g. <i>Dweelling Time</i> TPKS Ekspor	-	2,49	3,4	2,48	2,78	3,52
3	Pelabuhan Tanjung Intan						
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	1.359	410	354**)	1.240	1.441	1.030
	b. GRT (GT)	20.764.992	4.778.416	1.971.910**)	23.713.251	28.826.775	18.658.236
	c. Kargo (ton)	6.195.006	5.889.713	6.276.236**)	16.586.884	8.524.893	7.525.056

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama tahun 2021 *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,93 hari (impor) yang mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,84 hari. Sedangkan untuk ekspor mengalami penurunan kinerja dari 2,78 hari menjadi 3,52 hari.

3. Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis yang sudah beroperasi yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora. Telah dioperasionalkan terminal penumpang baru Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas ±6 juta penumpang per tahun, atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnya.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.52.

Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2020 telah terdapat intermoda transportasi dengan adanya kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan. Jumlah

penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2021 mengalami penurunan/kenaikan fluktuatif jika dibanding dengan tahun 2020.

Tabel 2.119.

Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bandara	4	4	4	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani						
	- Penumpang domestik (orang)	3.690.633	4.239.732	4.943.701	3.678.104	1.342.341	884.970
	- Penumpang internasional (orang)	143.860	188.691	216.548	228.700	35.728	9
	- Barang domestik (kg)	22.262.578	16.844.792	29.485.686	15.788.447	9.157.070	6.763.331
	- Barang internasional (kg)	1.765.117	766.173	2.226.842	2.086.421	239.699	1.212.031
3	Bandara Adi Soemarmo						
	- Penumpang domestik (orang)	1.819.288	1.193.606	1.303.570	1.565.093	516.780	427.536
	- Penumpang internasional (orang)	100.245	57.489	60.032	155.400	17.198	15
	- Barang domestik (kg)	5.746.845	3.238.753	7.808.387	7.074.726	1.596.685	1.856.723
	- Barang internasional (kg)	2.023.610	4.316	968.226	2.982.541	-	15.158

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewandaru pada tahun 2019 melalui perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter dan perluasan Gedung terminal penumpang dari 120 m² menjadi 220 m² untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.53.

Apron, Terminal dan *Runway* Bandara Dewadaru Karimunjawa

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan. *Runway* sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil. Kondisi saat ini terutama untuk landas pacu Bandara Tunggul Wulung tidak memungkinkan untuk diperpanjang karena terdapat kendala dilapangan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2,

Gambar 2.54.

Bandara Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih diperlukan persebaran bandara untuk pemerataan pembangunan. Untuk wilayah tengah dan selatan, karena Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan *progress* pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2020 berupa proses perpanjangan *runway* menjadi 1.600 meter, pembangunan *apron*, *taxiway* dan jalan akses.

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur sedang dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, dimana sampai dengan tahun 2021 *progress* pembangunannya sampai dengan 2021 perpanjangan *runway* menjadi 1.500 meter, landas parkir dan landas hubung, gedung terminal, jalan akses dan fasilitas penunjang lainnya serta sudah operasional Bulan November 2021.

4. Perkeretaapian

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021, sepanjang 1.669,61 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,67 persen dari total panjang rel), dan 740,113 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,33 persen dari total panjang rel). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Kota Jakarta dan Kota Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan masih diperlukan lanjutan penanganan sampai dengan semua jaringan rel tuntas dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.55.

Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Di Jawa Tengah terdapat 1.369 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebagian besar terdapat di jalan kewenangan kabupaten/kota sebesar 1.304 titik atau 95,25 persen dari total perlintasan. Kondisi perlintasan terdiri dari-91 perlintasan tidak sebidang (terdiri dari 13 *fly over* dan 78 *underpass*) dan 1.262 sebidang (372 berpalang pintu/dijaga dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Perlintasan sebidang yang terletak di perkotaan yang lalu lintasnya cukup tinggi berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan. Perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.120.
Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2,85	10	43,48	6	7,06	22	5,91	1	0,11
2.	Provinsi	26	1,90	0	0,00	1	1,18	24	6,45	1	0,11
3.	Kab/Kota	1304	95,25	13	56,52	78	91,76	326	87,63	887	99,78
Jumlah		1369	100	23	100	85	100	372	100	889	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Khusus untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, terdapat 26 titik perlintasan dengan jalur rel kereta api yang terdiri dari 25 titik perlintasan sebidang dan 1 titik tidak sebidang yang tersebar di 12 kabupaten/kota yang meliputi 4 Daerah Operasi (DAOP) PT. KAI. Beberapa titik sudah mendesak memerlukan penanganan dengan perlintasan tidak sebidang karena telah menyebabkan kemacetan utamanya pada Kabupaten Grobogan dan Cilacap.

Tabel 2.121.
Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2021

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
Perlintasan Sebidang					
DAOP 3 Cirebon					
1.	Kersana – Bandungsari	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu
DAOP 4 Semarang					
2.	Wiradesa – Kelibening	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu
3.	Semarang – Godong	15&17	13+257	Kab. Demak	Berpalang Pintu (Proses Pembangunan Flyover)
4.	Tegowanu – Tanggung – Kapung	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
5.	Gubug – Kapung – Kedungjati	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
6.	Gubug – Kapung – Kedungjati	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
7.	Purwodadi – Geyer	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
8.	Purwodadi – Geyer	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
9.	Singget – Doplang – Cepu	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu
10.	Singget – Doplang – Cepu	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
11.	Kuwu – Galeh	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
DAOP 5 Purwokerto					
12.	Buntu – Kroya – Slarang	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
13.	Menganti – Kesugihan	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
14.	Menganti – Kesugihan	467	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
15.	Sidareja – Cukangleuleus	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
16.	Jl. Veteran (Cilacap)	26	21+295	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu
17.	Kutoarjo – Ketawang	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu
DAOP 6 Yogyakarta					
18.	Purwodadi – Geyer	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
19.	Purwodadi – Geyer	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
20.	Gemolong – Andong	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
21.	Sragen – Batujamus	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
22.	Karangwuni – Cawas – Jentir	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu
23.	Sukoharjo – Nguter	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
24.	Surakarta – Sukoharjo	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
25.	Palur – Karanganyar	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu
	Perlintasan Tidak Sebidang				
1	Jl. A. Yani (Surakarta)	-	-	Kota Surakarta	<i>Underpass</i>

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.122.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jml penumpang (orang)	19.711.021	18.334.400	25.624.133	24.638.063	8.318.591	4.982.954
2.	Jumlah barang terangkut (ton)	1.480.612	1.617.727	1.939.940	2.056.546	1.902.245	2.661.209
3.	Jml stasiun KA	140	140	140	106	106	115
4.	Jml Perlintasan KA di Jawa Tengah	1.395	1.317	1.369	1.168	1.369	1369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah telah dikembangkan sistem angkutan rel di wilayah perkotaan Solo Raya yaitu pengembangan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (mulai operasional Desember 2019). Jaringan KA BIAS menghubungkan Stasiun Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan (sepanjang 12,77 km) yang direncanakan diperpanjang sampai dengan Stasiun Klaten sepanjang 43,77 km.

Tabel 2.123.
Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
1.	Kedungjati – Tuntang	32	FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2.	Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Masih ada tanah warga yang proses gugatan pengadilan. Pembebasan Lahan 2,1 Km sisa 400 m ditempati 56 warga (Anggaran dampak sosial dan konstruksi APBN 2021
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Penetapan Trase 2016, Rencana : 2018 - 2023
4.	Semarang – Demak – Kudus	52	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Studi SID APBN 2021. Rencana 2021 – 2030
5.	Kudus – Pati – Rembang	60	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Rencana 2021 – 2030

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
6.	Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta : - Magelang – Yogyakarta - Magelang – Secang – Parakan	46 37	FS 2013, Kajian Trase Bedono – Secang – Magelang 2014, Rekom Gubernur 2019, Studi Kelayakan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar akses jalur kereta 2018, Studi DED APND 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali 2022. Rencana 2018 – 2024
7.	Cepu – Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
8.	Purwosari – Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
9.	Wonosobo – Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

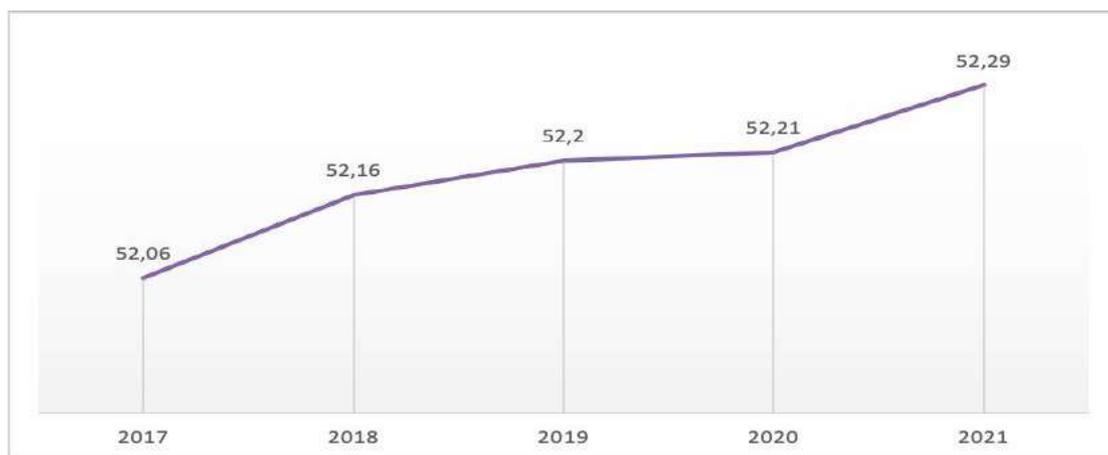
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.1.8. Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana

a. Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 930,44 km/luas DAS 4.425,36 km²) dan WS Bodri Kuto (panjang 355,03 km/luas DAS 1.647,40 km²).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2021 tercatat 52,29 persen (691,14 km dari 1.323,64 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 52,21 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.56.

Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (%)

Luasan daerah bebas genangan akibat banjir dari tahun 2016 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Dari luas total wilayah Provinsi

Jawa Tengah (3.254.412 ha), luas daerah bebas genangan banjir pada tahun 2021 seluas 3.127.360 ha (96,10 persen) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 seluas 3.122.355 ha (95,94 persen).

Tabel 2.124.

**Peningkatan Luas Daerah Bebas Genangan Akibat Banjir (Ha)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021**

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Daerah Bebas Genangan Banjir dibandingkan Luas Wilayah Prov. Jateng (ha)	3.102.600	3.107.607	3.112.611	3.117.611	3.122.355	3.127.360
Prosentase Luas bebas genangan dibandingkan luas wil prov. Jateng (%)	95,34	95,49	95,64	95,80	95,94	96,10

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

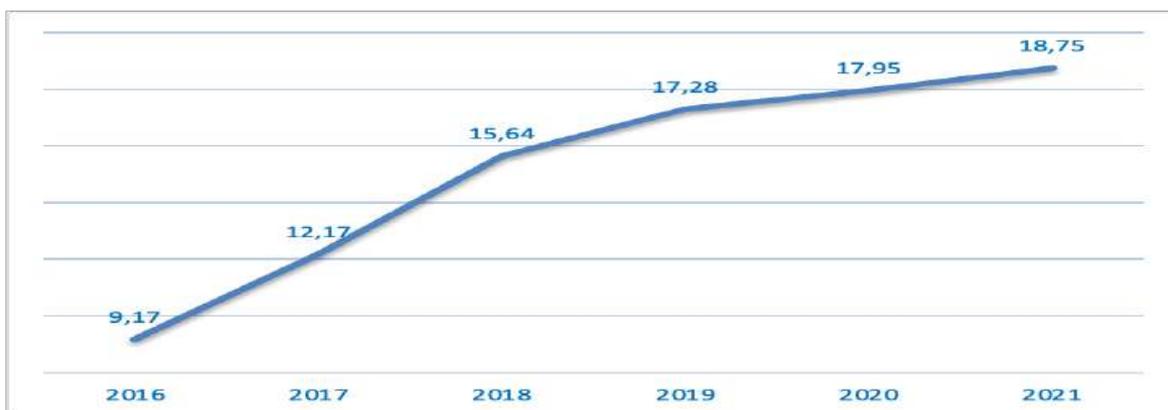
Khusus pada wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah, luas daerah rawan genangan banjir semakin berkurang, yang berarti bahwa persentase bebas genangan banjir pada daerah rawan banjir juga semakin meningkat.

Tabel 2.125.

**Penurunan Luasan Daerah Genangan Akibat Banjir (Ha) di Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021**

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total luas genangan (Ha)	30.331	29.372	28.322	27.772	27.547	27.278
Luas genangan yang bisa diturunkan tiap tahun (Ha)	1.002	1.004	1.005	550	225	269
Akumulasi luas genangan yang diturunkan	3.242	4.246	5.251	5.801	6.026	6.295

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.57.

Persentase Daerah Bebas Genangan Banjir Pada Daerah Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m³/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45 persen), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44 persen).

Tabel 2.126.

Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	33
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.542

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2021 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.127.**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865
2021	4.333	5	67.513	78	15.019	17	0	0	86.865

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan sebaran kondisi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, persentase kondisi baik irigasi tercatat ada 11 kabupaten dibawah 50 persen, 11 kabupaten antara 50 – 70 persen, serta 10 kabupaten antara 70– 95 persen. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

Tabel 2.128.**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
1	Cilacap	702	21,745	42.69	2.25	0.15	54.90
2	Banyumas	573	23,716	80.35	12.62	2.66	4.37
3	Purbalingga	255	19,159	48.00	-	31.00	21.00
4	Banjarnegara	322	16,483	70.30	10.87	8.02	10.92
5	Kebumen	283	12,260	75.17	1.23	1.55	22.04
6	Purworejo	250	9,470	21.48	25.40	28.20	24.92
7	Wonosobo	705	21,050	67.54	7.42	9.29	15.75
8	Magelang	993	35,662	52.16	18.72	14.57	14.54
9	Boyolali	255	9,821	60.77	8.46	24.23	6.54
10	Klaten	478	29,713	40.89	-	41.99	17.12
11	Sukoharjo	70	4,353	19.29	24.70	50.04	5.97
12	Wonogiri	403	28,784	72.67	6.34	6.80	14.18
13	Karanganyar	351	18,867	35.06	10.20	16.52	38.54
14	Sragen	118	12,323	78.68	-	10.30	11.02
15	Grobogan	268	20,194	24.54	18.76	41.82	14.88
16	Blora	183	13,351	51.03	14.55	12.73	21.68
17	Rembang	318	21,193	65.11	6.16	18.90	9.80
18	Pati	327	20,965	83.26	3.34	3.40	10.00
19	Kudus	231	10,295	87.90	7.12	4.98	0.00
20	Jejara	834	28,247	28.00	9.00	20.50	42.50

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
21	Demak	4	1,627	94.90	-	-	5.10
22	Semarang	666	32,687	60.01	13.11	10.59	16.29
23	Temanggung	577	17,709	45.32	-	25.58	29.09
24	Kendal	686	10,427	63.94	-	-	36.06
25	Batang	573	18,231	34.43	23.84	15.75	25.98
26	Pekalongan	339	13,818	49.19	4.00	7.34	39.47
27	Pemalang	91	7,343	70.26	9.15	11.26	9.32
28	Tegal	208	9,281	60.27	20.27	15.77	3.69
29	Brebes	449	25,731	65.08	2.97	8.49	23.46
30	Kota Salatiga	12	373	84.00	0.00	16.00	0.00
31	Kota Semarang	41	2,339	78.70	6.79	8.42	6.07
32	Kota Tegal	6	489	59.50	16.85	10.91	12.74

Sumber: Bappeda Kabupaten/ Kota Tahun 2022

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

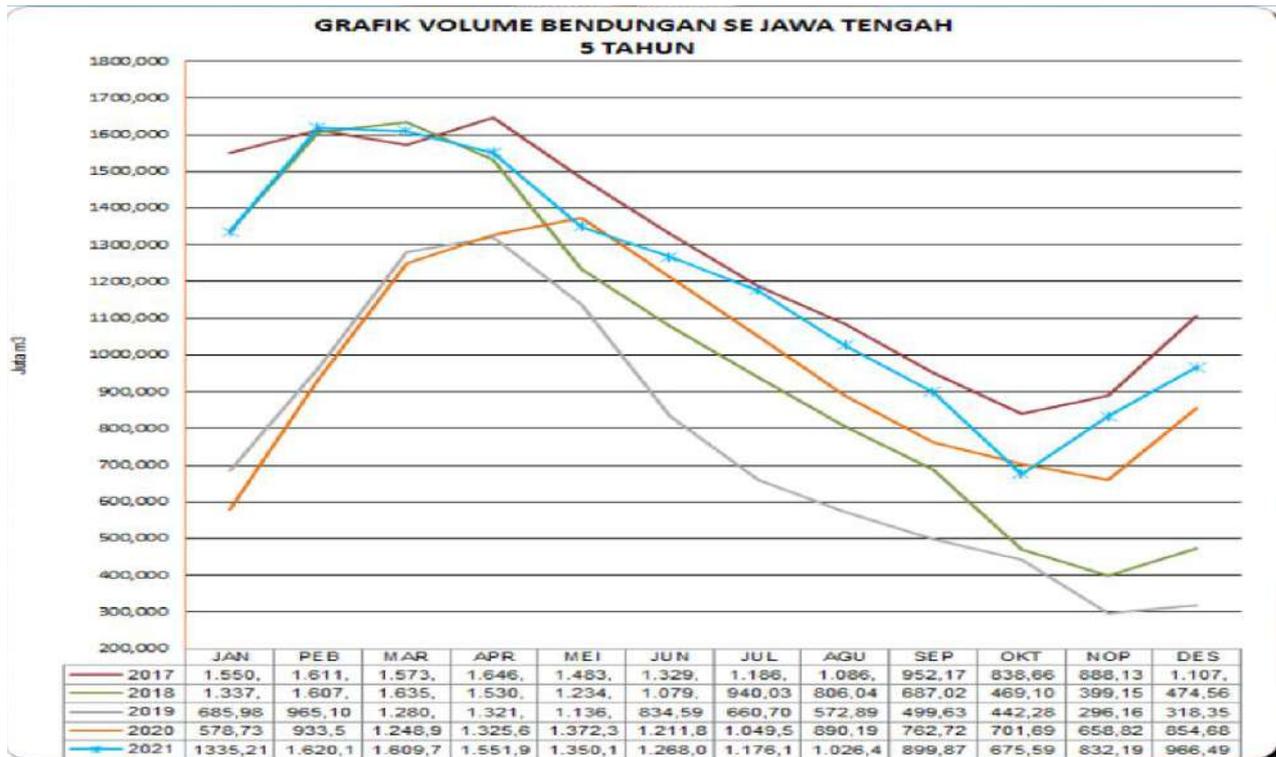
Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 45 bangunan bendungan/waduk (12 waduk besar dan 33 waduk kecil). Kebutuhan air baku khususnya air minum sejalan dengan besaran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu diharapkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat diimbangi secara positif dengan ketersediaan air baku.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2016 dari 56,49 persen menjadi tahun 2021 menjadi 61,50 persen.

Tabel 2.129.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	739,65	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33
Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	417,83	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62
Ketersediaan Air Baku (%)	56,49	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50

Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2022

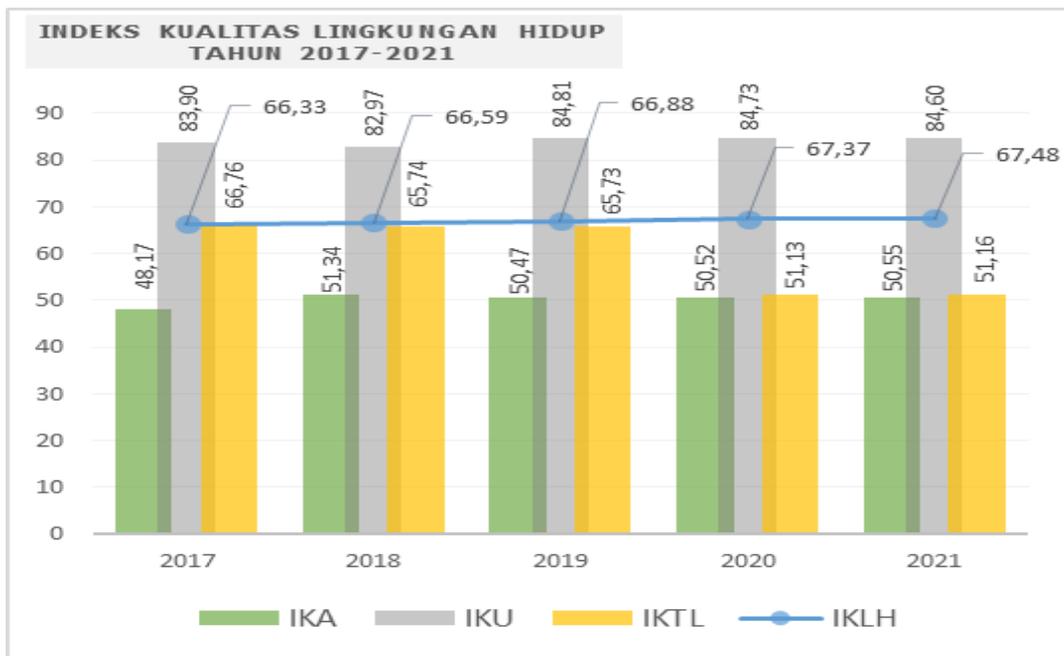
Gambar 2.58.

**Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³)
Tahun 2017 - 2021**

Gambar diatas menunjukkan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami perbaikan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

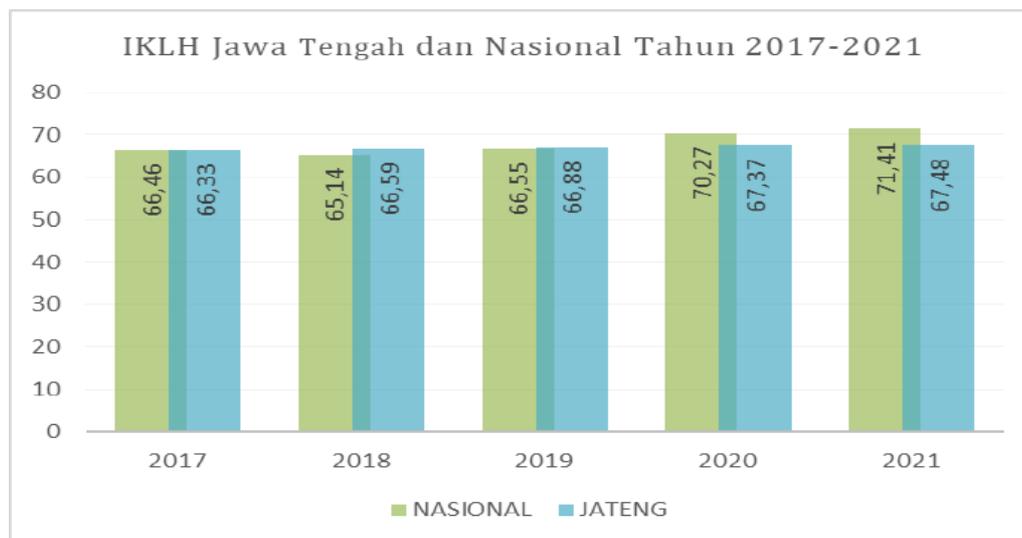
Gambar 2.59.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Tengah periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 66,33 pada tahun 2017 menjadi 67,48 pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IKLH pada predikat cukup baik (predikat IKLH $60 < \text{IKLH} \leq 70$ artinya cukup baik), dengan kenaikan selama tahun 2017-2021 sebesar 1,15 poin, mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Udara/IKU mengalami penurunan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan aktivitas pengelolaan sampah, pemakaian kendaraan bermotor, kegiatan industri, pertambangan dan lain sebagainya, dimana aktivitas tersebut menghasilkan gas buangan sehingga mencemari udara dan menurunkan kualitas udara. Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Hutan, maka terdapat perubahan parameter perhitungan. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang merupakan hasil dari upaya mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan perlindungan hutan yang didukung oleh peran serta masyarakat, BUMN kehutanan dan swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi di lahan yang berada di hulu, tengah dan hilir

DAS serta wilayah pesisir. Pada kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2020-2021), kejadian kebakaran hutan mengalami penurunan drastis, sehingga keberadaan tutupan lahan berupa hutan dapat dipertahankan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Gambar 2.60.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2021 adalah 71,41 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,48. Meningkatnya IKLH Nasional 2021 sebanyak 1,21 poin disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional.

c. Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan 9 kabupaten/kota berada pada kategori kerentanan sangat rendah (skor indeks 1), 20 kabupaten/kota dalam kategori kerentanan rendah (skor indeks 2), dan 6 kabupaten/kota berada dalam kategori kerentanan sedang (skor indeks 3). Jika dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut

akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.61.

Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Tahun 2021

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebesar 145.961,97 GgCO₂eq dengan kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Jawa Tengah adalah sektor energi mencapai 70.260,22 GgCO₂e (48,14 persen). Untuk penyumbang emisi kedua adalah sektor limbah dengan kontribusi sebesar 53.160,83 GgCO₂e (36,42 persen) yang dikontribusikan dari pengelolaan sampah dan limbah cair. Ada kenaikan yang signifikan pada sektor limbah karena adanya penambahan data dari kabupaten/kota untuk limbah industri yang sebelumnya belum terdata. Selain menghasilkan emisi GRK, Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mampu menyerap emisi sebesar 2.861,16 GgCO₂e (1,96 persen).

Tabel 2.130.

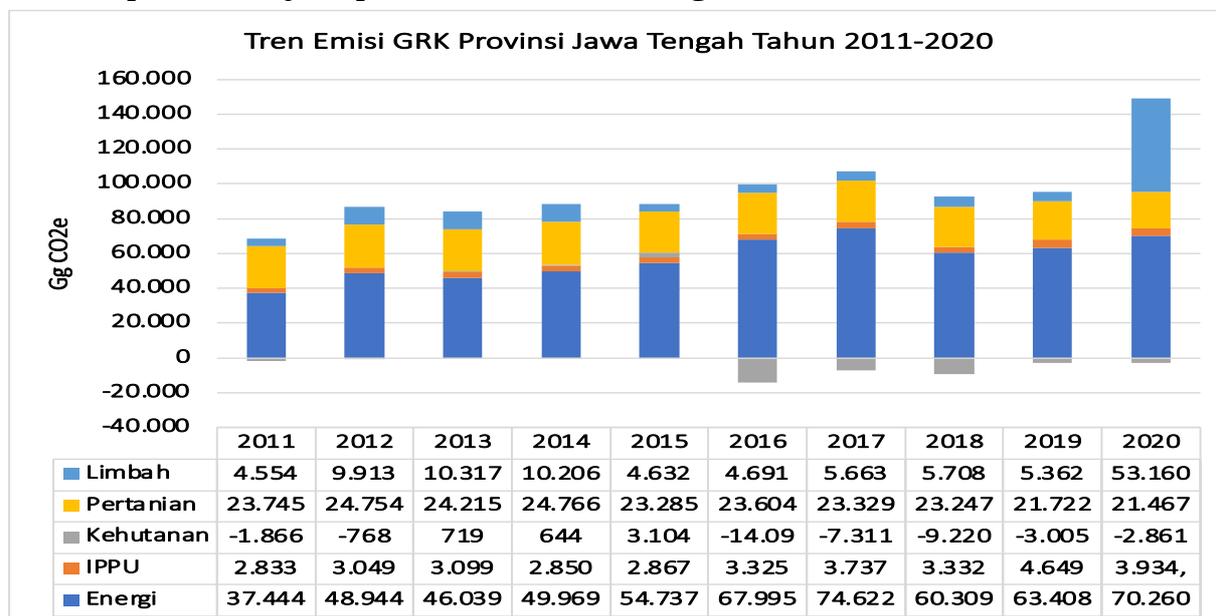
Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2021

No	Sektor	Emisi (Gg CO ₂ eq)	Persentase (%)
1	Energi	70.260,22	48,14
2	Pertanian	21.467,71	14,71
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	3.934,38	2,70
4	Limbah	53.160,83	36,42
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	-2.861,16	-1,96
	Total Emisi GRK	145.961,97	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

*Keterangan: Perhitungan besaran emisi GRK tahun 2021, merupakan data tahun 2020 yang dihitung tahun 2021.

Apabila dilihat dari tren pertumbuhan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan emisi dari tahun ke tahun, terutama dari sektor energi. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah menjadi lokasi beberapa sumber pembangkit untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu kebijakan terkait pembangunan rendah karbon perlu menjadi prioritas di Jawa Tengah.



Sumber: SIGNSMART KLHK, 2021

Gambar 2.62.

Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

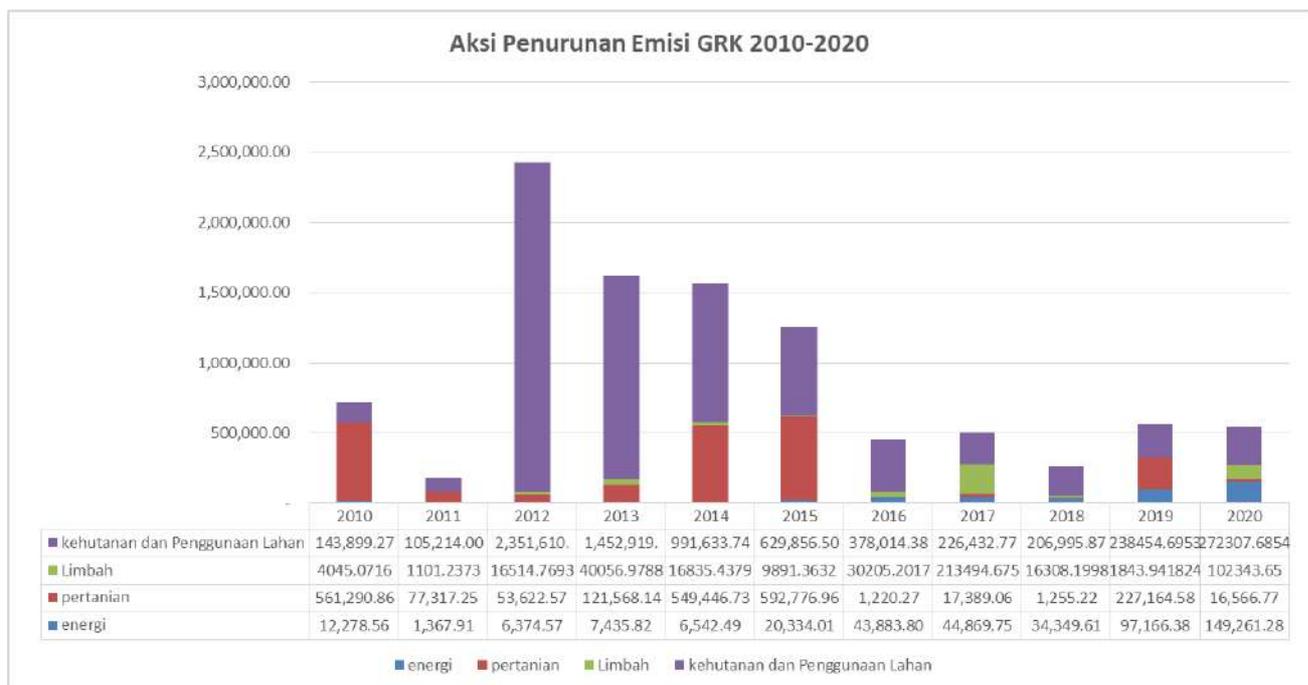
Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi AKSARA BAPPENAS, penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2021 adalah sebesar 10,158 juta ton CO₂eq. Sedangkan penurunan emisi untuk tahun 2021 saja adalah sebesar 128.509,91 ton CO₂eq dengan kontributor utama penurunan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan yang mencapai 49.272,38 ton CO₂e. Aksi-aksi mitigasi pada sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan ini berupa rehabilitasi dan penanganan lahan kritis.

Tabel 2.131.

Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2021

No	Sektor	Emisi (Ton CO ₂ eq)
1	Energi	8.757,06
2	Pertanian	2.570,99
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	-
4	Pengelolaan Limbah	86,95
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	52.839,96
	Total Emisi GRK	128.509,91

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2022 (data masuk sampai dengan 16 Agustus 2022)



Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2022 (data masuk sampai dengan 16 Agustus 2022)

Gambar 2.63.

Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020

Jawa Tengah tercatat memiliki 2.469 aksi penurunan emisi GRK (total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2021). Penurunan emisi GRK ini merupakan data agregasi kabupaten/kota dan PD provinsi. Data rincian kontribusi kabupaten/kota dan PD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132.

Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	Potensi Penurunan (Ton CO ₂ eq)			KETERANGAN
		TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	
1	Banjarnegara	334,02	-	-	
2	Banyumas	-	7.404,385	-	
3	Batang	-	-	-	Belum melaporkan aksi mitigasi
4	Blora	-	2,93	-	
5	Boyolali	-	85,59	-	
6	Cilacap	-	253,35	-	
7	Demak	-	18,40	2,41	
8	Grobogan	33,48	292,45	-	
9	Jepara	62,85	3.343,785	42,98	
10	Karanganyar	139,07	385,31	-	
11	Kebumen	-	18,76	135,63	

NO	KABUPATEN/KOTA	Potensi Penurunan (Ton CO ₂ eq)			KETERANGAN
		TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	
12	Kendal	246,65	17,68	-	
13	Klaten	430,84	5.653,31	5.512,00	
14	Kudus	39,46	85.959,73	-	
15	Kab. Magelang	195,00	180,65	-	
16	Pati	165,94	2.050,4	-	
17	Pemalang	-	1,85	-	
18	Purbalingga	2.947,22	3.620	57,03	
19	Purworejo	36,79	-	-	
20	Rembang	-	-	-	Belum melaporkan aksi mitigasi
21	Semarang	1.002,92	27,97	12,12	
22	Sragen	115,93	1.343,38	1.173,03	
23	Sukoharjo	-	63,81	-	
24	Kab. Tegal	143,97	48,83	-	
25	Temanggung	-	6.028,02	-	
26	Wonogiri	142,02	88,10	18,25	
27	Wonosobo	17,99	6.606,37	-	
28	Brebes	-	-	-	Belum melaporkan aksi mitigasi
29	Kab. Pekalongan	-	-	-	Belum melaporkan aksi mitigasi
30	Kota Pekalongan	-	-	-	Belum melaporkan aksi mitigasi
31	Kota Magelang	111,05	0,86	-	
32	Kota Salatiga	87,56	109,44	7,73	
33	Kota Semarang	4.526,82	41.371,32	90,93	
34	Kota Surakarta	809,81	1.325,51	-	
45	Kota Tegal	-	0,15	16,79	
TOTAL		11.589,40	166.302,4	7.068,89	

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2022 (data masuk sampai dengan 16 Agustus 2022)

d. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kualitas air sungai dilihat dari hasil perhitungan dan pengujian status mutu kualitas air sungai tahun 2021 menunjukkan bahwa sungai-sungai dalam kondisi cemar ringan sebanyak 24 sungai, dan cemar sedang sebanyak 1 sungai yaitu sungai Palur.

Tabel 2.133.**Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

No	Nama Sungai	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai IP	Status Mutu								
1	Baki	4,56	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,66	Cemar Ringan	5,20	Cemar Sedang	4,72	Cemar Ringan
2	Premulung	5,52	Cemar Sedang	4,46	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	3,50	Cemar Ringan	4,57	Cemar Ringan
3	Mungkung	5,23	Cemar Sedang	4,22	Cemar Ringan	3,01	Cemar Ringan	2,85	Cemar Ringan	3,55	Cemar Ringan
4	Grompol	4,80	Cemar Ringan	4,67	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	5,33	Cemar Sedang	3,84	Cemar Ringan
5	Samin	5,38	Cemar Sedang	3,76	Cemar Ringan	2,61	Cemar Ringan	5,18	Cemar Sedang	4,35	Cemar Ringan
6	Jlantah	3,80	Cemar Ringan	2,82	Cemar Ringan	3,36	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	3,16	Cemar Ringan
7	Palur	5,54	Cemar Sedang	4,57	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	6,12	Cemar Sedang	5,08	Cemar Sedang
8	Pepe	4,57	Cemar Ringan	4,37	Cemar Ringan	4,35	Cemar Ringan	3,42	Cemar Ringan	3,12	Cemar Ringan
9	Babon	4,86	Cemar Ringan	2,80	Cemar Ringan	3,97	Cemar Ringan	6,62	Cemar Sedang	4,03	Cemar Ringan
10	Bogowonto	1,94	Cemar Ringan	2,09	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	4,02	Cemar Ringan	3,22	Cemar Ringan
11	Garang	4,00	Cemar Ringan	5,58	Cemar Sedang	6,53	Cemar Sedang	3,40	Cemar Ringan	2,88	Cemar Ringan
12	Gung	3,28	Cemar Ringan	2,93	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	2,90	Cemar Ringan	3,78	Cemar Ringan
13	Kupang	3,99	Cemar Ringan	2,36	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan	3,86	Cemar Ringan	3,30	Cemar Ringan
14	Luk Ulo	1,82	Cemar Ringan	1,31	Cemar Ringan	2,94	Cemar Ringan	0,91	Kondisi Baik	3,30	Cemar Ringan
15	Lusi	2,21	Cemar Ringan	2,15	Cemar Ringan	3,35	Cemar Ringan	3,75	Cemar Ringan	2,95	Cemar Ringan
16	Pemali	3,10	Cemar Ringan	1,85	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	0,77	Kondisi Baik	3,89	Cemar Ringan
17	Sambong	3,84	Cemar Ringan	2,66	Cemar Ringan	3,74	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	3,04	Cemar Ringan
18	Serang	2,63	Cemar Ringan	2,19	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	2,29	Cemar Ringan	2,32	Cemar Ringan
19	Serayu	1,91	Cemar Ringan	1,57	Cemar Ringan	3,70	Cemar Ringan	2,24	Cemar Ringan	2,89	Cemar Ringan
20	Tuntang	3,49	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	3,19	Cemar Ringan	3,59	Cemar Ringan	3,09	Cemar Ringan
21	Wulan	4,75	Cemar Ringan	1,77	Cemar Ringan	2,13	Cemar Ringan	4,00	Cemar Ringan	4,89	Cemar Ringan

No	Nama Sungai	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai IP	Status Mutu								
22	Bengawan Solo	2,18	Cemar Ringan	3,91	Cemar Ringan	3,85	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	1,98	Cemar Ringan
23	Progo	1,53	Cemar Ringan	1,25	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan	1,94	Cemar Ringan
24	Citanduy	0,92	Kondisi Baik	1,97	Cemar Ringan	4,62	Cemar Ringan	1,97	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan
25	Cisanggrung	0,75	Kondisi Baik	2,83	Cemar Ringan	5,28	Cemar Sedang	1,94	Cemar Ringan	2,75	Cemar Ringan
26	Danau Rawapening			2,43	Cemar Ringan	2,32	Cemar Ringan	2,00	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan
Nilai IP Jawa Tengah		3,46	Cemar Ringan	2,98	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah adalah adanya pencemaran limbah domestik dan limbah industri kecil/menengah/besar yang cenderung tidak mau mengolah air limbahnya. Sektor pertanian dalam arti luas juga termasuk salah satu penyumbang pencemar, terutama terkait penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Pada DAS Solo terdapat industri tekstil dan industri rayon yang membuang air limbahnya langsung ke Sungai Bengawan Solo dengan debit yang besar. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan juga menyumbang pencemaran di daerah hulu sungai Bengawan Solo dan anak Sungai Bengawan Solo yang dibuktikan dengan parameter *Nitrit* dan *Phosphat* yang melebihi baku mutu. Beberapa penanganan pencemaran Bengawan Solo adalah 1) pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan besar yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pengolahan air limbah; 2) mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan skala besar melalui program Propernas dan Properda; 3) pemantauan dan uji laboratorium kualitas air sungai dan anak – anak sungai Bengawan Solo dan evaluasi terhadap kondisi kualitas air sungai atas dasar laporan hasil pengujian kualitas air sungai dari para pihak terkait; serta 4) Revitalisasi IPAL Komunal yang telah terbangun untuk meningkatkan kinerja IPAL.

Tabel 2.134.**Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.380.998	5.418.184	5.604.080,65	6.055.617,05	5.231.766,57
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	334.697,76	725.047,58	1.069.308,62	1.175.675,24	951.226,04
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	1.359.778,2	1.992.430,5	2.774.189,20	2.626.441,58	2.216.211,14
4	Total Pengelolaan Sampah	1.694.476	2.717.478,1	3.843.497,82	3.802.116,82	3.167.437,18
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		31,49	50,15	68,58	62,79	60,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan: Data Sementara, masih ada 6 Kab/Kota yang belum melakukan update data.

Jumlah timbunan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sejumlah 5.380.998 ton/tahun menjadi 5.231.766,57 ton/tahun pada tahun 2021. Sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.216.211,14 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.167.437,18 ton/tahun pada tahun 2021, yaitu sebesar 60,54 persen. Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah, luas total TPA yang ada sejumlah 58 TPA adalah 258,1 Ha. Dengan total sampah yang terangkut menunjukkan rata-rata setiap 1 Ha TPA menerima sampah sebesar 6.310 ton untuk dikelola. Berikut adalah tipe pengelolaan TPA di Jawa Tengah.

Tabel 2.135.**Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
1	Cilacap 1	TPA Majenang			√	1,6	2025
2	Cilacap 2	TPA Sidareja			√	1,4	2025
3	Cilacap 3	TPA Kroya			√	0,8	2017
4	Cilacap 4	TAP Jeruklegi	√			6,3	2019
5	Banyumas 1	TPA Kaliori	√			4,7	2018
6	Banyumas 2	TPA Gunung Tugel			√	6,7	2014
7	Banyumas 3	TPA Ajibarang			√	2,0	2014
8	Purbalingga	TPA Banjaran			√	4,0	2018
9	Banjarnegara	TPA Winong			√	3,8	2049

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
10	Kebumen 1	TPA Kaligending			√	5,0	2033
11	Kebumen 2	TPA Semali	√			3,7	2033
12	Purworejo	TPA Jetis Loana	√			4,7	2019
13	Wonosobo	TPA Wonorejo			√	4,5	2018
14	Kab. Magelang 1	TPA Pasuruhan			√	1,8	2017
15	Kab. Magelang 2	TPA Klegen			√	0,2	2017
16	Boyolali	TPA Winong		√		3,7	---
17	Klaten 1	TPA Jomboran			√	0,2	2014
18	Klaten 2	TPA Joho			√	0,9	2015
19	Klaten 3	TPA Candirejo			√	1,0	2016
20	Klaten 4	TPA Pedan			√	7,0	belum beroperasi
21	Sukoharjo	TPA Mojorejo			√	3,7	2017
22	Wonogiri 1	TPA Ngadirojo			√	8,2	2023
23	Wonogiri 2	TPA Baturetno			√	1,5	2026
24	Wonogiri 3	TPA Purwantoro			√	0,5	2021
25	Wonogiri 4	TPA Slogohimo			√	0,3	2026
26	Karanganyar	TPA Sukosari			√	4,4	2021
27	Sragen	TPA Tanggan			√	4,2	2016
28	Grobogan 1	TPA Ngembak	√			9,8	2033
29	Grobogan 2	TPA Godong		√		1,0	2015
30	Grobogan 3	TPA Mojorebo		√		1,0	2013
31	Grobogan 4	TPA Gubug			√	1,0	2013
32	Blora 1	TPA Lebok			√	1,5	2019
33	Blora 2	TPA Temurejo	√			4,0	2018
34	Rembang	TPA Kerep			√	3,2	2035
35	Pati 1	TPA Sukoharjo	√			12,5	2026
36	Pati 2	TPA Plosojenar			√	1,7	2018
37	Kudus	TPA Tajungrejo	√			5,6	2019
38	Jepara 1	TPA Bandengan	√			5,5	2015
39	Jepara 2	TPA Krasak			√	0,7	2020
40	Jepara 3	TPA Gemulung			√	0,9	2016
41	Demak 1	TPA Kalikondang			√	2,5	2016
42	Demak 2	TPA Candisari			√	0,8	2016
43	Kab. Semarang	TPA Blondo	√			5,7	2009
44	Temanggung	TPA Sanggrahan	√			4,0	2031

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
45	Kendal 1	TPA Darupono			√	0,9	2015
46	Kendal 2	TPA Pagergunung			√	1,8	2025
47	Batang	TPA Randu Kuning			√	2,5	2019
48	Kab.Pekalongan	TPA Linggoasri	√			4,7	2019
49	Pemalang	TPA Pegongsoran	√			6,0	2031
50	Kab. Tegal	TPA Penujah			√	3,0	2018
51	Brebes 1	TPA Kaliwlingi			√	4,0	2040
52	Brebes 2	TPA Kalijurang			√	2,0	2021
53	Kota Magelang	TPA Banyu Urip			√	7,8	2016
54	Surakarta	TPA Putri Cempo			√	17,0	2018
55	Salatiga	TPA Ngronggo			√	5,3	2017
56	Kota Semarang	TPA Jatibarang			√	46,0	2026
57	Kota Pekalongan	TPA Degayu			√	4,0	2013
58	Kota Tegal	TPA Muararejo		√		5,0	2022
JUMLAH			13	4	41	258,1	

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 58 TPA sebanyak 35 TPA telah melebihi usia pakai secara teknis atau sebesar 60,34 persen dari total TPA. Berdasarkan sistem pengelolaannya maka hanya 22,41 persen yang menggunakan sistem *controlled landfill*, sedangkan sisanya sebanyak 71 persen atau 41 TPA masih menggunakan sistem *open dumping* dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Hal di atas karena masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah di perdesaan, serta masih adanya kebiasaan penduduk yang membuang sampah di sungai (8,68 persen dari total buangan sampah berada di sungai menyebabkan air sungai meluap dan menimbulkan bencana banjir).

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu, yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022).

Selain timbunan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Tahun 2019 jumlah limbah padat yang dihasilkan oleh Rumah Tangga, Terminal, Pabrik/Industri, Tambang, Rumah Sakit, Hotel, Pariwisata, Sekolah sebesar 5.455.694 ton/hari, air limbah 1.750.225,00 m³/hari, limbah B3 padat 23.550,77 ton/hari dan limbah B3 cair sebesar 431,97 ton/hari.

Tabel 2.136.

Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar di Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/hari)	Jumlah Limbah B3 Cair (ton/hari)
Bergerak	-	-	-	-	-	-
Tidak Bergerak	Rumah Tangga, Terminal, Pabrik/ Industri, Tambang, Rumah Sakit, Hotel, Pariwisata, Sekolah	-	5.455.694	1.750.225	23.550,77	431,97

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

Wabah virus Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan hidup, utamanya timbunan limbah infeksius Covid-19. Data timbunan limbah medis yang dilaporkan oleh kabupaten/kota mencapai 2.826.125,68 kg, dengan jumlah pasien Covid-19 sebanyak 206.999 yang berada di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (data masih berproses). Penanganan limbah medis terutama di saat pandemi Covid-19 yaitu kesenjangan antara kapasitas pengolahan dan timbunan limbah yang semakin meningkat serta distribusi fasilitas pengolahannya perlu menjadi prioritas mempertimbangkan limbah medis Covid-19 masuk dalam kategori infeksius dan menjadi mata rantai penularan penyakit tersebut.

Tabel 2.137.

Jumlah Data Timbunan Limbah Infeksius Covid-19 Tahun 2021

NO	Uraian	Σ DEPO	Σ DROP BOX	Σ PASIEN COVID-19	TIMBULAN LIMBAH MEDIS COVID-19 (Kg)	Σ LIMBAH B3 MEDIS COVID (Pengelolaan Internal) Kg	Σ LIMBAH B3 MEDIS COVID (Pengelolaan Eksternal) Kg
1	Isoman	60	111	3.883	9.216,70	9.216,70	6.388,71
2	Uji Deteksi Covid	553	638	12.326	55.873,24	-	55.799,88
3	DEPO	260	2.287	-	88.196,26	3.436,76	85.037,05
4	RS, PUSK, Klinik	1.585	16.688	23.157	1.969.616,10	452.026,52	1.484.469,37

NO	Uraian	Σ DEPO	Σ DROP BOX	Σ PASIEN COVID-19	TIMBULAN LIMBAH MEDIS COVID-19 (Kg)	Σ LIMBAH B3 MEDIS COVID (Pengelolaan Internal) Kg	Σ LIMBAH B3 MEDIS COVID (Pengelolaan Eksternal) Kg
5	RS Darurat	11	2	1.292	9.796,25	-	9.569,25
6	Tempat Vaksin	723	1.021	66.341	1.188.796,82	595,63	1.184.861,42
	JUMLAH	3.192	20.747	206.999	3.321.495,36	465.275,61	2.826.125,68

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138.

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	34	46	62	69	83
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan / atau kegiatan	25	25	35	57	38
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan / atau kegiatan	-	-	27	49	19

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	-	-	-	6

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

e. Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan SK MenLHK No.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, sebesar 375.733 Ha (10,96 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah), dengan rincian luas lahan kritis sebesar 171.649,75 Ha dan sangat kritis sebesar 204.083,27 Ha.

Pada tahun 2021, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 649.354,96 ha dan hutan rakyat seluas 684.317,70 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.333.672,66 ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat.

Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial, dilakukan melalui sistem perhutanan sosial yang mana masyarakat sekitar hutan mendapat akses untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diprioritaskan melalui penerapan teknologi *agroforestry*. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139.

Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha)	1.249.104,02	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Kritis (ha)	634.601	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733*)

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas lahan yang direhabilitasi per tahun (ha)	35.333	23.361	23.431	32.389	23.606
Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%)	5,57	6,22	6,24	8,62	6,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

* Berdasarkan SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung 17 DAS di Jawa Tengah yang mengalami penurunan daya dukungnya dan harus dipulihkan daya dukungnya.

Tabel 2.140.

Data Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang Menurun Daya Dukungnya

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Keterangan
1	DAS Progo	174.644,93	Buruk (2018), Harus dipulihkan
2	DAS Serayu	372.425,17	Buruk (2017), Harus dipulihkan
3	DAS Bogowonto	57.457,50	Buruk (2019), Harus dipulihkan
4	DAS LukUlo	63.9006,43	Sedang (2020), harus dipulihkan
5	DAS Tuntang,	131.282,01	Harus dipulihkan
6	DAS Pemali,	131.162,91	Harus dipulihkan
7	DAS Solo,	621.350,88	Harus dipulihkan
8	DAS Citandui.	95.622,96	Harus dipulihkan
9	DAS Bodri,	60.557,50	Harus dipulihkan
10	DAS Garang,	21.303,58	Harus dipulihkan
11	DAS Serang,	348.723,62	Harus dipulihkan
12	DAS Cacaban,	17.472,52	Harus dipulihkan
13	DAS Juwana,	120.565,20	Harus dipulihkan
14	DAS Comal,	88.759,53	Harus dipulihkan
15	DAS WawarMedono	78.727,00	Harus dipulihkan
16	DAS Lampir	36.628,21	Harus dipulihkan
17	DAS Kabuyutan	15.369,64	Harus dipulihkan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan :

1. Jumlah DAS, Sub DAS dan Sub Sub DAS sebanyak 236 DAS
2. Tujuh Belas (17) DAS yang daya dukungnya menurun dan harus dipulihkan memiliki luas 2.317.978,69 ha atau 71% dari luas Provinsi Jawa Tengah

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan

tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Kerusakan kawasan hutan mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya, yaitu untuk luas pencurian pohon dari 17,41 Ha berhasil diturunkan menjadi 14,6 Ha, serta luas kebakaran hutan dari 281,50 Ha berhasil diturunkan menjadi 99,97 Ha. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141.

Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas pencurian pohon	29,82	29,00	22,88	17,41	14,6
2.	Luas Kebakaran hutan	1.320,96	4.215,64	3.628,84	281,50	99,97
	Total Luas Kerusakan hutan	1.350,78	4.244,64	3.651,72	298,91	114,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selanjutnya gambaran mengenai produksi hasil hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142.

Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat (m ³)	2.576.980,41	2.597.954,53	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97
2	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Negara (m ³)	210.673	254.657	278.118,06	361.641,11	249.517,67
	Total Produksi Hasil Hutan (m³)	2.787.653,41	2.852.611,53	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

f. Pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan. Berikut gambaran perkembangan pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan di Jawa Tengah.

Tabel 2.143.
Jumlah Pengelola Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan di Jawa Tengah
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengguna kawasan hutan	Unit	165	179	193	201	203
2	Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m ³ berizin	Unit	920	938	967	999	1.007
3	Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu	Unit	567	636	736	838	894

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pengguna kawasan hutan setiap tahun bertambah, dengan jumlah pengguna kawasan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 203 unit. Selain itu jumlah industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m³ berizin setiap tahun terus bertambah, dengan jumlah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.007 unit. Jumlah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu baik pada Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) maupun industri hasil hutan meningkat setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2021 berjumlah 894 unit. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hasil hutan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan ke masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial.

Tabel 2.144.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Total
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat	Ha	2.852,07	25.448,80	6.872,76	655,21	43.981,45	79.461,49
2	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	Kelompok	16	54	79	81	90	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021), telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 90 SK untuk 90 Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 79.461,49 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak

pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok.

g. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2017 sebesar 0,51 persen menurun menjadi 0,47 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya produksi kayu yang berada di kawasan hutan negara berasal dari tegakan yang berumur muda, sehingga hasilnya merupakan kayu berukuran kecil dan harganya lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanaman hutan rakyat dari jenis-jenis penghasil bahan baku kayu industri untuk meningkatkan industri pengolahan kayu yang bersertifikasi legal kayu (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK). Data kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Nilai Sektor Kehutanan (juta rupiah)	5.914.322,01	6.197.300,16	6.209.872,32	6.486.868,11	6.630.964,15
2	Nilai Total PDRB (juta rupiah)	1.172.794.523,68	1.268.261.165,59	1.361.567.356,73	1.348.600.397,35	1.420.799.908,38
3	Kontribusi (%)	0,50	0,49	0,46	0,48	0,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

h. Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2021 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 2.112 kejadian di tahun 2016 menjadi 1.753 kejadian di tahun 2021. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.146.

Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Bencana	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angintopan	419	490	407	706	629	439
2	Banjir	298	270	171	171	459	242
3	Gas beracun	0	0	0	0	2	0

No	Jenis Bencana	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Gempabumi	0	11	3	5	2	5
5	Kebakaran	468	600	589	718	356	229
6	Kekeringan	0	0	0	30	0	0
7	Letusan gn.Api	0	1	5	2	12	5
8	Tanah longsor	927	1.091	555	718	1.387	740
9	Tsunami	0	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	0	0	4	6	23	6
Jumlah		2.112	2.463	1.734	2.356	2.870	1.753

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2021

Selama kurun waktu 2016-2021, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor, pada tahun 2021 saja terdapat 21 orang meninggal dunia dan 83 luka berat, 151 luka sedang dan 317 luka ringan.

Tabel 2.147.

Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2016	2.112	129	21	61	96
2017	2.463	60	1	60	107
2018	1.734	39	4	17	124
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
Jumlah		333	38	191	666

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2021

Taksiran kerugian tertinggi akibat bencana tercatat di tahun 2016 sebesar 3 triliun rupiah lebih, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2021 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana kebakaran dan banjir.

Tabel 2.148.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Bencana	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	419	7.648.565	490	8.016.727	407	5.445.666	706	15.367.598	NA	5.469.095	437	4.288.779
2	Banjir	298	1.914.023.342	270	7.731.340	171	2.924.463	171	2.777.845		32.798.305	242	44.106.000
3	Tanah Longsor	927	185.627.303	1.091	21.025.867	555	5.111.856	718	9.354.277		16.806.207	740	7.098.159
4	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	30	0		0	0	0
5	Kebakaran	468	1.127.741.291	600	40.622.373	589	33.866.505	718	55.387.150		18.779.138	229	52.965.785
6	Gempa Bumi	-	-	-	-	3	65.000	5	65.000		0	5	0
7	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	5	-	2	0		0	5	0
8	Ombak Besar	-	-	-	-	4	57.000	6	0		0	6	45.000
9	Lainnya	-	-	12	9.771.788	-	-	-	-		0	46	131.687,50
	Jumlah	2.112	3.235.040.501	2.463	87.168.095	1.734	47.470.620	2.356	82.951.870	2.870	73.582.747	1.753	108.823.410,5

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2021

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, BNPB telah melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana yang terakhir diperbarui sesuai data tahun 2021. Kajian risiko bencana dilakukan dengan mengalikan komponen bahaya dengan kerentanan dibagi kapasitas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Semakin besar bahaya dan kerentanan serta semakin kecil kapasitas daerah maka risiko bencana akan semakin besar.



Sumber: BNPB, IRBI 2021

Gambar 2.64.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana tinggi sedang. Indeks risiko bencana 2021 Provinsi Jawa Tengah pada urutan ke 27 dengan nilai skor 125,73 dengan kategori sedang, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi dan 26 Nasional. Data pemutakhiran indeks risiko bencana yang dilakukan BNPB tahun 2021, diperoleh bahwa hasil perhitungan indeks risiko bencana menunjukkan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. 3 (tiga) provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 164,85), Kepulauan Bangka Belitung (skor 160,98), dan Maluku (skor 160.84). Sementara itu, tiga

provinsi yang memiliki indeks risiko terendah (kelas sedang) adalah Nusa Tenggara Barat (skor 122.33), Kepulauan Riau (skor 114.71), dan DKI Jakarta (skor 60.43). Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Dengan disusunnya Buku IRBI Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat. Upaya-upaya mitigasi terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari berbagai jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.

Tabel 2.149.
Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS RISIKO 2021
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	TINGGI
2	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	TINGGI
3	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	TINGGI
4	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	TINGGI
5	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	TINGGI
6	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	TINGGI
7	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	TINGGI
8	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	TINGGI
9	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	TINGGI
10	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	SEDANG
11	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	SEDANG
12	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	SEDANG
13	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	SEDANG
14	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	SEDANG
15	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	SEDANG
16	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	SEDANG
17	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	SEDANG
18	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	SEDANG
19	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
20	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	SEDANG
21	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	SEDANG
22	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	SEDANG
23	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	SEDANG
24	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	SEDANG
25	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	SEDANG
26	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
27	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	SEDANG
28	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	SEDANG
29	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	SEDANG
30	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	SEDANG
31	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
32	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
33	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	SEDANG

Sumber: BNPB, IRBI 2021

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2021, telah terpasang sebanyak 86 unit peralatan EWS dan 347 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.150.**Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2016 – 2021**

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2016	2	-	46	120
2017	5	-	51	90
2018	9	-	60	150
2019	15	-	75	230
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 95 desa, pada tahun 2021 dibentuk 30 Desa Tangguh Bencana baru, sehingga akumulasi jumlah Destana di Jawa Tengah hingga akhir tahun 2021 mencapai 125 desa, dari total seluruh desa sebanyak 8.562 desa.

Tabel 2.151.**Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2016	8	58 desa
2017	8	66 desa
2018	8	74 desa
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa

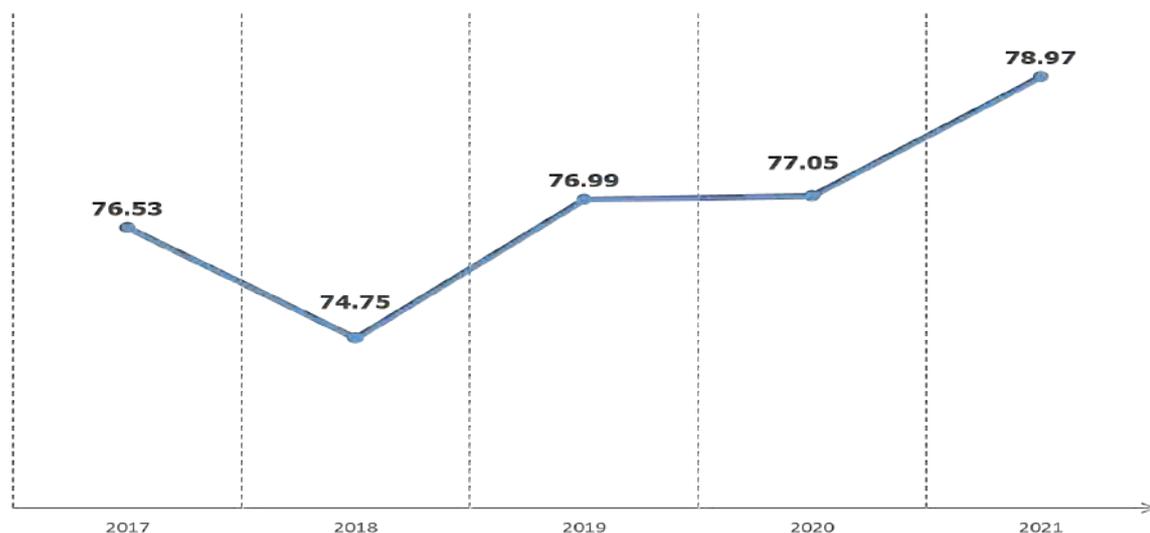
Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.1.9. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**a. Tata Kelola Pemerintahan****1. Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mencapai angka sebesar 78,97 naik sebesar 1,92 dari tahun 2020 yang sebesar 77,05. Nilai IRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 cenderung naik signifikan

dibandingkan dengan capaian IRB tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat baik dan perlu dipertahankan peningkatannya hingga akhir tahun RPJMD. Kenaikan capaian nilai RB pada tahun 2021 didorong oleh Komponen Pengungkit yaitu nilai Pemenuhan dan Reform.

Meski mengalami peningkatan, akan tetapi penerapan RB di Jawa Tengah masih perlu penyempurnaan antara lain optimalisasi peran agen perubahan, monev *quick wins*, internalisasi Nilai Inti ASN BerAkhlak, evaluasi peta proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan SOP Online, meningkatkan penerapan manajemen SPBE, optimalisasi implementasi *performance based budgeting*, meningkatkan monev pembangunan Zona Integritas, optimalisasi evaluasi dan analisis risiko kegagalan, monev pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, dan melakukan koordinasi dengan instansi pembina indeks hasil antara, terutama yang nilainya masih rendah.



Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2018-2022

Gambar 2.65.

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

2. Pelayanan Publik

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2017-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar manajemen mutu melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi ISO, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM terus meningkat, dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan jumlah UPP yang dilakukan pengukuran disebabkan adanya berbagai permasalahan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terutama di Satuan Pendidikan (SMA/SMK). Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, pergantian petugas pelaksana, pelaksanaan SKM yang lebih dari 1 tim dalam 1 OPD dan tidak saling bersinergi, serta petugas pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

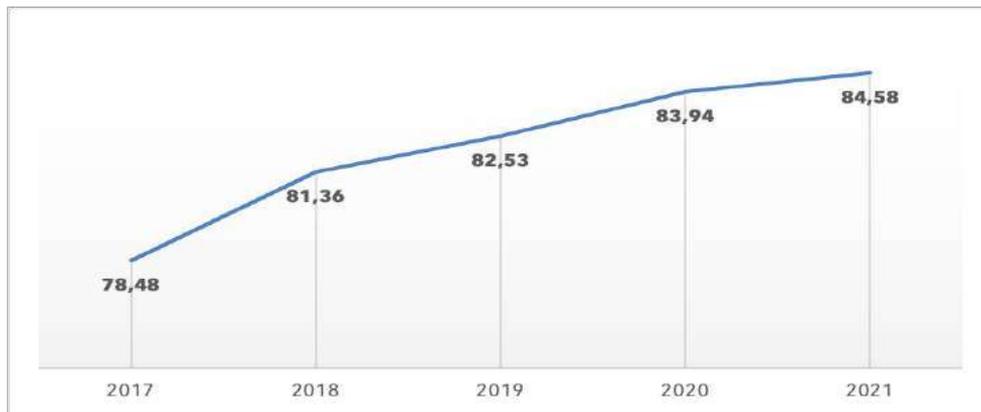


Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.66.

Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit)

Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 IKM terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 IKM Jawa Tengah sebesar 84,58, meningkat 0,64 poin dari tahun 2020 yang sebesar 83,94. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dan semakin diterima oleh masyarakat.



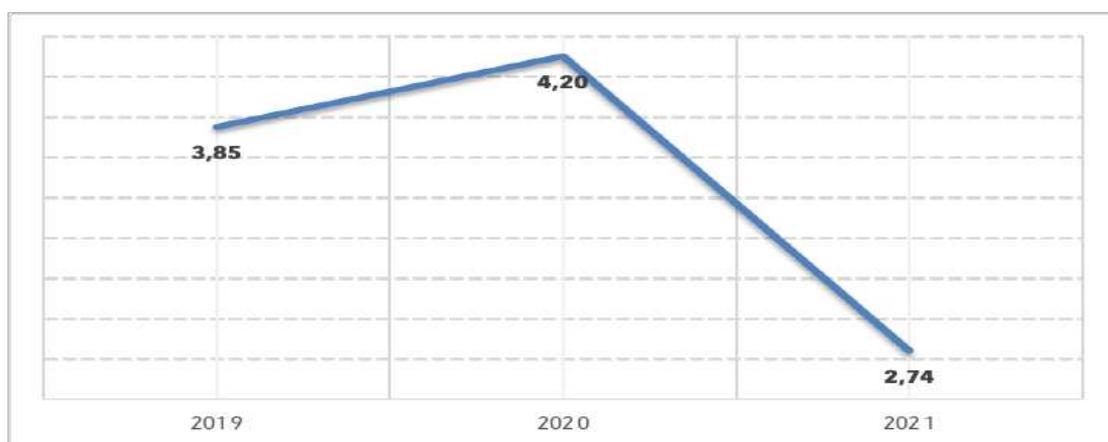
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.67.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, dengan tujuan agar pelayanan publik dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yaitu layanan publik yang berkualitas dan optimal. Ukuran capaian keberhasilan implementasi SPBE ditentukan dengan Indeks SPBE. Berdasarkan pengelompokannya, Indeks SPBE dibagi dalam 5 (lima) kriteria. Adapun kriterianya, bila Indeks <1,8 berarti berpredikat Kurang dalam mencapai tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis penerapan SPBE yang optimal. Selanjutnya, 1,8-<2,6 berarti Cukup; 2,6-<3,5 berarti Baik; 3,5-<4,2 Sangat Baik dan; 4,2-5,0 berarti Memuaskan.

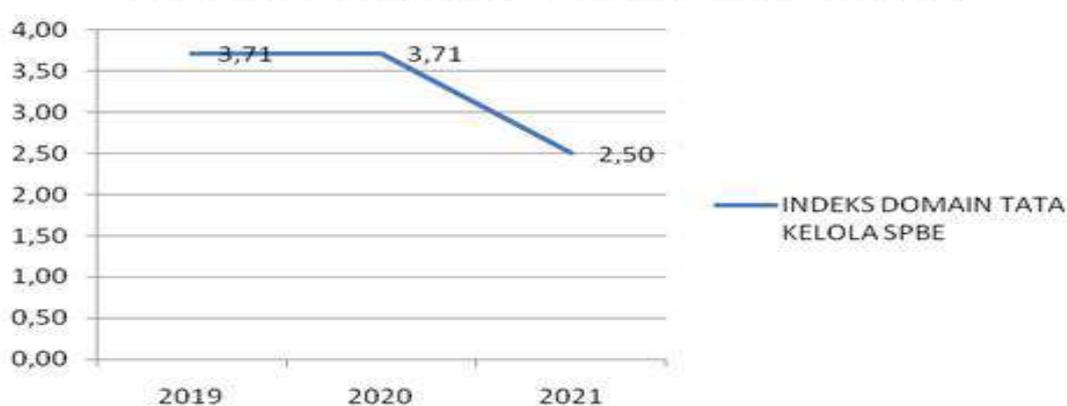


Sumber: Kemenpan RB, 2022

Gambar 2.68.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 - 2021

Hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai angka indeks SPBE sebesar 2,74 dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2020, maka tahun 2021 merupakan capaian yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Penurunan capaian disebabkan terjadinya perubahan metode penilaian dari semula berdasarkan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE ke penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Perubahan penilaian tersebut menyebabkan bertambahnya indikator penilaian dari semula 37 indikator menjadi 47 indikator. Penambahan indikator telah diikuti dengan penambahan domain. Dalam PermenPAN lama, terdapat 3 domain, tetapi dalam PermenPAN baru menjadi 4 Domain. Adapun domain-domain dimaksud yaitu Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain layanan SPBE, dan domain terbaru yaitu Indeks Domain Manajemen SPBE.



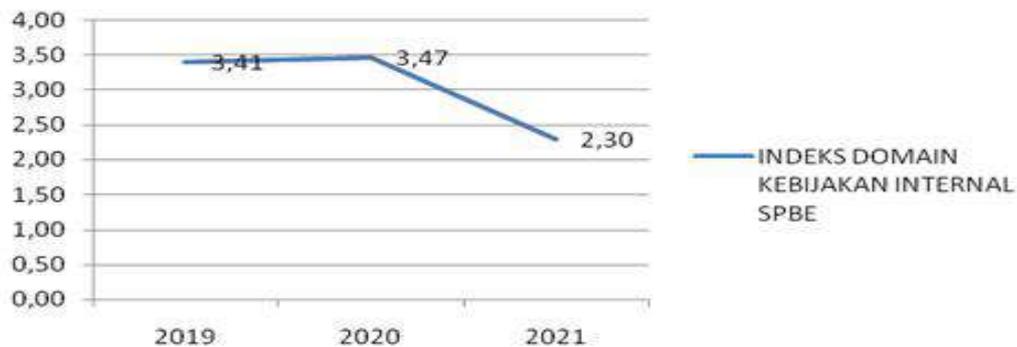
Sumber: Kemenpan RB, 2021

Gambar 2.69.
Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indeks Domain Tata Kelola SPBE pada tahun 2021 sebesar 2,50. Capaian tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya 3 indikator penilaian pada domain tata kelola SPBE dan menunjukkan adanya kelemahan, yaitu belum memiliki tata kelola/penerapan yang mengatur terkait arsitektur spbe dan peta rencana SPBE.

Adapun upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 yaitu menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE serta Keamanan Informasi, yang meliputi Manajemen Risiko, Kerangka Kerja, dan Arsitektur Keamanan Informasi dalam rangka mendukung aspek administratif/tata kelola SPBE guna mengatur layanan publik secara digital, baik layanan pada masyarakat, dunia usaha, dan administrasi pemerintahan. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan kualitas

perencanaan strategis SPBE berupa peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.

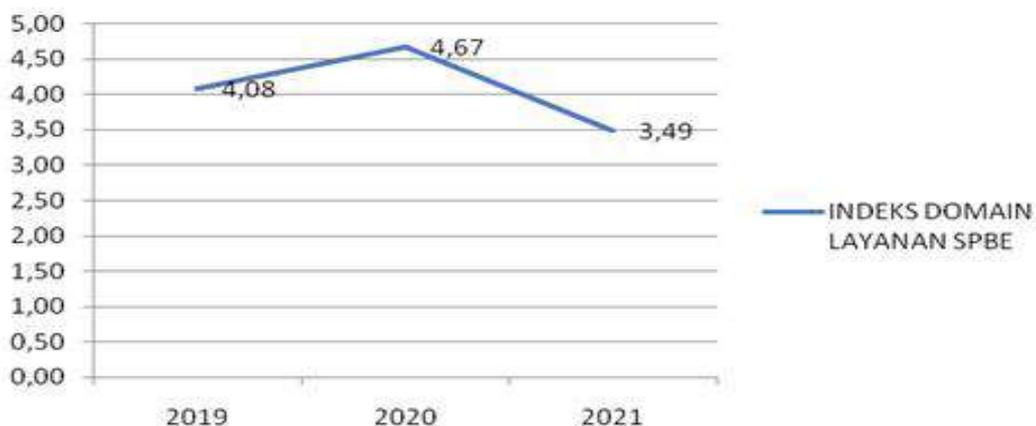


Sumber: Kemenpan RB, 2022

Gambar 2.70.

Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE pada tahun 2021 sebesar 2,30. Capaian tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh penggabungan 2 aspek menjadi 1 aspek yaitu aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Dengan adanya penggabungan aspek tersebut, menunjukkan adanya kelemahan yaitu belum dimilikinya kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Audit. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan integrasi kebijakan internal SPBE sesuai kebutuhan.



Sumber: Kemenpan RB, 2022

Gambar 2.71.

Indeks Domain Layanan SPBE Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indeks Domain layanan SPBE pada tahun 2021 sebesar 3,49. Capaian tersebut

merupakan yang terendah dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya 3 indikator penilaian pada domain layanan SPBE dan menunjukkan adanya kelemahan, yaitu masih belum memiliki aturan layanan pengelolaan Barang Milik Daerah dan aturan layanan dokumentasi serta informasi hukum yang belum memiliki fitur interaksi dengan pengguna layanan. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih meningkatkan pengintegrasian pada layanan perencanaan, layanan penganggaran, keuangan, layanan pengadaan barang dan Jasa, serta layanan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran maupun optimalisasi kinerja.

3. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi di tahun 2021, semua komponen mengalami peningkatan nilai, kecuali pada komponen pengukuran kinerja yang tidak mengalami peningkatan nilai. Peningkatan nilai terbesar ada pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi internal yang keduanya naik sebesar 19 poin. Perlu menjadi perhatian bahwa nilai komponen evaluasi internal meski mengalami kenaikan tetapi belum kembali ke nilai sebelumnya di tahun 2019 sebesar 8,26 sehingga komponen ini perlu mendapat upaya khusus untuk menutup penurunan yang terjadi di tahun sebelumnya. Adapun data hasil evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.

Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,39	25,24	26,38	26,77	26,64	26,66
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,95	18,13	19,87	20,50	20,23	20,23
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,68	10,79	11,68	11,99	12,08	12,27
4.	Evaluasi Internal	10	8,01	8,23	8,26	8,26	7,02	7,21
5.	Capaian Kinerja	20	12,57	13,55	13,99	14,04	14,28	14,35
	Hasil Nilai SAKIP	100	76,60	75,94	80,18	81,56	80,25	80,72
	Predikat		BB	BB	A	A	A	A

Sumber: Kemenpan RB, Maret 2022

4. Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

Tabel 2.153.

**Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2021**

NO	Aspek	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kebutuhan	60	10	37,5	40
2	Pengadaan	18	30	38	40
3	Pengembangan Karier	62,5	72,5	55	75
4	Promosi dan Mutasi	31	30	20	35
5	Manajemen Kinerja	42,5	50	67,5	70
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	22,5	30	35	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	10	16	14
8	Sistem Informasi	23	20	20	24
Skor Nilai		267,5	280	289	335,5
Indeks Sistem Merit		0,66	0,70	0,70	0,81

Sumber: KASN, 2021

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2021 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2020 sebesar 16, dikarenakan proses penyesuaian dasar hukum terkait perlindungan hukum kepada pegawai yang terkena kasus hukum dan perlindungan pegawai belum selesai ketika proses penilaian sistem merit tahun 2021 berakhir.

Untuk mendukung optimalisasi sistem merit, diperlukan manajemen talenta yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, melalui standar kompetensi ASN.

5. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin

ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.154.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2021

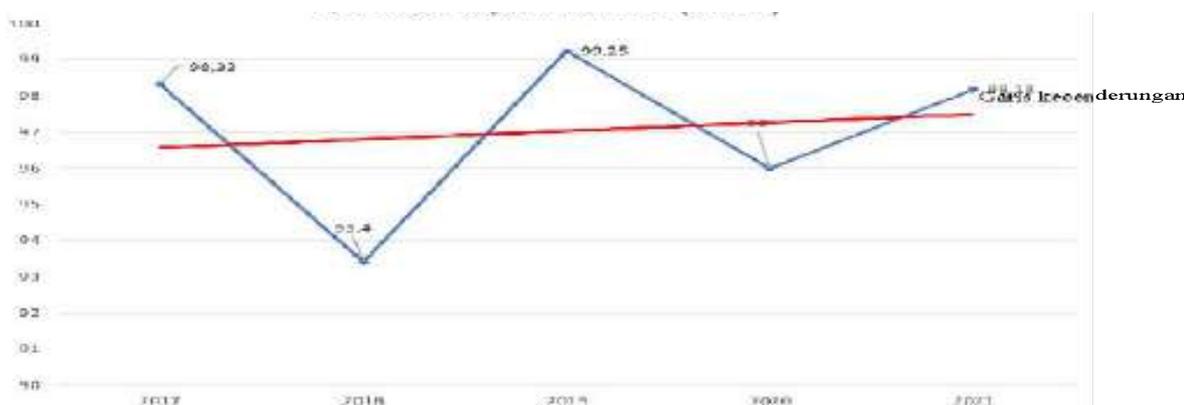
NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	92,20	Sangat Baik
2	2019	79,33	Sangat Baik
3	2020	92,08	Sangat Memuaskan
4	2021	91,314	Sangat Memuaskan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

6. Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP.



Sumber : Dispermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah, 2021

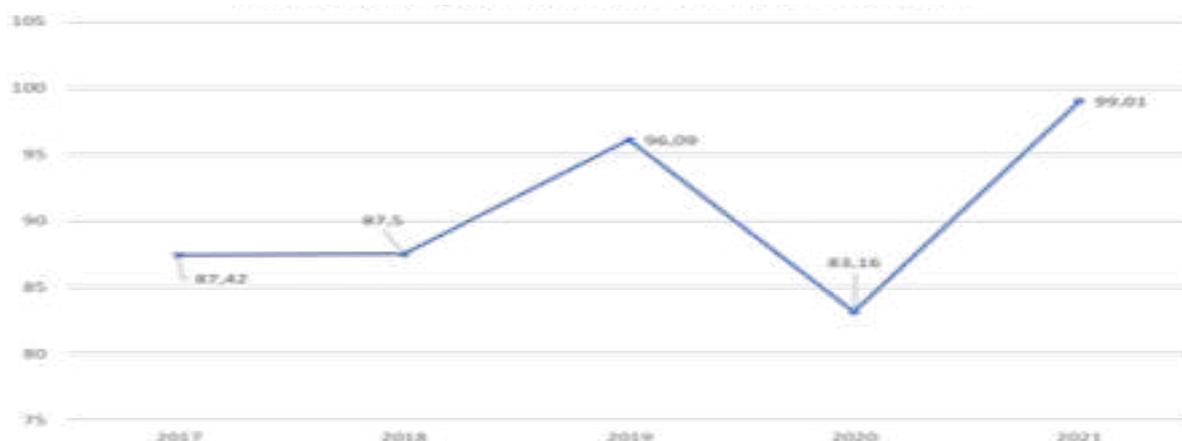
Gambar 2.72.

Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.73.

Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online*.

Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDPT dengan gambaran sebagai berikut.

Tabel 2.155.

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2021

Status Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sangat tertinggal	31	52	15	2	-
Tertinggal	1.433	1.444	603	266	147
Berkembang	5.242	5.203	5.580	5.560	5.168
Maju	1.036	1.038	1.494	1.841	2.295
Mandiri	67	72	117	140	199
Total Desa	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021.

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156.
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BUMDesa	2.230	2.511	4.215	5.539	6.776
2	Pasar desa	1.369	1.369	1.349	1.671	1.671
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	22.326	22.326

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah
Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021

No	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUM-LAH	2021 BARU	% progres input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
1	Banjarnegara	266	103	67	1	-	171	-	100	0,00%
2	Banyumas	301	120	153	23	3	299	30	100	10,03%
3	Batang	239	132	68	7	1	208	86	100	41,35%
4	Blora	271	131	101	10	3	245	40	100	16,33%
5	Boyolali	261	84	96	16	4	200	66	100	33,00%
6	Brebes	292	116	161	14	1	292	10	100	3,42%
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	18	100	6,69%
8	Demak	243	111	67	7	-	185	69	100	37,30%
9	Grobogan	273	163	99	7	4	273	11	100	4,03%
10	Jepara	184	81	93	10	-	184	-	100	0,00%
11	Karanganyar	162	80	65	8	1	154	37	100	24,03%
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	13	100	3,23%
13	Kendal	266	124	91	6	1	222	75	100	33,78%
14	Klaten	391	157	177	34	12	380	49	100	12,89%
15	Kudus	123	41	3	1	-	45	13	100	28,89%
16	Magelang	367	137	167	23	6	333	144	100	43,24%
17	Pati	401	222	172	5	2	401	-	100	0,00%
18	Pekalongan	272	91	85	8	7	191	56	100	29,32%
19	Pemalang	211	106	93	9	3	211	-	100	0,00%
20	Purbalingga	224	98	75	25	4	202	49	100	24,26%
21	Purworejo	469	152	240	20	5	417	43	100	10,31%
22	Rembang	287	144	69	8	5	226	90	100	39,82%
23	Semarang	208	51	107	15	1	174	44	100	25,29%
24	Sragen	196	110	80	1	1	192	4	100	2,08%

No	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUM-LAH	2021 BARU	% progres input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
25	Sukoharjo	150	45	77	3	-	125	55	100	44,00%
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	83	100	45,60%
27	Temanggung	266	43	150	11	1	205	-	100	0,00%
28	Wonogiri	251	97	122	6	-	225	80	100	35,56%
29	Wonosobo	236	114	44	3	2	163	72	100	44,17%
	JUMLAH	7.809	3.053	3.273	370	80	6.776	1.237	100	0,18355608

Sumber: Dispermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 94 kawasan perdesaan.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Gambar 2.74.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

8. Unsur Penunjang Pemerintahan

a) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

b) Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158.

**Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021**

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 3,023	Nilai 3,023	Nilai 3,158	NA	3,115
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 cenderung meningkat, artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2021 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

c) Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan

serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.159.

Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dokumen Penelitian	6	6	9	4	2
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	6	6	9	4	2

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu 2017 - 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk fasilitasi Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak diberikan lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark*, *agro technopark*, *marine science technopark*, digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan sudah mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas

kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 18 lembaga inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian BRIN dan KEMENKOP). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.160.

Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng

No	Tahun	Total Tenant
1	2017	10 Tenant
2	2018	3 Tenant
3	2019	6 Tenant
4	2020	1 Tenant
5	2021	40 Tenant

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah

difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

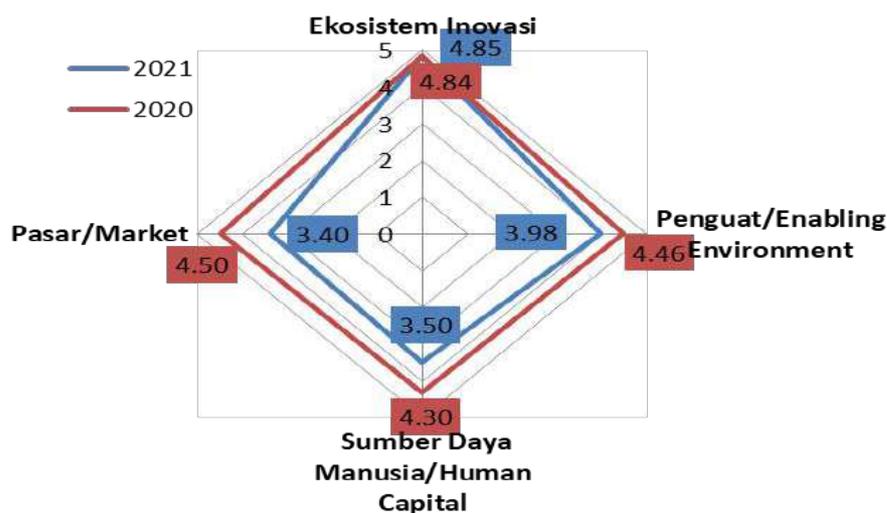
Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjangkaran inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjangkaran inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 16,91persen dan turun setiap tahun sampai pada tahun 2020 dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan jumlah inovator yang mengikuti lomba krenova tidak berjumlah maksimal sesuai persyaratan yang ditentukan. Penurunan pada tahun 2019 mencapai 18,93 persen sedangkan pada tahun 2020 turun lagi sebesar 1,20 persen. Dengan dilakukannya 2 mekanisme proses krenova maka pada tahun 2021 inovator yang mengikuti kegiatan krenova naik sebesar 27,70 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi dan perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat aspek, yaitu aspek Ekosistem Inovasi, aspek Pasar/*Market*, aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*, dan aspek Penguat/*Enabling Environment*. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator penilaian yang merepresentasikan ke-empat aspek tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, Jawa Tengah termasuk daerah pada kategori sangat inovatif, dengan nilai 4,0 tahun 2021. Nilai tersebut turun dibandingkan tahun 2020 (4,52), yang dipengaruhi kondisi Covid di Jawa Tengah.

Dari empat aspek IDSD hanya aspek Ekosistem Inovasi yang mengalami peningkatan, sedangkan tiga aspek yang lain mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek Pasar, di mana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar dan dimensi Ukuran Pasar. Walaupun demikian, sebagian dimensi mengalami peningkatan, seperti pada regulasi, penelitian dan pengembangan, serta tata kelola pemerintahan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

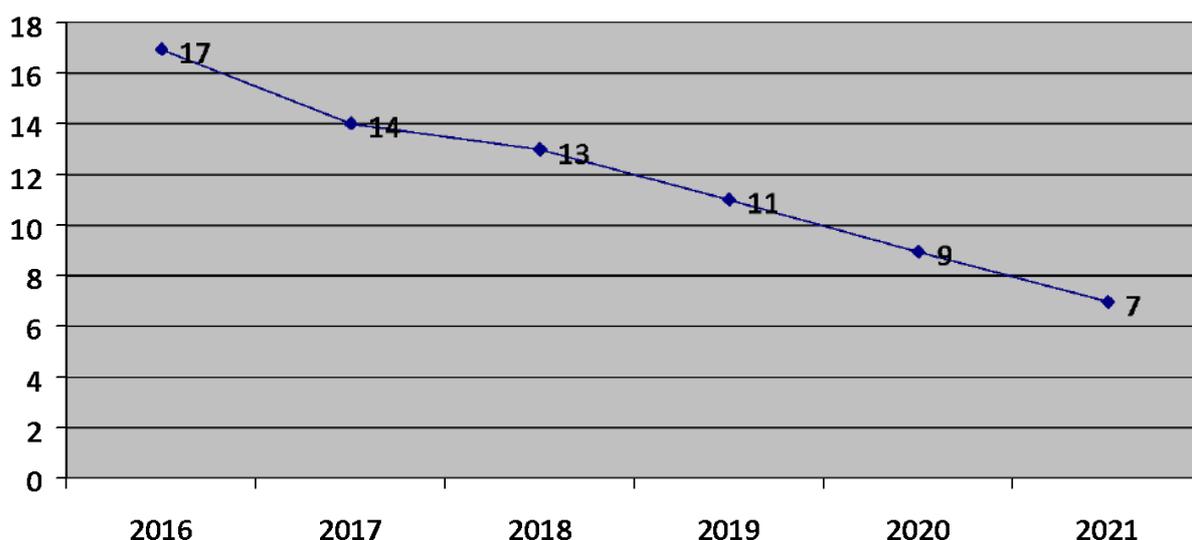
Gambar 2.75.

Nilai Aspek IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021

b. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah terjadinya konflik bernuansa SARA. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Selama kurun waktu 2016-2021, jumlah kasus konflik bernuansa SARA konsisten menurun, yaitu semula 17 kasus pada tahun 2017 menjadi 7 kasus pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan upaya penanganan konflik SARA di Jawa Tengah yang cukup signifikan antara lain melalui pendampingan secara intensif kepada masyarakat yang rawan terjadi konflik SARA, menggiatkan kegiatan antar kelompok maupun antar agama, dan patroli *cyber* terhadap penyebaran konten *hoax* dan *hatespeech*.



Sumber: BINDA Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.76.
Jumlah Kasus Konflik Bernuansa SARA di Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021

Kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari jumlah tindak pidana yang tertangani. Capaian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana di Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 86,23 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 84,49 persen.

Tabel 2.161.
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Tertangani	
1	2017	11.420	8.489	74,33
2	2018	9.834	7.251	73,73
3	2019	10.291	8.334	80,98
4	2020	9.807	8.286	84,49
5	2021	6.429	5.544	86,23
Jumlah		54.777	41.536	75,83

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2022

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga demokrasi (*democratic institution*), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Selama kurun waktu 2016-2021 pencapaian skor IDI cenderung meningkat dari 70,85 pada tahun 2017 menjadi 77,22 pada tahun 2019, namun pada 2020 turun 1,79 poin menjadi 75,43. Penurunan utamanya dipengaruhi oleh indeks variabel pada aspek kebebasan sipil yaitu variabel kebebasan berpendapat (turun 9,71 poin) dan variabel dari diskriminasi (turun 11,43 poin) serta indeks variabel pada aspek lembaga

demokrasi yaitu pada variabel peradilan yang independen (turun 11,50 poin) dan variabel peran DPRD (turun 10,60 poin). Sedangkan skor IDI 2021 belum rilis.

Tabel 2.162.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Kebebasan Sipil	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68	N/A
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16	N/A
	2. Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88	N/A
	3. Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40	N/A
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54	N/A
II.	Hak-Hak Politik	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46	N/A
	1. Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70	N/A
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22	N/A
III.	Lembaga-Lembaga Demokrasi	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60	N/A
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84	N/A
	2. Peran DPRD	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41	N/A
	3. Peran Partai Politik	74,29	100	100	100	100	N/A
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	27,43	83,16	54,30	79,56	81,96	N/A
	5. Peran Peradilan yang Independen	100,00	50,00	50,00	100	50,00	N/A
	Skor IDI	66,71	70,85	72,17	77,22	75,43	N/A

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari jumlah unjuk rasa berdasarkan kelompok massa maupun tuntutan. Unjuk rasa berdasar kelompok massa dari tahun ke tahun cenderung menurun, serta jumlah unjuk rasa pada tahun 2018 merupakan jumlah unjuk rasa terendah intensitasnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2017 tercatat sebanyak 279 kali, dan menurun menjadi 221 kali pada tahun 2021. Kondisi demikian secara umum dapat menunjukkan situasi di Jawa Tengah relatif cukup kondusif.

Tabel 2.163.

Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Kelompok Massa	Tahun / Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Guru	1	2	0	0	0
2	Mahasiswa	1	10	61	40	25
3	Buruh	7	17	59	100	67
4	Masyarakat	50	79	42	37	22

No	Kelompok Massa	Tahun / Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Warga Desa	0	0	51	39	38
6	Ormas/Parpol	0	0	76	116	69
	Jumlah	279	108	289	332	221

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2022

Selanjutnya, untuk unjuk rasa berdasarkan tuntutan selama periode tahun 2017-2021 dominan pada jenis tuntutan bidang sosbud sebanyak 584 tuntutan (47,5 persen), diikuti dengan jenis tuntutan bidang ekonomi sebanyak 289 tuntutan (23,5 persen).

Tabel 2.164.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2021

No	Tuntutan	Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Ideologi	0	0	0	0	0	0
2	Politik	201	10	26	8	9	254
3	Ekonomi	51	31	53	87	67	289
4	Sosbud	4	60	184	215	121	584
5	Hukum dan HAM	11	7	20	7	12	57
6	Pendidikan	12	0	1	7	6	26
7	Kesehatan	0	0	5	8	6	19
	Jumlah	279	108	289	332	221	1229

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2021

Dalam upaya mendukung penciptaan kondusivitas wilayah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas dan kewenangannya antara lain melakukan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Kinerja Satpol PP selama kurun waktu tahun 2017-2021 ditunjukkan dengan persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.165.
Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2017	1.000	1.000	100
2	2018	1.000	1.000	100
3	2019	1095	1095	100
4	2020	293	293	100
5	2021	435	435	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut kinerja penyelesaian pelanggaran Perda tahun 2017-2021 sudah sangat baik dengan persentase 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran Perda yang terdata dapat diselesaikan melalui cara persuasif dan represif. Upaya ke depan akan terus dilakukan pembinaan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran/kepatuhan terhadap Perda. Upaya represif baru diterapkan jika upaya pembinaan tidak dipatuhi.

Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan anggaran. Upaya penegakan Perda oleh SATPOL PP merupakan tindakan represif non yustisi dan yustisi sebagai tindak lanjut upaya preemtif dan preventif. Dengan tahapan penegakan Perda wajib mengedepankan upaya persusif dan humanis untuk menghindari terjadinya benturan dan gesekan sosial di masyarakat, sehingga dalam penegakannya, SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukannya secara serta merta. Implementasi SPM dilaksanakan Satpol PP melalui penegakan Perda dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

Selain itu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga tramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas. Rasio Linmas per 10.000 penduduk ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.166.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2017	242.020	34.257.865	70,64
2	2018	311.746	34.257.865	90,99
3	2019	230.782	34.490.835	66,91
4	2020	239.430	36.516.035	66,57
5	2021	240.958	36.516.035	65,98

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun menjadi 66,91 persen pada tahun 2019 karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota

linmas keluar provinsi. Upaya yang akan dilakukan adalah bersama-sama dengan kabupaten/kota meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota linmas, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas. Sebagaimana mandatori UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas pada sub urusan Kebakaran, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permend Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar agri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.167.

Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indikator	Tercapai \geq 100% Target Akhir RPJMD		Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD		Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IKU	13	4	30,77	8	61,54	1	7,69	0	0
IKPPD	194	91	46,91	85	43,81	18	9,28	0	0

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 4 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai, 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu pertumbuhan ekonomi. dampak akibat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi 2 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif membaik dan tumbuh dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III 2021 dimana semua lapangan usaha selama tiga triwulan mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 91 indikator tercapai, 85 indikator akan tercapai, 18 indikator perlu upaya keras dan 20.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Permasalahan pembangunan pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- a. masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun
- b. belum semua lulusan SMK terserap dalam dunia usaha dan dunia industri.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a. masih adanya kasus kematian ibu yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman terhadap kasus yang dicatatkan sebagai kematian ibu dan belum memadainya mekanisme pelaporan kasus kematian ibu;
- b. masih tingginya kasus penyakit tidak menular yang menjadi faktor penyerta pada komplikasi kehamilan;
- c. masih belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan kehamilan;
- d. belum optimalnya konvergensi sektor non kesehatan dalam penanganan permasalahan gizi. Penanganan permasalahan gizi saat ini masih dipahami sebagai domain sektor kesehatan sehingga belum secara optimal didukung oleh sektor lainnya, misalnya layanan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan

- bergizi seimbang dan beragam, perencanaan keluarga, perlindungan sosial bagi kelompok rentan;
- e. belum optimalnya pelaksanaan Deteksi Dini terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
 - f. kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan sehingga meningkatkan angka penyakit menular;
 - g. pentingnya Pengingat Minum Obat dari anggota keluarga untuk mencegah perburukan penyakit belum dipahami secara luas;
 - h. belum terpenuhinya rasio ideal tenaga kesehatan tertentu dibandingkan jumlah penduduk.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta untuk meningkatkan arus distribusi barang, jasa, dan orang utamanya dalam mendukung perekonomian.

Dalam pelaksanaannya yang masih perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi sedang dan rusak, serta terdapat jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- b. terdapat ruas jalan non status yang mempunyai fungsi strategis dan perlu penanganan seperti jalur jalan lintas selatan.

b. Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. semakin meningkatnya kebutuhan air baku, belum sebanding dengan kapasitas daya tampung waduk/bendungan dan embung.
- b. banjir dan rob yang disebabkan karena kondisi sungai yang tidak mampu menampung debit air yang berlebih di musim hujan, serta penurunan tanah pada daerah pesisir utamanya pantai utara.
- c. masih adanya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang dan rusak ringan.

c. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

- a. keterbatasan kuantitas dan kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai standar SDG's sehingga pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan belum optimal serta keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum regional;
- b. akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas pengelola instalasi pengolahan limbah domestik komunal.

d. Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan Gedung Milik Daerah

Dalam sektor jasa konstruksi, daya saing pelaku jasa konstruksi dan kelayakan bangunan gedung milik daerah masih memerlukan perhatian pada hal-hal sebagai berikut:

- a. kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi perlu ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi pasar bebas;
- b. perlunya pemetaan kondisi kelayakan bangunan gedung milik pemerintah.

4) Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang sebagai berikut:

- a. dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang memerlukan koordinasi intensif antar pemerintah
- b. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pemanfaatan ruang dan persyaratan dasar perijinan berusaha belum berjalan dengan optimal;
- c. pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik belum mendapatkan perhatian dalam penetapan kebijakan dalam rencana tata ruang di Kabupaten/ Kota;
- d. jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten/ Kota yang disusun untuk dukungan percepatan pelayanan perizinan/ KKPR dan investasi masih kurang;
- e. kelembagaan penataan ruang di Kabupaten/ Kota dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi penataan ruang belum berfungsi secara optimal;
- f. belum fokusnya perhatian pengendalian Pemanfaatan Ruang di

daerah sehingga belum tersedianya Instrumen Pengendalian pemanfaatan ruang;

- g. belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Pelaksana Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Tengah.

5) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Masih tingginya angka Backlog/kebutuhan rumah di Jawa Tengah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Beragamnya besaran alokasi bantuan stimulan penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota maupun CSR berpotensi ketidaksamaan ketuntasan penanganan RTLH sebagai bagian dari penanganan kemiskinan;
- c. Terdapat beberapa desa yang mendapat alokasi bantuan penanganan RTLH belum optimal dalam memenuhi kuota usulan BNBA karena terkendala pemenuhan persyaratan administrasi serta kemampuan swadaya dari calon penerima bantuan;
- d. Basis data kemiskinan yang sering berubah menyebabkan sulitnya mengukur tingkat capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Banyaknya rumah terdampak bencana yang butuh segera untuk ditangani;
- f. Luasan permukiman kumuh yang selalu bertambah setiap tahun sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali atas lokasi yang ditetapkan kumuh.

6) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Jawa Tengah, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan ketertiban umum, serta penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. masih kurangnya upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu untuk mengatasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. pelanggaran terhadap produk hukum daerah masih cukup tinggi
- c. masih kurangnya jumlah *Early Warning System* (EWS) yang dipasang di daerah rawan bencana;

- d. belum seluruh daerah memiliki dokumen perencanaan kebencanaan hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. masih kurangnya sumber literasi mengenai kebencanaan dan pendokumentasian sejarah kebencanaan;
- f. tingginya kerentanan wilayah pusat ekonomi dan industri;
- g. belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam pembiayaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

7) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. hasil verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan tidak sesuai dengan DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- b. belum adanya pendampingan bagi fakir miskin di dalam panti pasca pembentukan, pelatihan dan pemberian modal bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- c. keterbatasan daya tampung dan pemenuhan layanan panti.
- d. belum meratanya pembentukan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di tingkat desa/kelurahan.

b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. rendahnya peningkatan tenaga kerja yang kompeten;
- b. rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja;
- c. belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. perempuan masih menemui kesulitan dalam mengambil kesempatan dan berkkiprah di sektor politik dan ekonomi;
- b. masih terus terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. adanya kasus perkawinan usia anak;
- d. pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak belum sepenuhnya berbasis hak anak.

3) Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. distribusi dan akses pangan belum merata antar wilayah dan antar waktu.
- b. masih tingginya ketersediaan dan potensi lahan pekarangan/marjinal sebagai sumber pangan keluarga yang belum dimanfaatkan.
- c. masih terdapat daerah dengan resiko kerawanan dan kerentanan pangan.
- d. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.
- e. belum seimbang konsumsi antar kelompok pangan.
- f. masih terdapat pangan segar yang belum memenuhi standar keamanan pangan.
- g. kurangnya pemanfaatan dan pengolahan pangan lokal.

4) Pertanian

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa dan reforma agraria. Terkait hal tersebut permasalahan pertanian yang muncul diantaranya:

- a. belum tersedianya database bidang tanah terkait urusan pertanahan yang merupakan objek pensertipikatan tanah di provinsi Jawa Tengah;
- b. belum optimalnya operasionalisasi kewenangan, koordinasi, konsolidasi GTRA di daerah;
- c. adanya kesenjangan antara realisasi pemenuhan *asset reform* oleh pemerintah pusat dengan realisasi penyelenggaraan *access reform* yang menjadi ranah tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang membutuhkan tanah masih belum sesuai dengan ketentuan.

5) Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- a. masih adanya sungai dalam kondisi tercemar;
- b. menurunnya kualitas udara di Jawa Tengah;
- c. meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- d. masih adanya usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. meningkatnya emisi gas rumah kaca utamanya dari sektor energi dan limbah.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi:

- a. pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan belum dioptimalkan
- b. belum semua kabupaten/kota mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk

perbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. BUMDes sebagai katalisator perekonomian desa masih belum dipahami sepenuhnya oleh desa sehingga masih banyak desa yang belum membentuk BUMDesa dan masih perlunya peningkatan status klasifikasi BUMDes;
- b. belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan guna mendukung pembangunan ekonomi desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. pemakaian alat kontrasepsi dibawah target yang diharapkan
- b. masih tingginya *unmetneed*;
- c. kapasitas tri bina (bkb, bkr dan bkr) yang belum sepenuhnya *capable* dalam pendampingan pembangunan keluarga;
- d. belum semua kabupaten/kota menyusun dokumen grand desain pembangunan kependudukan.

9) Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Diperlukannya integrasi antar moda transportasi dalam mendukung pengembangan pelayanan angkutan umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah aglomerasi perkotaan antar kawasan, wilayah perbatasan dan kawasan yang memiliki nilai strategis pendukung perekonomian;
- b. Tingginya potensi peningkatan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan provinsi dan perlintasan sebidang dengan rel kereta api;
- c. Belum memadainya fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi Jawa Tengah;
- d. Masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Terminal Tipe B utamanya untuk memenuhi standart pelayanan sesuai dengan ketentuan;
- e. Masih diperlukannya fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung rencana pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat;

- f. Masih berjalannya proses pengalihan aset dan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional yang memerlukan masa transisi dalam operasionalisasi pelabuhan utamanya terhadap 3 (tiga) pelabuhan yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

10) Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan tahun 2021 capaian Indikator Kinerja Program (Nilai Survei Komunikasi Publik, Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dan, Persentase Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi) sudah sesuai target. Bahkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatannya ada yang melampaui target seperti kelompok kehumasan yang dikoordinasikan sebesar 68 tercapai 73 kelompok; Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum yang ditargetkan sebesar 145 tercapai 149 rekomendasi; target bandwidth tersedia sebesar 1.600 tercapai 5.800 Mbps; target SKPD terintegrasi infrastruktur TIK sebesar 28 tercapai 34 SKPD.

Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan permasalahan untuk penyempurnaan capaian program/kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika. Misalkan tentang kemanfaatan konten yang disebarluaskan; keberfungsian kinerja kelompok kehumasan; persentase rekomendasi analisis berita dan pendapat umum ditindaklanjuti; efektivitas infrastruktur TIK dan implementasi e-Govt. Kondisi ini diperkirakan karena belum optimalnya penerapan tata kelola/penerapan arsitektur dan inovasi proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan uraian tersebut maka, dirumuskan masalah yang akan diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya revitalisasi pemanfaatan konten, analisis berita, publikasi hasil pembangunan dan, kelompok kinerja kelompok kehumasan;
- b. Perlunya peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK untuk efisiensi pembangunan; dan
- c. Perlunya revitalisasi *e-Government* dalam mendukung kinerja sinergitas birokrasi dan perwujudan *smart province*.

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran

terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. kelembagaan Usaha, masih banyak koperasi yang belum mengimplementasikan prinsip dan jatidiri perkoperasian serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan dari sisi UMKM, masih banyak UMKM yang bersifat informal dan belum memiliki badan usaha atau ijin berusaha;
- b. pembiayaan, dari sisi koperasi masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan pembiayaan dari internal atau kemampuan anggotanya saja dan belum memanfaatkan akses pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi. Sedangkan untuk UMKM, keterbatasan informasi atas program pembiayaan murah, manajemen keuangan yang kurang memadai, serta belum tersedianya laporan keuangan yang akuntabel menyebabkan mereka belum mampu mengakses pembiayaan formal dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- c. produksi dan Pemasaran, koperasi dan UMKM masih menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana produksi, sistem manajemen produksi yang kurang efisien, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses produksi dan pemasaran produk, dan kurang tanggap atas tren pasar yang ada;
- d. sumber daya manusia, baik bagi koperasi dan UMKM adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus/pengelola sehingga belum dapat menerapkan manajemen usaha modern dalam pengelolaan usahanya.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

- a. penurunan pertumbuhan penanaman modal akibat dampak pandemi Covid-19 dan perlambatan terhadap laju ekonomi global;
- b. realisasi penanaman modal yang belum merata dan berkelanjutan;
- c. kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha sebagai akibat dampak pandemi dan penyesuaian regulasi;
- d. persiapan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan urusan penanaman modal seperti

regulasi, kelembagaan, SDM, sarana prasana, sistem informasi dan diseminasi informasi;

- e. kurang intensifnya kegiatan promosi investasi;
- f. kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

13) Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a. masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda;
- b. masih rendahnya kewirausahaan pemuda;
- c. belum optimalnya prestasi atlet Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional;
- d. belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

14) Statistik

Dalam pelaksanaan tahun 2021, capaian Indikator Kinerja Program yaitu persentase ketersediaan data sektoral sebesar 89 persen dan persentase badan publik yang terbuka sebesar 83 persen telah sesuai target. Indikator kinerja kegiatan yaitu Daftar Informasi Publik (DIP) yang diterbitkan badan publik sebesar 70 DIP dan persentase penyelesaian sengketa informasi sebesar 83 persen telah sesuai target. Bahkan indikator kinerja Data sektoral ekonomi dan Infrastruktur pada *Safety Data Sheets* (SDS) sudah melampaui target 7.500 data sektoral menjadi 14.163 data sektoral dan Data sektoral sopolkumham pada SDS melampaui target 9.000 data sektoral menjadi 16.186 data sektoral.

Meskipun demikian masih ditemukan permasalahan berkaitan dengan implementasi program/kegiatan yaitu terkait kemanfaatan data sektoral yang sudah disediakan. Permasalahan tersebut diperkirakan karena belum optimalnya pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, penggunaan kode referensi dan data induk dalam pengelolaan statistik sektoral daerah provinsi. Berkaitan uraian tersebut rumusan masalah yang harus dipecahkan adalah belum terstandarisasinya data sektoral.

15) Persandian

Dalam pelaksanaan tahun 2021, capaian indikator kinerja program prosentase PD yang memiliki keamanan informasi lebih dari 80 persen telah sesuai target sebesar 50 persen. Realisasi indikator kinerja kegiatan semua diatas target yaitu Pengelola persandian yang

ditingkatkan kapasitasnya sudah mencapai 252 orang dari target 201 orang; aplikasi yang diassessment mencapai 152 aplikasi dari target 149 aplikasi; dan Informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi mencapai 44.887 informasi dari target 21.442 informasi.

Meskipun capaian peningkatan kapasitas SDM, capaian aplikasi yang diassessment dan capaian informasi yang menggunakan jaring sandi sudah melampaui target, masih dirasakan kerentanan dalam menjaga keamanan informasi pembangunan. Hal ini diperkirakan karena belum optimalnya pengelolaan resiko dan keamanan sumber daya teknologi informasi di Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan uraian diatas maka dirumuskan masalah yang harus dipecahkan yaitu belum sinergisnya pengelolaan keamanan informasi.

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan menghadapi berbagai kendala baik dari sisi fisik maupun non fisik yaitu:

- a. masih rendahnya nilai-nilai budaya masyarakat;
- b. belum optimalnya pelestarian seni dan budaya.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Jawa Tengah, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi baik berbasis buku fisik maupun yang berbasis teknologi informasi.

18) Kearsipan

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

- a. masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan;
- b. belum optimalnya digitalisasi arsip.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan dengan menjaga produksi perikanan dan garam, mengoptimalkan usaha pengolahan ikan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. belum optimalnya pengelolaan dan sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- b. belum optimalnya jaminan risiko usaha penangkapan ikan;
- c. belum optimalnya pengelolaan budidaya dalam menghasilkan benih dan induk unggul;
- d. masih rendahnya angka konsumsi ikan;
- e. tingginya kerusakan ekosistem pesisir;
- f. belum optimalnya Unit Pengolahan Ikan dalam pemenuhan standar kelayakan produksi;
- g. pengelolaan kelembagaan usaha perikanan dan kelautan masih bersifat konvensional belum berbasis korporasi.

2) **Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a. belum meratanya penyebaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- b. belum optimalnya penataan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) pada Kawasan Strategis Pariwisata Jawa Tengah :
- c. sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren teknologi informasi dan komunikasi :
- d. masih terbatasnya kualitas pelayanan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
- e. masih terbatasnya infrastruktur fisik maupun teknologi informasi komunikasi (TIK) yang dibutuhkan pelaku ekonomi kreatif;
- f. masih kurangnya kemitraan dan kerja sama lintas sektor, publik dan privat.

3) **Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. masih lemahnya kelembagaan usahatani;

- c. belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
- d. belum optimalnya kualitas produk segar, produk olahan maupun produk organik;
- e. masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;
- f. belum optimalnya perlindungan terhadap petani.

4) Kehutanan

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

- a. masih adanya lahan kritis pada kawasan resapan air hulu DAS sehingga fungsi hidroorologis DAS kurang optimal;
- b. masih adanya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan;
- c. masih adanya Pengusahaan Industri Primer Kayu belum memiliki Sertifikasi legalitas kayu berbasis skema (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) SVLK;
- d. masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;
- e. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dan sumber daya mineral dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, industri dan pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan air tanah untuk mendukung kawasan industri semakin meningkat, sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan maupun perusahaan air tanah. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a. Pertumbuhan konsumsi (*demand*) tenaga listrik di Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan *supply* penyediaan tenaga listrik, merupakan potensi untuk pemanfaatan di sektor bisnis dan industri, dan masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik;
- b. Masih rendahnya pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam bauran energi;
- c. Kurangnya pemahaman penambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*good mining practice*);
- d. Masih perlunya peningkatan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam menjaga konservasi air.

6) **Perdagangan**

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. regulasi ekspor-impor yang bersifat dinamis dan spesifik pada tiap negara dan jenis komoditi menyebabkan *eksportir/importir* sering mengalami kendala khususnya saat akan melakukan *clearance* di daerah pabean;
- b. pandemi *Covid-19* menyebabkan arus transportasi angkutan laut antar negara menjadi tidak lancar sehingga terjadi kelangkaan kontainer dan *space* pengapalan produk ekspor, yang berdampak pada naiknya tarif *ocean freight*;
- c. masih perlunya penguatan nama produk Jawa Tengah di pasar Internasional (*Branding* Produk Jawa Tengah) dan perluasan ekspor ke pasar non tradisional;
- d. penataan dan pengembangan sistem informasi perdagangan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha yang belum terbangun;
- e. gejolak harga pangan/fluktuasi harga barang pokok penting dan strategis yang masih terjadi;
- f. kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang optimal.

7) **Perindustrian**

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya

meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhannya dikarenakan tingkat permintaan masih belum sesuai yang diharapkan sehingga tingkat produksinya juga mengalami penurunan dimana dampak pandemi *Covid-19* masih terjadi;
- b. beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhannya dikarenakan tingkat permintaan masih belum sesuai yang diharapkan sehingga tingkat produksinya juga mengalami penurunan dimana dampak pandemi *Covid-19* masih terjadi;
- c. perubahan proses perijinan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dimana terjadi perubahan secara mendasar dalam proses perijinan, sehingga Industri yang ingin melakukan perluasan atau investasi industri baru mengalami kendala karena sistem *Online Single Submission* (OSS) hingga saat ini masih belum bisa berjalan seperti yang diharapkan.

8) Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dari Pusat dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

d. Unsur Pendukung Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam siklus pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

- a. Belum memadai Ketersediaan dan validitas data pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
- b. Belum sepenuhnya hasil evaluasi pembangunan menjadi bahan referensi penyusunan perencanaan;

- c. Sistem perencanaan belum sepenuhnya dapat mengkomodir dinamika perencanaan dan penganggaran.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a. masih rendahnya penggunaan transaksi nontunai, dan penyempurnaan penggunaan *e-commerce* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. kurang optimalnya penggunaan SIM Aset dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan keuangan daerah;
- c. kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang menunjang pelayanan samsat;
- d. masih belum optimalnya kolaborasi antar BUMD dan OPD untuk mengembangkan potensi usaha;
- e. penggunaan *New Sakpole* belum maksimal;
- f. kurang optimalnya penagihan piutang pajak karena adanya *physical distancing*;
- g. banyak obyek pajak yang belum melakukan pengukuran ulang atas pengambilan/ pemanfaatan air permukaan;
- h. potensi retribusi yang belum di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan terdapat tarif retribusi dan tarif air permukaan yang sudah tidak relevan.
- i. belum adanya sistem pelaporan dan pembayaran Retribusi.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang handal, berintegritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Namun, masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. belum terpetakannya secara keseluruhan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan;
- b. pemanfaatan teknologi untuk layanan administrasi kepegawaian belum optimal;
- c. belum optimalnya program pengembangan kompetensi sebagai salah satu infrastruktur pendukung manajemen talenta ASN.

4) Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a. hasil penelitian dan pengembangan belum optimal mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- b. masih lemahnya jejaring dan kerjasama, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan yang melibatkan semua unsur; dan
- c. belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, serta kapasitas SDM yang belum optimal.

e. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:

- a. pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra yang disebabkan karena pengawasan belum berfokus pada hasil 3E, penanganan kasus/pegaduan masyarakat belum optimal serta peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran atau *advisory service* belum optimal;
- b. profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
- c. teknologi Informasi belum digunakan secara optimal dalam kegiatan pengawasan;
- d. belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

f. Unsur Pemerintahan Umum

Tantangan dan permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. ancaman ekstremisme terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang masih membutuhkan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
- b. belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19.

2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

a. Penanggulangan kemiskinan

Pada bulan September 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu dari 11,79 persen pada bulan Maret

2021 menjadi 11,25 persen pada bulan September 2021. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang yaitu dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terutama terkait data dan ketepatan sasaran intervensi. Dampak pandemi Covid-19 juga masih menjadi permasalahan yang harus tetap diwaspadai dan diantisipasi karena dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan di Jawa Tengah. Pandemi Covid-19 dapat memunculkan kemiskinan baru setiap waktu.

Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (*zero*) persen pada tahun 2024. Sesuai dengan kondisi kemiskinan ekstrem saat ini (4,4 persen) atau 1.527,60 ribu jiwa, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Mandat kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 66,64 meningkat menjadi 72,16 pada tahun 2021. IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan dari kategori sedang menjadi tinggi sejak tahun 2017. Dilihat dari angka capaian IPM secara makro, pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan namun terjadi pelambatan pertumbuhan laju IPM dan komponen pembentuknya di tahun 2020. Pada komponen pendidikan yaitu (1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan angka capaian, namun pertumbuhan melambat, dan (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat pada angka capaian maupun pertumbuhan, namun masih berada di bawah capaian nasional. Berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja komponen pendidikan dalam IPM diantaranya adalah dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan lain yang dapat berpengaruh meskipun tidak secara langsung terhadap komponen pendidikan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan bahanbahan literasi berbasis teknologi informasi, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal di era disruptsi.

Sedangkan pada komponen kesehatan yang diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) juga mengalami peningkatan capaian, namun pertumbuhan melambat. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usia harapan hidup diantaranya adalah masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita. Masalah lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup SDM antara lain bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan sehat, didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, pembinaan olahraga sejak dini dan berkelanjutan, serta kebijakan kependudukan yang menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Tengah dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing masih belum optimal.

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,32 persen (c to c). Tiga sektor unggulan Jawa Tengah seluruhnya tumbuh positif meliputi sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen dibandingkan periode Agustus 2020. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan juga mulai menurun. Dari empat komponen kelompok tenaga kerja yang terdampak Covid-19 seluruhnya mengalami penurunan, baik penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, bukan angkatan kerja, serta penduduk yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19. TPT dilihat dari tingkat pendidikan, tercatat bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang paling tinggi TPT, yaitu sebesar 10 persen.

Dengan kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK. Maka isu tentang penyerapan tenaga kerja berbasis demand dan supply side tenaga kerja menjadi isu penting dalam peningkatan kesempatan berusaha dan pengangguran. Meskipun demikian, isu terkait perekonomian daerah dan kesempatan berusaha tetap menjadi penting dan strategis di Jawa Tengah. Pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan akan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar bagi perekonomian daerah saat ini. Isu lain adalah bagaimana terus memperkuat sektor-sektor unggulan Jawa Tengah agar tetap tumbuh positif karena merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Jawa Tengah, serta bagaimana memperkuat sektor koperasi dan UKM yang juga menjadi penyokong

perekonomian daerah saat terjadinya pandemi Covid-19, maupun sektor-sektor lainnya yang hampir seluruhnya terdampak pandemi Covid-19 seperti pariwisata, dan investasi.

d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu global yang berpengaruh pada keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan adaptasi perubahan iklim. Persoalan lingkungan hidup yang masih perlu terus dilakukan peningkatan penanganan antara lain terkait kerusakan DAS, lahan kritis, penurunan kualitas sumberdaya air, penambangan yang belum menerapkan *good mining practice*, pengelolaan persampahan, kerusakan sumberdaya pesisir dan laut, serta belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.

e. Kedaulatan pangan dan energi

Kondisi ketahanan pangan salah satunya ditunjukkan dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada FSVA tahun 2020, masih terdapat 3 kecamatan sangat rentan pangan (prioritas 1) dan 12 kecamatan rentan pangan (prioritas 2). Berdasarkan kondisi tersebut, kerawanan dan kerentanan pangan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Selain itu, stabilitas harga pangan yang dipengaruhi oleh ketersediaan stok antar wilayah dan antar waktu masih menjadi tantangan. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya fluktuasi harga pangan berdasarkan koefisien variasi (KV), dimana semakin kecil KV maka harga semakin stabil. Pada tahun 2020, komoditas cabai merah dan bawang merah merupakan komoditas dengan KV yang cukup tinggi yaitu sebesar 39,15 persen dan 18,81 persen.

Fluktuasi harga dan stok serta masih adanya wilayah dengan kategori daerah rentan pangan menunjukkan bahwa Jawa Tengah belum sepenuhnya berdaulat pangan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mewujudkan sistem pangan yang terintegrasi dengan kelembagaan petani berbasis korporasi. Isu lain yang masih menjadi tantangan yaitu konsumsi yang belum seimbang antar kelompok pangan, belum optimalnya standar mutu dan keamanan pangan, serta produk pangan yang belum sepenuhnya berdaya saing. Terkait kedaulatan energi, permasalahan yang masih terjadi antara lain akses jaringan listrik rumah tangga miskin, masih perlu ditingkatkannya budaya hemat energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan perlu ditingkatkan.

f. Kesenjangan wilayah

Isu penting terkait kesenjangan wilayah adalah akses antar daerah dalam rangka peningkatan konektivitas dan kemudahan distribusi barang dan jasa antar daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Selain itu persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang belum merata juga menjadi persoalan penting yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah, terutama di perkotaan dan perdesaan.

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Beberapa hal terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Jawa Tengah yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan belum optimalnya penerapan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya struktur organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, belum optimalnya penerapan penjabaran kinerja organisasi sampai di level individu, belum optimalnya sistem integritas internal instansi, dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur manajemen talenta ASN. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kemandirian fiskal daerah yang tren dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun. Kemandirian fiskal daerah ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang-ruang fiskal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini di tahun 2020 semakin terlihat menurun dengan signifikan akibat terdampak pandemi Covid-19. Selanjutnya berkaitan dengan penciptaan kondusivitas wilayah juga harus terus tetap dijaga. Beberapa kejadian mengindikasikan munculnya paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Jawa Tengah, yang bahkan terjadi di satuan pendidikan. Permasalahan ini penting untuk dicegah antara lain denganantisipasi tumbuhnya paham ekstremisme yang menjurus pada kekerasan dan berdampak pada tindakan radikalisme dan terorisme, serta penguatan rasa kebangsaan sejak dini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi global dan nasional yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam *World Economic Outlook (WEO)* Bulan Juli 2022, lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,2 persen, atau turun signifikan 1,2 persen dari proyeksi di Januari 2022 sebesar 4,4 persen. Sedangkan tahun 2023 WEO memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan menurun di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,7 persen di tahun 2021 menuju 2,3 persen di 2022, dan 1,0 persen di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1 persen, 3,3 persen, dan 4,6 persen. Sedangkan di Negara Zona Eropa sebesar 5,3 persen, 2,6 persen, dan 1,2 persen. Sementara itu India diproyeksikan yang tumbuh tinggi sebesar 8,9 persen di 2021 dan 7,4 persen di 2022, kemudian akan mengalami moderasi menjadi 6,1 persen di 2023. Sedangkan di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Kondisi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus kita waspadai danantisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia – Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS). Perang Rusia – Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/ *supply* yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global. Harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran USD100 per barel. Sejak awal tahun (*year to date*), harga gas alam naik 127,0 persen, batu bara naik 137,3 persen, CPO naik 26,1 persen, gandum naik 56,5 persen, dan jagung naik 34,3 persen. Secara indeks harga pangan dunia telah mengalami kenaikan 145,0 persen dibanding situasi awal 2020.

Sementara itu tingkat inflasi di Amerika Serikat pada bulan Juli 2022 yang cukup tinggi yaitu 8,5 persen (yang sebelumnya 9,1 persen di bulan April tertinggi dalam 40 tahun terakhir) menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral Amerika

Serikat – *The Fed*, akan melakukan percepatan pengetatan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan sebesar 2,50 persen di bulan Juli 2022 dan berpotensi diikuti dengan kontraksi *balance sheet* yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global.

Sejak awal 2021 sampai dengan Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Inggris, Amerika Serikat, Eropa, Brazil, Meksiko, India, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara sangat signifikan. *Spillover effect* dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai, khususnya terhadap kenaikan *cost of fund* untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (*policy trade-off*) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980an dan 1990an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan *emerging market*.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren menguat. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (*c-to-c*) di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta. Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 dimana pada triwulan I-2022 pertumbuhan mencapai 5,01 persen (*y-o-y*) dan terus meningkat pada triwulan II-2022 menjadi sebesar 5,44 persen (*y-o-y*). Pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat didorong dari sisi konsumsi rumah tangga dan ekspor yang meningkat. Capaian pada triwulan II-2022 ini lebih baik dibandingkan negara lain yang sedang mengalami penurunan perekonomiannya seperti Amerika Serikat yang hanya tumbuh sebesar 1,6 persen, China sebesar 0,4 persen, Mexico sebesar 2,1 persen, Perancis sebesar 4,2 persen, Italia sebesar 4,6 persen, dan Singapura sebesar 4,8 persen.

Sejak tahun 2021, perekonomian Indonesia sudah pulih ke level pra pandemi yang ditandai oleh PDB riil tahun 2021 yang berada 1,6 persen di atas level 2019 dan 7,1 persen di semester pertama 2022. Pemulihan ekonomi yang cepat diikuti oleh terkendalinya inflasi dan merupakan salah satu yang paling moderat di antara negara lain (*peers*).

Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional, ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan

kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Indikator *Prompt Manufacturing Index (PMI)* atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Juli 2022 masih terus ekspansif, pada level 51,3.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli 2022 sebesar USD 4,23 miliar (turun dari bulan Juni 2022 yang sebesar USD 5,15 miliar). Secara kumulatif sampai dengan bulan Juli 2022, ekspor Indonesia mencapai USD 25,57 miliar, turun 2,20 persen dibandingkan bulan Juni 2022 yang sebesar USD 26,16 miliar. Impor pada bulan Juli 2022 senilai USD 21,35 miliar, naik 1,64 persen dibandingkan bulan Juni 2022 yang sebesar USD 21,00 miliar. Sektor strategis seperti manufaktur dan pertambangan tumbuh ekspansif menopang tingginya kinerja ekspor nasional, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,83 persen pada Februari 2022 dari 6,26 persen pada Februari 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun dari sebelumnya 9,71 persen di tahun 2021 menjadi sebesar 9,54 persen di bulan Maret tahun 2022 (capaian terendah semenjak pandemi).

Kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun faktor musiman yaitu bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga. Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen (*y-o-y*), dimana krisis pangan dan energi global memberikan tekanan kepada inflasi domestik sepanjang tahun 2022, serta kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan gangguan suplai domestik pada komoditas *volatile food*.

Bila dibandingkan negara-negara G20 tekanan inflasi di Indonesia masih jauh lebih rendah. Pada bulan Juli 2022, negara-negara G20 mengalami tekanan inflasi cukup besar seperti Negara Turki 79,6 persen, Argentina 64,0 persen, Rusia 15,9 persen, Brazil 10,1 persen, Inggris 9,4 persen, Amerika Serikat 8,5 persen, dan India 7,8 persen, sementara Indonesia sebesar 4,9 persen. Tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi di negara-negara tersebut karena kenaikan harga energi global (BBM, Listrik dan Gas) diredam oleh APBN (*shock absorber*) yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam (sebesar 502 triliun rupiah). Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal dan rapuh,

ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

Terkait potensi transmisinya ke sektor keuangan, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya (BI, OJK, dan LPS), berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan saat ini, kondisi sektor keuangan nasional masih relatif stabil. Fungsi intermediasi perbankan mulai meningkat, tercermin pada peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit. Sementara itu, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) juga tinggi dengan likuiditas yang masih memadai. Cadangan devisa nasional juga masih memadai dan diharapkan dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta momentum pemulihan ekonomi nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, Pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro tahun 2023 yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
- Inflasi sebesar 3,3 persen;
- Nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.750 per USD;
- Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 7,85 persen;
- Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD90 per barel;
- Lifting minyak bumi sebesar 660 ribu barel per hari; dan
- Lifting gas sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Tema kebijakan fiskal tahun 2023 selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 difokuskan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah Pusat adalah pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan *spending better* untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Kebijakan yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 yang didukung dengan asumsi dasar ekonomi makro tersebut di atas adalah dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di tahun 2023 guna pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif yaitu sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 persen;
- Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 persen;
- Gini rasio sebesar 0,375 – 0,378;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49;
- Nilai Tukar Petani sebesar 105,107;
- Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,108.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (*c-to-c*) meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta. Pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen (*y-o-y*), dan kemudian meningkat menjadi sebesar 5,66 persen di triwulan II-2022 (*y-o-y*). Angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian angka nasional yang sebesar 5,44 persen (*y-o-y*).

Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini merupakan hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Struktur ekonomi Jawa Tengah yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha ditopang oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan serta Konstruksi, sedangkan dari sisi pengeluaran ditopang oleh Ekspor dan Konsumsi Rumah Tangga. Kondisi Ekspor Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 10,14 persen (*y-o-y*) dibandingkan triwulan II tahun 2021. Komoditas utama ekspor Jawa Tengah yaitu pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan), pakaian dan aksesorinya (rajutan), kayu dan barang dari kayu, dan perabotan, lampu dan alat penerangan, serta alas kaki dengan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat (44,88 persen), Uni Eropa (14,06 persen), Jepang (7,87 persen), Tiongkok (4,96 persen) dan negara di kawasan ASEAN (5,40 persen). Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang pertumbuhan sebesar 6,14 persen pada triwulan II tahun 2022 (*y-o-y*).

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,75 persen pada Februari 2022 dari 5,96 persen pada Februari 2021. Sementara, angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun dari sebelumnya 11,25 persen di tahun 2021, turun 0,32 persen poin menjadi 10,93 persen di tahun 2022 (Bulan Maret) atau menurun 102,6 ribu jiwa.

Kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun faktor musiman yaitu Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga. Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 5,45 persen (*y-o-y*) yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan tarif angkutan udara.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,20 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 - 9,05 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 - 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

Tabel 3.1.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 - 5,60
2	PDRB ADHK	Miliar Rp	1.101,63
3	PDRB per kapita	Juta Rp	40,87
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48 - 4,80
7	Angka Kemiskinan	%	9,86 - 9,05
8	Rasio Gini	Angka	0,34

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 2) Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;
- 3) Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta *event* pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi;
- 5) Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan subsidi harga;
- 6) Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM;
- 7) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- 8) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- 9) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2021 cenderung meningkat, namun demikian mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19

terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2021, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp.4,758 triliun meningkat sebesar 179,30 miliar rupiah (3,92 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebesar 2,775 triliun rupiah meningkat 547,51 miliar rupiah (24,57 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2020 yang sebesar 2,228 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 1,826 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 107,27 miliar rupiah (6,24 persen) dibanding penerimaan tahun 2020 sebesar 1,719 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2021 sebesar 17,24 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,18 miliar rupiah (7,39 persen) dibanding penerimaan tahun 2020 sebesar 16,05 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 256,07 miliar rupiah dari realisasi tahun 2020 sebesar 2,595 triliun rupiah menjadi 2,339 triliun rupiah. Penurunan realisasi Pajak Rokok sebagai akibat dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pembatasan aktivitas selama PPKM berdampak langsung terhadap menurunnya intensitas dan volume pemberian jasa dan layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2021 sebesar 91,63 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,64 miliar rupiah dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar 93,27 miliar rupiah.

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 11,70 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,87 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan transfer adalah sebesar 7,863 triliun rupiah.

Tabel 3.2.**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021**

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	25.859.780.137.936	25.393.735.934.148	26.633.000.085.963
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.437.914.236.398	13.668.282.278.855	14.695.474.898.162
Pajak Daerah	11.951.919.535.383	11.139.173.309.780	11.718.378.824.580
Retribusi Daerah	114.861.058.851	93.279.991.699	91.634.269.205
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	512.701.993.939	530.091.029.137	508.263.876.971
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.858.431.648.225	1.905.738.818.239	2.377.197.927.406
PENDAPATAN TRANSFER	11.398.681.901.538	11.702.101.655.293	11.871.796.336.054
Dana Bagi Hasil Pajak	564.290.383.834	843.392.119.954	768.488.755.162
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	11.677.937.800	16.888.016.587	267.356.875.272
Dana Alokasi Umum	3.784.512.513.000	3.438.709.973.000	3.432.978.859.000
Dana Alokasi Khusus (fisik)	267.101.813.252	350.564.240.958	401.885.567.398
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.707.320.412.787	6.983.232.690.794	6.932.375.674.222
Dana Insentif Daerah	62.388.421.000	-	68.710.605.000
Dana Penyesuaian	-	68.212.455.000	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.390.419.865	1.102.159.000	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.184.000.000	23.352.000.000	65.728.851.747
Pendapatan Hibah	23.184.000.000	23.352.000.000	64.882.003.502
Lain lain pendapatan	-	-	846.848.245

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021

Selama kurun waktu tahun 2019-2021, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54,94 persen, pendapatan transfer sebesar 44,91 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,14 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 81,34 persen.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2021 (%)

Uraian	2019	2020	2021	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55,83	53,83	55,18	54,94
Pajak Daerah	82,78	81,50	79,74	81,34
Retribusi Daerah	0,80	0,68	0,62	0,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,55	3,88	3,46	3,63
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,87	13,94	16,18	14,33
PENDAPATAN TRANSFER	44,08	46,08	44,58	44,91
Dana Bagi Hasil Pajak	4,95	7,21	6,47	6,21
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,10	0,14	2,25	0,83
Dana Alokasi Umum	33,20	29,39	28,92	30,50
Dana Alokasi Khusus (fisik)	2,34	3,00	3,39	2,91
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	58,84	59,68	58,39	58,97
Dana Insentif Daerah	0,55	0,58	0,58	0,57
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,01	0,01	-	0,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,09	0,09	0,25	0,14
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	98,71	99,57
Lain-Lain Pendapatan	-	-	1,29	0,43

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,20-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2019-2021, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 7,863 triliun rupiah. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pendapatan transfer yang dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.4.**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1.	PAD	17.030.938.105.000
1.1.	Pajak Daerah	14.496.491.520.000
1.2.	Retribusi Daerah	130.666.107.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	630.115.007.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.773.665.471.000
2.	Pendapatan Transfer	8.201.542.504.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.201.542.504.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.908.038.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	25.311.388.647.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2022

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2023, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- c. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat BUMDes Digital Mandiri (BUDIMAN);
- d. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
- e. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (New Sakpole).
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;

- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi *Online* (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
- j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- k. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- l. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2020 kinerja pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19, dengan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk penanganan pandemi dengan menggunakan alokasi SILPA tahun 2019. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “*new normal*” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil pajak (dari 4,6 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun 2021) selaras dengan mulai naiknya pendapatan daerah. Realisasi komponen belanja hibah dan belanja batuan sosial juga mengalami peningkatan. Belanja hibah di tahun 2020 sebesar 5,5 triliun rupiah menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun 2021, dan belanja bantuan sosial di tahun 2020 sebesar 42 miliar rupiah menjadi sebesar 66 miliar rupiah di tahun 2021.

Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi juga terjadi pada komponen belanja pegawai

(dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021).

Meskipun realisasi belanja mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan tingkat serapan rendah seperti masih terdapatnya permasalahan dalam *cleansing* data penerima bantuan sosial agar tidak tumpang tindih, masih kurangnya peminat belanja subsidi karena persyaratan yang ketat dan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan telah dilakukan seperti pembaruan data dan pelaksanaan verifikasi faktual data penerima bantuan, melakukan pendampingan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Tabel 3.5.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	26.151.062.842.457	25.651.740.349.991	25.842.363.948.300
BELANJA OPERASI	16.354.554.423.473	16.223.988.285.131	16.825.242.533.039
Belanja Pegawai	6.591.903.141.578	6.483.761.623.794	5.685.925.255.020
Belanja Barang dan Jasa	4.562.499.451.144	4.104.637.788.228	5.344.064.156.345
Belanja Subsidi	0	0	90.482.166
Belanja Hibah	5.155.826.080.751	5.593.181.623.109	5.728.982.384.318
Belanja Bantuan Sosial	44.325.750.000	42.407.250.000	66.180.255.190
BELANJA MODAL	2.099.719.124.860	996.994.505.160	1.447.519.464.142
BELANJA TAK TERDUGA	2.662.431.206	1.783.884.978.571	72.303.305.000
BELANJA TRANSFER	7.694.126.862.918	6.646.872.581.129	7.497.298.646.119
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	5.248.472.302.270	4.633.245.749.888	5.735.553.033.353
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	1.050.456.112.049	845.543.195.241	493.309.827.766
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.361.431.049.000	1.168.083.636.000	1.268.435.785.000
Bantuan Keuangan kepada Parpol	19.767.399.599	-	
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	14.000.000.000	-	

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021

Pada tahun 2023 komposisi belanja daerah telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,883 triliun rupiah yang diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;
3. Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di seluruh kabupaten;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
10. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2023

- diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan SMK *Boarding School* dan SMK *Semi Boarding School*; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan keterampilan dan ketertiban;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, penyelesaian Kawasan Jatidiri, pembangunan SMK Lumbir Kabupaten Banyumas, tahap lanjutan pembangunan SMA Tawangmangu Kabupaten

- Karanganyar dan SMK Pagentan Kabupaten Banjarnegara, penyediaan sarpras *data center*, pelebaran segmen eksisting ruas jalan Bandungsari-Salem pasca bencana, pengadaan tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TSPT) Regional Magelang, serta penyediaan sarana prasarana rumah sakit;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2023 terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan; Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan perbaikan RTLH pedesaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

Tabel 3.6.**Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Operasi	14.842.447.490.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.223.709.320.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.397.046.280.000
1.3.	Belanja Subsidi	800.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.088.174.530.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	132.717.360.000
2.	Belanja Modal	1.965.253.619.000
3.	Belanja Tidak Terduga	23.100.000.000
4.	Belanja Transfer	9.052.787.538.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	6.290.333.788.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.762.453.750.000
5	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	25.883.588.647.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2019-2021 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.7.**Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021**

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	1.410.440.151.221	1.119.348.228.370	646.485.090.816
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.630.776.601.765	1.119.348.228.370	861.485.090.816
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.612.602.481.841	1.119.095.687.470	861.368.883.047
Pencairan dana Cadangan	-	-	-
Penerimaan pengembalian dana bergulir	140.403.868	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	18.033.716.056	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		252.540.900	116.207.769
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	220.336.450.544	-	215.000.000.000
Pembentukan dana cadangan	-	-	200.000.000.000
Penyertaan modal	180.000.000.000	-	15.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	40.336.450.544	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah 2019-2021 (2021 Unaudited)

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.8.**Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	942.200.000.000
	SiLPA	942.200.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	370.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	300.000.000.000
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Daerah	572.200.000.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1.	PAD	17.030.938.105.000
1.1.	Pajak Daerah	14.496.491.520.000
1.2.	Retribusi Daerah	130.666.107.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	630.115.007.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.773.665.471.000
2.	Pendapatan Transfer	8.201.542.504.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.201.542.504.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.908.038.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	25.311.388.647.000
1.	Belanja Operasi	14.842.447.490.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.223.709.320.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.397.046.280.000
1.3.	Belanja Subsidi	800.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.088.174.530.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	132.717.360.000
2.	Belanja Modal	1.965.253.619.000
3.	Belanja Tidak Terduga	23.100.000.000
4.	Belanja Transfer	9.052.787.538.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	6.290.333.788.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.762.453.750.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	25.883.588.647.000
	Surplus (defisit)	(572.200.000.000)
1	Penerimaan Pembiayaan	942.200.000.000
	SiLPA	942.200.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	370.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	300.000.000.000
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Daerah	572.200.000.000
	SILPA	0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.A

Tabel 3.10.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

No.	Kementerian/PD Provinsi	Jumlah (Rp. 000,-)		
		2020	2021	2022
I	Kementerian Dalam Negeri (DK & TP)	20.390	5.850.700	4.056.694
	Dinpermasdesdukcapil	0	2.983.658	0
	Biro Pemerintahan Otdaker	20.390	1.567.739	2.553.562
	Inspektorat	0	790.000	495.119
	Bappeda	0	381.000	432.421
	DPMPPTSP	0	128.303	575.592
II	Kementerian Pertanian (DK & TP)	390.608.656	461.535.241	280.480.476
	Dintanbun (Dekonsentrasi)	87.269.664	106.094.750	55.083.259
	Dintanbun (TP)	231.481.602	265.812.924	161.923.281
	Disnakeswan	44.286.930	72.110.542	63.473.936
	DKP (Dekonsentrasi)	27.570.460	0	0
	DKP (TP)	0	0	0
	Dishanpan	0	17.517.025	0
III	Kementerian Perdagangan (DK)	0	3.735.902	1.071.148
	Disperindag	0	3.735.902	1.071.148
IV	Kementerian Kesehatan (DK)	11.904.755	66.785.466	70.460.196
	Dinas Kesehatan	11.904.755	66.785.466	70.460.196
V	Kement PU (DK & TP)	150.589.515	142.143.963	107.025.750
	Dinas Bina Marga Cipta Karya	91.600.978	47.793.736	12.376.762
	Dinas PSDA dan Tata Ruang	58.988.537	94.350.227	94.648.988
VI	Kementerian Tenaga Kerja(DK & TP)	6.887.335	6.019.873	6.808.858
	Dinas Tenaga Kerja	6.887.335	6.019.873	6.808.858
VII	Kementerian Sosial (DK & TP)	22.677.090	17.112.154	0
	Dinas Sosial	22.677.090	17.112.154	0
VIII	Kementerian Lutkan (DK & TP)	2.365.866	4.997.705	8.380.561
	Dinas Lutkan (Dekonsentrasi)	2.365.866	4.697.705	4.763.699
	Dinas Lutkan (TP)		300.000	3.616.862
IX	Kementerian Koperasi & UKM (DK)	5.371.153	6.458.686	58.530.916
	Dinas Koperasi & UMKM	5.371.153	6.458.686	58.530.916
X	Kementerian Pora (DK)	8.393.308	8.194.653	5.959.120

No.	Kementerian/PD Provinsi	Jumlah (Rp. 000,-)		
		2020	2021	2022
	Dinas Porapar	8.393.308	8.194.653	5.959.120
XI	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.933.612	3.920.000	0
	Dinas Porapar	1.933.612	3.920.000	0
XII	Kementerian Investasi/BKPM (DK)	427.322	274.890	279.504
	DPMPTSP	427.322	274.890	279.504
XIII	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	726.000	0	0
	DP3AKB	726.000	0	0
XIV	Kementerian Perindustrian (DK)	3.672.461	0	2.216.775
	Disperindag	3.672.461	0	2.216.775
XV	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (DK)	572.216	1.144.613	1.144.613
	Bappeda	572.216	1.144.613	1.144.613
XVI	Arsip Nasional RI	440.905	422.490	733.838
	Dinas Arpus	440.905	422.490	733.838
XVII	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi	120.752.936	0	0
	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
	Dinas Pembermasdes Dukcapil	120.752.936	0	0
Jumlah Total		727.343.520	728.596.336	547.148.449

Sumber: Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2022

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang tersedia sebesar 83.767.555.393 rupiah pada tahun anggaran 2021 dan pada tahun 2022 sementara direncanakan sebesar 9.700.145.074 rupiah

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2021 tertinggi pada bidang pokja kesejahteraan sosial sebesar 34.356.803.333 rupiah dan terendah pada bidang pokja energi baru terbarukan sebesar 288.656.000 rupiah. Perusahaan dengan alokasi program dan anggaran terbanyak adalah PT. Telkom Regional IV Jateng sebanyak 275 program dengan anggaran sebesar 24.972.501.817 rupiah.

Tabel 3.11.**Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

No.	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
1	PT Telkom Regional IV Jateng & DIY	275	24.972.501.817
2	PT Semen Gresik Tbk	76	10.776.655.374
3	Bank Jateng	27	7.719.700.000
4	PT Sri Rejeki Isman Tbk	50	5.006.772.500
5	PT Sumber Segara Primadaya – PLTU Cilacap	22	4.811.005.290
6	PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV	39	4.005.919.750
7	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	259	3.505.862.462
8	PT Phapros Tbk	92	2.941.818.066
9	PT Petrokimia Gresik	7	1.889.999.998
10	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	47	1.457.847.500
11	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	40	1.435.825.063
12	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta	17	1.296.725.000
13	PT INDONESIA POWER SEMARANG PGU	68	1.285.228.500
14	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Cilacap	121	1.111.189.120
15	PT Sinar Tambang Arthalestari	84	1.057.523.219
16	PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica Banjarnegara	13	882.514.960
17	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VII/Jawa 2	5	735.000.000
18	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	23	721.000.000
19	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	38	689.783.994
20	PT Jateng Petro Energi (JPE)	28	578.687.581
21	PDAB Tirta Utama Jawa Tengah	53	490.256.667
22	BPR BKK PURWOKERTO	70	440.333.546
23	BPR BKK SURYA YUDHAKENCANA	40	433.680.000
24	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	21	385.888.596
25	BPR BKK JEPARA	44	368.880.000
26	BPR BKK BLORA	9	359.493.000
27	PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal	70	353.544.099
28	BPR BKK CILACAP	10	350.432.500
29	Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD CMJT)	9	331.025.095
30	BPR BKK KARANGMALANG	6	309.637.300

No.	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
31	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	31	300.000.000
32	BPR BKK PURWODADI	33	285.957.000
33	PT Tirta Investama (AQUA) Klaten	3	269.988.000
34	PT Jamkrida Jawa Tengah	24	255.971.150
35	BPR BKK TEMANGGUNG	23	204.483.900
36	BPR BKK KEBUMEN	4	200.000.000
37	BPR BKK Kendal	29	196.656.848
38	Angkasa Pura Airport	4	194.205.000
39	CV. MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA	4	186.500.950
40	BPR BKK BOYOLALI	7	135.780.185
41	BPR BKK UNGARAN	18	107.445.500
42	BPR BKK TASIKMADU	29	93.923.000
43	Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah	7	86.800.000
44	BPR BKK PATI	16	82.089.500
45	BPR BKK KAB. PEKALONGAN	13	79.544.000
46	BPR BKK DEMAK	11	78.407.412
47	BPR BKK GROGOL	3	47.450.000
48	PT Kimia Farma Tbk Semarang	8	43.650.000
49	BPR BKK MUNTILAN	22	38.734.000
50	BPR BKK BANJARHARJO	10	34.638.150
51	BPR BKK KUDUS	2	28.500.000
52	BPR BKK KAB. TEGAL	6	28.000.000
53	BPR BKK BATANG	1	25.000.000
54	BPR BKK TULUNG	16	17.100.801
55	PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah	4	16.025.000
56	BPR BKK KOTA MAGELANG	4	13.147.000
57	BPR BKK KOTA TEGAL	4	12.827.000
58	PT Coca Cola Amatil Indonesia Central Java	14	0
59	PT Bhimasena Power Indonesia	211	0
60	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	1	0
Total		2225	83.767.555.393

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022

No	Bidang Pokja	2021 (Realisasi/Rp)	2022 (Rencana/Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	34.356.803.333	780.000.000
2	Bidang Infrastruktur	11.005.656.582	3.592.680.000
3	Bidang Ekonomi Rakyat	9.821.191.838	1.985.000.000
4	Bidang Kesehatan	5.555.207.941	400.000.000
5	Bidang Keagamaan	4.753.840.491	554.500.000
6	Bidang Pendidikan	4.513.993.214	1.386.400.000
7	Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan	4.201.223.760	205.082.537
8	Bidang Kedaruratan	3.774.995.400	37.000.000
9	Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.875.555.790	147.782.537
10	Bidang Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata	1.635.789.956	60.000.000
11	Bidang Pendampingan Umum	984.641.088	486.700.000
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	288.656.000	65.000.000
	Total	83.767.555.393	9.700.145.074

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki visi yang akan diwujudkan di tahun 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan <i>guyub</i> untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan <i>guyub</i>	Terciptanya koheisi sosial masyarakat	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
			Indeks Toleransi	Angka	76,60
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good</i>		Persentase tindak pidana yang tertangani	%	90,00
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	<i>governance and clean government)</i>				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Angka	88,00 3,33
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	85,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,50
			Opini BPK	Opini	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	39,00
			Indeks Sistem Merit	Angka	0,82
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Angka Kemiskinan	%	9,86-9,05
			Indeks Gini	Angka	0,34
		Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	8,82 – 8,09
			Persentase penduduk miskin pedesaan	%	10,96-10,05

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	
			Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	450,72	
			Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,75	
			Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	29,75	
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48 - 4,80	
			Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,26	
	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 - 5,60	
			Inflasi	%	3,0 ± 1	
			PDRB per kapita	Juta Rp	40,87	
			Indeks Williamson	Angka	0,56	
			Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,10
				Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,65
				Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,90

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
			Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,20
			Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	9,00 – 10,00
			Nilai Tukar Petani	Angka	104,05
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,88
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,90
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,73
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,58
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,57
		Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	50,65
			Indeks Kualitas Udara	Angka	85,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,25

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,60

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,86-9,05 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,48-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,20-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 40,87 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,88;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,58; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2021, target pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, RKPD Tahun 2023 diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Pertimbangan tersebut yang mempengaruhi beberapa target kinerja tahun 2023 untuk dilakukan penyesuaian dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023 meliputi bidang perekonomian, infrastruktur dan sumberdaya alam lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, dan keuangan.

1. Bidang Perekonomian

- a) Peningkatan fasilitasi asuransi nelayan, pelayanan perijinan bagi nelayan, dan kesejahteraan nelayan;
- b) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian seperti lahan, pupuk bersubsidi, subsidi gabah, bibit, alat mesin pertanian (alsintan), jaringan irigasi, dan air baku (embung);
- c) Peningkatan fasilitasi pemasaran produksi hasil pertanian, termasuk jaminan harga jual produk pertanian;
- d) Perbaikan tata kelola data petani secara digital dan real time;
- e) Peningkatan bantuan ternak untuk masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat;
- f) Peningkatan fasilitasi kemudahan kredit terutama di Bank Jateng bagi pelaku UKM;
- g) Peningkatan fasilitasi pemasaran bagi produk unggulan daerah seperti produk batik, garmen, makanan, dan lainnya;
- h) Peningkatan pariwisata melalui even wisata, fasilitasi pengembangan desa dan kampung wisata, dan perbaikan destinasi wisata lainnya;
- i) Memperbanyak program padat karya;
- j) Peningkatan pelatihan, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, termasuk pengembangan wirausaha;

2. Bidang Infrastruktur dan SDA-LH

- a) Peningkatan dan perbaikan jalan terutama jalan rusak akibat bencana;
- b) Peningkatan kuota stimulan rumah sederhana sehat dan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH);
- c) Peningkatan bantuan sambungan listrik murah;
- d) Peningkatan sarana transportasi terutama untuk daerah perbatasan dan sarana transportasi untuk anak sekolah;
- e) Perbaikan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, termasuk kebijakan pengelolaan persampahan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial;
- f) Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam lebih optimal;
- g) Mengoptimalkan pengelolaan DAS secara terpadu;
- h) Penanganan banjir rob di pesisir utara, termasukantisipasi banjir;

3. Bidang Sosial Budaya
 - a) Mendorong dana BOSDa untuk sekolah menengah dan madrasah swasta agar ditingkatkan alokasi anggarannya;
 - b) Peningkatan sarana prasarana sekolah dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) Memperbaiki proses dan layanan belajar mengajar *online* serta menuju *offline* terutama di wilayah pedalaman atau di komunitas dengan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang tidak atau kurang stabil;
 - d) Percepatan perluasan vaksinasi untuk masyarakat termasuk untuk anak sekolah;
 - e) Penguatan Jamkesda;
 - f) Peningkatan infrastruktur pedesaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat;
 - g) Penguatan ketahanan keluarga, serta penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Bidang Pemerintahan
 - a) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah terutama berkenaan dengan program pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat dampak Covid-19;
 - b) Perbaiki regulasi terkait pemberian bantuan kepada masyarakat;
5. Pengelolaan Keuangan
 - a) Perbaiki pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
 - b) Peningkatan upaya terobosan guna peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain dengan penggalan sumber-sumber pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat;
 - c) Perbaiki pola penganggaran untuk stimulan desa wisata, desa tangguh bencana, pengembangan desa berdikari ekonomi kerakyatan melalui bantuan ke UMKM dan petani produktif;
 - d) Peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan pemerintahan desa untuk penyertaan modal BUMDesa sebagai sarana penggerak ekonomi desa.

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023

Pembangunan nasional tahun 2023 mengangkat tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang diarahkan pada kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Negara.

Kebijakan pembangunan nasional tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2023 adalah dalam rangka pencapaian beberapa sasaran makro yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49.

c. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Prioritas daerah pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana difokuskan pada:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit,

- dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan *database* (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, fasilitasi sarpras budidaya peternakan untuk penanggulangan kemiskinan, pengendalian penyakit hewan menular strategis, peningkatan kapasitas SDM pertanian dan peternakan, serta penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - d) Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - e) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, penguatan keberantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keberantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
 - f) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - g) Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;

- h) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
- i) Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
- j) Peningkatan ketahanan bencana melalui penguatan dokumentasi dan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan prioritas daerah penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja. Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada:

- a) Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;
- b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan,

utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;

- c) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;
- d) Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja;

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif yang artinya Jawa Tengah sudah mengalami bonus demografi. Di tengah bonus demografi saat ini, tantangan dalam membangun sumberdaya manusia sejak dini perlu menjadi perhatian mengingat bibit-bibit unggul telah ada dari sekarang yang ke depan akan menjadi generasi penerus yang produktif menuju generasi emas 2045. Untuk mewujudkan generasi masa depan berkualitas, maka diperlukan upaya yang komprehensif dengan harapan di Jawa Tengah tercipta generasi pintar dan bugar (GEN#TAGAR) yang memiliki kecerdasan paripurna, produktif, inovatif, berkarakter kuat, serta sehat jasmani dan rohani.

Untuk itu, prioritas daerah pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada:

- a) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) antara lain dalam bentuk penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal; Pemerataan akses layanan pendidikan melalui penyediaan prasarana sarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas; Peningkatan karakter SDM melalui peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama,

- budaya, dan kearifan lokal;
- b) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular yang difokuskan pada kasus TB, HIV AIDS, malaria, dan DBD, serta pengendalian penyakit tidak menular yang difokuskan pada penyakit jantung, kanker, dan stroke, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat melalui implementasi program GERMAS, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan *event* olahraga;
 - c) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - d) Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas daerah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah difokuskan pada:

- a) Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta *consulting partner* dan *quality assurance*;

- c) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
- d) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- e) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Implementasi lainnya dari sekolah tanpa sekat adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Program pelatihan tentang demokrasi dan pemilu ini terutama adalah untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Kegiatan lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaan, politik, dan pemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya politik gotong royong.

Program pendidikan anti korupsi juga menjadi salah satu program unggulan dalam konteks sekolah tanpa sekat. Pendidikan anti korupsi ini dilakukan melalui integrasi ke dalam penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Program lain adalah magang gubernur untuk SMA/SMK. Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik.

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan

yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Bentuk implementasi program unggulan ini antara lain dengan memberikan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama serta peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan.

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Bentuk penjabaran program unggulan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.

Penerapan teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Bentuk pelayanan publik lainnya yang didorong untuk dikembangkan adalah Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang ada di Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota dengan mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasi program ini juga didukung dengan upaya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN dan implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli, tidak hanya di tataran pemerintah provinsi tetapi juga sampai kabupaten/kota.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan fokus pada penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan Program Kepeloporan dan

Kepedulian Pemuda (PKKP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 Perangkat Daerah, 1 Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulan bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah, yang hingga saat ini sudah dilakukan inisiasi dalam mengimplementasikannya.

Program kemudahan akses kredit UMKM adalah program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Bentuk penerapan program ini antara lain melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM.

Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Implementasi penguatan BUMDesa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa, serta penyertaan modal kepada BUMDesa dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan *start-up* wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Upaya implementasi program tersebut antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal bagi wirausaha baru,

pengembangan aplikasi *e-commerce*, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga ditingkat produsen dan konsumen; membangun sistem informasi tentang ketersediaan dan stok pangan secara *real time*; menjamin pemasaran produk pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.

Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Sasaran penerima asuransi adalah petani yang sudah memiliki kartu tani.

Program melindungi kepentingan nelayan adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja. Jaminan tersebut berupa pemberian asuransi bagi nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Implementasi lainnya dari program ini adalah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT), pengembangan Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP), serta pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan".

7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri. Implementasinya berupa perbaikan daerah irigasi, serta perbaikan dan pembangunan embung.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam

mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menginternalisasi kebijakan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga, pembukaan kawasan industri baru juga didukung dengan pemenuhan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti penyediaan air baku, listrik, akses jalan, dan permukiman bagi pekerja.

Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan adalah integrasi hulu-hilir, integrasi berbasis organisasi pertanian dan konsolidasi lahan, usaha pada petani dengan lahan sempit, pinjaman dan jaminan kredit dari perbankan, serta pemasaran produk berbasis *online*. Pola pengembangan pertanian terintegrasi yaitu:

- a) Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain, antara lain melalui agrowisata, minapadi, dan integrasi bawah tegakan;
- b) Integrasi pertanian dengan kemudahan akses modal, jaminan usaha, dan pemasaran, antara lain melalui subsidi bunga dan asuransi gagal panen.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi program ini antara lain penyuluhan paradigma sehat, edukasi pasien dan keluarga pasien, *homecare*, *homevisit*, *daycare*, kolaborasi/ interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor, peningkatan *Public Safety Center* (PSC) 119 tingkat provinsi, pemanfaatan *command center* peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu di fasyankes.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Implementasinya antara lain pengelolaan SMK *boarding* dan SMK Negeri semi *boarding*, bantuan beasiswa miskin (BSM), Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, serta uji kompetensi siswa SMK miskin.

Program selanjutnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel, yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan. Bentuk kegiatan dari program ini adalah pemberian BOSDa untuk sekolah swasta, dan pemberian bantuan hibah sarpras keagamaan, pendidikan keagamaan, dan hibah kepada lembaga keagamaan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Bentuk implementasinya antara lain parade seni budaya, peggalaran seni, pertunjukan kesenian rakyat, pengembangan daya tarik wisata, dan Jambore Ekonomi Kreatif (*Workshop* Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa).

Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk olahraga serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Program ini dilakukan melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri.

Program lainnya adalah pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan

keberlanjutan lingkungan. Bentuk implementasinya antara lain edukasi lingkungan di tingkat sekolah, pengembangan budaya hemat energi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan (hutan, lahan, air tanah), pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan desa ekowisata, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, serta pembentukan desa tangguh bencana.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2018-2023), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
1	Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian	Penanggulangan Kemiskinan	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita; Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan sehat; Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, pembinaan olahraga sejak dini dan berkelanjutan, serta belum seluruh Kabupaten/Kota mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam kebijakan pembangunan.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
3	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan	a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha b. Kedaulatan pangan dan energi	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
	peningkatan pelayanan infrastruktur		
4	Kerusakan DAS, lahan kritis, penurunan kualitas sumberdaya air, penambangan yang belum menerapkan Good Mining Practice, pengelolaan persampahan, kerusakan sumberdaya pesisir dan laut, serta belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
6	Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
7	Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Berikut ini rencana program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 4.3.

Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Pertumbuhan Ekonomi			
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
		Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana		1.235.735.513.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	162.275.169.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	440.156.525.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.302.680.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.665.829.000
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.050.000.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.100.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	23.610.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	55.000.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.470.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.485.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.364.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.012.100.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.095.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.854.930.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	55.086.882.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.800.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	128.749.179.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.404.216.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.398.751.000
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.975.000.000
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.725.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.099.062.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10.009.920.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	550.000.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.030.000.000
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.200.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	919.530.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	600.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.530.303.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39.352.123.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.169.286.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.973.452.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.528.875.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.581.051.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.554.680.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.766.930.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	96.139.270.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.509.080.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	17.373.553.000
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	6.014.991.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	24.265.700.000
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.338.232.000
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.459.494.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.222.611.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.200.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	7.356.553.000
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.176.129.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	14.496.403.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.042.185.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.309.004.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	31.044.648.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.200.663.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.867.059.000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	619.870.000
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	20.057.133.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.322.462.000
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.500.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Angka Kemiskinan			
	Indeks Gini			
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka			
		Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran		3.149.441.014.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.286.733.393.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	402.995.427.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	96.244.958.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.817.800.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.517.151.000
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.118.249.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.095.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.194.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.482.300.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	53.401.624.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	157.457.147.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	380.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	400.000.000
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12.656.892.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.946.979.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.348.152.000
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.052.524.000
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.025.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.200.000.000
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.845.000.000
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	677.000.000
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	569.344.000
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	255.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	235.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	50.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.255.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	175.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.945.331.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.891.831.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.238.280.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	135.030.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.305.589.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	312.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.995.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.128.310.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	9.225.923.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	15.384.780.000
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	296.000.000
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing		3.413.336.496.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.120.933.060.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	857.573.010.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.402.600.000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	385.358.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	431.790.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.331.631.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.848.054.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	603.244.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.817.231.000
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.532.500.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.502.836.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	275.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	639.210.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	702.500.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	625.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	330.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	275.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	18.408.837.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	143.005.120.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	19.742.500.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	7.079.250.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.969.250.000
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.513.200.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.125.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.085.315.000
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi			
Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA			
		Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah		18.085.075.624.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.393.451.471.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	111.305.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	672.698.000
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.216.576.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	310.000.000
			PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	925.000.000
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.095.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	365.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	40.512.500.000
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	30.809.684.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.200.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	4.350.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	734.063.000
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	200.672.868.000
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.255.700.000
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.336.130.000
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	439.172.225.000
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.184.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	6.961.500.000
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.578.269.000
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.683.000.000
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	189.596.906.000
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	273.576.087.000
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.400.000.000
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.909.800.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.092.324.228.000
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.010.819.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	40.801.764.000
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	17.176.315.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.768.613.000
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.440.000.000
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.189.196.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.396.969.000
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.687.694.000
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.328.050.000
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.372.082.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	106.751.642.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.382.655.000
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.972.120.000
			TOTAL	25.883.588.647.000

4.3. Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 dikembangkan berbagai inovasi pembangunan daerah. Inovasi yang dikembangkan baik bersumber dari kebijakan pemerintah daerah maupun inovasi dari masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

1. Inovasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah antara lain:

a. Kemandirian Energi Berbasis Potensi Sumber Energi Lokal Desa

Pada kuartal I 2022, kondisi dan situasi geopolitik internasional cukup menantang bagi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di Jawa Tengah. Ketegangan geopolitik Internasional juga menimbulkan risiko tersendiri. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga terhadap pemulihan ekonomi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang terdampak karena ketegangan geopolitik tersebut. Harga energi utamanya Gas menjadi fluktuatif dan cenderung mengalami trend kenaikan. Kenaikan harga energi tentu akan berdampak pada kenaikan inflasi. Jika melihat data BPS volume impor gas Indonesia mencapai 6,24 juta ton pada 2021. Sedangkan konsumsi harian produk LPG di Jawa Tengah awal 2022 menurut Pertamina Patra Niaga sebesar ±4.360 Metric Ton per hari. Diperlukan strategi untuk pemanfaatan energi non migas, dengan prioritas energi baru yang terbarukan (EBT) memanfaatkan potensi lokal dalam membangun kemandirian energi.

Dalam upaya meningkatkan Kemandirian Energi tingkat lokal Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Bidang EBT dengan berbasis potensi sumber daya alam yang berada di wilayah setempat. Biogas Ternak merupakan Sarpras EBT yang memanfaatkan potensi lokal setempat berupa limbah hewan. Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021 memiliki 157 unit Biogas tersebar di berbagai daerah yang bersumber dari APBD. Pada TA 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membangun 113 unit digester biogas untuk berbagai daerah. Direncanakan juga pada 2023 sejumlah 196 unit digester biogas tersebar di seluruh Jawa Tengah. Kegiatan Ini menjadi program untuk mendukung kemandirian energi dari tingkat desa.

Mulai tahun 2021 pola kegiatan yang dikembangkan dengan cara pemberdayaan peternak dan industri rumah tangga. Sehingga sekarang sudah banyak masyarakat yang mengusulkan, dengan pola padat karya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membantu dari aspek peralatan dan teknologi, peran masyarakat ikut bergotong-royong mempersiapkan sarana pendukungnya. Dengan Pembangunan Digester Biogas, masyarakat bisa menjadi mandiri di bidang energi, seperti di Desa Samirono, Kecamatan Getasan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2022 telah memberikan hibah kepada Kelompok Tani Permataganik di Desa Samirono sebanyak 30 unit dengan kapasitas 180 m³. Sudah terbangun 24 unit, sebagian masih progress pembangunan.

Masyarakat Desa Samirono mulai merasakan manfaat dari pembangunan digester biogas, konsumsi gas LPG bagi kebutuhan hariannya sudah diganti dengan sumber energi Biogas. Selain itu, masyarakat di Desa Samirono juga memanfaatkan sumber energi Biogas tersebut untuk kegiatan produktif. Adanya pemanfaatan energi biogas di Desa Samirono, meningkatkan jumlah usaha UMKM. Produk samping dari Biogas yaitu slurry dapat dimanfaatkan warga untuk dijual sebagai pupuk organik.

Upaya promotif juga dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Program Penghargaan Desa Mandiri Energi. Desa Mandiri Energi adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 persen kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Penghargaan Desa Mandiri Energi bertujuan untuk memotivasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan energi baru terbarukan berbasis potensi masing – masing daerah. Desa Mandiri Energi yang mendapatkan penghargaan di tahun 2021 adalah:

- 1) Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap dengan komoditas PLT Hybrid Bayu dan PLTS Rooftop;
- 2) Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan komoditas PLTMH dan Biogas;
- 3) Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dengan komoditas Biogas dari limbah ternak.



Gambar 4.1
Pengembangan Biogas di Desa Samirono, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang

b. Subsidi Bunga Kredit

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa. Sebagian penduduk miskin di Jawa Tengah bermatapencaharian sebagai petani. Dan di tengah kondisi global yang tidak menentu, serta dipengaruhi oleh iklim maka kehidupan petani pun dapat terpengaruh. Di sisi lain, perekonomian Jawa Tengah salah satunya ditopang oleh sektor pertanian sebagai sektor unggulannya. Untuk itu, sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko yang dapat mempengaruhi sektor pertanian secara umum dan kehidupan petani secara khusus, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan inovasi kebijakan berupa subsidi bunga kredit untuk petani.

Subsidi bunga kredit ini adalah pemberian kredit untuk modal kepada petani melalui lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur yaitu Bank Jateng yang bunga kreditnya dijamin atau dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD. Inovasi kebijakan ini juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah diberikan kepada UMKM dan koperasi.

Program subsidi bunga kredit untuk petani ini dilakukan mulai tahun 2022 yang diberikan kepada petani di 5 (lima) kabupaten sebagai pilot project yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonogiri. Mekanisme yang diterapkan dalam program ini adalah pemberian kredit kepada petani dengan plafon 5-

10 juta per petani, dengan masa pengembalian satu musim tanam atau yarmen (bayar waktu panen). Persyaratan dan kriteria pemberian subsidi adalah petani tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, memiliki lahan maksimal 1 hektar, memiliki surat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan, dan rekomendasi dari LKMA. Dalam hal petani terkendala pembayaran akibat gagal panen maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melibatkan Jamkrida sebagai penjamin kredit.

Secara keseluruhan program subsidi bunga kredit bagi petani ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada petani khususnya bagi petani yang memiliki lahan sempit dengan modal terbatas (dimungkinkan petani ini juga masuk dalam kelompok desil 1 dan 2 dalam DTKS);
- 2) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan dengan subsidi suku bunga dan imbal jasa penjaminan pertanian kepada petani;
- 3) Mendukung peningkatan produksi dan produktivitas melalui akses pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.



Gambar 4.2
Launching Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Petani

2. Inovasi Masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan fasilitasi dan pendampingan pengembangan inovasi yang berasal dari masyarakat. Inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk tertentu atau menciptakan produk tertentu yang dapat mendukung pada peningkatan nilai tambah yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kampung Marketer

Kampung Marketer ini dikembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Karangmocol Kabupaten Purbalingga. Kampung marketer ini sekarang

dikenal dengan Komerce. Kampung Marketer ini dikembangkan dalam rangka memberikan jasa optimalisasi penjualan melalui e-commerce dan untuk menahan laju urbanisasi masyarakat desa ke kota. Tentunya urbanisasi berdampak pada terhambatnya pembangunan desa, dimana penduduk desa usia produktif akan bermigrasi ke kota, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Oleh karena itu pembangunan ekonomi desa sangat diperlukan agar desa tetap dapat memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakatnya,

Saat ini Kampung Marketer sudah berhasil menciptakan ratusan pemasar secara online yang handal. Di kampung ini juga membuka wisata edukasi untuk masyarakat di luar daerah Purbalingga. Sehingga siapa saja dapat berkesempatan untuk memiliki keterampilan pemasaran yang handal. Selain itu untuk para pemilik lapak baik di desa maupun kota dapat menggunakan jasa promosi agar penjualannya semakin meningkat. Saat ini Komerce ini memiliki pegawai sekitar 300 orang dengan omset sampai dengan 3 milyar rupiah.

Dengan pengembangan Kampung Marketer ini maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat selain dapat meningkatkan pemasaran produknya, juga dapat mengurangi pengangguran. Karena di kampung ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak terutama untuk wilayah Kabupaten Purbalingga.



Gambar 4.3
Kampung Marketer di Kabupaten Purbalingga

b. Pengolahan Limbah Untuk Energi

- Pengolahan limbah plastik menjadi BBM

Penggunaan plastik yang begitu masif dalam kehidupan sehari-hari berdampak pada peningkatan limbah plastik di Indonesia. Secara keseluruhan total sampah plastik yang dihasilkan mencapai 189 ton/hari jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi sampah hingga 30% melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sampai 2025. Khusus untuk sampah plastik, Pemerintah menetapkan target penurunan hingga 70% pada 2025.

Salah satu inovasi masyarakat di Jawa Tengah yang menjadi alternatif solusi dalam penanganan sampah plastik yaitu FASPOL (*Fast Pyrolysis* untuk Penanganan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Minyak). Faspol mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor, mesin diesel, keperluan rumah tangga dan lain-lain. Kegiatan pengolahan sampah plastik dengan mesin pirolisis telah dilakukan sejak tahun 2020. Seiring berjalannya waktu sistem pengolahan sampah menggunakan mesin pirolisis telah dilakukan perbaikan sehingga lebih efisien dalam prosesnya.

Dalam reaktor terjadi proses pirolisis pada kisaran suhu 100°C - 300°C untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar setara bensin, solar, minyak tanah dan tiner (Pengujian dilakukan di Laboratorium UPT Universitas Diponegoro, dimana kualitas dari hasil produksi mesin pirolisis menggunakan parameter angka cetane, nilai kalor, densitas dan viskositas dengan menggunakan perbandingan terhadap hasil uji solar dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi).



Gambar 4.4
Fast Pyrolysis untuk Penanganan Sampah Plastik
menjadi Bahan Bakar Minyak dari Kabupaten Banjarnegara

- Bioreaktor Kapal Selam

Bioreaktor Kapal Selam merupakan inovasi hasil dari warga masyarakat Kabupaten Pati. Inovasi ini mampu mengolah limbah rumah tangga, limbah pertanian dan peternakan menjadi 3 (tiga) produk antara lain: Pupuk, Dekomposer dan Gas Metana.



Gambar 4.5
Bioreaktor Kapal Selam

Pupuk yang dihasilkan berupa pupuk organik cair dan padat, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 10 hektar lahan di sekitar bioreaktor. Dengan pupuk organik, warga tidak perlu membeli dan menggunakan pupuk kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Dekomposer merupakan produk lain yang dihasilkan oleh alat ini, produk ini merupakan mikroba yang mampu mengurai atau menghancurkan sampah organik yang dapat dikonsumsi kembali oleh tanaman hijau. Gas metana bisa diolah menjadi gas untuk kompor rumah tangga selain itu dapat dikonversi menjadi listrik. Alat ini adalah sarana, untuk mengembangkan kawasan pertanian secara terintegrasi. Tidak ada residu dalam proses bioreaktor kapal selam. Semua akan seperti siklus yang berputar. Inovasi ini telah memperoleh penghargaan dari Kemenristekdikti pada perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-24 Tahun 2019 melalui ajang Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional kategori Labdha Kretya Sub Kategori Pengembangan Sumber Daya Alam

c. Pengembangan Drone Pertanian

Bidang pertanian merupakan sektor strategis yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun menjadi sektor yang strategis, ketersediaan lahan baku pertanian justru semakin menyempit akibat alih fungsi lahan menjadi tempat tinggal yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Hal ini diperparah dengan minimnya minat generasi muda untuk terjun langsung dalam kegiatan pertanian. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menarik minat calon petani muda, hingga peningkatan hasil produksi. Salah satu teknologi yang dapat menjembatani generasi muda dengan dunia pertanian adalah

pemanfaatan teknologi drone pertanian. Drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan *remote control* jarak jauh.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi uji coba pengembangan drone pertanian tipe penyemprot. Drone ini merupakan produk yang dikembangkan secara kolaboratif oleh inventor dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Temanggung. Drone ini dapat digunakan untuk kegiatan pemupukan dengan menggunakan pupuk cair dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan pestisida. Dengan menggunakan teknologi drone proses penyemprotan menjadi lebih cepat dan hemat. Selain itu juga dikembangkan drone pemupukan yang dikhususkan untuk menyebar pupuk granule/padat.



Gambar 4.6
Drone Pertanian Tipe Penyemprot

Seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan teknologi dalam rangka modernisasi pertanian, terdapat potensi pengembangan drone pertanian antara lain untuk penanaman benih, monitoring kesehatan tanaman, pemetaan lahan yang terintegrasi, pengendalian hama tingkat lanjut serta pengembangan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Kebijakan Umum

5.1.1. Arah Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata. Pengembangan wilayah ini juga memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan internasional yang tertuang dalam SDG's. Berdasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa poros/wilayah, yaitu:

- 1) Poros pengembangan Utara – Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong – Kedungsepur – Wanarakuti – Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan wilayah Jawa Tengah;
- 2) Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmas-cakeb – Purwomanggung – Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan, serta meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan;
- 3) Poros pengembangan Utara – Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten, diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela;
- 4) Poros pengembangan bagian tengah diarahkan untuk percepatan pembangunan koridor tengah dengan tetap menjaga dan meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi – Lawu;
- 5) Wilayah perbatasan timur dan barat diarahkan untuk percepatan pembangunan guna meningkatkan keserasian pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi;
- 6) Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Selanjutnya dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Jawa Tengah ditetapkan berbagai strategi pengembangan wilayah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 2) Peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
- 3) Pengembangan prasarana wilayah;

- 4) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- 5) Pemertahanan lahan pertanian;
- 6) Pengembangan kawasan industri;
- 7) Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis;
- 8) Pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak; dan
- 9) Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (hasil analisis)

Gambar 5.1
Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Pemerintah pusat berinisiasi untuk mendorong investasi yang mampu mempengaruhi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah yang diharapkan secara tidak langsung akan dapat berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Inisiasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama pada arahan pengembangan wilayah Pulau Jawa – Bali.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perubahan RTRW dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

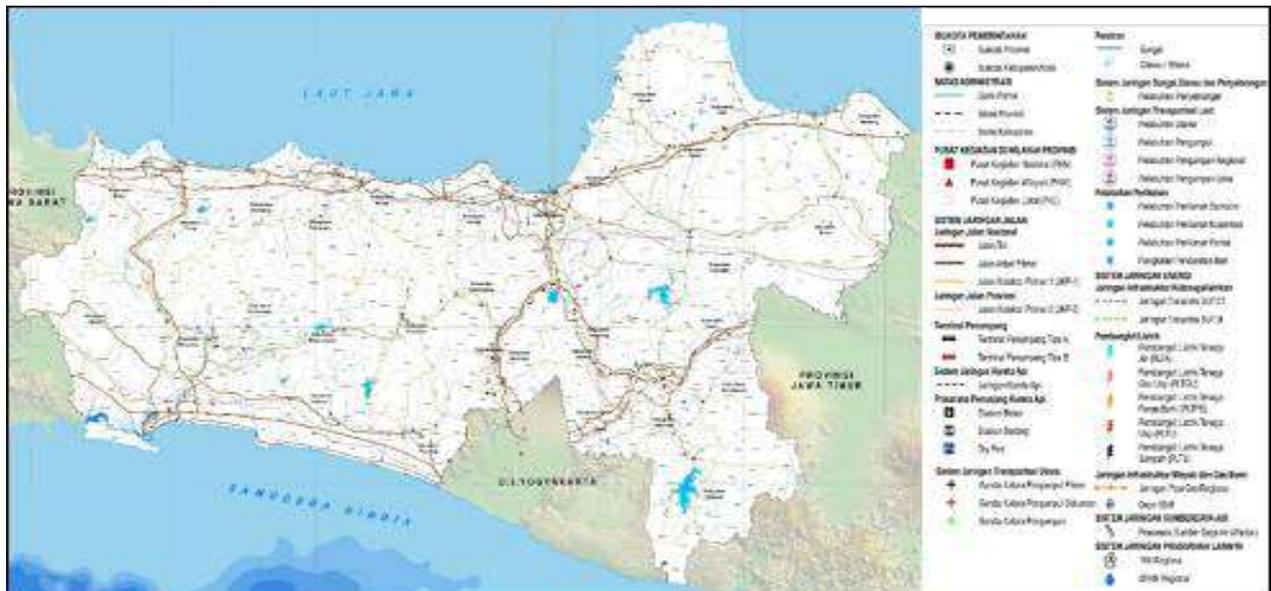
Penetapan perubahan ini selaras dengan diundangkannya peraturan-peraturan di tingkat pusat untuk pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

5.1.2. Kebijakan Penataan Ruang

5.1.2.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah diperlukan jaringan prasarana wilayah yang menekankan pengembangan prasarana dan sarana pendukung untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah yang menjamin keterhubungan antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW dan PKL). Adapun pengembangan jaringan tersebut meliputi jaringan transportasi yang terdiri dari pengembangan jaringan jalan, angkutan umum aglomerasi perkotaan, integrasi antar moda transportasi, bandar udara, reaktivasi jaringan rel kereta api, pelabuhan, terminal; jaringan prasarana energi; serta jaringan prasarana sumber daya air. Pengembangan jaringan prasarana wilayah tersebut dilakukan antara lain melalui:

- 1) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
- 2) Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung kawasan-kawasan strategis;
- 3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik mendukung pasokan energi nasional (sistem Jawa - Bali - Madura (JAMALI); dan
- 4) Pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan domestik, sektor industri, dan pertanian.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5.2
Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Jawa Tengah

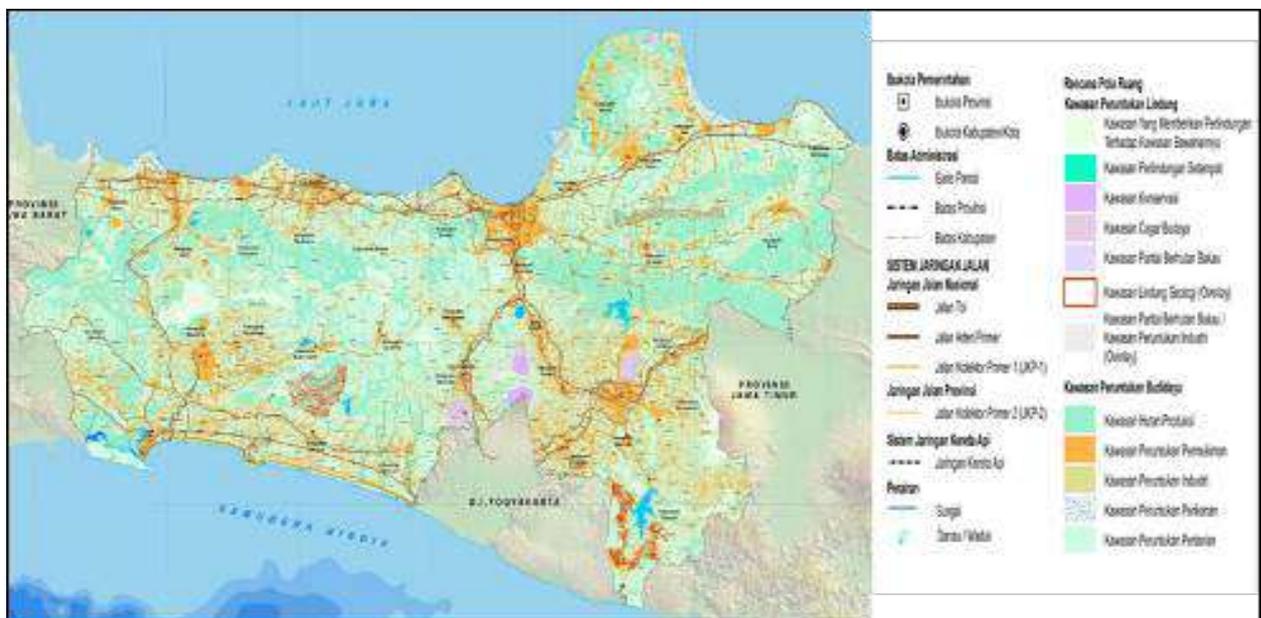
5.1.2.2. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang bersinergi dinamis untuk membentuk penggunaan lahan yang ideal sesuai daya dukung dan daya tampung. Kebijakan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 2) Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30 (tiga puluh) persen, yang terdiri RTH publik minimal 20 (dua puluh) persen, dan RTH privat minimal 10 (sepuluh) persen;
- 3) Rehabilitasi lahan kritis;
- 4) Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air; dan
- 5) Peningkatan upaya mitigasi pada kawasan rawan bencana.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan produksi;
- 2) Pemantapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 3) Pengembangan kawasan agropolitan;
- 4) Pengendalian kawasan pertambangan;
- 5) Pengembangan kawasan industri;
- 6) Pengembangan kawasan pariwisata; dan
- 7) Peningkatan kawasan permukiman.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5.3
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Jawa Tengah

5.1.2.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Jawa Tengah meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Nasional di Jawa Tengah meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana berikut:

- A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);
- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Kawasan Candi Prambanan, dan Kawasan Sangiran;
- C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak).

Selanjutnya penetapan kawasan strategis Jawa Tengah memperhatikan kesinergisan dengan Kawasan Strategis Nasional. Penetapan juga didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Kawasan tersebut terbagi menurut 3 sudut kepentingan yaitu:

- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan Industri (KI) Terpadu meliputi Kawasan Industri (KI) Kendal – Semarang – Demak, KI Brebes, KI Rembang, KI Cilacap, KI Kebumen; dan KI Terpadu Batang;
 - b. Kawasan agropolitan meliputi MANGGA MAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas); GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar); SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang); dan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara);
 - c. Kawasan perkotaan meliputi Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, dan Purwomanggung;
 - d. Kawasan strategis pariwisata terpadu meliputi Kawasan Surakarta dan sekitarnya, Borobudur – Kebumen – Dieng dan sekitarnya, dan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya;
- 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Masjid Agung Demak, Candi Dieng, Candi Gedongsongo, Candi Cetho – Suku, dan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran;
- 3) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Rawa Pening, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing, Kawasan Gunung Lawu, dan Kawasan Gunung Slamet.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5.4
Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

5.2. Arah Pengembangan Perwilayahan

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tidak terlepas dari arah pembangunan wilayah Jawa – Bali sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN, pembangunan wilayah Jawa-Bali diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yaitu: 1) pengembangan sektor unggulan; 2) pengembangan kawasan strategis; 3) pengembangan kawasan perkotaan; 4) pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; serta 5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, pembangunan diprioritaskan pada:

- 1) Pengembangan sektor unggulan pada komoditas tebu, kopi, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
- 2) Pengembangan kawasan strategis antara lain pada:
 - a. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi yaitu KEK Kendal, KI Kendal-Semarang-Demak, KI Brebes, KI Rembang, KI Cilacap, dan KI Kebumen, serta Kawasan Industri Terpadu Batang;
 - b. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE (*Meeting – Incentive – Conference – Exhibition*) yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur dan sekitarnya;
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain jalan tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, jalan lintas Pansela, pem-

bangunan KA Ekspres Jakarta – Semarang, dan pembangunan Bandara Ngloram Cepu;

- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, dan revitalisasi balai latihan kerja.



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 5.5
Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa – Bali

- 3) Pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan (WM) Semarang; pembangunan Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Semarang (Kedungsepur) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan;
- 4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal melalui proyek prioritas antara lain:
 - a. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset

- desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama di KPPN Magelang dan KPPN Kendal;
 - c. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mengurangi penduduk miskin di Jawa Tengah;
 - d. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- 5) Penguatan kelembagaan dan keuangan daerah dengan beberapa proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:
- a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
 - b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama pengawalan kepeminatan investasi;
 - c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - e. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
 - f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
 - g. Peningkatan kualitas belanja daerah;
 - h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
 - i. Pengembangan kerjasama antardaerah;
 - j. Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
 - k. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - l. Perluasan kepemilikan akta kelahiran;
 - m. Penataan ruang dan lahan;
 - n. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan; dan
 - o. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) Wilayah Pengembangan (WP) utama meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.

Pengembangan 8 (delapan) WP tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

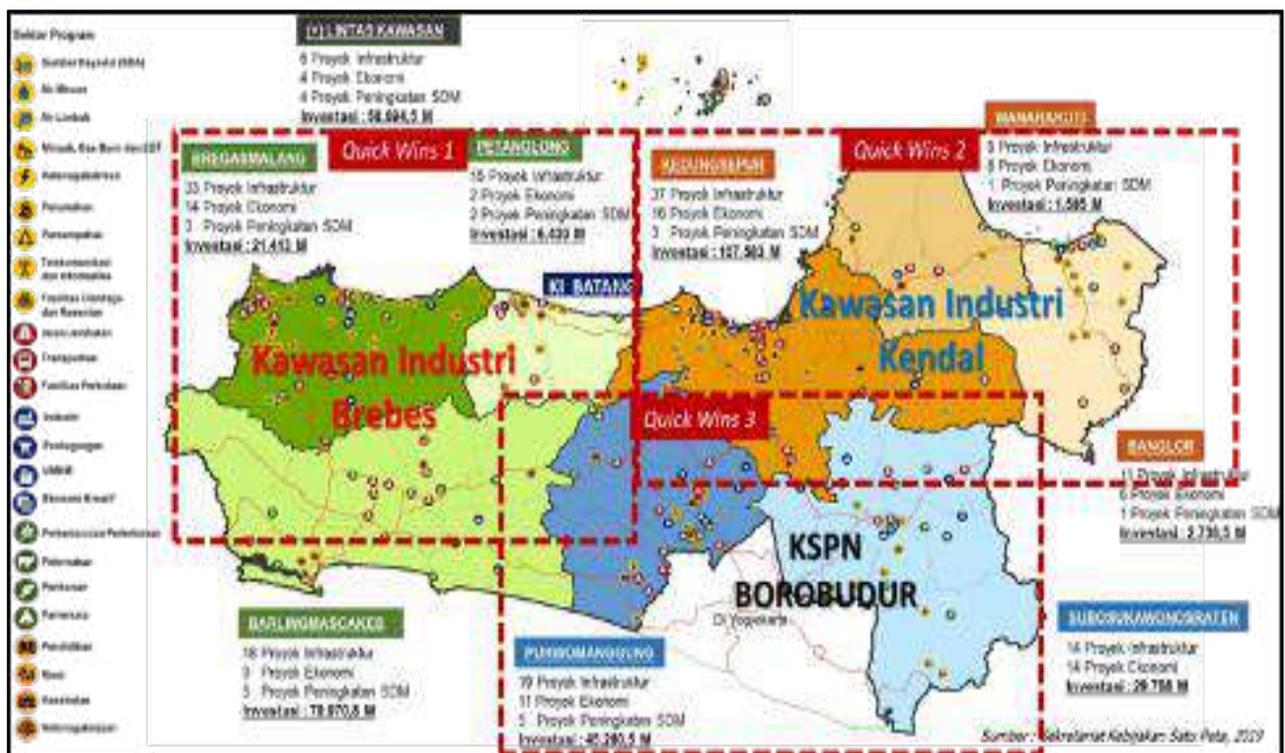
Gambar 5.6
Kebijakan Pengembangan Sistem Perwilayahan

Kebijakan pembangunan pada 8 (delapan) wilayah pembangunan terintegrasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta arah pembangunan wilayah yang berdaya saing, memperhatikan kelestarian alam, dan pemerataan pembangunan.

Sejalan dengan arahan kebijakan tersebut melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2019 didorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung 3 (tiga) *quick wins* di wilayah pengembangan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang yang terkoneksi dengan pengembangan wilayah sekitarnya/terdekat. Membangun konektivitas untuk menghubungkan satu sama lain secara spasial dimaksudkan untuk mereduksi potensi kesenjangan perekonomian dan kesejahteraan yang semakin tajam pada masyarakat pada daerah satu dengan daerah lainnya, serta mewujudkan keterkaitan yang bersifat sinergis dan menguntungkan semua pihak dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah,

sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana program/kegiatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) program/kegiatan dengan total estimasi nilai investasi sebesar 353.411,3 milyar rupiah. Mayoritas program/kegiatan di Provinsi Jawa Tengah berasal dari sektor sumber daya air (20,7 persen), jalan/jembatan (18,5 persen), transportasi (7,8 persen), pariwisata (7,8 persen), serta perikanan dan kelautan (7,0 persen). Rencana tersebut bersifat indikatif dinamis dengan memperhatikan kondisi kesiapan untuk dilaksanakan.



Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2019 (diolah)

Gambar 5.7

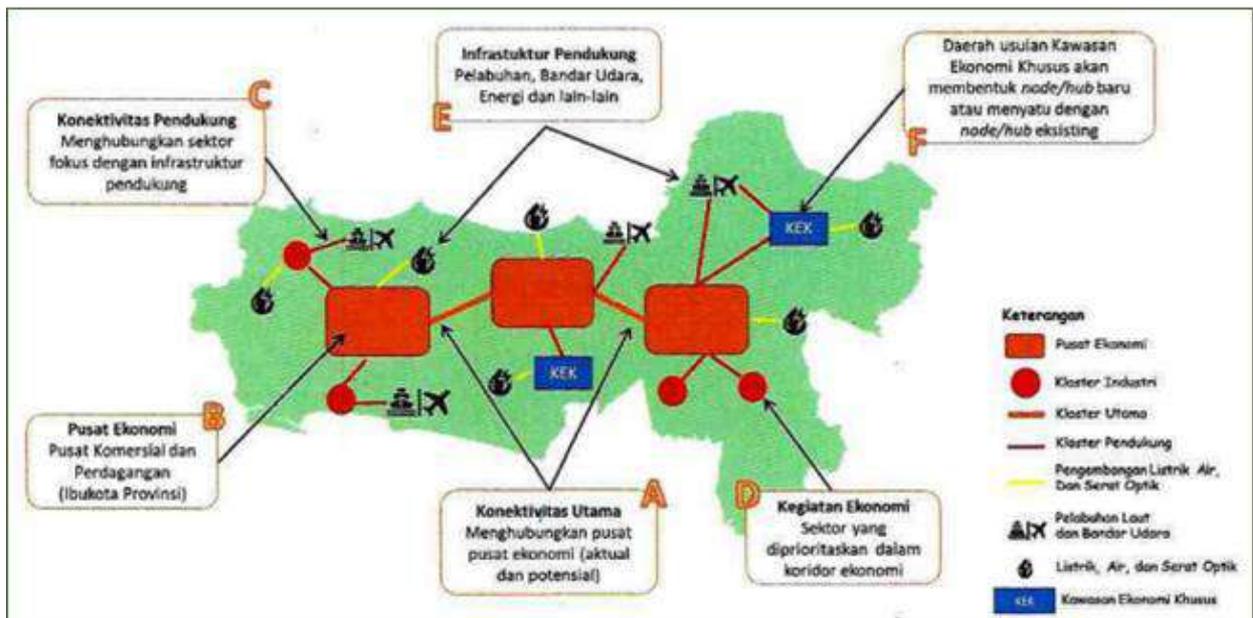
Quick Wins Dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Jawa Tengah Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 (diolah)

Gambar 5.8
Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

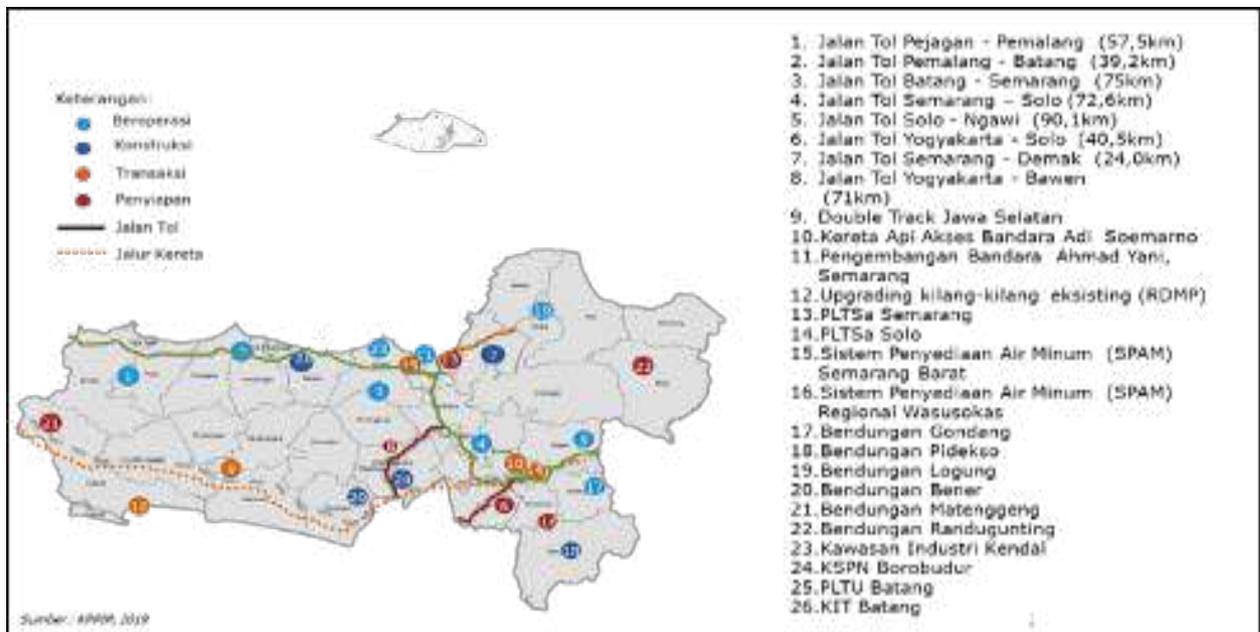
Disisi lain strategi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan melalui 3 (tiga) prinsip konektivitas yaitu: 1) konektivitas memaksimalkan pertumbuhan melalui keterpaduan kawasan (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 2) konektivitas memperluas pertumbuhan melalui keterkaitan hubungan wilayah-wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan 3) konektivitas berdampak pada pencapaian pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.



Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.9
Konsep Penguatan Konektivitas Jawa Tengah

Selain Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan pemerataan wilayah di Jawa Tengah dipercepat pula dengan pembangunan infrastruktur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020, dengan sebaran dan kegiatan sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Perpres No. 109 Tahun 2020

Gambar 5.10
Sebaran Proyek Strategis Nasional Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Di Provinsi Jawa Tengah

5.2.1. Integrasi Antar Wilayah Pengembangan

Integrasi antar Wilayah Pengembangan (WP) ini menggambarkan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian antara wilayah pengembangan prioritas dan pendukung yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

5.2.1.1. Integrasi WP dalam *Quick Win* Kawasan Industri (KI) Kendal

Kawasan Kedungsepur (Kendal – Kota Semarang – Semarang - Kota Salatiga - Demak – Grobogan) dengan *quick win* Kawasan Industri (KI) Kendal, dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029, dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 hektar. Kawasan pendukung WP Kedungsepur dengan *quick win* KI Kendal meliputi WP Banglor (Kabupaten Rembang dan Blora), dan WP Wanarakuti (Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara).

A. WP Kedungsepur

WP Kedungsepur sebagai WP prioritas dengan *quick win* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kondisi makro pembangunan wilayah Kedungsepur saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Grobogan	3,78	12,74	4,38	70,41
2	Kab. Demak	2,62	12,92	5,28	72,57
3	Kab. Semarang	3,63	7,82	5,02	74,24
4	Kab. Kendal	3,89	10,24	7,55	72,50
5	Kota Semarang	5,16	4,56	9,54	83,55
6	Kota Salatiga	3,33	8,60	7,26	83,60

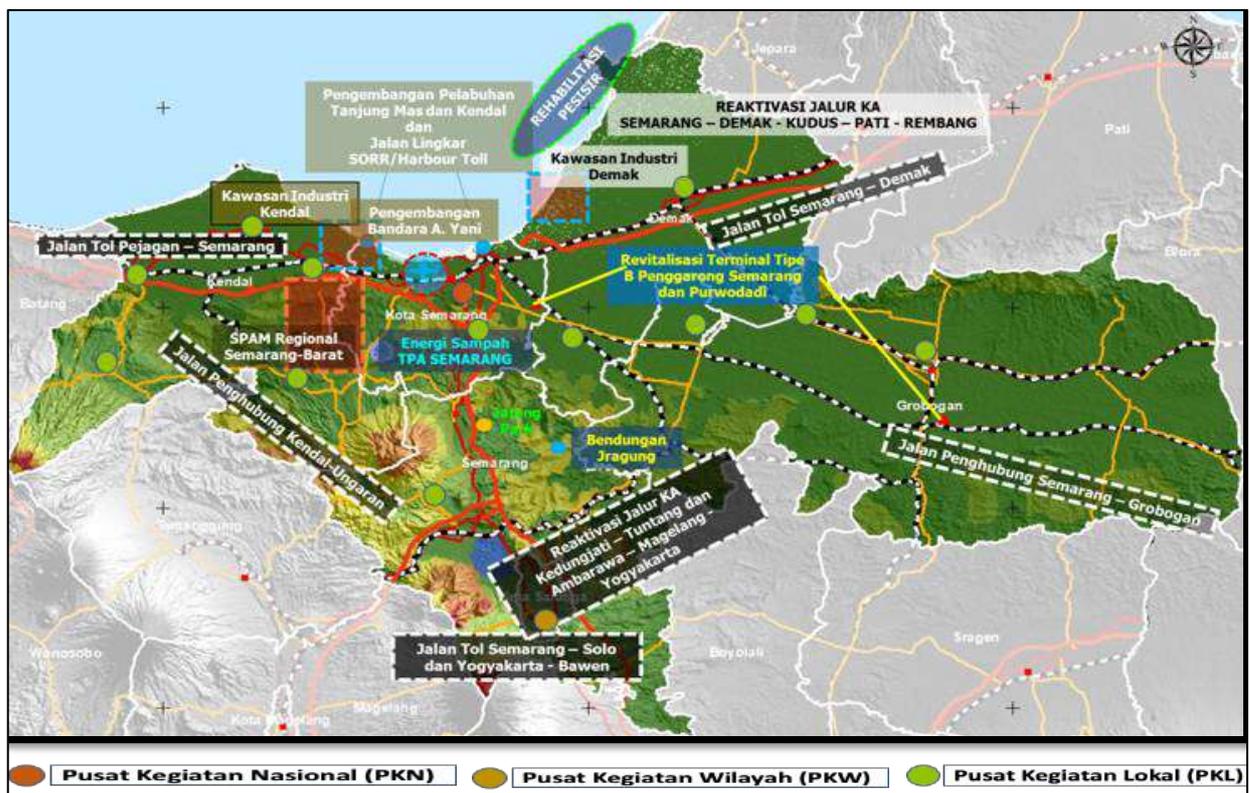
Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Demak merupakan kabupaten yang pertumbuhan ekonominya paling rendah yaitu sebesar 2,62 persen. Kota Semarang menjadi wilayah dengan angka kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,56 persen, namun dengan TPT tertinggi di wilayah Kedungsepur yaitu sebesar 9,54 persen. Kota Salatiga menjadi wilayah dengan IPM sebesar 83,60 persen paling tinggi diantara enam kabupaten/kota lainnya di wilayah Kedungsepur.

Wilayah Kedungsepur diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah. Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah, pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus, perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur pantura, serta perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 12 (dua belas) kawasan perkotaan yang diharapkan dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi di sekitarnya. Keduabelas kawasan tersebut adalah Purwodadi, Gubug, Godong, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, dan Sukorejo.

Kawasan-kawasan di WP Kedungsepur yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya antara lain Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo. Selain itu juga terdapat kawasan strategis kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Kendal – Semarang – Demak. Arah kebijakan pengembangan WP Kedungsepur berbasis perdagangan jasa, dan industri pengolahan yang sinergis dengan kegiatan pertanian dan pariwisata terpadu berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.11
Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.2.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Kedungsepur Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Grobogan	4,00 – 5,00	10,94 – 10,46	4,20 – 4,00	70,93 – 71,43
2	Kab. Demak	3,82 – 4,79	12,12 – 11,52	5,00 – 4,28	73,51
3	Kab. Semarang	4,10 – 5,30	7,35 – 6,35	4,54 – 4,00	74,80
4	Kab. Kendal	5,33 – 5,64	9,39 – 8,39	6,57 – 5,63	73,70
5	Kota Semarang	5,60 – 6,10	4,24 – 4,04	8,60 – 8,30	83,60 – 84,00
6	Kota Salatiga	4,86-5,44	4,76 – 4,59	6,46 – 5,51	84,56

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2022

Untuk mencapai target indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi. Pelayanan jaringan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (3 koridor) dan rel (kereta api komuter); fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal, fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Kedungjati – Tuntang, dan Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; fasilitasi pembangunan jalur rel dari Tanjung Emas menuju Kendal *Sea Port*; fasilitasi pembangunan jalan tol Semarang – Demak; fasilitasi pembangunan jalan lingkaran SORR/Semarang *Harbour Toll*; dan fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani Kota Semarang.

Selain itu upaya pengelolaan lingkungan diantaranya konservasi mangrove di Kabupaten Demak; konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak; konservasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang, DAS Garang, DAS Jragung; dan penanganan pencemaran Rawa Pening. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri kawasan Kendal dan Demak, dan pembangunan *Jateng Park* dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Program/kegiatan yang direncanakan akan dilakukan untuk mendukung kebijakan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 di WP Kedungsepur yaitu sebanyak 56 program/kegiatan yang akan dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 33 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 7 (tujuh) program/kegiatan; (3) BUMN terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan; (4) BUMD terdiri dari 3 (tiga) program/kegiatan; dan (5) Swasta terdiri dari 8 (delapan) program/kegiatan. Mayoritas program/kegiatan

di WP Kedungsepur adalah untuk sektor sumber daya air, jalan/jembatan, dan pariwisata.

Sistem Perwilayahan Kedungsepur didominasi oleh wilayah dengan kapasitas *basic* kecuali pada Kota Semarang sudah mulai ketahap memperhatikan efisiensi pasar dan inovasi. Meskipun efisiensi pasar yang ada di masing-masing daerah sudah mulai dilakukan namun mayoritas permasalahan yang ada adalah kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja untuk mendorong efisiensi pasar. Selain itu, perkembangan UMKM belum dapat dioptimalkan padahal penduduk usia produktif yang ada jumlahnya sangat tinggi. Peningkatan perlu dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai kapasitasnya untuk dapat meningkatkan peran dan fungsinya di tingkat yang lebih tinggi.

Untuk mendukung pengembangan WP Kedungsepur program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan;
- b. Penanganan banjir di Kabupaten Demak dan Kendal;
- c. Peningkatan Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo (Kabupaten Kendal);
- d. Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari (Kabupaten Grobogan) (Dana Alokasi Khusus-DAK); peningkatan Jalan Kuwu - Galeh (Kabupaten Grobogan) (DAK); peningkatan Jalan Wirosari – Kunduran, peningkatan Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo (Kabupaten Kendal); dan peningkatan Jalan Semarang - Godong (Kabupaten Demak) (DAK);
- e. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak, Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupaten Kendal, pengolahan rajungan Kabupaten Demak, sistem resi gudang dan pengelolaan hasil pasca panen komoditas padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Grobogan, serta peternakan sapi potong Kabupaten Semarang;
- f. Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kabupaten Grobogan;
- g. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Stasiun Tawang Kota Semarang – Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Terminal Mangkang Kota Semarang – Terminal Bahurekso Kabupaten Kendal – RTH Weleri Kabupaten Kendal, dan Terminal Penggaron Kota Semarang – Terminal Gubug via Terminal Godong Kabupaten Grobogan;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan Semarang - Godong (untuk mendukung Koridor Trans Jateng), Purwodadi - Geyer/Bts. Kabupaten Sragen dan Purwodadi -Klambu;
- i. Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang KA dengan jalan di ruas jalan provinsi melalui pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Kabupaten Grobogan;

- j. Pembangunan prasarana dan sarana air baku Embung Plumbon Kabupaten Semarang; dan
- k. Pembangunan Jateng Valley.

B. WP Banglor

WP Banglor sebagai WP pendukung *quick win* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Kondisi makro pembangunan wilayah Banglor saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

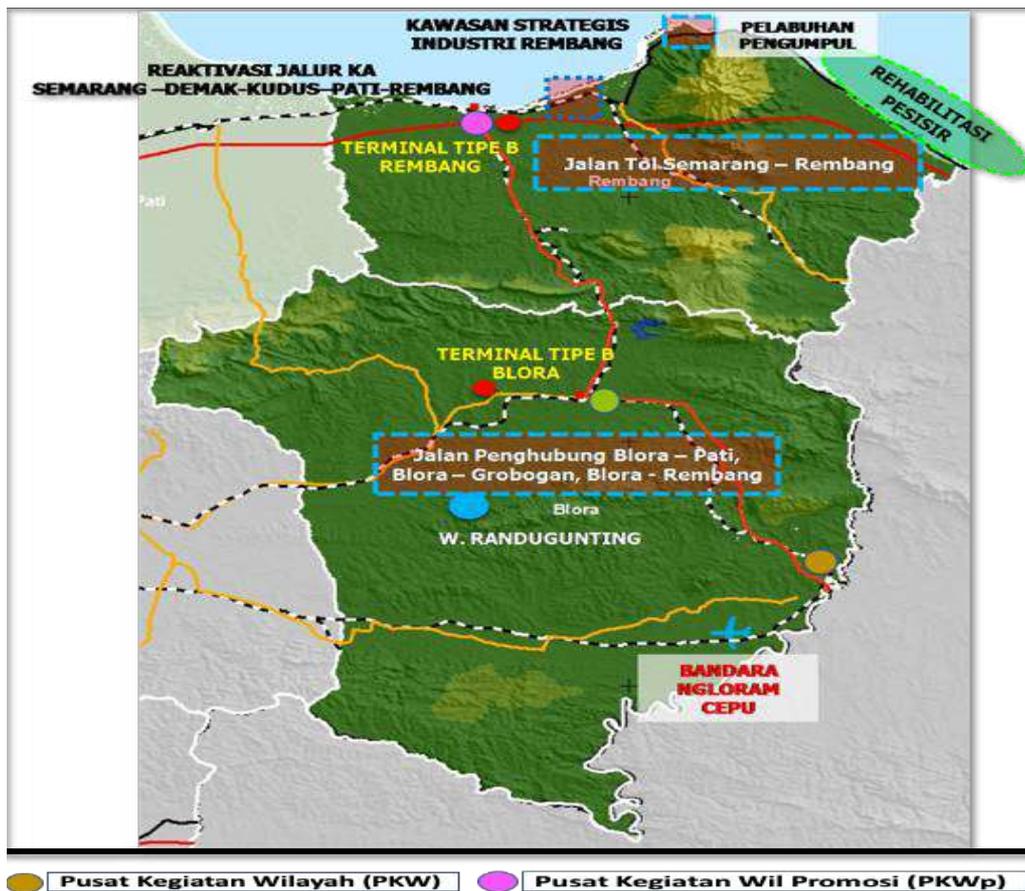
Tabel 5.3.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Banglor Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Blora	3,68	12,39	3,81	69,37
2	Kab. Rembang	3,85	15,80	3,67	70,43

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 capaian 3 indikator makro Kabupaten Rembang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Blora yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM. Sementara angka kemiskinan Kabupaten Blora di tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Rembang.

Arah kebijakan pengembangan WP Banglor difokuskan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, sedangkan perkotaan Rembang diusulkan menjadi PKW. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) wilayah Banglor meliputi Kawasan Perkotaan Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor berbasis perindustrian dan *agroforestry* yang didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.12
Arah Pengembangan Wilayah Banglor

Pengembangan wilayah Banglor untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Banglor Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Blora	4,93 - 5,53	11,12	5,40	69,44
2	Kab. Rembang	4,16 - 4,87	14,19 - 13,37	3,00 - 3,58	71,35 - 71,61

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan pemerataan wilayah timur Jawa Tengah, maka ke depan di wilayah ini akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan membangun kawasan industri baru di Rembang, dan pengembangan Bandara Ngloram dimana tahun 2020 sudah dilakukan uji coba, dan tahun 2021 sudah dapat melayani penerbangan komersial. Keduanya diharapkan akan memberikan daya ungkit dan memacu percepatan pembangunan di wilayah ini. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, Kawasan Perkotaan Rembang didorong

untuk dapat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, terutama di wilayah pantura.

Dalam mencapai arah pengembangan wilayah berbasis industri dan *agroforestry* yang didukung kepariwisataan akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai yaitu fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; fasilitasi peningkatan jalan nasional Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Batas Jatim, peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Pati, dan peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Grobogan. Selanjutnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan khususnya menjaga keberlanjutan air tanah maka dilakukan konservasi pada CAT Pati - Rembang dan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya penanganan kerusakan pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Rembang.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 terdapat 18 program/kegiatan yang akan dilakukan di WP Banglor. Sumber pembiayaan kegiatan di WP Banglor ini dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 16 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; dan (3) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Banglor meliputi sektor sumber daya air, jalan/jembatan, serta perikanan dan kelautan.

Wilayah Banglor secara umum terdapat perbedaan pada tahapan pembangunan kabupaten/kota. Kabupaten Rembang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Adapun Kabupaten Blora masih pada tahapan *basic* sehingga masih perlu meningkatkan faktor penguat daya saing. Disparitas antar 2 (dua) kabupaten tersebut perlu dikurangi dengan optimalisasi sistem perwilayahan dengan Kabupaten Rembang dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di WP Banglor.

Untuk mendukung pengembangan WP Banglor program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
- b. Peningkatan Jalan Lasem - Sale/Bts. Provinsi Jatim (Kabupaten Rembang); peningkatan Jalan Todanan - Ngawen (Kabupaten Blora); peningkatan Jalan Singget - Dopleng - Cepu (DAK) (Kabupaten Blora);
- c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang, dan pengembangan industri garam rakyat Kabupaten Rembang;
- d. Pembangunan STA Kabupaten Semarang; dan
- e. Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku Embung Ketileng (lanjutan) Kabupaten Blora.

C. WP Wanarakuti

WP Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) sebagai WP pendukung *quick win* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Kondisi makro pembangunan wilayah Wanarakuti saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.5.

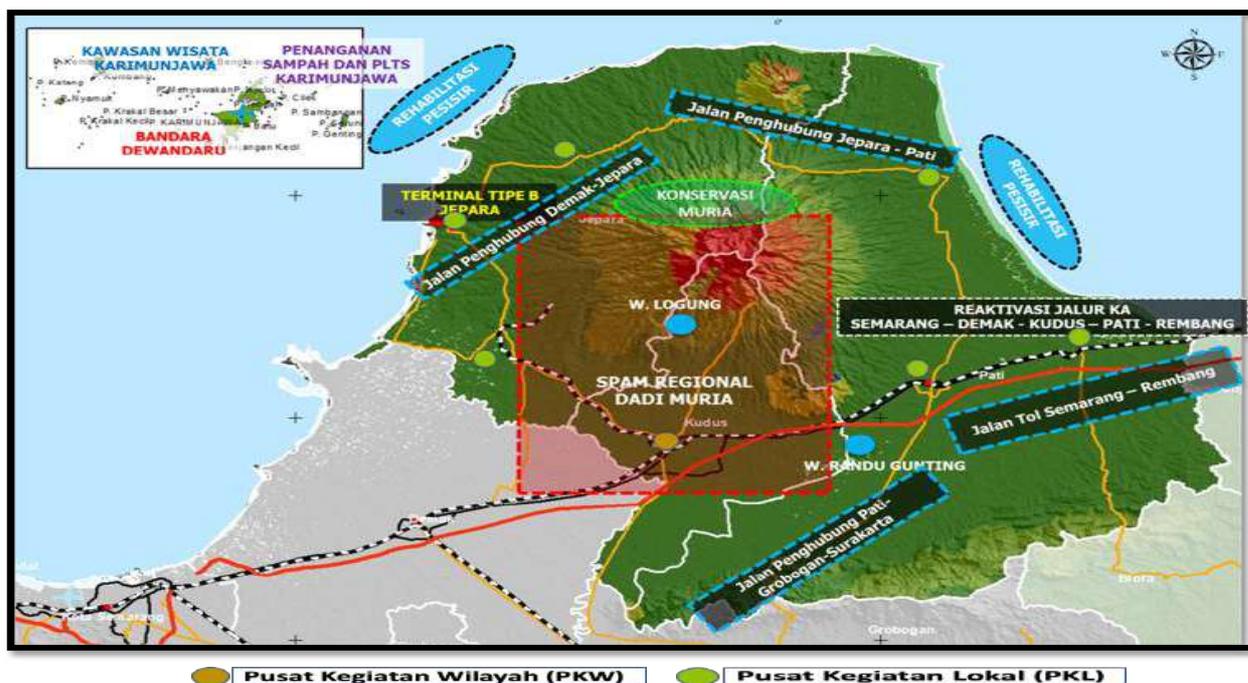
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Wanarakuti Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	4,63	7,44	4,23	72,36
2	Kab. Kudus	-1,98	7,60	3,77	75,16
3	Kab. Pati	3,38	10,21	4,60	72,28

Sumber: BPS, 2022

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja 3 (tiga) kabupaten pada WP Wanarakuti pada tahun 2021 dimana hanya Kabupaten Kudus yang pertumbuhan ekonominya berkontraksi sebesar negatif 1,98 persen. Sementara Kabupaten Jepara pertumbuhan ekonominya tertinggi dibandingkan dengan 2 kabupaten lainnya yang sebesar 4,63 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus berkontraksi negatif di tahun 2021 namun TPT dan IPM Kabupaten Kudus lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah ini. Sementara itu angka kemiskinan Kabupaten Pati di tahun 2021 paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang sebesar 10,21 persen.

Arah kebijakan pengembangan WP Wanarakuti difokuskan pada pemantapan fungsi-fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan, dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan berbasis industri pengolahan dan pariwisata yang didukung sektor agrominapolitan dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.13
Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti

Pengembangan wilayah Wanarakuti untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	5,00 – 6,00	6,64 – 7,10	3,85	73,35
2	Kab. Kudus	2,50 – 3,16	5,99 – 6,35	2,95 – 3,40	75,97
3	Kab. Pati	4,00 – 4,82	9,36 – 10,00	3,50 – 4,00	73,49

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Untuk mencapai target indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu fasilitasi pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang; peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; serta inisiasi pembangunan jalan Demak – Jepara (*Coastal Road*).

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih maka akan dilakukan dengan inisiasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dadi

Muria (Grobogan, Kudus, Pati, dan Jepara). Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi pada DAS Juwana dan penanganan lahan kritis di Kawasan Muria dan Patiayam. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan.

Selain itu diperlukan pengembangan prasarana sarana pendukung pariwisata melalui penyiapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal (Karimunjawa), penanganan sampah (Karimunjawa), pengembangan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa - Semarang dan sekitarnya, serta destinasi pariwisata Rembang-Blora.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 terdapat 18 program/kegiatan di WP Wanarakuti. Kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber diantaranya: (1) APBN terdiri dari 14 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; (3) BUMD terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; dan (4) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas program/kegiatan di WP Wanarakuti adalah untuk sektor perikanan dan kelautan, serta sumber daya air.

Kewilayahan Wanarakuti secara umum masih berkebutuhan untuk perbaikan *basic* faktor yaitu untuk faktor pendorong terutama untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas ekonomi makro dan kapasitas sumber daya manusia. Namun pada Kabupaten Kudus sebagai nilai tertinggi di kewilayahan Wanarakuti memiliki kapasitas efisiensi pasar yang baik, namun perlu peningkatan pada kesiapan teknologi untuk efisiensi pasar. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya produktif dari sisi pendidikan dan keterampilannya. Selain itu pada sisi inovasi masih menjadi inisiasi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan usaha percepatan hilirisasi produk inovasinya.

Untuk mendukung pengembangan WP Wanarakuti program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati;
- b. Peningkatan Jalan Jepara - Keling Bts. Kabupaten Jepara (Kabupaten Jepara);
- c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kabupaten Pati; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kabupaten Jepara; Pabrik Garam Kabupaten Pati; dan Industri Garam Rakyat Kabupaten Pati;
- d. Budidaya laut di Kabupaten Jepara; dan
- e. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan.

5.2.1.2. Integrasi WP dalam Quick Win Kawasan Pariwisata Borobudur

Kawasan Purwomanggung (Purworejo - Wonosobo - Magelang – Kota Magelang – Temanggung) terintegrasi dengan *quick win* Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* atau Mahakarya Budaya Dunia yang diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi wisata Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung.

Kawasan pendukung Purwomanggung (Kawasan Pariwisata Borobudur), adalah Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

A. WP Purwomanggung

Pengembangan WP Purwomanggung sebagai WP prioritas *quick win* Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kondisi makro pembangunan wilayah Purwomanggung saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2021

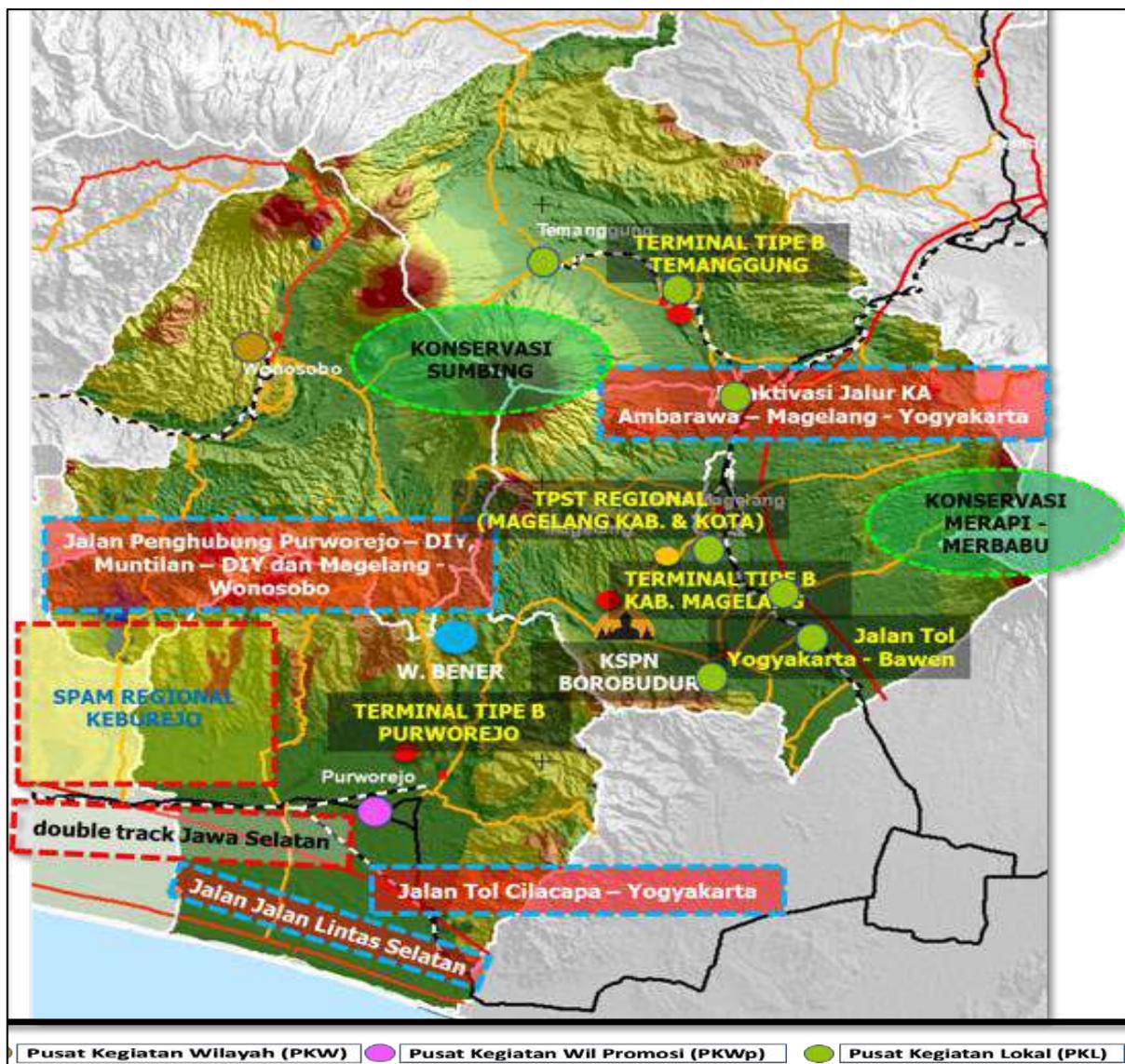
No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%) [*]	TPT (%)	IPM
1	Kab. Purworejo	3,38	12,40	3,59	72,98
2	Kab. Wonosobo	3,68	17,67	5,26	68,43
3	Kab. Magelang	3,48	11,91	5,03	70,12
4	Kab. Temanggung	3,34	10,17	2,62	69,88
5	Kota Magelang	3,20	7,75	8,73	79,43

Sumber: BPS, 2022

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pertumbuhan ekonomi dari kabupaten/kota di WP Purwomanggung hampir merata dengan capaian paling tinggi diraih oleh Kabupaten Wonosobo (3,68 persen), dan paling rendah dicapai oleh Kota Magelang (3,20 persen). Namun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo paling tinggi dibandingkan kelima kabupaten/kota mencapai 17,67 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah dicapai oleh Kabupaten Temanggung dengan capaian sebesar 2,62 persen. IPM pada 5 (lima) kabupaten/kota di wilayah ini bervariasi dengan angka terendah 68,43 di Kabupaten Wonosobo, dan yang paling tinggi diraih oleh Kota Magelang sebesar 79,43.

Wilayah Purwomanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi timur tidak akan terlepas dari pembangunan Bandara Bandara Nyi Ageng Serang/*Yogya International Airport* (YIA) di Kabupaten Kulon Progo. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Oleh karena itu untuk mendukung pengembangan kewilayahan baik dari sisi sosial, ekonomi dan kewilayahan maka Perkotaan Purworejo akan didorong statusnya yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan WP Purwomanggung diarahkan berbasis pertanian dan pariwisata guna mendorong sektor industri pertanian dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.14
Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung

Pengembangan wilayah Purwomanggung untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Purworejo	4,00 – 5,00	11,02 – 9,86	3,45	73,76
2	Kab. Wonosobo	3,00 – 4,50	15,62 – 14,75	4,60 – 3,25	69,72
3	Kab. Magelang	3,8 – 4,8	10,67 – 9,92	3,0 – 2,4	71,03
4	Kab. Temanggung	4,80	9,80	3,50	70,49
5	Kota Magelang	5,05 – 5,14	7,30 – 6,41	7,5 – 6,3	81,25

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Untuk mencapai target indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas melalui reaktivasi jalur rel KA Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan/BRT (koridor Purworejo–Magelang); pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Purworejo; peningkatan aksesibilitas Borobudur dan Dieng; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Purworejo – Perbatasan DIY (Purworejo – Sibolong), peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Magelang – Wonosobo (pendukung akses Bandara Nyi Ageng Serang Yogyakarta/YIA), dan peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Magelang – Perbatasan DIY (Muntilan – Klangan); serta fasilitasi pembangunan jalan tol Bawen – Yogyakarta dan Cilacap – Yogyakarta.

Guna pemenuhan kebutuhan air bersih maka dilakukan pengembangan SPAM Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo). Sedangkan untuk kelestarian lingkungan akan dilakukan tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Regional Magelang, dan konservasi utamanya pada DAS Bogowonto, DAS Progo, dan DAS Serayu. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan ekonomi yang meliputi pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.

Kewilayahan Purwomanggung secara umum masih berkebutuhan untuk perbaikan *basic factor* yaitu untuk faktor pendorong terutama untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas ekonomi makro, dan kapasitas sumber daya manusia. Namun telah ada upaya dari daerah untuk meningkatkan efisiensi pasar melalui penyerapan investasi dan pemanfaatan telekomunikasi, namun hal ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya produktif dari sisi pendidikan dan keterampilannya. Namun pada Kota Magelang sudah mulai memperkuat efisiensi pasar dengan ketersediaan

sumber daya manusia yang baik, dan regulasi yang telah mendukung efiseinsi pasar. Selain itu, pada sisi inovasi Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang menjadi inisiasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan usaha percepatan hilirisasi produk inovasinya.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 terdapat 35 program/kegiatan di WP Purwomanggung. Rencana program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas program/kegiatan di WP Purwomanggung adalah sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Untuk mendukung pengembangan WP Purwomanggung, program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung;
- b. Peningkatan Jalan Kutoarjo – Ketawang (Kabupaten Purworejo); preservasi paket PHJD 1 (Kabupaten Wonosobo); preservasi paket PHJD 2 (Kabupaten Wonosobo); dan preservasi paket PHJD 3 (Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo);
- c. Pengembangan STA Kabupaten Wonosobo; pengembangan kawasan kopi; dan pengembangan Agropolitan Pring Kakal;
- d. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Stasiun Kutoarjo Purworejo – Borobudur Kabupaten Magelang dalam rangka untuk mengoptimalisasi potensi keberadaan Bandara Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- e. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan terminal tipe B Kutoarjo Tahap III (pendukung peningkatan PKL ke PKW Promosi dan simpul integrasi antar moda kereta api, AKDP, Trans Jateng, dan angkutan lanjutan dari YIA); dan
- f. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Purworejo - Sibolong (ruas jalan perbatasan Provinsi DIY).

B. WP Subosukawonosraten

WP Subosukawonosraten sebagai WP pendukung *quick win* Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kondisi makro pembangunan wilayah Subosukawonosraten saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.9.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Subosukawonosraten Tahun 2021

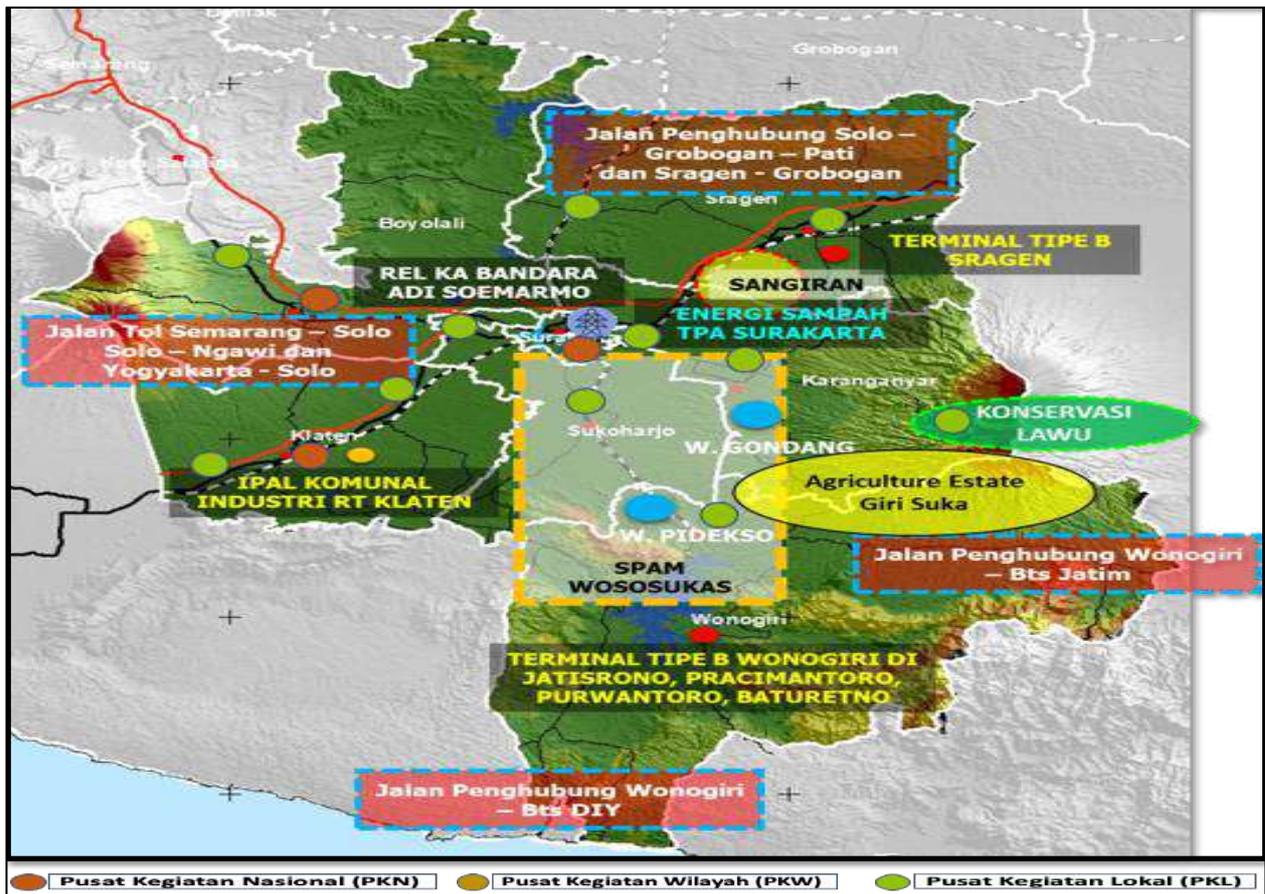
No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	4,63	10,62	5,09	74,40
2	Kab. Sukoharjo	3,82	8,23	3,32	77,13
3	Kab. Karanganyar	3,57	10,68	5,89	75,99
4	Kab. Wonogiri	3,35	11,55	2,43	70,49
5	Kab. Sragen	3,75	13,83	4,76	74,08
6	Kab. Klaten	3,82	13,49	5,48	76,12
7	Kota Surakarta	4,01	9,40	7,85	82,62

Sumber: BPS,2022

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM pada WP Subosukawonosraten pada tahun 2021. Dari ketujuh kabupaten/kota pada wilayah ini, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 4 persen. Kota Surakarta juga mencapai IPM paling tinggi sebesar 82,62 disusul oleh Kabupaten Klaten sebesar 76,12. Berbeda dengan capaian angka kemiskinan, Kabupaten Sukoharjo mencapai 8,23 persen yang merupakan angka paling rendah diantara kabupaten/kota tersebut di atas.

Wilayah Subosukawonosraten diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ampel, Sukoharjo, Kartosuro, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Gemolong, Jaten, Delanggu, dan Tawangmangu. Sektor unggulan wilayah ini adalah pariwisata, industri dan pertanian.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah Subosukawonosraten diarahkan berbasis pariwisata terpadu yang didukung oleh pertanian dan industri pengolahan dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.15
Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.10.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Subosukawonosraten Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	4,40 – 5,40	9,94 – 9,68	4,03	75,80
2	Kab. Sukoharjo	4,30 – 4,90	7,9 – 7,5	4,67 – 4,58	78,00
3	Kab. Karanganyar	4,25 – 5,00	8,96	5,80	76,50
4	Kab. Wonogiri	4,50 – 5,50	9,74 – 9,39	2,43	71,51
5	Kab. Sragen	5,30	11,73	4,07	74,72
6	Kab. Klaten	3,51 – 4,51	12,89	5,00	76,88
7	Kota Surakarta	5,48	7,89	6,20	83,56

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Pengembangan pariwisata terpadu menjadi arah pengembangan utama kawasan Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Sukuh, dan lain-lain). Kabupaten/kota lainnya diarahkan untuk mengembangkan pariwisata alam dengan memperbaiki aksesibilitas, serta prasarana dan sarana pendukung pariwisatanya.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan perlu dilakukan peningkatan konektivitas di Solo Raya yaitu pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (2 koridor), dan revitalisasi Terminal Tipe B Pilangsari (Kabupaten Sragen), Penggung (Kabupaten Boyolali), Pracimantoro (Kabupaten Wonogiri), Sukoharjo (Kabupaten Sukoharjo); peningkatan pelayanan (peningkatan frekuensi) kereta api regional Solo – Semarang; fasilitasi pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali; fasilitasi penyelesaian jalan tol Semarang – Solo, fasilitasi penyelesaian jalan tol Solo – Kertosono, fasilitasi pembangunan jalan tol Solo – Yogya, peningkatan jalan provinsi penghubung Surakarta – Grobogan – Pati, peningkatan jalan provinsi penghubung Wonogiri - Perbatasan Jatim, dan peningkatan jalan provinsi penghubung Wonogiri – Perbatasan DIY; fasilitasi pembangunan *Dry Port* Sragen; serta fasilitasi pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata di Wilayah Subosukawonosraten, dan fasilitasi pengembangan destinasi.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih maka akan dilakukan fasilitasi pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku akan dilakukan fasilitasi pembangunan Waduk Gondang dan Waduk Pidekso.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan penanganan lahan kritis di wilayah Merapi dan Lawu, penanganan pencemaran di anak Sungai Bengawan Solo dan industri kecil, serta konservasi pada CAT Karanganyar – Boyolali. Selain itu di wilayah Subosukawonosraten juga akan dikembangkan kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar) dan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang) yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 terdapat 28 usulan program/kegiatan di WP Subosukawonosraten. Adapun dari 28 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan; dan (3) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Subosukawonosraten adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Wilayah Subosukawonosraten masih pada tahap kapasitas berperan pada tingkat *basic* kecuali Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas berperan dalam kewilayahan.

Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di wilayah Subosukawonosraten.

Untuk mendukung pengembangan WP Subosukawonosraten program/ kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan di antaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, dan Sragen;
- b. Penanganan pencemaran limbah Sungai Bengawan Solo;
- c. Peningkatan Jalan Galeh – Ngrampal (DAK) (Kabupaten Sragen); peningkatan Jalan Kuwu – Galeh (DAK) (Kabupaten Sragen); peningkatan Jalan Wonogiri – Manyaran – Blimbing (Kabupaten Wonogiri); peningkatan Jalan Ngadirojo – Giriwoyo (Kabupaten Wonogiri); peningkatan Jalan Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro (DAK) (Kabupaten Wonogiri); dan preservasi paket PHJD 4 (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten);
- d. Pengembangan sapi di Kabupaten Sragen, pengembangan *Agriculture Estate* melalui *Coporate Farming* di Kabupaten Sukoharjo, pengembangan STA Kabupaten Karanganyar, dan pengembangan STA Kabupaten Wonogiri;
- e. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Terminal Tirtonadi – Sangiran – Terminal Sumberlawang sebagai dukungan peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata dan pembukaan koridor baru Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri;
- f. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui peningkatan terminal tipe B di Kabupaten Wonogiri (Terminal Pracimantoro, Terminal Jatisrono, dan Terminal Purwantoro);
- g. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Perbatasan Provinsi DIY (Karangwuni – Cawas – Jentir);
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan penyeberangan sungai melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan Dermaga pada Sungai Bengawan Solo lintas penyeberangan Kota Surakarta (Dermaga Sangkrah) – Kabupaten Sukoharjo (Dermaga Gading);
- i. Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang KA dengan jalan di ruas jalan provinsi melalui pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Kabupaten Sragen dan Sukoharjo; dan
- j. Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku Embung Ngunduk, Nglasep, Bakal (lanjutan) di Kabupaten Wonogiri.

5.2.1.3. Integrasi WP dalam Quick Win Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

Kawasan Bregasmalang (Brebes – Kota Tegal – Tegal – Pemalang) terintegrasi dengan *quick win* Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan Industri (KI) Brebes dan KIT Batang ditetapkan

sebagai kawasan strategis dari sisi ekonomi yang diarahkan sebagai pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di wilayah Bregasmalang. Kawasan pendukung Bregasmalang (KI Brebes dan KIT Batang) meliputi WP Barlingmascakeb (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), dan WP Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan).

A. WP Bregasmalang

WP Bregasmalang sebagai WP prioritas *quick win* Kawasan Industri (KI) Brebes dan KIT Batang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Kondisi makro pembangunan wilayah Bregasmalang saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.11.

**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Bregasmalang Tahun 2021**

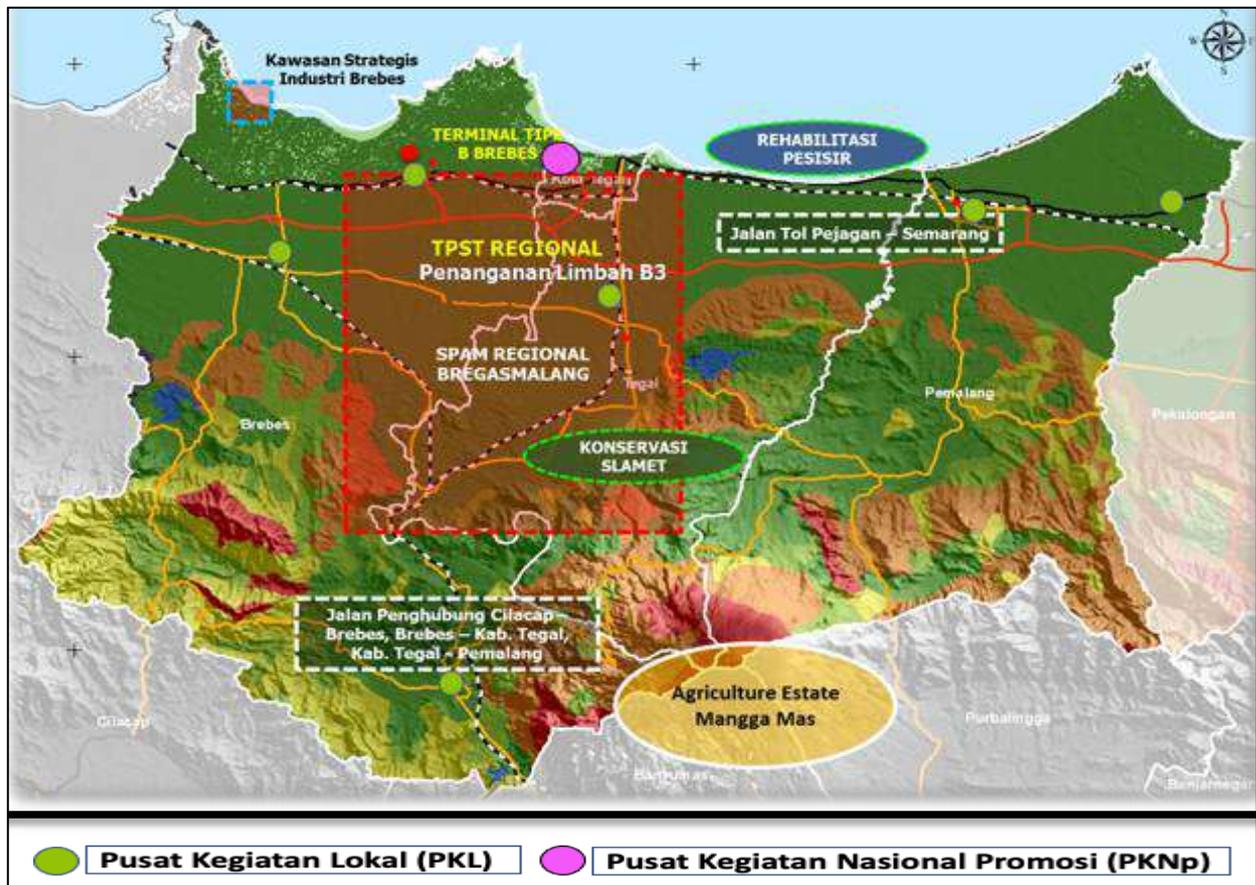
No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Brebes	2,33	17,43	9,78	66,32
2	Kab. Tegal	3,72	8,60	9,97	68,79
3	Kab. Pemalang	4,19	16,56	6,71	66,56
4	Kota Tegal	3,12	8,60	8,25	75,52

Sumber: BPS, 2022

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi dialami oleh Kabupaten Pemalang sebesar 4,19 persen. Kabupaten Pemalang juga berhasil menekan TPT dengan capaian 6,71 persen diantara tiga kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Brebes memiliki angka kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di wilayah Bregasmalang pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,43 persen. IPM Kota Tegal merupakan yang tertinggi di WP Bregasmalang dengan capaian sebesar 75,52.

Wilayah Bregasmalang diarahkan sebagai PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat. PKW meliputi Kota Tegal, dan PKL meliputi Comal, Pemalang, Slawi – Adiwerna, Ketanggungan – Kersana, Bumiayu, Brebes, dan Losari. Selanjutnya Kota Tegal diusulkan sebagai PKN Promosi. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes – Tegal – Adiwerna - Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan – Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Bregasmalang, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Bregasmalang berbasis agrominapolitan dan industri pengolahan dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.16
Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang

Pengembangan wilayah Bregasmalang untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Brebes	4,76 – 5,33	17,25 – 17,00	8,54 – 7,28	67,55
2	Kab. Tegal	4,20 – 5,35	8,35 – 8,05	10,12 – 9,14	70,13
3	Kab. Pemalang	4,19 – 4,50	15,39	6,75	68,17
4	Kota Tegal	4,50 – 5,50	5,99 – 6,99	8,20 – 7,70	75,85

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Pengembangan wilayah Jawa Tengah dilakukan dalam upaya meningkatkan pemerataan wilayah barat Jawa Tengah dengan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu membangun kawasan industri baru di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang. Selain itu Wilayah Bregasmalang juga merupakan bagian Kawasan Pariswisata Lereng Gunung Slamet dan Kawasan Agropolitan MANGGAMAS (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas) yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini. Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan didukung dengan pembangunan prasarana sarana pendukungnya terutama di wilayah pantura. Sedangkan bagian selatan wilayah ini, diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam, serta memperkuat pembangunan wilayah berbasis pertanian, yaitu di Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes bagian selatan.

Selanjutnya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah ini diarahkan untuk pengembangan infrastruktur meliputi fasilitasi pembangunan jalan tol Pejagan – Semarang; peningkatan konektivitas wilayah Bregasmalang; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Brebes - Kabupaten Cilacap (Salem – Bandungsari); peningkatan jalan provinsi penghubung Brebes – Kabupaten Tegal; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Tegal – Kabupaten Pemalang; dan revitalisasi Terminal Tipe B Tanjung, Kabupaten Brebes. Selain itu rehabilitasi SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) dan pembangunan prasarana dan sarana air baku dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan agropolitan. Upaya pengelolaan lingkungan di WP ini juga dilakukan antara lain konservasi pada CAT Pekalongan – Pemalang, konservasi pada DAS Pemali dan DAS Comal, penanganan lahan kritis (Tegal, perbatasan Brebes -Kuningan, Pemalang), serta rehabilitasi pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Tegal dan Brebes.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 telah disepakati 50 usulan program/kegiatan di WP Bregasmalang. Adapun dari 50 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 40 usulan program/kegiatan; (2) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terdiri dari 4 (empat) usulan program/kegiatan; (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan; (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan; dan (5) Swasta terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Bregasmalang adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Wilayah Bregasmalang secara umum masih pada tahap kapasitas yang berperan pada tingkat *basic* kecuali Kota Tegal yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas berperan dalam kewilayahan. Kota Tegal dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di WP Bregasmalang.

Untuk mendukung pengembangan WP Bregasmalang program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang;
- b. Penanganan banjir di Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang;
- c. Pembangunan *Seawall* di Kabupaten Brebes;
- d. Pembangunan Jalan Bandungsari – Salem Bts. Kabupaten Brebes (Kabupaten Brebes), peningkatan Jalan Kersana – Bandungsari (Kabupaten Brebes); peningkatan Jalan Bumiayu – Salem (Kabupaten Tegal); peningkatan Jalan Bumiayu – Sirampog (Kabupaten Tegal); dan peningkatan Jalan Randudongkal – Moga (Kabupaten Pemalang);
- e. Rehabilitasi JDU SPAM Regional Bregas (Kabupaten Tegal);
- f. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Larangan Kabupaten Tegal, pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang, pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal, pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Jabres di Kabupaten Brebes, dan pengembangan Pertanian Bawang Putih di Kabupaten Tegal;
- g. Pembangunan STA Kabupaten Pemalang dan STA Kabupaten Brebes;
- h. Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku Embung Cikeusal (lanjutan) Kabupaten Brebes; dan
- i. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Kesesi/Bts Kabupaten Pekalongan – Bantarbolang Randudongkal - Belik/Bts Kabupaten Purbalingga, Slawi-Jatibarang (Bts. Brebes) dan Ruas Jalan Jatinegaran (Bts. Pemalang) – Slawi.

B. WP Barlingmascakeb

WP Barlingmascakeb sebagai WP Pendukung *quick win* Kawasan Industri (KI) Brebes meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Kondisi makro pembangunan wilayah Barlingmascakeb saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.13.

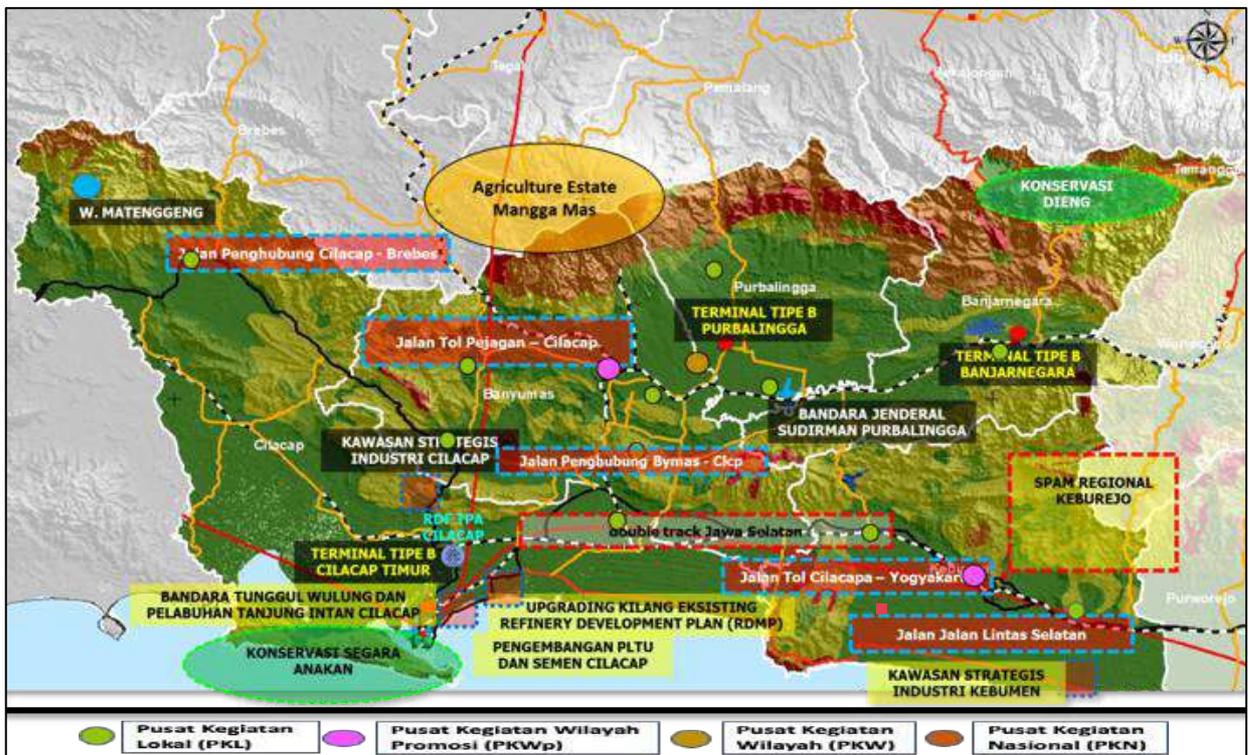
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Cilacap	2,15	11,67	9,97	70,42
2	Kab. Banyumas	4,00	13,66	6,05	72,44
3	Kab. Purbalingga	3,19	16,24	6,05	69,15
4	Kab. Banjarnegara	3,26	16,23	5,86	67,86
5	Kab. Kebumen	3,71	17,83	6,03	70,05

Sumber: BPS, 2022

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 Kabupaten Cilacap mencapai angka 2,15 persen dan merupakan angka paling rendah diantara empat kabupaten lainnya. Kabupaten Cilacap pada angka kemiskinan mencapai angka 11,67 persen dan merupakan angka paling rendah dari kelima kabupaten di wilayah ini. Angka TPT paling tinggi dicapai Kabupaten Banjarnegara dengan angka 5,86 persen. Sedangkan capaian IPM paling rendah pada wilayah ini diraih oleh Kabupaten Purbalingga sebesar 69,15 persen.

Wilayah Barlingmascakeb diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. PKN meliputi Kota Cilacap dan sekitarnya. Sedangkan PKW meliputi Purwokerto dan Kebumen, serta PKL meliputi Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Sumpiuh, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar – Kebumen, dan Prembun. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, PKL Purbalingga didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Arah kebijakan WP Barlingmascakeb diarahkan berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu yang didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.17
Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb

Pengembangan wilayah Barlingmascakeb tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.14.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Barlingmascakeb Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Cilacap	4,15-5,15	10,97	8,06 – 7,91	71,26
2	Kab. Banyumas	5,00	11,00	4,5	72,58
3	Kab. Purbalingga	4,50 – 5,00	14,50 – 14,00	4,50 – 5,50	70,01
4	Kab. Banjarnegara	4,50 – 5,50	15,35 – 14,35	4,50 – 5,00	68,34
5	Kab. Kebumen	5,00 – 5,50	15,00 – 16,00	5,27 – 5,50	71,00

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Untuk mencapai target indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi fasilitasi pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); fasilitasi pembangunan jalan tol Pejagan – Cilacap dan Cilacap – Yogyakarta; fasilitasi pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Bandara Tunggul Wulung beserta aksesibilitasnya; fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Banyumas – Cilacap, peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Cilacap – Brebes, peningkatan jalan provinsi di Kabupaten Cilacap (Perbatasan Jawa Barat), dan pembangunan Banjar Kebuka (Banjarnegara - Kebumen); pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (Koridor Purwokerto - Purbalingga); serta pembangunan Terminal Tipe B di Cilacap Timur.

Guna pemenuhan kebutuhan air baku maka dilakukan fasilitasi pembangunan Bendungan Matenggeng. Selain itu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan diantaranya konservasi pada DAS Citanduy, Dieng, Gunung Slamet, dan CAT Kebumen - Purworejo; penanganan kerusakan pesisir; serta pengembangan *Geopark* Karangsambung, dan rintisan pengembangan *Geopark* Dieng (Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo). Selanjutnya WP ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian utamanya adalah fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen; *upgrading RDMP*; industri semen; pariwisata koridor Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya; serta pengembangan kawasan agropolitan Mangga Mas.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, telah disepakati 32 usulan program/kegiatan di WP Barlingmascakeb. Adapun dari 32 usulan program/kegiatan tersebut akan dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 3 (tiga) usulan program/ kegiatan; (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan; dan (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan.

Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Barlingmascakeb adalah sektor jalan/jembatan dan transportasi.

Wilayah Barlingmascakeb masih pada tahap kapasitas berperan tingkat *basic* kecuali Kabupaten Banyumas yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas berperan dalam kewilayahan. Kabupaten Banyumas dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di wilayah Barlingmascakeb.

Untuk mendukung pengembangan WP Barlingmascakeb program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;
- b. Peningkatan Jalan Sidareja – Cukangleuleus (Kabupaten Cilacap); peningkatan Jalan Wanayasa – Kalibening (Kabupaten Banjarnegara); dan peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa (Kabupaten Banjarnegara);
- c. Pembangunan JDU SPAM Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo);
- d. Peningkatan produksi garam di pansela Kabupaten Kebumen;
- e. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupaten Kebumen;
- f. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui peningkatan terminal tipe B di Kabupaten Banjarnegara;
- g. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga sebagai dukungan peningkatan aksesibilitas PKW promosi.

C. WP Petanglong

WP Petanglong merupakan WP pendukung *quick win* Kawasan Industri (KI) Brebes dan KIT Batang yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.15.

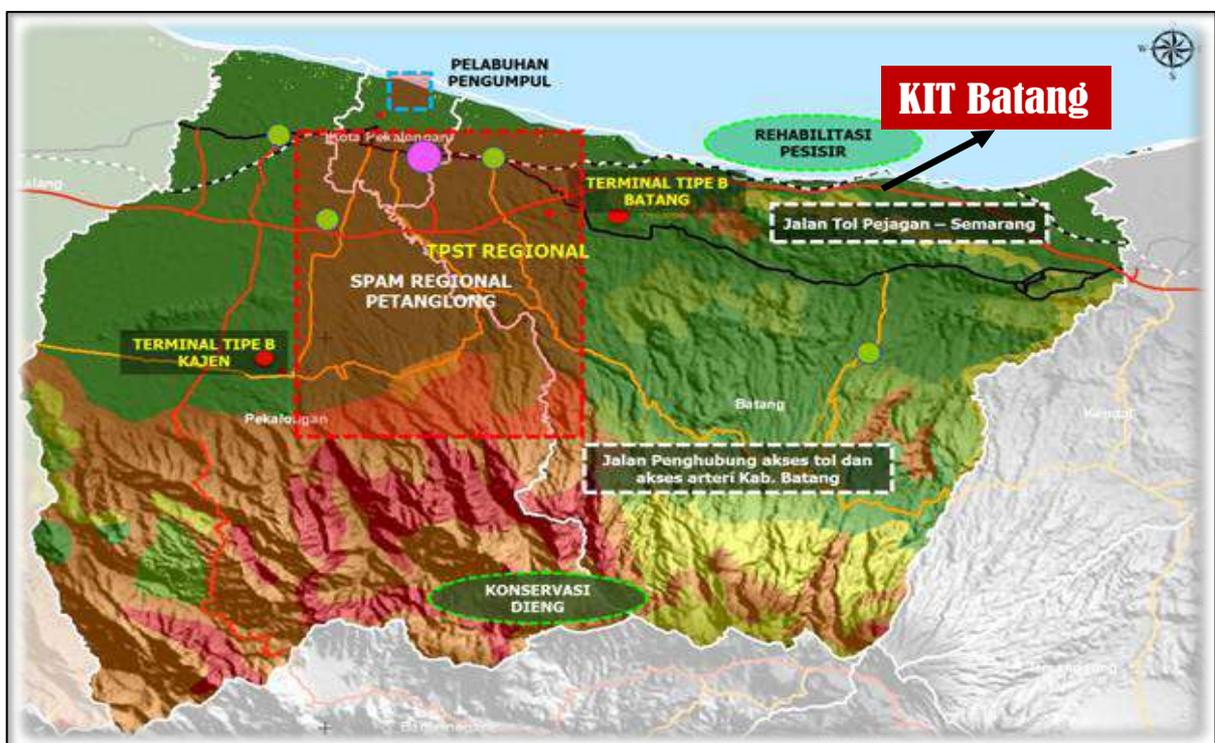
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Petanglong Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	3,54	10,57	4,28	70,11
2	Kab. Batang	4,88	9,68	6,59	68,92
3	Kota Pekalongan	3,59	7,59	6,89	75,40

Sumber: BPS, 2022

Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dari tiga kabupaten/kota di WP Petanglong berkisar 3 - 4 persen dengan pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Batang. Angka kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Pekalongan sebesar 10,57 persen. Sedangkan TPT paling rendah berada di Kabupaten Pekalongan dengan angka capaian 4,28 persen. Kota Pekalongan meraih angka tertinggi pada capaian IPM sebesar 75,40.

Wilayah Petanglong diarahkan sebagai PKW meliputi Kota Pekalongan, dan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Limpung, Batang, Kajen, Kedungwuni, dan Wiradesa. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong diarahkan berbasis industri pengolahan kreatif dan pertanian dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5.18
Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

Pengembangan wilayah Petanglong untuk tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 5.16.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Petanglong Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	4,00 – 4,50	9,61	4,00	70,71
2	Kab. Batang	4,90	8,40 – 7,98	5,93	69,66
3	Kota Pekalongan	3,70 – 4,20	6,50 – 6,45	6,48 – 6,10	75,60

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022

Untuk mencapai target indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain pemantapan konektivitas dan aksesibilitas melalui pengembangan infrastruktur meliputi revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih, Kabupaten Batang, dan Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan; peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan tol di Kabupaten Pekalongan, dan peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan arteri pantura di Kabupaten Batang.

Guna pemenuhan kebutuhan air bersih maka akan dilakukan pengembangan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan air baku diperlukan upaya pengelolaan lingkungan diantaranya utamanya rehabilitasi dan konservasi pada DAS Kupang dan Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), serta konservasi pada CAT Pekalongan – Pemalang; dan penanganan kerusakan pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Pekalongan.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di WP Petanglong. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Petanglong adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Di wilayah Petanglong sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dibangun Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi di wilayah Batang dan sekitarnya. Kawasan Industri Terpadu Batang (*the smart and sustainable Industrial Estate*) terletak di Koridor Industri Utara Jawa Tengah seluas 4.300 hektar. KIT Batang terbagi dalam 3 klaster kawasan dengan rincian klaster 1 (3.100 hektar), klaster 2 (800 hektar), dan klaster 3 (400 hektar). Peruntukkan pengembangan di klaster 1 adalah untuk pengembangan *industrial estate* dan *industrial township*, klaster 2 adalah untuk pengembangan pusat inovasi dan

township, dan klaster 3 adalah untuk pengembangan pusat rekreasi dan *township*.

Kewilayahan Petanglong secara umum masih berada di tingkatan *basic* yaitu untuk menguatkan faktor pendorong dan mulai mereorientasikan pada efektifitas produk. Namun, efisiensi pun masih perlu peningkatan pada hal-hal sentral seperti kualitas SDM tenaga kerja agar mendorong efektifitas produk dan pemanfaatan teknologi. Dalam hal inovasi, belum terdapat orientasi pemanfaatan hasil riset secara masif untuk peningkatan *output* produk dari wilayah Petanglong tersebut.

Untuk mendukung pengembangan WP Petanglong program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- b. Penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- c. Peningkatan Jalan Wiradesa - Kalibening Bts. Kabupaten Banjarnegara (Kabupaten Pekalongan);
- d. Pembangunan JDU SPAM Regional Petanglong (Kota Pekalongan);
- e. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kabupaten Batang;
- f. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui peningkatan terminal tipe B Banyuputih Kabupaten Batang (Tahap II);
- g. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan penyeberangan sungai melalui pembangunan dermaga plengsengan sungai pada Sungai Katikutho lintas penyeberangan Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal di Dermaga Lutungmati; dan
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan Wiradesa - Kalibening/Bts Kabupaten Banjarnegara.

5.2.2. Arahana Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, serta kurangnya dukungan prasarana dan sarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai etalase gambaran daerah/wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan

Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 5 (lima) konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumber daya untuk menserasikan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan; dan
5. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Kerangka pendanaan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah tahun 2023 diupayakan tercapai melalui:

- a. Penanganan tunggakan melalui *door to door* dengan melibatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, optimalisasi penagihan tunggakan melalui *call center*, program GADIS PANTURA (Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat), dan program Samsat BUMDes Digital Mandiri (BUDIMAN);
- b. Sosialisasi dan promosi melalui media cetak/elektronik, media sosial, baliho/papan reklame, event promosi, event apresiasi kepatuhan wajib pajak, MITRA PUTRA BANGSA (Pajak untuk Rakyat Bangkit Bersama), dan kerjasama dengan pelaku UMKM;
- c. Menambah titik layanan dan kanal pembayaran pajak kendaraan;
- d. Samsat keliling, Samsat PATEN, *Drive Thru*, *car free day*, gerai, mall, indomaret, *market place*, mall pelayanan publik;
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak lain dan retribusi daerah dengan menambah obyek baru, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, penanganan produksi rokok ilegal bekerjasama dengan bea cukai, koordinasi dengan BPH migas, *door to door* ke perusahaan yang teridentifikasi melakukan penjualan BBM di Jawa Tengah untuk menjadi WAPU, rekonsiliasi PBBKB dan WAPU, melakukan pengukuran ulang obyek PAP, dan UPPD memetakan potensi PAP (pengguna besar industri dan perusahaan);
- f. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi Sistem (eSAMSAT) dan penambahan titik-titik pelayanan;
- h. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- i. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
- j. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;

- k. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- l. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- m. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- n. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
- o. Menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Pada sisi yang lain proyeksi belanja pembangunan daerah ditujukan untuk penyelesaian dan penuntasan program dan kegiatan yang telah dimandatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 adalah tahun terakhir. Kebijakan belanja tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam pemantapan perekonomian daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Kebutuhan belanja juga tetap sejalan dengan upaya-upaya peningkatan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 25,883 triliun rupiah, dan pembiayaan netto sebesar 572,2 miliar rupiah.

Tabel 6.1.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1.	PAD	17.030.938.105.000
1.1.	Pajak Daerah	14.496.491.520.000
1.2.	Retribusi Daerah	130.666.107.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	630.115.007.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.773.665.471.000
2.	Pendapatan Transfer	8.201.542.504.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.201.542.504.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.908.038.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	25.311.388.647.000
1.	Belanja Operasi	14.842.447.490.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.223.709.320.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.397.046.280.000
1.3.	Belanja Subsidi	800.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.088.174.530.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	132.717.360.000
2.	Belanja Modal	1.965.253.619.000
3.	Belanja Tidak Terduga	23.100.000.000
4.	Belanja Transfer	9.052.787.538.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	6.290.333.788.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pmdes	2.762.453.750.000
5	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	25.883.588.647.000
6	Surplus (defisit)	(572.200.000.000)
1	Penerimaan Pembiayaan	942.200.000.000
	SiLPA	942.200.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	370.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	300.000.000.000
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Daerah	572.200.000.000
	SILPA	0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMA, SMK, dan SLB negeri termasuk untuk pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA, SMK, dan SLB swasta bagi 603.566 siswa, Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bagi 15.000 siswa, Biaya Operasional Sekolah (BOS), pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, pembinaan potensi siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan melalui DAK, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahap lanjutan SMK Lumbir Banyumas, SMK Pagentan Banjarnegara dan SMA Tawangmangu Karanganyar, penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta fasilitasi literasi gizi dan reproduksi remaja dalam rangka penanganan *stunting*. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK SMA, SMK, SLB; persentase prasarana sarana SMA, SMK, SLB sesuai standar; persentase keikutsertaan peserta didik SMA, SMK, SLB dalam even nasional yang berjenjang; persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik; dan persentase SMA, SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pada kompetensi dasar muatan lokal yang memuat internalisasi budaya dan kearifan lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase serapan kurikulum SMA, SMK dan SLB.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio guru SMA, SMK dan SLB dengan rombongan belajar SMA, SMK dan SLB.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan menengah dan khusus. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan SMA, SMK dan SLB yang diterbitkan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA terintegrasi, penguatan *Audit Maternal Perinatal* Surveilans dan Respons (AMP SR), penguatan pelayanan keluarga berencana, orientasi Pencegahan Penularan HIV Ibu Ke Anak (PPIA), *Blended Learning* Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), orientasi tata laksana kasus kekerasan perempuan dan anak bagi petugas kesehatan, penguatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), edukasi gizi seimbang melalui pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita, pelatihan konseling Pemberian Makanan dan Anak (PMBA), pelatihan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita, orientasi pendamping masyarakat dalam pencegahan anemia, pengembangan posyandu remaja, pengembangan desa siaga aktif di 35 kabupaten/kota; pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka penuntasan ODF; pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian vektor DBD dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemiologi dan peningkatan respon KLB serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; fasilitasi penyusunan regulasi dan promosi Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum; pendampingan pelayanan bagi ODGJ; pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan UCI desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; pelaksanaan vaksinasi di 7 RSUD/RSJD dan UPT Dinkes; pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas dan 7 RSUD/RSJD diantaranya pengadaan alat kesehatan, pengadaan alat kedokteran; pembangunan RS Mata rujukan kabupaten/kota, serta pembangunan gedung lanjutan tahap IV RSJD Surakarta.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan bayi; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan balita; persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga baik; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana <24 jam (termasuk di wilayah kerja 5 Balkesmas); persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu; persentase ketersediaan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; persentase ketersediaan obat dan vaksin; persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase pelayanan tersertifikasi (di masing-masing Balkesmas, BKIM, Balabkes PAK); persentase kabupaten/kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif; persentase kabupaten/kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan; persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (pada RSUD/RSJD).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi uji kompetensi fungsional kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan non kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya; tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes provinsi; serta persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (pada RSUD/RSJD).

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) di 35 kabupaten/kota; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional; penyediaan logistik (obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan makan minum) di 7 RSUD/RSJD, serta pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, reagen dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman, serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan monitoring evaluasi program promosi kesehatan; penyuluhan melalui berbagai media; komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi program prioritas; penguatan promosi di pondok pesantren; fasilitasi dan pendampingan dalam upaya pencapaian STBM, pengawalan implementasi germas; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pendampingan di desa binaan, penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh 7 RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; persentase kabupaten/kota yang difasilitasi teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran; persentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK; dan persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (pada RSUD/RSJD).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi, sungai dan pantai, sarpras air baku (embung), perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan irigasi dan air baku, serta pengelolaan konservasi SDA dan pengendalian banjir.

Penanganan prasarana sarana sumber daya air akibat banjir serta penanganan banjir dilaksanakan di 6 wilayah kerja Balai PSDA. Khusus penanganan banjir wilayah Pantura pada WS Pemali Comal dan Bodri Kuto antara lain Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kabupaten Brebes), Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan), Comal (Kab. Pemalang), Bodri (Kab. Kendal), Kemiri (Kota Tegal), serta Sengkarang (Kab. Pekalongan) yang dilaksanakan melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana sungai (perkuatan tebing dan konservasi DAS); sedangkan sistem Sungai Silandak (Kota Semarang), Anak Sungai Rawa Pening (Kab. Semarang), Sungai Cacaban (Kab. Tegal), Sungai Blukar (Kab. Kendal), dan Sungai Conang (Kab. Tegal)

melalui normalisasi dan pelurusan sungai. Upaya tersebut juga didukung melalui pengelolaan dan pengadaan peralatan berat; pengadaan bahan banjir; serta pembangunan IPAH (Instalasi Pengolah Air Hujan), dan biopori.

Rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana irigasi (Daerah Irigasi) di 6 wilayah kerja Balai PSDA, dan prasarana sarana air baku (embung) diantaranya di Kabupaten Wonogiri, Brebes, Tegal, dan Kota Semarang, dengan didukung penyediaan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) untuk operasi dan pemeliharannya (OP). Selain itu juga dilakukan dukungan fasilitasi pembangunan bendungan utamanya di Bendungan Jragung, Dolok, Bener, Kedunglanggar, Karanganyar (Pemalang), Ngemplak, Pasedan, Matenggeng, Bantarkawung, Malahayu, Jatinegara, Bodri dan Petanglong.

Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi; persentase luasan daerah bebas genangan banjir; persentase sungai dalam kondisi baik; persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase prasarana dan sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; serta persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi pembangunan SPAM Regional Wosusokas, rehabilitasi SPAM Regional Bregas, pengembangan SPAM Regional Petanglong, dan Keburejo (DAK), inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, serta hibah sarpras air minum kepada Kelompok Pengelola (KP) SPAM di 10 kabupaten PKE. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akses layak air minum perkotaan; persentase akses layak air minum perdesaan; dan persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyusunan DED IPLT Regional Purbalingga Banjarnegara, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase akses sanitasi air limbah domestik.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah diantaranya pembangunan gedung utamanya untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar.

e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang diperiksa keandalannya.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada ruas-ruas strategis penghubung pantura-pansela (di antaranya ruas Kersana – Bandungsari, Randudongkal - Moga peningkatan jalan Bumiayu-Sirampog, akses perbatasan antar provinsi di antaranya Sidareja - Cukangleuleus, Lasem - Sale/Bts. Provinsi Jatim, Wonogiri - Manyaran - Blimbing, pelebaran segmen eksisting ruas Bandungsari-Salem pasca bencana, serta penanganan jalan pendukung akses KSPN Borobudur melalui PHJD.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeliharaan rutin, dan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir, untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase panjang jalan provinsi sesuai standar kolektor baik (pada bidang); persentase jalan provinsi kondisi permukaan baik (pada balai); dan persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik (pada balai). Untuk mendukung perencanaan dan pengawasan penanganan jalan provinsi dilakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; dan penanggulangan bencana/tanggap darurat, serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase perencanaan, pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan.

Indikator kinerja lainnya di program ini yang juga harus dicapai yaitu persentase panjang jalan yang dileger; persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaannya yang termutakhirkan; persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan; dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi; dan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana tata ruang provinsi, pembinaan penyusunan/revisi rencana tata ruang kabupaten/kota, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase dokumen/arahan pengembangan kewilayahan yang disusun, persentase dokumen RTR kabupaten/kota yang dievaluasi, persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang, persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, serta persentase pengawasan ruang di masing-masing 6 (enam) balai PSDA.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi pembangunan rumah susun bagi pekerja. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, dan persentase rumah layak huni yang disediakan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan

kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program. Indikator kinerja program ini adalah persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggar produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggar perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal; pemeliharaan tramtibum, pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum; pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP; peningkatan keterampilan satlinmas, peningkatan kapasitas kelembagaan satlinmas, dan orientasi satlinmas dalam pengamanan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum; persentase pemeliharaan tramtibum lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah; persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan; serta persentase anggota linmas kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pendokumentasian sejarah kebencanaan dan peningkatan literasi tentang kebencanaan, penyediaan sistem informasi kebencanaan, penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana kontingensi Banjir Serayu, penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan 25

desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan 4 paket *Early Warning System*; pemasangan rambu jalur evakuasi 40 unit; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, fasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di kabupaten/kota; pembentukan posko terpadu penanggulangan bencana, pengadaan peralatan dan logistik penanganan bencana; dan pemulihan pasca bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penurunan risiko bencana, persentase penanganan darurat kebencanaan, persentase rehab rekon pasca bencana, dan persentase pemenuhan logistik bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/IPSM kabupaten/kota, peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, perluasan puskesmas di tingkat desa/kelurahan, bintek peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS, hibah kepada lembaga kesejahteraan sosial, serta monitoring dan pengawasan pelaksanaan penarikan undian. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di dalam panti. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (pada bidang dan seluruh panti).

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera/KJS, pemberian bantuan sosial KUBE, dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan; persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan

jaminan sosial; dan persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan permakanaan, sandang, dan hunian sementara bagi korban bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Giri Tunggal, anjangsana perintis kemerdekaan, serta penelitian dan pengkajian gelar kepahlawanan, pejuang dan keluarganya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja yang dilakukan pembinaan.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (Kejuruan Las, Listrik, Otomotif, Bangunan dan Mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (Kejuruan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Pengolahan Hasil Pertanian), Pelatihan *Housekeeping*, *Tour Guide*, *Waiters*, Barista, Pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi; persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi; persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi; persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian; persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan

atau kewirausahaan; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online* e-makaryo, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan Calon TK AKAD; penyebarluasan informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; *Job Canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan PMI baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu indikator persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal; persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan LKS Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah; persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk; persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan penarikan pekerja anak, pelaksanaan PPA, penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek K3 di perusahaan, pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3, dan

persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan evaluasi Pengarusutamaan Gender/PUG kabupaten/kota, pendidikan politik bagi perempuan, serta pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, serta koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan/tindak pidana perdagangan orang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja rasio korban kekerasan terhadap perempuan, dan persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan layanan Puspaga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender; dan persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan data gender dan anak, serta pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG dan PUHA. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan OPD provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan konferensi forum anak Jawa Tengah, serta TOT fasilitator sebaya forum anak. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota menuju layak anak minimal tingkat pratama, dan persentase keterisian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, serta advokasi implementasi kebijakan pemenuhan hak anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio korban kekerasan terhadap anak, dan

persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjenjang.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pasar mitra tani, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanganan *stunting*, rehabilitasi *Rice Milling Unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas; CV harga pangan strategis (beras); rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan; dan angka konsumsi beras.

b. Program Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah rawan pangan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase penurunan daerah rawan pangan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi Organik, sertifikasi keamanan pangan (Prima 2 dan 3 serta PSAT), penyediaan dan rehabilitasi alat uji keamanan mutu pangan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan; dan persentase peningkatan rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi, dan untuk dukungan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja program ini yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absente

Program ini diarahkan pada kegiatan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pelaksanaan reforma agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan PERDA Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJPD Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJMD Provinsi Jawa Tengah, validasi KLHS integrasi RTRW dan RZWP3K, fasilitasi validasi KLHS RTRW/RDTR/RPD kabupaten/kota, penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait pelestarian lingkungan hidup. Indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan upaya fasilitasi pembangunan IPAL limbah ternak, pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara, pengelolaan laboratorium, pendampingan Aksi Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim dan Registri Kampung Iklim, serta penyusunan dokumen tingkat Emisi dan serapan tahunan Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sungai yang meningkat kualitasnya; persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup), persentase pengujian kualitas air;

persentase pemantauan kualitas udara ambien (pada Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH dengan fasilitasi bibit dan penanaman RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (pada Bidang Pengelolaan Sampah, limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan pada Balai Kebun Raya Baturraden).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan, fasilitasi penanganan permasalahan, penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi lingkungan hidup (pada bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup), dan persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku peduli Lingkungan Hidup baik masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan bimtek kader lingkungan, kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya; (pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup); persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya (pada Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup); dan persentase lembaga/keompok yang ditingkatkan kapasitasnya (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Program ini

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang ditangani (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada tahapan pembebasan lahan TPST Regional Magelang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sampah yang dikelola.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tugas tersebut antara lain bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTPel di kabupaten/kota. Indikator kinerja program ini yang harus dicapai yaitu persentase kabupaten/kota yang seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota yang dilakukan antara lain bimtek aparatur pencatatan sipil, FGD pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang kepemilikan dokumen akte kelahiran usia 0-17 di atas 95%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat. Indikator kinerja program ini adalah persentase desa yang memiliki satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui fasilitasi pembentukan BUMDesma, dan kerjasama antar desa, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pengembangan kawasan perdesaan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Desa/SID) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendukung tata kelola penanggulangan kemiskinan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan desa; persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya; persentase rekomendasi gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum; dan persentase desa dengan Sistem Informasi Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya, dan persentase desa yang memiliki BUMDesa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada advokasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan/GDPK 5 pilar bagi kabupaten/kota, implementasi kebijakan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, integrasi pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran SMA/ sederajat termasuk kesehatan reproduksi remaja, serta fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK (*Grand Desain* Pembangunan Kependudukan) 5 bidang, dan persentase kabupaten/ kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, advokasi penurunan *unmetneed*, serta penggerakan dan bhakti sosial pelayanan KB bersama mitra kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan *unmetneed* KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan *workshop* peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA, bimbingan teknis penyusunan studi kelayakan kelompok UPPKA, *workshop* penurunan angka *stunting* melalui orientasi dan peningkatan kapasitas kader Bina Keluarga Balita/BKB, sosialisasi gerakan "Jo Kawin Bocah" melalui kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja/BKR dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK-R, *workshop* peningkatan kualitas hidup lansia melalui pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia/BKL, pendidikan pra nikah bagi komunitas anak dan pesantren (sadar kespro untuk pencegahan perkawinan anak dan *stunting*), serta penguatan peran serta *stakeholder* dalam pembangunan ketahanan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan; persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan; dan persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk untuk kebutuhan transportasi pelajar dan mahasiswa, buruh, dan veteran berupa operasionalisasi 6 (enam) koridor lanjutan (Kota Semarang - Kabupaten Semarang, Kota Semarang - Kendal, Kota Semarang

- Grobogan, Banyumas - Purbalingga, Purworejo - Kabupaten Magelang, Surakarta - Sragen) dan pembukaan 1 (satu) koridor baru (Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri); kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo Purworejo (Tahap III), peningkatan Terminal Banyuputih Batang (Tahap II), peningkatan Terminal Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara, peningkatan terminal di Kabupaten Wonogiri (Terminal Pracimantoro, Terminal Jatisrono, dan Terminal Purwantoro); peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan provinsi terutama pada ruas perbatasan antar provinsi DIY, jalan akses pendukung kawasan pariwisata, jalan alternatif sejajar pantura, dan ruas strategis lainnya, serta retrofit/perbaiki lampu yang rusak untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat.

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi; persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis; persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan; persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; persentase rehabilitasi daerah rawan kecelakaan (pada semua balai); persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (pada semua balai); persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM; persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi *Passing Grade* pemahaman keselamatan jalan; dan persentase fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal (lintas penyeberangan Lutungmati - Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo), serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai Bengawan Solo lintas Surakarta - Sukoharjo (lintas penyeberangan Sangkrah - Gading); kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa

pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan; kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa (proses *scrapping*).

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; dan persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (*Early Warning System/EWS*) di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Grobogan, serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang kereta api.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti publikasi data dan informasi oleh badan publik, koordinasi komunitas masyarakat kehumasan, penyebarluasan konten, penyusunan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dan penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu nilai survei kepuasan komunikasi publik, dan persentase badan publik yang terbuka.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti kegiatan utama seperti implementasi penyelenggaraan *e-Government*; pengelolaan nama domain dan sub domain; penyediaan *bandwith*; pengelolaan server/*storage*; pengintegrasian infrastruktur TIK; pengembangan aplikasi berbagi pakai; dan penyediaan jaringan FO, serta penyediaan sarana pendukung data *center*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan persentase aplikasi yang diintegrasikan.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi, melalui pemeriksaan dan pengawasan 372 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah koperasi aktif provinsi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui penilaian kesehatan bagi 222 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah KSP/KSPPS provinsi dengan kategori sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui fasilitasi *coworking space*, peningkatan SDM KUMKM *start-up* bisnis, peningkatan digitalisasi bagi 50 *start-up* wirausaha baru; dan pelatihan bagi 650 pengurus koperasi 1.350 UMKM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase SDM KUMKM yang terampil.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui fasilitasi penguatan manajemen dan kelembagaannya dan fasilitasi peningkatan usaha, antara lain berupa subsidi bunga bagi 100 koperasi; pengembangan ekonomi pesantren di 50 pesantren; pendampingan bagi 50 koperasi; dan pemeringkatan bagi 150 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi provinsi yang berkualitas.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui

fasilitasi kemudahan akses kredit bagi 500 UMKM; sertifikasi halal bagi 500 UMKM; pemberdayaan bagi 2.679 Usaha Mikro Kecil; dan penumbuhan 300 wirausaha baru. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha mikro menuju kecil.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, melalui pelibatan 125 UMKM dalam BLANGKON; pameran *offline/online*; dan peningkatan kelas bagi 861 Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha kecil menuju menengah.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi, dan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insetif dan kemudahan penanaman modal sebagai tindak lanjut atas revisi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Indikator kinerja program ini adalah persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF), *business meeting* dalam dan luar negeri, penyusunan bahan promosi investasi, digitalisasi promosi, *Investment Tour*, *bussiness meeting* pembinaan kepeminatan penanaman modal, dan koordinasi promosi aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha di bidang penanaman modal. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio izin usaha terhadap kepeminatan penanaman modal, dan rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan usaha.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui gerai pelayanan perizinan, mobil layanan keliling, dan klinik perizinan; koordinasi penyelesaian pengaduan permasalahan pelayanan perizinan dan penanaman modal; peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; Analisa Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM); dan peningkatan kapasitas SDM layanan perizinan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penyelesaian pengaduan masyarakat; persentase pemenuhan standar pelayanan; persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah, pemantauan realisasi penanaman modal, penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan/pengawasan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, dan klinik investasi pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase realisasi proyek penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan data mikro, penyusunan statistik penanaman modal, peningkatan kualitas dan publikasi data dan informasi penanaman modal, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal, serta pembangunan *website* CJIP dan aplikasi *new* SIAP Jateng. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan kesadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga memadai utamanya penyelesaian kawasan Jatidiri; peningkatan tenaga olahraga; penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *event* olahraga termasuk bagi penyandang disabilitas; serta pembinaan, pelatihan dan pengembangan atlet termasuk atlet pelajar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan prestasi olahraga;

persentase atlet PPLOP yang berprestasi; persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan aplikasi *Single Data System*, *Open Data* sebagai portal satu data Jawa Tengah; fasilitasi Satu Data Indonesia/Jaringan Informasi Geospasial Nasional ke kabupaten/kota (35 kabupaten/kota); pengembangan infrastruktur (lisensi aplikasi pemetaan). Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan data sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada kegiatan utama seperti penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi, analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintah, dan pelayanan keamanan penetapan pola hubungan komunikasi sandi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah persentase perangkat daerah (PD) memiliki keamanan informasi >80.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada parade seni budaya Jawa Tengah; pagelaran seni dalam provinsi; pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah; dan Kongres Bahasa Jawa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ragam budaya terlayani; dan persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jenis seni tradisi terlayani.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi melalui even napak tilas dan lawatan sejarah; dialog budaya dan tradisi; seminar sejarah lokal; dan festival/pagelaran/lomba seni dalam provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sumber belajar berbasis budaya.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya tingkat provinsi; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pelestarian cagar budaya; serta pameran cagar budaya dan permuseuman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase status cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada konservasi, pemeliharaan museum serta pameran, lomba dan *museum goes to school*. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Survei Kepuasan Pengunjung Museum.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Perpustakaan** yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Provinsi melalui pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka baik konvensional maupun digital melalui i-Jateng; pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik; pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi; peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan provinsi; pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan melalui kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas perpustakaan provinsi; peningkatan budaya gemar baca pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus, dan masyarakat melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial salah satunya berupa layanan rumah belajar modern; pengembangan dan pelestarian bahan pustaka; layanan perpustakaan keliling, dan layanan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, kabupaten/kota dalam pembudayaan gemar membaca; persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan; persentase perluasan jejaring kemitraan; persentase ketersediaan bahan pustaka dan persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan Arsip**. Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan kearsipan, akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, penyelamatan arsip, penyusunan naskah sumber arsip dalam bentuk cetak dan film, serta publikasi dan promosi kearsipan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perangkat daerah yang tertib arsip; dan persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan; serta persentase peningkatan pengunjung arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan/TKB dan penanaman bibit mangrove serta cemara laut; pengelolaan kawasan konservasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pencadangan kawasan konservasi; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan usaha petambak garam rakyat. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu yaitu persentase peningkatan produksi garam; persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir; persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif; persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya; dan persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi alat tangkap ramah lingkungan; penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan/SHTI dan ISO di pelabuhan perikanan pantai; pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi nelayan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; asuransi nelayan; dan gerai perijinan kapal perikanan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap; dan persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana dan revitalisasi loka budidaya; pemberian bantuan sarana prasarana budidaya ikan dalam rangka penurunan *stunting*; pengembangan minapadi dan nila salin; dan penanganan hama penyakit ikan. Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah persentase pertumbuhan produksi budidaya; persentase peningkatan produksi benih; dan persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan;

dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Indikator kinerja program ini yaitu persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan; persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan; dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan SDKP.

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); pemberian stimulan ikan segar/olahan ikan dalam rangka penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/*Certificate Of Analysis*); diversifikasi pengolahan ikan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*. Indikator kinerja program ini adalah persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan; dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi (pengembangan desa wisata, pengembangan atraksi wisata berbasis budaya); pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui penataan dan pemeliharaan sarana prasarana kawasan DTW Provinsi (Goa Seplawan, Karimunjawa dan Api Abadi Mrapen); perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP Dieng dskt, KSPP Sangiran dskt, KPPP Kaligua - Malahayu dskt, KSPP Cilacap - Nusakambangan dskt, KSPP Gedongsongo - Rawa Pening dskt, KSPP Demak - Kudus dskt, KSPP Prambanan - Klaten dskt, KPPP Tawangmangu dskt); pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata provinsi (Festival Karimunjawa, Festival Sangiran, Festival Borobudur); pemberian penghargaan kepariwisataan (Abiwara Pariwisata Jawa Tengah); pelatihan dan edukasi tentang standarisasi bagi usaha pariwisata di daerah; pengawasan sertifikasi usaha pariwisata; serta inventarisasi dan *updating* data 13 usaha pariwisata ke dalam aplikasi Madosi (*Map Destination Online System*) sesuai dengan Permenparekraf. Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada

setiap DPP, dan persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan setrategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi even pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi, penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (fasilitasi sertifikasi HKI dan sertifikasi kompetensi SDM ekonomi kreatif); serta penyediaan sarana prasarana kabupaten/kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kabupaten/kota kreatif yang teruji petik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kota kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan pengelola *homestay* dan pemandu wisata (*tour guide*); pelatihan *Digital Marketing*, pembinaan kewirausahaan bagi pelaku pariwisata; pemilihan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah; pelatihan kepariwisataan disekitar DTW; sertifikasi MICE pelaku wisata; penyusunan profil ekonomi kreatif Jawa Tengah; pelaksanaan publikasi dan pemasaran karya ekonomi kreatif secara virtual; serta penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan serta pemanfaatan aset milik pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan prasarana sarana

dan revitalisasi kebun benih, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, dan fasilitasi regenerasi petani melalui pencetakan petani milenial. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penambahan jumlah alsintan; persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah; persentase penyaluran pupuk subsidi; persentase peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati, dan jahe; persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa; persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil; persentase layanan sertifikasi benih; persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH (wilayah Semarang, Surakarta, Banyumas) dan di Balai Benih Tanaman Perkebunan.

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kawasan peternakan terintegrasi, distribusi bibit ternak berkualitas, pendampingan pembibitan, peningkatan produksi semen beku, pengawasan peredaran obat hewan dan keamanan produk hewan pada pelaku usaha, serta pelatihan kelompok ternak. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu jumlah populasi ternak, persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku, persentase peningkatan produksi ternak, serta persentase peningkatan pengawasan peredaran obat hewan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJIT), dan pendampingan petani tembakau. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jaringan irigasi yang baik; persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya; dan persentase produk tembakau yang diserap pasar.

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, dan pelatihan budidaya ternak. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan pembebasan *brucellosis* atau penyakit hewan menular termasuk penyakit mulut dan kuku melalui pemberian surveilans dan kompensasi bagi ternak reaktor *brucellosis*, serta pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan. Program ini diarahkan untuk

mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan PHMS (penyakit hewan menular strategis), dan persentase penurunan pemotongan betina produktif.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Selain itu diarahkan untuk kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (bidang penyuluhan, pasca panen, dan bina usaha); dan persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (balai pelatihan pertanian).

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan untuk pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (SUPRA). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan.

4. Kehutanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase

unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); serta persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani pada CDK I-XI dan BSPTH.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, dan pengelolaan Kebun Raya Baturaden, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE; inisiasi peningkatan/ perubahan status kawasan KHDPK berupa pengembangan kawasan konservasi baru yang menjadi kewenangan provinsi (Tahura) di Kawasan G.Muria, G.Slamet, G.Prau, G.Ungaran, Pegunungan Dieng maupun kawasan KHDPK lain yang potensial menjadi kawasan konservasi di Jawa Tengah; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase TSL yang ditangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam dan pada CDK I-IV, VI, VIII-XI); persentase kawasan konservasi yang dikelola secara efektif (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam pada CDK I-VI, VIII-IX; dan persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (pada Balai Kebun Raya Baturraden dan pada Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro).

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (pada bidang Penyuluhan, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, dan pada CDK I-XI).

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah DAS yang tertangani, dan persentase lahan kritis dan sangat kritis yang tertangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya alam).

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan geologi dan air tanah, utamanya untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah melalui kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal, pembangunan sumur pantau, pemeliharaan dan pembelian suku cadang peralatan sumur pantau, serta penyusunan Peta Zona Konservasi Air Tanah (CAT Eromoko, CAT Banyumudal, CAT Majenang, dan CAT Nusakambangan). Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu persentase pengambilan air tanah (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian air tanah.

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral, penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*good mining practice*), terwujudnya tertib usaha pertambangan (penertiban PETI), dan peningkatan produktifitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan, serta kegiatan penyusunan profil mineral unggulan dilanjutkan dengan kegiatan promosi potensi pertambangan di Jawa Tengah. Kemudian program ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kegiatan usaha pertambangan dengan melalui kegiatan bimtek mahasiswa kebumian,

pemberian bantuan alat cetak bata disertai dengan pelatihan penggunaan alat pengolahan bahan tambang tersebut.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu peningkatan persentase *good mining practice* (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan energi, menekan emisi karbon, dan konservasi energi dengan meningkatkan energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan infrastruktur EBT antara lain demplot biogas, biomass, gas rawa, PLTS *Rooftop*, Penghargaan Hemat Energi dan Air, dan Desa Mandiri Energi, serta program penyuluh energi dalam rangka mewujudkan kemandirian energi.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi di Jawa Tengah termasuk 12 wilayah Cabang Dinas ESDM.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk peningkatan keselamatan ketenagalistrikan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, serta peningkatan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi 15.000 rumah tangga miskin.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin di Jawa Tengah termasuk 12 wilayah Cabang Dinas ESDM.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat,

monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program ini adalah persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten/kota (*price center*).

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *Export Coaching Program (ECP)*, *Coaching Program For New Exporters (CPNE)*, pemetaan potensi desa ekspor, perluasan *networking* promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *One On One Meeting* dengan Atase Perdagangan (Atdag)/ *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)*. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator nilai ekspor non migas.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/ edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; kegiatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perijinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan kegiatan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian

dan sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan, persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (pada BPSMB Surakarta dan BPSMB Semarang).

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah. Produk ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri agro, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Indikator yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri agro.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan bidang industri non agro melalui penumbuhan dan pendampingan Wirausaha Baru/WUB industri non agro, peningkatan SDM industri non agro, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri non agro, serta peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan. Indikator kinerja yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri non agro.

Selain itu dilakukan juga kegiatan di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan meliputi peningkatan layanan baik SDM balai dan IKM yang bergerak di industri kreatif digital dan kemasan yang memanfaatkan layanan jasa di balai. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif.

Kegiatan lain juga dilakukan di Balai Industri Logam dan Kayu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan layanan balai/UPT terhadap pelaku industri logam dan kayu. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa.

Di samping itu kegiatan ini juga dilakukan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki melalui peningkatan dan penyaluran SDM industri produk tekstil dan alas kaki siap kerja di Jawa Tengah. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri/IUI, Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional, dan persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi; dan persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum; persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Adpem; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Perekonomian; persentase capaian

administrasi umum dan keuangan Biro Kesra; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi; persentase pelayanan administrasi kepegawaian Setda; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan; dan persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro APBJ.

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya; persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya; efektifitas pelaksanaan analisis jabatan OPD; persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan; persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan standar pelayanan; persentase OPD yang nilai PMPRBnya meningkat; persentase kabupaten/kota yang indeks reformasi birokrasinya meningkat; dan persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu efektifitas kerjasama daerah; persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti; dan persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan

bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar; persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar; dan persentase fasilitasi keagamaan dalam kondisi baik.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan persentase kabupaten/kota peduli HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu nilai kemandirian BLUD; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan; persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur; persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan; persentase capaian kinerja program bidang pertanian; tingkat kesehatan BUMD aneka usaha; dan tingkat kesehatan BUMD jasa keuangan.

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu efektivitas pengadaan secara elektronik; persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa; dan persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu capaian pelaksanaan APBD; capaian pelaksanaan APBN; persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; persentase realisasi bantuan keuangan; dan persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD, serta kegiatan perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja program ini yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Sekretariat DPRD; serta persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,

Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD; pelaksanaan dan pengawasan kode etik; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kapasitas DPRD; fasilitasi tugas pimpinan DPRD; pembahasan kebijakan anggaran; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; serta pembahasan kerja sama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA; dan persentase layanan bagian humas.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dalam mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase penetapan APBD tepat waktu; persentase evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan; persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun

tepat waktu; persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu; dan persentase realisasi serapan APBD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan capaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah; persentase objek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan BBNKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan PKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan PAP (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah; persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; persentase peningkatan penerimaan PBBKB; persentase peningkatan penerimaan pajak rokok; persentase peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah; persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah; dan persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada (di UPPD).

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan pada terselenggaranya manajemen talenta yang transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan 9 kotak manajemen talenta berdasarkan tingkat potensial dan kinerja; akuisisi talenta melalui pengadaan dan pengangkatan CASN, serta fasilitasi mutasi PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, akuntabel, kompetitif berbasis kompetensi dengan *Assesment Test*; pengembangan dan retensi talenta ASN melalui tugas belajar, fasilitasi ijin belajar, diklat lemhanas, diklat PIM Tk. I, evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tepat waktu; monitoring dan evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan; pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis TI; serta pembinaan disiplin, kesejahteraan, perlindungan dan penghargaan ASN.

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PNS yang terpetakan kompetensinya; persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar; persentase pejabat

pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya; persentase layanan administrasi kepegawaian; persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan; dan persentase penanganan kasus kepegawaian.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial; persentase ASN yang lulus latsar CPNS; persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti; indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan; dan persentase PNS yang lulus uji kompetensi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penelitian di berbagai bidang dan sektor, pengkajian isu-isu strategis daerah, pengkajian pengembangan wilayah, mendorong kreativitas dan inovasi di sektor pemerintahan, pedesaan, dan ekonomi masyarakat, fasilitasi kewirausahaan berbasis teknologi, fasilitasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sistem ilmu pengetahuan berbasis TIK, perekayasaan, diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang ekonomi dan industri; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang pemerintahan sosial dan budaya; dan persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung** yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan

masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian pelayanan penghubung.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal; dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan khusus, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta asistensi dan pendampingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu nilai *self assessment* RB provinsi, persentase capaian aksi stranas PK, persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi, persentase nilai MCP korsupgah, dan persentase penerapan MR di OPD.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian

indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pertahanan Dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah; persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta *Cost Recovery Rate* (CRR) total (RSUD/RSJD).

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada Lampiran Buku III RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas beserta pagu indikatifnya pada masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	NON URUSAN		9.514.384.531.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.514.384.531.000
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.147.526.151.000
01.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.144.306.403.000
01.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.402.600.000
01.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	385.358.000
01.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	431.790.000
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		631.595.587.000
01.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	614.327.058.000
01.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.848.054.000
01.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	603.244.000
01.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.817.231.000
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		819.440.659.000
01.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	162.275.169.000
01.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	96.244.958.000
01.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.817.800.000
01.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	111.305.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	672.698.000
01.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	440.156.525.000
01.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.302.680.000
01.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.665.829.000
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		56.924.400.000
01.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.517.151.000
01.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.118.249.000
01.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.095.000.000
01.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.194.000.000
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		9.266.576.000
01.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.216.576.000
01.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.050.000.000
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		220.896.071.000
01.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.482.300.000
01.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000
01.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	53.401.624.000
01.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	157.457.147.000
01.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.100.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	380.000.000
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		21.404.547.000
02.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	400.000.000
02.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12.656.892.000
02.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.946.979.000
02.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.348.152.000
02.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.052.524.000
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		5.877.046.000
02.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.557.500.000
02.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.502.836.000
02.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	275.000.000
02.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000
02.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	639.210.000
02.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	702.500.000
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		30.180.000.000
02.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.810.000.000
02.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.900.000.000
02.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.470.000.000
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.626.344.000
02.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
02.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	677.000.000
02.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	569.344.000
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		71.247.912.000
02.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.485.000.000
02.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.364.000.000
02.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.012.100.000
02.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.095.000.000
02.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.854.930.000
02.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000
02.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	55.086.882.000
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		800.000.000
02.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	255.000.000
02.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	235.000.000
02.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	310.000.000
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		6.060.000.000
02.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
02.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	925.000.000
02.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.095.000.000
02.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.840.000.000
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.035.000.000
02.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	330.000.000
02.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.255.000.000
02.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	450.000.000
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		135.552.146.000
02.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	128.749.179.000
02.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.404.216.000
02.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.398.751.000
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		71.322.184.000
02.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	40.512.500.000
02.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	30.809.684.000
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		39.646.144.000
02.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.975.000.000
02.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.725.000.000
02.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.099.062.000
02.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10.009.920.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
02.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.945.331.000
02.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.891.831.000
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.299.530.000
02.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	550.000.000
02.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.030.000.000
02.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.200.000.000
02.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	919.530.000
02.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	600.000.000
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		167.652.237.000
02.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	24.647.117.000
02.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	143.005.120.000
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		2.200.000.000
02.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.200.000.000
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		4.350.000.000
02.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	4.350.000.000
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		34.429.200.000
02.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	19.742.500.000
02.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	7.079.250.000
02.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.969.250.000
02.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.513.200.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
02.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.125.000.000
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.085.315.000
02.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.085.315.000
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		734.063.000
02.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	734.063.000
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		63.306.658.000
03.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.665.333.000
03.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	40.657.712.000
03.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.169.286.000
03.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.973.452.000
03.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.840.875.000
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		8.202.661.000
03.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.581.051.000
03.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.554.680.000
03.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000
03.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.766.930.000
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		158.425.904.000
03.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	98.134.270.000
03.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.637.390.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
03.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	17.373.553.000
03.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	6.014.991.000
03.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	24.265.700.000
03.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		47.446.260.000
03.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	30.338.232.000
03.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.459.494.000
03.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	11.448.534.000
03.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.200.000.000
03.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		44.456.050.000
03.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7.356.553.000
03.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.176.129.000
03.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	14.496.403.000
03.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	18.426.965.000
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		42.111.244.000
03.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000
03.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.309.004.000
03.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	31.044.648.000
03.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.200.663.000
03.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.867.059.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
03.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	619.870.000
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		21.379.595.000
03.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	20.057.133.000
03.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.322.462.000
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		296.000.000
03.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	296.000.000
04.01	SEKRETARIAT DAERAH		661.843.692.000
04.01.01		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	200.672.868.000
04.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.255.700.000
04.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.336.130.000
04.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	439.172.225.000
04.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.184.000.000
04.01.06		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	6.961.500.000
04.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.578.269.000
04.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.683.000.000
04.02	SEKRETARIAT DPRD		463.172.993.000
04.02.01		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	189.596.906.000
04.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	273.576.087.000
05.01	PERENCANAAN		12.309.800.000
05.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.400.000.000
05.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.909.800.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
05.02	KEUANGAN		9.138.136.811.000
05.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.092.324.228.000
05.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.010.819.000
05.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	40.801.764.000
05.03	KEPEGAWAIAN		17.176.315.000
05.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	17.176.315.000
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		24.768.613.000
05.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.768.613.000
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		8.940.000.000
05.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.940.000.000
05.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		3.189.196.000
05.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.189.196.000
06.01	INSPEKTORAT DAERAH		9.084.663.000
06.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.396.969.000
06.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.687.694.000
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		158.806.549.000
08.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.328.050.000
08.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.372.082.000
08.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	106.751.642.000
08.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.382.655.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
08.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.972.120.000
TOTAL			25.883.588.647.000

Selanjutnya implementasi Program Unggulan di tahun 2023 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.3.
Implementasi Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2023

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	a. Sekolah tanpa sekat	Integrasi pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB	Program ini dilakukan dengan memberikan stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan termasuk pemberian tambahan penghasilan bagi GTT dan PTT.
			Pemberian dana BOS SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Merupakan kewenangan pusat dan Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan termasuk pemberian tambahan penghasilan bagi GTT dan PTT
			Pemberian dana BOS SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Merupakan kewenangan pusat dan jumlah siswa penerima BOS sesuai

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri (SLBN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan termasuk pemberian tambahan penghasilan bagi GTT dan PTT
			Pemberian dana BOS SLB Negeri (SLBN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Merupakan kewenangan pusat dan Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SMA masuk dalam komponen BOP SMA
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SMK masuk dalam komponen BOP SMK
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SLB masuk dalam komponen BOP SLB

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Pelatihan tentang demokrasi dan pemilu	Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, terutama bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat	Fasilitasi forum OSIS SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelatihan kepemimpinan dan demokrasi bagi Forum OSIS SMA
		tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi	Fasilitasi forum OSIS SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelatihan kepemimpinan dan demokrasi bagi Forum OSIS SMK
		termasuk berpartisipasi dalam pemilu. Program ini juga ditujukan kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Edukasi politik mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan	Pesta Demokrasi Sekolah (simulasi pemilu dalam pemilihan Pengurus OSIS)	Badan Kesbangpol	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Peningkatan Demokrasi Indonesia (Pemahaman aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia kepada elemen masyarakat)	Badan Kesbangpol	
			Pendidikan Politik Perempuan	DPPPA DALDUK KB	termasuk kader politik perempuan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Badan Kesbangpol	Dilaksanakan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pemilih pemula
			Wakil Rakyat Mengajar SMA/SMK/Ponpes	Setwan	
			Sekolah Politik Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Sasaran masyarakat umum utamanya generasi muda milenial
			Kesbang Sambang Sekolah	Badan Kesbangpol	- Sasaran siswa SMA/SMK (pemilih pemula) - Dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu
			Pendidikan melalui media massa, <i>online</i> dan sosial.	Dinas Kominfo	Publikasi melalui berbagai media (Media massa, Media on line, TV dan Radio)
		Bentuk edukasi politik lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi,	Mengajar di Perguruan Tinggi / Akademi/ SMA/ SMK/ SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan siswa sekolah
			Mengajar di kelompok / lembaga non formal	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah kampung Bhineka

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kebangsaan, politik, dan pemerintahan.			
			Menyapa melalui media Radio/TV Lokal dan Nasional	Dinas Kominfo	Dialog informasi kebijakan dan pembangunan daerah lewat radio dan TV
			Ngopi bareng Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Umum dan Biro Adm. Bangda	
			Ngaji bersama Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Bentuk lainnya adalah menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya Politik Gotong Royong	Hari jumat hari pengabdian masyarakat	Semua OPD	Gerakan Jumat OPD bersama masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan kebersihan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat sekitar
			Gerakan Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Kegiatan gotong-royong dipadukan dengan pelaksanaan TMMD
	c. Pelatihan Gender	Merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka	Pelatihan dan TOT tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pendidik dan siswa SMA/SMK/SLB	DPPPA DALDUK KB	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah			
	d. Pendidikan Anti Korupsi	Merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang didalamnya terdapat Pendidikan Anti Korupsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam penyusunan silabus dan RPP
			Sosialisasi/asistensi/ fasilitasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB	Inspektorat	Dasarnya adalah Mou antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB se Jawa Tengah
	e. Program magang Gubernur untuk SMA/SMK	Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan	Siswa hadir dan bersama Gubernur/Wakil Gubernur dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Gubernur /Wakil Gubernur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Duta Integritas sebagai pendamping Gubernur

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik	("Program Sehari Bersama Gubernur")		
2.	Peningkatan rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji	Peningkatan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama yang terdaftar pada Kanwil Kemenag Jateng dan peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan	Pemberian insentif untuk pendidik keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Insentif untuk pendidik keagamaan
			Peningkatan Kualitas sarana prasarana peribadatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Hibah Sarana prasarana keagamaan
			Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang	Dinas PU BMCK	
3.	Reformasi birokrasi di kab/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Program ini ditujukan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Tengah. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.			
		Pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, didukung penguatan keamanan sistem informasi.	Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota; integrasi FO; <i>Smart City/Smart Province</i> ; <i>single data</i> sistem; didukung dengan penguatan keamanan sistem.	Dinas Kominfo	Digitalisasi pemerintahan ini untuk mendukung <i>Smart Province</i>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	- Tinjauan Lapangan	Semua OPD Prov. Jateng	
			- Dialog / Tatap muka dengan berbagai media		
			<i>Roadshow</i>	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
			Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan	Biro Pem, Otda Dan Kerjasama Setda Prov. Jateng	
		Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada	a. Pelayanan perijinan terpadu yang mudah dan cepat dengan :		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			- Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DPMPTSP	
			- Penanganan pengaduan, penyederhanaan proses pelayanan perizinan, Gelar Inovasi Pelayanan Publik, dan Analisa Survei Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP	
			b. Pelayanan samsat yang mudah dan cepat :		
			- Publikasi Pembayaran PKB melalui media elektronik dan media cetak	Bapenda	
			- Jaringan SAMSAT Online	Bapenda	
		Penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN	Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN	Biro Organisasi, BKD, dan BPSDMD	
			Penjaminan mutu kompetensi ASN	BPSDMD	
			Penggajian, penghargaan dan disiplin	BKD dan semua OPD	
			Pembinaan dan evaluasi Analisis Jabatan	Biro Organisasi	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli	Standar Pelayanan OPD	Biro Organisasi	
4	a. Satgas Kemiskinan	Secara fungsional merupakan penguatan lebih lanjut dari tugas dan fungsi TKPKD utamanya memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan			
			Koordinasi dan <i>focussing</i> penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota	Dinsos, Bappeda yang dikoordinir Asisten Kesejahteraan Rakyat	Satgas Kemiskinan bagian dari TKPKD dengan pelibatan Unsur-unsur non Pemerintah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	Disporapar	Dilaksanakan di Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di 100 desa
			Program "Maju Bareng" untuk penanggulangan kemiskinan	Seluruh PD	Gerakan bersama " 1 PD 1 Desa Dampingan" Menuju Desa Lebih Sejahtera menggunakan konsep "Kolaborasi Berjenjang" dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi), dikoordinasikan oleh Asisten Kesra
	b. Bantuan Desa	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).	Operasional KPMD, Stimulan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengembangan Kawasan	Dispermasdes	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	c. Rumah Sederhana Layak Huni	Bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan nilai keswadayaan dan sifat gotong royong masyarakat.	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebanyak 15.000 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Stimulan sebesar @ Rp. 20 Juta
		Bantuan sosial pembangunan baru Rumah Sederhana Sehat	Bantuan sosial berupa material bangunan untuk penanganan <i>backlog</i> sebanyak 615 unit		Bantuan sosial material sebesar Rp. 35 juta per unit
5.	a. Obligasi Daerah	Pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah			Secara umum, penerapan obligasi di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan sampai dengan tahun 2023. Sehingga seluruh indikasi rencana implementasi yang telah disusun dengan mekanisme pembiayaan obligasi sebagian dialihkan dengan pembiayaan yang lain, dan sebagian lain belum dapat terealisasi
			Pembangunan Rumah Sakit Khusus di Kota Pekalongan dan Magelang	Dinas Kesehatan	- Pada 2021 dilaksanakan studi pendahuluan pembangunan RSUD Provinsi di Kota

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					<p>Pekalongan dengan layanan unggulan ibu-anak melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa nilai investasi awal dan pembiayaan per tahun melalui KPBU masih belum dapat dipenuhi oleh kemampuan keuangan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSUD Provinsi di Magelang direncanakan untuk melaksanakan layanan unggulan kanker dengan skema pembiayaan KPBU. Dari studi kelayakan diketahui nilai investasi masih belum layak dilaksanakan melalui KPBU

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan Rumah Sakit Khusus di RSUD Kelet	RSUD Kelet Jepara	Skema pembiayaan dialihkan menggunakan sumber anggaran DBHCHT dan BLUD
			Pengembangan RSUD Moewardi (Pengembangan Onkologi Terpadu)	RSUD Dr. Moewardi	Skema pembiayaan dialihkan menggunakan sumber anggaran BLUD
			Pengembangan Kawasan <i>Edu Park</i> Tlogo Wening	CMJT dan Biro Perekonomian untuk memfasilitasi	Sampai dengan tahun 2022 belum ada progres pembangunan Kawasan Edu Park Tlogo Wening, karena belum ada investor yang berminat untuk mendukung pembiayaan pembangunan kawasan ini
	b. Kemudahan akses kredit UMKM	Fasilitasi Bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan	Pelatihan pengajuan kredit ke perbankan	Dinkop UKM	
			Fasilitasi Pemberian Pinjaman untuk UMKM (Kredit Mitra 25)	Bank Jateng dan Dinkop UMKM	
	c. Penguatan BUMDesa	Peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dalam	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa dan penyertaan modal kepada BUMDesa	Dispermades	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		upaya meningkatkan perekonomian desa	melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa		
	d. Pelatihan <i>startup</i> untuk wirausaha muda	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja	Bimtek dan pendampingan wirausaha baru	Disporapar, Disperindag, Distanbun, Dinkop UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Disporapar: Dilaksanakan di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kabupaten dengan kemiskinan ekstrem (terdapat irisan total 22 Kabupaten). Jumlah peserta 1.000 orang - DinkopUKM: penumbuhan dan pengembangan 560 wirausaha baru - Disperindag: bimtek 320 wirausaha baru; pendampingan 20 wirausaha baru
			Pengembangan Kemitraan, Permodalan, Akses Pasar dan Bahan Baku Bagi Industri Non Agro dan Agro	Disperindag	Industri agro 140 IKM Industri non agro 270 IKM
			Pelatihan padat karya produktif di desa miskin	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pelatihan kerja di bidang industri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/tenaga kerja
			Pelatihan kerja di bidang pertanian	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja dibidang pertanian
			Pemagangan ke luar negeri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi calon tenaga kerja
6.	a. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani				
	1) Menjaga Harga Komoditas	Program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penugasan PT. Jateng Agro Berdikari sebagai operator untuk menjaga stabilisasi stok dan harga	Dinas Ketahanan Pangan dan PT. JAB	Intervensi dilakukan melalui alokasi bantuan transportasi dan subsidi suku bunga
			Menjaga stok beras pada gudang (cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan masyarakat dan lembaga distribusi pangan masyarakat) tingkat kawasan	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan stok beras
			Penyediaan informasi harga kepokmas dan barang penting di Jawa Tengah	Disperindag	
	2) Asuransi gagal panen untuk petani	Merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya	Jaminan gagal panen bagi petani (Asuransi Petani)	Distanbun	Untuk petani yang sudah memiliki kartu tani
	b. Melindungi kepentingan nelayan	Program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Asuransi Nelayan Jawa Tengah	DKP	Jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil, nelayan tradisional, wanita nelayan dan ABK (bukan paruh waktu/sambilan) yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) <i>Gross Tonnage</i> (GT) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, berupa pemberian bantuan pembayaran premi asuransi dengan masa pertanggungan selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan polis induk
			Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT)	DKP	Memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah melalui sosialisasi dan pertemuan, bekerjasama dengan KKP dan BPN, serta memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan penyedia jasa keuangan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP)	DKP	Memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan dengan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nelayan di daerah bekerjasama dengan DPMPTSP dan KSOP guna efisiensi biaya dan waktu proses perizinan kapal perikanan oleh nelayan
7.	a. Pengembangan transportasi massal	Pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)	Pengembangan Koridor BRT Trans Jateng	Dinas Perhubungan	Operasionalisasi 6 Koridor lanjutan Trans Jateng (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Semarang-Gubug, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur) dan Solo-Sumberlawang Via Sangiran) dan pembukaan 1 koridor baru (Solo-Sukoharjo-Wonogiri)

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Revitalisasi jalur kereta api	Fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur, serta wilayah tengah	Peningkatan layanan berupa peningkatan frekuensi kereta api (Fasilitasi)	Dinas Perhubungan	KA Joglosemarkerto sebelumnya bernama KA Joglokerto, Tahun 2020 frekuensi 3 x rangkaian kereta dengan perjalanan melingkar tanpa perjalanan PP
			Revitalisasi / Reaktivasi Jalur KA Non Operasi	Kementerian Perhubungan RI	Pada tahun 2021 fasilitasi Penyusunan studi Investigasi dan Rancang Dasar Jalur KA Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Anggaran APBN sebesar 2 M (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan) Pada tahun 2021 sudah disusun Studi Investigasi Dengan Rancangan Dasar Jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang (APBN) dan pada tahun 2022 dialokasikan studi kelayakan, survei investigasi

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					dengan Rancangan Dasar untuk KA Bandara YIA-KSPN Borobudur (APBN)
			Pemasangan <i>Early Warning System</i> di Perlintasan Sebidang Kereta Api	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan pemasangan <i>Early Warning System</i> (EWS) di Perlintasan JPL 72, 123, 138 Kabupaten Sragen, JPL 19 Kabupaten Sukoharjo, dan JPL 81, 39, 27 Kabupaten Grobogan
	c. Pengembangan bandara	Fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah	Pembangunan dan Pengembangan Bandara di Jawa Tengah (Fasilitasi Pemprov. Jateng berupa <i>sharing</i> pembebasan tanah)	Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan	Sharing pembebasan lahan untuk pengembangan bandara selesai di tahun 2021
	d. Pembangunan embung/ irigasi	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri	Perbaiki daerah irigasi: - Rehabilitasi jaringan irigasi 40 paket	Dinas PU SDA Taru	Pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Perbaikan dan pembangunan embung: - Pembangunan embung 1 paket - Rehabilitasi embung 5 paket	Dinas PU SDA Taru	Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat termasuk untuk pertanian
8.	a. Pembukaan kawasan industri baru	Afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	- Kajian Sektori Industri - Pendampingan Perijinan Sektor Industri dan SIINAS - Pendampingan Percepatan Penyusunan RPIK - Jejaring Kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil dan Menengah	Disperindag	
	b. Rintisan pertanian terintegrasi	Integrasi hulu-hilir, integrasi berbasis organisasi pertanian dan konsolidasi lahan, usaha pada petani dengan lahan sempit, pinjaman dan jaminan kredit dari perbankan, serta pemasaran produk berbasis <i>online</i>			
	1) Integrasi di bawah tegakan	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan	Fasilitasi dan koordinasi dengan Perhutani untuk penyediaan lahan di bawah tegakan	Dinas LHK	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penanaman tanaman pangan di bawah tegakan pendampingan budidaya	Dintanbun	
	2) Agrowisata	Integrasi sektor pariwisata dengan pertanian	Penyediaan dan pengembangan kawasan wisata	Distanbun	Pengembangan potensi lokal berbasis agro menjadi Atraksi Wisata
			Pengembangan destinasi dan promosi	Disporapar	Pembinaan dan pengembangan Keunikan Lokal Daerah/Masyarakat menjadi Atraksi Wisata di Desa Wisata/ Daya Tarik Wisata pertanian berbasis <i>eco socio tourism</i> melalui bimbingan teknis dan pagelaran seni masyarakat lokal
	3) Minapadi	Integrasi padi dengan perikanan budidaya	Penyiapan lahan	Dinlutkan	Integrasi antara budidaya tanaman padi sawah dengan budidaya perikanan tawar dalam satu lahan
			Pengadaan bibit tanaman padi		
Budidaya tanaman padi					
Penyediaan bibit ikan					
		Budidaya ikan			
4) Subsidi Suku Bunga	Pemberian kredit (pinjaman modal) kepada petani melalui lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai	Pinjaman Kredit yang diberikan kepada petani miskin dengan kepemilikan lahan makismal 1 Ha	Distanbun, Bank Jateng, OJK, PT Jamkrida	Pinjaman kredit yang diberikan kepada petani dengan kriteria tertentu yang bertujuan untuk	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		penyalur, yang bunga kreditnya dibayar oleh APBD			meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada petani
	5) Asuransi gagal panen	Asuransi yang diberikan kepada petani yang mengalami gagal panen	Pemberian ganti rugi kepada petani yang gagal panen dengan kriteria: tergabung dalam kelompok tani, lahan maksimal 2 Ha, memiliki NIK	Distanbun, lembaga penyalur asuransi	
9.	a. Rumah Sakit tanpa dinding	RS tanpa dinding mengubah paradigma kesehatan dari dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jempuk bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan	Penyuluhan paradigma sehat melalui : Penyebaran informasi melalui media elektronik (TV, radio, Vidiotron, Media <i>Online</i> , TV Kereta , media luar ruang , media pameran, media cetak, media transportasi); Penyuluhan kesehatan ke sekolah dan masyarakat; Edukasi pasien dan keluarga pasien; <i>home care; home visit; Daycare</i>	Dinas Kesehatan; 7 RSUD/RSJD	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi.			
		Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat	Kolaborasi/interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor (puskesmas, RS Kabupaten/Kota/RS Provinsi)	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan kapasitas <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Tingkat Provinsi	Dinas Kesehatan	
			Pemanfaatan <i>command center</i>	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Optimalisasi akreditasi RS dengan peningkatan mutu di Fasyankes (RS, Puskesmas, Laboratorium)	Dinas Kesehatan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Sekolah biaya pemerintah khusus siswa miskin (SMA/SMK/SLB)	Sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaannya operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh	Pengelolaan SMK Negeri <i>Boarding</i>	Dinas Dikbud	Pengelolaan 3 SMK Negeri Jawa Tengah di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Purbalingga
			Pengelolaan SMK Negeri <i>Semi Boarding</i>	Dinas Dikbud	Pengelolaan 15 SMK Negeri <i>Semi Boarding</i>
			Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	Dinas Dikbud	Alokasi BSM sebesar Rp. 1.000.000 Siswa/Tahun untuk 15.000 siswa/tahun
			Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara	Dinas Dikbud	Pembiayaan selama 3 tahun dengan sasaran siswa miskin berprestasi
	c. Bantuan sekolah swasta, Ponpes, Madrasah dan Difabel	Pemberian Stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan	Bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta (BOSDa)	Dinas Dikbud	BOSDa SMA Swasta, SMK Swasta, dan SLB Swasta

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Bantuan operasional pendidikan untuk sekolah keagamaan (BOSDa)	Biro Kesra	BOSDa MA Negeri dan Swasta
			Bantuan Hibah Pendidikan Keagamaan	Biro Kesra	Hibah sarana prasarana pendidikan keagamaan
10.	a. Festival seni	Program ini dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain	Parade seni budaya Jawa Tengah	Dinas Dikbud, Badan Penghubung	Pelaksanaan Parade seni budaya Jawa Tengah pada HUT Provinsi Jawa Tengah
			Pagelaran seni dalam Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pagelaran wayangan, ketoprak dan tampilan kesenian lainnya
			Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitasi kesenian bagi masyarakat

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Kongres Bahasa/ Kebudayaan Jawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tuan rumah Kongres Bahasa/Kebudayaan Jawa
			Pentas seni budaya di TBJT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kesenian kepada Kabupaten/Kota	Disporapar	Penyelenggaraan kesenian/atraksi wisata untuk promosi pariwisata melalui: (1) tampilan kesenian pada event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri; (2) fasilitasi atau dukungan kesenian pada event pariwisata di kabupaten/kota.
			Pengembangan Daya Tarik Wisata	Disporapar	Pembinaan dan pengembangan Keunikan Lokal Daerah/Masyarakat menjadi Atraksi Wisata di Desa Wisata melalui pagelaran seni masyarakat lokal
			Pembangunan Pusat Kreatif Borobudur (<i>Sharing</i> pengadaan lahan Pasar Kujon)	Dinas PUBMCK	Pembangunan pusat kreatif Borobudur di Kabupaten Magelang juga dalam rangka

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					mendukung pengembangan KSPN Borobudur
	b. Pengembangan infrastruktur olahraga	Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri	Disporapar	Pembangunan <i>venue</i> panjat tebing, <i>venue</i> panahan, renovasi berat asrama B dan C, serta Sarpras Pendukung Kawasan Olahraga Jatidiri
	c. Rumah kebudayaan	Penyediaan Ruang Bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah	Pemanfaatan aset aset pemerintah provinsi/ kabupaten/kota/desa yang potensial sebagai "Rumah Budaya"	BPKAD	
			Event napak tilas dan lawatan sejarah	Dinas Dikbud	Napak Tilas bagi Guru Sejarah, Lawatan Sejarah bagi Siswa
			Dialog Budaya dan tradisi	Dinas Dikbud	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Seminar sejarah lokal	Dinas Dikbud	
			Penyelenggaraan warisan dunia	Dinas Dikbud	Warisan Budaya Benda dan Tak benda
			Pameran cagar budaya dan permuseuman	Dinas Dikbud	
			Festival/Pagelaran/Lomba Seni dalam Provinsi	Dinas Dikbud	Lomba tingkat provinsi diikuti oleh 35 kab/kota
			Dialog tradisi keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	d. Kepedulian Lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan peningkatan pengurangan resiko bencana	Peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui:		
			Edukasi melalui Sekolah Peduli Lingkungan sebanyak 100 unit	DLHK	
			Sadar lingkungan melalui Program Kampung Iklim sebanyak 550 kampung iklim	DLHK	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Budaya hemat energi (Penghargaan Hemat Energi dan Air dan Penghargaan Desa Mandiri Energi)	Dinas ESDM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air merupakan tindakan promotif untuk mendorong peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. ✓ Penghargaan Desa Mandiri Energi merupakan salah satu kegiatan dari Program Desa Mandiri Energi yang bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Energi dalam memenuhi kebutuhan energi

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					<p>daerah, meningkatkan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi, dan menekan emisi CO₂ sebagai bentuk upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Program Desa Mandiri Energi didukung dengan kegiatan pembangunan infrastruktur EBT melalui dana APBD, APBN, maupun melalui swadaya masyarakat serta kegiatan penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah
			Audit energi	Dinas ESDM	Audit energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung
			Upaya konservasi dan rehabilitasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan seluas 16.536 hektar	DLHK	
			Konservasi air tanah: - sumur resapan (90 titik) - sumur pantau (2 titik)	Dinas ESDM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan sumur resapan dangkal sejumlah 90 unit untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah ✓ Pembangunan sumur pantau sejumlah 2 unit untuk memantau pemanfaatan air tanah secara kontinyu dalam meminimalisir pemanfaatan air tanah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					yang berlebihan, terutama pada daerah-daerah kawasan industri
			Pengembangan EBT: Pembangunan infrastruktur EBT sejumlah 225 unit terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Biogas sejumlah 196 unit - Gas rawa 2 unit - PLTS rooftop sejumlah 27 unit, terdiri dari 7 SMK (14 unit, terdiri 7 ongrid dan 7 offgrid), 9 Ponpes (9 unit), dan 2 UMKM (4 unit) 	Dinas ESDM	Pembangunan infrastruktur EBT bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Energi dalam memenuhi kebutuhan energi daerah, meningkatkan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi, dan menekan emisi CO ₂ sebagai bentuk upaya mitigasi dampak perubahan iklim
			Pengembangan desa ekowisata	Dinporpar	Pengembangan desa ekowisata dalam bentuk fasilitasi pengembangan desa wisata yang memiliki potensi alam
			Pemantauan kualitas air serta pengembangan dan perbaikan kualitas air melalui pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan, penegakkan hukum dalam rangka pengendalian pencemaran air	DLHK	Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemantauan kualitas udara melalui pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran udara	DLHK	35 kabupaten/kota
			IPAL Industri kecil/ limbah Rumah Tangga/Lembaga sebanyak 6 unit	DLHK	
			Fasilitas pengolahan sampah melalui: - TPS 3R (4 unit) - Pembinaan pengelolaan limbahB3 - TPST regional Magelang tahap pembebasan lahan	DLHK	
			Rekomendasi ijin lingkungan	DLHK	
			Penegakan Perda melalui: Pembinaan terhadap siswa SMK/SMA, Ormas, BUMD dan penegakan Perda terutama berkaitan dengan Lingkungan	SATPOL PP	
			Penanggulangan Bencana melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Set BPBD	Tahun 2023 membentuk 25 desa tangguh bencana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2021, target pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, RKPD Tahun 2023 diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Pertimbangan tersebut yang mempengaruhi beberapa target kinerja tahun 2023 untuk dilakukan penyesuaian dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target		Keterangan	Perangkat Daerah Koordinator
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00	15,00	Tetap	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,00	80,00	Tetap	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	9,86-9,05	7,48-6,48	Berubah, karena terjadi kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19	Sekretariat Daerah
4	Indeks Gini	Angka	0,34	0,30	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat menengah dan bawah	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48-4,80	4,00	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi letenagakerjaan	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20-5,60	5,60-6,00	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan juga dipengaruhi oleh dinamika global terutama kondisi geopolitik dimana terjadinya perang Rusia-Ukraina mempengaruhi kenaikan harga pangan dan energi, serta adanya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat	Sekretariat Daerah
7	Inflasi	%	3,0 ± 1	3,0 ± 1	Tetap	Sekretariat Daerah
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	40,87	45,35	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan juga dipengaruhi oleh dinamika global terutama kondisi geopolitik dimana terjadinya perang Rusia-Ukraina mempengaruhi kenaikan harga pangan dan energi, serta adanya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat	Sekretariat Daerah
9	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,56	Tetap	Sekretariat Daerah
10	Nilai Tukar Petani	Angka	104,05	103,15	Berubah menjadi lebih baik	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target		Keterangan	Perangkat Daerah Koordinator
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,88	73,00	Berubah, karena hasil harmonisasi perhitungan teknokratik dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021	Sekretariat Daerah
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,58	92,25	Berubah menjadi lebih baik	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,57	67,26	Berubah menjadi lebih baik	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	99,5	91,55	Berubah menjadi lebih baik
2		Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	6,82	Tetap
3		Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,75	6,79	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,95	80,43	Berubah menjadi lebih baik
5		Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,08	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
6	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	100.000/ KH	100	81	Berubah, karena melihat penyebab kematian ibu yang mayoritas didominasi kasus <i>unpredictable</i> dilihat dari pelaporan AMP kab/kota
7		Angka Kematian Balita	10.000/ KH	9,2	10,43	Berubah menjadi lebih baik
8		Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,8	7,8	Tetap
9		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,21	0,32	Berubah, karena IKS Baru <i>launching</i> pada saat penetapan target RPJMD sehingga belum ada gambaran kemampuan pencapaian Prov Jateng, serta terdapat indikator yang sulit berubah walaupun sudah dilakukan intervensi yaitu indikator ada anggota keluarga yang merokok, kepesertaan JKN untuk seluruh anggota keluarga dan penderita hipertensi berobat sesuai standar
10		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69	69	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	Tetap
12		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	60	60	Tetap
13		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	85,71	72	Berubah menjadi lebih baik
14		Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	84	84	Tetap
15		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	87,67	Berubah menjadi lebih baik
16		Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	90	Tetap
17		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	87	95	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (diklat, kematian dan tingkat pendidikan perawat)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	Tetap
19		Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	97,33	98,17	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (diklat, kematian dan tingkat pendidikan perawat)
20		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	97	100	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (kematian di RS)
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	15,23	Tetap
22		Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	44,24	Tetap
23		Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	89,65	-	Baru
24		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,35	92,5	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	66,85	67,69	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tertundanya konstruksi fisik, serta karena adanya perubahan regulasi/aturan terkait penataan ruang
26		Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,95	56,62	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan akumulasi tertundanya konstruksi fisik (pembangunan dan rehabilitasi) berbagai sarana prasarana sumber daya air
27		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	78,75	78,75	Tetap
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	46,7	34,16	Berubah menjadi lebih baik
29		Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	Tetap
30		Persentase penurunan kawasan kumuh	%	8,1	49,83	Berubah menjadi lebih baik

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase penanganan gangguan trantibum di Jawa Tengah	%	100	-	Baru
32		Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	%	100	-	Baru
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik	%	3,15	-	Baru
34		Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	%	3,35	-	Baru
35	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	Tetap
36		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,6	3,6	Tetap
37		Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	12	10	Berubah menjadi lebih baik
38		Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5	5	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	Tetap
40	Dinas Sosial	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	2,37	-	Baru
41		Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	34,38	-	Baru
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase pengangguran yang ditangani	%	28,55	28,55	Tetap
43		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,01	71,01	Tetap
44		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,67	-	Baru
45		Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54,62	54,62	Tetap
46		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8,19	8,19	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenaga-kerjaan	%	82,97	82,97	Tetap
48		Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	57,14	-	Baru
49		Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,6	-	Baru
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,07	8,07	Tetap
51		Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	%	100	100	Tetap
52		Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,3	-	Baru
53		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,19	2,18	Berubah, karena ada penyesuaian terhadap target nasional yang juga mengalami penurunan, dimana upaya pencapaian TFR dilaksanakan bersama antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat melalui BKKBN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62,85	34,29	Berubah menjadi lebih baik
55		Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90	-	Baik
56		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,02	8,02	Tetap
57		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	Angka	65,17	76	Berubah, karena penyesuaian target CPR berdasarkan pada data SDKI yang menjadi data BKKBN
58		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	-	Baru
59		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,7	75,2	Berubah, karena berdasarkan hasil evaluasi, sejak tahun 2017 terjadi penurunan angka IDG Jawa Tengah dari angka 75,1 di tahun 2017 menjadi 71,64 di tahun 2021. Faktor penyumbang terbesar penurunan angka IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen dimana targetnya 30% keterwakilan perempuan di parlemen hanya tercapai 18,33%
60	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8	88,8	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61		Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.100	2.150	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	51,25	66,76	Berubah, karena berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Hutan, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja IKTL
63		Indeks Kualitas Udara	%	85	85,11	Berubah, karena mendasarkan surat dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KemenLHK no S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020, tanggal 04 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja IKU
64		Indeks Kualitas Air	%	50,65	50,07	Berubah menjadi lebih baik
65		Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	Tetap
66		Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	Tetap
67		Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	Tetap
68		Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69		Luas Tutupan Lahan (LTV)	km ²	10.224,57	16.555,86	Berubah, karena berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Hutan, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja LTV
70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	68	20,35	Berubah menjadi lebih baik
71		Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	-	Baru
72	Dinas Perhubungan	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	60,38	Tetap
73		Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	51,45	Tetap
74		Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	Tetap
75	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,95	2,82	Berubah menjadi lebih baik
76		Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,65	3,3	Berubah menjadi lebih baik

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77		Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,3	3,6	Berubah menjadi lebih baik
78		Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	95,65	75,9	Berubah menjadi lebih baik
79		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	3	Tetap
80	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,68	29,68	Tetap
81		Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,95	29,95	Tetap
82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	100	Tetap
83		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	90	Tetap
84	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,65	0,65	Tetap
85		Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,25	3,25	Tetap
86		Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	50,35	Berubah menjadi lebih baik
87	Dinas Kearsipan dan Per-pustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	100	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88		Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	90	-	Baru
89	Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	37,07	33,67	Berubah menjadi lebih baik
90		Produksi Perikanan	Ton	1.023.928,09	1.042.610,71	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
91	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	-	Baru
92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	4,06	-	Baru
93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,96	15,96	Tetap
94		Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan <i>good mining practice</i> (GMP)	%	67	-	Baru
95		Indeks ketersediaan air tanah	Angka	2,99	2,99	Tetap
96		Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,65	5,65	Tetap
98		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,9	5,9	Tetap
99	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	84	Berubah menjadi lebih baik
100		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	84	Berubah, karena terjadi perubahan cascading di Setda, sehingga terjadi perubahan formulasi perhitungan dari sebelumnya
101		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	-	Baru
102		Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	96	-	Baru
103		Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	96	-	Baru
104		Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	-	Baru
105		Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90	-	Baru
106		Ketercapaian laba BUMD	%	75	-	Baru

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82	-	Baru
108		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	-	Baru
109		Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	89	-	Baru
110		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90	70	Berubah menjadi lebih baik
111		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	-	Baru
112		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	87,76	-	Baru
113		Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	85,37	-	Baru
114		Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78,5	-	Baru

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	89	75	Berubah menjadi lebih baik
116	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	90	-	Baru
117		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	71	-	Baru
118		Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,2	-	Baru
119	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,58	8,59	Berubah, karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat
120		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	6,79	10,37	Berubah, karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat
121	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100	100	Tetap

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
				RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
122		Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,5	-	Baru
123	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	Tetap
124		Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	Tetap
125	Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	Tetap
126		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,19	3,5	Berubah, karena adanya perubahan metode perhitungan (dari maturitas SPIP menjadi penilaian SPIP terintegrasi yang mengkolaborasikan antara Maturitas SPIP, Manajemen Resiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi)
127	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36,26	35,08	Berubah menjadi lebih baik
128		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	%	30	-	Baru
129	Badan Penghubung	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	85	Tetap

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Angka Kemiskinan	%	9,86-9,05	7,48-6,48	Berubah, karena terjadi kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19
2	Indeks Gini	Angka	0,34	0,3	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat menengah dan bawah
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	8,82-8,09	9,17	Berubah, karena hasil harmonisasi perhitungan teknokratik angka kemiskinan
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	10,96-10,05	11,97	Berubah, karena hasil harmonisasi perhitungan teknokratik angka kemiskinan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	450,72	523,15	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan juga dipengaruhi oleh dinamika global terutama kondisi geopolitik dimana terjadinya perang Rusia-Ukraina mempengaruhi kenaikan harga pangan dan energi
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,75	61,75	Tetap
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	29,75	29,75	Tetap
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48-4,80	4	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,26	5,5	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20-5,60	5,60-6,00	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan juga dipengaruhi oleh dinamika global terutama kondisi geopolitik dimana terjadinya perang Rusia-Ukraina mempengaruhi kenaikan harga pangan dan energi, serta adanya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat
11	Inflasi	%	3,0 ± 1	3,0 ± 1	Tetap
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	40,87	45,35	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan juga dipengaruhi oleh dinamika global terutama kondisi geopolitik dimana terjadinya perang Rusia-Ukraina mempengaruhi kenaikan harga pangan dan energi, serta adanya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat
13	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,56	Tetap
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,1	3,1	Tetap
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,65	5,65	Tetap
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,9	5,9	Tetap
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,2	3,2	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	9,00-10,00	-	Baru
19	Nilai Tukar Petani	Angka	104,05	103,15	Berubah menjadi lebih baik
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,88	73	Berubah, karena hasil harmonisasi perhitungan teknokratik dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,9	7,45	Berubah menjadi lebih baik
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	13,17	Berubah, karena hasil harmonisasi perhitungan teknokratik dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,73	74,1	Berubah menjadi lebih baik
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,58	92,25	Berubah menjadi lebih baik
B	Aspek Pelayanan Umum				
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	PENDIDIKAN				
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,75	6,79	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,95	80,43	Berubah menjadi lebih baik
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,08	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	99,5	91,55	Berubah menjadi lebih baik
	KESEHATAN				
5	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	100	81	Berubah, karena melihat penyebab kematian ibu yang mayoritas didominasi kasus <i>unpredictable</i> dilihat dari pelaporan AMP kab/kota
6	Angka Kematian Balita	1.000/KH	9,2	10,43	Berubah menjadi lebih baik
7	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,8	7,8	Tetap
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,21	0,32	Berubah, karena IKS Baru <i>launching</i> pada saat penetapan target RPJMD sehingga belum ada gambaran kemampuan pencapaian Prov Jateng, serta terdapat indikator yang sulit berubah walaupun sudah dilakukan intervensi yaitu indikator ada anggota keluarga yang merokok, kepesertaan JKN untuk seluruh anggota keluarga dan penderita hipertensi berobat sesuai standar
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69	69	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	Tetap
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	60	60	Tetap
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	85,71	72	Berubah menjadi lebih baik
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	84	84	Tetap
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	87,67	Berubah menjadi lebih baik
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	90	Tetap
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	87	95	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (diklat, kematian dan tingkat pendidikan perawat)
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	97,33	98,17	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (diklat, kematian dan tingkat pendidikan perawat)
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	97	100	Berubah, karena terdapat indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pencapaian SPM (kematian di RS)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	15,23	Tetap
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	44,24	Tetap
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	89,65	-	Baru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,35	92,5	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	66,85	67,69	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tertundanya konstruksi fisik, serta karena adanya perubahan regulasi/aturan terkait penataan ruang
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,95	56,62	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan akumulasi tertundanya konstruksi fisik (pembangunan dan rehabilitasi) berbagai sarana prasarana sumber daya air

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	78,75	78,75	Tetap
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	46,7	34,16	Berubah menjadi lebih baik
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	8,1	49,83	Berubah menjadi lebih baik
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100	-	Baru
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	-	Baru
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	Tetap
32	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	12	10	Berubah menjadi lebih baik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5	5	Tetap
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	Tetap
	SOSIAL				
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	2,37	-	Baru
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	34,38	-	Baru
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	TENAGA KERJA				
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	28,55	28,55	Tetap
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,01	71,01	Tetap
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,67	-	Baru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54,62	54,62	Tetap
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8,19	8,19	Tetap
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	82,97	82,97	Tetap
43	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	57,14	-	Baru
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,07	8,07	Tetap
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	100	100	Tetap
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,3	-	Baru
47	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62,85	34,29	Berubah menjadi lebih baik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90	-	Baru
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,02	8,02	Tetap
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,7	75,2	Berubah, karena mendasarkan hasil evaluasi, sejak tahun 2017 terjadi penurunan angka IDG Jawa Tengah dari angka 75,1 di tahun 2017 menjadi 71,64 di tahun 2021. Faktor penyumbang terbesar penurunan angka IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen dimana targetnya 30% keterwakilan perempuan di parlemen hanya tercapai 18,33%
	PANGAN				
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8	88,8	Tetap
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.100	2.150	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
	PERTANAHAN				
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	Tetap
	LINGKUNGAN HIDUP				
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	Tetap
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	-	Baru
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	68	20,35	Berubah menjadi lebih baik
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,19	2,18	Berubah, karena ada penyesuaian terhadap target nasional yang juga mengalami penurunan, dimana upaya pencapaian TFR dilaksanakan bersama antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat melalui BKKBN
59	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	65,17	76	Berubah, karena penyesuaian target CPR berdasarkan pada data SDKI yang menjadi data BKKBN
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	-	Baru
	PERHUBUNGAN				
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	60,38	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	51,45	Tetap
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	Tetap
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,95	2,82	Berubah menjadi lebih baik
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,65	3,3	Berubah menjadi lebih baik
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,3	3,6	Berubah menjadi lebih baik
	KOPERASI DAN UKM				
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,68	29,68	Tetap
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,95	29,95	Tetap
	PENANAMAN MODAL				
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	100	Tetap
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	90	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	50,35	Berubah menjadi lebih baik
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,65	0,65	Tetap
	STATISTIK				
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	95,65	75,9	Berubah menjadi lebih baik
	PERSANDIAN				
74	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	3	Tetap
	KEBUDAYAAN				
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	6,82	Tetap
	PERPUSTAKAAN				
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	100	Tetap
	KEARSIPAN				
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	90	-	Baru
	URUSAN PILIHAN				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
78	Produksi Perikanan	Ton	1.023.928,09	1.042.610,71	Berubah, karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	37,07	33,67	Berubah menjadi lebih baik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PARIWISATA				
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,25	3,25	Tetap
	PERTANIAN				
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	-	Baru
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	4,06	-	Baru
	KEHUTANAN				
83	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	Tetap
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km ²	10.224,57	16.555,86	Berubah, karena berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/ I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Hutan, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja LTV
85	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	Tetap
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan <i>good mining practice</i> (GMP)	%	67	-	Baru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	2,99	2,99	Tetap
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1	Tetap
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,96	15,96	Tetap
	PERDAGANGAN				
90	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,9	5,9	Tetap
	PERINDUSTRIAN				
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,65	5,65	Tetap
	TRANSMIGRASI				
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,6	-	Baru
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	84	Berubah menjadi lebih baik
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	84	Berubah, karena terjadi perubahan cascading di Setda, sehingga terjadi perubahan formulasi perhitungan dari sebelumnya

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	-	Baru
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	96	-	Baru
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	96	-	Baru
98	Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	-	Baru
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90	-	Baru
100	Ketercapaian laba BUMD	%	75	-	Baru
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82	-	Baru
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	-	Baru
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	89	-	Baru
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90	70	Berubah menjadi lebih baik
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	-	Baru
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	87,76	-	Baru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	85,37	-	Baru
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78,5	-	Baru
	SEKRETARIAT DPRD				
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	89	75	Berubah menjadi lebih baik
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90	-	Baru
	KEUANGAN				
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,58	8,59	Berubah, karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	6,79	10,37	Berubah, karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,5	-	Baru
	KEPEGAWAIAN				
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	Tetap
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	Tetap
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36,26	35,08	Berubah menjadi lebih baik
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	30	-	Baru
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	71	-	Baru
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,2	-	Baru
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	85	Tetap
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,19	3,19	Tetap
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,15	-	Baru
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,35	-	Baru
C	Aspek Daya Saing				
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15	Tetap
2	Indeks Toleransi	Angka	76,6	76,6	Tetap
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	90	90	Tetap
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80	80	Tetap
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	88	Tetap
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,33	3,24	Berubah menjadi lebih baik
7	Nilai SAKIP	Angka	85	85	Tetap
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,5	3,5	Tetap
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tetap
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	39	29	Berubah menjadi lebih baik
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,82	0,71	Berubah menjadi lebih baik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			RKPD 2023	RPJMD 2018- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,57	67,26	Berubah menjadi lebih baik
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,65	50,07	Berubah menjadi lebih baik
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	85	85,11	Berubah, karena mendasarkan surat dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KemenLHK no S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja IKU
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,25	66,76	Berubah, karena berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/ I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Hutan, maka terdapat perubahan parameter perhitungan utk indikator kinerja IKTL
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,6	3,6	Tetap

7.4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	Tetap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	Tetap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	82,5	72,05	Berubah menjadi lebih baik	RSUD Dr. Moewardi
	CRR Total	%	81	75	Berubah menjadi lebih baik	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	CRR total	%	50,85	53,69	Berubah karena penyesuaian belanja dalam pemanfaatan estimasi SILPA tahun 2022	RSUD Tugurejo
	CRR Total	%	35	90	Berubah karena penyesuaian belanja dalam pemanfaatan estimasi SILPA tahun 2022	RSUD Kelet Donorejo
	CRR Total	%	45	39	Berubah karena penyesuaian belanja dalam pemanfaatan estimasi SILPA tahun 2022	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	35	35	Tetap	RSJD Surakarta
	CRR total	%	37,39	46	Berubah karena penyesuaian belanja dalam pemanfaatan estimasi SILPA tahun 2022	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	APK SMA	%	28,36	28,36	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan SMA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	73,61	73,61	Tetap	Bidang Pembinaan SMA
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	10,42	-	Baru	Bidang Pembinaan SMA
	APK SMK	%	49,46	49,46	Tetap	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	88,98	86,54	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan SMK
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	23,47	-	Baru	Bidang Pembinaan SMK
	APK SLB	%	70	67,14	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,87	81,13	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Diksus
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	26,15	-	Baru	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99,99	99,35	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	99,96	84,79	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	100	90,51	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Ketenagaan Dikbud

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	86	73,9	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	76,64	76,44	Tetap	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	APK SMA Cabdin I	%	39,46	39,46	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMK Cabdin I	%	49,88	49,88	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SLB Cabdin I	%	170,1	65,54	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I	%	81,39	81,39	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	1,15	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	4,2	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	3,36	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar	%	75,15	65,76	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar	%	88,5	77,86	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	APK SMA Cabdin II	%	31,93	19,05	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMK Cabdin II	%	39,51	33,73	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SLB Cabdin II	%	60	74,01	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin	%	0,95	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,86	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMA Cabdin III	%	31,62	25,54	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMK Cabdin III	%	44,91	37,33	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SLB Cabdin III	%	72,33	49,09	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III	%	90,19	76,62	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	3,24	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,26	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	1,92	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMA Cabdin IV	%	25,72	23,11	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SMK Cabdin IV	%	44,88	42,92	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SLB Cabdin IV	%	64,11	64,11	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV	%	71,45	71,45	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV	%	85,87	69,38	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,57	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,34	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	1,15	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	APK SMA Cabdin V	%	35,36	35,36	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMK Cabdin V	%	59,24	59,24	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SLB Cabdin V	%	120,1	71,64	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V	%	50,21	71,49	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V	%	77,27	77,27	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,72	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0,52	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMA Cabdin VI	%	26,04	20,77	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMK Cabdin VI	%	56,24	51,62	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SLB Cabdin VI	%	112,01	88,94	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI	%	77	70,2	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI	%	90,09	90,09	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	1,34	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,34	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMA Cabdin VII	%	51,79	51,79	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMK Cabdin VII	%	66,71	73,19	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SLB Cabdin VII	%	190,2	61,08	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	2,48	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	1,12	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta	%	4,62	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII					
	APK SMA Cabdin VIII	%	30,82	30,82	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SMK Cabdin VIII	%	52,33	55,52	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SLB Cabdin VIII	%	70,09	70,09	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII	%	89,1	73,99	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	2,48	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	0,86	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	3,85	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SMA Cabdin IX	%	23,17	20,55	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMK Cabdin IX	%	50,25	44,71	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SLB Cabdin IX	%	66,26	66,26	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX	%	78,72	66,32	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX	%	90,76	84,68	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX	%	81,65	81,65	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	1,53	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	0,6	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	3,08	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMA Cabdin X	%	24,83	24,83	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMK Cabdin X	%	56,97	56,97	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SLB Cabdin X	%	50,11	41,65	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X	%	98	75,04	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,34	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even	%	0,6	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN X

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	lomba nasional yang berjenjang Cabdin X					
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMA Cabdin XI	%	30,71	30,71	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMK Cabdin XI	%	54,12	55,64	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SLB Cabdin XI	%	30,21	64,94	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI	%	90,02	75,04	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,53	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,03	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMA Cabdin XII	%	22,59	19,88	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	APK SMK Cabdin XII	%	59,02	37,78	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SLB Cabdin XII	%	49,88	66,88	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021 terhadap kemungkinan ketercapaian target RPJMD	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII	%	90,66	80,16	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,53	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	0,6	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,54	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMA Cabdin XIII	%	29,87	26,77	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SMK Cabdin XIII	%	55,18	43,58	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SLB Cabdin XIII	%	83,23	83,23	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,57	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even	%	0,34	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII					
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	1,15	-	Baru	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	Prersentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	Tetap	Bidang Pembinaan SMA
	Prsentase serapan kurikulum SMK	%	100	80,81	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase serapan kurikulum SLB	%	100	97,97	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I	%	100	82,11	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I	%	100	96,71	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II	%	100	78,66	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II	%	100	98,71	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III	%	100	80,42	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III	%	100	97,81	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV	%	100	75,69	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV	%	100	98,91	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V	%	100	81,69	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V	%	100	96,61	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI	%	100	81,02	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI	%	100	97,78	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII	%	100	82,22	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII	%	100	98,96	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII	%	100	84,95	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII	%	100	97,67	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX	%	100	83,16	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX	%	100	98,88	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X	%	100	81,45	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X	%	100	98,06	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI	%	100	78,13	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI	%	100	98,83	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII	%	100	80,1	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII	%	100	96,69	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII	%	100	100	Tetap	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII	%	100	80,1	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII	%	100	98,01	Berubah menjadi lebih baik	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
	Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,08	0,08	Tetap	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,08	0,08	Tetap	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0,5	0,5	Tetap	Bidang Ketenagaan Dikbud
PROGRAM PENGENDALIAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PERIZINAN PENDIDIKAN						
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan	%	100	-	Baru	Bidang Pembinaan SMA
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan	%	96	-	Baru	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui	%	100	-	Baru	Bidang Pembinaan Diksus
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	40	-	Baru	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	60	-	Baru	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	60	-	Baru	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik	%	94	100	Berubah karena adanya penurunan target STBM	Bidang Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular	%	68,57	74,3	Berubah karena adanya naiknya capaian terduga TB	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	77	-	Baru	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	74,28	-	Baru	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	Tetap	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	75	-	Baru	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	85,71	74,3	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit	%	85,71	52	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang	%	91,3	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	52	52	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	74,3	74,3	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa	%	91	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	%	57,14	52	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang					
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang	%	71,42	74,3	Berubah karena adanya kenaikan target terduga TB	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang	%	91	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	85,71	52	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	85,71	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten	%	91	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	%	85,71	52	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	85,71	74,3	Berubah menjadi lebih baik	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati	%	91	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	100	100	Tetap	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,7	-	Baru	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4	-	Baru	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan	Kabupaten /Kota	35	-	Baru	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	laboratorium dan pengujian alat kesehatan					
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	-	Baru	RSUD Dr. Moewardi
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	-	Baru	RSUD Tugurejo
	Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	-	Baru	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	-	Baru	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	95	-	Baru	RSJD Surakarta
	Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	-	Baru	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	-	Baru	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap	%	92	-	Baru	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi					
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	-	Baru	RSJD Surakarta
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	89	-	Baru	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
	Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	71	-	Baru	Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	94,29	-	Baru	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	%	85,71	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	86	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	85,71	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	85,71	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	85,71	-	Baru	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara	%	55	-	Baru	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran					
	Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	60	-	Baru	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	70	Berubah menjadi lebih baik	RSUD Dr. Moewardi
	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	40	40	Tetap	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	20	Tetap	RSUD Tugurejo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	90	Berubah menjadi lebih baik	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	10	Berubah menjadi lebih baik	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	95	95	Tetap	RSJD Surakarta
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	20,35	18,59	Berubah menjadi lebih baik	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	60,38	100	Berubah karena tertundanya tindak lanjut dokumen teknis (DED) yang telah tersusun menjadi kegiatan konstruksi pembangunan/rehabilitasi SDA	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62,5	65,8	Berubah karena tertundanya pembangunan dan lanjutan pembangunan sarpras tampungan air baku seperti embung dan <i>longstorage</i>	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	83	84,5	Berubah karena tertundanya kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) dan rehabilitasi kerusakan DI akibat bencana	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	22,04	23,83	Berubah karena tertundanya konstruksi pengendali banjir, serta perubahan iklim/cuaca ekstrim	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,27	52,36	Berubah karena tertundanya konstruksi sarpras sungai serta kerusakan akibat bencana banjir dan longsor	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Pemali Comal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	di wilayah Balai PSDA Pemali Comal					
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serang Lusi Juana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serayu Citanduy.
	Persentase darurat banjir yang tertangani	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serayu Citanduy.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy					
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serayu Citanduy.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	94,15	94,15	Tetap	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	83,3	83,3	Tetap	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	100	-	Baru	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	91,5	91,5	Tetap	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	15,23	15,23	Tetap	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	15,23	-	Baru	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	100	100	Tetap	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	100	Tetap	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	-	Baru	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,49	40,13	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	45,16	47,68	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	96,46	88,43	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	86,09	86,09	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,71	96,65	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,44	88,44	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	98,29	91,75	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi	%	83,6	83,6	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	96,06	97,89	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	85,46	85,46	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	95,49	92,4	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	93,6	93,6	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,92	97,87	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,85	94,85	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	91,89	88,33	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	93,77	93,77	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	80,61	84,41	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,13	91,13	Tetap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	93,92	94,73	Berubah, karena di tahun 2020-2021 fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga penanganan infrastruktur jalan sebagian dilakukan penundaan yang berakibat tidak tercapainya target di tahun 2020 dan 2021	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94,73	96,05	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	100	100	Tetap	Balai Pengujian dan Peralatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100	100	Tetap	Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	-	Baru	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19,09	19,09	Tetap	Balai Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
	Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21,99	33,35	Berubah karena sejalan dengan terbitnya UU Cipta Kerja yang tidak mengamanahkan penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Provinsi sudah termuat pada RTRW Provinsi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	77,29	100	Berubah karena saat ini proses persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN menunggu kesepakatan bersama terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Bidang Penataan Ruang
	Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	80	80	Tetap	Bidang Penataan Ruang
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	77,5	77,5	Tetap	Bidang Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	Tetap	Balai PSDA Serayu Citanduy.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	15,08	37,24	Total target RTLH yang harus ditangani oleh APBD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RPJMD 2018-2023 yaitu sebanyak 176.755 unit. Capaian 2019-2021 sebesar 44.799 unit dan alokasi tahun 2022 sebanyak 11.417 unit sehingga sisanya adalah 120.539 unit. Mendasarkan pada kemampuan anggaran yang tersedia maka pada tahun 2023 untuk indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani hanya mencapai angka 15,08%, dengan target jumlah RTLH yang tertangani pada tahun 2023 sebanyak 15.000 unit	Bidang Perumahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	13,45	12,5	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	20	-	Baru	Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	32,95	32,95	Tetap	Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	Tetap	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan	%	13,51	12,16	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	kesadaran terhadap tramtibum					
	Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	%	100	-	Baru	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	-	Baru	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	2,82	2,69	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	Persentase penurunan risiko bencana	%	3	2	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Penanganan Darurat
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	100	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Logistik dan Peralatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	34,38	-	Baru	Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	-	Baru	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	4,1	4,1	Tetap	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0,15	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,16	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,18	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,22	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang	%	0,13	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Cepiring

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	mebutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring					
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,13	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,16	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,11	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,15	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,21	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di	%	0,23	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha					
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,17	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,14	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,21	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,09	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,28	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,07	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,18	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,14	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,22	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,16	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,23	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,07	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan	%	0,07	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo					
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,08	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,12	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,11	-	Baru	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100	-	Baru	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,82	-	Baru	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,29	-	Baru	Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	-	Baru	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	-	Baru	Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	57,14	-	Baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8,19	8,19	Tetap	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,5	38,5	Tetap	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,25	2,25	Tetap	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan	%	4,2	4,2	Tetap	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	peningkatan produktivitas					
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2,74	1,12	Berubah menjadi lebih baik	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,38	6,67	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	5,88	13,04	Berubah, karena kondisi perekonomian yang terkena dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,75	16	Berubah menjadi lebih baik	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	71,01	71,01	Tetap	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68	68	Tetap	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	97,8	87,7	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43	43	Tetap	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,72	47,61	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96	96	Tetap	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,57	-	Baru	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,14	26,14	Tetap	Balai Keselamatan Kerja Kelas A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6,84	-	Baru	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,64	5,64	Tetap	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejing	%	20	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	40	-	Baru	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	40	-	Baru	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	20	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	100	91,43	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	25	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,36	12,36	Tetap	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	20	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita /hari	4.020	4.020	Tetap	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	CV harga pangan strategis (beras)	%	2	5	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	1	1	Tetap	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/ tahun	91,4	-	Baru	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	-	Baru	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	-	Baru	Bidang Keamanan Pangan
	Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%	80	-	Baru	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						
	Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	Tetap	Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	-	Baru	Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						
	Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	-	Baru	Bidang Pertanahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	-	Baru	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	10	Tetap	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8,57	8,57	Tetap	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	-	Baru	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	100	Tetap	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	3,83	-	Baru	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
						Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,14	-	Baru	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	Tetap	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	75	-	Baru	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	-	Baru	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup	%	17,14	-	Baru	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	meningkat kapasitasnya					
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	-	Baru	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	-	Baru	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	Persentase sampah yang dikelola	%	89	-	Baru	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
	Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	97	-	Baru	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	-	Baru	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
	Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	-	Baru	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENATAAN DESA						
	Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	100	100	Tetap	Bidang Penataan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%	100	-	Baru	Bidang Penataan Desa
	Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	100	Tetap	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	40,24	40,24	Tetap	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	4,34	4,34	Tetap	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	91	-	Baru	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	3,55	3,55	Tetap	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	27,7	-	Baru	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	35	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	30	30	Tetap	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Unmetneed KB	%	12,76	10,75	Berubah karena selama pandemi Covid-19 angka unmetneed meningkat, dan capaiannya di tahun 2021 sebesar 14,29, sehingga dilakukan penyesuaian target	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,3	89,3	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	91	90,2	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	30	-	Baru	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	52,34	52,34	Tetap	Bidang Lalu Lintas
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18,52	18,52	Tetap	Bidang Lalu Lintas
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,68	5,68	Tetap	Bidang Angkutan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	94,45	94,45	Tetap	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42,86	42,86	Tetap	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	43,75	43,75	Tetap	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	100	100	Tetap	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31,25	31,25	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,51	52,51	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	50	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan	%	43,21	43,21	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B					
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	62,5	62,5	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52,03	52,03	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,46	38,46	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79,53	79,53	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	76,92	76,92	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66,43	66,43	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34,48	34,48	Tetap	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	84,23	83,55	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34,85	34,85	Tetap	Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	75	75	Tetap	Bidang Pelayaran
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	51,12	43,28	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pelayaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	87,79	87,79	Tetap	Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45,45	45,45	Tetap	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
	Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	85	85	Tetap	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase badan publik yang terbuka	%	100	100	Tetap	Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	80	80	Tetap	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	85	85	Tetap	Bidang E-Government
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
	Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	85,19	85,19	Tetap	Bidang Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
	Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	27,15	27,15	Tetap	Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
	Persentase SDM KUMKM yang terampil	%	83	83	Tetap	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
	Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	76,5	76,5	Tetap	Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
	Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12,77	-	Baru	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
	Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	25	-	Baru	Bidang Bina Usaha
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
	Persentase perencanaan dan	%	100	80	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	pengembangan penanaman modal yang dipromosikan					
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	24	24	Tetap	Bidang Promosi PM
	Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha	%	26	26	Tetap	Bidang Promosi PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	95	95	Tetap	Bidang Pelayanan Perizinan
	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	Tetap	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	93	93	Tetap	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
	Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	15	Tetap	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
	Persentase pemanfaatan sistem	%	90	90	Tetap	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	informasi penanaman modal dan perizinan					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	100	100	Tetap	Bidang Kepemudaan
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	16,3	16,3	Tetap	Bidang Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	45	45	Tetap	Bidang Keolahragaan
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	15	15	Tetap	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	100	Tetap	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	100	100	Tetap	Bidang Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
	Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	100	100	Tetap	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
	Presentase ragam budaya terlayani	%	3,1	-	Baru	Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	100	80	Berubah menjadi lebih baik	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
	Presentase jenis seni tradisi terlayani	%	6,82	-	Baru	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
	Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,42	0,42	Tetap	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
	Persentase status cagar budaya	%	23,62	21,89	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	Angka	89,8	88,7	Berubah menjadi lebih baik	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	100	-	Baru	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	100	100	Tetap	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	100	100	Tetap	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	100	100	Tetap	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	%	100	-	Baru	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	100	100	Tetap	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	25	25	Tetap	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30	30	Tetap	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	17,6	75	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	25	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	-	Baru	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	25	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	-	Baru	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	25	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	-	Baru	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	-	Baru	Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81,82	81,82	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81,82	81,82	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63,64	63,54	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	Tetap	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100	100	Tetap	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	25	25	Tetap	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	-	Baru	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	72	-	Baru	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	%	45	-	Baru	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2	Tetap	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahhan Ikan	%	25	25	Tetap	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	50	50	Tetap	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	78,26	78,26	Tetap	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	70	70	Tetap	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	17.295.375	-	Baru	Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
	Persentase Kota Kreatif	%	5,71	-	Baru	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	59,72	-	Baru	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	4.013.001	4.013.001	Tetap	Bidang Budidaya
	Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	-	Baru	Bidang Veteriner
	Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	1	Tetap	Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak	%	2	2	Tetap	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	4	4	Tetap	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah	%	5	-	Baru	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100	-	Baru	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2,9	-	Baru	Bidang Tanaman Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10,8	-	Baru	Bidang Hortikultura
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3,1	-	Baru	Bidang Perkebunan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2,5	2,5	Tetap	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100	100	Tetap	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	3	3	Tetap	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	3	3	Tetap	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	3	3	Tetap	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	17,22	3	Berubah menjadi lebih baik	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
	Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	2	2	Tetap	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	18,88	18,88	Tetap	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10	10	Tetap	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	10	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021	Bidang Veteriner
	Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10	-	Baru	Bidang Veteriner
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	10	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021	Balai veteriner semarang
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	10	Berubah karena mempertimbangkan realisasi tahun 2021	Balai veteriner boyolali
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
	Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	2,1	0,43	Berubah menjadi lebih baik	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
	Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	15,62	15,62	Tetap	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10	10	Tetap	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	100	Tetap	BALAI PELATIHAN PERTANIAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,38	35,38	Tetap	Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	-	Baru	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	0,72	0,72	Tetap	CDK 1
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	-	Baru	CDK 1
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1,63	1,63	Tetap	CDK 1
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	0,72	0,72	Tetap	CDK 2
	Persentase pengendalian gangguan	%	100	-	Baru	CDK 2

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II					
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1,63	1,63	Tetap	CDK 2
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	0,62	0,62	Tetap	CDK 3
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	-	Baru	CDK 3
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1,69	1,69	Tetap	CDK 3
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV	%	0,72	0,72	Tetap	CDK 4
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	-	Baru	CDK 4
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1,81	1,81	Tetap	CDK 4
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan	%	0,82	0,82	Tetap	CDK 5

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	yang berkelanjutan di CDK Wil V					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100	-	Baru	CDK 5
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	2	2	Tetap	CDK 5
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI	%	0,82	0,82	Tetap	CDK 6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	-	Baru	CDK 6
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	3,25	3,25	Tetap	CDK 6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	0,82	0,82	Tetap	CDK 7
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	-	Baru	CDK 7
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis	%	3,13	3,13	Tetap	CDK 7

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	tertangani di CDK Wil VII					
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	0,62	0,62	Tetap	CDK 8
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	-	Baru	CDK 8
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	2,06	2,06	Tetap	CDK 8
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	0,72	0,72	Tetap	CDK 9
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	-	Baru	CDK 9
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	2,63	2,63	Tetap	CDK 9
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	0,62	0,62	Tetap	CDK 10
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan	%	100	-	Baru	CDK 10

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	(Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X					
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	2,06	2,06	Tetap	CDK 10
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI	%	0,62	0,62	Tetap	CDK 11
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	-	Baru	CDK 11
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	3,13	3,13	Tetap	CDK 11
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPH	%	0,91	0,91	Tetap	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	-	Baru	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100	-	Baru	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	-	Baru	CDK 1

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100	-	Baru	CDK 1
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	-	Baru	CDK 2
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II	%	100	-	Baru	CDK 2
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	-	Baru	CDK 3
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III	%	100	-	Baru	CDK 3
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	-	Baru	CDK 4
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV	%	100	-	Baru	CDK 4
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V	%	100	-	Baru	CDK 5
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	-	Baru	CDK 6
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI	%	100	-	Baru	CDK 6
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang	%	100	-	Baru	CDK 8

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	ditangani di CDK Wil VIII					
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII	%	100	-	Baru	CDK 8
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	-	Baru	CDK 9
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX	%	100	-	Baru	CDK 9
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	-	Baru	CDK 10
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	-	Baru	CDK 11
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	%	0,14	0,14	Tetap	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,09	0,09	Tetap	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	25	25	Tetap	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	3	3	Tetap	CDK 1
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	2	2	Tetap	CDK 2
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III	%	2	2	Tetap	CDK 3
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	2	2	Tetap	CDK 4
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	3	3	Tetap	CDK 5
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	2	2	Tetap	CDK 6
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	3	3	Tetap	CDK 7
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	2	2	Tetap	CDK 8
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	2	2	Tetap	CDK 9
	Presentase peningkatan kelas kelompok	%	2	2	Tetap	CDK 10

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat di CDK Wil X					
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	2	2	Tetap	CDK 11
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						
	Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5	-	Baru	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	25	25	Tetap	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						
	Persentase pengambilan air tanah	%	55,76	55,76	Tetap	Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4,2	4,2	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,6	12,6	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,91	2,91	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,17	1,17	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,97	0,97	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8,47	8,47	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,61	0,61	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3,31	3,31	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,1	1,1	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14,81	14,81	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5,36	5,36	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,25	0,25	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	100	Tetap	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						
	Persentase Good Mining Practice	%	90,7	85,71	Barubah menjadi lebih baik	Bidang Mineral dan Batubara
	Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	6,76	6,57	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria	%	4,23	2,86	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	6,48	6,29	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	4,51	4,29	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	12,11	12	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	3,1	2,86	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	11,55	11,43	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	5,63	5,14	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	14,37	14,29	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak	%	4,79	4	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	13,24	13,14	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3,94	2,86	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	100	Tetap	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	123.938	123.401	Barubah menjadi lebih baik	Bidang Energi Baru Terbarukan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	332	332	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	1.738	1.737,69	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	803,7	583	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	739	739	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	408	408	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	462,07	76,2	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	505	505	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	407	407	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	95.701	95.701	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	20.288	20.288	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	1.836	1.836	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	718,8	76	Barubah menjadi lebih baik	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	37,13	37,13	Tetap	Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1,92	1,92	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2,53	2,53	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	1,95	1,95	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	4,15	4,15	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	5,06	5,06	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,62	1,62	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	4,8	4,8	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1,82	1,82	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	5,01	5,01	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1,82	1,82	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	3,73	3,73	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2,73	2,73	Tetap	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	-	Baru	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0,21	-	Baru	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
	Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	11,5	11,5	Tetap	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
	Nilai ekspor non migas	Juta US\$	7.430	7.205	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	3	3	Tetap	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5	5	Tetap	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4	4	Tetap	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A
PROGRAM PENGGUNAAN DAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	10	-	Baru	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	6	6	Tetap	Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3	3	Tetap	Bidang Industri Non Agro
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,17	3,17	Tetap	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	85	Tetap	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,35	4,35	Tetap	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam	%	1	-	Baru	Bidang Industri Agro

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Sistem Informasi Industri Nasional					
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	-	Baru	Bidang Industri Non Agro
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,6	3,41	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,6	3,41	Berubah menjadi lebih baik	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	-	Baru	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	-	Baru	BIRO HUKUM
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	-	Baru	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	-	Baru	BIRO UMUM
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	-	Baru	BIRO UMUM
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	-	Baru	BIRO UMUM
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	-	Baru	BIRO PEMERINTAHAN, OTONO MI DAERAH DAN KERJA SAMA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	-	Baru	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34,15	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87,8	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37	-	Baru	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	100	Tetap	BIRO ORGANISASI
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63	59,53	Berubah menjadi lebih baik	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92	-	Baru	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Efektivitas kerjasama daerah	%	95	-	Baru	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	-	Baru	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	-	Baru	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	-	Baru	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95	-	Baru	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95	-	Baru	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100	94	Berubah menjadi lebih baik	BIRO HUKUM
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang	%	100	-	Baru	BIRO HUKUM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	dievaluasi atau difasilitasi					
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100	94	Berubah menjadi lebih baik	BIRO HUKUM
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	94	Berubah menjadi lebih baik	BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90	-	Baru	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95	-	Baru	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96	-	Baru	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN
	Nilai kemandirian BLUD	%	55	-	Baru	BIRO PEREKONOMIAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	-	Baru	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	-	Baru	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	-	Baru	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,5	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	-	Baru	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	100	Tetap	Sekretariat DPRD
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	Tetap	Bagian Umum
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
	Persentase Layanan Bagian Humas	%	95	95	Tetap	Bagian Humas
	Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	-	Baru	Bagian Persidangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
	Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan	%	90	-	Baru	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran	%	90	-	Baru	Bidang Kajian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	perencanaan pembangunan lintas sektor					
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90	-	Baru	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	-	Baru	Bidang Perekonomian
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	-	Baru	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	-	Baru	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	-	Baru	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	Tetap	Bidang Anggaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	Tetap	Bidang Akuntansi
	Persentase realisasi serapan APBD	%	95	95	Tetap	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	72,5	-	Baru	Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	95	Tetap	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	7,08	10,17	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	7,35	5,38	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	12	-	Baru	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	13,08	-	Baru	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	4,32	9,54	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	12,5	-	Baru	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	14,33	8,41	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	2,03	6,49	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	-6,73	12,08	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	90	Tetap	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	8,37	6,03	Barubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	4,3	5,95	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	%	10,26	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	4,97	10,34	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	9,49	3,2	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	16,38	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	5,34	12,91	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	11,24	5,19	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	16,16	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	7,76	10,73	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	9,31	6,4	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	%	7,88	9,38	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	-0,87	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	%	5,68	9,5	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	6,28	9,22	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	25	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	2,52	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	8	11,16	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	%	9,13	6,56	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	19,61	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	10,22	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	10,35	14,6	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	7,59	6,29	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	16,47	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	8,35	10,25	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	3,45	9,32	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	12,04	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	5,74	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	4,16	9,49	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	10,26	6,19	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	%	5,94	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	5,69	10,79	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	9,07	10,76	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	%	16,22	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	0,52	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	%	6,18	10,85	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	21,95	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5,04	9,74	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8,39	5,74	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	16,4	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	6,85	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5,83	10,65	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8,82	4,4	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5,41	9,38	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	5,01	7,82	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9,65	3,45	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	16,22	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	6,91	11,97	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	5,74	4,03	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	16,26	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	-4,84	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	6,23	10,65	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	16,1	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	3,47	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	6,27	11,66	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	11,18	7,77	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	16,7	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	%	8,09	11,68	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	6,66	11,66	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	%	16,36	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	6,04	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	4,95	15,5	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	5,33	3,42	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	-9,09	9,38	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	%	5,04	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	10,07	10,25	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	3,98	5,56	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	13,04	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	12,74	10,59	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	7,2	11,54	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	9,36	5,46	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	6,87	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10,73	13,28	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	5,25	2,54	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	76,74	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10,85	10,59	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	11,44	13,39	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	6,53	7,03	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	49,42	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	7,36	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	10,09	11,48	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	7,15	3,43	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	16,53	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	5,02	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	8,21	10,19	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	8,09	2,94	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	%	-48,69	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	10,99	14,57	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	6,32	1,49	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	16,19	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	%	7,34	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	11,42	8,06	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	6,91	0,46	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	16,32	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	2,47	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	8,02	7,74	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	6,69	3,05	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	%	10,92	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0,67	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	8,21	8,25	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	5,05	2,48	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	17,58	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	5,01	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	9,43	6,23	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8,61	4,55	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	16,35	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	%	5,75	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	9,92	8,73	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	7,65	5,97	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	3,5	9,38	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	2,2	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	3,16	5,91	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	15,97	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6,03	8,64	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6,72	3,53	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	16,36	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	%	26,54	10,59	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	7,68	6,75	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	6,1	4,09	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	3,32	9,38	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	5,69	11,55	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	6,17	7,82	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	%	16,49	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	%	2,45	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	5,14	8,35	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
					memperhitungkan efek pandemi Covid-19	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	4,41	5,11	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	%	16,37	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	7,43	10,83	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13,99	9,38	Berubah menjadi lebih baik	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	%	2,03	10,59	Berubah karena asumsi peningkatan pendapatan dari realisasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan efek pandemi Covid-19	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	%	12	-	Baru	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	100	Tetap	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	100	Tetap	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	Tetap	Bidang Mutasi
	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	Tetap	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	Tetap	Bidang Informasi Kepegawaian
	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	100	Tetap	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	100	Tetap	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	82	80	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,5	3,5	Tetap	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	93,17	90	Berubah menjadi lebih baik	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	100	-	Baru	UPT BRIDA
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri	%	20	-	Baru	UPT BRIDA
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	-	Baru	UPT BRIDA
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	100	-	Baru	UPT BRIDA
	Persentase hasil penelitian dan	%	20	-	Baru	UPT BRIDA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20	-	Baru	UPT BRIDA
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	-	Baru	Badan Penghubung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	-	Baru	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	-	Baru	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	85	-	Baru	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	-	Baru	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	-	Baru	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	-	Baru	INSPEKTORAT
	Persentase Penerapan MR di OPD	%	100	-	Baru	INSPEKTORAT
	Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	86	-	Baru	INSPEKTORAT
	Persentase Nilai MCP korszupgah	%	85	-	Baru	INSPEKTORAT
	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	90	-	Baru	INSPEKTORAT
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,4	-	Baru	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PENINGKATAN PERAN						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,3	-	Baru	Bidang Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,11	-	Baru	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,39	-	Baru	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI						

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target		Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RKPD 2023	RPJMD 2018-2023		
1	2	3	4	5	6	7
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,9	-	Baru	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 memiliki makna yang cukup penting karena merupakan rencana pembangunan daerah Jawa Tengah tahun terakhir dari penjabaran pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Untuk itu maka dalam RKPD Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka penuntasan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2023 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2023 yang disusun berorientasi pada pendekatan *money follow priority programme* dan *programme follows result*, serta dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. RKPD Tahun 2023 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka menuntaskan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2023 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023. Dengan demikian diharapkan akan tercapai cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yakni “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO



Ditandatangani secara elektronik oleh:



BUKU II

HASIL EVALUASI RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
BUKU II EVALUASI HASIL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021	1
A. Indikator Kinerja Utama Daerah.....	1
B. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2
C. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	21
1. Urusan Pendidikan.....	21
2. Urusan Kesehatan	36
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60
6. Urusan Sosial.....	62
D. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	67
1. Urusan Tenaga Kerja.....	67
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	70
3. Urusan Pangan.....	72
4. Urusan Pertanahan	74
5. Urusan Lingkungan Hidup	76
6. Urusan Adiministrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	79
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	80
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	82
9. Urusan Perhubungan	84
10. Urusan Komunikasi dan Informatika	89
11. Urusan Koperasi dan UKM	90
12. Urusan Penanaman Modal	92
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	94
14. Urusan Statistik	96
15. Urusan Persandian.....	97
16. Urusan Kebudayaan.....	98
17. Urusan Perpustakaan.....	99
18. Urusan Kearsipan	100
E. Urusan Pilihan	101
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	101
2. Urusan Pariwisata	106
3. Urusan Pertanian	108
4. Urusan Kehutanan	113
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	121

6. Urusan Perdagangan	129
7. Urusan Perindustrian.....	131
8. Urusan Transmigrasi.....	133
F. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	134
1. Sekretariat Daerah	134
2. Sekretariat DPRD	144
G. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	145
1. Urusan Perencanaan	145
2. Urusan Keuangan	148
3. Urusan Kepegawaian.....	170
4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	171
5. Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	172
6. Urusan Penghubung.....	173
7. Urusan Pengawasan	174
H. Unsur Pemerintahan Umum.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Kinerja Indikator Utama Daerah	1
Tabel 2. 2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2
Tabel 2. 3	Capaian kinerja Urusan Pendidikan	21
Tabel 2. 4	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	36
Tabel 2. 5	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	49
Tabel 2. 6	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59
Tabel 2. 7	Tabel Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	60
Tabel 2. 8	Capaian Kinerja Urusan Sosial	62
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	67
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...	70
Tabel 2. 11	Tabel Capaian Kinerja Urusan Pangan.....	72
Tabel 2. 12	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	74
Tabel 2. 13	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	76
Tabel 2. 14	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ...	79
Tabel 2. 15	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82
Tabel 2. 17	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	84
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	89
Tabel 2. 19	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM.....	90
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	92
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja urusan Kepemudaan dan olahraga	94
Tabel 2. 22	Capaian Kinerja Urusan Statistik	96
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Urusan Persandian	97
Tabel 2. 24	Capaian kinerja Urusan Kebudayaan	98
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	99
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	100
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	101
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	106
Tabel 2. 29	Capaian kinerja Urusan Pertanian.....	108
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	113
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	121
Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	129
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	131
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	133
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	134

Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD..	144
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan	145
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	148
Tabel 2. 39	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian	170
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Urusan Diklat	171
Tabel 2. 41	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	172
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Urusan Penghubung.....	173
Tabel 2. 43	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	174
Tabel 2. 44	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	176

BUKU II
EVALUASI HASIL RKPd PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

A. Indikator Kinerja Utama Daerah

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Indikator Utama Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15	15,38	102,53		Setda
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80	77	78	97,5		Setda
3	Angka Kemiskinan	%	7,48-6,48	11,94-11,02	11,25 (Sep)	66,49		Setda
4	Indeks Gini	Angka	0,3	0,365	0,368 (Sep)	81,52		Setda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4	5,86-5,79	5,95 (Ags)	67,23		Setda
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,0	3,80-4,80	3,32	57,14		Setda
7	Inflasi	%	3,0±1	3,0 ± 1	1,70	176,47		Setda
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	45,35	40,9	38,67	85,27		Setda
9	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,595	0,608	92,11		Setda
10	Nilai Tukar Petani	Angka	103,15	101,15	103,18	100,03		Setda
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73	72,23	72,16	98,85		Setda
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,25	92,18	92,18	99,92		Setda
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,26	67,47	67,48	100,02		Setda

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

* : Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 3 indikator tercapai, 9 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Meskipun belum mencapai target, namun perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar

3,32 persen (c-on-c) membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang berkontraksi - 2,65 persen (c-on-c).

B. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Angka Kemiskinan	%	7,48	11,94- 11,02	11,25 (Sep)	66,49		Sekretariat Daerah
2	Indeks Gini	Angka	0,3	0,365	0,368 (Sep)	81,52		Sekretariat Daerah
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70	3,80 – 4,80	3,32	57,14		Sekretariat Daerah
4	Inflasi	%	3,00	3,0 ± 1	1,70	176,47		Sekretariat Daerah
5	PDRB per kapita	Juta Rupiah	45,35	40,09	38,67	85,27		Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,00	72,23	72,16	98,85		Sekretariat Daerah
7	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,17	10,01- 9,25	10,16	90,26		Sekretariat Daerah
8	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,97	14,01- 12,93	12,44	96,22		Sekretariat Daerah
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	5,86-5,79	5,95 (Ags)	67,23		Sekretariat Daerah
10	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,595	0,608	92,11		Sekretariat Daerah
11	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,10	1,87	0,35	11,29		Sekretariat Daerah
12	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,65	2,58	2,02	35,75		Sekretariat Daerah
13	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,90	1,61	5,8	98,31		Sekretariat Daerah
14	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,20	15,25	2,88	90,00		Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,45	7,82	7,75	104,03		Sekretariat Daerah
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	12,79	12,77	96,96		Sekretariat Daerah
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,1	74,45	74,47	100,50		Sekretariat Daerah
18	Pertumbuhan investasi	%	10,00	4,00 – 5,00	6,56	65,6		Sekretariat Daerah
19	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,5	7,71	5,51	99,82		Sekretariat Daerah
20	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	523,15	412,74	385,53	73,69		Sekretariat Daerah
21	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,75	61,25	58,41	94,60		Sekretariat Daerah
22	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	29,75	30,25	27,70	107,40		Sekretariat Daerah
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,25	92,18	92,18	99,92		Sekretariat Daerah
24	Nilai Tukar Petani	Angka	103,15	101,15	103,18	100,03		Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum							
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,10	12,90	8,78	80,87		
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	80,43	83,52	81,93	101,86		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,08	0,07	0,07	87,50		
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	91,55	98,95	99,06	108,20		
	KESEHATAN							Dinas Kesehatan
5	AKI	100.000/KH	81,00	99,00	199,00	40,70		
6	AKB	1.000/KH	7,80	9,61	7,87	99,11		
7	AKABA	1.000/KH	10,43	10,45	8,95	116,54		
8	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	72,00	85,00	84,12	116,83		
9	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	60,00	55,00	65,50	109,17		
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	%	100,00	100	100,00	100,00		
11	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69,00	57,00	57,00	82,61		
12	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,32	0,19	0,20	62,50		
13	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	90,00	92,65	92,65		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
14	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJD Surakarta	%	98,17	96,16	96,6	98,40		RSJD Surakarta
15	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) RSJD	%	100,00	100,00	99,23	99,23		RSJD Dr. Amino Gondohutomo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	Dr. Amino Gondohutomo							
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kelet Donorejo	%	95,00	82,00	86,73	91,29		RSUD Kelet Donorejo
17	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Dr. Moewardi	%	84,00	82,00	82,61	98,35		RSUD Dr. Moewardi
18	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	87,67	88,00	89,82	102,45		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
19	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Tugurejo	%	90,00	86,00	87,78	97,53		RSUD Tugurejo
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
20	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	40,51	41,56	93,94		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
21	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,5	90,82	90,86	98,23		
22	Persentase akses aman air aman perkotaan	%	94,15	90,15	90,32	95,93		
23	Persentase akses aman air aman perdesaan	%	83,30	79,80	83,42	100,14		
24	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	12,42	12,42	81,55		
25	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,14	64,02	64,06	98,34		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
26	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	56,62	53,75	53,79	95,00		
27	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	78,75	74,29	74,34	94,40		
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	49,83	63,97	28,29	176,14		
29	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	34,16	15,35	39,96	116,98		
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
30	Persentase kab/kota yang kondusif	%	100,00	100,00	100,00	100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
31	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	50,00	5,00	7,29	56,12		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	25,00	3,00	6,3	118,20		
33	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100,00	100,00	100	100,00		
34	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100	100,00		
35	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,56	3,55	3,55	98,61		
	SOSIAL							Dinas Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
36	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1,42	1,40	1,40	98,59		
37	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	20,63	15,84	15,84	35,33		
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	TENAGA KERJA							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si
38	Persentase pengangguran yang ditangani	%	28,55	8,16	19,70	69,00		
39	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8,19	4,76	5,34	65,20		
40	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,01	20,00	50,63	71,30		
41	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,00	88,00	89,74	93,48		
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	82,97	92,09	89,51	107,88		
43	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	%	54,62	29,29	55,91	102,36		
44	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,00	43,18	43,42	63,85		
45	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	87,70	87,41	97,6	111,29		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							Dinas Pemberdaya an Perempu an, Perlindun gan Anak, Pengendalia n Penduduk Dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
								Keluarga Berencana
46	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75,16	72,60	71,73	95,44		
47	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	88,57	100	100	112,91		
48	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,22	8,22	8,97	91,64		
49	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Angka	2,22	2,30	2,09	106,22		
50	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	34,30	34,24	34,29	99,97		
51	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	34,29	28,57	62,85	183,29		
52	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,02	7,78	8,35	96,05		
	PANGAN							Dinas Ketahanan Pangan
53	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,08	88,08	86,67	98,40		
54	PPH Ketersediaan	Angka	83,50	83,00	85,84	102,80		
55	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/kapita /hari	2150,00	2150	2054,43	95,55		
56	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Gram/kapita /hari	57,00	57,00	60,24	105,68		
	PERTANAHAN							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
57	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100,00	100,00	205,84	205,84		
	LINGKUNGAN HIDUP							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
58	Indeks Kualitas Air	%	49,47	50,55	50,55	100		
59	Indeks Kualitas udara	%	84,91	84,91	84,60	99,63		
60	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	3,39	98,26		
61	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,20	0,20	100		
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
62	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	20,35	48,57	63,82	313,61		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
64	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	76,00	75,25	70,35	92,57		
65	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	19,64	21,14	21,99	89,31		
	PERHUBUNGAN							Dinas Perhubungan
66	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	42,64	43,38	71,84		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
67	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	19,62	21,18	41,17		
68	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	46,67	46,67	70,00		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							Dinas Komunikasi dan Informatika
69	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,30	3,41	2,30	69,70		
70	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,82	3,71	2,50	88,65		
71	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3,60	4,06	3,49	96,94		
	KOPERASI DAN UKM							Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
72	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,68	23,68	17,42	58,69		
73	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,95	25,30	28,08	93,76		
	PENANAMAN MODAL							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,00	90,00	94,23	104,70		
75	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	100	111,71	111,71		
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
76	Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,28	54,50	54,50	108,39		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
77	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,61	0,61	0,61	100,00		
	STATISTIK							Dinas Komunikasi dan Informatika
78	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	75,9	63,72	95,71	126,10		
	PERSANDIAN							Dinas Komunikasi dan Informatika
79	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	3,00	2,00	3,00	100,00		
	KEBUDAYAAN							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	5,90	5,68	83,28		
	PERPUSTAKAAN							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
81	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	64,00	61,72	61,72		
	KEARSIPAN							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
82	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	100	64,00	64,00	64,00		
	URUSAN PILIHAN							
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							Dinas Kelautan dan Perikanan
83	Produksi Perikanan	Ton	4.739. 656,34	1.013. 765,09	864.706,7 7	17,86		
84	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita /tahun	33,67	32,05	36,74	109,12		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	PARIWISATA							Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
85	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,21	3,21	2,95	91,90		
	PERTANIAN							
86	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	Ton	58.587 .320	11.716 .810	9.692.169 ,3	16,54		Dinas Pertanian dan Perkebunan
87	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	18.448 .802	3.689 .702	3.598.263 ,74	19,50		
88	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	536.251	107.201	46.949	8,76		
89	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	1.088 .140	217 .628	174.705,0 4	16,06		
90	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	2.860 .080	572.016	519.271,2 2	18,16		
91	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	14.817 .560	2.963 .438	235.757,5 4	1,59		
92	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura,	Ton	829.494	165.895	171.926,9 3	20,73		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	dan perkebunan (kelapa)							
93	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	107.779	21.556	27.206,39	25,24		
94	Jumlah Produksi Daging	Kg	375.382 .386	340.041 .606	395.212.5 01	105,28		Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
95	Jumlah Produksi Susu	Kg	101.866 .620	101.663 .192	102.508.6 39	100,63		
96	Jumlah Produksi Telur	Kg	325.083 .370	315.686 .596	328.156.9 75	100,95		
	KEHUTANAN							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
97	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	66,76	51,15	51,16	76,63		
98	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	0,49	113,95		
99	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km ²	16.555,86	10.233,10	10.224,57	99,92		
100	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	4,61	980,85		
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
101	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	67,00	66,00	66,51	99,27		
102	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	2,99	3,02	3,61	120,74		
103	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,00	1,00	1,26	126,00		
104	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,96	12,94	13,38	83,83		
	PERDAGANGAN							Dinas Perindustri an dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
								Perdagangan
105	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	8,64	1,61	6,52	75,46		
	PERINDUSTRIAN							Dinas Perindustri an dan Perdagangan
106	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,85	2,58	2,62	44,78		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH							
107	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	84,00	82,00	92,05	112,25		Sekretariat Daerah
108	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	84,00	82,00	83,77	102,16		
109	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	80,00	77,00	82,75	107,47		
110	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85,00	85,00	100,00	117,65		
111	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85,00	85,00	100,00	117,65		
112	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	90,00	80,00	80,00	88,89		
113	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	85,00	85,00	87,5	102,94		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
114	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	96,00	90,00	90,00	93,75		
115	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	94,00	92,00	100,00	106,38		
116	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	85,00	83,00	99,14	116,64		
117	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	85,00	83,00	100	117,65		
118	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	84,00	82,00	100,00	119,05		
119	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	94,00	92,00	100,00	106,38		
120	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	94,00	92,00	100,00	106,38		
121	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	94,00	92,00	100,00	106,38		
122	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	31,00	25,00	36,10	116,45		
123	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	100,00	76,48	100,00	100,00		
124	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	92,00	82,00	91,83	99,82		
125	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	85,00	54,00	88,70	104,35		
126	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis	%	96,00	88,00	90,00	93,75		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam							
127	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	85,00	85,00	85,71	100,83		
128	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	95,00	90,00	90,00	94,74		
129	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	70,00	65,00	67,22	96,03		
130	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85,00	85,00	85,71	100,84		
131	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	96,00	88,00	87,5	91,14		
132	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100,00	100	100,00	100,00		
133	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	85,00	85,00	81,25	95,58		
134	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	100,00	100	80,00	80,00		
135	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100,00	100	100,00	100,00		
136	Persentase Keberhasilan	%	79,00	77,00	82,75	104,75		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan							
137	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	94,00	92,00	100	106,38		
138	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	100	100	100,00		
	SEKRETARIAT DPRD							
139	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	75,00	73,00	90,28	120,37		Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PERENCANAAN							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
140	Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	90,00	90,00	90,00	100,00		
141	Persentase Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	90,00	90,00	90,00	100,00		
	KEUANGAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
142	Persentase peningkatan pajak daerah	%	8,59	5,36	5,2	60,54		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
143	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	10,37	-4,31	14,92	143,88		
144	Persentase pemanfaatan aset	%	72,50	67,50	72,84	100,47		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
145	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100,00	100	100	100,00		
	KEPEGAWAIAN							
146	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	100	100,00		Badan Kepegawaian Daerah
147	Persentase Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100	100,00		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
148	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,08	35,05	36,36	103,62		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
149	Persentase hasil kelitbanganiptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	90,00	90,00	90,00	100,00		
	PENGHUBUNG							
150	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85,00	83,00	83,06	97,72		Badan Penghubung

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							Inspektorat
151	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,00	100,00		
152	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,5	3,17	3,95	112,86		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
153	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	90,00	83,00	90,45	100,50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
154	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	90,00	83,00	90,12	100,13		
C	Aspek Daya Saing							
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,00	15,38	102,53		Sekretariat Daerah
2	Indeks Toleransi	Angka	76,6	75,30	72,64	94,83		Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,00	77,00	78	97,5		Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00	84,00	84,53	96,06		Sekretariat Daerah
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,00	3,10	2,74	91,33		Sekretariat Daerah
6	Nilai SAKIP	Angka	85,00	81,00	80,25	94,41		Sekretariat Daerah
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,50	3,47	3,72	106,29		Sekretariat Daerah
8	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	29,00	37,10	37,16	128,14		Sekretariat Daerah
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,26	67,47	67,48	100,02		Sekretariat Daerah
10	Indeks Kualitas Air	Angka	49,47	50,55	50,55	102,18		Sekretariat Daerah
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,91	84,91	84,6	99,63		Sekretariat Daerah
12	Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76	51,15	51,16	76,63		Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perubahan RKPD 2021	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8	9	1011
13	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	90,00	85,00	86,23	95,81		Sekretariat Daerah
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP*	WTP!		Sekretariat Daerah
15	Indeks Sistem Merit	Angka	0,71	0,71	0,81	114,08		Sekretariat Daerah
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,60	3,55	3,55	98,61		Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 91 indikator tercapai, 85 indikator akan tercapai, dan 18 indikator perlu upaya keras.

Adapun 14 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi dikarenakan imbas dari pandemi Covid-19. Meskipun belum mencapai target, namun perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 3,32 persen (c-on-c) membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang berkontraksi - 2,65 persen (c-on-c).
2. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dikarenakan pola historis musim tanam. Pada triwulan III 2021 Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan meningkat sejalan dengan panen komoditas tanaman bahan makanan, perkebunan, dan perikanan di sejumlah daerah, kemudian melambat pada triwulan IV 2021 dikarenakan dimulainya masa tanam di akhir tahun. Namun, secara umum selama masa pandemi sektor pertanian, tercatat mampu menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi.
3. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dikarenakan penurunan tajam pada industri rokok, meningkatnya nilai cukai dan harga rokok yang menyebabkan produsen beralih ke rokok dengan *grade* yang lebih rendah. Namun demikian, pada tahun 2021 lapangan usaha industri pengolahan mampu mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 34,31 persen.
4. AKI dikarenakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan kesehatan maternal kurang maksimal sehingga fasilitas Kesehatan lebih fokus kepada pasien Covid 19. Disamping itu terdapat kasus ibu hamil yang positif Covid dan meninggal sebanyak 558 orang dari 1.011 kasus kematian ibu atau 55,2%.
5. Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana dikarenakan penyesuaian target Tahun 2021 dari 10% menjadi 5% sehingga capaian kinerja secara akumulatif dibawah 60%.
6. Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS dikarenakan pembatasan jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan dan adanya *refocusing* anggaran kegiatan yang dialihkan ke bantuan sosial untuk membantu korban yang terdampak pandemi COVID-19.

7. Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi dikarenakan adanya penundaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 diantaranya pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Perlintasan Sebidang JPL 251 130+530 Kabupaten Klaten; realokasi anggaran pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi, penanganan daerah rawan kecelakaan, pembangunan plengsengan dermaga sungai, pada Tahun 2020 dan 2021 untuk penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat yaitu penundaan kegiatan Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor Tahun 2020 dan 202.
8. Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi sehingga menurunkan permintaan atas produk Koperasi dan UMKM yang mengakibatkan target pertumbuhan omzet tidak dapat tercapai.
9. Produksi Perikanan dikarenakan turunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain : cuaca ekstrem yang mempengaruhi penangkapan ikan di laut (musim Barat lebih lama daripada musim Timur), masih banyak terjadi *unreported* karena hasil tangkapan tidak dilelang di TPI, masih ada kapal yang belum dapat ijin untuk melaut karena masih adanya kekurangan persyaratan, penggantian Alat Penangkapan Ikan ramah lingkungan (dari API cantrang menjadi pukat tarik berkantong) belum selesai 100%, dampak pandemi Covid mempengaruhi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan.
10. Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi, jagung, kedelai, cabe besar, bawang merah, tebu, kelapa, kopi) dikarenakan adanya faktor cuaca, dimana pada musim penghujan, pengaruh tingginya curah hujan mengakibatkan kondisi tanah menjadi terlalu asam sehingga menghambat pertumbuhan, dan tanaman cabe banyak yang busuk . Selain itu pada pada musim kemarau, banyak tanaman yang terkena virus kuning, thrips, kutu daun, antraknose, dan OPT lainnya.
11. Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri dikarenakan terjadi penurunan pada sektor industri Mesin peralatan dan Industri logam dasar sebagai dampak Pandemi Covid 19 dimana Industri masih menahan diri untuk melakukan perluasan usaha sehingga kebutuhan akan mesin dan peralatan mengalami penurunan.

C. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 179 indikator kinerja.

Tabel 2. 3
Capaian kinerja Urusan Pendidikan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PENDIDIKAN								
	Program Pengelolaan Pendidikan								
1		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	81,13	87,85	86,98	107,21		Bidang Pembinaan Diksus
2		APK SLB	%	67,14	84,39	68,78	102,44		Bidang Pembinaan Diksus
3		Disparitas prestasi SLB	%	0,65	0,58	2,6	25		Bidang Pembinaan Diksus
4		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	81,42	89,8	89,1	109,43		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
5		APK SLB	%	65,54	220,95	164,78	251,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
6		Disparitas prestasi SLB	%	7,41	7,61	80,11	9,25		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
7		Disparitas prestasi SLB	%	0,02	0,22	1	2		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
8		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,95	98,62	94,92	107,92		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
9		APK SLB	%	74,01	40,65	53,61	72,44		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
10		Disparitas prestasi SLB	%	0,06	0,1	1,33	4,51		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
11		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	78,81	85,3	85,21	108,12		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
12		APK SLB	%	49,09	91,9	71,77	146,2		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
13		APK SLB	%	64,11	63,05	63,07	98,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	75,77	80,89	77,46	102,23		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
15		Disparitas prestasi SLB	%	0,01	0,5	0	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
16		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	76,77	94,54	52,29	68,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
17		Disparitas prestasi SLB	%	0,28	0,95	1	28		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
18		APK SLB	%	71,64	139,87	116,33	162,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
19		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	85,5	87,4	85,3	99,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
20		Disparitas prestasi SLB	%	0,11	1,28	1,33	11,28		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
21		APK SLB	%	88,94	14,51	109,69	123,33		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
22		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	79,8	87,21	80,95	101,44		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
23		APK SLB	%	61,08	252,61	187,86	307,56		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
24		Disparitas prestasi SLB	%	0,14	1,45	0,5	28		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
25		Disparitas prestasi SLB	%	0,11	0,45	0,45	24,44		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
26		APK SLB	%	70,09	66,84	66,84	95,36		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
27		Persentase prasarana	%	80,49	80,81	80,81	100,4		CABANG DINAS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sarana SLB sesuai standar							PENDIDIKAN VIII
28		APK SLB	%	66,26	66,68	49,12	74,13		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
29		Disparitas prestasi SLB	%	0,16	0,36	3,17	5,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
30		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	81,65	81,87	78,06	95,6		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
31		Disparitas prestasi SLB	%	0,02	0,95	3,5	0,57		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
32		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	69,57	89,12	100	143,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
33		APK SLB	%	41,65	54,78	13,68	32,85		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
34		Disparitas prestasi SLB	%	0,1	0,2	0	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
35		APK SLB	%	64,94	32,25	25,56	39,36		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
36		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	97,18	91,68	92,42	95,1		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
37		APK SLB	%	66,88	56,98	44,17	66,04		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
38		Disparitas prestasi SLB	%	0,02	0,22	0	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
39		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	84,68	92,18	90,32	106,66		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
40		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	75,03	81,09	80,17	106,85		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41		Disparitas prestasi SLB	%	0,06	0,62	2	3		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
42		APK SLB	%	83,23	97,46	79,99	96,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
43		Disparitas prestasi SMK	%	1,02	0,98	1,9	53,68		Bidang Pembinaan SMK
44		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	86,17	88,88	88,25	102,41		Bidang Pembinaan SMK
45		APK SMK	%	49,46	54,94	49,02	99,11		Bidang Pembinaan SMK
46		Persentase SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	76,44	63,49	65,24	85,35		Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
47		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	77,06	85,5	88,66	115,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
48		APK SMK	%	49,88	46,59	47,2	94,63		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
49		Disparitas prestasi SMK	%	2,55	0,45	5	51		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
50		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	77,86	87,5	87,5	112,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
51		Disparitas prestasi SMK	%	0,81	0,45	0,5	162		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
52		APK SMK	%	33,73	42,87	34,48	102,22		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
53		APK SMK	%	37,33	50,02	41,56	111,33		CABANG DINAS PENDIDIKAN III

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
54		Disparitas prestasi SMK	%	1,81	2	10,67	16,96		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
55		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	76,62	90,17	85,12	111,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
56		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	69,38	85,85	84,75	122,15		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
57		Disparitas prestasi SMK	%	0,31	0,45	0,5	62		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
58		APK SMK	%	42,92	43,92	44,45	103,56		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
59		APK SMK	%	59,24	58,85	54,49	91,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
60		Disparitas prestasi SMK	%	0,87	0,62	8,67	10,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
61		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	77,27	89,79	58,78	76,07		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
62		Disparitas prestasi SMK	%	0,72	0,65	2,67	26,97		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
63		APK SMK	%	51,62	56,04	52,54	101,78		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
64		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	90,09	88,79	87,15	96,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
65		Disparitas prestasi SMK	%	1,78	3,45	6,5	27,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
66		APK SMK	%	73,19	63,25	64,43	88,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
67		Persentase prasarana	%	84,25	92,29	92,17	109,4		CABANG DINAS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sarana SMK sesuai standar							PENDIDIKAN VII
68		Disparitas prestasi SMK	%	0,81	1,45	0	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
69		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	73,99	88,84	88,84	120,07		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
70		APK SMK	%	55,52	50,66	50,66	91,25		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
71		Disparitas prestasi SMK	%	0,96	1,12	4,5	21,33		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
72		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	84,68	90,05	89,61	105,82		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
73		APK SMK	%	44,71	53,96	47,32	105,84		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
74		APK SMK	%	56,97	66,35	53,41	93,75		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
75		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	78,98	88,55	90,81	114,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
76		Disparitas prestasi SMK	%	0,84	0,45	8	10,5		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
77		APK SMK	%	55,64	66,28	50,91	91,5		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
78		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	75,04	89,21	88,11	117,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
79		Disparitas prestasi SMK	%	0,23	0,45	0,5	46		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
80		APK SMK	%	37,78	60,01	56,03	148,31		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81		Disparitas prestasi SMK	%	0,59	1,95	2,67	22,1		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
82		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	80,16	90,64	90,01	112,29		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
83		Disparitas prestasi SMK	%	0,51	0,62	4	12,75		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
84		APK SMK	%	43,58	60,41	51,59	118,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
85		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	78,77	84,6	84	106,64		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
86		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	73,61	73,5	71,48	97,11		Bidang Pembinaan SMA
87		APK SMA	%	28,36	29,2	26,83	94,61		Bidang Pembinaan SMA
88		Disparitas prestasi SMA	%	0,93	0,91	9,82	9,47		Bidang Pembinaan SMA
89		Persentase SMA memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	73,9	61,78	85,71	115,98		Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
90		APK SMA	%	39,46	34,77	35,95	91,1		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
91		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	81,39	76,11	74,5	91,53		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
92		Disparitas prestasi SMA	%	3,62	3,45	34,5	10,49		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
93		Disparitas prestasi SMA	%	0,3	0,95	7,5	4		CABANG DINAS PENDIDIKAN II

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
94		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	65,76	72,93	73,06	111,1		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
95		APK SMA	%	19,05	31,72	26,26	137,85		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
96		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	67,48	63,79	66,63	98,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
97		APK SMA	%	25,54	31,38	26,41	103,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
98		Disparitas prestasi SMA	%	1,44	5,33	5,33	27,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
99		APK SMA	%	23,11	24,3	25,05	108,39		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
100		Disparitas prestasi SMA	%	0,31	0,45	1,5	15,33		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
101		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	71,45	70,37	67,68	94,72		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
102		Disparitas prestasi SMA	%	0,85	1,95	24	3,54		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
103		APK SMA	%	35,36	34,5	33,05	93,47		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
104		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	71,49	66,74	46,05	64,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
105		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	70,2	71,49	76,55	92,65		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
106		Disparitas prestasi SMA	%	0,11	1,28	4	2,75		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
107		APK SMA	%	20,77	25,61	24,57	118,30		CABANG DINAS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									PENDIDIKAN VI
108		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	76,74	74,03	73,74	96,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
109		Disparitas prestasi SMA	%	0,83	9	0,5	166		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
110		APK SMA	%	51,79	46,6	48,05	92,78		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
111		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	78,25	75,9	75,9	97		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
112		APK SMA	%	30,82	29,58	29,58	95,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
113		Disparitas prestasi SMA	%	1,21	5,5	0	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
114		APK SMA	%	20,55	22,89	20,84	101,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
115		Disparitas prestasi SMA	%	0,65	1,1	8	8,13		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
116		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	66,32	76,7	77,57	116,96		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
117		APK SMA	%	24,83	27,46	22,89	92,19		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
118		Disparitas prestasi SMA	%	1,51	5,5	18,5	8,16		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
119		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	68,03	63,37	99,63	146,45		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
120		Disparitas prestasi SMA	%	0,79	0,45	7	11,29		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
121		APK SMA	%	30,71	32,94	27,02	87,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
122		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	83,68	74,5	76,14	90,99		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
123		Disparitas prestasi SMA	%	0,27	1,28	3,33	8,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
124		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	74,16	70,45	68,53	92,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
125		APK SMA	%	19,88	22,32	20,84	104,83		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
126		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	81,94	75,54	71,6	87,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
127		APK SMA	%	26,77	31,33	27,1	101,23		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
128		Disparitas prestasi SMA	%	0,34	4,55	4,67	7,28		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
129		Persentase serapan kurikulum SLB	%	96,71	98,09	100	103,4		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
130		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,71	98,8	100	101,31		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
131		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,81	98,68	100	102,24		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
132		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,91	99,5	100	101,1		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
133		Persentase serapan kurikulum SLB	%	96,61	97,38	120,72	124,96		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
134		Persentase serapan	%	97,78	98,02	100	102,27		CABANG DINAS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kurikulum SLB							PENDIDIKAN VI
135		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,96	99,52	100	101,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
136		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,67	98,53	98,53	100,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
137		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,88	99,12	100	101,13		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
138		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,06	98,4	100	101,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
139		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,83	99,11	98,91	100,08		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
140		Persentase serapan kurikulum SLB	%	96,69	96,93	100	103,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
141		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,01	98,15	100	102,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
142		Persentase serapan kurikulum SMK	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
143		Persentase serapan kurikulum SMK	%	78,66	99,43	99,99	127,12		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
144		Persentase serapan kurikulum SMK	%	80,42	99,64	97,89	121,72		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
145		Persentase serapan kurikulum SMK	%	75,69	98,21	100	132,12		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
146		Persentase serapan kurikulum SMK	%	81,69	99,05	101,87	124,7		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
147		Persentase serapan kurikulum SMK	%	81,02	99,47	100	123,43		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
148		Persentase serapan kurikulum SMK	%	82,22	100	97,38	118,44		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
149		Persentase serapan kurikulum SMK	%	84,95	99,42	99,42	117,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
150		Persentase serapan kurikulum SMK	%	83,16	98,03	100	120,25		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
151		Persentase serapan kurikulum SMK	%	81,45	98,47	99,01	121,56		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
152		Persentase serapan kurikulum SMK	%	78,13	97,68	100	127,99		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
153		Persentase serapan kurikulum SMK	%	80,1	98,94	97,96	122,3		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
154		Persentase serapan kurikulum SMK	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
155		Persentase serapan kurikulum SMA	%	82,11	100	100	121,79		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
156		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	99,99	99,99		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
157		Persentase serapan kurikulum SMA	%	499,21	100	299,88	60,07		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
158		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
159		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
160		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
161		Persentase serapan	%	100	100	100	100		CABANG DINAS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kurikulum SMA							PENDIDIKAN VII
162		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
163		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
164		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	99,99	99,99		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
165		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
166		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
167		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	100	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
168		Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	90,51	100	100	110,49		Bidang Ketenagaan Dikbud
169		Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	84,79	99,92	99,92	117,84		Bidang Ketenagaan Dikbud
170		Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99,35	99,95	99,95	100,6		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Program Pengembangan Kurikulum								
171		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,97	98,5	99,98	102,05		Bidang Pembinaan Diksus
172		Persentase serapan kurikulum SMK	%	80,81	99,02	99,14	122,68		Bidang Pembinaan SMK

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
173		Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	100	99,99	99,99		Bdg Pembinaan SMA
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
174		Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,08	0,07	0,07	87,5		Bidang Ketenagaan Dikbud
175		Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0,5	0,26	0,26	52		Bidang Ketenagaan Dikbud
176		Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,08	0,07	0,07	87,5		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan								
177		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar *)	%	81,13	87,85	86,98	107,21		Bidang Pembinaan Diksus
178		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar *)	%	73,61	73,5	71,48	97,11		Bdg Pembinaan SMA
179		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar *)	%	86,17	88,8	88,25	102,41		Bidang Pembinaan SMK

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 179 target indikator kinerja Urusan Pendidikan, terdapat 96 Indikator berstatus telah Tercapai, 46 Indikator berstatus Akan Tercapai dan 37 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Disparitas Prestasi SLB, SMA dan SMK pada masing-masing Cabang Dinas; APK SLB Cabang Dinas Pendidikan X; APK SLB Cabang Dinas Pendidikan XI; dan Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan selama pandemi Covid 19.

2. Urusan Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 101 indikator kinerja.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	KESEHATAN								
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
1		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM	%	52	74	77	148,08		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2		Persentase UCI desa	%	99,96	99,96	86	86,03		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	74,3	90	90	121,13		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4		Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana < 24 jam	%	100	100	100	100,00		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang	%	52	46	46	88,46		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
6		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan	%	100	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Semarang							Wilayah Semarang
7		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan & penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang	%	74,3	90	90	121,13		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
8		Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	52	42,85	42,85	82,40		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
9		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	100	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
10		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	74.3	57,15	57,15	76,92		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
11		Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang	%	52	43	43	82,69		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
12		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan	%	100	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Magelang							Wilayah Magelang
13		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang	%	74,3	57	57	76,72		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
14		Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten	%	52	43	43	82,40		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
15		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Klaten	%	100	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
16		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	74,3	57	57	76,72		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
17		Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati	%	52	43	43	82,69		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
18		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Pati	%	100	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	74,3	57,14	57,14	76,90		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
20		Persentase penanganan gangguan penglihatan dan pendengaran	%	100	71	82,86	82,86		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
21		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	18,00	17	28,57	158,72		RSUD Dr. Moewardi
22		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	66	100	100	151,52		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
23		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	80	72	72	90,00		RSUD Tugurejo
24		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	90	100	100	111,11		RSUD Tugurejo
25		Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	100	90	90	90,00		RSUD Kelet Donorejo
26		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	15	23	23	153		RSUD Kelet Donorejo
27		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	100	95	100	100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
28		Persentase pemenuhan sarana,	%	95	95	100	78,95		RSJD Dr. Amino Gondohutomo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan							
29		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	95	85	100	105,26		RSJD Surakarta
30		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	95	85	100	105,26		RSJD Surakarta
31		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
32		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	100	70	70	70,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
33		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%	100	63	63	63,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
34		Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	%	100	100	100	100,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
35		Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	100	89,65	96,55	96,55		Bidang Pelayanan Kesehatan
36		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan	%	34	29	29	85,29		Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang	%	82	57,14	57,14	69,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
38		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa	%	82	57,14	69,68	69,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
39		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang	%	80	57,14	57,14	69,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
40		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten	%	80	57,14	57,14	69,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
41		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati	%	82	57,14	57,14	69,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
42		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BKIM	%	82	57,14	65,71	80,13		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
43		Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	100	63	63	63,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
44		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK	%	71,43	57,14	57,14	79,99		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
45		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	100	100,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan
46		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang	%	100	20	71	71,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
47		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	20	75,75	75,75		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
48		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang	%	35	20	23	62,86		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
49		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten	%	35	20	22	62,86		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
50		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati	%	100	20	71	71,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
51		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BKIM	%	35	25	26	74,29		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
52		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BKIM	%	35	25	26	74,29		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
53		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK	%	100	25	71	71,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
54		Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar *)	%	100	93	100	100,00		Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
55		Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja	%	100	71	71	71,00		Bidang Kesehatan Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan olahraga baik							
56		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi & balita	%	80	42,85	17,14	21,43		Bidang Kesehatan Masyarakat
57		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang	%	342,83	62,86	62,86	78,58		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
58		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa	%	80	57,14	57,14	71,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
59		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang	%	80	57,14	57,14	71,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
60		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten	%	80	57,14	57,14	71,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
61		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati	%	80	43	57,14	71,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
62		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	8,42	8,42	21,83	259,26		RSUD Dr. Moewardi
63		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	27	100	100	370,37		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
64		Persentase kegiatan	%	30	100	100	333,33		RSUD Tugurejo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		memenuhi logistik							
65		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	16,84	0	16,84	100,00		RSUD Kelet Donorejo
66		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	100	100	100	100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
67		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	100	97	100	100,00		RSJD Surakarta
68		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	100	100	100	100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
69		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	72,05	81	108,44	150,51		RSUD Dr. Moewardi
70		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	75	75	104,97	139,96		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
71		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	53,69	82,73	74,71	139,15		RSUD Tugurejo
72		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	100	85	64	64,00		RSUD Kelet Donorejo
73		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	39	35	45,5	103,54		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
74		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	35	32	70,23	200,66		RSJD Surakarta
75		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	46	44	63,93	123,57		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
76		Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	%	100	100	100	100,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan
77		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	35	60	83,23	237,80		RSUD Dr. Moewardi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	40	20	38,12	95,30		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
79		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	20	22	110		RSUD Tugurejo
80		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	19	19	19,00		RSUD Kelet Donorejo
81		Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70	70	58,64	62,83		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
82		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	26,98	145,42	145,42		RSJD Surakarta
83		Persentase SDM kesehatan & non kesehatan yang terlatih	%	89	60	88,49	67,42		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
84		Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar	%	100	93	100	100,00		Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman								
85		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yg berlaku	%	100	71	75,75	75,75		Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
86		Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11%	%	45,7	74,28	80	175,05		Bidang Kesehatan Masyarakat
87		Persentase kabupaten/kota	%	71	29	45	63,38		Balai Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang							Masyarakat Wilayah Semarang
88		Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa	%	71	28,57	45	63,38		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
89		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang	%	37,14	14,28	25	67,31		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
90		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten	%	37,14	29	45	121,16		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
91		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati	%	71	29	45	63,38		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
92		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5%	%	37,14	14,28	23	61,93		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
93		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balapkes PAK	%	80	68,57	68,57	85,71		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
94		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan	%	70	70	66,04	94,34		RSUD Dr. Moewardi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemberdayaan masyarakat							
95		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	100	15	15	15		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
96		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	20	181,40	181,40		RSUD Tugurejo
97		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	15	15	15,00		RSUD Kelet Donorejo
98		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta	%	100	70	44	44,00		RSUD Kelet Donorejo
99		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	20	21,94	21,18		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
100		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	95	85	102,43	107,82		RSJD Surakarta
101		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	39,24	60,53	211,08		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :



: Tercapai \geq 100% Target Akhir RPJMD



: Akan Tercapai $99\% \leq$ 60% Target Akhir RPJMD



:Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD

NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 101 target indikator kinerja Urusan Kesehatan, terdapat 43 Indikator berstatus Telah Tercapai, 52 Indikator Akan Tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi & balita dikarenakan pandemi Covid 19 yang membatasi pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti posyandu serta hampir semua kab/kota mengalami kenaikan kasus kematian ibu dan anak
2. Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo dikarenakan pandemi Covid 19 sehingga terdapat penundaan pelaksanaan diklat
3. Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dikarenakan pandemi Covid 19 dengan adanya kebijakan PPKM sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan bhakti sosial dimasyarakat.
4. Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet dikarenakan pandemi Covid 19 yaitu pelaksanaan PPKM sehingga pelaksanaan *follow up* pasien kusta tidak menjangkau di 35 kab kota, namun prioritas di wilayah kerja RSUD Kelet.
5. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta RSUD Kelet Donorejo dikarenakan pandemi Covid 19 yaitu pelaksanaan PPKM sehingga pelaksanaan *follow up* pasien kusta tidak menjangkau di 35 kab kota, namun prioritas di wilayah kerja RSUD Kelet.
6. Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dikarenakan pandemi Covid 19 dengan adanya kebijakan PPKM sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan bhakti sosial dimasyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 66 indikator kinerja.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								
1		Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	84,5	82,6	82,6	97,75		Bidang Irigasi dan Air Baku
2		Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	65,8	61,4	61,5	93,47		Bidang Irigasi dan Air Baku

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3		Persentase prasarana sarana air baku yg dipelihara di wil Balai PSDA Pemali Comal	%	100	30	30	30		Balai PSDA Pemali Comal
4		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	90	90	90		Balai PSDA Pemali Comal
5		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	15	15	15		Balai PSDA Bodri Kuto
6		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	90	90	90		Balai PSDA Bodri Kuto
7		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	65	65	65		Balai PSDA Serang Lusi Juana
8		Persentase daerah irigasi yg dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	70	70	70		Balai PSDA Serang Lusi Juana
9		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	70	70	70		Balai PSDA Bengawan Solo
10		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	35	35	35		Balai PSDA Bengawan Solo
11		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo	%	100	40	40	40		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bogowonto Luk Ulo							
12		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	60	60	60		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
13		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	57,05	57,05	57,05		Balai PSDA Serayu Citanduy.
14		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	30	30	30		Balai PSDA Serayu Citanduy.
15		Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	23,83	18,75	18,75	78,68		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
16		Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,36	52,23	52,29	99,87		Bidang Sungai, Bendungan & Pantai
17		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	95	95	95		Balai PSDA Pemali Comal
18		Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	70	70	70		Balai PSDA Pemali Comal
19		Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	75	75	75		Balai PSDA Bodri Kuto
20		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	80	80	80		Balai PSDA Bodri Kuto

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	95	95	95		Balai PSDA Serang Lusi Juana
22		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	85	85	85		Balai PSDA Bengawan Solo
23		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	90	90	90		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
24		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	90	90	90		Balai PSDA Serayu Citanduy.
25		Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	100	28,3	28,3	28,3		Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
26		Persentase akses air minum perkotaan	%	94,15	90,15	90,32	95,93		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
27		Persentase akses air minum perdesaan	%	83,3	79,8	83,42	100,14		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Program Pengelolaan dan Pengembangan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sistem Air Limbah								
28		Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	91,5	91,7	88,67	96,91		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan Gedung								
29		Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	15,23	12,42	12,42	81,55		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan Lingkungannya								
30		Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar *)	%	15,23	12,42	12,42	81,55		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan								
31		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	40,13	37,92	38,98	97,13		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
32		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan	%	48,35	43,18	44,22	92,74		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Wilayah Barat							
33		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	88,43	95,39	95,39	107,87		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
34		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	86,09	83,79	83,79	97,33		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
35		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	96,65	94,52	94,52	97,8		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
36		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,44	85,45	85,45	96,62		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
37		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	91,75	95,9	95,9	104,52		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
38		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	83,6	81,29	81,29	97,24		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
39		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	97,89	94,63	94,63	96,67		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
40		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	85,46	83,68	83,68	97,92		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
41		Persentase panjang	%	93,6	91,42	91,42	97,67		Balai Pengelolaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang							Jalan Wilayah Magelang
42		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	92,4	95,43	95,53	103,39		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
43		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	97,87	91,52	91,52	93,51		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
44		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,85	92,4	92,4	97,42		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
45		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	88,33	89,86	89,86	101,73		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
46		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	93,77	90,88	90,88	96,92		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
47		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	84,41	77,68	77,68	92,03		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
48		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,13	88,03	88,03	96,6		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
49		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ	%	94,73	92,24	92,24	97,37		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Wilayah Surakarta							
50		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	96,05	91,63	91,63	95,4		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
51		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	100	57,06	57,06	57,06		Balai Pengujian dan Peralatan
52		Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100	80,45	92,8	92,8		Balai Pengujian dan Peralatan
53		Persentase panjang jalan yang dileger	%	100	97,59	97,59	97,59		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
54		Persentase database jalan, jembatan, dan kecipta-karyaan yg termutakhirkan	%	100	100	100	100		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi								
55		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19,09	14,13	14,13	74,02		Balai Jasa Konstruksi
56		Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar *)	%	15,23	12,42	12,42	81,55		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
57		Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang	%	80	74,95	75	93,75		Bidang Penataan Ruang
58		Persentase rencana tata ruang kabupaten/kot a yang mendapatkan rekom Gub	%	100	43	50,14	50,14		Bidang Penataan Ruang
59		Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	%	77,5	73,63	73,67	95,06		Bidang Penataan Ruang
60		Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	%	33,35	15,32	8,65	25,94		Bidang Penataan Ruang
61		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	57,14	57,14	57,14		Balai PSDA Pemali Comal
62		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100	100		Balai PSDA Bodri Kuto
63		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	60	60	60		Balai PSDA Serang Lusi Juana
64		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	62,21	62,21	62,21		Balai PSDA Bengawan Solo
65		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo	%	100	50	50	50		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bogowonto Luk Ulo							
66		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100	100		Balai PSDA Serayu Citanduy.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 66 target indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 8 Indikator berstatus Telah Tercapai, 46 Indikator Akan Tercapai dan 12 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

Untuk permasalahan terkait dengan penundaan pekerjaan pemeliharaan dan perencanaan teknis adalah sebagai berikut :

1. Persentase prasarana sarana air baku yg dipelihara di wil Balai PSDA Pemali Comal;
2. Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto;
3. Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo;
4. Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo;
5. Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy;
6. Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy;
7. Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti.

Sedangkan permasalahan terkait perubahan regulasi adalah sebagai berikut:

8. Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gubernur;
9. Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun;
10. Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal;
11. Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo;

Adapun permasalahan pada indikator Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan di sebabkan oleh adanya perubahan data dasar peralatan kebinamargaan pasca penarikan aset alat berat milik Kementerian PU PR.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Program Pengembangan Perumahan								
1		Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	12,5	3,66	3,66	29,28		Bidang Perumahan
2		Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	37,24	8,99	9,44	25,35		Bidang Perumahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)								
3		Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	32,95	13,79	24,12	73,20		Bidang Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4		Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan	%	100	100	100	100		Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kawasan permukiman							

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 4 target indikator kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu:

1. Persentase rumah layak huni yang disediakan dikarenakan terdapat beberapa BNBA calon penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana sudah tertangani dari sumber pembiayaan lain sehingga tidak dapat direalisasikan dengan APBD provinsi.
2. Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani dikarenakan belum optimalnya pemenuhan kuota usulan BNBA dari beberapa desa yang mendapat alokasi bantuan penanganan RTLH disebabkan terkendala pemenuhan persyaratan administrasi serta kemampuan swadaya dari calon penerima bantuan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja.

Tabel 2. 7
Tabel Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1		Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100	100		Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
2		Persentase kabupaten/kota rawan	%	85	85	85	100		Bidang Ketertiban Umum & Ketentrama

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tramtib yang kondusif							n Masyarakat
3		Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya	%	12,52	2,66	5,39	43,05	▼	Bidang Pembinaan Masyarakat
4		Persentase masyarakat yang meningkatkan kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas	%	12,16	5,07	6,98	57,4	▼	Bidang Pembinaan Masyarakat
5		Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya	%	2,69	0,22	0,35	13,01	▼	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masy
	Program Penanggulangan Bencana								
6		Persentase penurunan risiko bencana	%	8	1	1	12,5	▼	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7		Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	100	100	●	Bidang Penanganan Darurat
8		Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	100	100	●	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9		Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	100	100	100	●	Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 9 target indikator kinerja Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai dan 4 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu : Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya, Persentase masyarakat

yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas, Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya dikarenakan (tiga) indikator program yang mengalami perubahan (penurunan) pada target, faktor alasan perubahan yaitu adanya Covid-19 dan *refocusing* anggaran sehingga terjadi penyesuaian target pada RKPD. Kemudian pada indikator Persentase penurunan risiko bencana dikarenakan terbatasnya pelaksanaan kegiatan secara tatap muka/langsung disebabkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagian besar kegiatan di Sekretariat BPBD adalah sosialisasi dan gladi untuk masyarakat di daerah rawan bencana.

6. Urusan Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
6	SOSIAL								
	Program Pemberdayaan Sosial								
1		Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS	%	34,38	15,84	15,84	46,07		Bidang Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								
2		Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif *)	%	1,82	1,09	1,09	59,89		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial								
3		Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti	%	4,1	2,46	2,46	60		Bidang Rehabilitasi Sosial
4		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,15	0,09	0,09	60		Panti Pelayanan Sos. PGOT Mardi Utomo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
5		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,16	0,09	0,09	56,25		Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri
6		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,18	0,11	0,11	61,11		Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya
7		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,22	0,13	0,13	59,09		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu
8		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,13	0,08	0,08	61,54		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring
9		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,13	0,08	0,08	61,54		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede
10		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,16	0,1	0,1	62,5		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo
11		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,11	0,06	0,06	54,55		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo
12		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,15	0,09	0,09	60		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan
13		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,21	0,12	0,12	57,14		Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama
14		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,23	0,14	0,14	60,87		Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha
15		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,17	0,1	0,1	58,82		Panti Pelayanan Sos. Anak Dharma Putera
16		Persentase keberfungsian	%	0,14	0,08	0,08	57,14		Panti Pelayanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		sosial PMKS Dalam Pant							Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo
17		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,21	0,13	0,13	61,9		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata
18		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,09	0,06	0,06	66,67		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran
19		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,28	0,17	0,17	60,71		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo
20		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,07	0,04	0,04	57,14		Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu
21		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,18	0,11	0,11	61,11		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti
22		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,14	0,08	0,08	57,14		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara
23		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,22	0,13	0,13	59,09		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata
24		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,16	0,09	0,09	56,25		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi
25		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,23	0,14	0,14	60,87		Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
26		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	0,07	0,04	0,04	57,14		Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mera Demak
27		Persentase keberfungsian	%	0,07	0,04	0,04	57,14		Panti Pelayanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		sosial PMKS Dalam Panti							Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali
28		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,08	0,05	0,05	62,5		Panti Pelayanan Sosial Anak Sukomulyo Tegal
29		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,12	0,07	0,07	58,33		Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso Salatiga
30		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	0,11	0,07	0,07	63,64		Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri Magelang
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
31		Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi	%	0,29	0,14	0,17	48,28		Bidang Penanganan Fakir Miskin
32		Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	%	1,82	1,09	1,09	59,89		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
33		Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti *)	%	4,31	2,46	2,46	60		Bidang Rehabilitasi Sosial
	Program Penanganan Bencana								
34		Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif *)	%	1,82	1,09	1,09	59,89		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
35		Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS *)	%	34,38	15,84	15,84	46,07		Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 35 target indikator kinerja Urusan Sosial terdapat 16 indikator akan tercapai dan 19 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (Bidang Pemberdayaan Sosial)
2. Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (Bidang Linjamsos)
3. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Mandiri)
4. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSEP Ngudi Rahayu)
5. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSDN Pendowo)
6. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSW Wanodyatama)
7. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Dharma Putera)
8. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSLU Adi Yuswo)
9. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Tawangmangu)
10. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSLU Bisma upakara)
11. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSLU Bojong Bata)
12. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSDN Penganthi)
13. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Kasihmesra)
14. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Pamardi Utomo)
15. Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantli (PPSA Woro Wiloso)
16. Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi (Bidang Penanganan Fakir Miskin)
17. Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (Bidang Linjamsos)
18. Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif *) (Bidang Linjamsos)
19. Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS *) (Bidang Dayasos).

19 indikator dengan status capaian perlu upaya keras dikarenakan distribusi target pada tahun ke-3 dibawah 60%.

D. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1		Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8,19	4,76	5,34	65,2		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
2		Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,5	2,5	3,54	9,19		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
3		Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,2	0,81	0,81	19,29		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
4		Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,25	0,75	0,77	34,22		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
5		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di	%	1,12	1,12	1,85	165,18		Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		bidang industry							
6		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	6,67	7,62	8,16	122,34		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
7		Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas/ kewirausahaan	%	13,04	4,87	5,4	41,41		Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
8		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%	16	13,2	46,59	291,19		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
	Program Penempatan Tenaga Kerja								
9		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	71,01	20	50,63	71,3		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
10		Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68	43,18	43,42	63,85		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Program Hubungan Industrial								
11		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	87,7	87,41	97,6	111,29		Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial HI JAMSOS

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12		Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43	15,69	16,02	37,26		Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial HI JAMSOS
13		Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	47,61	45,65	49,63	104,24		Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial HI JAMSOS
14		Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	24,15	23,42	24,36	100,87		Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial HI JAMSOS
15		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96	88	89,74	93,48		Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan								
16		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	82,97	92,09	89,51	92,69		Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
17		Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,14	25,54	25,55	97,74		Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 17 target indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja 6 indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai, dan 5 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase kenaikan Lembaga pelatihan terakreditasi dikarenakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang diusulkan dari Kabupaten/Kota untuk mengikuti akreditasi kurang memenuhi persyaratan dan memahami standar akreditasi.
2. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas dikarenakan belum terbentuknya Lembaga Produktivitas Daerah (LPD) menunggu terbitnya Perpres sebagai tindak lanjut dari Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).
3. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi dikarenakan biaya sertifikasi kompetensi yang tinggi.
4. Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas/kewirausahaan dikarenakan adanya perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 sehingga pelatihan tenaga kerja di sektor tembakau tidak dilaksanakan.
5. Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, dan pemerintah memberikan kebijakan perusahaan diberikan kesempatan untuk menata kembali usahanya dengan tetap melaksanakan ketentuan normatif dan mengupayakan tanpa terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan bahwa struktur skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan sebelumnya dimana pengusaha wajib menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, pendidikan, masa kerja, kompetensi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam menyusun struktur skala upah menjadi terhambat karena belum terbitnya petunjuk teknis penyusunan struktur skala upah.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
1		Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi	%	30	30	30	100		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pelaku usaha ekonomi							
2		Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia *)	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Program Perlindungan Perempuan								
3		Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,64	5,76	5,11	110,37		Bidang Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga								
4		Rasio korban kekerasan terhadap perempuan *)	Per 100.000	5,64	5,76	5,11	110,37		Bidang Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan
5		Rasio korban kekerasan terhadap anak *)	Per 100.000	12,36	12,44	11,02	112,16		Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak
6		Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia *)	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak								
7		Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
8		Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya,	%	91,43	91,43	100	109,37		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan tingkat nindya							
9		Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia *)	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Program Perlindungan Khusus Anak								
10		Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,36	12,44	11,02	112,16		Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 10 target indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak keseluruhan indikator telah tercapai.

3. Urusan Pangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja.

Tabel 2. 11
Tabel Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
3	PANGAN								
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
1		Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	Gram/kapita/hari	107,8	88	98,17	91,07		Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
2		Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	4020	3.735,00	3736	92,94		Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan
3		CV harga pangan strategis beras	%	5	5	0,57	877,19		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
4		CV harga pangan strategis bawang merah	%	25	27	9,47	263,99		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
5		CV harga pangan strategis cabai	%	40	42	17,01	235,16		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
6		Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	100	100	100	100		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
7		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	Angka	1	0,6	0,6	60		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
8		Rasio konsumsi pangan local	Angka	0,15	0,13	0,16	106,67		Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan
9		Konsumsi pangan beras	kg/kapita/tahun	97,8	98,5	88,48	110,53		Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan
10		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapita/tahun	87	85	86,88	99,86		Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan
11		Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapita/tahun	34	32	33,51	98,56		Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan
	Program Penanganan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	Kerawanan Pangan								
12		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	85	85	85	100		Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan								
13		Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	90	90	90	100		Bidang Keamanan Pangan
14		Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	%	80	80	98,69	123,36		Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 14 target indikator kinerja Urusan Pangan terdapat 9 indikator tercapai dan 5 indikator akan tercapai.

4. Urusan Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PERTANAHAN								
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum								
1		Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat	%	100	100	222,96	222,96		Bidang Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan pembangunan untuk kepentingan umum							
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan								
2		Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	222,96	222,96		Bidang Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee								
3		Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	222,96	222,96		Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 3 target indikator kinerja Urusan Pertanahan keseluruhan indikator telah tercapai.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 13 indikator kinerja.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
5	LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup								
1		Persentase rekomendasi lingkungan hidup *)	%	100	100	100	100		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2		Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	5	5	50		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
3		Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	5	5	50		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
4		Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	100	100	100		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)								
5		Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8,57	5,71	5,71	66,63		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
									dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
6		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	0,09	0,09	0,09	100		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)								
7		Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	100	100		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
8		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
9		Persentase rekomendasi lingkungan hidup*)	%	100	100	100	100		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
10		Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara*)	%	8,57	5,71	5,71	66,63		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
									Lingkungan Hidup
11		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat*)	%	25	15	15	60		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								
12		Persentase pengaduan yang ditangani*)	%	100	100	100	100		Bidang Penyuluhan, Penegakan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Program Pengelolaan Persampahan								
13		Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara*)	%	8,57	5,71	5,71	66,63		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 13 target indikator kinerja Urusan Lingkungan Hidup terdapat 7 indikator tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase sungai yang meningkat kualitasnya pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup dikarenakan penyesuaian belanja mendasarkan Surat Edaran Nomor 900/0003693 tentang Percepatan Penyesuaian APBD dan Pembatasan Belanja TA. 2021 serta adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam koordinasi pengumpulan data lintas sektor.

6. Urusan Adiministrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan Urusan Adiministrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Adiministrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
6	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Program Pendaftaran Penduduk								
1		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%	100	95	98,18	98,18		Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
	Program Pencatatan Sipil								
2		Tingkat partisipasi 0-18 thn memiliki akte kelahiran	%	100	92	95,15	95,15		Bidang Fasilitasi Lay Adminduk
	Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan								
3		Cakupan OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	50	75	75		Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 3 target indikator kinerja Urusan Adiministrasi Kependudukan daan Pencatatan Sipil keseluruhan indikator berstatus akan tercapai.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Program Penataan Desa								
1		Persentase rekom. raperda/ raperbup yang berkaitan dg desa	%	100	100	100	100		Bidang Penataan Desa
2		Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosbud masy	%	100	77,92	96,1	96,1		Bidang Penataan Desa
3		Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%	40,24	12,92	13,66	33,96		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
4		Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	4,34	2,7	12,86	296,46		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
5		Persentase jumlah rekom Gub thd permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa								
6		Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	100	74	74	74		Bidang Pengembangan & Kerjasama Desa
7		Persentase desa yang mengembangkan BKAD	%	6,68	2,86	3,01	45,02		Bidang Pengembangan &

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kerjasama Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat								
8		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yg difasilitasi	%	71,61	50,28	68,05	95,03		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
9		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yg meningkat kapasitasnya	%	3,55	2,35	2,85	80,28		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 9 target indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 3 indikator tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras. Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu

1. Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa dikarenakan Pemasayarakatan SID di Jawa Tengah dibutuhkan beberapa kegiatan pendukung seperti Bintek, *Updating* Aplikasi, serta penjajakan kerjasama dengan beberapa pihak. Adanya kondisi pandemi Covid-19 dan pemrioritasan pendanaan sehingga kegiatan belum dapat dicapai secara maksimal.
2. Persentase desa yang mengembangkan BKAD dikarenakan dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 dan pemrioritasan pendanaan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana								
1		Persentase provinsi dan kabupaten/ kota yg memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%	41,67	11,42	19,44	46,65		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2		Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
3		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	30	26,39	28,42	94,73		Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
4		Unmetneed KB	%	10,75	12,66	14,29	75,23		Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
5		Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif *)	%	100	100	100	100		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
6		Persentase kelompok tribina yang aktif	%	89,3	85,57	114,46	128,17		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
7		Persentase UPPKS yang aktif	%	90,2	68,25	112,61	128,84		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
8		Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	%	100	60	60	60		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 8 target indikator kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai dan 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dikarenakan sebagian besar kabupaten/kota masih dalam proses menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar acuan kebijakan pengendalian penduduk sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

9. Urusan Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	PERHUBUNGAN								
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
1		Persentase fasilitas perlongkapan jalan terpasang	%	52,34	23,86	25,06	47,88		Bidang Lalu Lintas
2		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	30	35	70		Bidang Lalu Lintas
3		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	76,92	46,15	53,85	70,01		Bidang Lalu Lintas
4		Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18,52	3,89	3,89	21		Bidang Lalu Lintas
5		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,68	4,87	5,14	90,49		Bidang Angkutan Jalan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	43,21	39,56	41,46	95,95		Bidang Angkutan Jalan
7		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66,43	64,7	65,88	99,17		Bidang Angkutan Jalan
8		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42,86	28,57	28,57	66,66		Bidang Angkutan Jalan
9		Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%	94,45	85,58	85,63	90,66		Bidang Angkutan Jalan
10		Persentase terminal Bus Tipe B sesuai standar pelayanan	%	43,75	20,31	21,88	50,01		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
11		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,51	50,15	51,59	98,25		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
12		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan	%	31,25	18,75	21,88	70,02		Balai Pengelola Sarana Prasarana

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A							Perhubungan Wilayah I Kelas A
13		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52,03	48,99	50,28	96,64		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
14		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	62,5	37,5	43,75	70		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
15		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79,53	78,08	79,26	99,66		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
16		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,46	15,38	19,23	50		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
17		Persentase Pembaharuan izin AKDP yg berbadan hukum Balai	%	83,55	82,49	83,77	100,26		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A							Wilayah VI Kelas A
18		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34,48	17,24	20,69	60,01		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
19		Persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34,85	31,92	31,92	91,59		Balai Transportasi Jawa Tengah
	Program Pengelolaan Pelayaran								
20		Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	43,28	40,86	47,39	109,5		Bidang Pelayaran
21		Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	75	25	25	33,33		Bidang Pelayaran
22		Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	87,79	64,43	60,67	69,11		Balai Transportasi Jawa Tengah
	Program Pengelolaan Penerbangan								
23		Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur	%	100	33,33	33,33	33,33		Bidang Jaringan Transportasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		transportasi strategis							dan Perkeretaapian
	Program Pengelolaan Perkeretaapian								
24		Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45,45	9,09	9,09	20		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :



: Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD



: Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD



:Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD

NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 24 target indikator kinerja Urusan Perhubungan terdapat 2 indikator tercapai, 15 indikator akan tercapai dan 7 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase terminal Bus Tipe B sesuai standar pelayanan;
2. Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api;
3. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang;
4. Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A;
5. Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang;
6. Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis; dan
7. Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi *Passing Grade* pemahaman keselamatan jalan

Ketidak tercapaian 7 indikator urusan Perhubungan dikarenakan :

1. Prioritas Tahun 2021 dilakukan untuk penanganan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2020 yaitu antara lain peningkatan Terminal Tipe B 6 Lokasi (Madureso, Purbalingga, Purwodadi, Pilangsari, Gagakrimang dan Penggaron); Pembangunan Terminal Tipe B di 1 Lokasi (Kutoarjo), pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Perlintasan Sebidang JPL 251 130+530 Kabupaten Klaten; realokasi anggaran pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi; Penanganan daerah rawan kecelakaan; Pembangunan plengsengan dermaga sungai;
2. Fasilitas proyek strategis Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Perpres 79/2019 tidak dilaksanakan dikarenakan pemprioritasan kegiatan untuk penanganan dan pemulihan dampak Pandemi Covid-19.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penundaan kegiatan Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Program Pengelolaan Komunikasi Publik								
1		Nilai survei kepuasan komunikasi publik	%	85	71	80,88	95,15		Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
2		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	80	60	60,00	75		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
3		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	%	85	65	65,00	76,47		Bidang E-Government

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 3 target indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika yang semuanya berstatus akan tercapai.

11. Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	KOPERASI DAN UKM								
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi								
1		Persentase koperasi aktif	%	85,19	65	72,96	85,64		Bidang Pengawasan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								
2		Persentase koperasi sehat	%	27,15	22	13,06	48,1		Bidang Pengawasan
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian								
3		Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil	%	83	80	99,13	119,43		Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi								
4		Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi	%	66,2	2,5	2,68	4,05		Bidang Kelembagaan
5		Persentase koperasi provinsi berkualitas	%	76,5	54	94,00	122,88		Bidang Kelembagaan
	Program Pemberdayaan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)								
6		Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan	%	32,14	27,85	31,61	98,35		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
7		Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yg dibina	%	56,48	1,22	1,28	2,27		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
8		Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina	%	74,93	6,68	0,22	0,29		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
	Program Pengembangan UMKM								
9		Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	%	29,92	8,73	7,81	26,10		Bidang Bina Usaha
10		Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM	%	6,4	3,84	0	0		Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 10 target indikator kinerja Urusan Koperasi dan UKM terdapat 2 Indikator berstatus telah Tercapai, 2 Indikator Akan Tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase koperasi sehat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat menyebabkan banyak koperasi yang mengalami penurunan kinerja, baik usaha maupun kelembagaannya (masih adanya beberapa KSP/USP yang belum mengadakan Rapat Anggota Tahunan/RAT meskipun sudah ada kebijakan RAT dapat dilakukan secara *daring*, sehingga penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilakukan).

2. Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak anggota koperasi yang terpaksa berhenti sebagai anggota karena kesulitan dalam melakukan pembayaran simpanan wajib. Selain itu, banyak koperasi menahan diri untuk tidak membuka kantor cabang baru dan tidak melayani keanggotaan baru selama masa pandemi, selain itu adanya kebijakan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga menyebabkan koperasi tidak bisa buka cabang baru dan tidak bisa melayani anggota baru.
3. Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina dikarenakan penurunan daya beli masyarakat dan permintaan terhadap produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja koperasi dan UKM. Selain itu, koperasi dan UMKM banyak yang tidak bisa menjalankan usahanya selama PPKM Darurat dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja koperasi dan UKM sebagai langkah akhir dalam mempertahankan keberlangsungan usaha pada masa pandemi COVID-19.
4. Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina dikarenakan penurunan daya beli masyarakat dan permintaan terhadap produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga berdampak terhadap penurunan omset Koperasi dan UKM
5. Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina dikarenakan penurunan omset KUKM yang dibina selama masa pandemi Covid-19 sehingga berdampak terjadinya penurunan profit yang diterima.
6. Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM sebagai dampak terbatasnya aktivitas masyarakat menyesuaikan penerapan kebijakan PPKM.

12. Urusan Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	PENANAMAN MODAL								
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
1		Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan	%	80	70	80,00	100,00		Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	Program Promosi								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanaman Modal								
2		Rasio jumlah ijin usaha dan /atau izin komersial/izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal	%	24	10	29,72	123,83		Bidang Promosi PM
3		Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jml kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM	%	26	10	10,00	38,46		Bidang Promosi PM
	Program Pelayanan Penanaman Modal								
4		Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	95	93	94,67	99,65		Bidang Pelayanan Perizinan
5		Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	93	91	100,00	107,53		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
6		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00	100,00		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
7		Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	15	82,07	238,33		Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
	Program Pengelolaan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
8		Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	%	90	60	114,19	126,88		Bidang Pengelola Data dan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 8 target indikator kinerja Urusan Penanaman Modal terdapat 6 Indikator berstatus telah Tercapai, 1 indikator Akan tercapai dan 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM dikarenakan dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang berimbas pada produksi barang beberapa Usaha Besar dan Usaha Kecil, sehingga para pelaku Usaha Besar sementara waktu membatasi upaya kemitraan. Selain itu, pelaku UKM belum bisa memenuhi permintaan barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Usaha Besar dikarenakan keterbatasan penggunaan teknologi, kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan permodalan pelaku UKM.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja urusan Kepemudaan dan olahraga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	100	40,5	40,50	40,50	▼	Bidang Kepemudaan
2		Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	16,3	2,27	2,27	13,93	▼	Bidang Kepemudaan
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan								
3		Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	45	15	15,00	33,33	▼	Bidang Keolahragaan
4		Persentase capaian even olahraga rekreasi	%	100	30	30,00	30,00	▼	Bidang Keolahragaan
5		Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	%	63,9	15	15,00	23,47	▼	Bidang Keolahragaan
6		Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	15	9,19	9,19	61,27	▶	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
7		Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	50	50,00	50,00	▼	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 7 target indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 1 Indikator berstatus akan tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras.

Adapun 6 Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase capaian kapasitas kepemudaan; Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi olahraga; Persentase capaian even olahraga rekreasi; Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten dikarenakan kegiatan bersifat pengumpulan massa, sehingga dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, maka kegiatan seperti seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA, pemuda pelopor, kecintaan keamanan, dan Kapal Pemuda Nusantara dilakukan penundaan.
2. Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik dikarenakan pada Tahun 2019 tidak dilaksanakan pembangunan fisik pada Kawasan Olahraga Jatidiri disebabkan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

14. Urusan Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	STATISTIK								
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
1		Persentase badan publik yang terbuka	%	100	83	83	83		Bidang Statistik
2		Persentase ketersediaan data sektoral	%	100	89	89	89		Bidang Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 2 target indikator kinerja Urusan Statistik keseluruhan Indikator berstatus akan tercapai.

15. Urusan Persandian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	PERSANDIAN								
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
1		Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80	%	100	50	50	50		Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 1 target indikator kinerja Urusan Persandian yaitu Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 berstatus perlu upaya keras dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang keamanan informasi (*Computer Security Incident Response Team Agent*) dan belum optimalnya pemahaman pentingnya keamanan informasi dan data berbasis web.

16. Urusan Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja.

Tabel 2. 24
Capaian kinerja Urusan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	KEBUDAYAAN								
	Program Pengembangan Kebudayaan								
1		Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani	%	37,84	30,4	31,2	82,45		Bidang Pembinaan Kebudayaan
2		Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	%	80	80	80	100		Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional								
3		Persentase jenis budaya yang terlayani	%	6,82	5,14	5,68	83,28		Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah								
4		Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,42	0,36	0,36	85,71		Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya								
5		Persentase status cagar budaya	%	21,89	19,6	22,1	100,96		Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6		Survei Kepuasan Pengunjung Museum	%	88,7	89,12	89,6	101,01		Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 6 target indikator kinerja Urusan Kebudayaan terdapat 3 Indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus akan tercapai.

17. Urusan Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	PERPUSTAKAAN								
	Program Pembinaan Perpustakaan								
1		Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	%	100	40	52,86	52,86		Bidang Pengembangan Perpustakaan
2		Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan	%	100	60	73,33	73,33		Bidang Pengembangan Perpustakaan
3		Persentase ketersediaan	%	100	32,97	51,75	51,75		Bidang Pengelolaan Perpustakaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		bahan pustaka							
4		Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	100	60	60,00	60,00		Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 4 target indikator kinerja Urusan Perpustakaan terdapat 2 indikator akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan dan Persentase ketersediaan bahan pustaka dikarenakan kebijakan pemrioritasan kegiatan untuk pemulihan dampak Pandemi COVID-19.

18. Urusan Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	KEARSIPAN								
	Program Pengelolaan Arsip								
1		Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	100	64	64	64		Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
2		Persentase pengelolaan arsip	%	100	60	70,56	70,56		Bidang Pengelolaan dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pelestarian Arsip
	Program Perizinan Penggunaan Arsip								
3		Persentase pengunjung arsip	%	100	32,18	81,29	81,29		Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 3 target indikator kinerja Urusan Kearsipan keseluruhan indikator berstatus akan tercapai.

E. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 27 indikator kinerja.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	URUSAN PILIHAN								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
1		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang	%	25	1	1,00	4,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)							Selatan Kelas A
2		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	25	2	2,00	8,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
3		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	25	2	2,00	8,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
4		Persentase peningkatan produksi garam	%	25	5	-29,85	-119,40		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
5		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30	1	896,00	2.986,67		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
6		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	75	2,5	2,50	3,33		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								
7		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.172.401,92	497.833	330.293,06	15,20		Bidang Perikanan Tangkap
8		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	100	100	100,00	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemtoyong	%	100	90,91	89,20	89,20		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong Kelas B
10		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	63,64	72,73	88,89		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
11		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	100	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
12		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	81,82	81,82	50,00	61,11		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
13		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	100	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kls A
14		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	81,82	100,00	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
15		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
16		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63,54	54,55	54,55	85,85		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kls B
17		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	100	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
18		Persentase ketercapaian	%	100	100	100,00	100,00		Pelabuhan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan							Pantai Larangan Kelas B
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
19		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100,00	100,00		Balai Lab. Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
20		Persentase peningkatan produksi benih	%	25	10	15,00	60,00		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
21		Produksi perikanan budidaya	Ton	2.567.254,74	515.932,09	516.369,07	79,63		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
22		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	2	6	6,00	33,33		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
23		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	2	6	6,00	33,33		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
24		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan	%	2	6	6,00	33,33		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah							
25		Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti	%	5	3	3,00	60,00		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
26		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	50	15	15,00	30,00		Balai Pengujian Mutu Hsl Perikanan Kelas A
27		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	25	15	15,00	60,00		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 27 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 5 indikator tercapai, 12 indikator akan tercapai dan 10 Indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya di Wilayah Barat dikarenakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan yang substratnya cocok untuk penanaman mangrove yang secara hukum lahan tersebut milik negara untuk ditanami sesuai kewenangan provinsi yaitu antara 0 sampai dengan 12 mil ke arah laut dari garis pantai. Selain itu lahan yang dapat ditanami mangrove, luasannya sedikit, dan tidak berbentuk hamparan;
2. Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya di Wilayah Selatan dikarenakan untuk wilayah selatan difokuskan pada penanaman rhizophora dan cemara. Ke depan diusulkan adanya kajian pemetaan potensi kawasan mangrove di pesisir Selatan sehingga bisa diketahui lokasi serta luas lahan yang akan dilakukan konservasi dan rehabilitasi;
3. Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya di Wilayah Timur dikarenakan diprioritaskan untuk penanganan kegiatan lainnya, sehingga dilakukan percepatan dengan melakukan koordinasi

- beberapa lembaga, perusahaan dan OPD terkait yang juga melakukan penanaman mangrove di beberapa daerah wilayah kerja cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur;
4. Persentase peningkatan produksi garam dikarenakan terjadinya musim kemarau basah yang ditandai dengan tingginya curah hujan selama beberapa waktu menyebabkan mayoritas petambak garam hanya dapat memproduksi garam dalam jumlah sedikit dan bahkan tidak dapat memproduksi;
 5. Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif dikarenakan revisi dokumen penetapan kawasan konservasi menyesuaikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 belum selesai/masih dalam proses persetujuan, dokumen usulan penetapan kawasan konservasi telah selesai dilakukan pembahasan, dan proses permohonan persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan sudah pada tahapan pengajuan surat Gubernur;
 6. Produksi perikanan tangkap dikarenakan terjadinya musim gelombang (musim barat) yang cukup lama sehingga nelayan terkendala dalam penangkapan ikan, perlambatan aktivitas melaut oleh nelayan karena adanya perubahan dari alat tangkap cantrang menjadi jaring tarik berkantong, serta perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (wilayah pantai selatan, pantai utara timur dan pantai utara barat Jawa Tengah) dikarenakan masih diperlukan upaya pembinaan kepada *stakeholder* kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan perundangan yang berlaku;
 8. Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu dikarenakan masih sulitnya pemenuhan persyaratan mutu hasil perikanan oleh unit pengolah skala mikro kecil yang mengakibatkan masih banyak pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang enggan untuk sertifikasi kelayakan mutu hasil perikanan serta pasar/masyarakat yang masih belum memberikan pilihan utama pada produk olahan hasil perikanan yang telah memenuhi kelayakan mutu.

2. Urusan Pariwisata

Kinerja penyelenggaran Urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	PARIWISATA								
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
1		Persentase peningkatan	%	78,26	21,73	21,73	27,77		Bidang Pengem-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP							bangan Destinasi Pariwisata
2		Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	70	37	55,3	79		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata								
3		Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	62.748.973	18.717.134	21.332.409	34		Bidang Pemasaran Pariwisata
4		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.118.957	812	1.793	0,16		Bidang Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								
5		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi *)	%	100	51,45	51,46	51,46		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
6		Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	38,3	31,91	46	120,1		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	%	100	51,45	51,46	51,46		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 7 target indikator kinerja Urusan Pariwisata terdapat 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 5 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP dikarenakan pemprioritasan kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu stimulant bantuan masyarakat pelaku pariwisata yang terdampak Covid-19.
2. Kunjungan Wisatawan Nusantara dikarenakan kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan PPKM yang berdampak pada buka tutup DTW dan pembatalan *Event* Pariwisata di daerah;
3. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dikarenakan kebijakan pemberlakuan PPKM dan adanya kebijakan mancanegara untuk larangan bepergian ke Indonesia;
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikarenakan pemprioritasan kegiatan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif.

3. Urusan Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 28 indikator kinerja.

Tabel 2. 29
Capaian kinerja Urusan Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	PERTANIAN								
	Program Penyediaan dan Pengembangan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sarana Pertanian								
1		Persentase penambahan alsintan	%	4	1,98	5,32	133,00		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
2		Persentase layanan Sertifikasi benih	%	500	100	100,00	80,00		Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
3		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	3	1,5	1,50	50,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
4		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	3	1,5	0,96	32,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
5		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	3	1,5	1,43	47,67		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
6		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	3	3	17,11	570,33		Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
7		Populasi ternak	(ST)/(AU)	4.013 .001	3.473 .966	3.606.788	89,87		Bidang Budidaya
8		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pematangan betina produktif *)	%	10	10	35,05	350,50		Bidang Veteriner

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9		Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	1	1,25	125,00		Balai Inseminasi Buatan Kelas A
10		Persentase peningkatan produksi ternak	%	2	1	1,10	55,00		Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
11		Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	18,88	17,88	52,29	276,96		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
12		Persentase peningkatan Produksi Kedelai	%	2,1	2,5	3,04	144,76		Bidang Tanaman Pangan
13		Persentase peningkatan Produksi Jagung dan sereal lainnya	%	0,3	0,3	0,29	95,33		Bidang Tanaman Pangan
14		Persentase peningkatan Produksi Padi	%	0,7	0,5	0,51	72,86		Bidang Tanaman Pangan
15		Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah	%	3,8	3,8	3,80	100,00		Bidang Hortikultura
16		Persentase peningkatan Produksi Cabe Besar	%	3,8	2	2,00	52,63		Bidang Hortikultura
17		Persentase peningkatan Produksi kopi	%	2,5	2,5	2,57	102,80		Bidang Perkebunan
18		Persentase peningkatan	%	0,5	0,3	0,49	98,00		Bidang Perkebunan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Produksi Tebu							
19		Persentase peningkatan Produksi Kelapa	%	0,5	0,3	0,44	88,00		Bidang Perkebunan
20		Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil	%	2,5	2,5	2,50	100,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
21		Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	2	1	1,00	50,00		Bidang Prasarana, Sarana & Penyuluhan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
22		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	10	10	35,05	350,50		Bidang Veteriner
23		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	10	10	35,05	350,50		Balai veteriner semarang
24		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan	%	10	10	35,05	350,50		Balai veteriner boyolali

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		betina produktif							
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
25		Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	0,43	0,53	2,04	474,42		Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kls A
	Program Penyuluhan Pertanian								
26		Persentase jumlah SDM penyuluh ditingkatkan yang kapasitasnya	%	50	7	7,00	68,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
27		Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	100	86,34	86,34		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
28		Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	15,62	12	12,00	76,82		Bidang Prasarana, Sarana & Penyuluhan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 28 target indikator kinerja Urusan Pertanian terdapat 13 indikator tercapai, 9 indikator akan tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang dikarenakan pemprioritasan kegiatan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
2. Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta dikarenakan puso akibat serangan hama dan penyakit;

3. Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) meliputi burung, wereng, dan sundep;
4. Persentase peningkatan produksi ternak dikarenakan capaian jumlah produksi bibit ternak ruminansia yang tidak memenuhi target disebabkan sebagian induk sapi pada taman ternak Sumberejo tidak menunjukkan gejala estrus akibat skor kondisi tubuh rendah sebagai dampak ketersediaan pakan yang belum memadai;
5. Persentase peningkatan Produksi Cabe Besar dikarenakan pengaruh dari berfluktuasinya harga cabe besar sehingga ketika harga rendah tidak dirawat secara intensif yang berakibat ketika harga tinggi produksi cabe berkurang; faktor cuaca dan serangan OPT;
6. Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan dikarenakan permohonan perijinan peternakan dan Kesehatan hewan mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada penurunan kinerja program.

4. Urusan Kehutanan

Kinerja penyelenggaran Urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 63 indikator kinerja.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	KEHUTANAN								
	Program Pengelolaan Hutan								
1		Persentase pengaduan yang ditangani *)	%	100	100	100,00	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Perlindungan Hutan
2		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,38	19,18	17,76	50,20		Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
3		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	1,63	1,08	1,13	69,33		CDK 1

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	1,63	1,1	1,27	77,91		CDK 2
5		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	1,69	1,03	1,29	76,33		CDK 3
6		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	1,81	1,34	1,55	85,64		CDK 4
7		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	2	0,99	1,03	51,50		CDK 5
8		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	3,25	1,3	1,56	48,00		CDK 6
9		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	2,06	1,21	1,52	73,79		CDK 8
10		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	2,63	1,68	1,83	69,58		CDK 9
11		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	2,06	1,66	1,90	92,23		CDK 10
12		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,91	0,91	0,91	100,00		Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
13		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	3,13	1,05	1,69	53,99		CDK 11

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	3,13	2,74	2,99	95,53		CDK 7
15		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,72	0,51	0,41	56,94		CDK 1
16		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,72	0,51	0,41	56,94		CDK 2
17		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,62	0,41	0,31	50,00		CDK 3
18		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,72	0,51	0,41	56,94		CDK 4
19		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,82	0,62	0,51	62,20		CDK 5
20		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,82	0,62	0,51	62,20		CDK 6

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,62	0,41	0,31	50,00		CDK 8
22		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,72	0,51	0,41	56,94		CDK 9
23		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,62	0,41	0,41	66,13		CDK 10
24		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,62	0,41	0,31	50,00		CDK 11
25		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	0,82	0,62	0,62	75,61		CDK 7
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
26		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	25	15,18	18,05	72,2		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,14	0,14	0,14	100,00		Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
28		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,09	0,09	0,09	100,00		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
29		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	1,63	1,08	1,13	69,33		CDK 1
30		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	1,63	1,1	1,27	77,91		CDK 2
31		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	1,69	1,03	1,29	76,33		CDK 3
32		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	1,81	1,34	1,55	85,64		CDK 4
33		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	2	0,99	1,03	51,50		CDK 5
34		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	3,25	1,3	1,56	48,00		CDK 6
35		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	2,06	1,21	1,52	73,79		CDK 8
36		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	2,63	1,68	1,83	69,58		CDK 9

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	2,06	1,66	2,2	106,8		CDK 10
38		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	3,13	1,05	1,69	53,99		CDK 11
39		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani *)	%	3,13	2,74	2,99	95,53		CDK 7
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								
40		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	25	15	15,00	60,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Perlindungan Hutan
41		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 1
42		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	3	1,8	1,80	60,00		CDK 1
43		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 2
44		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 2
45		Persentase pengaduan	%	100	100	100,00	100,00		CDK 3

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang ditangani							
46		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 3
47		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 4
48		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 4
49		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 5
50		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	3	1,8	1,80	60,00		CDK 5
51		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 6
52		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 6
53		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 8
54		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 8
55		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 9
56		Persentase pengaduan	%	100	100	100,00	100,00		CDK 9

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang ditangani							
57		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 10
58		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 10
59		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 11
60		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2	1,2	1,20	60,00		CDK 11
61		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00		CDK 7
62		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	3	1,8	1,80	60,00		CDK 7
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
63		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	25	15,18	18,05	72,2		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :



: Tercapai \geq 100% Target Akhir RPJMD



: Akan Tercapai $99\% \leq$ 60% Target Akhir RPJMD



: Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD

NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 63 target indikator kinerja Urusan Kehutanan terdapat 16 indikator tercapai, 33 indikator akan tercapai dan 14 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan pada Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, CDK Wil 1, CDK Wil 2, CDK Wil 3, CDK Wil 4, CDK Wil 8, CDK Wil 9, CDK Wil 11 dikarenakan pemrioritasan kegiatan sehingga kegiatan penyusunan penyusunan dokumen SVLK tidak dilaksanakan serta sebagian besar pengelola hutan dan pengolah hasil hutan belum memiliki SVLK;
2. Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani pada CDK Wil 5, CDK Wil 6 dan CDK Wil 11 dikarenakan keterlambatan dalam penambahan penanaman bibit MPTS sebagai penyediaan pakan satwa liar.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator kinerja.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian								
1		Persentase pengambilan air tanah	%	55,76	55,2	45,99	121,24		Bidang Geologi dan Air Tanah
2		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4,2	4,15	3,55	118,31		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
3		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,6	12,48	7,22	174,52		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
4		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,91	2,88	2,64	110,23		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
5		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,17	1,16	0,65	180,00		Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
6		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,97	0,97	0,89	108,99		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
7		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8,47	8,39	8,39	100,95		Cabang Dinas ESDM Wil. Ungaran - Telomoyo
8		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,61	0,6	0,58	105,17		Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Selatan
9		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3,31	3,28	2,36	140,25		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
10		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,1	1,09	1,09	100,92		Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Selatan
11		Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	100	100,00	100,00		Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
12		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,25	0,25	0,22	113,64		Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Tengah
13		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5,36	5,31	4,14	129,47		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
14		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14,81	14,67	14,18	104,44		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara								
15		Persentase Good Mining Practice	%	85,71	40	43,12	50,31		Bidang Mineral dan Batubara
16		Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo	%	6,57	1,93	2,17	33,03		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
17		Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria	%	2,86	2,65	2,65	92,66		Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Muria
18		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara	%	6,29	2,17	2,41	38,31		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
19		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan	%	4,29	2,89	2,89	67,37		Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Selatan
20		Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara	%	12	5,54	5,54	46,17		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
21		Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran - Telomoyo	%	2,86	2,17	2,17	75,87		Cabang Dinas ESDM Wil. Ungaran - Telomoyo
22		Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan	%	11,43	6,27	8,67	75,85		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
23		Persentase Good Mining Practice	%	5,14	2,41	2,65	51,56		Cabang Dinas ESDM

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		Wilayah Sewu Lawu							Wilayah Sewu Lawu
24		Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan	%	14,29	5,78	5,78	40,45		Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Selatan
25		Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	100	100,00	100,00		Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kls A
26		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah	%	2,86	2,89	2,89	101,05		Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Tengah
27		Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi	%	13,14	2,41	2,41	18,34		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
28		Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak	%	4	2,89	2,89	72,25		Cabang Dinas ESDM Wil. Smg – Demak
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan								
29		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	tCO2e	123.401	28.335,3	28.549,65	23,14		Bidang Energi Baru Terbarukan
30		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo	tCO2e	332	216,75	235,77	71,02		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
31		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah	tCO2e	1737,69	330,6	389,28	22,40		Cabang Dinas ESDM Wilayah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		Kendeng Muria							Kendeng Muria
32		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Serayu Utara	tCO ₂ e	583	715,25	715,25	122,68		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
33		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Serayu Selatan	tCO ₂ e	739	75,66	76,76	10,39		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
34		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Slamet Utara	tCO ₂ e	408	173,33	173,33	42,48		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
35		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) Wilayah Ungaran - Telomoyo	tCO ₂ e	76,2	101,57	190,78	250,37		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
36		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Kendeng Selatan	tCO ₂ e	505	173,24	213,32	42,24		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
37		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Sewu Lawu	tCO ₂ e	407	245,42	273,16	67,12		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
38		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah	tCO ₂ e	95701	19.870	19.908,23	20,80		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		Slamet Selatan							
39		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Serayu Tengah	tCO ₂ e	76	203,84	203,84	268,21		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
40		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Merapi	tCO ₂ e	1836	848,88	928,58	50,58		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
41		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO ₂ e) wilayah Semarang - Demak	tCO ₂ e	20288	4.961,40	4.994,90	24,62		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan								
42		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	37,13	22,98	26,08	70,24		Bidang Ketenagalistrikan
43		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1,92	1,26	1,55	80,73		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
44		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2,53	1,59	2,11	83,40		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
45		Persentase pemenuhan	%	1,95	1,39	1,76	90,26		Cabang Dinas

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara							ESDM Wilayah Serayu Utara
46		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	4,15	2,64	2,93	70,60		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
47		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	5,06	2,88	2,88	56,92		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
48		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,62	1,10	1,46	90,12		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
49		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	4,8	2,91	3,05	63,54		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
50		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1,82	1,21	1,59	87,36		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
51		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	5,01	3,03	3,65	72,85		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
		Wilayah Slamet Selatan							
52		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2,73	1,7	1,70	62,27		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
53		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	3,73	2,22	2,33	62,47		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
54		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1,82	1,07	1,17	64,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang – Demak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 54 target indikator kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 19 indikator tercapai, 19 indikator akan tercapai dan 16 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu

1. Persentase *Good Mining Practice* pada Bidang Mineral dan Batu Bara, wilayah Solo, wilayah Serayu Utara, wilayah Slamet Utara, wilayah Sewu Lawu, wilayah Selamet Selatan, wilayah Merapi dikarenakan penerbitan rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan saat ini kewenangan berada pada Pemerintah Pusat sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO₂e) pada Bidang Energi Baru Terbarukan, wilayah Kendeng Muria, wilayah Serayu Selatan, wilayah Slamet Utara, wilayah Kendeng Selatan, wilayah Slamet Selatan, wilayah Merapi, wilayah Semarang Demak dikarenakan pemprioritasan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sehingga beberapa pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan yang direncanakan ditunda;
3. Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara dikarenakan terdapat kendala pada pelaksanaan pekerjaan sambungan listrik murah

yang tidak dapat tersalurkan kepada calon penerima karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima sambungan listrik bersubsidi. Ketidaksiharian tersebut dikarenakan data yang bersifat dinamis sehingga perencanaan pada T-1 beberapa sasaran sudah tidak relevan lagi ketika dilakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan sambungan listrik bersubsidi..

6. Urusan Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	PERDAGANGAN								
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan								
1		Nilai ekspor non migas *)	Juta US\$	7205	6.257	10.257,35	142,36		Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan								
2		Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten kota (price center) *)	%	11,5	12,5	7,71	149,16		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
3		Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten kota (price center)	%	11,5	12,5	7,71	149,16		Bidang Perdagangan Dalam Negeri

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengembangan Ekspor								
4		Nilai ekspor non migas	Juta US\$	7205	6.257	10.257,35	142,36		Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen								
5		Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	3	5	4,23	70,92		Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	%	5	5	5,17	103,4		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
7		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	%	4	5	19,18	479,5		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri								
8		Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten kota (price center *)	%	11,5	12,5	7,71	149,16		Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 8 target indikator kinerja Urusan Perdagangan terdapat 7 indikator tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

7. Urusan Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	PERINDUSTRIAN								
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
1		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	6	3,2	2,78	46,33		Bidang Industri Agro
2		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3	1,5	1,55	51,67		Bidang Industri Non Agro
3		Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,35	4,25	4,25	97,70		Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
4		Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,17	3,17	3,68	116,09		Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
5		Persentase peserta pelatihan yang diserap	%	85	75	74,22	87,32		Balai Industri Produk Tekstil Dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		industri produk tekstil dan alas kaki							Alas Kaki Kelas A
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								
6		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro *)	%	6	3,2	2,78	46,33	▼	Bidang Industri Agro
7		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro *)	%	3	1,5	1,55	51,67	▼	Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 7 target indikator kinerja Urusan Perindustrian terdapat 1 indikator tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro dan non agro pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dikarenakan masih terdapat beberapa industri yang mengalami penurunan antara lain industri pengolahan tembakau minus 5,83% , industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman turun sebesar 0,21%. Selain itu, adanya perubahan proses perizinan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dimana terjadi perubahan secara mendasar dalam proses perizinan, sehingga Industri yang ingin melakukan perluasan atau investasi industri baru mengalami kendala karena sistem *Online Single Submission* hingga saat ini masih belum bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 menyebabkan proses pengawasan dan pendampingan perizinan industri, kajian-kajian sektor industri hingga evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)/pendampingan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sempat terhenti.

8. Urusan Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	TRANSMIGRASI								
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
1		Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,41	0,47	0,79	23,17		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
2		Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%	3,41	0	0,79	23,17		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terdapat 2 target indikator kinerja Urusan Transmigrasi dengan berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi dan Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian dikarenakan belum terbitnya Surat Perintah Penempatan transmigrasi dan kesiapan daerah transmigran.

F. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 60 indikator kinerja.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	SEKRETARIAT DAERAH								
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
1		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat
2		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat
3		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan	%	100	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
4		Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	90,91	90,91		Biro Kesejahteraan Rakyat
5		Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	90	92.31		Biro Kesejahteraan Rakyat
6		Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	91,67	91,67		Biro Kesejahteraan Rakyat
7		Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	100	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat
8		Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga	%	100	90	90	90		Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya							
9		Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	90	90		Biro Kesejahteraan Rakyat
10		Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
11		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
12		Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
13		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
14		Persentase rata-rata ketercapaian	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan,

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah							Otonomi Daerah dan Kerjasama
15		Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
16		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	94	92	100	106,38		Biro Hukum
17		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	94	93	100	106,38		Biro Hukum
18		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	94	92	100	106,38		Biro Hukum
19		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	94	92	100	106,38		Biro Hukum
20		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	94	92	100	106,38		Biro Hukum
21		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	94	93	100	106,38		Biro Hukum
	Program Perekonomian Pembangunan								
22		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief)	%	85	85	100	117,65		Biro Administrasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset							Pembangunan Daerah
23		Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	85	81	85,39	100,46		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
24		Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100	100	100	100,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
25		Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	88	88	90,48	102,82		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
26		Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	90	84	86,39	95,99		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
27		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
28		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief)	%	100	100	100	100,00		Biro Infrastruktur dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur							Sumber Daya Alam
29		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	100	100	100	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
30		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	100	100	100	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
31		Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	90	90,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
32		Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan	%	100	90	90	90,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya							
33		Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	90	90,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
34		Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	100	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
35		Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	100	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
36		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	100	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
37		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang	%	80	80	80	100,00		Biro Perekonomian Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata							
38		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	96	90	93,75	97,66		Biro Perekonomian Daerah
39		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	93	88	89,47	96,20		Biro Perekonomian Daerah
40		Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	97	93	93,33	96,22		Biro Perekonomian Daerah
41		Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	95	90	92,31	97,17		Biro Perekonomian Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42		Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	98	75	93,62	95,53		Biro Perekonomian Daerah
43		Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	85	100	111,11		Biro Perekonomian Daerah
44		Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	92	87	100	108,7		Biro Perekonomian Daerah
45		Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	90	70	89,36	99,29		Biro Perekonomian Daerah
46		Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	80	76	76	95,00		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
47		Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	80	76	76	95,00		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
48		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	95	92	92	96,84		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Program Penataan Administrasi Umum								
49		Persentase Kabupaten/Kota yang	%	48	31	31	52,78		Biro Organisasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		mencapai skor kematangan organisasi minimal 15							
50		Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	97	87	82,5	85,05		Biro Organisasi
51		Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	85	57	88,57	104,20		Biro Organisasi
52		Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	86	85	89,5	104,07		Biro Organisasi
53		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	78,59	79,44	79,44		Biro Organisasi
54		Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	100	83	100	100,00		Biro Organisasi
55		Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	59,53	34,59	42,66	71,66		Biro Organisasi
56		Presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	63	51	100	158,73		Biro Organisasi
57		Persentase layanan	%	100	100	100	100,00		Biro Umum

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		liputan dan keprotokolan							
58		Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100,00		Biro Umum
59		Persentase pemenuhan pelayanan umum dan keuangan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100,00		Biro Umum
60		Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100,00		Biro Umum

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 60 target indikator kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah terdapat 39 Indikator tercapai dan 21 Indikator Akan tercapai.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	SEKRETARIAT DPRD								
	Program Layanan dan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Keuangan								
1		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100		Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
2		Persentase layanan bagian humas	%	95	95	95	100		Bagian Humas
3		Persentase layanan bagian persidangan	%	95	95	95	100		Bagian Persidangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 3 target indikator kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD keseluruhan indikator berstatus tercapai.

G. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PERENCANAAN								
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
1		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	90	90	90	100		Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
2		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	90	90	90	100		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
3		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	90	90	90	100		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam								
4		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	%	90	90	90	100		Bidang Perekonomian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		lingkup bidang perekonomian							
5		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian	%	90	90	90	100		Bidang Perekonomian
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan								
6		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	90	90	100		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
7		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	90	90	100		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 7 target indikator kinerja Urusan Perencanaan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

2. Urusan Keuangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 161 indikator kinerja.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	KEUANGAN								
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
1		Persentase kabupaten/kot a yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2		Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100	100		Bidang Anggaran
3		Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100		Bidang Akuntansi
4		Persentase realisasi serapan APBD	%	95	92	94,28	99,24		Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5		Persentase pemanfaatan aset daerah	%	72,5	67,5	72,84	100,47		Bidang Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
6		Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah	%	95	95	95	100		Bidang Pengelolaan Data & Pengembangan Pendapatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB	%	5,38	16,15	24,57	456,69		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
8		Persentase peningkatan penerimaan PKB	%	10,17	7,91	3,92	38,54		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
9		Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak	%	76	73	73	96,05		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
10		Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	8,41	14,74	7,39	87,87		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
11		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	%	11,85	-1,96	45,1	380,59		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
12		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi KayadaDipisahkan	%	11	-1,36	-4,12	11,91		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
13		Persentase peningkatan penerimaan PBBKB	%	6,49	7,63	6,24	96,15		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
14		Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok	%	12,08	2,84	6,29	52,07		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
15		Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	%	9,54	27,23	23,82	249,69		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
16		Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah	%	90	90	90	100		Bidang Evaluasi dan Pembinaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I	%	6,03	26,2	24,03	398,51		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
18		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I	%	5,95	0,74	-5,93	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
19		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang I	%	10,59	-18,93	78	736,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
20		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II	%	3,2	7,1	24,4	762,5		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
21		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II	%	9,38	19,78	-3,85	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
22		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II	%	10,34	10,7	11,45	110,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
23		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang II	%	10,59	14,51	95,3	899,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
24		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di	%	5,19	16	17,27	332,755		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		UPPD Kota Semarang III							Semarang III
25		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III	%	9,38	30,63	83,52	890,41		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
26		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III	%	12,91	10,61	-2,22	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
27		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang III	%	10,59	4,35	82,8	781,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
28		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	6,4	20,5	27,23	425,47		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
29		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang	%	9,38	8,9	-4,39	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
30		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	10,73	13,04	6,08	56,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
31		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Semarang	%	10,59	6,32	47,7	450,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga	%	9,22	25,5	31,56	342,3		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
33		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga	%	9,38	26,06	-15,76	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
34		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga	%	9,5	3,64	-3,58	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
35		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Salatiga	%	10,59	4,48	17,2	162,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
36		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal	%	6,56	16,2	23,17	353,2		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
37		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal	%	9,38	39,5	6,37	67,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
38		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal	%	11,16	2,8	2,72	24,37		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
39		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD	%	10,59	-54,44	21	198,3		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Kendal							
40		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak	%	6,29	19,6	19,94	317,01		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
41		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak	%	9,38	18,54	24,18	257,78		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
42		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak	%	14,6	7,64	3,37	23,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
43		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Demak	%	10,59	- 34,22	12,2	115,2		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
44		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	9,32	30	21,81	234,01		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
45		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan	%	9,38	13,47	29,13	310,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
46		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	10,25	6,33	4,38	42,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
47		Persentase peningkatan penerimaan	%	10,59	4,55	50,1	473,09		Unit Pelayanan Pendapatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Grobogan							Daerah Kabupaten Grobogan
48		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta	%	6,19	18,6	26,67	430,856		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
49		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta	%	9,38	23,18	-15,16	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
50		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta	%	9,49	4,54	2,49	26,24		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
51		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Surakarta	%	10,59	-53,51	32,2	304,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
52		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	10,76	15,1	22,56	209,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
53		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten	%	9,38	19,95	9,93	105,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
54		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	10,79	4,26	0,09	0,83		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
55		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Klaten	%	10,59	0,38	6,9	65,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
56		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	3,45	26,8	29,15	844,93		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
57		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen	%	9,38	38,36	-88,93	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
58		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	10,85	9,85	6,8	62,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
59		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Sragen	%	10,59	1,38	19,7	186,02		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
60		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5,74	19,5	29,26	509,76		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
61		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	9,38	57,56	-11,05	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
62		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	9,74	17,41	9,97	102,36		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
63		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	10,59	4,51	23,14	218,51		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
64		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	4,4	25,6	25,04	569,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
65		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	9,38	5,34	-7,1	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
66		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	10,65	8,1	3,62	33,99		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
67		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	10,59	8,76	102	963,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
68		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	3,45	20,5	25,56	740,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Karanganyar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
69		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9,38	19,19	19,15	204,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Karanganyar
70		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	7,82	6,83	3,6	46,04		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Karanganyar
71		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	10,59	2,64	29,5	278,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
72		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	4,03	22,7	28,97	718,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
73		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali	%	9,38	13,26	6,71	71,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
74		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	11,97	13,84	8,26	69,01		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
75		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Boyolali	%	10,59	0,76	17,7	167,14		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
76		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati	%	6,23	12,4	15,88	254,9		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
77		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati	%	9,38	25,59	17,05	181,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
78		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati	%	10,65	4,76	3,63	34,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
79		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pati	%	10,59	42,17	53,7	507,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
80		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora	%	7,77	9,8	11,54	148,52		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
81		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora	%	9,38	54,74	-5,4	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
82		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora	%	11,66	6,09	3,17	27,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
83		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD	%	10,59	23,18	47,3	446,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Blora							
84		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang	%	11,66	19,9	27,87	239,02		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
85		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang	%	9,38	37,7	-13,64	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
86		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang	%	11,68	9,7	3,63	31,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
87		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Rembang	%	10,59	18,29	35	330,5		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
88		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	15,5	7,13	4,38	28,26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
89		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	3,42	18,6	25,99	759,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
90		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus	%	9,38	9,94	-97,89	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
91		Persentase peningkatan penerimaan	%	10,59	11,74	53	500,47		Unit Pelayanan Pendapatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kudus							Daerah Kabupaten Kudus
92		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	5,56	14,5	20,42	367,27		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
93		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Jepara	%	9,38	0	100	1066,1		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
94		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	10,25	10,9	8,05	78,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
95		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Jepara	%	10,59	91,12	147,4	1391,88		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
96		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan	%	5,46	29,2	40,01	732,78		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
97		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan	%	11,54	1,51	4,62	40,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
98		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%	10,59	3,93	20,9	197,36		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah di UPPD Kota Pekalongan							
99		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	2,54	34,5	34,39	1353,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Pekalongan
100		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	9,38	18,82	86,07	917,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Pekalongan
101		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13,28	13,68	7,32	55,12		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Pekalongan
102		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10,59	1,16	7,5	70,82		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Pekalongan
103		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang	%	7,03	27,7	25,49	362,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
104		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang	%	9,38	24,5	3,01	32,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
105		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang	%	13,39	11,07	6,3	47,05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab Batang
106		Persentase peningkatan	%	10,59	1,5	12,9	121,81		Unit Pelayanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Batang							Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
107		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	3,43	12,9	18,94	552,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
108		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang	%	9,38	33,25	-46,45	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
109		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,48	12,36	6,06	52,79		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
110		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pemalang	%	10,59	1,77	31	292,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
111		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal	%	2,94	13,2	27,03	919,39		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
112		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal	%	10,19	14,21	9,91	97,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
113		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%	10,59	-6,39	119,5	1128,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah di UPPD Kota Tegal							
114		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	1,49	16,9	28,04	1881,88		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
115		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal	%	9,38	29,89	-20,31	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
116		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	14,57	12,59	2,66	18,26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
117		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Tegal	%	10,59	0,42	8,5	80,26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
118		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	0,46	12,4	21,45	4663,04		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
119		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes	%	9,38	25,18	-48,27	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
120		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	8,06	5	-1,64	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
121		Persentase peningkatan	%	10,59	4,62	2,7	25,5		Unit Pelayanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes							Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
122		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	3,05	20,2	27,81	911,8		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
123		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas	%	9,38	35,12	0,25	2,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
124		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	7,74	8,84	4,02	51,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
125		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas	%	10,59	3,54	50,5	476,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
126		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%	2,48	12,4	17,47	704,44		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
127		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap	%	9,38	22,95	28,77	306,72		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
128		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD	%	8,25	9,44	5,72	69,33		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Cilacap							Kabupaten Cilacap
129		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap	%	10,59	1,58	14,6	137,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
130		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	4,55	44,9	41,89	920,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.Purbalingga
131		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	9,38	19,5	0,58	6,18		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.Purbalingga
132		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	6,23	11,77	4,29	68,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.Purbalingga
133		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	10,59	11,22	8,4	79,32		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.Purbalingga
134		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	5,97	28,6	31,95	535,18		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Banjarnegara
135		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	9,38	-8,19	3,31	35,29		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Banjarnegara
136		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8,73	11,25	5,4	61,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Banjarnegara
137		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	10,59	13,2	46,4	438,15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Banjarnegara
138		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang	%	8,6	22,2	32,13	373,6		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
139		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang	%	9,38	27,64	60,26	642,43		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
140		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang	%	5,91	28,09	10,22	172,93		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
141		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang	%	10,59	25,76	31,6	298,39		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
142		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang	%	3,53	41,4	26,36	746,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
143		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang	%	9,38	13,15	20,75	221,22		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
144		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang	%	8,64	1,63	0,95	11		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
145		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Magelang	%	8,64	-4,52	89	840,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
146		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	4,09	14,2	26,11	638,39		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
147		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen	%	9,38	16,33	21,93	233,8		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
148		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	6,75	8,72	6,34	93,93		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
149		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen	%	10,59	9,46	18,3	172,8		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
150		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di	%	7,82	26,9	27,09	346,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		UPPD Kabupaten Purworejo							Kabupaten Purworejo
151		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo	%	9,38	42,11	9,45	100,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
152		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%	11,55	10,48	6,53	56,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
153		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo	%	10,59	1,46	16,5	155,81		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
154		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%	5,11	28,7	26,24	513,5		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Temanggung
155		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung	%	9,38	25,61	-28,55	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Temanggung
156		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%	8,35	2,13	-1,59	0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Temanggung
157		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD	%	10,59	13,54	37,5	354,11		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Temanggung

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Temanggung							
158		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	7,16	27,8	33,96	474,3		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Wonosobo.
159		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	9,38	25,05	5,15	54,9		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Wonosobo.
160		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10,83	14,52	8,78	81,07		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Wonosobo.
161		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10,59	-6,61	74	698,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Wonosobo.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 161 target indikator kinerja Urusan Keuangan terdapat 94 Indikator berstatus telah Tercapai, 19 Indikator berstatus Akan Tercapai dan 48 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu: Persentase peningkatan penerimaan PKB di Bidang PKB dan 25 UPPD, Persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada, Persentase peningkatan penerimaan pajak rokok dan Persentase peningkatan penerimaan PAP di 20 UPPD. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pada penerimaan PKB secara umum adalah adanya dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal Tahun 2020, adanya beberapa lokasi yang blank area sehingga menghambat pelayanan, penundaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di beberapa wilayah, karena masyarakat lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan sekunder dan tersier, dan ditiadakannya kegiatan Razia Kendaraan Bermotor oleh pihak Polri, Hal ini mengakibatkan prosentase tingkat pertumbuhan penerimaan PKB 2021 tidak dapat mencapai target yang ditentukan pada beberapa unit kerja. Penutupan beberapa objek pajak air permukaan karena imbas dari pemberlakuan PPKM di wilayah pulau Jawa dan Bali yang menyebabkan penerimaan pajak air permukaan tidak dapat mencapai target

3. Urusan Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	KEPEGAWAIAN								
	Program Kepegawaian Daerah								
1		Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	100	100	100		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2		Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	%	100	60	60	60		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
3		Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100		Bidang Mutasi
4		Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	100	100		Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
5		Persentase sistem informasi kepegawaian yg dikembangkan dan terintegrasi	%	100	44	44	44		Bidang Informasi Kepegawaian
6		Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	34	43,2	43,2		Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 6 target indikator kinerja Urusan Kepegawaian terdapat 3 Indikator tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase sistem informasi kepegawaian yg dikembangkan dan terintegrasi dikarenakan Kebijakan berkaitan dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga pengembangan aplikasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
2. Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya dikarenakan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengharuskan untuk tidak membuat kerumunan sehingga ada kebijakan untuk mengurangi kegiatan pemetaan kompetensi ini karena menimbulkan kerumunan pada ruangan komputer dalam titik lokasi kegiatan.

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Urusan Diklat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
1		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	80	78	82	102,5		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
2		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,5	3,5	3,32	94,86		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
3		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
4		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
5		Persentase ASN yang lulus	%	100	100	99,97	99,97		Bidang Pengembang-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengembangan kompetensi manajerial							an Kompetensi Manajerial
6		Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	100	99,96	99,96		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
7		Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	90	90	93,17	103,52		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 7 target indikator kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan terdapat 4 Indikator Tercapai dan 3 Indikator berstatus Akan tercapai.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								
1		Persentase implementasi riset dan pengembangan	%	100	100	100	100		Bidang Riset dan Pengembangan
2		Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	75	75	75	100		Bidang Inovasi dan Teknologi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 2 target indikator kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan telah tercapai.

6. Urusan Penghubung

Kinerja penyelenggaraan Urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Urusan Penghubung

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
6	PENGHUBUNG								
	Program Pelayanan Penghubung								
1		Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat	%	100	100	100	100		Badan Penghubung
2		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya.	%	100	100	100	100		Badan Penghubung

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
 NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 2 target indikator kinerja Urusan Penghubung keseluruhan indikator telah tercapai.

7. Urusan Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	Program Penyelenggaraan Pengawasan								
1		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	100	100	104,84	104,84		Irbanwil III
2		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	100	0	0	0		Irbanwil III
3		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	%	100	100	100	100		Irbanwil III
4		Persentase obyek pemeriksaan yg dilakukan pengawa-san lainnya wilayah I	%	100	100	100	100		Irbanwil I
5		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	100	0	0	0		Irbanwil I
6		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I	%	100	100	100	100		Irbanwil I

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100	0	0	0		Irbansus
8		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	100	100	100	100		Irbansus
9		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	%	100	100	100	100		Irbansus
10		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	%	100	100	101,61	101,61		Irbanwil II
11		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	%	100	100	100	100		Irbanwil II
12		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	100	100	100	100		Irbanwil II
13		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100		Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								
14		Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	%	100	60	100	100		Inspektorat
15		Nilai Budaya Integritas	%	90	83	92.49	102,77		Inspektorat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16		Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Angka	87,35	87,35	87,11	99,73		Inspektorat
17		Persentase OPD yg memiliki profil manajemen risiko	%	100	100	100	100,00		Inspektorat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD  : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD  :Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 17 target indikator kinerja Urusan Pengawasan terdapat 13 Indikator tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan di Irbansus, Inbanwil I dan Irbanwil III dikarenakan ketiga indikator tersebut tidak ditargetkan dalam RKPD Tahun 2021 atau target 0 (nol).

H. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
1		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	90	83	91,14	101,27		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nas.

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
2		Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	%	90	83	90,12	100,13		Bidang Politik Dalam Negri
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
3		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	%	90	83	88.01	97.79		Bidang Ketahanan Bangsa
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
4		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa *)	%	90	83	91,44	101,60		Bidang Ketahanan Bangsa
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial								
5		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	%	90	83	91,19	101,32		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nas.

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s.d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	100	100	100	100,00		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nas.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

 : Tercapai $\geq 100\%$ Target Akhir RPJMD
 : Akan Tercapai $99\% \leq 60\%$ Target Akhir RPJMD
 : Perlu Upaya Keras $< 60\%$ Target Akhir RPJMD
NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 6 target indikator kinerja Unsur Pemerintahan Umum terdapat 5 indikator tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									4.600.888.986.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	98		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								24.381.360.000		
						Nilai SAKIP Perangkat daerah	Angka	78	24.381.360.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						24.381.360.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	24.381.360.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.381.360.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	8	24.381.360.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.162.110.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Angka	4	24.162.110.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				219.250.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Angka	4	219.250.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								4.576.507.626.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	98	4.576.507.626.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4.576.507.626.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	1.342.050.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					464.550.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	464.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	14	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				63.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	63.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					134.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	134.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				60.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	8	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					417.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	417.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.100.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	140.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				258.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	326.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										195.000.000		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										45.000.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100		1.173.900.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					386.900.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2		386.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										10.000.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										170.000.000		
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5		140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										15.000.000		
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
										10.000.000		
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										50.000.000		
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										131.900.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		131.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					317.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	317.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	110.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	470.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	55.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	1.419.420.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					562.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	562.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				233.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	15	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	2	68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					497.420.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	497.420.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				278.420.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	278.420.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	6.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	210.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	360.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	60.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				145.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	1.838.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					534.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	534.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				170.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	19	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	448.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	240.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				192.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	192.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					706.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	706.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	36.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	60.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	600.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	1.426.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					498.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	498.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				170.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	7	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	25	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	400.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					210.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		210.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						477.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		477.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					51.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					350.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100		2.803.439.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						606.866.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2		606.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					22.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		22.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					336.516.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	40		260.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	6		76.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				72.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	83.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					210.484.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	2	210.484.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.250.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	54	180.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.234.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	30.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.323.575.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	1.323.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				836.375.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	836.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				475.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	475.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					662.514.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	2	662.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	147.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	346.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	856.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	328.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	8	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									40.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				60.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	31	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	9		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				333.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	333.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	920.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					394.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	394.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	7	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					178.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		178.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2		57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	25		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					42.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	3		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						349.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		349.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	50.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	40.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.208.090.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				502.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	502.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	7	150.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	30.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	70.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				161.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	161.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		329.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					198.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						377.090.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		377.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.590.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		27.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					240.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.377.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					436.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	436.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				88.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.900.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	39.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					235.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				235.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.800.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	430.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	4.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	216.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	276.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	23.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				198.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	198.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.267.000.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					526.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	526.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				145.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	120.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit		25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	36.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	12.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	60.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				60.000.000			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	60.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	432.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	240.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				186.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	186.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					224.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	224.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	32.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				24.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	24.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	48.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	2	120.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	5.296.600.000		Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.425.688.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	1.425.688.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	75.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				880.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	166	800.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	80.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	30.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.688.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	105.688.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000			
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Laporan	2	500.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				300.000.000			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	55	300.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000			
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	2	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.095.912.000			
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	2	2.095.912.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	700.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.375.912.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.375.912.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.275.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	2		1.275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					700.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	7		700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		3.287.500.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						506.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2		506.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	4		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					45.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					26.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.500.000		
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Laporan	2		50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.331.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	1.331.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				520.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	520.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				765.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	765.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	2	1.400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				950.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5	950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.056.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					378.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	378.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				145.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	355.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	140.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	323.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				48.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	48.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	150.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.577.900.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					49.500.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	49.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				49.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					538.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	538.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				208.500.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	13	168.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				59.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	59.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					61.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	15	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					438.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	438.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				207.600.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	207.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					489.500.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Laporan	2	489.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				22.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya		Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Bulan	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		%	100	980.550.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah		Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					434.850.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Laporan	2	434.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				109.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	7	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	24.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				49.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	49.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				17.500.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	26	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	403.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				251.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	251.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	109.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah	%	100	4.548.677.377.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.510.325.417.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	4.510.325.417.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.507.027.277.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	4.507.027.277.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.298.140.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.298.140.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					380.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada	Laporan	2	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				180.000.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					303.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	2	303.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				200.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				103.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	330	103.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.830.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	2	2.830.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				650.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	49	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	0	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	80	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	11	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.460.211.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	32.460.211.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	2.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				29.630.211.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	29.405.264.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Kegiatan	4	224.947.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.028.749.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	2	2.028.749.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				868.749.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	10		868.749.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	250		250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Penguatan karakter dan Ketahanan Budaya										29.349.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Angka Partisipasi Seni dan Budaya	Angka	12			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Peningkatan pendidikan karakter dalam jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya									29.349.950.000		
						Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6.28		29.349.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							19.742.500.000		
						Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	100		3.007.500.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					3.007.500.000		
						Jumlah pelaku seni yang terlayani	Angka	1050		605.000.000	SEKSI PELESTARIAN SENI	
		2.22.02.1.02.02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					605.000.000		
						Jumlah SDM yg terbina	Orang	840		605.000.000	SEKSI PELESTARIAN SENI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah seni budaya yang dipentaskan	Angka	215		2.402.500.000	SEKSI PERTUNJUKAN DAN PAMERAN SENI	
		2.22.02.1.02.01			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					2.402.500.000		
						Jumlah kelompok seni yang di tampilkan	Kelompok	215		2.402.500.000	SEKSI PERTUNJUKAN DAN PAMERAN SENI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase ragam budaya terlayani	%	3.1		16.735.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					850.000.000		
						presentase objek pemajuan kebudayaan teregistrasi nasional	%	3.1		850.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.02.1.01.01			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					700.000.000		
						Jumlah objek pemajuan kebudayaan terintegrasi provinsi	Angka	19		700.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.02.1.01.02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					150.000.000		
						Jumlah SDM lembaga pranata budaya terbina	Orang	70		150.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					14.751.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						presentase objek seni tradisi teregritasi nasional	%	0.07		14.751.300.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.02.01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				14.751.300.000		
						Jumlah objek seni tradisi teregritasi provinsi	Angka	7		14.751.300.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.133.700.000		
						presentase lembaga adat terbina	%	30		1.133.700.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.02.1.03.01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				1.133.700.000		
						Jumlah lembaga adat terfasilitasi	Angka	3		1.133.700.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							2.000.000.000		
						Presentase jenis seni tradisi terlayani	%	6.28		2.000.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		
						Prosentase pelaku seni terbina	%	3.4		2.000.000.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.03.1.01.01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				2.000.000.000		
						Jumlah pelaku seni tradisional yang terfasilitasi	Angka	9271		2.000.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.03.1.01.03				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						
						Jumlah lembaga seni tradisi terfasilitasi	Angka	0			SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							2.969.250.000		
						Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0.42		2.969.250.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
						Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				2.969.250.000		
						presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi	%	2.8		2.969.250.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.04.1.01.01				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				2.819.250.000		
						Jumlah lembaga sejarah lokal terfasilitasi	Angka	5		2.819.250.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.04.1.01.03				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						
						Jumlah pengayaan dan informasi kesejarahan	Angka	0			SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.04.1.01.04				Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				150.000.000		
						Jumlah sejarah lokal terfasilitasi	Angka	1		150.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							1.513.200.000		
						Persentase status cagar budaya	%	23.62		1.513.200.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
						Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				275.550.000		
						Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi	%	38.41		275.550.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.01.01				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				88.300.000		
						Jumlah objek diduga cagar budaya yang teregister provinsi	Angka	252		88.300.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.22.05.1.01.02				Penetapan Cagar Budaya				187.250.000		
						Jumlah cagar budaya ditetapkan di provinsi	Angka	133		187.250.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				1.237.650.000		
						Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola	%	52.63		1.237.650.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.05.1.02.01			Pelindungan Cagar Budaya				287.250.000		
					Jumlah cagar budaya registrasi provinsi terlindungi	Angka	2		287.250.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		2.22.05.1.02.02			Pengembangan Cagar Budaya				145.000.000		
					Jumlah cagar budaya teregister provinsi yang direvitalisasi	Angka	2		145.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		2.22.05.1.02.03			Pemanfaatan Cagar Budaya				365.900.000		
					Jumlah cagar budaya teregistrasi provinsi yang dimanfaatkan	Angka	17		365.900.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; BALI ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.22.05.1.02.04			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				439.500.000		
					Jumlah SDM cagar budaya terbina	Angka	35		439.500.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						3.125.000.000		
					Survei Kepuasan Pengunjung Museum	Angka	89.8		3.125.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Pengelolaan Museum Provinsi					3.125.000.000		
					Jumlah koleksi museum dilestarikan	Angka	1900		3.125.000.000	SEKSI PELESTARIAN	
		2.22.06.1.01.01			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				975.000.000		
					Jumlah koleksi museum yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	Angka	1900		975.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.03			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.700.000.000		
					Jumlah penyelenggaraan event permuseuman bagi masyarakat	Kegiatan	8		1.700.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.04			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				450.000.000		
					Jumlah sarana prasarana museum tersedia	Angka	5		450.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB									3.169.783.263.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8.75				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja								3.169.783.263.000		
					APK SMA/SMK/SLB	%	85.1		2.879.300.084.000		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.876.465.694.000		
					APK SLB	%	70		83.675.238.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					83.675.238.000		
					Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	99		83.675.238.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.38			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				337.500.000		
					Jumlah siswa SLB penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	2250		337.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.000.000		
					Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	2		100.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.47			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				150.000.000		
					Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan Khusus	Dokumen	4		150.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.826.728.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	6		2.826.728.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.52			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus					80.261.010.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima dana BOS	Siswa	30780		80.261.010.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin I	%	170.1		2.116.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.116.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	96.64		2.116.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					2.116.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		2.116.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin II	%	60		1.110.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.110.800.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	85		1.110.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					1.060.800.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		1.060.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin III	%	72.33		3.225.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.225.800.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	99		3.225.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					3.175.800.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		3.175.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SLB Cabdin IV	%	64.11		1.174.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.174.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	100		1.174.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					1.124.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		1.124.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin IX	%	66.26		3.210.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.210.800.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	98		3.210.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					3.160.800.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		3.160.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin V	%	120.1		916.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					916.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	99		916.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				866.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	866.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VI	%	112.01	2.653.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus				2.653.600.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	99	2.653.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.603.600.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SLB	Dokumen	4	2.603.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VII	%	190.2	973.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus				973.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	98	973.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				923.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SLB	Dokumen	4	923.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VIII	%	70.09	2.015.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus				2.015.600.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	98	2.015.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.965.600.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	1.965.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin X	%	50.11	1.500.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus				1.500.800.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	98	1.500.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.450.800.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	1.450.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XI	%	30.21	1.142.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus				1.142.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	100	1.142.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.092.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		1.092.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XII	%	49.88		3.479.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.479.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	99		3.479.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	3		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					3.429.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		3.429.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XIII	%	83.23		1.779.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.779.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB	%	97.11		1.779.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB	Dokumen	0		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					1.729.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4		1.729.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA	%	83.23		679.667.556.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					679.667.556.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA	%	100		679.667.556.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.39			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					4.947.000.000		
						Jumlah siswa SMA penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	32980		4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					100.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		100.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.48			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan SMA	Dokumen	2		100.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					11.302.846.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	3		11.302.846.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.53			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					663.217.710.000		
						Jumlah siswa SMA penerima dana BOS	Siswa	674001		663.217.710.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin I	%	39.46		22.383.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.383.200.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I	%	96.64		22.383.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					22.383.200.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4		22.383.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin II	%	31.93		17.587.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.587.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II	%	85		17.587.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					17.512.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4		17.512.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin III	%	31.62		20.777.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					20.777.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III	%	99		20.777.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					20.702.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4		20.702.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA Cabdin IV	%	25.72		14.740.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					14.740.600.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV	%	100		14.740.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					14.665.600.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4		14.665.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin IX	%	23.17		27.773.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					27.773.800.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX	%	99		27.773.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					27.698.800.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan menengah atas	Dokumen	4		27.698.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin V	%	35.36		24.598.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					24.598.600.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V	%	99		24.598.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					24.523.600.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4		24.523.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin VI	%	26.04		23.253.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					23.253.500.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI	%	99		23.253.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				23.178.500.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	23.178.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin VII	%	51.79	14.942.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				14.942.200.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII	%	98	14.942.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				14.867.200.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	14.867.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA Cabdin VIII	%	30.82	22.367.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				22.367.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII	%	98	22.367.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.292.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan Menengah Atas	Dokumen	4	22.292.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin X	%	24.83	24.508.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				24.508.200.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X	%	98	24.508.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				24.433.200.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	24.433.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XI	%	30.71	17.160.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				17.160.200.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI	%	100	17.160.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				17.085.200.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	17.085.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XII	%	22.59	23.985.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				23.985.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII	%	99	23.985.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				23.910.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	23.910.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XIII	%	29.87	16.643.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.643.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII	%	98	16.643.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA	Dokumen	1	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.568.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	16.568.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMK	%	49.46	1.458.273.778.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.458.273.778.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK	%	100	1.458.273.778.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		
						Jumlah siswa SMK penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	52395	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						
						Jumlah SMK Boarding yang dikelola	Unit	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				165.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3	165.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.40			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				100.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan SMK	Dokumen	1	100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				15.310.778.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	5	15.310.778.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.46			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.435.160.050.000		
						Jumlah siswa SMK penerima dana BOS	Siswa	1274225	1.435.160.050.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin I	%	49.88	42.713.833.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					42.713.833.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I	%	96.64	42.713.833.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				12.193.783.000		
						Jumlah SMK Boarding di kelola	Unit	1	12.193.783.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				30.520.050.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	30.520.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						APK SMK Cabdin II	%	49.88	17.111.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.111.000.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II	%	85	17.111.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		
						Jumlah pengadaan perlengkapan peserta didik	Paket	3	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				961.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding dikelola	Unit	1	961.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				16.052.500.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	16.052.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK CABdin III	%	44.91	23.668.679.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					23.668.679.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III	%	99	23.668.679.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				6.779.779.000		
						Jumlah SMK Boarding dan SMK Semi Boarding dikelola	Unit	2	6.779.779.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				16.791.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	16.791.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						APK SMK Cabdin IV	%	44.88	13.985.750.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					13.985.750.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV	%	100	13.985.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				45.000.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	6	45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.922.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola	Unit	2	1.922.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				11.943.750.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	11.943.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin IX	%	50.25	52.156.810.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					52.156.810.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX	%	98	52.156.810.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				67.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	9		67.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				9.375.710.000		
						Jumlah SMK Boarding dan Semi Boarding di keleola oleh Cabdin IX	Unit	4		9.375.710.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				42.638.600.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan menengah kejuruan	Dokumen	4		42.638.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin V	%	59.24		33.693.650.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					33.693.650.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V	%	99		33.693.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3		22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				961.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola	Unit	1		961.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				32.635.150.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4		32.635.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin VI	%	56.24		33.183.100.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					33.183.100.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI	%	99		33.183.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				45.000.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	6		45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.922.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang di kelola Cabdin VI	Unit	2		1.922.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				31.141.100.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4		31.141.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin VII	%	66.71		23.138.250.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					23.138.250.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII	%	99		23.138.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				23.063.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4		23.063.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						APK SMK Cabdin VIII	%	52.33		23.002.050.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						23.002.050.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII	%	99		23.002.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					22.500.000		
						jumlah pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Paket	3		22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					961.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola Cabdin VIII	Unit	1		961.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					21.943.550.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan SMK	Dokumen	4		21.943.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin X	%	56.97		26.503.050.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						26.503.050.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X	%	98		26.503.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					45.000.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	6		45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					1.922.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding dikelola oleh Cabdin X	Unit	2		1.922.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					24.461.050.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4		24.461.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XI	%	54.12		12.821.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						12.821.500.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI	%	100		12.821.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					22.500.000		
						jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0		22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					961.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang di kelola cabang dinas XI	Unit	1		961.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					11.763.000.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4		11.763.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XII	%	59.02		27.765.750.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						27.765.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII	%	99	27.765.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.31			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.37			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				961.000.000		
						Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola Cabdin XII	Unit	1	961.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				26.707.250.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	26.707.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XIII	%	55.18	18.713.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.713.400.000		
						Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII	%	98	18.713.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMK	Dokumen	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.638.400.000		
						Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	18.638.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	21.15	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.000.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	Siswa	29	1.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.000.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat Nasional yang diikuti	Siswa	5	1.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	1.15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0.77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0.77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	1.15		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	3.08		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Dokumen	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0.77		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0.77		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	3.85		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	3.85		50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000	
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII	Siswa	26		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1.54	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0.77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1.54	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	1.15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII	Siswa	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.48			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	9.22	3.624.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.624.200.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	Siswa	132	3.624.200.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.624.200.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat nasional yang diikuti	Kegiatan	5	3.624.200.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	3.36	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0.86	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0.26	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0.17	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	0.6	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0.52	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0.34	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	0.86	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000			
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	0.86		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0.43		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0.86		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	0.34		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Dokumen	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0.17		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII	Siswa	132		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	20.61		2.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.500.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	Siswa	85	2.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.500.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat nasional yang diikuti	Kegiatan	3	2.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin	%	0.95	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	4.2	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	2.86	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0.57	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	1.15	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1.72	100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000			
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0.95		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	2.48		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	2.1		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0.95		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1.53		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1.53		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000			
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0.57		100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000		
						Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII	Siswa	85		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					100.000.000		
						Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							2.402.600.000		
						Persentase serapan kurikulum SLB	%	100		400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						400.000.000		
						Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB	Dokumen	1		400.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					400.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal	Dokumen	4		400.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V	%	97.45		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI	%	100		5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI	Dokumen	2		5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					5.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	2		5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin X	Dokumen			14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI	%	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					10.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V	%	99.15	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI	%	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					10.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X	%	100	28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X	Dokumen	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA	%	100	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					400.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Dokumen	1	400.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				400.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	4	400.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII	%	100		14.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						14.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII	Dokumen	2		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus					14.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal Khusus	Dokumen	1		14.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII	Dokumen	2		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI	Dokumen	2		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII	Dokumen	2		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	0		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII	%	100		28.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						28.000.000		
						Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII	Dokumen	2		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah					28.000.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1		28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SMK	%	100		737.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						737.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK	Dokumen	7		737.600.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.03.1.01.01				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				737.600.000		
						Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	5		737.600.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							431.790.000		
						Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui	%	100		70.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penerbitan Ijin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				70.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB	Dokumen	3		70.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02.01				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				70.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SLB	Dokumen	5		70.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan	%	100		170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penerbitan Ijin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				170.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA	Dokumen	5		170.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.05.1.01.01				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				170.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SMA	Dokumen	2		170.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan	%	96		191.790.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penerbitan Ijin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				191.790.000		
						Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK	Dokumen	25		191.790.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01.01				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				191.790.000		
						Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SMK	Dokumen	25		191.790.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	98.99		2.659.147.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							2.659.147.000		
						Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	100		680.467.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
						Pengelolaan Pendidikan Khusus				680.467.000		
						Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya	Orang	173		680.467.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.49				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				194.467.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB dan Kebudayaan	Orang	105		194.467.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.50				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				486.000.000		
						Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	Kegiatan	5		486.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99.99		812.680.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				812.680.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya	Orang	95	812.680.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.02.1.01.50			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	Orang	0		SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.02.1.01.51			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				812.680.000		
						Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	Kegiatan	7	812.680.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
						Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	99.96	1.166.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.166.000.000		
						Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya	Orang	135	1.166.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.42			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Orang	0		SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.43			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.166.000.000		
						Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Kegiatan	10	1.166.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83.95	287.438.674.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						287.438.674.000		
						Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar	%	98.65		CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
						Jumlah sarpras SLB Wilayah II sesuai SNP	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87.87	6.461.662.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					6.461.662.000		
						Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP	Unit		6.461.662.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.01			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						
						Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah				1.407.304.000		
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3	1.407.304.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				403.332.000		
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2	403.332.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				201.666.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1	201.666.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				588.210.000		
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	5	588.210.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.14			Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)						
						Jumlah Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.15			Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)						
						Jumlah Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.16			Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)						
						Jumlah Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.17			Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)						
						Jumlah Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				3.285.810.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	16	3.285.810.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.19			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.29			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						
						Jumlah ruang terapis yang direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.31			Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.32			Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.33			Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.34			Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang			Bidang Pembinaan Diksus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.35			Pengadaan Mebel Sekolah				130.000.000		
					Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		Unit	3	130.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				445.340.000		
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	10	445.340.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I		%	89.9		CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
					Jumlah sarpras SLB Wilayah I sesuai SNP		Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
					Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III		%	87.3		CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
					Jumlah sarpras SLB Wilayah III sesuai SNP		Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium						
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
					Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV		%	80.94		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
					Jumlah sarpras SLB Wilayah IV sesuai SNP		Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX	%	81.65		736.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus						736.000.000		
						Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP	Unit	0		736.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah					470.000.000		
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2		470.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah					266.000.000		
						Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2		266.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V	%	59.48			CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus								
						Jumlah sarpras SLB Wilayah V sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI	%	85.5			CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus								
						Jumlah sarpras SLB Wilayah VI sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII	%	87.51			CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus								
						Jumlah sarpras SLB Wilayah VII sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII	%	81.02			CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus								
						Jumlah sarpras SLB Wilayah VIII sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
					Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X	%	100			CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
					Jumlah sarpras SLB Wilayah X sesuai SNP	Unit	4			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium						
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
					Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI	%	97.18			CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
					Jumlah sarpras SLB Wilayah XI sesuai SNP	Unit	10			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII	%	92.2			CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus							
						Jumlah sarpras SLB Wilayah XII sesuai SNP	Unit	14			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII	%	81.11			CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus							
						Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP	Unit	12			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.12			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.20			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.03.40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar	%	75.15	120.000.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					120.000.000		
						Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP	Unit	0	120.000.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				120.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	120.000.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	73.61		90.128.488.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						90.128.488.000		
						Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP	Unit	200		90.128.488.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.01			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)					6.155.000.000		
						Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	1		6.155.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru					5.070.060.000		
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	8		5.070.060.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi					939.874.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	2		939.874.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika					453.634.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	1		453.634.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia					461.761.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	1		461.761.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer					284.655.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	1		284.655.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					655.816.000		
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	2		655.816.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.11			Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah unit pembangunan perpustakaan sekolah	Unit	0			Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					871.642.000		
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2		871.642.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					41.287.972.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	56		41.287.972.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.20			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					4.252.369.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	22		4.252.369.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi					3.203.639.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	13		3.203.639.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				3.744.794.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	15	3.744.794.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				4.448.824.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	17	4.448.824.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				1.058.111.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	4	1.058.111.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				778.827.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	5	778.827.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.050.189.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	6	1.050.189.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				6.526.321.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	38	6.526.321.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.36			Pengadaan Mebel Sekolah				1.910.000.000		
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	15	1.910.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				6.975.000.000		
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	47	6.975.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I	%	81.39		CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
						Jumlah sarpras SMA Wilayah I sesuai SNP	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III	%	67.48		CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
						Jumlah sarpras SMA Wilayah III sesuai SNP	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV	%	71.45	875.000.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					875.000.000			
						Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP	Unit	0	875.000.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				875.000.000		
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	12		875.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
					Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX	%	78.72		400.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					400.000.000		
					Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP	Unit	1		400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				400.000.000		
					Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2		400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V	%	50.21		1.362.631.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						1.362.631.000		
						Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP	Unit			1.362.631.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru					776.151.000		
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	2		776.151.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					586.480.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4		586.480.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI	%	77	131.220.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					131.220.000			
						Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP	Unit	0	131.220.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				131.220.000			
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	131.220.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII	%	76.74			CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah sarpras SMA Wilayah VII sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII	%	78.25			CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah sarpras SMA Wilayah VIII sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X	%	99.73			CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP	Unit	6			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI	%	83.68			CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
						Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP	Unit	21			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII	%	73.45			CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP	Unit	31			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII	%	75.35			CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
						Jumlah sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP	Unit	8			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.02			Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.07			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.21			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA
		1.01.02.1.01.25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.27			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar	%	88.5	296.700.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					296.700.000			
						Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP	Unit	0	296.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				120.000.000			
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	120.000.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000			
						Jumlah unit pengadaan mebel	Unit	90	176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	88.98	178.155.435.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					178.155.435.000			
						Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP	Unit	280	178.155.435.000		Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.01			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				11.100.000.000			
						Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	2	11.100.000.000		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				58.185.435.000			
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	50	58.185.435.000		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				5.250.000.000			
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	50	5.250.000.000		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				103.620.000.000			
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	130	103.620.000.000		Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.34			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
						Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.35			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I	%	89			CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah sarpras SMK Wilayah I sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.34			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
						Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.35			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III	%	90.19	176.700.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					176.700.000			
						Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP	Unit	0	176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000			
						Jumlah unit Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	77		176.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.34			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
						Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.35			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV	%	85.87		1.453.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						1.453.400.000		
						Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP	Unit	0		1.453.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah					1.100.000.000		
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4		1.100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				353.400.000			
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	154		353.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.38			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX	%	90.76		2.530.100.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.530.100.000			
						Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP	Unit	1		2.530.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium					1.200.000.000		
						Jumlah pembangunan Ruag laboratorium	Ruang	0		1.200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah					800.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang			800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah					530.100.000		
						Jumlah pengadaan mebel sekolah	Unit	0		530.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.34			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
						Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangnan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.35			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah unit pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V	%	77.27		1.042.020.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.042.020.000			
						Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP	Unit	0		1.042.020.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				865.320.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	7	865.320.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000		
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	1	176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI	%	90.09	484.620.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					484.620.000		
						Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP	Unit	0	484.620.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				131.220.000		
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	131.220.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				353.400.000		
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	154	353.400.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII	%	92.31			CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah sarpras SMK Wilayah VII sesuai SNP	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII	%	89.1		176.700.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						176.700.000		
						Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP	Unit	0		176.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000			
					Jumlah mebel sekolah	Unit	77		176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
					Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X	%	98		353.400.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					353.400.000			
					Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP	Unit	13		353.400.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
					Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
					Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
					Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
					Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
					Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				353.400.000			
					Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	77		353.400.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
					Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
					Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI	%	90.02		176.700.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					176.700.000			
					Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP	Unit	8		176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
					Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
					Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000			
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	0	176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII	%	90.66	176.700.000		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					176.700.000			
						Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP	Unit	38	176.700.000		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium							
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.28			Pengadaan Mebel Sekolah				176.700.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	30	176.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII	%	84.95		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							
						Jumlah sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP	Unit	95		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.02			Penambahan Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.05			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.06			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.10			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.15			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.18			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.19			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.23			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
						Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	86	1.250.599.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.250.599.000		
						Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK	Angka	90	583.860.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.46			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				583.860.000		
						Jumlah Produksi Sumber Belajar Bbasis TIK Jenjang SMA	Angka	90	583.860.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran	Angka	655	666.739.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		
						Jumlah Kategori Lomba Jenjang SMA	Angka	5	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.51			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				516.739.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran Jenjang SMA	Orang	650	516.739.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	76.64	950.599.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					950.599.000		
						Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK	Angka	110	283.860.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.38			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				283.860.000		
						Jumlah Produksi Sumber Belajar Bbasis TIK Jenjang SMK	Angka	110	283.860.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran	Angka	1225	666.739.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		
						Jumlah Kategori Lomba Jenjang SMK	Angka	5	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.43			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				516.739.000		
						Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran Jenjang SMK	Orang	1220	516.739.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	%	0.07	385.358.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						385.358.000		
						Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0.5	152.802.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					152.802.000		
						Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya	Orang	60	76.400.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				76.400.000		
						Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	Dokumen	14	76.400.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi	Orang	69	76.402.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				76.402.000		
						Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SLB	Laporan	14	76.402.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0.08	85.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					85.000.000		
						Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya	Orang	100	30.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.04.1.01.01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				30.000.000		
						Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	Dokumen	14	30.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi	Orang	112	55.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.04.1.01.02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				55.000.000		
						Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SMA	Laporan	14	55.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0.08	147.556.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
					Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi				147.556.000		
						Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya	Orang	101	73.778.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.04.1.01.01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				73.778.000		
						Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Dokumen	14	73.778.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi	Orang	109	73.778.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.04.1.01.02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				73.778.000		
						Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SMK	Laporan	14	73.778.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									7.800.022.199.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									557.133.822.000	Dinas Kesehatan	
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72		Dinas Kesehatan	
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								557.133.822.000		
						Angka Kematian Balita	Angka	9,2	532.555.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						532.555.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	60	532.555.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					532.555.000		
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	%	60	72.650.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				72.650.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang minimal 90 %	%	22	72.650.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk < 0,05%	%	28,57	459.905.000		
		1.02.02.1.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				459.905.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan penanganan bayi resiko stunting	%	22	362.705.000		OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk	%	22	97.200.000		OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Angka kematian bayi	Angka	7,8	323.200.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						323.200.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	60	323.200.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					323.200.000		
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	%	88,6	323.200.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				323.200.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan kunjungan neonatal lengkap minimal 90%	%	28	323.200.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Angka kematian ibu,	Angka	100	1.587.097.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.587.097.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	40	1.587.097.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.587.097.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 %	Kabupaten/Kota	30		170,244,000		
		1.02.02.1.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut					170,244,000		
						Jumlah Kab/Kota yang memberikan pelayanan kesehatan jansia sesuai standart	Kabupaten/Kota	22		170,244,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dlayani Sesuai Standar Minimal 60%	%	88,57		118,353,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif					118,353,000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan Pelayanan kesehatan peduli Remaja Sesuai Standar Minimal 60%	%	22		118,353,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	%	100		911,209,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					911,209,000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan pelayanan persalinan difaskes sesuai standart minimal 95 %	%	32		911,209,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	%	62,8		340,491,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					340,491,000		
						Jumlah Kab/kota yang difailltasi dan dilakukan pendampingan melakukan ANC minimal 6 kali sesuai standart minimal sebesar 95 %	%	22		340,491,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%	%	31,42		46,800,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					46,800,000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan pelayanan KB mantap minimal 5 %	%	11		46,800,000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,21		9,881,180,000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,187,200,000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik	%	94		1,187,200,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1,187,200,000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik	%	100		1,187,200,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					445,000,000		
						Prosentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	100		320,741,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	%	100		124,259,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					742,200,000		
						Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Yang Memenuhi Syarat	%	85		100,000,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat-Tempat Umum (Ttu) Memenuhi Syarat	%	77		217,200,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM	%	100		425,000,000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							8,693,980,000		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	94,29		2,595,875,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						2,595,875,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%	%	80		2,595,875,000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				2,595,875,000		
						Jumlah Kab/Kota Yang Telah Mengimplementasikan Kebijakan PHBS	Kabupaten/Kota	7		954,088,000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Tema Pesan Dalam Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat	Jenis	5		1,071,500,000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kab/Kota Yang Telah Mencapai Rumah Tangga Sehat 76,5%	%	74,3		291,400,000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 %	%	71,42		278,887,000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	%	55		470,000,000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				260,000,000		
						Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun	Kelompok	11		260,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				260,000,000		
						Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan teradvokasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	Kelompok	11		260,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				210,000,000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM	Kali	15		210,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				210,000,000		
						Jumlah penyuluhan tentang kesehatan Indera penglihatan dan pendengaran pada masyarakat di BKIM	Kali	110		210,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	86		1,036,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200,000,000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5		200,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200,000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi Penguatan UKBM di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5		130,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	2		70,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					836.000,000			
						Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa	Paket	7		836.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				836.000,000			
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Ambarawa	Kali	55		836.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	85,71		986.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						150.000,000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	3		150.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					150.000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	5		100.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilker balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	3		50.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					836.000,000			
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten	Jenis	7		836.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				836.000,000			
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Klaten	Kali	55		836.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	85,71		1.136.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						250.000,000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	Kabupaten/Kota	7		250.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					250.000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	4		150.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	4		100.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					886.000,000			
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang	Jenis	7		886.000,000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05.1.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			886,000,000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wilayah Magelang	Kali	55	886,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	85,71	1,086,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			200,000,000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	3	200,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			200,000,000		
						Jumlah kab / kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	120,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	3	80,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			886,000,000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati	Jenis	7	886,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			886,000,000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wilayah Pati	Kali	55	886,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	%	85,71	1,231,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			175,000,000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	6	175,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			175,000,000		
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilayah kerja Balkesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	5	105,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di wilayah kerja Balkesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	3	70,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			1,056,000,000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang	Paket	7	1,056,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			1,056,000,000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wilayah Semarang	Kali	55	1,056,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	60	153,105,000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					153,105,000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK	Angka	5	153,105,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				153,105,000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balabkes PAK	Kali	36	153,105,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69	525,198,456,000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						519,530,358,000		
						Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	863,000,000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					863,000,000		
						Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin	%	100	863,000,000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				863,000,000		
						Persentase kelengkapan data kesehatan yang terintegrasi	%	85	863,000,000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	75	40,354,714,000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					40,354,714,000		
						Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	%	75	40,354,714,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				40,354,714,000		
						ketersediaan obat dan vaksin	Paket	4	40,354,714,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wikker Ambarawa	%	91	6,511,310,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					5,740,000,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa	Bulan	12	5,740,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3,726,000,000		
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Ambarawa	Unit	1	3,726,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				274,000,000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Ambarawa	Paket	1	274,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				775,000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Ambarawa	Bulan	12	775,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				165,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Ambarawa	Paket	1	165,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				800,000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Ambarawa	Bulan	12	800,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				771,310,000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa	Angka	85	771,310,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				771,310,000		
						Prosentase Survey Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa	Angka	85	771,310,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wiker Klaten	%	91	5,000,555,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				4,372,536,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten	Bulan	12	4,372,536,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2,500,000,000		
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Klaten	Unit	1	2,500,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Klaten	Paket	1		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				530,000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Klaten	Bulan	12	530,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				385,000,000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten	Paket	2	385,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				957,536,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Klaten	Bulan	12	957,536,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				628,019,000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten..	Angka	86	628,019,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				628,019,000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Klaten..	%	100	628,019,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wiker Magelang	%	91	1,886,040,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1,585,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang	Bulan	12		1,585,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					205,000,000		
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Magelang	Unit	1		205,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan					400,000,000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Magelang	Paket	1		400,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)					390,000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Magelang	Bulan	12		390,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan					100,000,000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang	Paket	1		100,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					490,000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Magelang	Bulan	12		490,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					301,040,000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang	Angka	87		301,040,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					301,040,000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Magelang.	%	91		301,040,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati	%	91		4,042,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3,730,070,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati	Bulan	12		3,730,070,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					2,140,000,000		
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Pati	Unit	1		2,140,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati	Paket	1			SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)					565,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan reagen, bahan habis pakai di Balkesmas Pati	Bulan	12		565,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan					400,000,000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati	Paket	1		400,000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					625,070,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan makan minum di Balkesmas Pati	Bulan	12	625,070,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					311,930,000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati..	%	83	311,930,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				311,930,000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan di Balkesmas Pati	%	100	311,930,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wiker Semarang	%	91,3	2,796,796,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2,250,000,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang	Bulan	12	2,250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				550,000,000		
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Semarang	Unit	1	550,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				70,000,000		
						Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Semarang	Paket	0	70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				480,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan Reagen, bahan habis pakai di Balkesmas Wilayah Semarang	Bulan	12	480,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				350,000,000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di balkesmas Semarang	Paket	1	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				800,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan makan minum di Balkesmas Wilayah Semarang	Bulan	12	800,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					546,796,000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang	%	86	546,796,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				546,796,000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Semarang	%	100	546,796,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	74,28	406,399,052,000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng	%	55,55		SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								Target	Rp (000)			
												2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Proporsi RS Provinsi Jateng dengan Unggulan Di Jawa Tengah	%	28,57			SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					406,399,052,000			
						presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS	%	74,43		402,995,427,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.16			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				402,995,427,000			
						Persentasi Masyarakat yang mendapatkan dukungan kontribusi pembiayaan kesehatan	%	100		402,995,427,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	100		450,465,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				450,465,000			
						Presentase Kab/Kota dengan 90% Labkesda terakreditasi	%	100		144,560,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% Puskesmas terakreditasi	%	100		142,390,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% RS terakreditasi	%	100		163,515,000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	%	34,29		695,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				110,000,000			
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai dengan Standar Minimal 2 Puskesmas	%	68,57		110,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.20			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				585,000,000			
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20%	%	100		255,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20%	%	100		330,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan	%	85,71		2,258,160,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				200,000,000			
						Proporsi Pelayanan Kesehatan pada Tanggap Darurat Krisis Kesehatan	%	100		200,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.23			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Panangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				150,000,000			
						Proporsi Kab/Kota Yang Memiliki Pelayanan Gawat Darurat Pra Rumah Sakit	%	85,71		150,000,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1,908,160,000			
						Proporsi Kab/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Unit-Unit Kritis Sesuai Ketentuan	%	85,71		302,432,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Rs Provinsi Jawa Tengah Yang Melaksanakan RS Tanpa Dinding	%	85,71		80,104,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas	%	83		1,525,624,000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	Kabupaten/Kota	35		1,031,477,000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1,031,477,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku	Angka	35		1,031,477,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					1,031,477,000		
						Jumlah Labkesda Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan dan mutu laboratorium	%	100		466,730,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase pelayanan pengujian alat kesehatan di Fasyankes	%	25		85,970,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar di Balabkes PAK	%	80		478,777,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4		11,722,121,000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11,722,121,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK	Bulan	12		11,722,121,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.02			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3,000,000,000		
						Jumlah Pembangunan fasilitas kesehatan Balabkes PAK	Paket	0		3,000,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.08			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Pembangunan fasilitas kesehatan Balabkes PAK	Unit	1			SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balabkes PAK	Paket	1			SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							
						Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0			SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)					3,138,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai lainnya di Balabkes PAK	Bulan	12		3,138,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan					5,584,121,000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat alat kesehatan/ peralatan laboratorium yang dipenuhi di Balabkes PAK	Paket	12		5,584,121,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan reagen di Balabkes PAK	Bulan	0			SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,7		38,923,293,000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						38,423,293,000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM	Bulan	12		38,423,293,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					35,000,000,000		
						Jumlah gedung yang dibangun	Unit	1		35,000,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					1,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipenuhi di BKIM	Unit	1	1.000.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang terpenuhi Di BKIM	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				1.000.000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di BKIM	Bulan	12	1.000.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				423.293,000		
						bulan terpenuhnya pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan di BKIM	Bulan	12	323.293,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan peralatan / peralatan labororium kesehatan yang terpenuhi di BKIM	Unit	150	100.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.000.000,000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di BKIM	Bulan	12	1.000.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				500.000,000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	87	500.000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				500.000,000		
						Tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar di BKIM	%	100	500.000,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						5.064.854,000		
						Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	1.118.198,000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.118.198,000		
						Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	%	100	1.118.198,000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.118.198,000		
						Persentase SDM Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	%	70	1.118.198,000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	92	3.946.656,000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				3.946.656,000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	95	3.946.656,000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				3.946.656,000		
						Persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan yang terakreditasi	%	97	3.946.656,000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						603.244,000		
						Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	71	603.244,000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				548.140,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	75	548,140,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				548,140,000		
						Sarana Distribusi farmasi, alkes dan sarana pelayanan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	75	548,140,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
					Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				55,104,000		
						Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	65	55,104,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				55,104,000		
						Sarana produksi Farmasi dan makanan minuman Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	65	55,104,000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	85,71	2,449,580,000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,449,580,000		
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	85,71	259,130,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				259,130,000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	6	259,130,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				259,130,000		
						Jumlah kab / kota dengan angka kesakitan DBD < 46 / 1000 penduduk di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	6	75,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota dengan cakupan penemuan HIV/AIDS > 40 % di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	76,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota dengan CNR > 100 / 100,000 penduduk di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	6	108,130,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	74,3	85,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				85,000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	6	85,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				85,000,000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	6	20,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV/AIDS >40% di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	6	30,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100,000 pendd di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	20,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan kasus malaria di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	1	15,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	85,71	150,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					150.000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balikesmas Klaten	Kabupaten/Kota	6	150.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				150.000,000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilkes Balikesmas Klaten..	Kabupaten/Kota	7	40.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilkes Balikesmas Klaten..	Kabupaten/Kota	7	50.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100,000 pendd di wilker Balikesmas Klaten..	Kabupaten/Kota	5	60.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balikesmas Magelang	%	71,42	160.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					160.000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	4	160.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				160.000,000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/100,000 penduduk di wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	30.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	6	50.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100,000 pendd di wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	6	50.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan kasus Malaria di wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	6	30.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balikesmas Semarang	%	85,71	196.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					196.000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balikesmas Semarang	Kabupaten/Kota	5	196.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				196.000,000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilkes Balikesmas Semarang	Kabupaten/Kota	6	72.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilkes Balikesmas Semarang	Kabupaten/Kota	6	62.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100,000 penduduk di wilker Balikesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	5	62.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular	%	68,57	1.599.450,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.599.450,000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	%	95	1.599.450,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.599.450,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian target penyakit tular vektor dan zoonosis	%	80	684.450,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan/deteksi dini Penyakit Menular Langsung	%	74,29	915.000,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	60	13.723.754,000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						13.723.754,000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	100	358.344,000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					358.344,000		
						Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	Kabupaten/Kota	35	358.344,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				358.344,000		
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	Kabupaten/Kota	35	358.344,000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	77	11.569.410,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					11.569.410,000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza	%	88	11.569.410,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11.089.410,000		
						Persentase Kab/Kota dengan desa yang melaksanakan layanan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	%	100	10,911,055,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Kab/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini gangguan penglihatan dan pendengaran	%	52	61.150,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Cervik Dengan Metode Iva	%	88	117.205,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				305.000,000		
						Persentase kabikota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan jiwa	%	100	305.000,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				175.000,000		
						Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas Yang melaksanakan layanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)	%	15	175.000,000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Ambarawa	%	52	540.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					540.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	6		540,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					540,000,000		
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balikesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	6		540,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Pati	%	85,71		175,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					175,000,000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balikesmas Pati	Kabupaten/Kota	6		175,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					175,000,000		
						Jumlah kab / kota dengan puskesmas yang melaksanakan posbindu institusi di wilayah kerja Balikesmas Pati	Kabupaten/Kota	5		175,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Wilayah Magelang	%	57,14		338,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					338,000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Wilayah Magelang..	Kabupaten/Kota	5		338,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					338,000,000		
						Jumlah kab/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balikesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	6		338,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Klaten	%	85,71		47,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					47,000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Klaten	Kabupaten/Kota	6		47,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					47,000,000		
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balikesmas Klaten	Kabupaten/Kota	7		47,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Semarang	%	85,71		696,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					696,000,000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balikesmas Semarang	Kabupaten/Kota	6		696,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					696,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Instansi di Wilker Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	6		696,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpolensi bencana skala provinsi	%	100		3,438,000,000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3,438,000,000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100		2,366,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2,366,000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam	%	100		1,821,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					200,000,000		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pra bencana/KLB	%	100		200,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					1,381,000,000		
						Prosentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berdampak dan akan beresiko pada kasus KLB	%	100		1,381,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.16			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota					240,000,000		
						prosentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bencana/Krisis Kesehatan	%	100		40,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase respon cepat pelayanan kesehatan tahap tanggap darurat bencana / krisis kesehatan	%	100		200,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Uci Desa	%	99,96		545,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.17			Pengelolaan Surveilans Kesehatan					545,000,000		
						Tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap	%	95		545,000,000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100		212,000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					212,000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Ambarawa	%	100		212,000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					212,000,000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Ambarawa	%	100		212,000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100		262,000,000		
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					262,000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Magelang	%	100		262,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				262.000,000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	262.000,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	312.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					312.000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas pati	%	100	312.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				312.000,000		
						Persentase kabupaten / kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat, dan pasca bencana / KLB di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	100	312.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	112.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					112.000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Klaten	%	100	112.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				112.000,000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Klaten	%	100	112.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana < 24 Jam	%	100	174.000,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					174.000,000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Semarang	%	100	174.000,000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				174.000,000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di Wilayah Kerja Balkesmas Wilayah Semarang	%	100	174.000,000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
meningkatkan tata kelola organisasi									163.261.204.000	Dinas Kesehatan	
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja								100.587.265.000		
						Nilai SAKIP	Angka	87	100,587,265,000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100,587,265,000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100,587,265,000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					733,000,000		
						Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD	%	100	733,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X,XX,01,1.01,01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				533,000,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	533,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.01,07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200,000,000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	200,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99,854,265,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	99,854,265,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01,1.02,01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				98,304,265,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	98,304,265,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1,000,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1,000,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.02,03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	250,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.02,04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				300,000,000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	1	300,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01,1.04,07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
									62,673,939,000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5	62,673,939,000	Dinas Kesehatan	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						62,673,939,000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	4,530,033,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,594,533,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,594,533,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1,594,533,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12	1,594,533,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	5		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					726,400,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		726,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140,000,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					144,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		144,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					99,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12		99,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		6,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					22,400,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		22,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					260,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		260,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					30,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1		30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						110,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		110,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					110,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	10		110,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,264,100,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1,264,100,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		8,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					244,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		244,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,012,100,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1,012,100,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					835,000,000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		835,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				160,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		160,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		55,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				385,000,000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5		385,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				185,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		185,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		16,308,039,000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					600,000,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	12		600,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,03,02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		250,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,03,04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				350,000,000			
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12		350,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					600,000,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1		600,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,05,03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300,000,000			
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300,000,000			
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	25		300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3,928,500,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1		3,928,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				170,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12		170,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					487,000,000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	12		287,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	12		200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					17,450,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		17,450,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					207,550,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		207,550,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					364,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		364,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12		10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					79,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		79,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2,271,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		2,271,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					322,000,000		
						Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1		322,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						478,000,000		
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		478,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,05			Pengadaan Mebel					50,000,000		
						Jumlah unit pengadaan mebeleur	Unit	5		50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					28,000,000		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5		28,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Pengadaan aset tak berwujud	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					400,000,000		
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	0		400,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8,671,539,000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		8,671,539,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					50,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12		50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2,627,500,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12		2,627,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		160,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5,834,039,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		5,834,039,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,030,000,000		
					Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		2,030,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12		650,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,05			Pemeliharaan Mebel				50,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	12		50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				185,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		185,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya	Bulan	12		100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				850,000,000		
					Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	1		850,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		195,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		5,799,303,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,047,503,000		
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1		2,047,503,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2,047,503,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12		2,047,503,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ workshop/ seminar	Orang	2			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					861,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1		861.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					60.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		60.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					80.000,000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	12		80.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					175.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		175.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					180.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		180.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					132.500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		132.500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					6.000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12		6.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					32.500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		32.500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					165.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		165.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					30.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik)	Dokumen	1		30.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.000,000		
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1		350.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000,000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	Unit	2		200.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000,000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Unit	2		150.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.820.800,000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1		1.820.800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12		6.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					650.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		650.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,164,800,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1,164,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					720,000,000			
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1		720,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12		60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				235,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		235,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				35,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	12		35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250,000,000			
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	2		250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				140,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dan sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		140,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		4,631,045,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					939,255,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		939,255,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				939,255,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Jasa Pelayanan)	Bulan	12		939,255,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,007,390,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1,007,390,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				348,400,000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12		233,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12		115,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		65.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					80.000,000		
						jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		80.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					90.000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		90.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.000,000		
						Jumlah bulan terukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		4.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitas Kunjungan Tamu					12.720,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		12.720,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					365.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		365.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12.270,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1		12.270,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						506.400,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		506.400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					49.400,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5		49.400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					457.000,000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6		457.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.125.000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1.125.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		6.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					250.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		250.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Peltengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					869.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		869.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.053.000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1.053.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					168.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		168,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1.09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					160,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		160,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1.09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1.09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					450,000,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2		450,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1.09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					225,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		225,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		8,478,176,000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,083,469,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		4,083,469,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4,083,469,000		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12		4,083,469,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	60			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						934,647,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		934,647,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					62,900,000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		62,900,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					297,845,000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	12		297,845,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12,700,000		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12		12,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					110,862,000		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12		110,862,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					100,000,000		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12		100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					31,800,000		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12		31,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305,640,000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan	12	305,640,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12,900,000		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	200	12,900,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					499,160,000		
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen	12	499,160,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				299,160,000		
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Unit	30	299,160,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
					Pengadaan Aset Tak Berwujud		Unit	10		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200,000,000		
					Pengadaan Mebel		Unit	30	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	10	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,228,407,000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	12	2,228,407,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah		Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah		Bulan	12	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47,300,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	47,300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,776,107,000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan	12	1,776,107,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					732,493,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen	12	732,493,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151,025,000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan/berkala dan pajak kendaraan dinas jabatan		Bulan	12	151,025,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap lainnya		Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Aset Tetap Tak Berwujud		Bulan	12	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				275,300,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	275.300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.168,000		
						Jumlah bulan dipenuhinya pemeliharaan mebel	Bulan	12	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala di sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	91.168,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	5,866,000,000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/workshop/seminar	Orang	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				865,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	865,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180,000,000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	2	130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	2	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	7,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	8,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,605,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1,605,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X,XX,01,1.07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1,154,000,000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	2		1,154,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud					100,000,000		
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	1		100,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					351,000,000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	5		351,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,083,000,000		
		X,XX,01,1.08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		2,083,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										10,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat daerah	Bulan	12		10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					700,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		700,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor					6,800,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		6,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1,366,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1,366,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,313,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dokumen	1		1,313,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X,XX,01,1.09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		100,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					133,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		133,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	12		100,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X,XX,01,1.09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					750,000,000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	3		750,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1.09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					230,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		230,000,000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		4,491,151,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,478,261,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1,478,261,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1,478,261,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12		1,478,261,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	52			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,028,890,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1,028,890,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						250,200,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		250,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		2,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						166,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		166,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						202,890,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		202,890,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,08		Fasilitasi Kunjungan Tamu						74,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		74,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						263,600,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		263,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1		20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						434,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		434,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						249,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		249,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,08		Pengadaan Aset Tak Berwujud						60,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1		60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,07,10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125,000,000		
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	1		125,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,140,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1,140,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					17,000,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12		17,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					235,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12		235,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					888,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12		888,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						410,000,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1		410,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					160,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12		160,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					52,500,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12		52,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					30,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud		Bulan	12		30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					120,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Bulan	12		120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					47,500,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12		47,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		%	100		4,801,307,000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,637,307,000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	12		1,637,307,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1,637,307,000		
					Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)		Bulan	12		1,637,307,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar		Orang	39			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						696,700,000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Dokumen	12		696,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan pemenuhan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90,000,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16,700,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	16,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150,000,000		
						Jumlah Bulan pemenuhan kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	275,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1	25,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					430,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	430,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				173,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	173,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				75,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud dalam	Unit	2	75,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				182,000,000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	15	182,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,361,500,000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	1,361,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,023,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1,023,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					675,800,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	675,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,09,06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					51,800,000		
						Jumlah bulan pemenuhan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	51,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,09,08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					50,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,09,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					274,000,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	12	274,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X,XX,01,1,09,10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	7.768,885,000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.788,952,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	2.788,952,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,02,02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.788,952,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	2.788,952,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI KULON
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,05,09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.083,535,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,083,535,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					474,495,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	15	394,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	80,495,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					32,400,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		32,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					82,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		82,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					7,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		7,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					21,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		21,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					286,440,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		286,440,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					70,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Bulan	1		70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,07,08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,806,398,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		2,806,398,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					115,750,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		115,750,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1,345,148,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		1,345,148,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,225,500,000		
					Jumlah terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	1,225,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,090,000,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	1,090,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	180,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				320,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	320,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,09,08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud		Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400,000,000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	3	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	190,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
JUMLAH									720.395.026.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									39.261.644.000		
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72			
									39.261.644.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	84		39.261.644.000	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						38.961.290.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100		38.961.290.000	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					38.961.290.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	65		38.961.290.000	
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						
						Jumlah Pemenuhan Bangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				38.961.290.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	2		38.961.290.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1			SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah pemenuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Paket	1			SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Paket	1			SEKSI PENUNJANG TERAPI
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1			SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1			SEKSI PENUNJANG TERAPI OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	80				
		1,02,02,1,04,03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	90		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; KOTA SURAKARTA --> BANJARSARI --> KELURAHAN BANJARSARI	
		1,02,03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	45				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	3				
		1,02,03,1,02,01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan							
						Jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang mengikuti Diklat	Orang	950		BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi ; KOTA SURAKARTA --> BANJARSARI --> KELURAHAN BANJARSARI	
		1,02,05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						300,354,000			
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90		300,354,000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					300,354,000			
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3		300,354,000		
		1,02,05,1,01,01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				300,354,000			
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Kegiatan	3700		300,354,000	SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; KOTA SURAKARTA --> BANJARSARI --> KELURAHAN BANJARSARI
meningkatkan tata kelola organisasi						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		1.189.861.019.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan					Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		1.189.861.019.000		
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.189.861.019.000		
						Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	82,5		1.015.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD						1.015.000.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	100		1.015.000.000.000		
		X,XX,01,1,10,01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.015.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan BLUD	%	95		1.015.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	95		174,861,019,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						174,861,019,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	24		174,861,019,000		
		X,XX,01,1,02,01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					174,861,019,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		174,861,019,000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; KOTA SURAKARTA --> BANJARSARI --> KELURAHAN BANJARSARI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	2				
		X,XX,01,1,07,02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	2			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH										1.229.122.663.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									250.000.000		
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72			
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	250.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah paket pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	9		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.12			Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes (paket)	Paket	1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
						Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket			SEKSI PENUNJANG TERAPI	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100			
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	40				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
						Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	Kegiatan	5				
		1.02.03.1.02.01				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	720			SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	OPD Provinsi : BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						250.000.000			
						Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	40		250.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						250.000.000		
						Jumlah kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3		250.000.000		
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung Hospital Without Walls (HWW)	Orang	1800		250.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi : BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
meningkatkan tata kelola organisasi										653.407.852.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan					Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		653.407.852.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		653.407.852.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							653.407.852.000		
						CRR Total	%	81		540.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD						540.000.000.000		
						Persentase CRR parsial	%	95		540.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				540.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100		540.000.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi : BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%	100		113.407.852.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						113.407.852.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		113.407.852.000		
		X.XX.01.1.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				113.407.852.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		113.407.852.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi : BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
				Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan pengadaan Administrasi Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan		Unit	0			SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
JUMLAH									653.657.852.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSUD Tugurejo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		(11)	(12)	
								2023				
								Target	Rp (000)			
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									6.148.234.000			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72				
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90		6.148.234.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							5.898.234.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100		5.898.234.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						5.400.393.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		5.400.393.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					5.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Paket	1		5.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0			SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)							
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0			SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0			SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					400.393.000		
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan minum serta faskes lainnya	Paket	1		400.393.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						497.841.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		497.841.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit					497.841.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	497.841.000	SUB BAGIAN ORPEG	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	%	20			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	300		SUB BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						250.000.000		
						Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	250.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000		
						jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	250.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1000	250.000.000	SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
meningkatkan tata kelola organisasi									323.033.572.000		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								323.033.572.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5	323.033.572.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						323.033.572.000		
						CRR total	%	50,85	235.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					235.000.000.000		
						CRR Parsial	%	72,34	235.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					235.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	235.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	88.033.572.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					88.033.572.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	88.033.572.000		
		X.XX.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					88.033.572.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	88.033.572.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0			
		X,XX,01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0			
JUMLAH									329.181.806.000		
										SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSUD Kelet Donorejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									1.196.600.000		
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72			
									1.196.600.000		
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet	%	87	1.196.600.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						996.600.000		
						Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	996.600.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	80			
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						
						Jumlah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket			SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah Pemenuhan Pengembangan Rumah Sakit	Paket	0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	0		SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	1		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan, minum serta faskes lainnya	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					130,000,000			
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	30		130,000,000		
		1,02,02,1,02,11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					130,000,000		
						Jumlah pasien kusta yang mendapatkan pelayanan	Orang	100		130,000,000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						866,600,000		
						Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	%	20		866,600,000		
		1,02,02,1,04,02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit					866,600,000		
						Prosentase peningkatan tata kelola RS	%	20		866,600,000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1,02,02,1,04,03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%				SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1,02,03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	50				
		1,02,03,1,02,01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan							
						Jumlah SDM kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	100			SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1,02,05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							200,000,000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100		200,000,000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						200,000,000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	85		200,000,000		
		1,02,05,1,01,01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200,000,000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	300		200,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
meningkatkan tata kelola organisasi										86.428.212.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan					Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5				
										86.428.212.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		86,428,212,000		
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							86,428,212,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						CRR Total	%	35		57.028.000,000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD						57.028.000,000		
						Persentase CRR Parsial	%	95		57.028.000,000		
		X,XX,01.1.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						57.028.000,000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100		57.028.000,000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100		29.400.212,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.400.212,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14		29.400.212,000		
		X,XX,01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						29.400.212,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14		29.400.212,000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0				
		X,XX,01.1.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0			SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH										87.624.812.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									802.056.000		
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72			
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohusodo	%	100	802.056.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						302.056.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	302.056.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						
						Jumlah pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana beserta pendukungnya	Paket			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik	Paket	3		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket			SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan minum serta faskes lainnya	Paket	3		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100				
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	30000			SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					302.056,000			
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		302.056,000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit					302.056,000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100		302.056,000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0			SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	24				
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan							
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	500			SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							500.000,000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100		500.000,000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						500.000,000		
						Jumlah advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	5		500.000,000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					500.000,000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1500		500.000,000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
meningkatkan tata kelola organisasi										117.767.927.000		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5				
	Meningkatnya kualitas pelayanan									117.767.927.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		117.767.927,000		
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							117.767.927,000		
						CRR Total	%	45		63,000,000,000		

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program (4)	Kegiatan (5)	Sub Kegiatan (6)	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) (7)	Satuan (8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah (11)	Lokasi (12)
								2023			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					63.000.000,000		
						CRR Parsial	%	96	63.000.000,000		
		XXX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				63.000.000,000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	63.000.000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	54.767.927,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.767.927,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	54.767.927,000		
		XXX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				54.767.927,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	54.767.927,000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0			
		X,XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									118.569.983.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSJD Surakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									26.123.434.000			
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72				
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								26.123.434.000			
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	97,33	26.123.434.000			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						24.873.434.000			
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100				
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	42194			SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	95	24.873.434.000			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					24.404.434.000			
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	90	24.404.434.000			
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							
						Terpenuhinya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	0			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit							
						Terpenuhinya pengembangan Rumah Sakit	Paket	0			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							
						Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	0			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medik	Paket	0			SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan							
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0			SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				15.000.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1		15.000.000,000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0			SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.14				Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				1.548.434,000		
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	3		1.548.434,000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.20				Penyediaan Telermedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah ketersediaan pelayanan telermedicine di fasyankes	Paket	1			SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22				Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				7.856.000,000		
						jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	2		7.856.000,000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				469.000,000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	95		469.000,000		
		1.02.02.1.04.02				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				469.000,000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100		469.000,000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.04.03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	80			SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							750.000,000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100		750.000,000		
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				750.000,000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		750.000,000		
		1.02.03.1.02.01				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				750.000,000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	2750		750.000,000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							500.000,000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	95		500.000,000		
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				500.000,000		
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3		500.000,000		
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				500.000,000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	40000		500.000,000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
meningkatkan tata kelola organisasi									107.535.709.000			
	Meningkatnya kualitas pelayanan					Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		107.535.709.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		107.535.709.000		
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							107.535.709.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	35		50.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD						50.000.000.000		
						Cost Recovery rate (CRR) Parsial	%	100		50.000.000.000		
		X,XX,01.1.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						50.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100		50.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		57.535.709.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						57.535.709.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		57.535.709.000		
		X,XX,01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						57.535.709.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		57.535.709.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1				
		X,XX,01.1.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH										133.659.143.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									679.797.000		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74,72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								679.797.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. RM Soedjarwadi	%	97	679.797.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						523.700.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	%	100			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Jumlah ODGJ dan ODMK yang terlayani	Orang	23000			SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	523.700.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIS OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIS OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1			SUB BAGIAN RUMAH TANGGA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0			SEKSI PENUNJANG NON MEDIS OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIS OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0			SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.22				Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan minum serta faskes lainnya	Paket	1			SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				523.700,000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		523.700,000		
		1.02.02.1.04.02				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				523.700,000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100		523.700,000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.04.03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0			SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							33.200,000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	89		33.200,000		
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				33.200,000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	4		33.200,000		
		1.02.03.1.02.01				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				33.200,000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	445		33.200,000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							122.897,000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	20,35		122.897,000		
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				122.897,000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	7		122.897,000		
		1.02.05.1.01.01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				122.897,000		
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Orang	1150		122.897,000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
meningkatkan tata kelola organisasi										101.373.299.000		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85,5				
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5		101.373.299.000		
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							101.373.299.000		
						CRR total	%	37,39		63.000.000.000		
						Peningkatan Pelayanan BLUD				63.000.000.000		
						CRR parsial	%	68,25		63.000.000.000		
		X,XX,01.1.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				63.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100		63.000.000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		38.373.299,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38.373.299,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1		38.373.299,000		
		X,XX,01,1,02,01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					38.373.299,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		38.373.299,000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0				
		X,XX,01,1,07,02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit				SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH										102.053.096.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas sesuai dengan Standar Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor									440.156.525.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44,24		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik								175.913.409.000		
						Persentase Panjang Jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,35	175.913.409.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						175.913.409.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	98,29	15.493.946.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.493.946.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1	Km	119,014	7.154.396.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09		Rehabilitasi Jalan					1.230.700.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 1	Km	0,1	1.230.700.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan					5.923.696.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	120,014	5.923.696.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2	Km	73,433	8.339.550.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09		Rehabilitasi Jalan					4.055.420.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	2,5	4.055.420.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan					4.284.130.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	74,933	4.284.130.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	95,49	27.623.491.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					27.623.491.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1	Km	100,653	4.193.562.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09		Rehabilitasi Jalan							
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Magelang 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan					4.193.562.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	100,653	4.193.562.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2	Km	185,07	23.429.929.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09		Rehabilitasi Jalan					14.604.464.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Magelang 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	7,4	14.604.464.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1,03,10,1,01,11				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Km	0		8,825,465,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Pemeliharaan Rutin Jalan						
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	198,968		8,825,465,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	91,89		13,261,585,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi					13,261,585,000		
		1,03,10,1,01,09				Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1	Km	143,83		7,557,629,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 1	Km				SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1,03,10,1,01,11				Pemeliharaan Rutin Jalan				7,557,629,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1	Km	113,19		7,557,629,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2	Km	124,57		5,703,956,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1,03,10,1,01,09				Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1,03,10,1,01,11				Pemeliharaan Rutin Jalan				5,703,956,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	Km	124,571		5,703,956,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,71		13,198,479,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi					13,198,479,000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1	Km	158,9		9,293,661,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1,03,10,1,01,09				Rehabilitasi Jalan				1,724,320,000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 1	Km	1		1,724,320,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1,03,10,1,01,11				Pemeliharaan Rutin Jalan				7,569,341,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	158,9		7,569,341,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2	Km	91,67		3,904,818,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1,03,10,1,01,09				Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1,03,10,1,01,11				Pemeliharaan Rutin Jalan				3,904,818,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	92,67		3,904,818,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	80,61		27,257,489,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi					27,257,489,000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1	Km	188,73		13,254,818,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1,03,10,1,01,09				Rehabilitasi Jalan				6,048,000,000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1	Km	0,1		3,000,000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	0,5		3,048,000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1,03,10,1,01,11				Pemeliharaan Rutin Jalan				7,206,818,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	188,73	7,206,818,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2	Km	197,76	14,002,671,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan			14,002,671,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	197,76	14,002,671,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	96,06	15,469,098,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi				15,469,098,000			
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan			5,836,243,000		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 1	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 1	Km	0,5	1,108,800,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan			4,727,443,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	134,88	4,727,443,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2	m	85,48	9,832,855,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan			7,081,040,000			
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	2	7,081,040,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan			2,551,815,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	85,48	2,551,815,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	93,82	20,903,349,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta,	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi				20,903,349,000			
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan			8,089,153,000		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Surakarta 1	Km	0,03	1,712,320,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 1	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan			6,376,833,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	166,945	6,376,833,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2	Km	235,59	12,814,196,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Surakarta 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 2	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan			12,814,196,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	235,59	12,814,196,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	96,46	10,358,632,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi				10,358,632,000			
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1	Km	87,67	4,198,940,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.198.940,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	87,67		4.198.940,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2	Km	97,72		6.159.692,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.159.692,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	98,72		6.159.692,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,92		13.475.205,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					13.475.205,000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1	Km	128,69		11.165.310,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.024.000,000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Wonosobo 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	1		3.024.000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 1	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.141.310,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	128,695		8.141.310,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2	Km	44,8		2.309.895,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Wonosobo 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km				SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 2	Km	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				2.309.895,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	44,8		2.309.895,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	83,6		1.152.785,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.152.785,000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1	m	1226,22		613.110,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				613.110,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	1226,22		613.110,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2	m	1079,35		539.675,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				539.675,000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	1079,35		539.675,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	93,6		954.975,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					954.975,000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1	m	1904,05		241.300,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				241.300,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	482,6		241.300,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2	m	482,6		713.675,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				713.675,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	1904,05		713.675,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	93,77		1.208.875,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.208.875,000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1	m	1252		492.400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 1	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				492.400,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1	m	995		492.400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2	m	1432,95		716.475,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 2	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				716.475,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2	m	1432,95		716.475,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,44		4.499.750,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						4.499.750,000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1	m	1601,6		3.824.800,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan					3.024.000,000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	60		3.024.000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				800.800,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	1601,6		800.800,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2	m	1349,9		674.950,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				674.950,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	1349,9		674.950,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,13		2.831.750,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						2.831.750,000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1	m	1958,7		979.350,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				979.350,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	1958,7		979.350,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2	m	1648,8		1.852.400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan					1.008.000,000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	40		1.008.000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				844.400,000			
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	1648,8		844.400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	85,46		1.022.900,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1,022,900,000		
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1	m	1316,8	658,400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	1316,8	658,400,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2	m	729	364,500,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	729	364,500,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94,73	2,180,200,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta,	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2,180,200,000		
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1	m	1078,2	539,100,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	1078,2	539,100,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2	m	3282,2	1,641,100,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	3282,2	1,641,100,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	86,09	4,141,300,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4,141,300,000		
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1	m	780,4	390,200,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	0	390,200,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	780,4	390,200,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2	m	1243	3,751,100,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	6,7	3,129,800,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	1236,3	621,500,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,85	879,600,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					879,600,000		
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1	m	1384	692,000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	0	692,000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	1384	692,000,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.18		Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2	m	375,2	187,600,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	0	187,600,000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	375,2	187.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor								264.243.116.000		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	264.243.116.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						264.243.116.000		
						Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	3.070.248.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.070.248.000		
						Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan	Dokumen	3	3.070.248.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				3.070.248.000		
						Jumlah Dokumen Kondisi Jalan	Dokumen	1	1.920.248.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Kondisi Jembatan	Dokumen	1	500.000.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen perhitungan LHR	Dokumen	1	650.000.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	45,16	97.049.777.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					97.049.777.000		
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)	Km	2,1	25.245.721.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.05			Pembangunan Jalan						
						Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 1	Km	0			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				25.245.721.000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 1	Km	1,1	25.245.721.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan						
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat 1	Km				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan						
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Barat 1	m				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover						
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Barat 1	Km				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan						
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	m	0			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)	Km	4,8	71.804.056.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.05			Pembangunan Jalan				7.058.289.000		
						Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	1,5	7.058.289.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				64.745.767.000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2	Km	2,3	64.745.767.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan						
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat 2	Km				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan						
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Barat 2	m				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover							
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Barat 2	Km				SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan							
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	m	0			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,49		73.764.880,000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						73.764.880,000		
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)	Km	2		56.265.506,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar					44.215.506,000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Timur 1	Km	7,4		44.215.506,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan							
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur 1	Km				SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan							
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Timur 1	m				SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover							
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Timur 1	Km	0			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan					12.050.000,000		
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	m	50		12.050.000,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)	Km	2		17.499.374,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar					9.430.474,000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Timur 2	Km	1		9.430.474,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan					8.068.900,000		
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur 2	Km	1		8.068.900,000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan							
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Timur 2	m				SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover							
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Timur 2	Km	0			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan							
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	100		137.770,000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						137.770,000		
						Panjang Jalan yang dileger	Km	2404,741		137.770,000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.03			Pengelolaan Leger Jalan					137.770,000		
						Panjang Jalan yang dileger	Km	6,89		137.770,000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	100		13.833.339,000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						13.833.339,000		
						Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia	Unit	227		13.833.339,000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan					13.833.339,000		
						Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	226		9.588.977,000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	59		1.854.150,000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						persediaan bahari/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	3305		2.390.212,000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100		3.946.389,000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi						3.946.389,000		
						Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	1395		3.946.389,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.22			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan					3.946.389,000		
						dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2		305.550,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	50		668.451,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	1395	390,938,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						unit Pemeliharaan alat uji	Unit	95	184,990,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						unit Penambahan alat uji	Unit	13	2,396,460,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	72,440,713,000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					72,440,713,000		
						Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	4	24,117,193,000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.21			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				10,194,685,000		
						Jumlah Kegiatan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1	10,194,685,000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.10.1.01.23			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				13,922,508,000		
						Jumlah dokumen pengawasan jalan	Dokumen	9	13,056,733,000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengawasan jembatan	Dokumen	1	865,775,000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	5	8,843,520,000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				8,843,520,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan	Dokumen	3	8,583,520,000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	Dokumen	2	260,000,000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						luas lahan yang dibebaskan	m2	5010	39,480,000,000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.02			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				39,480,000,000		
						Luas lahan yang dibebaskan untuk bangunan gedung	m2	35000	35,000,000,000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas lahan yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	m2	900	4,480,000,000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Konstruksi									212.343.136.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Persentase jumlah pelayanan air minum dan sanitasi serta bangunan gedung milik daerah menuju baik	%	52.44		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya akses layak air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat								98.062.758.000		
						Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	89.65	98,062,758,000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						96,244,958,000		
						Persentase akses layak air minum perdesaan	%	83,3	1,042,114,000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					1,042,114,000		
						Jumlah Sambungan rumah yang tertayani SPAM perdesaan	KK	3309148	1,042,114,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.03.1.01.08			Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi				1,042,114,000		
						Jumlah Kabupaten/Kota terfasilitasi dalam pengelolaan SPAM perdesaan	Kabupaten/Kota	29	1,042,114,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase akses layak air minum perkotaan	%	94,15	415,976,000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					415,976,000		
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan	KK	2957458	415,976,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.08			Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi				415,976,000		
						Jumlah Kabupaten/Kota terfasilitasi dalam pengelolaan SPAM perkotaan	Kabupaten/Kota	35	415,976,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	100	94,786,868,000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					94,786,868,000		
						Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun	Liter	1319	94,786,868,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				1,340,868,000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun	Dokumen	3	1,340,868,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.03			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				93,446,000,000		
						Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun	Liter	45	93,446,000,000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						1,817,800,000		
						Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	91,5	1,817,800,000		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					1,817,800,000		
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik	KK	6941376,46	1,817,800,000		
		1.03.05.1.01.06			Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik				1,817,800,000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas dalam pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten/Kota	8	1,817,800,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi								114.280.378.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	114,280,378,000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						111,305,000,000		
						Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	15,23	111,305,000,000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					111,305,000,000		
						Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n)	Unit	11	111,305,000,000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1,03,08,1,01,01			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				111,060,000,000		
						Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (tahun n)	Unit	3	111,060,000,000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1,03,08,1,01,04			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				165,000,000		
						Jumlah BGMD yang mendapat bantuan teknis	Unit	16	165,000,000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1,03,08,1,01,06			Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)				80,000,000		
						Jumlah SKPD yang mengikuti bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Unit	1	80,000,000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1,03,09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						672,698,000		
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	15,23	672,698,000		
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					672,698,000		
						Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n)	Unit	11	672,698,000		
		1,03,09,1,01,03			Penataan Bangunan dan Lingkungan				632,698,000		
						Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (tahun n)	Unit	1	437,360,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng	Dokumen	2	195,338,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1,03,09,1,01,06			Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota				40,000,000		
						Jumlah SKPD Teknis Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat sosialisasi peraturan	Unit	35	40,000,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1,03,11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						2,302,680,000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	356,000,000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					356,000,000		
						Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	540	356,000,000		
		1,03,11,1,01,07			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				356,000,000		
						Jumlah anggota asosiasi penyedia jasa yang mendapat sosialisasi dan diseminasi peraturan	Orang	380	162,400,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengguna jasa yang mendapat sosialisasi dan diseminasi peraturan	Orang	160	193,600,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19,09	1,946,680,000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1,533,000,000		
						Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	400	1,533,000,000		
		1,03,11,1,01,04			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				1,533,000,000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (tahun n)	Orang	400	1,533,000,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAK) Cakupan Daerah Provinsi					413,680,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah informasi jasa konstruksi	Buah	3		413,680,000		
		1.03.11.1.02.05				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi				413,680,000		
						Jumlah buku pengadaan buku konstruksi	Buah	100		15,000,000		
						Jumlah dokumen HSPK	Dokumen	2		178,680,000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit stand pameran	Unit	4		220,000,000		
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah										124.023.933.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									648.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	80,77		648,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							648,000,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	80,77		648,000,000	SEKRETARIAT	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				648,000,000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	36		648,000,000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				378,000,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	7		378,000,000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				270,000,000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	29		270,000,000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									123.375.933.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100		123,375,933,000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							123,375,933,000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawalan dan keuangan perangkat daerah	%	100		1,119,950,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				206,850,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		206,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		13,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		31,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		11,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12		3,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,06,08				Fasilitasi Kunjungan Tamu				28,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		28,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,06,09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					466,300,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		466,300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,300,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		3,300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,08,02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,08,04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				393,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		393,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446,800,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		446,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				141,600,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		141,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,09,09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				292,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2		292,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X,XX,01,1,09,10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		13,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		1,371,680,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					260,120,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		260,120,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9,250,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		9,250,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40,430,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		40,430,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10,670,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		10,670,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28,770,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		28,770,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,500,000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12		3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37,500,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		37,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					447,500,000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		447,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,500,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		132,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				312,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		312,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					664,060,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		664,060,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136,060,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		136,060,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500,000,000		
					Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	15		500,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		28,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		1,375,150,000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					157,500,000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		157,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		18,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40,000,000		
					Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	4,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,500,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,001,650,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1,001,650,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,650,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1,650,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	800,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					216,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	216,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	16,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1,710,350,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					193,350,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	193,350,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	55,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1.06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3,850,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	16,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					572,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	572,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan, pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	8,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	139,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				425,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	425,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					945,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	945,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkata dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	6	800,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkata sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1,925,895,000	Batal Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					318,450,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	318,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	11,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1.06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	47,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				39,500,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	39,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	7,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				51,450,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	51,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,028,819,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1,028,819,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	170,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				853,819,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	853,819,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					578,630,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	578,630,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137,950,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	137,950,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				420,680,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	5	420,680,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X,XX,01,1.09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1,126,930,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					271,230,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	271,230,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1.06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,800,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	44,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16,280,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	16,280,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				36,300,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	36,300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3,850,000		
						Jumlah bulan terukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	32,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					475,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	475,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	380,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					380,700,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	380,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	137,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,08,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2	230,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,08,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	13,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1,346,000,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
									216,500,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	216,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	45,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang celakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	18,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3,500,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	29,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,000,000		
						umlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					652,500,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	652,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,500,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	2,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	125,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				525,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	525,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					477,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	477,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	108,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	19,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	2,092,446,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					287,140,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		287,140,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		11,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		49,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		14,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39,500,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		39,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3,640,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12		3,640,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					40,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,038,696,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		1,038,696,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		4,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					210,320,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		210,320,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					824,376,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		824,376,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						766,610,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		766,610,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					147,250,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		147,250,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					601,360,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2		601,360,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		18,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		1,359,600,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					215,230,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	215,230,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6,600,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	31,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	31,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,500,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	22,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111,130,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	111,130,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	588,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	124,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				459,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	459,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					556,370,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	556,370,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	3	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36,370,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	36,370,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	716,250,000	Balai Jasa Konstruksi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					127,750,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	127,750,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7,700,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31,900,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	31,900,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7,700,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	7,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2,400,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	2,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3,850,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitas Kunjungan Tamu				24,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	24,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487,500,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	487,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	82,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				404,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	404,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	101,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	55,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		11,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		1,561,400,000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						213,750,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		213,750,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10,450,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		10,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					39,600,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		39,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					13,750,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		13,750,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					26,400,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		26,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3,850,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12		3,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitas Kunjungan Tamu					29,700,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		29,700,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						646,800,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		646,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3,300,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		3,300,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					115,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		115,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					528,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		528,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						700,850,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12		700,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					122,650,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		122,650,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					515,000,000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	4		515,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	63,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	107,670,278,000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93,581,064,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	93,581,064,000	SUBBAG KEUANGAN	
		X,XX,01,1,02,01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				91,485,984,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	91,485,984,000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,02,02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1,780,080,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1,780,080,000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,02,07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				315,000,000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	19	315,000,000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					120,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	120,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,03,02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	120,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	50,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	15	50,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,217,500,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	2,217,500,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15,500,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91,250,000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	91,250,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				215,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	215,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				70,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	70,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				21,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	21,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1.06,08			Facilitasi Kunjungan Tamu				200,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		200,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1,479,750,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		1,479,750,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				65,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	4		65,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60,000,000		
					Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	13		60,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6,977,420,000		
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		6,977,420,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.07,02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,338,360,000		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Didakan	Unit	26		1,338,360,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.07,05			Pengadaan Mebel				1,433,280,000		
					Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	588		1,433,280,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4,205,780,000		
					Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	149		4,205,780,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,695,544,000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		2,695,544,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20,000,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		20,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				895,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		895,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,780,544,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1,780,544,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,028,750,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		2,028,750,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				730,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		730,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800,000,000		
					Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2		800,000,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				498,750,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		498,750,000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									776.523.594.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang									166.940.998.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	66,85		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air (SDA)								162.275.169.000		
						Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,95	162.275.169.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						162.275.169.000		
						Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	6.245.585.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.245.585.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	31	6.245.585.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.245.585.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	31	6.245.585.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	5.345.115.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.345.115.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	9	5.345.115.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.345.115.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	9	5.345.115.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi
						Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	6.779.124.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.779.124.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	13	6.779.124.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.779.124.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	13	6.779.124.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	3.465.829.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah					3.465.829.000		

				Kabupaten/Kota									
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	7		3,465,829,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		
		1,03,02,1,02,21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					3,465,829,000			
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	7		3,465,829,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO	
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100		3,737,158,000	Balai PSDA Serang Lusi Juana		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3,737,158,000			
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	9		3,737,158,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		
		1,03,02,1,02,21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					3,737,158,000			
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	9		3,737,158,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS	
						Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy,	%	100		3,975,079,000	Balai PSDA Serayu Citanduy,		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3,975,079,000			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	2		3,975,079,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN		
		1,03,02,1,02,21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					3,975,079,000			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	2		3,975,079,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS	
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100		2,890,943,000	Balai PSDA Bengawan Solo		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2,890,943,000			
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo	Bulan	7		2,890,943,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN		
		1,03,02,1,01,53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					1,890,943,000			
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	15		1,496,223,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN	
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Bengawan Solo	Bulan	7		394,720,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO	
		1,03,02,1,01,80			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi					1,000,000,000			
						jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Bengawan Solo	Laporan	3		1,000,000,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI	
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100		2,362,557,000	Balai PSDA Bodri Kuto		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2,362,557,000			
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Bulan	7		2,362,557,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				816,025,000		
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Bodri Kuto	Bulan	7	816,025,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1,546,532,000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Bodri Kuto	Laporan	3	1,546,532,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	3,647,324,000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3,647,324,000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Bulan	7	3,647,324,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2,000,000,000		
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Pemali Comal	Bulan	7	2,000,000,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1,647,324,000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Pemali Comal	Laporan	3	1,647,324,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	2,903,846,000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2,903,846,000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Bulan	7	2,903,846,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1,997,486,000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	6	1,151,325,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Bulan	7	846,161,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				906,360,000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Laporan	3	906,360,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	3,151,518,000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3,151,518,000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Bulan	7	3,151,518,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2,116,371,000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	8	1,091,576,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Serang Lusi Juana	Bulan	7	1,024,795,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1,035,147,000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Serang Lusi Juana	Laporan	3	1,035,147,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100		2.806.524,000	Balai PSDA Serayu Citanduy,	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.806.524,000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Bulan	7		2.806.524,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					1.662.384,000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	4		656.574,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Serayu Citanduy	Bulan	7		1.005.810,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi					1.144.140,000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Serayu Citanduy	Laporan	3		1.144.140,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	83		39.349.300,000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						39.349.300,000		
						Persentase Luas Di Kondisi Baik dan Rusak Ringan	%	83		39.349.300,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.14			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					38.850.554,000		
						Jumlah daerah irigasi beserta sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dibangun	Lokasi	43		38.850.554,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.03.02.1.02.28			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi					498.746,000		
						Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi	Dokumen	4		498.746,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	22,04		12.326.180,000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						12.326.180,000		
						Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani	Lokasi	20		12.326.180,000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					12.326.180,000		
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat	Bulan	7		467.749,000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah penanganan sarana prasarana akibat banjir	Lokasi	20		11.022.855,000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat	Unit	21		835.576,000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62,5		11.431.437,000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						11.431.437,000		
						Jumlah Ketersediaan Air Baku	%	62,5		11.431.437,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.06			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					3.587.410,000		
						Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun	Lokasi	1		3.587.410,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.21			Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya					6.000,000,000		
						Jumlah sarana dan prasarana air baku yang direhabilitasi	Lokasi	5		6.000,000,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi					134.241,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku	Dokumen	2		134.241,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.63				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				1.709.786,000		
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	4		1.709.786,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi : JAWA TENGAH
						Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	60,38		10.393.659,000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						9.093.659,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti	Dokumen	10		9.093.659,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1.072.237,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya)	Dokumen	2		1.072.237,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.03				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				4.000.000,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai)	Dokumen	6		4.000.000,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.03.02.1.01.04				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				2.450.000,000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Daya Air	Dokumen	3		2.450.000,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.03.02.1.01.60				Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1.094.274,000		
						Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA	Dokumen	3		528.487,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Pos Hidrologi dan klimatologi yang diperbaiki	Pos	2		565.787,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.62				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi				477.148,000		
						Jumlah Dokumen Pendayagunaan Sumber Daya Air	Dokumen	2		477.148,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti	Dokumen	13		1.300.000,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				1.300.000,000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Irigasi dan Rawa)	Dokumen	2		1.300.000,000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100		650.000,000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						650.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	5		650.000,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				650.000,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	5		650.000,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100		315.690,000	Balai PSDA Bodri Kuto	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				315.690,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	1		315.690,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				315.690,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	1		315.690,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100		679.065,000	Balai PSDA Pemali Comal	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				679.065,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	2		679.065,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				679.065,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	2		679.065,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100		217.429,000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				217.429,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	2		217.429,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				217.429,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	2		217.429,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100		750.000,000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				750.000,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	3		750.000,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				750.000,000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	6		750.000,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100		225.050,000	Balai PSDA Serayu Citanduy	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				225.050,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Cilanduy	Lokasi	1		225,050,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya					225,050,000		
						Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Cilanduy	Lokasi	1		225,050,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,27		29,342,510,000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						29,342,510,000		
						Panjang sungai dalam kondisi baik	m	6000		29,342,510,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.10			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					27,320,000,000		
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana tebing sungai yang dibangun	m	5400		27,320,000,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.02.1.01.16			Pembangunan Check Dam							
						Jumlah Lokasi Sarana dan prasarana check dam sungai yang dibangun	Lokasi	0			SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		1.03.02.1.01.18			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana pantai yang dibangun	m	0			SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		1.03.02.1.01.46			Normalisasi/Restorasi Sungai					1,280,000,000		
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana sungai yang dipelihara	m	1000		1,280,000,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.03.02.1.01.61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi					742,510,000		
						Jumlah dokumen pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai	Dokumen	2		742,510,000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100		3,911,896,000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3,911,896,000		
						Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	13		3,911,896,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					3,911,896,000		
						Jumlah lokasi sarana dan prasarana sungai yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	13		3,911,896,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
						Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100		5,372,351,000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5,372,351,000		
						Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	32		5,372,351,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					5,372,351,000		
						Jumlah lokasi sarana dan prasarana sungai yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	32		5,372,351,000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)									4,665,829,000		
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	78,75		4,665,829,000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							4,665,829,000		
						Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21,99		1,500,000,000	Bidang Penataan Ruang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					1,500,000,000		
						Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	100	1,500,000,000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.03		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					1,500,000,000		
						Jumlah dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	Dokumen	1	1,500,000,000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	77,29	889,547,000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					889,547,000		
						Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi	%	100	889,547,000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.03		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota					889,547,000		
						Jumlah RTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Dokumen	12	889,547,000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	80	630,197,000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					630,197,000		
						Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	100	630,197,000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					630,197,000		
						Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi	Dokumen	1	257,015,000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	221,792,000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Workshop TKPRD	Kali	1	151,390,000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	77,5	1,163,697,000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					1,163,697,000		
						Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	100	1,163,697,000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1,163,697,000		
						Jumlah dokumen identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang	Dokumen	2	634,401,000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan	Lokasi	5	199,659,000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan	Orang	580	329,637,000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72,097,000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					72,097,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72,097,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					72,097,000		
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	7	72,097,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96,321,000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					96,321,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96,321,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					96,321,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Laporan	1		96.321,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100		97.638,000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						97.638,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal	%	100		97.638,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					97.638,000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Laporan	1		97.638,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100		72.961,000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						72.961,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100		72.961,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					72.961,000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Laporan	1		72.961,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100		76.171,000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						76.171,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100		76.171,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					76.171,000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Laporan	1		76.171,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100		67.200,000	Balai PSDA Serayu Citanduy	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						67.200,000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100		67.200,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					67.200,000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Laporan	1		67.200,000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD)										92.353.326.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80			Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah									700.000.000		
						Nilai Sakip PD	Angka	80		700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							700.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		700.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	7		700.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					350.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun	Dokumen	4		350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350,000,000		
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	3		350,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah (PD)								91.653.326.000		
					Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80		91.653,326,000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						91.653,326,000		
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		634,202,000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					89,507,000		
					Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		89,507,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24,807,000		
					Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Pemali Comal	Unit	755		24,807,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17,800,000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		17,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,000,000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		3,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		9,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34,900,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		34,900,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					246,900,000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		246,900,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,200,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		1,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211,200,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		211,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34,500,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		34,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297,795,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		297,795,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115,400,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		115,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120,000,000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62,395,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		62.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		442,018,000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74,411,000		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		74,411,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15,977,000		
					Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	494		15,977,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12,568,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		12,568,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2,200,000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan PD	Bulan	12		2,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6,353,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		6,353,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37,313,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		37,313,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170,638,000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		170,638,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				838,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12		838,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Bulan	12		111,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				58,800,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		58,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					196,969,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		196,969,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78,620,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan Rutin / Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		78,620,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70,000,000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48,349,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		48,349,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		569,078,000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						68,303,000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		68,303,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20,441,000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	600		20,441,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					17,690,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		17,690,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4,392,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		4,392,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					8,780,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		8,780,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					17,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		17,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193,779,000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		193,779,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,179,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		1,179,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					147,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		147,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					45,600,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		45,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306,996,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		306,996,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					151,760,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		151,760,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					101,026,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		101,026,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					54,210,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		54,210,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		503,003,000	Balai PSDA Serayu Citanduy,	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						73,059,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		73,059,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16,607,000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	1119		16,607,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,06,05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14,372,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		14,372,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,06,06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2,500,000		
						Jumlah bulan terukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		2,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,06,08				Fasilitas Kunjungan Tamu				8,380,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		8,380,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,06,09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31,200,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		31,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162,958,000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		162,958,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				958,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		958,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,08,02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		132,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,08,04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					266,986,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		266,986,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95,634,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		95,634,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,09,09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95,636,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		95,636,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,09,10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75,716,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		75,716,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		88,307,634,000	SEKRETARIAT	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78,839,687,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		78,839,687,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01,1,02,01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				77,539,687,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		77,539,687,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,02,07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1,300,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	1,300,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					243,440,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	243,440,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,03,02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				243,440,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	243,440,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					250,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	6	250,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,05,02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,05,03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	400	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,05,10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,05,11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100,000,000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	90	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,617,894,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	1,617,894,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				858,132,000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	270	728,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	3776	130,132,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				58,545,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	58,545,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				43,047,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	43,047,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8,500,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	8,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				42,400,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	42,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184,080,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	184,080,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				223,190,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan	12	223,190,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,295,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	1,295,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,295,000,000		
						Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	1,295,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,03			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit pengadaan Alat besar	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,539,759,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	3,539,759,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68,874,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	68,874,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				621,800,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	621,800,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2,444,730,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	2,444,730,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				404,355,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	404,355,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,521,854,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	2,521,854,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,176,271,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1,176,271,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				562,318,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	562,318,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				783,265,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	783,265,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	523,673,000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					61,089,000		
						Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	61,089,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor				16,178,000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	956	16,178,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12,727,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		12,727,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,584,000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		1,584,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6,600,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		6,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203,249,000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		203,249,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				849,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		849,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169,400,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		169,400,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				33,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		33,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259,335,000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		259,335,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106,492,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		106,492,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106,493,000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		106,493,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46,350,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung	Bulan	12		46,350,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		673,718,000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					65,044,000		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12		65,044,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17,389,000		
					Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	553		17,389,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13,674,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		13,674,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,061,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan /buku perpustakaan PD	Bulan	12		3,061,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										11,130,000		
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		11,130,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										19,790,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		19,790,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										246,192,000		
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12		246,192,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										912,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		912,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					166,800,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		166,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					78,480,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum Kantor Perangkat Daerah	Bulan	12		78,480,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						362,482,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12		362,482,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					127,850,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		127,850,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					127,250,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2		127,250,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					107,382,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		107,382,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH										259.294.324.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum									1.626.344.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
						Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum								1.626.344.000		
						Prosentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	1.626.344.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						380.000.000		
						Prosentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	380.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					380.000.000		
						Prosentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	20	380.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.01		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					380.000.000		
						Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	Bidang	1000	300.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURABAYA
						Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	Bidang	250	80.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						677.000.000		
						Prosentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	677.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					677.000.000		
						Prosentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	%	20	677.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.01		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600.000.000		
						Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	687	600.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		2.10.04.1.01.02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					77.000.000		
						Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	Sengketa	3	77.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						569.344.000		
						Prosentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	569.344.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					569.344.000		

					Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	%	20		569.344.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.01			Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah				221.461.000		
					Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan	Bidang	232		221.461.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.02			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30.770.000		
					Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria	Lokasi	2		30.770.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				317.113.000		
					Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria	Bidang	200		317.113.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas									56.924.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
					Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	79,61			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	91,7			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan								50.517.151.000		
					Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	46,7		50.517.151.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						50.517.151.000		
					Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	13,45		36.440.100.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					150.000.000		
					Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat	Dokumen	1		150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.05			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi				150.000.000		
					Jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima manfaat rumah sederhana sehat	Dokumen	1		150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					165.000.000		
					Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat	Dokumen	1		165.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.01			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap				165.000.000		
					Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah	Dokumen	1		165.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					12.226.400.000		
					Jumlah unit rumah yang disediakan	Unit	262		12.226.400.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.05			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				12.226.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rumah	Dokumen	1		100.000,000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	262		12.126.400,000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						23.898.700,000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan	Unit	615		23.898.700,000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1,04,02,1,04,01				Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi				23.898.700,000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang dibangun	Unit	615		23.898.700,000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	15,08		14.077.051,000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						235.000,000		
						Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	Dokumen	2		235.000,000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1,04,02,1,01,03				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				115.000,000		
						Jumlah dokumen penyiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan	Dokumen	1		115.000,000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1,04,02,1,01,05				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi				120.000,000		
						Jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	Dokumen	1		120.000,000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						8.000,000		
						Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah	Dokumen	1		8.000,000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1,04,02,1,02,01				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap				8.000,000		
						Jumlah dokumen sosialisasi teknis rehabilitasi rumah	Dokumen	1		8.000,000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						12.045.000,000		
						Jumlah unit rumah yang ditangani	Unit	468		12.045.000,000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1,04,02,1,03,01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				5.070.000,000		
						Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit	345		5.070.000,000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1,04,02,1,03,04				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				6.975.000,000		
						Jumlah unit rumah korban bencana yang direlokasi	Unit	123		6.975.000,000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANYUWAS
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1.789.051,000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani	Unit	15000		1.789.051,000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1,04,02,1,04,01				Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi				1.789.051,000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang direhabilitasi	Unit	15000		1.789.051,000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								6.407.249.000		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	8,1	6.407.249.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						4.118.249.000		
						Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	20	4.118.249.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima					500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh	Dokumen	2	500.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.01			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				140.000.000		
						Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	Dokumen	1	140.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh				360.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	Dokumen	1	360.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					3.618.249.000		
						Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Lokasi	7	3.618.249.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				3.618.249.000		
						Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	Dokumen	1	130.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	Lokasi	7	3.488.249.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.095.000.000		
						Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	32,95	1.095.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					1.095.000.000		
						Jumlah lokasi yang disediakan PSU	Lokasi	6	1.095.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.02			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				1.095.000.000		
						Jumlah dokumen penyediaan PSU	Dokumen	1	220.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan	Lokasi	6	875.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1,194,000,000			
						Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100		1,194,000,000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					1,194,000,000			
						Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur	Dokumen	5		583,000,000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah					583,000,000		
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dokumen	5		583,000,000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi	Dokumen	3		272,000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah					272,000,000		
						Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	Dokumen	3		272,000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data	Dokumen	4		339,000,000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah					339,000,000		
						Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	Dokumen	4		339,000,000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah										21,298,061,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									983,656,000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79		983,656,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							983,656,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		983,656,000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						983,656,000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	16		983,656,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					583,656,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9		583,656,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	7	400.000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								20.314.405.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75	20.314.405.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.314.405.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	20.314.405.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.324.549,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6	15.324.549,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.677.069,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	14.677.069,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					557.980,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	557.980,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					40.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	40.000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4.000,000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	4.000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01.1.02.06		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan					5.500,000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	5.500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					40.000,000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1	40.000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	150.000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					150.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	150.000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	50.000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.609.856,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.609.856,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	45,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				310,856,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	310,856,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	40,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20,000,000		
						Jumlah bulan terukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah vv	Bulan	12	950,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				124,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12	124,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					875,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	4	875,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500,000,000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	1	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,05			Pengadaan Mebel				50,000,000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	8	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				325,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	325,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,615,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1,615,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				190,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	190,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	600,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				825,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	825,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					690,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	690,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				550,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	550,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	65,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	65,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									79.848.805.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									19.335.720.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	77		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								227.177.000		
						Nilai SAKJP Perangkat Daerah	Skor	71,25	227.177.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						227.177.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	227.177.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					227.177.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	13	227.177.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X,XX,01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				147.850.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9	147.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.327.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	79.327.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								19.108.543.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	77	19.108.543.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.108.543.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.108.543.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.158.581.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	12.158.581.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.907.781.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.907.781.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				200.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	18	200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah					139,100,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	139,100,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.03,02			Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD				139,100,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milk daerah	Bulan	12	139,100,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.03,06			Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					590,730,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	590,730,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.05,02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				35,150,000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	130	35,150,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.05,03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32,780,000		
						Jumlah bulan peleyanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	32,780,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				22,800,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	2	22,800,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.05,10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500,000,000		
						Jumlah Peserta Sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal	Orang	1280	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,058,080,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1,058,080,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1.06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	40,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				369,500,000		
						Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	219,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55,580,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	55,580,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31,400,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	31,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9,600,000		
						Jumlah bulan terukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	9,600,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,08			Fasilitas Kunjungan Tamu				100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1.06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	400,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X,XX,01,1.06,10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			52,000,000			
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		52,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit penghadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,07,05				Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,616,362,000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		2,616,362,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,400,000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			565,200,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		565,200,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,047,762,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		2,047,762,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,545,690,000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		2,545,690,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,09,02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			381,000,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		381,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2,101,840,000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		2,101,840,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52,850,000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		52,850,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X,XX,01,1,09,11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Terpeliharanya Trantibum di Jawa Tengah										4.216.576.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						persentase penanganan gangguan trantibum di jawa tengah	%	100			Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Trantibum dan Linmas									4.216.576.000		
						Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	%	100		4.216.576.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.216.576.000		
						Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	2,82		500.000,000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						500.000,000		
						Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya	Orang	6830		375.000,000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia						375.000,000		
						Jumlah personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas	Orang	1280		214.390,000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan Satlinmas yg bertugas dalam pengamanan pemilu	Orang	5550		160.610,000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemberdayaan Satlinmas	%	100		125.000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						125.000,000		
						Jumlah pemutakhiran data Sistem Informasi Linmas	Unit	1		125.000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta Jambore Satlinmas	Orang	0			SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%	13,51		500,000,000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						500,000,000		
						Jumlah elemen masyarakat yang dibina	Unit	120		286,611,000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						105,850,000		
						Jumlah sekolah, ormas dan BUMD yang dibina	Unit	120		105,850,000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						180,761,000		
						Jumlah peserta konsolidasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang tibumtrnmas	Orang	360		180,761,000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan trambit	%	100	213,389,000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1,05,02,1,01,01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			131,680,000		
						Jumlah buku pendataan daerah rawan trambit	Buku	1	90,980,000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemutakhiran peta daerah rawan trambit	Unit	1	40,700,000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1,05,02,1,01,05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pertindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia			81,709,000		
						Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP	Orang	142	81,709,000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	2,666,576,000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1,000,000		
						Persentase penerapan SPM trambitum Linmas	%	100	1,000,000	SEKSI PENINDAKAN	
		1,05,02,1,01,09				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1,000,000		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara di provinsi	%	100	1,000,000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				2,589,126,000		
						Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kali	10	2,411,126,000	SEKSI PENINDAKAN	
		1,05,02,1,02,01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			344,070,000		
						Jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal	Orang	366	344,070,000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1,05,02,1,02,03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			2,067,056,000		
						Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	100	1,655,930,000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar yang ditindak	Orang	250	411,126,000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi	Orang	485	178,000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1,05,02,1,02,02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			66,500,000		
						Jumlah masyarakat dan Badan Usaha yang dilakukan pengawasan	Orang	100	66,500,000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1,05,02,1,02,03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			111,500,000		
						Jumlah pelanggar perda yang dibina	Orang	35	66,500,000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar perda yang terinventarisasi	Orang	385	45,000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemasangan tanda larangan	Buah	0		SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				76,450,000		
						Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi	Orang	70	76,450,000	SEKSI PENINDAKAN	
		1,05,02,1,03,01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			76,450,000		
						Jumlah PPNS di Jateng yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas	Orang	70	76,450,000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemeliharaan Trambitum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	%	100	550,000,000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					550,000,000			
						Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah	Kegiatan	120		370,000,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					213,320,000			
						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	36		80,920,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawasan pejabat VVIP	Kegiatan	24		50,800,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibum	Kali	35		81,600,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					156,680,000			
						Jumlah Operasi Bersama di perbatasan (Jateng-Jabar, Jateng-Jatim, Jateng-DIY)	Kegiatan	9		73,520,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi	Kegiatan	16		45,280,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100		37,880,000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum	%	100		180,000,000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					125,046,000			
						Jumlah Kawasan tertib yg dibina	Lokasi	8		55,596,000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
						Jumlah KST yang dibina	Orang	120		69,450,000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan tramtibum di Jawa Tengah	Orang	0			SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					54,954,000			
						Jumlah penertiban PNS	Kegiatan	10		54,954,000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									23.552.296.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		(11)	(12)
								2023			
								Target	Rp (000)		
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana									5.050.000.000		
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana					Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,6			
						Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	275.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						275.000.000		
						Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	275.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					175.000.000		
						Persentase masyarakat terdampak yang direhab	%	100	100.000.000		
		1.05.03.1.02.07			Penanganan Pascabencana Provinsi				100.000.000		
						Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	Orang	100	100.000.000		
						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	%	100	75.000.000		
		1.05.03.1.02.07			Penanganan Pascabencana Provinsi				75.000.000		
						Jumlah kegiatan movev rehab rekon yang dilaksanakan	Kabupaten/ Kota	35	75.000.000		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		
						Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun	Dokumen	1	100.000.000		
		1.05.03.1.04.03			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				100.000.000		
						Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	Dokumen	1	50.000.000		
						Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	Kegiatan	1	50.000.000		
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana								425.000.000		
						Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5	425.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						425.000.000		
						Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	425.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					150.000.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih	Orang	1000	150.000.000		
		1.05.03.1.02.08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana					150.000.000		
						jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	Kelompok	2	75.000.000		
						Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	Kelompok	2	75.000.000		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					275.000.000		
						Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti	%	100	275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1,05,03,1,03,03			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				75.000,000		
					Jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	Kegiatan	2		75.000,000		
		1,05,03,1,03,05			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				200.000,000		
					Jumlah pelatihan Pusdalops yang diselenggarakan	Kegiatan	1		100.000,000		
					Jumlah posko bencana yang diselenggarakan oleh provinsi dan kabupaten/kota	Lokasi	36		100.000,000		
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana								3.075.000.000		
					Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	12		3.075.000,000		
		1,05,03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						3.075.000,000		
					Persentase penurunan risiko bencana	%	3		3.075.000,000		
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.350.000,000		
					Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	1		1.350.000,000		
		1,05,03,1,01,01			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						
					Jumlah dokumen KRB yang disusun	Dokumen	0				
		1,05,03,1,01,02			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				1.350.000,000		
					Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	Desa	67		1.350.000,000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					1.725.000,000		
					Persentase upaya PRB Jateng	%	1		1.725.000,000		
		1,05,03,1,02,01			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				125.000,000		
					Jumlah dokumen RPB yang disusun	Dokumen	1		125.000,000		
		1,05,03,1,02,02			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				300.000,000		
					Jumlah Komunitas PB yang dilatih	Kelompok	5		300.000,000		
		1,05,03,1,02,04			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				400.000,000		
					Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	Unit	44		400.000,000		
		1,05,03,1,02,06			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				650.000,000		
					Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	Desa	25		650.000,000		
		1,05,03,1,02,09			Penyusunan Rencana Kontijensi				100.000,000		
					Jumlah dokumen renkon yang disusun	Dokumen	1		100.000,000		
		1,05,03,1,02,10			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				150.000,000		
					jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	Orang	450		150.000,000		
	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi								1.275.000.000		
					Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100		1.275.000,000		
		1,05,03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.275.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100		1,275,000,000		
										250,000,000		
						Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	%	100		250,000,000		
		1.05.03.1.02.03			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					250,000,000		
						Jumlah kegiatan pelatihan penggunaan peralatan PB yang diselenggarakan	Kegiatan	1		100,000,000		
						Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	Unit	10		150,000,000		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1,025,000,000		
						Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	%	100		1,025,000,000		
		1.05.03.1.03.04			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1,025,000,000		
						Jumlah penyediaan logistik (bulan)	Jenis	10		950,000,000		
						Persentase dapur umum yang dilaksanakan	%	100		75,000,000		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										13.541.655.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	90				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									225.000.000		
						Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	70		225.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							225.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		225.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	10		225.000.000		
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5		100.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5		125.000.000		OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah										13.316.655.000		
						Nilai kepuasan masyarakat	Angka	90		13.316.655.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.316.655.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		13.316.655.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.803.085.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		7.803.085.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.503.085.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14		7.503.085.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		300.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Bulan	0				
		X,XX,01,1,02,04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen					
		X,XX,01,1,02,05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang disusun	Laporan	0				
		X,XX,01,1,02,07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	0				OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						120,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		120,000,000		
		X,XX,01,1,03,02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		120,000,000		OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		20,000,000		
		X,XX,01,1,05,02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0				OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	50		10,000,000		
		X,XX,01,1,05,10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50		10,000,000		OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,213,570,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1,213,570,000		
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					13,570,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		13,570,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Perlengkapan Kantor	Bulan	12		50,000,000		
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		35,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		10,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		50,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1,000,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		1,000,000,000		OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				55,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan	1	55,000,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0			
		X,XX,01,1,07,02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0			OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit				OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,160,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	3,160,000,000		
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				480,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	480,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,670,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2,670,000,000		OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,000,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1,000,000,000		
		X,XX,01,1,09,01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0			OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	500,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400,000,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	400,000,000		OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		50,000,000		OPD Provinsi
JUMLAH											18.591.655.000	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)									7.862.300.000	Dinas Sosial	
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	34.38		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								7.862.300.000		
						Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	7.862.300.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						7.482.300.000		
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	34.38	7.482.300.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					200.000.000		
						Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	100	200.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					200.000.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial	Orang	100	200.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					7.282.300.000		
						Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	9832	6.932.300.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi					100.000.000		
						Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di tingkat Provinsi	Orang	1750	100.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi					5.434.000.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	2880	5.434.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.02.1.02.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi					1.398.300.000		
						Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	5735	1.398.300.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial	Orang	1920	350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.02.1.02.03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				350.000.000		
					Jumlah PSKS Keluarga yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Orang	4800		350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						380.000.000		
					Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100		380.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					380.000.000		
					Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	Unit	1		380.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.01			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				100.000.000		
					Jumlah sarpras TMPN Provinsi yang mendapatkan rehabilitasi sarana prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi	Unit	1		100.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.07.1.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				280.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan TMPN Provinsi	Bulan	12		50.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	300		230.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									142.191.601.000	Dinas Sosial	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88			Dinas Sosial	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								776.700.000		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80		776.700.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						776.700.000		
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%			776.700.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					776.700.000		
					Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2		776.700.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				391.500.000		
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		391.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				385.200.000		
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1		385.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah									141.414.901.000		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88		141.414.901.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						141.414.901.000		
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		134.394.236.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					117.027.221.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		117.027.221.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				115.427.221.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		115.427.221.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		1.250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1		150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1		200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Paket	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.000.000			
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Paket	1		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.978.140.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1.978.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				103.140.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		103.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				125.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				980.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	980.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	20.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Paket	16			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	6			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	5			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	10			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	5			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.848.875.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	13.848.875.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				550.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	550.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.348.875.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12.348.875.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				850.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	850.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.365.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.365.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	150.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				275.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	275.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12		250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100		329.940.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.440.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		145.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		35.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		35.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		98.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.100.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat		Bulan	12	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.400.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Bulan	12	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.400.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Bulan	12	32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Bulan	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Pantii pelayanan sosial Bisma Upakara		%	100	252.560.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.560.000		
					Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		Bulan	12	106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga		Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor		Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		88.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					83.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata	%	100		347.315.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						148.815.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		148.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					38.925.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		38.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		35.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		112.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					104.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100		241.560.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.560.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		77.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata	%	100	340.940.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.440.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	145.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	35.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	35.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	109.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	348.300.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					136.800.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	136.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.750.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	18.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.050.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	35.050.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.250.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	6.250.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				18.750.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	18.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	7.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	32.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	131.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	7.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	124.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	80.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100		139.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.400.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	100	171.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.400.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	283.560.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.560.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					33.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		119.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					114.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	287.810.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	114.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	31.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	115.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo	%	100	237.560.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					96.972.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	96.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	35.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.990.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.440.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				10.892.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	10.892.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.850.000		
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	20.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	79.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	78.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.788.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	60.788.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	19.300.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.600.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	7.600.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.088.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	23.088.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	10.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	235.570.000		Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.570.000			
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.570.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.510.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	13.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Pantii Pelayanan Sosial pamardi Utomo	%	100	159.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.400.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%		269.560.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				106.560.000			
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			2.160.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material			13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			23.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	105.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	223.360.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.560.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		75.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		41.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi	%	100		267.560.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.560.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	103.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100		241.060.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.060.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		112.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		38.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo	%	100	457.600.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					201.600.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	201.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	38.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	128.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	128.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti	%	100	340.300.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					136.800.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	136.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.750.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	18.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.050.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	35.050.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.250.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	6.250.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				18.750.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	18.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	7.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	32.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	123.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	7.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	116.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	80.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran	%	100		156.850.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.510.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		65.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.110.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		22.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.340.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		47.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					44.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		44.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					14.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo	%	100		150.400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.400.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				49.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	49.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	351.940.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.440.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	145.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		35.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		35.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		120.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					112.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					32.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Pantii pelayanan sosial Tawangmangu	%	100		146.400.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.400.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		56.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR	
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	269.560.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.560.000			
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	105.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	258.560.000		Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.560.000			
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	106.560.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	10.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	13.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	94.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	89.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	100	372.300.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					136.800.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	136.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	35.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	6.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				18.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	155.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	148.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12		12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100		139.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.900.000		
					Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12		50.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.700.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		15.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
					Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	57.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	3.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	54.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	32.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	5.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									213.033.771.000	Dinas Sosial		
						Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	2.37			Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani								213.033.771.000			
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	100		213.033.771.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						75.000.000			
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan	%	100		75.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah					75.000.000			

				Kabupaten/Kota Asal								
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal	%	100		75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.01			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					75.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	%	100		75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							53.401.624.000		
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	4.1		4.759.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.222.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	10500		2.222.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan					1.822.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) panti swasta	Orang	10500		1.822.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu					50.000.000		
						jumlah paket penyediaan alat bantu	Paket	4		50.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					350.000.000		
						Jumlah LKS penanganan penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	100		350.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.652.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	8500		1.652.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					1.502.500.000		
						Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) Panti Swasta	Orang	6800		1.502.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					150.000.000		
						Jumlah LKS penanganan anak terlantar yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	100		150.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					480.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	2000		480.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan					380.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) pantri swasta	Orang	400		380.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti					100.000.000		
						Jumlah LKS penanganan Lanjut usia terlantar yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	30		100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					405.000.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	1250	405.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				255.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) panti swasta	Orang	1250	255.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				150.000.000		
						Jumlah LKS penanganan Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pembinaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	20	150.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.18	2.039.155.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.015.560.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	500	89.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	500	9.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				49.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	500	49.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.800.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	500	5.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500	926.160.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				824.900.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	500	824.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				78.760.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500	78.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				22.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500	22.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.023.595.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	450	132.055.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu							
					Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah		Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				27.180.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah		Orang	450	27.180.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				37.500.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Orang	450	37.500.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.875.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Orang	450	16.875.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				40.500.000			
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah		%	100	40.500.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000			
					Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah		Bulan	12	10.000.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti		Orang	450	891.540.000		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				722.700.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah		Orang	450	722.700.000		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				141.840.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah		Orang	450	141.840.000		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.000.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah		Orang	450	27.000.000		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
					Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo		%	0.14	1.659.690.000		Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.142.750.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti		Orang	500	152.150.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu							
					Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah		Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				29.400.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah		Orang	500	29.400.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				39.000.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Orang	500	39.000.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.750.000			
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Orang	500	18.750.000		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				45.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	45.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500	990.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				803.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	500	803.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				157.600.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500	157.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				30.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500	30.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					516.940.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	250	64.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				8.100.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250	8.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				32.750.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250	32.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.250.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250	6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				7.500.000		
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas pemulangan ke Daerah Asal	%	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	250	452.340.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				401.500.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250	401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang				38.840.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250	38.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,14	1.672.977.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.251.905.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	550	162.245.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				31.620.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	550	31.620.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	550	40.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.625.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	550	20.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				49.500.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	49.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	550	1.089.660.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				883.300.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	550	883.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				173.360.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	550	173.360.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				33.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	550	33.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					421.072.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	200	59.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				7.200.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				31.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	31.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.000.000			
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200		5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				6.000.000			
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas pemulangan ke Daerah Asal	%	100		6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	200		361.872.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan					321.200.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan permakanan dalam panti	Orang	200		321.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang					31.072.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200		31.072.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses					9.600.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200		9.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.22		2.625.390.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						500.245.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250		89.745.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang					32.320.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250		32.320.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					7.800.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250		7.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					34.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250		34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					5.625.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250		5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250		410.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan					401.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250		401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					9.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250		9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						2.125.145.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	950		243.005.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial					49.380.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	950		49.380.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					52.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	950		52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					35.625.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	950		35.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan					85.500.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100		85.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti					20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	950		1.882.140.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan					1.525.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	950		1.525.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang					299.440.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	950		299.440.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses					57.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	950		57.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.13		1.579.370.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						1.579.370.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	700		192.530.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial					38.280.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	700		38.280.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					45.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	700		45.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					26.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	700		26.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan					63.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100		63.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti					20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	700		1.386.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan					1.124.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	700		1.124.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang					220.640.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	700		220.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses					42.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	700		42.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.21		2.917.967.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						1.258.277.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	650		99.145.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					14.520.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	650		14.520.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					50.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	650		50.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					14.625.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	650		14.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan Terpenuhi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	650	1.159.132.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.043.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	650	1.043.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				84.032.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	650	84.032.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.200.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	650	31.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.142.750.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	500	152.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	500		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				29.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	500	29.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				39.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	500	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.750.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	500	18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				45.000.000		
						persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	45.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500	990.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				803.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	500	803.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				157.600.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500	157.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				30.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500	30.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					516.940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250		64.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					8.100.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250		8.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					32.750.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250		32.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					6.250.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250		6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal					7.500.000		
						Persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	%	100		7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250		452.340.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan					401.500.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250		401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang					38.840.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250		38.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses					12.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250		12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.17		2.074.450.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						500.245.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250		57.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					7.800.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250		7.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					34.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250		34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					5.625.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250		5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250		442.820.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan					401.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250		401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang					32.320.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250		32.320.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					9.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250		9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						868.075.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	375		194.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	375		7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					15.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	375		15.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					157.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	375		157.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					3.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	375		673.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					602.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	375		602.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang					54.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	375		54.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.875.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	375	16.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					706.130.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	300	706.130.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				481.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	300	481.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				94.560.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	300	94.560.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				18.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	300	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				20.520.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	300	20.520.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				33.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	300	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	300	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				27.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.07	939.840.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					939.840.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	205.680.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				7.680.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	7.680.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				16.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	16.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				168.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400		168.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					4.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		4.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400		734.160.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					642.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400		642.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang					73.760.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400		73.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					18.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400		18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,11		1.387.240.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1.387.240.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang			297.520.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					11.520.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	600		11.520.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					18.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	600		18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					252.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	600		252.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					6.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang			1.089.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					963.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	600		963.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang					99.120.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	600		99.120.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					27.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	600		27.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.16		1.856.110.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					505.050.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250		55.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					4.800.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250		4.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					36.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250		36.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					2.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250		2.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					2.500.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250		449.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					401.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250		401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang					36.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250		36.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					11.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250		11.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.351.060.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	600		162.340.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1				SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial					33.840.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	600		33.840.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					42.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	600		42.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.500.000			
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	600		22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				54.000.000			
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100		54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	600		1.188.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				963.600.000			
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	600		963.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				189.120.000			
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	600		189.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				36.000.000			
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	600		36.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0.15		1.587.143.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					503.245.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250		57.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	250			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				7.800.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250		7.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				34.000.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250		34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.625.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250		5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250		445.820.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				401.500.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250		401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				32.320.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250	32.320.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.083.898.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	550	88.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				13.500.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	550	13.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				43.250.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	550	43.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.750.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	550	13.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				8.250.000		
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas pemulangan ke Daerah Asal	%	100	8.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Bulan	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	550	995.148.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				883.300.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	550	883.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang				85.448.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	550	85.448.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				26.400.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	550	26.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.23	2.388.685.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					829.197.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	425	71.303.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket			SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	425	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				36.340.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	425	36.340.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.563.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	425	9.563.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.400.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	5.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	425	757.894.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				682.550.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	425	682.550.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				54.944.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	425	54.944.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	425	20.400.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.559.488.000		
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	800	112.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				18.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	800	18.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	800	52.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	800	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal				4.000.000		
						persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas pemulangan ke Daerah Asal	%	100	4.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan Terpenuhi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	18.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	800	1.447.488.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan				1.284.800.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	800	1.284.800.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang				124.288.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	800	124.288.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				38.400.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	800	38.400.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,22	2.254.748.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.254.748.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	1185	141.571.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				23.508.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	1185	23.508.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				71.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	1185	71.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				26.663.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	1185	26.663.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	1185	2.113.177.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.903.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	1185	1.903.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				153.197.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	1185	153.197.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				56.880.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	1185	56.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.07	924.480.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					924.480.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang		205.680.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				7.680.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	7.680.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				16.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	16.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				168.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	168.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100	4.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang		718.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				642.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	642.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				58.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	58.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.16	1.677.358.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.677.358.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	875	116.988.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				18.300.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	875	18.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				59.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	875	59.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				19.688.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	875	19.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	875	1.560.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.405.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	875	1.405.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				113.120.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	875	113.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				42.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	875	42.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,11	1.112.884.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.112.884.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	575	89.398.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				13.260.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	575	13.260.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				47.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	575	47.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.138.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	575	9.138.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	575	1.023.486.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				923.450.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	575	923.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				79.336.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	575		79.336.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					20.700.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	575		20.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.16		1.788.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						962.890.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	500		77.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					12.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	500		12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					44.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	500		44.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					11.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	500		11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500		885.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan					803.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	500		803.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang					64.640.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500		64.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					18.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500		18.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						825.110.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	350		182.720.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					6.720.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	350		6.720.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					15.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	350		15.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				147.000.000			
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	350		147.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.500.000			
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		3.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhiya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	350		642.390.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				562.100.000			
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	350		562.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				64.540.000			
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	350		64.540.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				15.750.000			
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	350		15.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.15		1.707.072.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					782.632.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400		69.320.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	400			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				10.320.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400		10.320.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.000.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400		40.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.000.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400		9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhiya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400		713.312.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				642.400.000			
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400		642.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				51.712.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	51.712.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				19.200.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	19.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					924.440.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	131.960.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				24.960.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	24.960.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				36.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				36.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	792.480.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				642.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	642.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				126.080.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	126.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.28	3.210.810.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.444.535.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	750	107.075.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				16.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	750		16.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					54.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	750		54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					16.875.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	750		16.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar					20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12		20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	750		1.337.460.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan					1.204.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	750		1.204.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang					96.960.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	750		96.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					36.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	750		36.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1.169.300.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	500		251.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					9.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	500		9.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					17.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	500		17.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					210.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	500		210.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					5.000.000		
						persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100		5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500		917.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				803.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanaan dalam Panti Pemerintah	Orang	500	803.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				92.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500	92.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				22.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500	22.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					596.975.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250	195.475.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				78.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250	78.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				15.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				18.300.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250	18.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				31.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250	31.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.375.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250	9.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				22.500.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250	401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				401.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanaan dalam Panti Pemerintah	Orang	250	401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.18	2.412.701.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.817.051.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	950	122.935.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	950		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				19.560.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	950	19.560.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				62.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	950	62.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				21.375.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	950	21.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	950	1.694.116.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.525.700.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	950	1.525.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				122.816.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	950	122.816.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				45.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	950	45.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					595.650.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	250	136.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				4.800.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	250	4.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				14.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	250	14.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				105.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	250	105.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	250	458.850.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
									401.500.000		
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	250	401.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
									46.100.000		
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	250	46.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
									11.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	250	11.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.09	1.131.800.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.131.800.000		
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	500	141.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
									37.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	500	37.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				39.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	500	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	500	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				30.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	500	990.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
									803.000.000		
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	500	803.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
									157.600.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	500	157.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				30.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	500	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.08	1.054.570.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.054.570.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang		228.640.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				8.640.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	450	8.640.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				16.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	12	16.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				189.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	450	189.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.500.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100	4.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang		825.930.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				722.700.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	450	722.700.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				82.980.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	450	82.980.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	450	20.250.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.23	2.417.933.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.677.358.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	375	116.988.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				18.300.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	375	18.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				59.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	375	59.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				19.688.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	375	19.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan Terpenuhiya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	375	1.560.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.405.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	875	1.405.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				113.120.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	375	113.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				42.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	375	42.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					740.575.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	875	66.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	875	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				42.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	875	42.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	875	3.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhiya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	875	673.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				602.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	375	602.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				54.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	875	54.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.875.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	875	16.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.07	868.075.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					868.075.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	375	194.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	375	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				15.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	375	15.750.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				157.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	375	157.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		
						persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100	3.750.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	375	673.875.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				602.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	375	602.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				54.750.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	375	54.750.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.875.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	375	16.875.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.13	1.633.948.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.633.948.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	725	197.578.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				39.390.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	725	39.390.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				45.750.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	725	45.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.188.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	725	27.188.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				65.250.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	65.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				20.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	725	1.436.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				1.164.350.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	725	1.164.350.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				228.520.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	725	228.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				43.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	725	43.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.21	2.213.218.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					731.568.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	375	67.338.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	375	9.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				39.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	375	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.438.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	375	8.438.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	375	664.230.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				602.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	375	602.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				48.480.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	375	48.480.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	375	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.481.650.000			
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	750		107.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					17.100.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	750		17.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					50.250.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	750		50.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					18.750.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	750		18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal					11.250.000		
						persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas pemulangan ke Daerah Asal	%	100		11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA					10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	750		1.374.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan					1.204.500.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	750		1.204.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang					133.800.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	750		133.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses					36.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	750		36.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.12		1.506.510.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1.506.510.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	650		340.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti					12.480.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	650		12.480.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	650		7.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					309.620.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	650		309.620.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					6.500.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitas reunifikasi kepada Keluarga	%	100		6.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					5.200.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12		5.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	650		1.165.710.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan					1.043.900.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	650		1.043.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang					92.560.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	650		92.560.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					29.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	650		29.250.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							157.457.147.000		
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,29		3.800.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					3.800.000.000		
						Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan	%	0,14		1.400.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.03			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					1.400.000.000		
						Jumlah Fakir Miskin Wilayah I yang Mendapatkan Penanganan	Orang	5000		1.400.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
						Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan	%	0,14		1.400.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.03			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					1.400.000.000		
						Jumlah Fakir Miskin Wilayah II yang Mendapatkan Penanganan	Orang	5000		1.400.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
						Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi	%	100		1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.02			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam pemutakhiran data fakir miskin	Kabupaten/Kota	35		1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
						Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,82		153.557.147.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					153.557.147.000		
						Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	63820		153.557.147.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.01			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					153.557.147.000		
						Jumlah PMKS yang mendapatkan Fasilitas bantuan Sosial	Orang	63970		153.557.147.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100		100.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						100.000.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan	%	100		100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.01			Pengangkatan Anak antar WNI					100.000.000		
						Jumlah anak yang mendapatkan Fasilitasi Pengangkatan Anak Antar WNI	Orang	150		100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							2.100.000.000		
						Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100		2.100.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						2.100.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang ditangani	%	100		1.250.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.01			Penyediaan Permakanan					700.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang mendapatkan Pemenuhan permakanan	%	100		700.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.02			Penyediaan Sandang					100.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang mendapatkan Pemenuhan sandang	%	100		100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					100.000.000		
						Persentase Korban Bencana Sosial yang mendapatkan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	%	100		100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					150.000.000		
						Persentase Kelompok Rentan Korban Bencana Alam yang mandapatkan penanganan	%	100		150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial					200.000.000		
						Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	%	100		200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
						Persentase korban bencana sosial yang ditangani	%	100		850.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.01			Penyediaan Permakanan					200.000.000		
						Persentase korban bencana sosial yang mendapatkan Pemenuhan permakanan	%	100		200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.02			Penyediaan Sandang					100.000.000		
						Persentase korban bencana sosial yang mendapatkan Pemenuhan sandang	%	100		100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					50.000.000		
						Pesentase korban bencana alam yang mendapatkan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	%	100		50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					425.000.000		
						Persentase Kelompok Rentan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100		425.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial					75.000.000		
						Persentase Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	%	100		75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
JUMLAH										363.087.672.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mengurangi Jumlah Pengangguran									21.700.547.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase pengangguran yang ditangani	%	28.55		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								3.052.524.000		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	82.97	3.052.524.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						3.052.524.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.14	1.122.329.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.122.329.000		
						Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3	%	44	298.958.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				298.958.000		
						Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja	Unit	20	128.620.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3	Orang	60	147.568.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3	Unit	1	22.770.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	%			SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						
						Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	Unit	0		SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja	%	76	823.371.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				823.371.000		
						Jumlah laboratorium yang terakreditasi	Unit	1	73.371.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja	Unit	95	750.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.57	1.930.195.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.930.195.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55	334.485.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.02			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				334.485.000		
						Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP	Kasus	2	56.435.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan	Kasus	130	272.335.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus	Orang	80	2.934.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Orang	60	2.781.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	29	387.141.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				387.141.000		
						Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji (pemeriksaan dan pengujian) objek K3	Unit	60	92.292.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3	Unit	150	264.113.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3	Unit	30	30.736.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62	1.208.569.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
		2.07.06.1.01.01			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.208.569.000		
						Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	Orang	30	313.490.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	Unit	30	60.423.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	Unit	550	644.203.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	Unit	30	46.470.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	Unit	40	60.200.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	Orang	160	57.888.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan	Orang	20	25.895.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								12.656.892.000		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8.19	10.044.420.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						10.044.420.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38.5	225.113.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				225.113.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	27.27	225.113.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.01			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				225.113.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengikuti bimtek Akreditasi	Unit	40	225.113.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8.19	667.341.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				667.341.000		
						Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	30	667.341.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				667.341.000		
						Jumlah Kab/kota yang dimonitoring hasil pelatihannya di Lembaga Pelatihan kerja Pemerintah dan Swasta	Orang	35	52.940.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah Peserta Magang Luar Negeri	Orang	725	214.806.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	Orang	80	296.867.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan	Orang	40	30.975.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Orang	25	71.753.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2.74	3.819.525.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					3.819.525.000		
						Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri	%	100	219.525.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				219.525.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri	Orang	2220	136.599.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						jumlah dokumen training need assesment (TNA)	Dokumen	35	45.691.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja	Dokumen	1	37.235.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	32	400.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				400.000.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Orang	280	400.000.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	%	22	2.900.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.900.000.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT)	Orang	580	2.900.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	30	300.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				300.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap	Unit	1	300.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.75	1.716.373.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.716.373.000		
						Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran	%	75	302.504.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				302.504.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran Indonesia	Orang	340	164.768.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen training need assesment (TNA)	Dokumen	1	113.778.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja	Dokumen	1	23.958.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%	51	1.413.869.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.413.869.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa	Orang	160	937.869.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran Indonesia	Orang	20	235.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang	Orang	40	241.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%			SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1	Unit	0		SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.38	2.725.183.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi					2.725.183.000		
						Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian	%	66	100.750.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				100.750.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	Orang	480	42.851.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAssesment)	Dokumen	1	35.562.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama dengan duniaindustri/pelaku usaha	Dokumen	1	22.337.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	%	76	2.411.834.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				2.411.834.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT)	Orang	640	2.411.834.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	86	112.599.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				112.599.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN	Orang	48	112.599.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	30	100.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	Unit	4	100.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.25	890.885.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi					890.885.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	83.33	890.885.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				890.885.000		
						Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penilaian akreditasi lembaga	Orang	35	99.635.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Jumlah peserta yang tersertifikasi	Orang	350	791.250.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54.62	2.612.472.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.612.472.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.2	649.077.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					649.077.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21	649.077.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				649.077.000		
						Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Kabupaten/Kota	35	174.077.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah Lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan mengikuti bimbingan teknis peningkatan produktivitas	Orang	40	35.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas	Orang	65	160.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa	Orang	200	280.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	5.88	1.963.395.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.619.815.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	%	71	1.250.297.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.250.297.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (DBHCHT)	Orang	725	1.250.297.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	19	369.518.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				369.518.000		
						Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan pelatihan	Dokumen	2	35.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah naskah kerjasama dengan pelaku usaha yang akan melaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Dokumen	2	77.518.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah tenaga kerja yang dilakukan pemasaran tools, teknik, dan metode peningkatan produktivitas	Orang	220	257.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	30		SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2	Unit	1		SEKSI PELATIHAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					334.080.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	19	334.080.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				334.080.000		
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas	Unit	16	44.080.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas	Orang	700	290.000.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					9.500.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	3	9.500.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				9.500.000		
						Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	Unit	1	9.500.000	SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								400.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	57.14	400.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						400.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	57.14	400.000.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					400.000.000		
						Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	90	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				220.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi	Dokumen	1	115.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro	Kabupaten/ Kota	10	105.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.07.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				180.000.000		
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Kabupaten/ Kota	35	80.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro	Unit	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								2.946.979.000		
						Persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan	%	71.01	2.946.979.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						2.946.979.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	71.01	239.960.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					210.000.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.25	210.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.02			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				210.000.000		
						Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online	Orang	70	210.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					29.960.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	Dokumen	100	29.960.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				29.960.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA	Dokumen	25		3.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA	Orang	50		26.960.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68		2.707.019.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.447.854.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	58.33		1.419.042.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.01			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja					85.000.000		
						Jumlah Petugas Pengelola BKK dan Petugas IPK mengikuti Bimbingan Teknis / Pemanduan / Pembinaan Antar Kerja	Orang	100		85.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.02			Pelayanan Antar Kerja					1.197.453.000		
						Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD	Orang	75		30.783.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	Orang	1150		1.099.170.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Orang	10		67.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.03			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					61.589.000		
						Jumlah Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mendapatkan PBJ	Orang	100		61.589.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.04			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)					75.000.000		
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	Unit	100		75.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	51		1.028.812.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.05			Perluasan Kesempatan Kerja					1.028.812.000		
						Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	Orang	80		208.222.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah masyarakat mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	300		728.093.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah masyarakat mengikuti penyuluhan/ sosialisasi perluasan kesempatan kerja	Orang	0			SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan	Orang	35		46.618.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam upaya perluasan kesempatan kerja	Orang	0			SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course	Orang	10		45.879.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha binaan terfasilitasi dalam mengakses pasar	Orang	0			SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						259.165.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	75		182.995.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.04			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					182.995.000		
						Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	20		32.636.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah PMI Purna mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	80		114.032.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif	Orang	75		36.327.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	2.83		76.170.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.04.01			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					63.630.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah CPMI mengikuti Pembekalan Pra Keberangkatan	Orang	50		26.860.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam perlindungan PMI	Orang	50		36.770.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.04.03			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					12.540.000		
						Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal	Unit	9		12.540.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi									296.000.000		
						Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3.6		296.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							296.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.6		76.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						76.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	3.6		76.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.06			Pelatihan Transmigrasi					76.000.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	40		76.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.6		220.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						220.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	3.6		220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					220.000.000		
						Jumlah dokumen ketransmigrasian	Dokumen	1		20.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
						Jumlah pemerintah daerah kab/kota difasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerjasama bidang ketransmigrasian	Kabupaten/ Kota	50		200.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial									2.348.152.000		
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91.67		2.348.152.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							2.348.152.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	97.8		343.609.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						343.609.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	25		343.609.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.01.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial					133.794.000		
						jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	Orang	100		133.794.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.01.02			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				35.606.000		
						Jumlah perusahaan yang teridentifikasi belum memenuhi ketentuan pp/pkb	Unit	100		35.606.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
		2.07.05.1.01.03			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				174.209.000		
						Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos	Orang	70		107.312.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial	Orang	80		66.897.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.72		605.997.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					605.997.000		
						Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	47.44		605.997.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				241.997.000		
						Jumlah kab/kota yang mengikuti diseminasi/ sosialisasi/ bimtek Koordinasi dan Konsolidasi HI	Kabupaten/Kota	20		61.404.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah Mediator dan Pegawai HI yang mengikuti Koordinasi Teknis HI	Orang	80		41.047.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialisasi/ bimtek LKS Bipartit	Orang	90		52.261.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialisasi/ bimtek Pemberdayaan SP/SB	Orang	60		35.607.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialisasi/ bimtek Pembinaan Hubungan Industrial Bagi PUK SP/SB dan Manajemen di Perusahaan	Orang	70		51.678.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
		2.07.05.1.02.03			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				90.550.000		
						Jumlah Unit Kerja yang terdata dalam Verifikasi SP/SB	Unit	2000		90.550.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
		2.07.05.1.02.04			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				273.450.000		
						Jumlah anggota LKS Tripartit Kabupaten/ Kota yang mengikuti Forum Komunikasi LKS Tripartit	Orang	60		26.536.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah anggota LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pembinaan SDM LKS Tripartit Kabupaten/ Kota	Orang	40		23.082.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah anggota LKS Tripartit yang mengikuti Pemberdayaan LKS Tripartit	Orang	120		223.832.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96		515.543.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					515.543.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial	%	11		322.221.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				322.221.000		
						Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota	Dokumen	1		119.029.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI	Dokumen	1		34.610.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasuskasus PHI/PHK	Kabupaten/Kota	20		45.577.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisihan hubungan industrial	Orang	35		89.422.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial	Unit	20		33.583.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
						Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit	%	28		193.322.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.05.1.02.02			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				193.322.000		
						jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di luar provinsi	Kasus	2		31.714.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri	Kasus	30		64.689.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Jumlah Penyelesaian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota	Kasus	7		71.530.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
						jumlah penyelesaian kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia)	Kasus	25		25.389.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43		883.003.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				446.979.000		
						Persentase perusahaan yang telah dibina pmbutan LKS Bipartit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	17		446.979.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
		2.07.05.1.02.05			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				446.979.000		
						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan Struktur dan skala upah	Unit	1400		193.713.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
						Jumlah Peserta workshop sistem pengupahan	Orang	75		108.683.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
						Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI	Orang	120		60.423.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan	Orang	75		56.107.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
						Jumlah Petugas Survey identifikasi struktur skala upah	Orang	22		28.053.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				436.024.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/kota	%	2.28		436.024.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
		2.07.05.1.03.03			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				265.352.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen penetapan UMP & UMK	Dokumen	2		239.352.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						JUMLAH PESERTA YG MENGIKUTI SOSIALISASI UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov., Apindo Tk. Prov)	Orang	100		26.000.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.05				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				170.672.000		
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja	Orang	120		163.767.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah petugas data yg melakukan identifikasi Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja	Orang	15		6.905.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										92.272.331.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	79			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									1.109.635.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.5		1.109.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.109.635.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		1.109.635.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12		43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					210.390.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		210.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.137.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		25.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.846.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		34.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.163.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		29.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07				Penyediaan Bahan/Material				32.614.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12		32.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.630.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		8.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.123.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		57.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					57.123.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	12		57.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						507.860.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		507.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.660.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		7.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					380.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		380.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						291.062.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		291.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					12.135.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.182.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		60.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					27.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		27.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					41.195.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		41.195.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									91.162.696.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	75		91.162.696.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						91.162.696.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.213.062.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.421.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	42.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.280.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	37.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5.141.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	5.141.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.799.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				17.799.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					222.776.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	222.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.689.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	19.689.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	12	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.139.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	23.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				16.698.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					693.716.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		693.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					195.789.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		195.789.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					489.427.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		489.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.350.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		236.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					136.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		136.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		1.345.464.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						251.935.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		251.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				55.796.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	55.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.225.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.280.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				32.634.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	32.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					41.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.000.000		
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	0	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					893.529.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	893.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.660.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				281.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	281.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				604.469.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	604.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				90.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		962.797.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.936.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		34.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					31.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12		31.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3.736.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1		3.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						218.148.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12		218.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.679.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		10.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.397.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	3		33.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					16.698.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		16.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.148.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		15.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.029.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12		20.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		14.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12		7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		506.767.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		84.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		193.946.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		45.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		9.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		9.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					41.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.544.470.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	58.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				58.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	58.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.770.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	220.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	45.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.262.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	1	15.262.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.273.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	11.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.360.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	18.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.701.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	3.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				31.458.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	31.458.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				6.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	6.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.286.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	88.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor / bangunan lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.019.300.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.019.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.300.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
		X.XX.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					264.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
		X.XX.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					750.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					245.600.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	245.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					59.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	59.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
		X.XX.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					79.150.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	79.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
		X.XX.01.1.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					77.250.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	77.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
		X.XX.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.625.696.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.445.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	37.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA	
		X.XX.01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12.445.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	12.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					207.356.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	207.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	19		26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					2.856.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		2.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12		175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	11			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	17			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	28		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	90			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	1		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	16			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						890.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		890.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					782.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		782.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.895.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12		315.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.395.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		43.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				9.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		84.471.207.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.124.192.000			
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	10		1.124.192.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5		450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta rakor bidang nakertrans	Orang	105		50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				50.000.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				13.000.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		13.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				24.000.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		24.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				13.000.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		13.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				135.000.000			
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1		135.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				389.192.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	1		139.192.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2		150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen monitoring bidang nakertrans	Dokumen	3		100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.583.675.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		74.583.675.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					73.688.483.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14		73.688.483.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					573.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12		573.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					229.152.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12		229.152.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					31.630.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1		31.630.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					60.530.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	13		60.530.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						55.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						54.490.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1		54.490.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah							
						Jumlah Data Objek Retribusi Daerah	Laporan	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					54.490.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12		54.490.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Orang	100		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.226.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		2.226.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				125.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				150.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				540.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	540.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				538.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	538.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				78.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	78.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				360.000.000		
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	0	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.180.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	4.180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				170.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.609.850.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.609.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				415.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	415.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				384.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	384.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									113.972.878.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak									5.877.046.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,7		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%	34,3		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100,000	8,07		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan								3.671.710.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62,85	1.014.210.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						175.000.000		
						Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	40	175.000.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		
						Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%	48,57	175.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.01		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		
						Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	Kelompok	7	175.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						200.000.000		
						Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	20	200.000.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kabupaten/ Kota	7	200.000.000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.08.05.1.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi					200.000.000		
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	6	200.000.000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						639.210.000		
						Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	100	539.210.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					539.210,000			
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kabupaten/Kota	35		539,210,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					439.210,000			
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Orang	35		439,210,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi
		2.08.06.1.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					100.000,000			
						Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	Kelompok	35		100,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi
						Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	25		100,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					100.000,000			
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	15		100,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.06.1.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					60.000,000			
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	Orang	35		60,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.08.06.1.02.04		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					40.000,000			
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	Kelompok	10		40,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90		2,657,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2,557,500,000			
						Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100,000	6,84		2,557,500,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					455.000,000			
						Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%	60		455,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi					15.000,000			
						Jumlah peserta perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Orang	30		15,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.08.02.1.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi					70.000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Orang	60	70.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.08.02.1.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi				265.000,000		
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kegiatan	2	265.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.02.1.01.04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi				105.000,000		
						Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Orang	100	105.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi					2.102.500,000		
						Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%	40	2.102.500,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.02.01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.077.500,000		
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	Orang	2800	1.077.500,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.025.000,000		
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	Orang	100	1.025.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000,000		
						Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	40	100.000,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					100.000,000		
						Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%	50	100.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.04.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000,000		
						Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi dan lintas Kab/Kota	Kegiatan	2	100.000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak								2.205.336.000		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100,000	8,02	2.205.336,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.502.836,000		
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	20	415.000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					415.000,000		

					Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	20		415.000.000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.03.1.03.04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				415.000.000		
					Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan Lintas daerah Kab/Kota	Orang	35		415.000.000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
					Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100,000	5,64		1,087.836,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				197.211,000		
					Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	13,889		197,211,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				46.875.000		
					Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi	Orang	35		46.875.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.03.1.01.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				150.336.000		
					Jumlah peserta Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Orang	195		150,336,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				358.750.000		
					Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100		358,750,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani bagi perempuan korban kekerasan	%	100		250.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.03.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				108.750.000		
					Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	10		108,750,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				531.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	8		531,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					75,000,000		
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	120		75,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.03.1.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					406,875,000		
						Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	100		406,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.03.1.03.03			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi					50,000,000		
						Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi	Unit	2		50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							702,500,000		
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	20		60,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						10,000,000		
						Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	Kelompok	10		10,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.07.1.02.04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					10,000,000		
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka perlindungan khusus anak	Kelompok	10		10,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000		
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	15		50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.07.1.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					50,000,000		
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	1		50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100,000	12,36		642,500,000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						126,875,000		

						Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	13,889		126,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2,08,07,1,01,01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				80,000,000		
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi	Kegiatan	3		80,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
		2,08,07,1,01,02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				46,875,000		
						Jumlah rakor pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	2		46,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					383,750,000		
						Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100		383,750,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2,08,07,1,02,01				Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				225,000,000		
						Persentase penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	%	100		225,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
		2,08,07,1,02,02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				108,750,000		
						Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2		108,750,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
		2,08,07,1,02,03				Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				50,000,000		
						Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Kegiatan	1		50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					131,875,000		
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15		131,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2,08,07,1,03,01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				100,000,000		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2		100,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi
		2,08,07,1,03,02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				31,875,000		
						Jumlah pelatihan bagi penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2		31,875,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									15.373.767.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	85		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								453.500.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,1	453.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						453.500.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	453.500.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	453.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				253.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	253.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								14.920.267.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	85	14.920.267.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.920.267.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	90	14.920.267.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.614.477.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	11.614.477.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.184.477.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.184.477.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				310.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	310.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				70.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	3	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					64.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2		64,470,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,03,02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					64,470,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		64,470,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						106,200,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		106,200,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,05,02			Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaihan dinas yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10,000,000		
						Jumlah bulan petyayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	10		10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					86,200,000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	72		86,200,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						635,780,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		635,780,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9,190,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		9,190,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					130,590,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5		56,590,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12		74,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					120,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					185,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		185,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					160,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		160,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					11,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		11,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14,790,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		14.790,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,07,01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					14.790,000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		14.790,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.935,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.935,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					580,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		580,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1,350,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1,350,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						549,550,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		549,550,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,09,01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					178,800,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		178,800,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					275,010,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		275,010,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					67,640,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		67,640,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					28,100,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		28,100,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas										2.035.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,19			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana									1.585.000.000		
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	65,17		1.585.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							330.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	35		25.000.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						25.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	10		25.000.000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.14.02.1.02.06			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					25.000.000		
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1		25.000.000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi
						Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	27,7		305.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						305.000.000		
						Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kabupaten/ Kota	20		305.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.01			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)					105.000.000		
						Jumlah Peserta Workshop GDPK	Orang	50		105.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.14.02.1.01.02			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi					100.000.000		
						Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan GDPK	Dokumen	1		100.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.14.02.1.01.07			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat					100.000.000		
						Jumlah peserta Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan dan Fasilitasi Pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	Orang	105		100.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		2,14,03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						1,255,000,000			
						Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	30		1,175,000,000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1,175,000,000		
						Jumlah peserta KB Aktif	Orang	4901017		1,175,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	
		2,14,03,1,01,04				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja				450,000,000		
						Jumlah peserta penggerakan advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mitra Kerja	Orang	1100		450,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	OPD Provinsi
		2,14,03,1,01,07				Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				725,000,000		
						Jumlah peserta Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Orang	7500		725,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Unmetneed KB	%	12,76		80,000,000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber- KB				80,000,000		
						Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesetaraan berKB	%	17,5		80,000,000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2,14,03,1,02,02				Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				80,000,000		
						Jumlah PPKBD yang berperan serta aktif dalam pembinaan kesetaraan ber-KB	Orang	180		80,000,000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga									450.000.000		
						Indeks pembangunan keluarga	Angka	56,29		450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2,14,04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							450,000,000		
						Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,3		200,000,000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
						Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				200,000,000		
						Jumlah kelompok tribina yang aktif	Kelompok	21540		200,000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2,14,04,1,01,05				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				200,000,000		
						Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Orang	175		200,000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi
						Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	30		75,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					75.000,000			
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	35		75.000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.14.04.1.02.04			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				75.000,000			
						Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	Kelompok	25		75.000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	91		175.000,000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					175.000,000			
						Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	7000		175.000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.02				Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				175.000,000		
						Jumlah peserta Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Orang	80		175.000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi
JUMLAH											23.285.813.000	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Ketahanan Pangan									31.582.000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas								31.582.000,000		
						Angka Konsumsi Energi	kcal/kapita/h	2100	31.582.000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.402.000,000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.402.000,000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah					40.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	40.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.03.02			Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD				40.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milk daerah	Bulan	12	40.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.074.000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.074.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	6	1.000.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	10.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	30.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	218.000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		3,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		95,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		70,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X,XX,01,1,09,09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000,000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	1		50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,09,10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2,09,03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							24.810.000.000		
						Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	91,4		2,925,000,000	Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan	
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi				2,925,000,000		
						Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapita/tahun	87		500,000,000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2,09,03,1,04,01				Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				500,000,000		
						Jumlah Promosi dan Edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	Kali	4		500,000,000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapita/tahun	34		1,225,000,000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2,09,03,1,04,02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1,225,000,000		
						Analisa PPH	Laporan	1		25,000,000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	Kelompok	37		1,200,000,000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,15		1,200,000,000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2,09,03,1,04,01				Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1,200,000,000		
						Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Kelompok	28		1,200,000,000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						CV harga pangan strategis (beras)	%	2		2,775,000,000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				2,775,000,000		
						Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5		2,150,000,000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2,09,03,1,01,03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2,150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Laporan	1		2.150.000,000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Paket	0			SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.03.1.01.05			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan							
						Jumlah lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	Lokasi	0			SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kelompok	0			SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	%	5		625.000,000	SEKSI HARGA PANGAN	
		2.09.03.1.01.01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					625.000,000		
						Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	Kali	4		625.000,000	SEKSI HARGA PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	4020		660.000,000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						660.000,000		
						Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	Laporan	2		325.000,000	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					325.000,000		
						Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan	Laporan	2		325.000,000	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Kelompok	0		335.000,000	SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	
		2.09.03.1.01.02			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					335.000,000		
						Jumlah bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Paket	0		335.000,000	SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	
						Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	1		18.450.000,000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						18.450.000,000		
						Persentase peningkatan volume cadangan pangan	%	3		18.450.000,000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi					18.450.000,000		
						Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang disediakan (beras)	Ton	250		2.873.273,000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	315		15.576.727,000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							2.900.000,000		
						Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1		2.900.000,000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						2.900.000,000		
						Prosentase penanganan daerah rawan pangan	%	4,91		2.900.000,000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi					2.900.000,000		
						Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	Desa	34		2.845.000,000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Peta SKPG dan atau FSVA	Laporan	1		55.000,000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							2.470.000,000		
						Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80		1.120.000,000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.120.000,000		
						Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	Laporan	1		345.000,000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.05.1.01.04			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				345,000,000		
					Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	250		345,000,000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
					Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	%	10		350,000,000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.01			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				350,000,000		
					Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dilina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok	25		350,000,000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	%	23		425,000,000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.04			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				425,000,000		
					Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Laporan	2		25,000,000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	sampel	300		400,000,000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%	80		1,350,000,000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1,350,000,000		
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	Angka	70		670,000,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	
		2.09.05.1.01.05			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				670,000,000		
					Dukungan fasilitas sarana dan prasarana Laboratorium BPMKP	Paket	0			SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Jumlah sampel pangan yang diuji	sampel	70		670,000,000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	Angka	83,5		680,000,000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.03			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				680,000,000		
					Jumlah Layanan sertifikasi dan registrasi	Sertifikat	35		680,000,000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									22.239.259.000	Dinas Ketahanan Pangan	
					Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	76			Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								670.545.000		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,02		670.545.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X,XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						670.545.000		
					Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		670.545.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					670.545.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	23		670.545.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X,XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				320.545.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	6		320.545.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17		350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								21.568.714.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	76	21.568.714.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.568.714.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	21.568.714.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.427.514.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	17.427.514.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X,XX,01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.692.514.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	16.692.514.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				340.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	340.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				395.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	395.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					134.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	134.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	4	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					231.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	231.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				231.600.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	231.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.725.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.725.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				735.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	30	735.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12		40,600,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,06,04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					90,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		90,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12		12,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,08			Fasilitas Kunjungan Tamu					80,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,06,09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					525,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		525,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,06,10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,06,11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					198,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	12		198,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,066,600,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		1,066,600,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12,000,000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		12,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					415,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12		415,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					639,600,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		639,600,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						983,400,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		983,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					347,500,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		347,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					555,900,000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	2		555,900,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X,XX,01,1,08,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					80,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
JUMLAH												
										53.821.259.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah									71.247.912.000		
						Indeks Kualitas Air	Angka	50.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	85			
	Menurunnya pencemaran air permukaan								9.010.798.000		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.45	9.010.798.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						1.485.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	1.485.000.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					914.000.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	5	914.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi				465.000.000		
						Jumlah PERDA yang disusun	Dokumen	1	465.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.02			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				449.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	4	449.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					571.000.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi	Dokumen	3	571.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.01			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				90.000.000		
						Jumlah KLHS dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	1	90.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02.02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				381.000.000		
						Jumlah KLHS dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen	2	381.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02.04			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				100.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dokumen KLHS-nya	Kabupaten/ Kota	35	100.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						3.887.078.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	1.837.078.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					1.837.078.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	1.023.078.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1.023.078.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	1000	1.023.078.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan	Dokumen	1	814.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				814.000.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan ISO 17025	Unit	66	484.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
						Jumlah peralatan lab yang terpelihara/terkalibrasi	Unit	70	330.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	2.050.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					2.050.000.000		
						Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau	Lokasi	25	2.050.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2.050.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Kegiatan	50	2.050.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						1.095.000.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	75	395.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					395.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	47	395.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.03			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				395.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang diawasi	Unit	62	395.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	700.000.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					700.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan	Dokumen	6	700.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.01			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				700.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai	Dokumen	6	700.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						2.193.720.000		
						Persentase lembaga/keompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	471.100.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					471.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah sasaranuluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Kelompok	3		471.100.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					233.300.000		
						Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	90		233.300.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					237.800.000		
						Jumlah sasaranuluh pada gerakan peduli lingkungan yang didampingi	Orang	300		237.800.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100		1.722.620.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						1.722.620.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	Unit	103		1.722.620.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					821.629.000		
						Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH	Unit	3		821.629.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					900.991.000		
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	100		900.991.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							350.000.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100		350.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						350.000.000		
						Jumlah pengaduan yang ditangani	Laporan	25		350.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.01			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi					350.000.000		
						Jumlah pengaduan yang dilakukan verifikasi lapangan	Laporan	25		350.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Menurunnya pencemaran udara									62.237.114.000		
						Indeks Pencemar SO2 dan NO2	Angka	0.2		62.237.114.000		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							2.476.922.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8.57		1.475.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						1.475.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien	Kabupaten/ Kota	35		1.475.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					1.475.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	Dokumen	1		102.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	550		1.373.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100		1.001.922.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						1.001.922.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1		1.001.922.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					1.001.922.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	1150		1.001.922.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							2.012.100.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	3.83		1.012.100.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						1.012.100.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	100		1.012.100.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					136.000.000		
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dievaluasi	Dokumen	1		136.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.04			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					876.100.000		
						Luas RTH yang ditangani	Ha	100		876.100.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	%	0.14		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						1.000.000.000		
						Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Ha	3.74		1.000.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.03			Pengelolaan Kebun Raya					1.000.000.000		
						Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya	Unit	3		1.000.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							2.661.210.000		
						Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	%	17.14		2.661.210.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						2.661.210.000		
						Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya	Kabupaten/Kota	6		260.735.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					260.735.000		
						Jumlah SDM Lingkungan Hidup yang mengikuti pelatihan/sertifikasi	Orang	120		260.735.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya	Kabupaten/Kota	2		2.400.475.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					2.400.475.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah	Kelompok	4		2.400.475.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							55.086.882.000		
						Persentase sampah yang dikelola	%	89		55.086.882.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					55.086.882.000		
						Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani	Ton	4991975		55.086.882.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					55.086.882.000		
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendukung penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Dokumen	3		55.086.882.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari										47.446.260.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51.25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0.43			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan (LTL)									41.552.492.000		
						Luas Tutupan Lahan / LTV	km2	10224.57		41.552.492.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							24.444.464.000		
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH	%	0.91		2.647.439.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					2.247.439.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam	Batang	1000000		2.247.439.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.04.06			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					2.247.439.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Batang	1000000		1.940.039.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sumber benih yang dikembangkan	Unit	1		307.400.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
					Perbenihan Tanaman Hutan					400.000.000		
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan	Dokumen	75		400.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.01			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar					27.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	5		27.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.02			Sertifikasi Sumber Benih					22.000.000		
						Jumlah sertifikasi sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	5		22.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.03			Sertifikasi Mutu Benih					35.000.000		
						Jumlah sertifikasi mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	10		35.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.04			Sertifikasi Mutu Bibit					99.740.000		
						Jumlah sertifikasi mutu bibit yang diterbitkan	Dokumen	60		99.740.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.05			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit					216.260.000		
						Jumlah pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar yang diawasi	Dokumen	10		216.260.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1.63		1.609.380.000	CDK 1	
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.609.380.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I	Ha	7162		1.609.380.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					54.386.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil I	Dokumen	1		54.386.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					317.084.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil I	Ha	420		317.084.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					490.174.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil I	Ha	678		490.174.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan					699.736.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil I	Unit	14		699.736.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan					48.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil I	Dokumen	1		48.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1.63		1.653.600.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						1.653.600.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II	Ha	7162		1.653.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					33.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil II	Dokumen	1		33.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					544.240.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil II	Ha	499		544.240.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					300.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil II	Ha	300		300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan					726.360.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil II	Unit	74		726.360.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan					50.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil II	Dokumen	1		50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1.69		2.034.900.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.034.900.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III	Ha	7426		2.034.900.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					73.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil III	Dokumen	1		73.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					660.000.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil III	Ha	500		660.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					531.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil III	Ha	370	531.900.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				700.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil III	Unit	14	700.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				70.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil III	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1.81	1.359.365.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.359.365.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV	Ha	7953	1.359.365.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				40.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil IV	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				293.850.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil IV	Ha	300	293.850.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil IV	Ha	282	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				795.515.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil IV	Unit	26	795.515.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil IV	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	2.63	1.391.074.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.391.074.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX	Ha	11556	1.391.074.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				70.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil IX	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				556.074.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil IX	Ha	1012	556.074.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				275.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil IX	Ha	759	275.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				450.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil IX	Unit	12	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil IX	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	2		2.244.410.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.244.410.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V	Ha	8788		2.244.410.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil V	Dokumen	1		50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					979.400.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil V	Ha	1429		979.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					325.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil V	Ha	704		325.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan					850.010.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil V	Unit	11		850.010.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan					40.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil V	Dokumen	1		40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	3.25		2.148.420.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.148.420.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI	Ha	14280		2.148.420.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					80.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VI	Dokumen	1		80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					533.900.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VI	Ha	2558		533.900.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					500.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil VI	Ha	1163		500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan					934.520.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VI	Unit	66		934.520.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan					100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VI	Dokumen	1		100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII	%	3.13		2.572.400.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.572.400.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII	Ha	13753		2.572.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VII	Dokumen	1		50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					1.255.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VII	Ha	300	1.255.850.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				247.750.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil VII	Ha	300	247.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				873.600.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VII	Unit	17	873.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				145.200.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VII	Dokumen	1	145.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	2.06	2.116.666.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					2.116.666.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII	Ha	9051	2.116.666.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				35.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VIII	Dokumen	1	35.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				850.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VIII	Ha	900	850.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				125.166.000		
						Luas penghijauan di CDK Wil VIII	Ha	300	125.166.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				1.031.500.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VIII	Unit	52	1.031.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				75.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VIII	Dokumen	1	75.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	2.06	1.508.430.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.508.430.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X	Ha	9051	1.508.430.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil X	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				407.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil X	Ha	300	407.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				250.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil X	Ha	300	250.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				647.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil X	Unit	17	647.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				154.430.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil X	Dokumen	1	154.430.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	3.13	2.017.135.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					2.017.135.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI	Ha	13753	2.017.135.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				65.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil XI	Dokumen	1	65.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
			3.28.03.1.04.02		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				400.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil XI	Ha	2108	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.122.135.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil XI	Ha	1054	1.122.135.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			400.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil XI	Unit	8	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			30.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil XI	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	400.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			400.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan	Kasus	3	400.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			400.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum	Dokumen	3	400.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	121.545.000	CDK 1	
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			121.545.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I	Kasus	2	121.545.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			121.545.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil I	Kelompok	2	121.545.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II	%	100	19.780.000	CDK 2	
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			19.780.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II	Kasus	2	19.780.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			19.780.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil II	Kelompok	2	19.780.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	80.000.000	CDK 3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					80.000.000			
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III	Kasus	2		80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					80.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil III	Kelompok	2		80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100		50.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV	Kasus	2		50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil IV	Kelompok	2		50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100		50.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX	Kasus	2		50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil IX	Kelompok	2		50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100		29.250.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						29.250.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V	Kasus	2		29.250.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					29.250.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil V	Kelompok	2		29.250.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100		100.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						100.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI	Kasus	2		100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					100.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VI	Kelompok	2		100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100		110.670.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						110.670.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII	Kasus	2		110.670.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				110.670.000			
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VII	Kelompok	3		110.670.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100		75.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						75.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII	Kasus	2		75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					75.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VIII	Kelompok	2		75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X	%	100		60.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						60.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X	Kasus	2		60.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					60.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil X	Kelompok	2		60.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100		45.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						45.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI	Kasus	2		45.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					45.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil XI	Kelompok	2		45.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							4.459.494.000		
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100		150.000.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						150.000.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	9		150.000.000		
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					150.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	2		150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100		235.003.000	CDK 1	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						235.003.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII I	Unit	2	235.003.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				202.003.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII I	Unit	1	202.003.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				33.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII I	Kelompok	1	33.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII II	%	100	321.484.000	CDK 2	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					321.484.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII II	Unit	1	321.484.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				321.484.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII II	Unit	1	321.484.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII II	Kelompok	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII III	%	100	450.000.000	CDK 3	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					450.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII III	Unit	1	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				250.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII III	Unit	1	250.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				200.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII III	Kelompok	1	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII IV	%	100	122.000.000	CDK 4	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					122.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII IV	Unit	1	122.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII IV	Unit	1	60.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				62.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII IV	Kelompok	1	62.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII IX	%	100	50.000.000	CDK 9	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					50.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII IX	Unit	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII IX	Kelompok	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII V	%	100	88.000.000	CDK 5	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					88.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII V	Unit	1	88.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				39.800.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII V	Unit	1	39.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				48.200.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII V	Kelompok	1	48.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII VI	%	100	250.000.000	CDK 6	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					250.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII VI	Unit	1	250.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				250.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII VI	Unit	1	250.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII VIII	%	100	266.525.000	CDK 8	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					266.525.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII VIII	Unit	1	266.525.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				244.400.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK WII VIII	Unit	1	244.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				22.125.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII VIII	Kelompok	1	22.125.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK WII X	%	0		CDK 10	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam							
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK WII X	Unit	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK WII X	Kelompok	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,09	291.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					291.500.000		
						Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	10	291.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				291.500.000		
						Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturraden	Dokumen	1	71.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	Unit	10	220.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	%	0,14	1.349.900.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					1.349.900.000		
						Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro	Dokumen	2	500.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.03			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				250.000.000		
						Jumlah tumbuhan dan satwa tahura yang diawetkan	Jenis	4	250.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.05			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				250.000.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan tahura yang disusun	Dokumen	1	250.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan)	Unit	3	404.900.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.04.1.01.06			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Unit	1	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.07			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi				125.000.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yang dilaksanakan	Dokumen	2	125.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.08			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi				129.900.000		
						Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan	Kelompok	1	129.900.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	445.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.02			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				445.000.000		
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	445.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	100.000.000		
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	1	100.000.000		
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian TSL	Dokumen	2	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	58.000.000	CDK 1	
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				58.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I	Unit	2	58.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				58.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil I	Kasus	1	58.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	34.600.000	CDK 2	
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				34.600.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II	Unit	2	34.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				34.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil II	Kasus	1	34.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	100.000.000	CDK 3	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					100.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III	Unit	2	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				100.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil III	Kasus	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	50.000.000	CDK 4	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					50.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV	Unit	2	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				50.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil IV	Kasus	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	182.482.000	CDK 9	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					182.482.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX	Unit	2	182.482.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				182.482.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil IX	Kasus	1	182.482.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V	%	0		CDK 5	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi							
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil V	Unit	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil V	Kasus	0			SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	130.000.000		CDK 6	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					130.000.000			
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI	Unit	2		130.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					130.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VI	Kasus	1		130.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII	%	0			CDK 7	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VII	Unit	0			SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES							
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VII	Kasus	0			SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	25.000.000		CDK 8	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.000.000			
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VIII	Unit	2		25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					25.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VIII	Kasus	1		25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	105.000.000		CDK 10	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					105.000.000			
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X	Unit	2		105.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					105.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil X	Kasus	1	105.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	100.000.000	CDK 11	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					100.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI	Unit	2	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				100.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil XI	Kasus	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						11.448.534.000		
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	25	855.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					855.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	855.000.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				150.000.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya (bidang)	Orang	60	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				520.000.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	3	520.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				185.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	185.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	3	961.078.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					961.078.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I	Kelompok	3	667.166.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				146.166.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil I	Orang	60	146.166.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				521.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil I	Kelompok	130	521.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I	Unit	1	293.912.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				293.912.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil I	Unit	1	293.912.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	2	1.089.280.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1.089.280.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II	Kelompok	2	426.630.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				108.430.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil II	Orang	60	108.430.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				318.200.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil II	Kelompok	101	318.200.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II	Kelompok	6	662.650.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				662.650.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil II	Unit	6	662.650.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III	%	2	1.220.651.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1.220.651.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III	Kelompok	2	780.651.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				194.500.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil III	Orang	60	194.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				586.151.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil III	Kelompok	109	586.151.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III	Unit	10	440.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				440.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil III	Unit	10	440.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	2	1.851.020.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1.851.020.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV	Kelompok	2	799.020.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				175.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil IV	Orang	60	175.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				624.020.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil IV	Kelompok	54	624.020.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV	Unit	16	1.052.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				1.052.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil IV	Unit	16	1.052.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	2	698.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					698.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX	Kelompok	2	543.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			155.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil IX	Orang	60	155.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			388.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil IX	Kelompok	69	388.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX	Unit	1	155.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			155.000.000		
						Jumlah unit perhutanan sosial yang dikembangkan di CDK Wil IX	Unit	1	155.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	3	1.549.200.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1.549.200.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V	Kelompok	3	972.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			972.500.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil V	Kelompok	75	972.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V	Unit	5	576.700.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			106.550.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil V	Orang	60	106.550.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.05.1.01.03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			470.150.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil V	Unit	5	470.150.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	2	677.630.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					677.630.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI	Kelompok	2	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			400.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VI	Kelompok	107	400.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			200.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil VI	Unit	2	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI	Unit	2	77.630.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			77.630.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VI	Orang	60	77.630.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	3	935.655.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					935.655.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII	Kelompok	3	815.975.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			65.365.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VII	Orang	60	65.365.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			750.610.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VII	Kelompok	121	750.610.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII	Unit	1	119.680.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			119.680.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil VII	Unit	1	119.680.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	2	793.470.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					793.470.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII	Kelompok	2	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			600.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VIII	Kelompok	72	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII	Unit	4	193.470.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			95.970.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VIII	Orang	60	95.970.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.03				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			97.500.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil VIII	Unit	4	97.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X	%	2	525.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					525.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X	Kelompok	2	372.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			168.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil X	Orang	60	168.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.05.1.01.02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			204.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil X	Kelompok	105	204.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X	Unit	1	153.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				153.000.000			
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil X	Unit	1		153.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	2		292.550.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						292.550.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI	Kelompok	2		182.105.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan					75.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil XI	Orang	60		75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					107.105.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil XI	Kelompok	57		107.105.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI	Unit	1		110.445.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial					110.445.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil XI	Unit	1		110.445.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							1.200.000.000		
						Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5		400.000.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						400.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2		400.000.000		
		3.28.06.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS					200.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS	Dokumen	1		200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.06			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS					200.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pengelolaan DAS	Dokumen	1		200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	25		800.000.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						800.000.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	19		800.000.000		
		3.28.06.1.01.02			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS					150.000.000		
						Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS	Dokumen	2		150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS					650.000.000		
						Jumlah lembaga masyarakat yang peduli DAS yang difasilitasi	Kelompok	6		650.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan									5.893.768.000		
						Pertumbuhan PDRB subsektor Kehutanan	%	0.47		5.893.768.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							5.893.768.000		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35.38		1.414.100.000		
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						541.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	2		541.750.000		
		3.28.03.1.03.01			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi					221.750.000		
						Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun	Dokumen	1		221.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi					320.000.000		
						Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban	Unit	3		320.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					350.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	1		350.000.000		
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu					150.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pengolahan HHBK	Dokumen	1		150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian produksi Budidaya HHBK (bidang)	Dokumen	1		100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.04			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu					100.000.000		
						Jumlah unit usaha HHBK yang tertib (Bidang)	Unit	2		100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					522.350.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	3		522.350.000		
		3.28.03.1.07.01			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					181.230.000		
						Jumlah pengendalian pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban	Laporan	1		181.230.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					220.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas 2000-6000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya	Laporan	2		220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.03			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					121.120.000		
						Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) kapasitas < 6.000 m3 per tahun	Dokumen	4		121.120.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	0.72		696.970.000	CDK 1	
					Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					532.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I	Unit	1		532.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu					355.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil I	Unit	1		355.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				177.000.000			
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil I	Unit	1		177.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				164.970.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I	Unit	7		164.970.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				164.970.000			
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil I	Unit	7		164.970.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	0.72		656.998.000	CDK 2	
					Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu				578.618.000			
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II	Unit	1		578.618.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				415.438.000			
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil II	Unit	1		415.438.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				163.180.000			
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil II	Unit	1		163.180.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				78.380.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II	Unit	7		78.380.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				78.380.000			
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil II	Unit	7		78.380.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	0.62		303.500.000	CDK 3	
					Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu				215.000.000			
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III	Unit	1		215.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				115.000.000			
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil III	Unit	1		115.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000			
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil III	Unit	1		100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				88.500.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III	Unit	6		88.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				88.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil III	Unit	6	88.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV	%	0.72	267.600.000	CDK 4	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV	Unit	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				75.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil IV	Unit	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil IV	Unit	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					117.600.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV	Unit	7	117.600.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				117.600.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil IV	Unit	7	117.600.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	0.72	354.535.000	CDK 9	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					261.235.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX	Unit	1	261.235.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				152.665.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil IX	Unit	1	152.665.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				108.570.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil IX	Unit	1	108.570.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					93.300.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX	Unit	7	93.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				93.300.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil IX	Unit	7	93.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V	%	0.82	314.175.000	CDK 5	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					194.675.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V	Unit	1	194.675.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				74.825.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil V	Unit	1	74.825.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				119.850.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil V	Unit	1	119.850.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					119.500.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V	Unit	8	119.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				119.500.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil V	Unit	8	119.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI	%	0.82	270.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI	Unit	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				100.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VI	Unit	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				50.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VI	Unit	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					120.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI	Unit	8	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				120.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VI	Unit	8	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	0.82	328.490.000	CDK 7	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					235.170.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII	Unit	1	235.170.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				25.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VII	Unit	1	25.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				210.170.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK VII	Unit	1	210.170.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					93.320.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII	Unit	8		93.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				93.320.000			
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VII	Unit	8		93.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	0.62		235.600.000	CDK 8	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					149.100.000			
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII	Unit	1		149.100.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				74.100.000			
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil VIII	Unit	1		74.100.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.000.000			
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VIII	Unit	1		75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					86.500.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII	Unit	6		86.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				86.500.000			
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VIII	Unit	6		86.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	0.62		300.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					200.000.000			
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X	Unit	1		200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				50.000.000			
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil X	Unit	1		50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				150.000.000			
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil X	Unit	1		150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					100.000.000			
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X	Unit	6		100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				100.000.000			
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil X	Unit	6		100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI	%	0.62	751.800.000	CDK 11	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					671.800.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI	Unit	1	671.800.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				334.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina / difasilitasi di CDK Wil XI	Unit	1	334.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				337.800.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil XI	Unit	1	337.800.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				80.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI	Unit	6	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				80.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (LUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil XI	Unit	6	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									146.209.014.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Nilai kepuasan masyarakat	%	85		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								1.050.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81	1.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.050.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	1.050.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.050.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.050.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				550.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9	550.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								145.159.014.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	145.159.014.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						145.159.014.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	912.074.000	CDK 9	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	221.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				21.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	89.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.074.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	284.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.074.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	59.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.000.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	1	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		%	100	1.181.724.000	CDK 3	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah		Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.725.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Laporan	1	175.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.425.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	30.425.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	4.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.350.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	3.350.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.750.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	14.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	90.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					136.400.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	136.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	30.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.400.000			
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	106.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.999.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	271.999.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	69.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				202.999.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	202.999.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					587.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	587.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					94.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12	94.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05		Pemeliharaan Mebel					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	35.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					255.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana	Bulan	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.311.850.000	CDK 11	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.850.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	172.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					21.250.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	21.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
									10.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
									100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					385.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	385.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	108.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				182.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	182.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					247.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	247.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				155.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					461.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	461.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					61.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					240.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		1.134.842.000	CDK 6	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						247.598.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		247.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.980.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12		17.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					13.028.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		13.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.560.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		14.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					24.530.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		24.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						84.020.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		84.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.020.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	64.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.224.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	308.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				76.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				214.224.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	214.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					480.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				165.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.322.400.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.968.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	132.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.968.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	11.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	250.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	73.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				177.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	177.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					476.832.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	476.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	99.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				376.632.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	376.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.100.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	450.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				94.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	94.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	9.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				146.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	682.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					96.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	96.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.400.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	12.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				210.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	153.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				92.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	92.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				76.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.049.400.000	CDK 4	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					189.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	189.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					7.350.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		7.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					7.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					7.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					50.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		50.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.600.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		120.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.600.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		70.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		279.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					198.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						448.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		448.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					71.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12		71.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					2.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					333.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		333.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		709.400.000	CDK 8	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						141.592.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		141.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.092.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		10.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
									14.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
									80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				74.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				19.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				236.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	236.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				195.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	195.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				247.508.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	247.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.408.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		22.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					120.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					13.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		13.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		3.277.900.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		40.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		40.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						233.430.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		233.430.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		6.150.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.503.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12		15.503.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					46.297.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		46.297.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.480.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		14.480.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					41.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12		41.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		5.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		30.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		75.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.220.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.220.100.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					232.600.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		232.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					927.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		927.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350.370.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		350.370.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.050.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		2.050.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					66.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		66.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					282.320.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		282.320.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.434.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.434.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		85.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		5.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		60.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					647.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		647.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					57.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		57.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					580.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	580.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.494.542.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					198.350.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	198.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	22.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.992.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	9.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.928.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	22.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.380.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	19.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.100.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				3.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					273.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	273.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	198.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					316.192.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		316.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					57.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					247.692.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		247.692.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						661.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		661.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					152.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		152.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					235.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					209.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		209.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		1.147.820.000	CDK 10	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.320.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		10.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					10.320.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		10.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					176.750.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	176.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				92.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	92.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					407.250.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	407.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					443.500.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		443.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				105.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	1		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		58.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		630.000.000	CDK 7	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					120.200.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		120.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.200.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	3.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	197.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				126.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	272.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				82.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	993.960.000	CDK 5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						462.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		462.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					62.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					400.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						224.460.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		224.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					155.460.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		155.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		144.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12		50.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.200.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	74.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	881.560.000	CDK 2	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					84.140.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		84.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					54.140.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2		54.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.420.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		236.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.300.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					189.120.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		189.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						403.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		403.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					58.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12		58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					251.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		251.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					54.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana	Bulan	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	127.350.122.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					121.780.527.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	121.780.527.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				121.570.527.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	121.570.527.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.860.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	56.860.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				153.140.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	153.140.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					160.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	160.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				160.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	160.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					444.025.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	444.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				68.975.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	68.975.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				375.050.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	250	375.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.157.320.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.157.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				41.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	41.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.500.000		
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor		Bulan	12	69.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.020.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah		Bulan	12	51.020.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.400.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor		Bulan	12	75.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				94.250.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor		Bulan	12	94.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD		Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				117.550.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu		Bulan	12	117.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				696.600.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Bulan	12	696.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
					Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip		Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					801.500.000		
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan	1	801.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				48.000.000		
					Jumlah unit pengadaan meubelair		Unit	5	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				678.000.000		
					Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin		Unit	1	678.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya		Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.500.000		
					Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	1	75.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.995.900.000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	1	1.995.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				517.200.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	517.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.343.700.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1.343.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.010.350.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.010.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				446.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		446.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				40.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		184.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				255.350.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2		255.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah	%	100		1.079.420.000	CDK 1	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					238.500.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		238.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					94.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					312.470.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	312.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				217.470.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	217.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					419.450.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	419.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000		

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program (4)	Kegiatan (5)	Sub Kegiatan (6)	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) (7)	Satuan (8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah (11)	Lokasi (12)
								2023			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	59.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
JUMLAH									264.903.186.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah									6.060.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tingkat Kemandirian Desa (Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM))	%	2.88		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah								6.060.000.000		
						Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	68	6.060.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						200.000.000		
						Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	100	200.000.000	Bidang Penataan Desa	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					200.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	Desa	15	200.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.02			Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				200.000.000		
						Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk	Kelompok	150	200.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						925.000.000		
						Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	100	925.000.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					925.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD	Unit	87	925.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.01			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				225.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD	Desa	87	225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.03.1.01.03			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				700.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Desa	24	700.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						2.095.000.000		
						Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	4.34	820.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					820.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Kabupaten/ Kota	29	820.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.04			Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						
						Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih P3MD/Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Orang	0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.11			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				70.000.000		
						Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa	Orang	174	70.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.12			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Lokasi	29	750.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	40.24	400.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					400.000.000		
						Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa	Desa	580	400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.18			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				400.000.000		
						Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	580	400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	375.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					375.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa	Kabupaten/Kota	29	375.000.000		
		2.13.04.1.01.05			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				75.000.000		
						Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa	Orang	29	75.000.000		OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.06			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				300.000.000		
						Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum	Dokumen	60	300.000.000		OPD Provinsi
						Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%	100	500.000.000	Bidang Penataan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					500.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa	Kabupaten/Kota	29	200.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.08			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				200.000.000		
						Jumlah Daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan	Kabupaten/Kota	35	200.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.04.1.01.09			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan						
						Jumlah lokasi penyusunan data base Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa	Dokumen	7	300.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				300.000.000		
						Jumlah Raperda/ Raperbub tentang Desa yang difasilitasi	Dokumen	7	300.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.840.000.000		
						Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	91	1.685.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.685.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi	%	71.61	1.685.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.05			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1.685.000.000		
						Jumlah BUMDes yang difasilitasi	Unit	500	1.535.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Unit	160	150.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	3.55	1.155.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.155.000.000		
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	100	1.155.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.02			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				250.000.000		
						Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat	Orang	150	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah KPMD yang dilatih dalam fasilitasi proses pembangunan desa	Orang	29	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				75.000.000		
						Kelembagaan posyandu yang mengikuti perlombaan pada tahun berjalan	Kabupaten/Kota	35	75.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.06			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				115.000.000		
						Jumlah partisipasi provinsi pada Gelar TTG pada tahun berjalan	Kali	1	115.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.07			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				165.000.000		
						Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten/Kota	35	165.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.09			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				550.000.000		
						Jumlah TP PKK Aktif yang dibina	Kabupaten/Kota	35	550.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah									19.507.473.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah								567.214.000			
						Nilai SAKIP PD	Angka	83.5	567.214.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						567.214.000			
						Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades	Angka	83.5	567.214.000	SEKRETARIAT		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					567.214.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	567.214.000	SUB BAGIAN PROGRAM		
		X.XX.01.1.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			447.214.000			
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	447.214.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.000.000			
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								18.940.259.000			
						Nilai kepuasan Masyarakat	%	88	18.940.259.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.940.259.000			
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.940.259.000	SEKRETARIAT		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.383.259.000			
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	15.383.259.000	SUB BAGIAN KEUANGAN		
		X.XX.01.1.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.003.259.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	15.003.259.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			375.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	375.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.02.04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Buah	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Buah	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya laporan penatausahaan aset di SKPD	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Buah	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						803.500.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12		803.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Unit	35		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					82.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		82.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					80.000.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					40.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya Penyediaan barang cetak dan penggandaan perangkat daerah	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					15.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					294.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		294.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					110.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Buah	35	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.500.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	11.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah meubelair yang diadakan	Buah	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya pendukung	Buah	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				11.500.000		
						Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Buah	2	11.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.073.500.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2.073.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				547.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	547.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.488.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.488.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.500.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	568.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				175.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	Bulan	12	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				18.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.500.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	40.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah									800.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan	%	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan								800.000.000		
						Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	800.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						255.000.000		
						Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	97	255.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					255.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el	%	100	255.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.03			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				255.000.000		
						Penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el	%	100	255.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						235.000.000		
						Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	235.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					235.000.000		
						presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	100	235.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.04			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				235.000.000		
						Penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi kepemilikan akta kelahiran	%	100	235.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						310.000.000		
						Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	310.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					310.000.000		
						Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	310.000.000	SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	
		2.12.04.1.02.05			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				310.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten/ Kota	5	310.000.000	SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									26.367.473.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah									135.552.146.000	Dinas Perhubungan	
						Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	%	59.5		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi								17.974.867.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51.45	17.974.867.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						13.039.116.000		
						Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	52.34	7.317.436.000	Bidang Lalu Lintas	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					6.281.325.000		
						Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Unit	4252	6.281.325.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					6.281.325.000		
						Jumlah Pengadaan Aplikator Marka	Unit			SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan APILL	Unit	2	515.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ITS	Unit			SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU	Unit	250	4.838.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu	Buah	350	382.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Buah	29	273.825.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Unit	10	272.500.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					911.111.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/ Kota	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.03		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					46.320.000		
						Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional	Kabupaten/ Kota	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Kali	42	60.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					60.000.000		
						Jumlah Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Lokasi	21	60.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	26	804.791.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					804.791.000		
						Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	Kegiatan	6	804.791.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					125.000.000			
						Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	Dokumen	119		125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.06.01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin					125.000.000		
						Jumlah penilaian dan pengawasan Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	Dokumen	24		125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18.52		235.000.000	Bidang Lalu Lintas	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						235.000.000		
						Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	Orang	362		200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.04			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi					200.000.000		
						Jumlah peserta Abdi Yasa yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan	Orang	70		130.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan	Orang	35		70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum	Kegiatan	12		35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					35.000.000		
						Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Bidang Lalu Lintas)	Unit	0			SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar	Unit	20		35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	62.5		949.880.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						949.880.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi	10		328.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					328.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Buah	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Buah	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah III Kelas A)	m	10000		328.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Km	11.45		621.880.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					621.880.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Orang	76		284.880.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	60		337.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Kegiatan	0			SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum							
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	840.980.000		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					840.980.000			
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Lokasi	10	340.000.000		KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				340.000.000			
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Buah	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Buah	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah II Kelas B)	m	10000	340.000.000		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Km	10.05	500.980.000		KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				500.980.000			
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Orang	52	198.480.000		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	55	302.500.000		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Kegiatan	0			KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum							
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31.25	876.280.000		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					876.280.000			
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi	10	410.000.000		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				410.000.000			
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Buah	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Buah	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	30	170.000.000		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah I Kelas A)	m	10000	240.000.000		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	0			SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Km	10.25	466.280.000		SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan				466.280.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Orang	50	191.280.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	50	275.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan	0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38.46	1.113.880.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.113.880.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi	10	540.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				540.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	25	300.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	m	10000	240.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdapat fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Km	9.75	573.880.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan				573.880.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Orang	62	236.880.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	60	337.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Kegiatan	0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34.48	862.180.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					862.180.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi	10	390.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				390.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Kegiatan	0			KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.05				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	0			KEPALA BALAI	OPD Provinsi
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1.537.000.000		
						Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	75		1.537.000.000	Bidang Pelayaran	
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				220.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi	Lokasi	3		220.000.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.03				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				220.000.000		
						Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan	Lokasi	13		180.265.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy	Lokasi	0			SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pemeliharaan SBNP	Lokasi	0			SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi
						Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng	Buku	10		8.585.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan	Lokasi	3		20.250.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran	Lokasi	0			SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi
						Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan	Lokasi	2		10.900.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.317.000.000		
						Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan	Lokasi	6		1.317.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.01				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				30.000.000		
						Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1		30.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.03.1.10.02				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.240.000.000		
						Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai	Lokasi	3		1.165.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai	Unit	3		75.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.03.1.10.04				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				47.000.000		
						Jumlah alat keselamatan ASDP	Buah	0			SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP	Dokumen	12		47.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP	Orang	0			SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							3.398.751.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45.45		3.398.751.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						3.398.751.000		
						Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian							
						Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Kegiatan	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
						Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan	Lokasi	10		3.398.751.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.03			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian					3.398.751.000		
						Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA	Lokasi	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System	Lokasi	7		2.279.727.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang	Lokasi	3		242.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang	Lokasi	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengad an Gazon di perlintasan Sebidang	Buah	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang	Lokasi	4		877.024.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang	Lokasi	0			SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi									104.351.419.000		
						Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66.67		104.351.419.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							104.351.419.000		
						Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34.85		104.351.419.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						1.621.020.000		
						Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional	Unit	210		1.621.020.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.621.020.000		
						Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng	Paket	2		1.621.020.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						102.730.399.000		
						Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	Unit	107		102.730.399.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.01			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					102.730.399.000		
						Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	Trayek	7		102.730.399.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi									13.225.860.000		
						Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60.38		13.225.860.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							11.358.644.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5.68	50.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM	Dokumen	366	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.01			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000		
						Jumlah Evaluasi Trayek AKDP	Dokumen	0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi
						Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang	Unit	30	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
						Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor	Unit	0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.03			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi						
						Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi	Trayek	0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi
						Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	100	600.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					600.000.000		
						Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	1	600.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				600.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis	Lokasi	8	200.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	400.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52.03	404.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					50.400.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Unit	108405	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				50.400.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Kali	365	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					313.400.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Kegiatan	22	313.400.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				313.400.000		

					Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi	11		313.400.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.850.000		
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Dokumen	564		40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					40.850.000		
					Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	10		20.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
					Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	10		20.850.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
					Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	43.21		115.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					10.500.000		
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Unit	5733		10.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.03		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					10.500.000		
					Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Kali	365		10.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					85.450.000		
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Kegiatan	4		85.450.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.08.02		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					85.450.000		
					Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah II Kelas B	Lokasi	2		85.450.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Dokumen	296		20.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.13.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					20.000.000		
					Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	6		10.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
					Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	6		10.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
					Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52.51		210.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					15.625.000		
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Unit	34373		15.625.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					15.625.000		
					Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Kali	365		15.625.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					170.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan	8		170.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					170.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi	4		170.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						25.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Dokumen	512		25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					25.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	9		12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	9		12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79.53		197.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						25.000.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Unit	24191		25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					25.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Kali	365		25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						142.800.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Kegiatan	8		142.800.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					142.800.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi	4		142.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Dokumen	878		30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					30.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	7		15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	7		15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	84.23		251.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					21.990.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Unit	39781	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				21.990.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Kali	365	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Kegiatan	10	200.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi	5	200.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Dokumen	1107	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66.43	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					15.500.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Unit	50074	15.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				15.500.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Kali	365	15.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Kegiatan	8	150.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B	Lokasi	4	150.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Dokumen	845	30.000.000	KEPALA BALAI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				30.000.000		
					Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	6		15.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
					Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	6		15.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
					Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	94.45		1.540.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.450.000.000		
					Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Orang	4406000		1.450.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				1.450.000.000		
					Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Lokasi	28		1.450.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
					Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan	Unit	15		40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.12.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				40.000.000		
					Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi	Lokasi	1		20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis	Lokasi	1		20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
					Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi	Unit	15		50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi				50.000.000		
					Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek	Trayek	1		25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek	Unit	15		25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	43.75		7.562.129.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					7.562.129.000		
					Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek	Lokasi	14		7.562.129.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.03.01			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				60.000.000		
						Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	60.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		2.15.02.1.03.02			Pembangunan Gedung Terminal				4.617.429.000		
						Jumlah Pembangunan Terminal	Kegiatan	1	4.517.429.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Pengadaan Tanah Terminal	Paket	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal	Paket	1	100.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		2.15.02.1.03.03			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				2.850.000.000		
						Jumlah Penerapan Sistem Informasi	Lokasi	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV	Lokasi	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal	Paket	5	120.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Pengembangan Terminal	Lokasi	5	2.730.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.03.05			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B				34.700.000		
						Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Type B	Kali	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi
						Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B	Kali	4	34.700.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42.86	230.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					180.000.000		
						Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani	Trayek	5	180.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.01			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng	Paket	0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi
						Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Studi Review Maserplan sistem angkutan massal	Dokumen	0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi
		2.15.02.1.09.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				110.000.000		
						Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi	Orang	300	110.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM	Lokasi	0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani	Trayek	4	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis	Kali	2	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						1.867.216.000		
						Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	87.79	1.732.216.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.732.216.000		

					Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa	Trip	14	1.732.216.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.03.1.05.02			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			1.732.216.000		
					Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1	Paket	1	1.732.216.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
					Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	51.12	135.000.000	Bidang Pelayaran	
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			135.000.000		
					Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	Dokumen	232	135.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	
		2.15.03.1.06.01			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			135.000.000		
					Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	Dokumen	50	135.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.06.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					
					Jumlah Appraisal KMC. Kartini I	Paket	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusaha bongkar muat barang	Orang	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusaha Depo Peti Kemas	Orang	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusaha jasa pengurusan transportasi di perairan	Orang	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi
								65.115.060.000	Dinas Perhubungan	
					Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80		Dinas Perhubungan	
								400.000.000		
					Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	71	400.000.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				400.000.000		
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	400.000.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	13	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								64.715.060.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	64.715.060.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						64.715.060.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	434.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	%	100	376.600.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					121.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	121.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	240	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	48.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	%	100	92.112.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.112.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	47.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	60	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.612.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	5.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	%	100	118.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.840.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	57.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.840.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	9.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	%	100	128.200.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	62.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	14.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	%	100	141.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	73.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12		26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	%	100		118.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						59.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12		59.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					36.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	80		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12		19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12		38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	%	100		63.305.408.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.113.502.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12		48.113.502.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47.223.302.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		47.223.302.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				820.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12		820.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12		70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					165.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12		165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				165.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12		125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000			
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20		105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.148.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	2.148.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				88.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Unit	1760	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				165.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	3000	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					105.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.261.506.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	11.261.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.811.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.811.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.446.506.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	9.446.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.387.400.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	1.387.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				687.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	687.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)	Unit	2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									200.667.206.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah									77.872.184.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Indeks SPBE	Angka	3.33		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)								4.350.000.000		
						Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	4.350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						4.350.000.000		
						Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	100	4.350.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					2.375.652.000		
						Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	%	80	1.063.908.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				277.584.000		
						Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	Buah	247	277.584.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.04			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				786.324.000		
						Persentase Layanan Pengamanan Informasi	%	75	786.324.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	80	1.311.744.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
		2.21.02.1.01.01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				529.000.000		
						Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan informasi	Dokumen	1	529.000.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
		2.21.02.1.01.02			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				782.744.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	201	782.744.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					1.974.348.000		
						Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi	%	80	1.974.348.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.01			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1.974.348.000		
						Jumlah Informasi Yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Buah	39317	1.974.348.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral								2.200.000.000		
						Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	95.65	2.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						2.200.000.000		
						Persentase Ketersediaan data sektoral	%	100	2.200.000.000	Bidang Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					2.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia	Jenis	18000	800.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.02			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				800.000.000		
						Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang Telah Mengikuti Bimtek Pengolahan Data	Kabupaten/Kota	58	800.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia	Jenis	23000	1.400.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1.400.000.000		
						Jumlah Forum Satu data	Kali	2		SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
						Jumlah Kab/Kota Yang Terafiliasi dan Terintegrasi dengan Satu Data Jawa Tengah	Kabupaten/Kota	35	1.400.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
	Meningkatnya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah								71.322.184.000		
						Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	%	3.65	6.975.360.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						6.975.360.000		
						Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	85	6.975.360.000	Bidang E-Government	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					6.975.360.000		
						Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government	Dokumen	7	1.079.420.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.01			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1.079.420.000		
						Jumlah Regulasi Aplikasi Yang Terbit	Buah	6	1.079.420.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	80	5.453.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				5.453.840.000		
						Jumlah Aplikasi Berbagai Pakai Yang Dikembangkan/Dikelola	Unit	15	5.453.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi	%	80	442.100.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				442.100.000		
						Jumlah Penyelenggara E-Government yang Ditingkatkan kapasitasnya	Orang	1100	442.100.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Layanan SPBE	%	4.3	40.512.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						40.512.500.000		
						Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	85	37.462.500.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					37.462.500.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	85	6.475.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.10			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				475.000.000		
						Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan	Kelompok	44	475.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				6.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Komunitas Yang DiKoordinasikan	Kelompok	44	6.000.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	240	19.532.500.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2.800.000.000		
						Jumlah Konten Informasi yang Disebarkan	Konten	60	2.800.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				10.782.500.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	60	10.782.500.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.07			Layanan Hubungan Media				2.000.000.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	60	2.000.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.08			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				3.950.000.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	60	3.950.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Buah	240	11.455.000.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.02			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				840.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat Umum	Buah	117	840.000.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.03			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1.400.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Buah	117	1.400.000.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.09			Manajemen Komunikasi Krisis				9.215.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Agenda Publik	Konten	6	9.215.000.000	SEKSI OPINI PUBLIK	OPD Provinsi
						Persentase badan publik yang terbuka	%	100	3.050.000.000	Bidang Statistik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					3.050.000.000		
						Keterbukaan Informasi Publik	Angka	41	3.050.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.06			Pelayanan Informasi Publik				850.000.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan badan Publik	Kelompok	80	850.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				2.200.000.000		
						Persentase Penyelesaian Sengketa Publik	%	85	2.200.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	%	3.95	23.834.324.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						23.834.324.000		
						Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi	%	80	23.834.324.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					9.915.000.000		
						Persentase Sub Domain yang Aktif	%	100	9.915.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.01			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				15.000.000		
						Jumlah Domain Pemprov Jateng	Buah	1	15.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.02			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Domain dan Sub Domain	Buah	150	100.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.03			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				9.800.000.000		
						Jumlah Banwith Yang Tersedia	MBps	8500	9.800.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					13.919.324.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center	Lokasi	151	13.294.324.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				12.734.324.000		
						Jumlah Server/Storage	Buah	23	12.734.324.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.08			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				560.000.000		
						Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan FO Milik Prov. Jateng	Lokasi	86	560.000.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
						jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK	%	80	625.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.06			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				375.000.000		
						Jumlah Perangkat daerah yang terintegrasi Infrastruktur TIK	OPD	65	375.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan TIK	Dokumen	10	250.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									31.267.775.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	81,25		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								600.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat daerah	%	81	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						600.000.000		
						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%	100	600.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	5	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	5	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	Dokumen	2	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah									30.667.775.000		
						Nilai Kepuasan Masyarkat	%	81,25	30.667.775.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.667.775.000		
						Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%	100	30.667.775.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.638.042.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.	Dokumen	1	20.638.042.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.898.042.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.	Bulan	12	19.898.042.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN.	Bulan	12	550.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan.	Dokumen	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60.000.000			
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah.	Dokumen	1		60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					80.000.000		
						Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan yang di susun.	Dokumen	1		80.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					50.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran PD yang disusun.	Dokumen	12		50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						238.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah.	Dokumen	1		238.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					180.000.000		
						jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					36.000.000		
						jumlah bulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	Bulan	12		36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					22.000.000		
						jumlah laporan penatausahaan aset perangkat daerah	Dokumen	1		22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						483.070.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah.	Dokumen	1		483.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					211.700.000		
						Jumlah pakaian dinas yang diadakan.	Paket	1		211.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					22.820.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Bulan	12		22.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					49.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai.	Dokumen	1		49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					199.550.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/Workshop/seminar.	Orang	48		199.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan.	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis.	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.861.630.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah.	Dokumen	1		1.861.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.	Bulan	12	33.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				299.250.000			
						Jumlah unit penyediaan dan perlengkapan gedung kantor.	Unit	1	299.250.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				98.800.000			
						jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah.	Bulan	12	98.800.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.500.000			
						jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.	Bulan	12	71.500.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				132.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor.	Bulan	12	132.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah.	Bulan	12	5.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				275.000.000			
						Jumlah bulan ternuhnya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu.	Bulan	12	275.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				866.080.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah.	Bulan	12	866.080.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip.	Bulan	12	31.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE.	Dokumen	1	50.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.430.880.000			
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1	1.430.880.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit pengedaaan kendaraan dinas jabatan.	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.130.880.000			
						Jumlah unit pengedaaan kendaraan dinas operasional.	Unit	3	1.130.880.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengedaaan meubelair.	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengedaaan peralatan mesin.	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000			
						Jumlah unit pengedaaan aset tetap lainnya.	Unit	1	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengedaaan aset tak berwujud.	Paket	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengedaaan gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000			
						Jumlah unit pengedaaansarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	1	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.093.920.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1		4.093.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Surat Menyurat perangkat daerah	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.485.724.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Bulan	12		1.485.724.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Bulan	12		19.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.576.396.000		
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	Bulan	12		2.576.396.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.922.233.000		
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1		1.922.233.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas jabatan.	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					946.696.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional.	Paket	12		946.696.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan meubelair.	Unit	12		22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin lainnya.	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya.	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tak berwujud.	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					633.737.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab.	Unit	1		633.737.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					283.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	Paket	12		283.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya.	Paket	12		36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
JUMLAH									109.139.959.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah									39.646.144.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Presentase Kontribusi sektor KUKM terhadap PDRB Jawa Tengah	%	5.64		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah								33.547.082.000		
						Persentase Pertumbuhan Omzet KUKM Jawa Tengah	%	29.68	33.547.082.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						1.975.000.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	85.19	1.975.000.000	Bidang Pengawasan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					475.000.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi	%	100	475.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				300.000.000		
						Jumlah Koperasi Provinsi yang ditingkatkan akuntabilitasnya	Unit	150	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.03.1.01.02			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				175.000.000		
						Jumlah Koperasi Provinsi yang ditingkatkan kepatuhannya	Unit	140	175.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.500.000.000		
						Presentase KSP/USP yang sudah diawasi	%	100	1.500.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.02.01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				1.500.000.000		
						Jumlah KSP/USP yang ditingkatkan akuntabilitasnya	Unit	750	1.500.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						1.725.000.000		
						Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	27.15	1.725.000.000	Bidang Pengawasan	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.725.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatan	%	100	1.725.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.04.1.01.01			Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				385.000.000		
						Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP Provinsi yang ditingkatkan kualitas kesehatannya	Orang	210	385.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.04.1.01.02			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi				1.340.000.000		
						Jumlah KSP/USP Provinsi yang diukur tingkat kesehatannya	Unit	785	1.340.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						10.009.920.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	76.5	10.009.920.000	Bidang Kelembagaan	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					10.009.920.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya	%	14	3.075.000.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.01			Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3.075.000.000		
						Jumlah Koperasi Prov yang difasilitasi pengembangan usahanya	Unit	560	3.075.000.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya	%	17	6.934.920.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.02			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				6.934.920.000		
						Jumlah Kop Prov yg difasilitasi penguatan manajemen dan kelembagaanya	Unit	290	6.934.920.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						9.945.331.000		
						Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12.77	9.945.331.000	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					9.945.331.000		
						persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan	%	13.43	2.050.000.000	SEKSI PEMBIAYAAN	
		2.17.07.1.01.01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				2.050.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan akses pembiayaannya	Orang	925	2.050.000.000	SEKSI PEMBIAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya	%	20.47	7.895.331.000	SEKSI RESTRUKTURISASI USAHA	
		2.17.07.1.01.01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				7.895.331.000		

					Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya	Orang	2980		7.895.331.000	SEKSI RESTRUKTURISASI USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							9.891.831.000		
					Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	25		9.891.831.000	Bidang Bina Usaha	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					9.891.831.000		
					Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi	%	14		6.368.648.000	SEKSI PEMASARAN	
	2.17.08.1.01.01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					6.368.648.000		
					Jumlah Pelaku UMKM yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain Teknologi	Orang	860		6.368.648.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya	%	11		3.523.183.000	SEKSI PRODUKSI	
	2.17.08.1.01.01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					3.523.183.000		
					Jumlah Pelaku UMKM yang ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya	Orang	685		3.523.183.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									6.099.062.000		
					Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi KUKM yg dibina	%	29.95		6.099.062.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							6.099.062.000		
					Persentase SDM KUMKM yang terampil	%	83		6.099.062.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					6.099.062.000		
					Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun	Dokumen	4		38.050.000	SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
	2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					38.050.000		
					jumlah dokumen evaluasi dan pengembangan pelatihan	Dokumen	0			SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi
					Jumlah dokumen instrumen pelatihan	Dokumen	4		38.050.000	SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space	%	100		1.367.162.000	SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
	2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					1.367.162.000		
					Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space	Orang	750		803.750.000	SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah SDM Pendamping Pasca Pelatihan yang ditingkatkan kualitasnya	Orang	30		563.412.000	SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilannya	%	87		4.693.850.000	SEKSI PENYELENGGARA	
	2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					4.693.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih melalui pelatihan reguler	Orang	1110	1.668.277.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah SDM UMKM yang dilatih melalui pelatihan berjenjang	Orang	330	3.025.573.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah									34.754.477.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	86		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								1.300.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77.51	1.300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.300.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	77.51	1.300.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	11	1.300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				700.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5	700.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	6	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								33.454.477.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	86	33.454.477.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						33.454.477.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	77.51	7.000.000.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					704.916.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	704.916.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				111.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	111.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				281.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	8	281.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah pada Balatkop UKM	Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				207.916.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	207.916.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.813.340.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	14	1.813.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				332.500.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	104	332.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				990.840.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	120	990.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				490.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	490.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.263.144.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		3.263.144.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				875.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	875.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.352.544.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.352.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.218.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.218.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	144.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				870.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	870.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				149.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	86	26.454.477.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.054.477.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	7	18.054.477.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.154.477.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	17.154.477.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				495.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	495.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		
						umlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				175.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				50.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	5	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	150	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	35	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.006.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	2.006.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		
						umlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					240.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.236.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		1.236.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.570.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1.570.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					790.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	45		790.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					380.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	18		380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					400.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2		400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.839.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		2.839.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					620.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		620.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.119.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		2.119.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.785.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.785.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.210.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	1.210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									74.400.621.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera									4.299.530.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	10		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN								2.499.530.000		
						Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	2.499.530.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						550.000.000		
						Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	%	100	550.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					165.580.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	2	165.580.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.01		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					165.580.000		
						Jumlah dokumen kajian kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	Dokumen	2	165.580.000	SEKSI PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					384.420.000		
						Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun	Dokumen	1	154.420.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi					154.420.000		
						Jumlah dokumen kajian perencanaan penanaman modal daerah	Dokumen	1	154.420.000	SEKSI PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kajian Potensi dan Wilayah Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	5	230.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi					230.000.000		
						Jumlah dokumen prospektus investasi di Jawa Tengah yang disusun	Dokumen	5	230.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.030.000.000		
						Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	24	838.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					838.000.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	75	688.000.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi					688.000.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	8	688.000.000	SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha	Dokumen	18	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi					150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang dilakukan fasilitasi pendampingan	Unit	15	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepedulian kemitraan Usaha	%	26	192.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					192.000.000		
						Jumlah realisasi kemitraan usaha	Dokumen	20	192.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				192.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan fasilitasi temu usaha	Unit	35	192.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						919.530.000		
						Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	919.530.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					919.530.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Unit	700	376.016.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				376.016.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	12	376.016.000	SEKSI PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Buah	1500	330.859.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				330.859.000		
						Jumlah perusahaan yang ditinjau perizinannya	Unit	1500	330.859.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui	%	100	130.000.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				130.000.000		
						Jumlah proyek yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Unit	10000	130.000.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	90	82.655.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				82.655.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	12	82.655.000	SEKSI PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan								1.800.000.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	1.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.200.000.000		
						Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	93	261.655.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					261.655.000		
						Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi	%	40	120.380.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				120.380.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	85.380.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	35.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan	Buah	1	141.275.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				141.275.000		
					Jumlah aparaturnya yang mengikuti orientasi teknis pelayanan	Orang	25		25.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana dan prasarana layanan yang disusun	Dokumen	9		116.275.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100		138.345.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					138.345.000		
					Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100		138.345.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				138.345.000		
					Jumlah pelayanan fasilitasi	Buah	60		87.025.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah pelayanan informasi perizinan dan non perizinan oleh masyarakat	Buah	500		51.320.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	95		800.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					800.000.000		
					Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	Dokumen	1760		167.520.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				167.520.000		
					Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang penerbitannya terdigitalisasi	Dokumen	1760		167.520.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah notifikasi Online Single Submission	Buah	1650		259.808.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				79.808.000		
					Jumlah klinik pemenuhan komitmen perizinan	Kali	11		79.808.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.04.1.02.02			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				180.000.000		
					Jumlah pemohon perizinan berusaha/komitmen yang dilakukan pemantauan proses penerbitan	Unit	1100		180.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan	Unit	2530		372.672.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				372.672.000		
					Jumlah layanan perizinan yang masuk pada mall pelayanan publik, gerai dan layanan keliling yang dilaksanakan	Unit	1155		301.152.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah layanan perizinan yang terlayani dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Dokumen	1375		71.520.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						600.000.000		
					Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	90		600.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					600.000.000		

					Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Unit	1		384.570.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				384.570.000		
					Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	2		115.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah sistem aplikasi pendukung perizinan dan/atau penanaman modal yang dilakukan pengintegrasian	Dokumen	1		269.570.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik	Dokumen	4		215.430.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				215.430.000		
					Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4		215.430.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									20.211.437.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Nilai Kepuasan Masyarakat								19.941.437.000		
					Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		19.941.437.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.941.437.000		
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		19.941.437.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.427.334.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4		16.427.334.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.077.794.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		16.077.794.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				349.540.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		349.540.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					105.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.000		
					Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	150		45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		
					Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20		60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					701.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	701.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	35.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				60.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				69.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	69.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					585.651.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	585.651.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				585.651.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	184	585.651.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.763.207.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.763.207.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					612.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		612.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.105.707.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1.105.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.145.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		279.145.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					94.145.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		94.145.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					90.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)									270.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%	74	270.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						270.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	270.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					270.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	4	270.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				114.800.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	2	114.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				155.200.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	2	155.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									24.510.967.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah									143.005.120.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0.65		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah								143.005.120.000		
						Tingkat Prestasi Olahraga	Peringkat	4	143.005.120.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						143.005.120.000		
						Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	15	13.070.000.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					200.000.000		
						Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar pplop	%	100	200.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	
		2.19.03.1.02.03			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				200.000.000		
						Jumlah atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional dan Internasional antar PPLOP/ pelajar	Orang	20	200.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					12.870.000.000		
						Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP	%	100	12.870.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	
		2.19.03.1.03.02			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				12.570.000.000		
						Jumlah Atlet PPLOP yang berintegritas	Orang	185	12.570.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi				300.000.000		
						Jumlah Atlet PPLOP yang dibina	Orang	185	300.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	45	105.036.400.000	Bidang Keolahragaan	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					19.150.000.000		
						Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	%	100	19.150.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	
		2.19.03.1.02.01			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi				12.400.000.000		
						Jumlah Event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1.400.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penyelenggaraan event olahraga pendidikan dan prestasi	Kegiatan	3	11.000.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.02.03			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				6.750.000.000		
						Jumlah event Olahraga yang diikuti	Kegiatan	6	6.750.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					84.986.400.000		
						Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	%	100	84.986.400.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	
		2.19.03.1.03.02			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				438.280.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta yang dilakukan pengukuran kebugaran jasmani	Orang	150	150.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga	Orang	100	173.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Unit	1	115.280.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi				84.271.560.000		
						Jumlah Atlet dan pelatih berprestasi yang dibina	Orang	100	84.271.560.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				276.560.000		
						Dokumen profil data keolahragaan	Dokumen	1	276.560.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					900.000.000		
						Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	100	900.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	
		2.19.03.1.04.01			Standarisasi Organisasi Keolahragaan				800.000.000		
						Jumlah SDM Olahraga yang bersertifikasi kepelatihan	Orang	400	800.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.04.03			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				100.000.000		
						Jumlah Dokumen/ Kerjasama/MOU Bidang Keolahragaan	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	24.898.720.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					24.898.720.000		
						Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri	%	100	24.898.720.000	SEKSI KEPELATIHAN	
		2.19.03.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi				24.898.720.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi, renovasi dan atau dibangun	Unit	2	24.898.720.000	SEKSI KEPELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pemuda									24.647.117.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Indeks Pembangunan Pemuda	%	55.15		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda								24.647.117.000		
						Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda	%	51.04	24.647.117.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						24.647.117.000		
						Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	100	18.408.837.000	Bidang Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					3.325.000.000		
						Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda	%	100	3.325.000.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	
		2.19.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				2.425.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Keceintaanaman)	Orang	4000	2.425.000.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.19.02.1.01.04			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				900.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PAPAN, Pemuda Pelopor dan KPN)	Orang	105	900.000.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					15.083.837.000		
						Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	15.083.837.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	
		2.19.02.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha				158.837.000		
						Jumlah organisasi pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan	Unit	1	158.837.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.02.1.02.02			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				14.925.000.000		
						Jumlah dokumen kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan	Dokumen	9	14.925.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	16.3	6.238.280.000	Bidang Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					6.238.280.000		
						Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda	%	100	6.238.280.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	
		2.19.02.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi				1.405.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan	Orang	1000	1.405.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.02.1.01.09			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				4.833.280.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP	Orang	200	4.833.280.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata									8.202.661.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3.25		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan								8.202.661.000		
						Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Ribu Rupiah	6040686	8.202.661.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						2.581.051.000		
						Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	78.26	1.970.611.000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					851.560.000		
						Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	2	851.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	
		3.26.02.1.01.03			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				851.560.000		
						Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan	Desa	75	651.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Potensi Keunikan Lokal Budaya yang Dikembangkan sebagai Atraksi Wisata	Kegiatan	1	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produk pariwisata yang dikembangkan / diverifikasi	Kegiatan	2	120.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					914.840.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	Dokumen	2		300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.02.02			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan KSP/ KPPP	Dokumen	2		300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KSP/KPPP yang dikembangkan	Lokasi	1		614.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.02.03			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					614.840.000		
						Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata	Kegiatan	7		350.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daya Tarik Wisata pada KSP/ KPPP yang dikembangkan (fisik)	Lokasi	1		264.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	Kegiatan				SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					204.211.000		
						Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata	Unit	1		204.211.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.03			Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi					204.211.000		
						Jumlah pengelola destinasi pariwisata/daya tarik wisata yang dilatih	Orang	100		204.211.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi							
						Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Unit				SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	70		610.440.000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					610.440.000		
						Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata	Jenis	1			SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	
		3.26.02.1.04.03			Pengelolaan Investasi Pariwisata							
						Jenis media informasi investasi industri pariwisata	Unit	0			SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Travel Pattern (Pola Perjalanan Wisata) yang dikembangkan	Kegiatan	0			SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	Unit	100		610.440.000	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	
		3.26.02.1.04.02			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota					610.440.000		
						jumlah industri pariwisata yang dibina	Unit	200		610.440.000	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							2.554.680.000		
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	17295375		2.554.680.000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					2.554.680.000		
						Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kelompok	12		951.560.000	SEKSI PROMOSI	
		3.26.03.1.01.02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					951.560.000		
						Jumlah Event Pariwisata yang diselenggarakan	Kegiatan	0			SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti dan difasilitasi	Kegiatan	57		951.560.000	SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata	Orang	350000		763.280.000	SEKSI SARANA PEMASARAN	
		3.26.03.1.01.01			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					763.280.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah media promosi pariwisata	Jenis	2		763.280.000	SEKSI SARANA PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	Kegiatan	1		839.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	
		3.26.03.1.01.03				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				839.840.000		
						Jumlah Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata Jawa Tengah	Dokumen	3		614.840.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Mitra Pengenalan dan Pengembangan Pasar Wisata Potensial Jawa Tengah	Kegiatan	3		225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							300.000.000		
						Persentase Kota Kreatif	%	5.71		300.000.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					300.000.000		
						Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik	Unit	1		300.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	
		3.26.04.1.01.01			Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					300.000.000		
						Jumlah Kota Kreatif Yang difasilitasi	Kabupaten/Kota	7		300.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							2.766.930.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	59.72		2.766.930.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					2.766.930.000		
						Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri)	Kelompok	1		438.280.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.03				Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan						
						Jumlah pengelola homestay dan pemandu wisata (tour guide) yang dilatih	Orang	0			SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.08				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				438.280.000		
						Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi kreatif	Dokumen	2		250.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah komunitas Ekonomi Kreatif yang difasilitasi publikasi karya ekraf	Kelompok	5		188.280.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	Kelompok	2		890.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	
		3.26.05.1.01.02				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				890.000.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	1		100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lembaga/kelompok/organisasi pariwisata yang dibina	Orang	100		640.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah masyarakat yang sadar wisata dan Sapta Pesona	Orang	0			SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata	Orang	50		150.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi	Orang	50		735.530.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.09				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				735.530.000		
						Jumlah pelaku ekonomi Kreatif yang dilatih	Orang	50		50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi	Orang	210	585.530.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi kreatif yang difasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Orang	80	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	Orang	240	703.120.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.01			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				703.120.000		
						Jumlah dokumen Pengembangan SDM Pariwisata	Dokumen	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Duta Wisata yang terpilih dan diikutsertakan dalam event pariwisata	Orang	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku Pariwisata yang disertifikasi	Orang	150	703.120.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku pariwisata yang dilatih	Orang	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									50.562.527.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								997.870.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	76.46	997.870.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						997.870.000		
						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%	100	997.870.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					997.870.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	1	997.870.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				697.870.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	697.870.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								49.564.657.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Laporan	100	49.564.657.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						49.564.657.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	4.750.000.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					75.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					182.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12		182.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.750.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	0		30.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.260.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		3.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.370.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		5.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					99.620.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		99.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.352.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		3.352.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.352.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		2.352.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					950.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.141.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.141.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.000.000			
						Jumlah terpenuhinya bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	141.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	1.000.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	44.814.657.000		SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.936.937.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	32.936.937.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				32.232.657.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	32.232.657.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				704.280.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung palaksanaan tugas ASN	Bulan	12	704.280.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					290.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	290.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				290.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	290.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Bulan	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	90.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				90.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	100	90.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.375.720.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.375.720.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					70.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					15.720.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		15.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					270.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					780.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		780.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit penghadaan kendaraan dinas jabatan	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.402.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		9.402.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.595.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		1.595.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.687.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	7.687.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					720.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	0	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									226.417.425.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									35.413.615.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								35.413.615.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.24	35.413.615.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						35.413.615.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	35.413.615.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					199.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	5	199.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				163.100.000		
						Jumlah dokumen Renja, renstra PD yg disusun	Dokumen	2	163.100.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
						Jumlah dokumen RKA PD yang disusun	Dokumen	0		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
						Jumlah dokumen Perubahan RKA PD yang disusun	Dokumen	0		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
						Jumlah dokumen DPA PD yang disusun	Dokumen	0		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
						Jumlah dokumen Perubahan DPA PD yg disusun	Dokumen	0		SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	Dokumen	1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.500.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	36.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.749.667.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	29.749.667.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.537.267.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	29.537.267.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				212.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	212.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					120.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					824.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	824.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				90.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	90.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				209.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	209.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	400.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					336.190.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	336.190.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				200.000.000			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	2	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136.190.000			
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Paket	4	136.190.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.709.158.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		3.709.158.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.525.632.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		1.525.632.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.167.526.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		2.167.526.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						475.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					475.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan Di Jawa Tengah										1.085.315.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai Standar Kepuasan Pengunjung Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai	79.24			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat									1.085.315.000		
						Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100		1.085.315.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							1.085.315.000		
						Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	100		726.300.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						726.300.000		
						Jumlah Alihmedia koleksi Deposit	halaman	18566		242.300.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.08			Pengembangan Perpustakaan Deposit					242.300.000		
						Jumlah pelestarian bahan pustaka	halaman	2500		242.300.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	Eks	4500		484.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					484.000.000		
						Jumlah Bahan Pustaka Yang Diolah	Eks	13384		484.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	100		72.160.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						72.160.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan	Unit	35		72.160.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.01			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					62.800.000		
						Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pd satuan pendidikan menengah & khusus	Jenis	3		62.800.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.23.02.1.02.04			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					9.360.000		
						Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jenis	1		9.360.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	100		151.840.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						151.840.000		
						Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah	Orang	807000		44.840.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.07			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					44.840.000		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis	8		44.840.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengunjung perpustakaan online	Orang	3000000		107.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.01			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					107.000.000		
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik	Jenis	2		107.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	100		73.820.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						73.820.000		
						Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi	Orang	15		73.820.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.06			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi					73.820.000		
						Jumlah SDM Perpustakaan yg mengikuti pelatihan	Orang	450		73.820.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	100		61.195.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						61.195.000		
						Jumlah mitra perpustakaan	Unit	3		61.195.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.02			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi					61.195.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerjasama	Unit	3		61.195.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Penyelenggaraan Kearsipan Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Tertib Arsip										734.063.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai indeks kearsipan	Nilai	92			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip									734.063.000		
						Nilai pengelolaan kearsipan LKD Provinsi	Nilai	90		734.063.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							734.063.000		
						Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	%	100		280.010.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						280.010.000		
						Persentase arsip yg dilestarikan	%	100		280.010.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					280.010.000		
						Jumlah arsip yang di akusisi	Berkas	18691		98.925.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah arsip yang dilestarikan	Lembar	67684		105.290.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah arsip yang diolah	Berkas	10000	75.795.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	100	226.080.000		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					226.080.000		
						Jumlah pengunjung layanan kearsipan	Orang	3678	49.880.000		
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				49.880.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	450	49.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase publikasi kearsipan	%	100	176.200.000		
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				176.200.000		
						Jumlah promosi kearsipan	Jenis	6	176.200.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	100	227.973.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					112.200.000		
						Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik	OPD	25	112.200.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				112.200.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	OPD	41	112.200.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					115.773.000		
						Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan	OPD	41	115.773.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				115.773.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan	OPD	9	115.773.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									37.232.993.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program (4)	Kegiatan (5)	Sub Kegiatan (6)	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) (7)	Satuan (8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah (11)	Lokasi (12)
								2023			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
									63.306.658.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	1.5		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan								58.035.687.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	37.07	2.840.875.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2.840.875.000		
						Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	50	1.351.575.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.351.575.000		
						Jumlah reakreditasi ISO	Dokumen	1	1.351.575.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			147.390.000		
						Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Dokumen	140	43.425.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan dokumen	Dokumen	1	103.965.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.02.02				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			1.204.185.000		
						Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Dokumen	800	1.204.185.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	%	25	1.489.300.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					220.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	3	100.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.02				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha	Orang	100	100.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	6550	120.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.03				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen statistik pengolah dan pemasar perikanan	Dokumen	1		120.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						1.269.300.000		
						Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	55000		1.269.300.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				312.000.000		
						Jumlah Poklahsar yang dibina	Kelompok	10		312.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.02.02				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				957.300.000		
						Jumlah kerjasama dalam mengakomodir menu ikan dalam jamuan	Jenis	3		33.750.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	2000		753.015.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Poklahsar yang difasilitasi pemasaran e commerce	Kelompok	5		170.535.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Garam	Ton	207505.12		1.367.814.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							1.367.814.000		
						Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30		135.030.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						135.030.000		
						Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya	Kelompok	2		135.030.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				135.030.000		
						Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan	Orang	100		135.030.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	25		1.232.784.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						1.232.784.000		
						Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	5		1.232.784.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1.232.784.000		
						Jumlah dokumen data statistik garam rakyat	Dokumen	1		32.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas tambak garam yang menerapkan teknologi	Ha	20		1.200.184.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	1023928.09		53.826.998.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							40.657.712.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100		552.360.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						552.360.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11		552.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.02				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				150.000.000		
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3		150.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				402.360.000			
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8		402.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100		1.299.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.299.500.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11		938.300.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					938.300.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	600		184.136.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	1800		754.164.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	50		361.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					361.200.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10		361.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100		514.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						514.400.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11		268.456.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					268.456.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	20		172.617.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	10		95.839.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	40		245.944.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					245.944.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8		245.944.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81.82		1.559.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.559.200.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	40		1.559.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					1.138.800.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	34		1.100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	12		38.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					420.400.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8		420.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100		872.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						872.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	872.150.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				622.400.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	170	302.920.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3350	319.480.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				249.750.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	249.750.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	1.125.771.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.125.771.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	50	1.125.771.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				650.771.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	147	72.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	1270	578.771.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				475.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	475.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	750.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					750.280.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	50	750.280.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				186.500.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	110	80.750.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	7	105.750.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				563.780.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	563.780.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81.82	767.160.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					767.160.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	40	767.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				617.269.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	10	150.756.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	5	466.513.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				149.891.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	149.891.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	799.660.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					799.660.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	50	799.660.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				441.660.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	85	189.090.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	625	252.570.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				358.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	358.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63.64	582.258.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					582.258.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	40	582.258.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				502.216.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	30	111.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	700	391.216.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				80.042.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	80.042.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	1.265.436.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.265.436.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	1.265.436.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				446.916.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	600	135.185.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	6500	311.731.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				818.520.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	818.520.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0.1	30.569.537.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					28.098.237.000		
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	502823.78	28.098.237.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.02			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				28.098.237.000		
						Jumlah KUB yang terfasilitasi	Kelompok	5	42.990.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	10000	1.305.589.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran	Lokasi	11	26.551.248.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO	Lokasi	1	70.905.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI	Lokasi	1		84.515.000	SEKSI KEPSELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha	Orang	10		42.990.000	SEKSI KEPSELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.471.300.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	150		2.471.300.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.01			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					137.250.000		
						Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusun	Dokumen	1		137.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.25.03.1.02.03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					2.334.050.000		
						Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	Paket	75		1.888.650.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan (Orang)	Orang	1000		445.400.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							13.169.286.000		
						Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100		1.234.620.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						1.234.620.000		
						Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Kasus	300		545.142.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.07			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi					545.142.000		
						Data peredaran Obat Ikan yang Terdaftar/Belum Terdaftar	Dokumen	1		390.987.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan	Lokasi	35		86.480.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang terakses informasi pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan	Orang	350		67.675.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu	%	1		689.478.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.06			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					689.478.000		
						Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	1		232.585.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskamling	sampel	400		50.218.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Penambahan Ruang Lingkup Pengujian	Jenis	1		406.675.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	25		7.880.166.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						7.880.166.000		
						Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau)	%	60		7.313.862.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.05.03			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.313.862.000		
						Jumlah Broodstock Center	Lokasi	3		712.553.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Produksi Benih Ikan Air Payau dan Tawar Bermutu	Ekor	8000000	340.545.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah Produksi Calon Induk Unggul	Ekor	7000	2.369.496.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Tawar	Ton	5	1.724.520.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah rehabilitasi sarana prasarana loka	Unit	10	2.166.748.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut)	%	40	566.304.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.04			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				566.304.000		
						Jumlah Produksi Benih Ikan Air Laut Bermutu	Ekor	14000000	109.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Ekor	7	403.804.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah rehabilitasi sarana prasarana loka	Unit	1	53.500.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0.2	4.054.500.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					346.000.000		
						Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	3	346.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.02			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				200.000.000		
						Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Unit	5	137.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	Unit	15	48.020.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Unit	1	14.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.03			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				146.000.000		
						Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	Dokumen	1	146.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					3.708.500.000		
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	521104.31	3.708.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.05		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.708.500.000		
						Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya tawar/payau/laut	Kelompok	25	3.708.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif								5.270.971.000		
						Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	%	61	5.270.971.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						2.297.519.000		
						Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	17.6	966.994.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					966.994.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	1		966.994.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					386.825.000		
						Jumlah dokumen integrasi RZWP3K kedalam RTRWP dan Tindak Lanjutnya	Dokumen	1		314.225.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut	Orang	250		72.600.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.02.1.01.02			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat					580.169.000		
						Jumlah aktifitas pengelolaan kawasan konservasi	Kegiatan	4		580.169.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25		327.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						327.000.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	2		327.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					327.000.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	20000		218.357.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah TKB dan rumah ikan yg ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	5		108.643.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25		486.300.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						486.300.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	3		486.300.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					486.300.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	30000		310.920.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah TKB dan rumah ikan yg ditenggelamkan	Unit	5		175.380.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25		362.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						362.000.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	2		362.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					362.000.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	20000		362.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1		31.225.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						31.225.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	3		31.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional					31.225.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	1		6.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1		6.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	1		19.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1		66.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						66.000.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	12		66.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional					66.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	1		14.770.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1		26.785.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	10		24.445.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1		58.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						58.000.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	12		58.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional					58.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	10		53.780.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1		2.110.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	1		2.110.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.973.452.000		
						Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan	%	72		1.218.550.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						955.700.000		
						Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	250		955.700.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					144.850.000		
						Jumlah pelaku usaha ruang laut yang memahami perundangan	Orang	50		72.800.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha pemanfaatan ruang laut	Kasus	20		72.050.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					544.450.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memahami perundangan	Orang	100		116.200.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus Usaha perikanan tangkap	Kasus	150		428.250.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				266.400.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan payau dan laut yang memahami perundangan	Orang	100	56.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus Pembudidayaan ikan payau dan laut	Kasus	18	209.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					262.850.000		
						Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan	Kasus	40	262.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				98.600.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang memahami perundangan	Orang	30	40.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha perikanan tangkap di PUD	Kasus	8	58.100.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				66.500.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang memahami perundangan	Orang	30	18.250.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha Pembudidayaan ikan air tawar	Kasus	15	48.250.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				97.750.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memahami perundangan	Orang	30	48.750.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kasus	18	49.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	477.050.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					413.250.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	4	413.250.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				25.690.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30	25.690.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				373.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30		373.040.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil					14.520.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30		14.520.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						63.800.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	4		63.800.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya					25.000.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30		25.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya					15.700.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	0		15.700.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					23.100.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30		23.100.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2		558.560.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						395.000.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	4		395.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					91.152.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30		91.152.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					241.700.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30		241.700.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil					62.148.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30		62.148.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						163.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	4		163.560.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya					74.036.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30		74.036.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya					39.534.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	30		39.534.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					49.990.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30		49.990.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2		486.042.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						254.520.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	4		254.520.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					48.324.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30		48.324.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					157.872.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30		157.872.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil					48.324.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30		48.324.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						231.522.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	4		231.522.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya					67.249.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30		67.249.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				63.557.000			
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	30		63.557.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100.716.000			
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30		100.716.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdgp	%	45		233.250.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						233.250.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	45		233.250.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.04			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					233.250.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Kelompok	90		233.250.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah										58.323.605.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	81			Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									727.000.000		
						Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	81		727.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							727.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		727.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						727.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2		727.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					433.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1		433.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					294.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1		294.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah									57.596.605.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	81		57.596.605.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							57.596.605.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					503.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	503.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				498.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	498.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	148.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah		%	100	95.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.700.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Dokumen		16.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.700.000		
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor		Unit	1	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
					Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor		Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.000.000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	145.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				720.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.280.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	44.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	758.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	603.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				598.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	598.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	1.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	8.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	176.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.750.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	6.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	5.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	124.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	253.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	187.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.500.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	93.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					54.500.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		54.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		77.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.840.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		7.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		26.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.800.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		31.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		11.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		114.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						23.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		23.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		55.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					53.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		98.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						21.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					37.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		264.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		154.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					151.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		151.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		160.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						27.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					58.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	108.280.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.680.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	16.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.300.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	3.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	9.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.100.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	38.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	48.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	7.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					23.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		54.118.325.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						49.355.175.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		49.355.175.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					48.315.175.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		48.315.175.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					920.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					120.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1		120.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah							
						Jumlah laporan pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					325.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000			
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30.000.000			
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				280.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	30		280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	300			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	20			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.358.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1.358.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				170.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				130.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				773.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	773.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					630.150.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	630.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				355.150.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	355.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.585.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.585.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				580.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				980.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	980.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	765.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				365.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		Bulan	12	365.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				240.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									121.630.263.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan pertumbuhan laju PDRB ADHK (atas harga konstan) sub sektor peternakan									65.910.613.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	Nilai	5.5		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya produksi daging, susu dan telur								65.910.613.000		
						Persentase kenaikan produksi daging, susu dan telur	%	4.06	65.910.613.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						32.564.770.000		
						Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	4013001	17.000.293.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					5.388.233.000		
						Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak	%	1	5.388.233.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				5.388.233.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak	Kelompok	68	5.388.233.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					11.612.060.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak	Kelompok	20	4.090.040.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				4.090.040.000		
						Jumlah Pakan ternak yang difasilitasi	Kg	12000	3.960.373.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak	Laporan	11	129.667.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak	%	1	7.522.020.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.02			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				7.522.020.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak	Kelompok	15	7.522.020.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	2.301.567.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					2.301.567.000		
						Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar	Unit	5	2.301.567.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.01			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				2.301.567.000		
						Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan	Kali	5	100.000.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengawasan Obat hewan dan produk hewan	Unit	5	2.201.567.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	4.650.302.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					4.650.302.000			
						Jumlah Produksi semen Beku	Dosis	500000		1.362.351.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.02			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.362.351.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	450000		131.680.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	39		1.230.671.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran	Nilai	2		3.287.951.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.287.951.000		
						Jumlah ternak bunting dari IB Straw BIB Ungaran	Ekor	50000		3.287.951.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak	%	2		8.612.608.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						8.612.608.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia	(ST)/(AU)	188		3.598.236.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.598.236.000		
						Jumlah produksi telur	Butir	500094		1.015.350.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah produksi ternak nonruminansia	Ekor	45630		2.582.886.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah produksi ternak ruminansia	(ST)/(AU)	23.65		5.014.372.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					5.014.372.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB	Ekor	65		2.241.602.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah produksi susu	Liter	38000		1.528.205.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah produksi ternak ruminansia	Ekor	154		1.244.565.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							5.367.290.000		
						Persentase kenaikan fasilitas sarpras peternakan	%	1		5.367.290.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
					Penataan Prasarana Pertanian					5.367.290.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi	Unit	10		968.420.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.02			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					968.420.000		
						Jumlah pengolahan dan pemasaran yang terfasilitasi	Unit	10		968.420.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang terfasilitasi	Orang	100		4.398.870.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.09			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					4.398.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah inovasi peternakan yang terfasilitasi	Unit	8		3.270.560.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah prasarana peternakan yang terfasilitasi	Unit	8		1.128.310.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							17.373.553.000		
						Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10		497.700.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						497.700.000		
						Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Ekor	500		497.700.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.01			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit					497.700.000		
						Jumlah pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Ekor	500		497.700.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5		1.073.735.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						1.073.735.000		
						IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan	%	81		1.073.735.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.02			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan					1.073.735.000		
						Jumlah Pengawasan lalulintas hewan di Jawa Tengah Utara	(ST)/(AU)	500000		175.100.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji di Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	Kali	24500		698.485.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak yang terlayani Kesehatan hewan Wilayah Jateng Utara	Ekor	13850		200.150.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5		14.379.285.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						13.860.985.000		
						Persentase laporan penyakit yang tertangani	%	75		13.860.985.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.01			Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					13.860.985.000		
						Jumlah Laporan Kasus Penyakit yang direspon	Laporan	258981		13.060.985.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis	Buah	1		800.000.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						518.300.000		
						Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya	Buah	10		518.300.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.01			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit					518.300.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	20		518.300.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5		1.422.833.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						1.422.833.000		
						Tingkat Kepuasan Pelanggan	Nilai	81		1.422.833.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.02			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan					1.422.833.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Pengawasan lalulintas hewan di Jawa Tengah Selatan	(ST)/(AU)	500000		177.760.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji di Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	Kali	28600		853.813.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak yang terlayani Kesehatan hewan Wilayah Jateng Selatan	Ekor	14000		391.260.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							10.605.000.000		
						Persentase kenaikan fasilitas penyuluhan dan kemitraan	%	15.62		10.605.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						10.605.000.000		
						Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan	Kelompok	35		10.605.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani					10.605.000.000		
						Jumlah Kelompok yang Didampingi Pengembangan Penguatan kelembagaan dan kemitraan peternakan	Kelompok	37		9.484.480.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	500		1.120.520.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										63.589.027.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									800.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71		800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							800.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		800.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						800.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	16		800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					450.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	10		450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	6		350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									62.789.027.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		62.789.027.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							62.789.027.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		42.795.417.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.263.486.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2		34.263.486.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					33.939.286.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		33.939.286.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					274.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		274.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50.000.000			
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1		50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	2			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						378.850.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		378.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					60.000.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12		60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					18.850.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	1		18.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						90.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah							
						Jumlah laporan pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Laporan	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					90.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	1		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						210.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Paket	100			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					70.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	100		70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					140.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20		140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.639.955.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		1.639.955.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					129.955.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		129.955.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					270.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	5		111.270.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	5		158.730.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					105.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					20.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					650.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					125.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						892.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		892.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	2			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	4			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							
						Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	5			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	10		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					387.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		387.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					175.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1		175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud					15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1		15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.047.088.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		4.047.088.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					650.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12		650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					165.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.227.088.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		3.160.698.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1		66.390.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.273.538.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.273.538.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					524.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		524.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					120.138.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1		120.138.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		6.107.037.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.221.079.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		1.221.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					121.326.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1		21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1		100.326.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					109.438.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		109.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					405.543.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		405.543.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					51.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					106.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					349.775.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		349.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7.997.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		7.997.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.492.408.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1.492.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					692.408.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1		692.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				800.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.776.650.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2.776.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	219.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.522.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.520.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					616.900.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	616.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	84.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				126.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	126.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				210.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	2.786.555.000	Balai veteriner boyolali	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					585.725.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	585.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.310.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		44.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					45.700.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1		34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1		11.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.110.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		23.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					233.890.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		233.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					55.040.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		55.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					70.990.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		70.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12.685.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						415.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					215.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1		215.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud					15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					185.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1		185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.267.830.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		1.267.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.750.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		12.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					72.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		72.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					992.280.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		981.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1		11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						518.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		518.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					53.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12		53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		7.553.261.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.495.592.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		1.495.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					72.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		72.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					277.856.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1		218.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1		59.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					78.717.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		78.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					491.300.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		491.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					45.100.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					137.630.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		137.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					347.729.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		347.729.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.805.459.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	2.805.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				2.370.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1	2.370.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				1.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				402.959.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	402.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.450.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.450.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				45.100.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.110.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.109.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.801.410.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.801.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	180.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				392.940.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	392.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				340.270.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	340.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				834.200.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1		834.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12		52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		3.546.757.000	Balai veteriner semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					904.853.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		904.853.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				39.625.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		39.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263.400.000		
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1		243.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1		19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				342.728.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		342.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.600.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		93.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					369.000.000		
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		369.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				82.000.000		
					Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1		82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				2.000.000		
					Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				285.000.000		
					Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1		285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.664.904.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.664.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	121	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.399.904.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.388.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					608.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	608.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				164.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	164.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
JUMLAH									129.499.640.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Memantapkan produksi pertanian dan pertanian berkelanjutan									92.515.291.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	%	1.15		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan								14.970.800.000		
						Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	Angka	3690	14.970.800.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						14.970.800.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10	9.220.800.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					500.000.000		
						- Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian	Orang	250	500.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.01			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN				500.000.000		
						Adopsi teknologi	Orang	1630	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Penyuluh yang ditingkatkan kapasitas nya	Orang	250	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Penyusunan programa penyuluhan	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Terinputnya data petani di simlutan dan e-RDKK	Kabupaten/ Kota	35	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
				Penataan Prasarana Pertanian					1.310.100.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran dan sarana pasca panen	Kelompok	0	1.310.100.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.01.01			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1.214.100.000		
						Jumlah promosi pemasaran produk pertanian	Kali	0	1.214.100.000	SEKSI BINA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07.1.01.09			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				96.000.000		
						Jumlah sarana pasca panen komoditas panen	Unit	0	96.000.000	SEKSI BINA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					6.910.700.000		
						Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	Kelompok	0.33	6.910.700.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.02			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				6.910.700.000		
						Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	0	6.910.700.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					500.000.000		
						- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (Kelompok	Kelompok	0		SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani						
						Kelompok petani tembakau dengan pengembangan usaha terpadu	Kelompok	0		SEKSI BINA USAHA	
						Fasilitasi Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha	Kelompok	0		SEKSI BINA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani						
						Kelompok petani tembakau melalui pengembangan kemitraan usaha	Kelompok	0			SEKSI BINA USAHA
						Penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	3		500.000.000	SEKSI BINA USAHA
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani					500.000.000	
						Pembentukan dan pengembangan korporasi	Unit	3		500.000.000	SEKSI BINA USAHA
						Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100		5.750.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						5.750.000.000	
						Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian	Orang	1350		2.500.000.000	SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI
		3.27.07.1.02.02			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					2.500.000.000	
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM Pertanian	Orang	1350		2.500.000.000	SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI
						Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian	Orang	1130		3.250.000.000	SEKSI PELATIHAN
		3.27.07.1.02.02			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					3.250.000.000	
						Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Pertanian	Orang	1130		3.250.000.000	SEKSI PELATIHAN
	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan									77.544.491.000	
						Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	11.6		77.544.491.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							65.569.500.000	
						Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100		2.325.000.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						2.325.000.000	
						Pengawasan peredaran benih	Bulan	12		947.070.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					221.240.000	
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12		221.240.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					550.830.000	
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12		550.830.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
		3.27.02.1.02.04			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan					175.000.000	
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12		84.580.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	800000		90.420.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
						Pengujian laboratorium	Lembar	115		104.450.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
		3.27.02.1.02.01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih					104.450.000	
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	1015		104.450.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
						Pengujian laboratprium	Lembar	1015		45.550.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.02.01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				45.550.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	115	45.550.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	100	328.760.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				328.760.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Ton	470000	230.910.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	900	97.850.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Sertifikasi benih padi	Ha	5400	746.540.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				746.540.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	21600	746.540.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Sertifikasi Benih palawija	Ha	1100	152.630.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				152.630.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	1650	152.630.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	4	18.301.500.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				18.301.500.000		
						- Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan	Ha	200	965.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				965.000.000		
						Pupuk organik mendukung optimasi lahan pertanian dan perkebunan	Ton	200	965.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Penambahan sarana pra panen	Unit	0	16.481.500.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				16.481.500.000		
						Alat mesin pertanian	Unit	0	16.481.500.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel	Unit	100	855.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				855.000.000		
						Pengembangan/pembinaan SDM UPJA dan bengkel	Orang	100	855.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
						Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah	%	5	1.870.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1.870.000.000		
						Asuransi pertanian	Ha	15000	1.870.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.550.000.000		
						Premi asuransi pertanian	Ha	15000	1.550.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				320.000.000		
						Koordinasi pelaksanaan kegiatan Asuransi Pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Kabupaten/Kota	30	280.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Pembinaan/monitoring/Evaluasi Asuransi Pertanian	Kabupaten/Kota	29	40.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2.5		8.014.200.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						8.014.200.000		
						Informasi harga pasar	Kabupaten/Kota	35		300.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					300.000.000		
						Terfasilitasinya petugas informasi pasar komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten/Kota	35		300.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil	Kelompok	6		7.269.200.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					7.269.200.000		
						Alat pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit	6		6.614.200.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Unit	2		295.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Alat pasca panen tanaman pangan	Unit	2		360.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Starup kewirausahaan	Unit	6		445.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					445.000.000		
						Jumlah startup kewirausahaan pertanian yang tumbuh	Unit	6		445.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10.8		2.328.800.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						2.328.800.000		
						Pengembangan Bawang merah	Ha	10		593.800.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					593.800.000		
						Benih bawang merah	Ton	4		593.800.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan Buah durian	Ha	4		193.175.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					193.175.000		
						Benih Durian	Batang	1800		193.175.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Pengembangan Buah Lainnya	Ha	17		365.125.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					365.125.000		
						Benih Buah Lainnya	Batang	10125		365.125.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Pengembangan Cabe	Ha	21		198.500.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					198.500.000		
						Benih Cabe	Ha	6		198.500.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan jahe	Ha	4		279.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					279.000.000		
						Benih jahe	Ton	4		279.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan melati	Ha	2		60.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					60.000.000		
						Benih melati	Batang	20000		60.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan Sayuran lainnya	Ha	10		333.200.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					333.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Benih Sayuran Lainnya	Kg	5.8		333.200.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan Tanaman Hias Lainnya	Ha	1		236.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				236.000.000		
						Benih Tanaman Hias Lainnya	Ton	1		236.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan Tanaman obat Lainnya	Ha	2		70.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				70.000.000		
						Benih Tanaman Obat Lainnya	Ton	1.75		70.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	17.22		3.000.000.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.000.000.000		
						Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas)	Lokasi	25		1.616.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1.616.000.000		
						Peremajaan/penambahan /penggantian tanaman tumpangsari/tanaman sela/ tanaman musiman	Lokasi	25		1.616.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Lokasi	1		843.161.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				843.161.000		
						Terbangunnya calon kebun induk tanaman perkebunan	Lokasi	1		843.161.000	SEKSI BENIH	
						Perbanyak benih tanaman perkebunan	Batang	124000		540.839.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				540.839.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan siap tanam	Batang	124000		540.839.000	SEKSI BENIH	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	3		3.200.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.200.000.000		
						Pengembangan tanaman hias	Batang	50		71.906.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				71.906.000		
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	50		71.906.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyak bawang merah	Ha	0.5		62.324.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				62.324.000		
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	2.5		62.324.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyak benih buah-buahan	Pohon	1000		1.053.770.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1.053.770.000		
						Jumlah produksi benih buah-buahan	Batang	1000		1.053.770.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyak benih padi	Ha	40		1.689.500.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				1.689.500.000		
						Jumlah produksi benih padi	Ton	270.1		1.689.500.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyak palawija	Ha	8		322.500.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				322.500.000		
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	6.8		322.500.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Revitalisasi Kebun	Unit	0			SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah kebun benih yang direvitalisasi	Unit	0			SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	3	3.850.000.000		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.850.000.000			
						Pengembangan sayuran	Ha	1		100.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					100.000.000		
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	1		100.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Pengembangan tanaman hias	Batang	5000		25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					25.000.000		
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	5000		25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan Benih Padi	Ha	86		2.830.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					2.830.000.000		
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	318.2		2.830.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan Benih sayuran	Ha	0.7		50.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					50.000.000		
						Jumlah produksi sayuran	Ton	1		50.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan	Batang	4000		675.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					675.000.000		
						Jumlah produksi benih buah	Batang	4000		675.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan/pengembangan palawija	Ha	9.99		170.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					170.000.000		
						Jumlah kebun benih yang diperbaiki	Unit	0			SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	4		170.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	3	4.200.000.000		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						4.200.000.000		
						Perbanyakan benih kedelai	Ha	5		91.615.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					91.615.000		
						Jumlah produksi benih kedelai	Ton	4		91.615.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan benih padi	Ha	64		2.208.385.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					2.208.385.000		
						Jumlah produksi benih padi	Ton	224		2.208.385.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan benih sayuran	Ha	4		728.586.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					728.586.000		
						Jumlah produksi benih kultur jaringan	Unit	32		233.506.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	16000		495.080.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan tanaman buah	Unit	29		821.414.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					821.414.000		
						Jumlah produksi tanaman buah	Batang	29000		821.414.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Revitalisasi kebun benih hortikultura	Unit	1		150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					150.000.000		
						Jumlah kebun benih hortikultura yang direvitalisasi	Unit	1		150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Revitalisasi kebun benih tanaman pangan	Unit	1		200.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kebun benih tanaman pangan yang direvitalisasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3.1	16.250.000.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					16.250.000.000		
						Fasilitas sarana penanaman dan intensifikasi tebu	Ha	300	590.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				590.000.000		
						Bantuan pupuk anorganik yang diberikan	Ton	30	590.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Fasilitas sarana produksi pengembangan tanaman kelapa	Ha	30	275.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				275.000.000		
						Benih kelapa yang diberikan	Batang	2500	275.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
						Fasilitas sarana produksi pengembangan tanaman kopi	Ha	60	400.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				400.000.000		
						Benih kopi arabika yang diberikan	Batang	0		SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih kopi yang diberikan	Batang	35000	400.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Fasilitas sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya	Ha	38	200.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				200.000.000		
						Jumlah benih cengkeh yang diberikan	Batang	1000	29.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih kakao yang diberikan	Batang	5000	44.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih lada yang diberikan	Batang	5000	33.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih pala yang diberikan	Batang	1000	29.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih teh yang diberikan	Batang	12000	65.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Fasilitas sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya	Ha	30	175.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				175.000.000		
						Benih jambu mete yang diberikan	Batang	2500	75.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
						Benih karet yang diberikan	Batang	3000	100.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
						Fasilitas sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya	Ha	9	14.610.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.610.000.000		
						Benih nilam yang diberikan	Batang	0		SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Benih vanili yang diberikan	Batang	1500	60.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Pupuk anorganik yang diberikan	Ton	0	14.500.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Pupuk organik yang diberikan	Ton	7	50.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2.9	2.100.000.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.100.000.000		
						Pengembangan Jagung dan sereal	Ha	800	742.000.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				742.000.000		
						Benih jagung dan sereal yang diberikan	Kg	800	742.000.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
						Pengembangan kedelai	Ha	600	816.000.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				816.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Benih kedelai yang diberikan	Kg	600		816.000.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
						Pengembangan Padi	Ha	2000		542.000.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					542.000.000		
						Benih padi yang diberikan	Kg	2000		542.000.000	SEKSI PADI	
						Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100		130.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						130.000.000		
						Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota	35		130.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					130.000.000		
						Koordinasi pelaksanaan kegiatan pupuk subsidi	Kali	1		30.600.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Pembinaan/monitoring/evaluasi penyaluran pupuk subsidi	Kabupaten/Kota	35		99.400.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							5.960.000.000		
						Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	18.88		5.960.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Penataan Prasarana Pertanian						5.960.000.000		
						Irigasi Perpipaan/perpompaan/springkel	Unit	0		5.000.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.09			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					5.000.000.000		
						Sarana irigasi	Unit	0		5.000.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Unit	8		960.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.01			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					960.000.000		
						Luas lahan yang terairi jaringan irigasi tersier	Ha	200		960.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Sarana irigasi	Unit	0			SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Persentase produk tembakau yang diserap pasar	%	100			Bidang Perkebunan	
				Penataan Prasarana Pertanian								
						Persentase hasil uji kadar nikotin rendah	%	0.23			SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.03.1.01.01			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian							
						Jumlah lokasi pengujian kadar nikotin	Lokasi	0			SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Persentase petani tembakau yang mendapatkan bimtek diversifikasi produk tembakau	%	0.17			SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.03.1.01.01			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian							
						Jumlah petani yang mendapatkan bimtek diversifikasi produk tembakau	Orang	0			SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							6.014.991.000		
						Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	2.1		6.014.991.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						6.014.991.000		
						Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Unit	27		325.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					325.000.000		
						Gerakan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Unit	27		325.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Unit	30		425.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					425.000.000		
						Gerakan pengendali OPT Tanaman Pangan	Unit	30		425.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Unit	24		4.864.991.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					4.864.991.000		
						Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	Unit	24		4.864.991.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Perbanyak Agens pengendali hayati dan pestisida nabati	Kg	1250		400.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					400.000.000		
						Perbanyak Agens pengendali hayati dan pestisida nabati	Kg	1250		400.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										140.075.566.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64			Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									751.200.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76.2		751.200.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							751.200.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		751.200.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						751.200.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	8		751.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					501.200.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	6		501.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	2		250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									139.324.366.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	64		139.324.366.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							139.324.366.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100		6.064.900.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		117.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.800.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	40.800.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1			
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0			
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0			
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	46.400.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					544.100.000		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	544.100.000		
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1			
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				544.100.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	544.100.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					334.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	334.600.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000		
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12	135.200.000		
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				194.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	194.400.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.029.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	5.029.000.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				114.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.315.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	4.315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.151.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					135.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						685.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		685.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					500.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		585.000.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					102.500.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		102.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.500.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				155.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		107.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					57.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		7.775.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						175.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		44.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		15.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.000.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						320.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					215.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		215.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.275.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		6.275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.720.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		5.720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	11.482.587.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					600.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	410.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.347.587.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	10.347.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.247.587.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	0	10.247.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		%	100	5.615.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang miik daerah		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
					Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah		Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Dokumen	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.000.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	4.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	4.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.110.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		995.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1			SUB BAGIAN TATA USAHA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					385.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	385.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	105.655.879.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					101.665.158.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	101.665.158.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				98.118.158.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	98.118.158.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.547.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.547.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000	
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000	
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.000.000	
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					25.000.000	
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	50		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						650.221.000	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		650.221.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.000.000	
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.221.000	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		20.221.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					25.000.000	
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					50.000.000	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					500.000.000	
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						582.500.000	
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		582.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					550.000.000	
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1		550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	22.500.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.675.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.675.600.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	900.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	50.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	705.600.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					957.400.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	957.400.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				582.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	582.400.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	75.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JUMLAH									232.590.857.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									54.762.060.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Nilai kepuasan masyarakat	%	90.11		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								985.415.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80.5	985.415.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						985.415.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	985.415.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					985.415.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	27	985.415.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				562.850.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	562.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				422.565.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	18	422.565.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								53.776.645.000		
						Nilai kepuasan masyarakat	%	90.11	53.776.645.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.776.645.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	765.380.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					255.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	255.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	6.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.100.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	124.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				22.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	5	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					313.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	313.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.100.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	108.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.600.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	56.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.417.556.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.161.456.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	34.161.456.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33.496.156.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	33.496.156.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				389.340.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	389.340.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				80.260.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	80.260.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				47.700.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	47.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				148.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	12	148.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					360.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				335.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	335.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					249.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	249.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				110.350.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	110.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				109.450.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	109.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				30.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	10	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.944.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.944.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	104.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			24.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			300.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			22.500.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	22.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			73.000.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	73.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu			110.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			935.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	935.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			250.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				230.000.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.000.000			
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel			30.000.000			
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	5	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000			
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.532.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		2.532.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					40.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					560.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.920.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1.920.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						939.800.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		939.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					185.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					234.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		234.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					335.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		335.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		756.093.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						216.122.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		216.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.120.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	8.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.302.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	14.302.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				10.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	10.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					23.900.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	23.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.900.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	23.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.091.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	381.091.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				289.491.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	289.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.573.480.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					191.728.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	191.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.728.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	108.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					761.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	761.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				761.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	761.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					393.272.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	393.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				390.072.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	390.072.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	827.580.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					259.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	259.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	113.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					378.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	378.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.500.000		
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	132.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		%	100	1.468.880.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN		Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.300.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Dokumen	1	278.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.500.000		
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor		Unit	5	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
					Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor		Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah		Bulan	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.000.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor		Bulan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	108.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					82.100.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	82.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				82.100.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	82.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	421.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				328.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	328.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					630.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	630.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				570.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	570.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	792.033.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.863.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	254.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.075.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.318.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	7	80.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	10.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				7.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	7.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.020.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	91.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					345.440.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	345.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	65.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.840.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	275.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.250.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	134.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.500.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	87.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	24.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	838.305.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					211.575.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	211.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.330.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.077.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	30.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	13.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.600.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.468.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					105.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.500.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2		18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		419.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					331.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		331.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.250.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		131.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					33.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					70.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		927.950.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						214.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		214.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.720.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	34		11.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10		11.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		14.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					7.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					6.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						149.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					149.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6		149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						438.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		438.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		1.234.010.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					377.600.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		377.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				172.600.000		
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5		148.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
					Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10		24.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.000.000		
					Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		111.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					271.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	271.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
									10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				261.500.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	261.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					409.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	409.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				316.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	316.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.930.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	117.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.930.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	929.948.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.450.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	214.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	18.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.640.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	38.640.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.500.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.840.000			
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.840.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				7.680.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	7.680.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				107.790.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	107.790.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					187.518.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	187.518.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				187.518.000			
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	20	187.518.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					342.000.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	342.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	82.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				251.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	251.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.500.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	128.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.100.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	49.100.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.265.100.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					361.840.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	361.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				142.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	13	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	17.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.040.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	47.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					162.780.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	162.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				162.780.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	10	162.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	446.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				123.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				315.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	237.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.262.130.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					213.050.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	213.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		29.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					2.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						257.900.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		257.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					32.900.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	8		32.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					225.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	4		225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						339.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		339.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.800.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					255.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						393.900.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		393.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					323.100.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		323.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					23.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		23.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	718.200.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.480.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					187.720.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	187.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.760.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	26.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	79.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					372.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	372.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan									32.923.368.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Konsumsi listrik per kapita	KWh/Kapita	921.69		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi								14.496.403.000		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15.96	14.496.403.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						14.496.403.000		
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	123938	5.797.371.000		
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					5.797.371.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT	SBM	3717	5.797.371.000		
		3.29.05.1.04.01			Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi				1.504.256.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi	%	28.02	1.445.935.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi	Kali	2	58.321.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				4.293.115.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT	Unit	28	4.293.115.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	1738	634.540.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					634.540.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria	SBM	312	634.540.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				634.540.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	9	634.540.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	505		652.385.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						652.385.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan	SBM	312		652.385.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					652.385.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	9		652.385.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	1836		1.089.825.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						1.089.825.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi	SBM	312		1.089.825.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					1.089.825.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Merapi	Unit	23		1.089.825.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	20288		309.785.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						309.785.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak	SBM	138		309.785.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					309.785.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	8		309.785.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	739		676.720.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						676.720.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan	SBM	68		676.720.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					676.720.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	9		676.720.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	718.8		775.360.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						775.360.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah	SBM	104		775.360.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					775.360.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	8		775.360.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	803.7		820.640.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						820.640.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara	SBM	475		820.640.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					820.640.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	26		820.640.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	407		494.995.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						494.995.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu	SBM	347		494.995.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					494.995.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	7		494.995.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	95701		1.073.852.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						1.073.852.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan	SBM	208		1.073.852.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					1.073.852.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	16		1.073.852.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	408		661.095.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						661.095.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara	SBM	208		661.095.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					661.095.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	12		661.095.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	332		692.965.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						692.965.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo	SBM	208		692.965.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					692.965.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Solo	Unit	21		692.965.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	462.07		816.870.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						816.870.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	451		816.870.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					816.870.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	50		816.870.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat									18.426.965.000		
						Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1		18.426.965.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							18.426.965.000		
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	37.13		978.570.000		
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						978.570.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2)	%	73.11		978.570.000		
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					978.570.000		
						Jumlah pembinaan usaha ketenagalistrikan	Paket	1		149.990.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan	Paket	4		828.580.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2.53		1.032.245.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						138.920.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	7.98		138.920.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				57.750.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	80		57.750.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				81.170.000			
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	80		81.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					893.325.000			
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria	%	100		893.325.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				25.500.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1		25.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				867.825.000			
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	850		867.825.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	4,8		1.759.305.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					94.160.000			
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	3,19		94.160.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				54.160.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	20		54.160.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				40.000.000			
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	85		40.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.665.145.000			
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan	%	100		1.665.145.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				48.000.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1		48.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.617.145.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	1600		1.617.145.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	3.73		1.760.860.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						130.485.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	7.18		130.485.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					74.865.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Merapi	Dokumen	55		74.865.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					55.620.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	Lokasi	50		55.620.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						1.630.375.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi	%	100		1.630.375.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					45.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Merapi	Dokumen	1		45.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					1.585.375.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi	RT/KK	1500		1.585.375.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1.82		817.065.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						181.920.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	11.17		181.920.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					113.320.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	Dokumen	80		113.320.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					68.600.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	60		68.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						635.145.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak	%	100		635.145.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				18.000.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1		18.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				617.145.000			
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	600		617.145.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	4.15		1.643.050.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					54.450.000			
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	2.87		54.450.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				27.000.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	18		27.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				27.450.000			
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	35		27.450.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.588.600.000			
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan	%	100		1.588.600.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.000.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1		45.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.543.600.000			
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	1500		1.543.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2.73		1.281.220.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					104.000.000			
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	3.19		104.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				30.000.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	25		30.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				74.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	50	74.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.177.220.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah	%	100	1.177.220.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				33.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.144.220.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	1100	1.144.220.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	1.95	1.925.220.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					130.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	6.39	130.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	Dokumen	50	50.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				80.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	100	80.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.795.220.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara	%	100	1.795.220.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				51.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	51.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.744.220.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	1700	1.744.220.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1.82	969.265.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					128.040.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	4.79	128.040.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				62.910.000		

					Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	40		62.910.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				65.130.000		
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	36		65.130.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					841.225.000		
					Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu	%	100		841.225.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				24.000.000		
					Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1		24.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				817.225.000		
					Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	800		817.225.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
					Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	5.01		2.239.175.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					161.950.000		
					Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	4.79		161.950.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				75.000.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	50		75.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				86.950.000		
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	65		86.950.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					2.077.225.000		
					Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan	%	100		2.077.225.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				60.000.000		
					Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1		60.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.017.225.000		
					Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	2000		2.017.225.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
					Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	5.06		2.265.105.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					187.930.000		
					Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	6.39		187.930.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				75.000.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	Dokumen	50		75.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				112.930.000			
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	65		112.930.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					2.077.175.000			
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara	%	100		2.077.175.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				60.000.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1		60.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.017.175.000			
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	2000		2.017.175.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1.92		967.025.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					125.100.000			
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	6.39		125.100.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				58.000.000			
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo	Dokumen	40		58.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				67.100.000			
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo	Lokasi	51		67.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					841.925.000			
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo	%	100		841.925.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				24.000.000			
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Solo	Dokumen	1		24.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				817.925.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo	RT/KK	800		817.925.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.62		788.860.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						176.660.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8.78		176.660.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					83.450.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	65		83.450.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					93.210.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	75		93.210.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						612.200.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100		612.200.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					16.500.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1		16.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					595.700.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	550		595.700.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan										11.532.682.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.1			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah									7.356.553.000		
						Indeks Ketersediaan Air tanah	Angka	2.99		7.356.553.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							7.356.553.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100		734.940.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						734.940.000		
						Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah	%	100		734.940.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.02.01			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah					734.940.000		
						Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah	Dokumen	1716		701.940.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi	Eks	1188	33.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah	%	55.76	4.404.425.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					4.404.425.000		
						Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah	%	16	4.404.425.000		
		3.29.02.1.01.02			Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						
						Jumlah Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi pada CAT di Jawa Tengah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.02.1.01.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				4.404.425.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah	Unit	92	4.404.425.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12.6	166.120.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					65.680.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	100	65.680.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				65.680.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	60	65.680.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.440.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria	%	100	100.440.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				100.440.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	96	100.440.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0.61	130.005.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					38.460.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	100	38.460.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				38.460.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	24	38.460.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					91.545.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan	%	100	91.545.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				91.545.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	40	91.545.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5.36	153.575.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					64.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi	%	100	64.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				64.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi	Dokumen	50	64.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					89.575.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi	%	100	89.575.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				89.575.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi	Lokasi	50	89.575.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14.81	243.245.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					150.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				150.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	120	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					93.245.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak	%	100	93.245.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				93.245.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	61	93.245.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1.17	130.225.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					30.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	100	30.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				30.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	24	30.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.225.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan	%	100	100.225.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				100.225.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	50	100.225.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0.25		130.655.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						36.170.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	100		36.170.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah					36.170.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	35		36.170.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						94.485.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah	%	100		94.485.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					94.485.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	33		94.485.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2.91		249.810.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						87.900.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100		87.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah					87.900.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	60		87.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						161.910.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara	%	100		161.910.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					161.910.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	50		161.910.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3.31		205.298.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						73.950.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	100		73.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah					73.950.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	50		73.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						131.348.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu	%	100		131.348.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					131.348.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	92		131.348.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1.1	149.325.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					70.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	100	70.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				70.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	46	70.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					79.325.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan	%	100	79.325.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				79.325.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	72	79.325.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0.97	198.125.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					67.825.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	67.825.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				67.825.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	50	67.825.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					130.300.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara	%	100	130.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				130.300.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	51	130.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4.2	199.805.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					73.800.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo	%	100	73.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				73.800.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo	Dokumen	70	73.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					126.005.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo	%	100	126.005.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				126.005.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo	Lokasi	71	126.005.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURABAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8.47	261.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					120.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				120.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	85	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					141.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	141.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				141.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	80	141.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								4.176.129.000		
						Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Melaksanakan Good Mining Practice (GMP)	%	67	4.176.129.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						4.176.129.000		
						Persentase Good Mining Practice	%	90.7	2.176.591.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					1.435.836.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan	M3/Ha	27796	1.435.836.000		
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1.435.836.000		
						Jumlah paket pembinaan pertambangan minerba	Paket	8	1.435.836.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					740.755.000		
						Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	35	740.755.000		
		3.29.03.1.07.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				740.755.000		
						Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	4	740.755.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria	%	4.23	112.660.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					112.660.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	M3/Ha	580.02	112.660.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.340.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	20	29.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				83.320.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	60	83.320.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	11.55	216.790.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					216.790.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	M3/Ha	19395.26	216.790.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				64.250.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	34	64.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				152.540.000		

					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	75		152.540.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	13.24		211.659.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					211.659.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	M3/Ha	1513.91		211.659.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					102.200.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Dokumen	55		102.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.03.1.03.04		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					109.459.000		
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Lokasi	50		109.459.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
					Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak	%	4.79		153.340.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					153.340.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	M3/Ha	705.79		153.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					92.950.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	55		92.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.03.1.03.04		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					60.390.000		

					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	45		60.390.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
					Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	4.51		117.020.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					117.020.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	M3/Ha	440.78		117.020.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				23.340.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	10		23.340.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				93.680.000		
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	30		93.680.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3.94		97.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					97.300.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	M3/Ha	362.54		97.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				37.260.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	15		37.260.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut				60.040.000		

					sampai dengan 12 Mil Laut						
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	25	60.040.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	6.48	179.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
					Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				179.560.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	M3/Ha	1187.04	179.560.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				72.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	40	72.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				107.560.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	48	107.560.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	5.63	80.742.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
					Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				80.742.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	M3/Ha	987.73	80.742.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.155.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	15	29.155.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				51.587.000		

					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	20	51.587.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
					Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	14.37	187.350.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				187.350.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	M3/Ha	1031.62	187.350.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			76.090.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	33	76.090.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			111.260.000		
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	46	111.260.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
					Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	12.11	233.782.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				233.782.000		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	M3/Ha	275.91	233.782.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			95.956.000		
					Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	50	95.956.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			137.826.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	95	137.826.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	6.76	136.020.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
						Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			136.020.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	M3/Ha	171.52	136.020.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			76.400.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Dokumen	55	76.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.04				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			59.620.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Lokasi	30	59.620.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	3.1	89.815.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
						Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			89.815.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	M3/Ha	1144.14	89.815.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			39.920.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	15	39.920.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.03.1.03.04				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut			49.895.000		

				sampai dengan 12 Mil Laut							
					Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	21		49.895.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
					Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100		183.500.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					183.500.000		
					Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral	%	100		183.500.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.03.01		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					183.500.000		
					Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan serta analisa kimia tanah dan batuan	Dokumen	241		183.500.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									99.218.110.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah									21.379.595.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	34.33		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri								21.379.595.000		
						Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5.65	21.379.595.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						20.057.133.000		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.35	1.594.760.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.594.760.000		
						Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan	Orang	162	1.039.760.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.039.760.000		
						Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan	Industri Kecil	72	108.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan	Orang	90	931.260.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	220	555.000.000	SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				555.000.000		
						Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce	Orang	30	72.500.000	SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan dan magang industri kreatif digital	Orang	190	482.500.000	SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3.17	1.948.690.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.948.690.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	180	256.810.000	SEKSI PENERAPAN DAN REKAYASA	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				256.810.000		
						Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan	Orang	180	256.810.000	SEKSI PENERAPAN DAN REKAYASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Orang	145	1.691.880.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.691.880.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilayani	Orang	145	1.691.880.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	6	7.689.500.000	Bidang Industri Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					7.689.500.000		
						Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	0	6.700.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		3.31.02.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
						Jumlah fasilitasi pembentukan KIHT	Kegiatan	0			SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah fasilitasi pendukung pembentukan KIHT	Unit	0			SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4.260.000.000			
						Jumlah Pelaku IKM industri agro binaan	Orang	157		3.035.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penyediaan/pemeliharaan fasilitasi peralatan uji laboratorium	Unit	29		1.125.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah verifikasi/registrasi dan pengawasan mesin	Unit	35		100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.440.000.000			
						Jumlah pendampingan kemitraan	Kegiatan	4		540.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Orang	540		1.900.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih	Orang	1370		989.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				989.500.000			
						Jumlah peserta Bintek	Orang	180		487.400.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan	Unit	0			SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Yang Difasilitasi Peningkatan Kapabilitas SDM Industri Agro	Orang	140		502.100.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3		4.383.234.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.383.234.000			
						Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri	Kegiatan	1		123.490.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				123.490.000			
						Jumlah informasi industri Non Agro yg tersedia	Dokumen	1		123.490.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	45		2.462.627.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2.042.672.000			
						Jumlah industri non agro binaan	Unit	34		2.042.672.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.02.1.01.05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				419.955.000			
						Jumlah fasilitasi industri non agro	Kegiatan	9		419.955.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih	Orang	538		1.797.117.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.797.117.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan	Orang	0			SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM industri	Orang	538	1.797.117.000		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	4.440.949.000		Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.440.949.000			
						Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi	Orang	50	2.231.449.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.231.449.000			
						Jumlah peserta yang dilatih pelatihan alas kaki	Orang	500	2.171.449.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang disalurkan pelatihan alas kaki	Orang	375	60.000.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi	Orang	75	2.209.500.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.209.500.000			
						Jumlah peserta yang dilatih Pelatihan Produk Tekstil	Orang	900	2.137.500.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang disalurkan Pelatihan Produk Tekstil	Orang	675	72.000.000		SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						1.322.462.000			
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	565.200.000		Bidang Industri Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					565.200.000			
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS	Unit	2	565.200.000		SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.01			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				565.200.000			
						Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan data industri agro	Kegiatan	2	565.200.000		SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	757.262.000		Bidang Industri Non Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					757.262.000			
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	25	757.262.000		SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.01			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				757.262.000			
						Jumlah industri non agro binaan	Unit	320	757.262.000		SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah									42.111.244.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	13.18			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan								42.111.244.000			
						Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5.9	42.111.244.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						70.000.000			
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	70.000.000		Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					70.000.000			
						Persentase kenaikan penerbitan SKA dan Pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB)	%	3	70.000.000		SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				70.000.000			
						Jumlah perusahaan pengguna layanan IPSKA yang terverifikasi	Unit	40	70.000.000		SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.309.004.000			
						Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0.21	2.309.004.000		Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					2.309.004.000			
						Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB	%	16	1.738.609.000		SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.02			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1.738.609.000			
						Jumlah Kemitraan UDKM dan UMB	Kegiatan	2	644.620.000		SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat Revitalisasi yang Dilatih	Orang	600	1.093.989.000		SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi transaksi	%	10	570.395.000		SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.03.1.01.03			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				570.395.000			
						Jumlah Pelaku Pasar lelang Komoditas yang bertransaksi	Orang	12	570.395.000		SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						31.044.648.000			
						Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	11.5	31.044.648.000		Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					30.805.596.000			
						Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas	Unit	108	30.805.596.000		SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.01			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				30.805.596.000			

					Jumlah informasi harga kepokmas	Komoditi	25		30.805.596.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					239.052.000		
					Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	%	14.29		239.052.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.03			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				239.052.000		
					Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi	Unit	50		239.052.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						4.200.663.000		
					Nilai ekspor non migas	Juta US\$	7430		4.200.663.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					4.200.663.000		
					Jumlah binaan yang melakukan ekspor	Orang	15		1.420.497.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.05.1.01.05			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				1.420.497.000		
					Jumlah peserta Pelatihan Eskpor Impor	Orang	375		1.420.497.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
					Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	4		523.005.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
		3.30.05.1.01.05			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				523.005.000		
					Jumlah Informasi Ekspor Impor Neraca perdagangan dan Peluang Pasar	Dokumen	2		323.285.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah peserta forum Peluang Pasar Ekspor	Orang	150		199.720.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	2		2.257.161.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.01			Pameran Dagang Internasional/Nasional				329.203.000		
					Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi luar negeri	Orang	4		329.203.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.03			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				1.729.753.000		
					Jumlah event promosi (offline/ online)	Kegiatan	2		1.729.753.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.04			Peningkatan Citra Produk Ekspor				198.205.000		
					Jumlah Komoditi Potensi Ekspor yang ditingkatkan citra produknya	Komoditi	3		198.205.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						3.867.059.000		
					Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	3		1.981.684.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					573.698.000		
					Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen	%	300		573.698.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				573.698.000		
					Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen	Orang	600		573.698.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					923.656.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri	Industri Kecil Menengah	53		923.656.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi					923.656.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI	Orang	53		923.656.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						484.330.000		
						Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	Kali	75		484.330.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.01			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen					484.330.000		
						Jumlah barang beredar yang diawasi	Buah	350		235.460.000	SEKSI TERTIB NIAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit	150		248.870.000	SEKSI TERTIB NIAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4		885.327.000		
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						885.327.000		
						Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	%	10		756.067.000		
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi					544.967.000		
						Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang	Kegiatan	1		544.967.000		
		3.30.06.1.02.04			Pengembangan Layanan Kalibrasi					211.100.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi	Sertifikat	800		211.100.000		
						Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan	%	10		129.260.000		
		3.30.06.1.02.02			Pengembangan Layanan Pengujian					129.260.000		
						Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang	Sertifikat	55		129.260.000		
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5		1.000.048.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1.000.048.000		
						Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	%	5		170.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.01			Verifikasi Mutu Produk							
						Jumlah pendampingan dan uji produk	Sertifikat	0			SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.04			Pengembangan Layanan Kalibrasi					170.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi	Lembar	935		170.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
						Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan	%	5		830.048.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.02			Pengembangan Layanan Pengujian					230.000.000		
						Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta	Sertifikat	1700		230.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi					600.048.000		
						Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta	Kegiatan	1		600.048.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							619.870.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	10		619.870.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						619.870.000		
						Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi	Orang	22		619.870.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.01.01			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					619.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah						Jumlah partisipasi promosi	Kali	12	619.870.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
									57.113.409.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Nilai Kepuasan masyarakat	Skor	88		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							950.037.000		
						Nilai SAKIP PD	Skor	86.5	950.037.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					950.037.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	950.037.000	SEKRETARIAT	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				950.037.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	14	950.037.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			577.460.000		
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	8	577.460.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			372.577.000			
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	6	372.577.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah							56.163.372.000			
					Nilai Kepuasan masyarakat	Skor	90	56.163.372.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					56.163.372.000			
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.549.560.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				65.200.000			
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	65.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			65.200.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	65.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				42.000.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			42.000.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				559.660.000			
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9	559.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.000.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.000.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
					Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22.200.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Unit	4		22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.960.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		3.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					316.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	3		316.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					126.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						93.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6		93.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	20		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					20.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	2		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					24.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3		24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					27.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5		27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						662.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4		662.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					210.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					373.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		373.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.127.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	1.127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				825.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.311.800.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.360.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	78.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				78.360.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	78.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					568.030.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9	568.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	7	42.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				143.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	143.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.005.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	35.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.300.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.775.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				90.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	80	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					153.400.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	153.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	44	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.400.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	18.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.080.480.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	1.080.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		355.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					722.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		722.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.396.530.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7		1.396.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					16.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		16.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					317.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		317.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					801.530.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3		801.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					77.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12		77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					93.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		93.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100		2.352.140.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						88.920.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		88.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					88.920.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		88.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	8		379.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				155.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	107.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	9	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.960.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	27.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					149.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				70.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	28	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.500.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	19	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.091.020.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		1.091.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.020.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				734.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	734.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					608.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	608.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				158.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	158.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.018.190.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					417.210.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	10	417.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	12	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.960.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				45.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	20	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					239.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	239.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	7	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	6	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				73.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	15	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					683.900.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	683.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				473.900.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	473.900.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					552.000.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	9	552.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	25.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	32.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	75.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	50.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.000.000			
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	180.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.644.350.000		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.320.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	81.320.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				81.320.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		81.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						435.560.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9		435.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	2		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					68.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					27.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.480.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		3.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					152.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	20		152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					78.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		78.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.600.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	5		230.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					85.100.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	7		85.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					55.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	3		55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					66.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	12		66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					24.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					513.700.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	513.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.900.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	145.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				358.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	358.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355.670.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	355.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	50.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.070.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	96.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	28.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				121.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	44.287.332.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.087.332.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	8	36.087.332.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.028.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	35.028.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				905.202.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	905.202.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				60.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	2	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				44.130.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	44.130.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					120.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.057.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	3	1.057.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.022.000.000		
						Jumlah orang yang mendapat sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	1200	1.022.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.323.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	10		1.323.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					179.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		115.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5		64.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	Unit	12		2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					105.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					33.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		33.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					25.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					812.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		812.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		15.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	4		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						374.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6		374.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					300.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					40.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	19		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					34.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.752.120.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	3.752.120.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.540.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.540.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.187.120.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.187.120.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.523.400.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	8	1.523.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				260.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				613.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	313.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				184.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	184.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
JUMLAH									120.604.248.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									200.672.868.000			
						Nilai IKM Setda	Angka	78.5				
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.97				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								250.000.000		
						Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100		250.000.000		
			4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						250.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100		250.000.000		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		
						Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Dokumen	6		250.000.000		
			4.01.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		
					Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	Dokumen	8		150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		4.01.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000			
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	Dokumen	4		100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								200.422.868.000			
						Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	Angka	78.5		370.006.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						370.006.000			
					Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100		370.006.000			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					370.006.000			
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen	2		370.006.000			
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				319.000.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12		319.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				51.006.000			
					Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12		51.006.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
					Nilai IKM Biro Hukum	Angka	78.5		601.707.000			
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						601.707.000			
					Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100		601.707.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					350.000.000			
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		350.000.000			
		4.01.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000			
					Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	Laporan	12		350.000.000			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					251.707.000			
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Dokumen	2		251.707.000			
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.707.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Hukum	Bulan	12	31.707.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Angka	78.5	1.219.439.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						1.219.439.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	1.219.439.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					800.000.000		
						Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai	Orang	8000	800.000.000		
		4.01.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				800.000.000		
						Jumlah Laporan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Laporan	1	800.000.000		OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					419.439.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Laporan	4	419.439.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				377.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	206.180.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro ISDA	Bulan	12	171.600.000		OPD Provinsi
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				41.659.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	23.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro ISDA	Bulan	12	18.659.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Angka	78.5	540.259.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						540.259.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	540.259.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					540.259.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	540.259.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.259.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	400.259.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	140.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Organisasi	Angka	78.5	494.300.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						494.300.000		
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	185.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					185.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	185.000.000		
		4.01.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				142.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	142.000.000		
		4.01.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	35	43.000.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	309.300.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.300.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	4	309.300.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	Bulan	12	75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	Bulan	12	174.300.000		
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	Bulan	12	20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Organisasi	Bulan	12	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Pemotdaker	Angka	78.5	511.076.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						511.076.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	511.076.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					511.076.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	Dokumen	4	511.076.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				455.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	160.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemotdaker	Bulan	12	295.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				56.076.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	8.076.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemotdaker	Bulan	12	48.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Angka	78.5	371.731.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						371.731.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	371.731.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					371.731.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	371.731.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				336.498.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	336.498.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.233.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	35.233.000		OPD Provinsi
						Nilai IKM Biro Perekonomian	Angka	78.5	294.980.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						294.980.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	294.980.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.980.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Laporan	2	294.980.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				259.980.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	259.980.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	Bulan	12	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Layanan Biro Umum	Angka	78.5	196.019.370.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						196.019.370.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	20.366.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					71.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Laporan	12	71.000.000		
		4.01.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	36.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				35.000.000		
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	4	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									18.850.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	18.550.000.000		
		4.01.01.1.13.02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				15.750.000.000		
						Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	Dokumen	12	15.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.13.03			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				2.800.000.000		
						Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	Laporan	12	2.800.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan	Laporan	12	300.000.000		
		4.01.01.1.13.01			Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000		
						Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Keprotokolan					1.445.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Laporan	12	1.445.000.000		
		4.01.01.1.14.01			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1.345.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	1.345.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14.02			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	Bulan	12	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14.03			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				20.000.000		
						Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	Bulan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100		146.862.157.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						98.886.007.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12		98.886.007.000		
		4.01.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					97.503.798.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		97.503.798.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					307.209.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12		307.209.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					75.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	Laporan	12		75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						577.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12		577.500.000		
		4.01.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					375.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		375.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					202.500.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	12		202.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12		20.000.000		
		4.01.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12		20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.564.749.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	Laporan	12		7.564.749.000		
		4.01.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					402.437.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		402.437.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					500.718.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12		200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12		300.718.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					425.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					120.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					225.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	4.400.000.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.491.594.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	Bulan	12	1.491.594.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.860.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	5.860.000.000		
		4.01.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				300.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.560.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	5.560.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	12			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Laporan	12	30.000.000		
		4.01.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.138.908.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	8.138.908.000		
		4.01.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.875.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1.875.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				62.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	62.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	1.250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.288.908.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	4.288.908.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				412.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	412.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					25.784.993.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	Laporan	12	25.784.993.000		
		4.01.01.1.11.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				241.829.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	Bulan	12	241.829.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.04			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25.543.164.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH	Bulan	12	25.543.164.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	28.791.213.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	25.000.000		
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	Bulan	12	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.756.213.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	22.756.213.000		
		4.01.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	6.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				831.213.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	831.213.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.725.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	15.225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	2	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Kegiatan	3	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	Laporan	12	210.000.000		
		4.01.01.1.11.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	Unit	15	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	Unit	15	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.03			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	Bulan	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	Bulan	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					5.800.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Laporan	12	2.950.000.000		
		4.01.01.1.12.01			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	Bulan	12	2.950.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	12	1.100.000.000		
		4.01.01.1.12.03			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.100.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	12	1.100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Laporan	12		1.750.000.000		
		4.01.01.1.12.02			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1.750.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	Bulan	12		1.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah										461.170.824.000		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85				
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80				
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									16.620.969.000		
						Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89		2.683.000.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							2.683.000.000		
						Capaian Pelaksanaan APBD	%	98.5		637.500.000		
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					637.500.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	3		402.000.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					402.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4		402.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	3		235.500.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					235.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4		235.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Capaian Pelaksanaan APBN	%	95.5		390.000.000		
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					390.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	2		390.000.000		
		4.01.08.1.01.02			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					390.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4		390.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85		696.000.000		
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					696.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4		200.000.000		
		4.01.08.1.02.01			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah					200.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4		200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	90	496.000.000		
		4.01.08.1.02.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				496.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	496.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	859.500.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					859.500.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	288.400.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				288.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	288.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	288.950.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				288.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	288.950.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	282.150.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				282.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	282.150.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					100.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan	4	100.000.000		
		4.01.08.1.02.03			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	3.578.269.000		
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.578.269.000		
						Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	920.000.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					920.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	920.000.000		
		4.01.07.1.02.01			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				290.000.000		
						Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	12	290.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.02			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				450.000.000		
						Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	Laporan	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.03			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				180.000.000		
						Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	1.934.527.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.934.527.000		
						Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	5	1.934.527.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.07.1.01.01			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				400.000.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan SHB	Laporan	2	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.02			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.219.200.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	Laporan	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	2	219.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.03			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				315.327.000		
						Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	Laporan	4	315.327.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	723.742.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					723.742.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	723.742.000		
		4.01.07.1.03.01			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				225.000.000		
						Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.02			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				246.481.000		
						Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	246.481.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.03			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				252.261.000		
						Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	252.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Ketercapaian Laba BUMD	%	75	1.850.000.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN						1.850.000.000		
						Nilai kemandirian BLUD	%	55	100.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					100.000.000		
						Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	Dokumen	2	50.000.000		
		4.01.06.1.03.05			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan				50.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	Laporan	2	50.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	50.000.000		
		4.01.06.1.03.04			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				50.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	Laporan	4	50.000.000		OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	300.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					300.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Dokumen	2	125.000.000		
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				125.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Laporan	2	125.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Dokumen	3	175.000.000		
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Fasilitas Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4		175.000.000		OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85		1.450.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1.450.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2		150.000.000		
		4.01.06.1.03.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan BUMD					150.000.000		
						Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Laporan	2		150.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4		1.300.000.000		
		4.01.06.1.03.01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					1.300.000.000		
						Jumlah Fasilitas Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4		1.300.000.000		OPD Provinsi
						Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90		2.337.500.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							2.337.500.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95		1.045.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						1.045.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	3		415.000.000		
		4.01.04.1.02.02			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					415.000.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Laporan	3		415.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	3		310.000.000		
		4.01.04.1.02.01			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					310.000.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Laporan	3		310.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	3		320.000.000		
		4.01.04.1.02.03			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					320.000.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Laporan	3		320.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95		1.292.500.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						1.292.500.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Dokumen	3		302.500.000		
		4.01.04.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					302.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Laporan	3		302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dokumen	3		687.500.000		
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					687.500.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan	3		687.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi kependudukan	Dokumen	4		302.500.000		
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					302.500.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Laporan	3		302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82		3.916.500.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN							3.916.500.000		
						Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96		900.000.000		
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					900.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	2		500.000.000		
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					500.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4		500.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2		400.000.000		
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					400.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4		400.000.000		
						Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95		611.300.000		
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					611.300.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2		302.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				302.500.000		
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4		302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2		308.800.000		
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				308.800.000		
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4		308.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90		2.405.200.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					2.405.200.000		
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2		252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				252.600.000		
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4		252.600.000		OPD Provinsi
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2		252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				252.600.000		
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4		252.600.000		OPD Provinsi
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	3		1.900.000.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.900.000.000		
					Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2		1.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4		400.000.000		
					Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87.76		391.000.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						391.000.000		
					Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91.42		226.157.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					226.157.000		
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3		226.157.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				226.157.000		
					Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4		226.157.000		
					Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95.92		164.843.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					164.843.000		
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	8		164.843.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				164.843.000		
					Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4		164.843.000		
					Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85.37		1.164.000.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.164.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100		412.000.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						412.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2		412.000.000		
		4.01.02.1.02.04			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					412.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	4		412.000.000		
						Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85.37		355.000.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						355.000.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2		355.000.000		
		4.01.02.1.02.02			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					355.000.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	76		355.000.000		
						Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85.63		397.000.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						397.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2		397.000.000		
		4.01.02.1.02.05			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik					397.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	2		397.000.000		
						Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85.37		700.700.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							700.700.000		
						Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87.8		229.550.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						229.550.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	2		229.550.000		
		4.01.02.1.01.03			Penataan Analisis Jabatan					229.550.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	8		229.550.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80		200.150.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						200.150.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4		200.150.000		
		4.01.02.1.01.02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota					200.150.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4		200.150.000		
						Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34.15		271.000.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						271.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2		271.000.000		
		4.01.02.1.01.01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi					271.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	Laporan	8		271.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah									444.549.855.000		
						Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78		1.195.000.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN							1.195.000.000		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82		480.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					480.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	2		220.000.000	
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					220.000.000	
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	Laporan	4		220.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	2		260.000.000	
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					260.000.000	
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	Laporan	4		260.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77		715.000.000	
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						715.000.000	
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	2		330.000.000	
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					330.000.000	
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	Laporan	4		330.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3		385.000.000	
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					385.000.000	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	4		385.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90		3.336.130.000	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							3.336.130.000	
						Efektivitas kerjasama daerah	%	95		1.201.450.000	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah						1.201.450.000	
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95		571.450.000	
		4.01.03.1.03.01			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah					571.450.000	
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	Laporan	1		310.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	Laporan	14		261.450.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95		250.000.000	
		4.01.03.1.03.02			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta					250.000.000	
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Dokumen	15		250.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95		380.000.000	
		4.01.03.1.03.03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					380.000.000	
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	Laporan	4		125.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Laporan	4		120.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100		135.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90		970.790.000	
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						970.790.000	
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	10		970.790.000	
		4.01.03.1.01.01			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					550.000.000	
						Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	Laporan	4		550.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.03.1.01.02			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan	4		225.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.03			Fasilitasi Penataan Wilayah				195.790.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	Laporan	4		195.790.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95		1.163.890.000	
				Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.163.890.000	
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3		223.890.000	
		4.01.03.1.02.02			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan					223.890.000	
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Laporan	4		223.890.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95		640.000.000	
		4.01.03.1.02.01			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					640.000.000	
						Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	Dokumen	35		640.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100		300.000.000	
		4.01.03.1.02.03			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					300.000.000	
						Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	39		300.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96		1.894.000.000	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							1.894.000.000	
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100		1.149.000.000	
					Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					1.149.000.000	
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12		437.000.000	
		4.01.05.1.01.03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya					437.000.000	
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12		242.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12		195.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12		110.000.000	
		4.01.05.1.01.02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan					110.000.000	
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12		110.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12		602.000.000	
		4.01.05.1.01.01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					602.000.000	
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12		178.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15		424.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100		745.000.000	
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						745.000.000	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12		745.000.000	
		4.01.05.1.01.04			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					745.000.000	
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	95		265.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	100		250.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	100		230.000.000	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	1.290.000.000		
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1.290.000.000		
						Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100	965.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					965.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	965.000.000		
		4.01.05.1.02.01			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				965.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	10	465.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	325.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					325.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	325.000.000		
		4.01.05.1.02.02			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				325.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	135.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	7	190.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	436.834.725.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						436.834.725.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	436.834.725.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					436.834.725.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	3	434.146.850.000		
		4.01.04.1.01.01			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				434.146.850.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Kegiatan	3	434.146.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	3	2.687.875.000		
		4.01.04.1.01.02			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				2.687.875.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	10	1.687.875.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									661.843.692.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah									273.576.087.000	Sekretariat DPRD	
						Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	%	89		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah								273.576.087.000		
						Persentase capaian tingkat Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	%	75	273.576.087.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						273.576.087.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	101.943.230.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					4.136.360.000		
						Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA	Laporan	120	4.136.360.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	
		4.02.02.1.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4.136.360.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyusunan RAPERDA	Laporan	120	4.136.360.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.518.590.000		
						Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	12	1.518.590.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	
		4.02.02.1.02.03		Pembahasan APBD					1.518.590.000		
						Jumlah laporan pembahasan APBD	Laporan	12	1.518.590.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					9.769.350.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	268	9.769.350.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.676.640.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	1.676.640.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.676.640.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	1.676.640.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.676.640.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	1.676.640.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.676.640.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	1.676.640.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi
		4.02.02.1.03.05			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1.676.640.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	1.676.640.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.02.02.1.03.06			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				687.150.000		
					Jumlah laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	2		687.150.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.07			Pengawasan Penggunaan Anggaran				699.000.000		
					Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	26		699.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Peningkatan Kapasitas DPRD					3.440.000.000		
					Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	6		3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.02			Pendalaman Tugas DPRD				3.440.000.000		
					Jumlah laporan Pendalaman Tugas DPRD	Laporan	6		3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					40.324.970.000		
					Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	51		40.324.970.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	
		4.02.02.1.05.01			Kunjungan Kerja dalam Daerah				9.319.200.000		
					Jumlah laporan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan	24		9.319.200.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				275.000.000		
					Jumlah laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	24		275.000.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.05.03			Pelaksanaan Reses				30.730.770.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan reses	Laporan	3		30.730.770.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					252.490.000		
					Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Laporan	16		252.490.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	
		4.02.02.1.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD				252.490.000		
					Jumlah laporan penyusunan kode etik DPRD	Laporan	16		252.490.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Fasilitasi Tugas DPRD					42.501.470.000		
					Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD	Laporan	37		42.501.470.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				42.501.470.000		
					Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan	37		42.501.470.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
					Persentase Layanan Bagian Humas	%	95		171.632.857.000	Bagian Humas	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					91.779.410.000		
					Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas)	Laporan	709		91.779.410.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
		4.02.02.1.04.04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2.000.000.000		
					Jumlah laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	36		2.000.000.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				360.000.000		
					Jumlah laporan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Laporan	12		360.000.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.06			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				47.143.080.000		
					Jumlah laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Laporan	406		47.143.080.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.04.07			Penyusunan Program Kerja DPRD				42.276.330.000		
					Jumlah laporan Penyusunan Program Kerja DPRD	Laporan	255		42.276.330.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					79.853.447.000		
					Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah	Angka	81		79.853.447.000	SUB BAGIAN PUBLIKASI	
		4.02.02.1.07.02			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				79.853.447.000		
					Jumlah media masa yang diajak kerjasama / jumlah website	Angka	81		79.853.447.000	SUB BAGIAN PUBLIKASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah									189.596.906.000	Sekretariat DPRD	
						Nilai kepuasan masyarakat	%	75		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								157.949.191.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69	157.949.191.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI						157.949.191.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	157.949.191.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					815.567.000		
						Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun	Dokumen	13	815.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		4.02.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				515.567.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD	Dokumen	9	515.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	Dokumen	4	300.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.804.148.000		
						Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	48	19.804.148.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
		4.02.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.954.148.000		
						Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Laporan	24	18.954.148.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				850.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD	Laporan	24	850.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					137.329.476.000		
						Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	36	137.329.476.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
		4.02.01.1.15.01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				137.329.476.000		
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Laporan	36	137.329.476.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								31.647.715.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75	31.647.715.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI						31.647.715.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	31.647.715.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.055.674.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD	Bulan	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.055.674.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					543.293.000		
						Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	Orang	60	543.293.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		4.02.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				393.293.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	40		393.293.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	20		50.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.238.879.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Bulan	12		2.238.879.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	
		4.02.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				200.000.000			
						Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	390		200.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.879.000			
						Jumlah orang yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	422		133.879.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				350.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bulan	12		350.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				1.200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Sekretariat DPRD	Bulan	12		1.200.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12		300.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				55.000.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya arsip Sekretariat DPRD	Bulan	12		55.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.704.870.000			
						Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4622		5.704.870.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi
		4.02.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.250.000.000			
						Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Unit	2		3.250.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				394.226.000			
						Jumlah Unit Mebel yang diadakan	Unit	1737		394.226.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				560.644.000			
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	1335		560.644.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000			
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1545		1.500.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.550.117.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		4.02.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	14.550.117.000		SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	
									145.000.000			
		4.02.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	Bulan	12	145.000.000		SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
									2.000.000.000			
		4.02.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2.000.000.000		SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
									2.000.000.000			
		4.02.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	767.582.000		SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
									767.582.000			
		4.02.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	11.637.535.000		SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
									11.637.535.000			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.595.761.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	5.595.761.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				335.000.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	335.000.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.871.286.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan oprasional	Bulan	12	1.871.286.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				51.475.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya mebelair	Bulan	12	51.475.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.338.000.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	1.338.000.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000.000			
						Jumlah bulan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	2.000.000.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.121.000			
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang	120	1.959.121.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.15.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.393.000.000			
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Orang	120	1.393.000.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.15.03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000			
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up DPRD	Orang	120	566.121.000		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									463.172.993.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kontribusi Iptek untuk meningkatkan Daya Saing Daerah									4.440.000.000		
	Implementasi hasil riset dalam pembangunan daerah					Indek Daya Saing Daerah	Nilai	4.2		4.440.000.000	
						Persentase urusan pemerintah daerah yang mengimplementasikan hasil riset	%	20		4.440.000.000	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							4.440.000.000	
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri	%	20		1.540.000.000	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						1.540.000.000	
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20		1.540.000.000	
		5.05.02.1.03.02			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					770.000.000	
						jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	3		770.000.000	
		5.05.02.1.03.04			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					770.000.000	
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	Dokumen	3		770.000.000	
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20		1.210.000.000	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						620.000.000	
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20		620.000.000	
		5.05.02.1.01.02			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					620.000.000	
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pemerintahan umum	Dokumen	3		620.000.000	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						590.000.000	
						persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20		590.000.000	
		5.05.02.1.02.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					590.000.000	
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor sosial budaya	Dokumen	3		590.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	20		1.690.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						1.690.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20		1.690.000.000		
		5.05.02.1.03.07			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					820.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor lingkungan hidup	Dokumen	3		820.000.000		
		5.05.02.1.03.09			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					870.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pekerjaan umum	Dokumen	3		870.000.000		
Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan inovasi daerah										4.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
						Indeks Inovasi Daerah	Nilai	71			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatnya inovasi daerah yang diterapkan									4.500.000.000		
						Persentase inovasi daerah yang diterapkan	%	100		4.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							4.500.000.000		
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	100		2.057.490.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi						2.057.490.000		
						persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi	%	100		2.057.490.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					253.175.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang ekonomi dan industri	Buah	3		253.175.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					244.760.000		
						Jumlahinovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bidang ekonomi industri	Buah	2		244.760.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1.559.555.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang ekonomi industri	Buah	126		1.559.555.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	100		1.621.795.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi						1.621.795.000		
						persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi	%	100		1.621.795.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					337.445.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang Pemsosbud	Buah	4		337.445.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				229.725.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi bidang Pemsosbud	Buah	2	229.725.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				507.200.000		
						Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif bidang Pemsosbud	Kegiatan	49	507.200.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				72.825.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang Pemsosbud	Buah	4	72.825.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.05			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				474.600.000		
						Jumlah Inovasi yang terfasilitasi KI	Buah	100	474.600.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	820.715.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					820.715.000		
						persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi	%	100	820.715.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				355.880.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	2	355.880.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				204.515.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	2	204.515.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				260.320.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	6	260.320.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
Meningkatkan tata kelola organisasi BRIDA									3.700.396.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah								100.000.000		
						Nilai Sakip OPD	Nilai	82	100.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah usulan dokumen perencanaan	Dokumen	2	100.000.000		
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						jumlah usulan dokumen perencanaan	Dokumen	2		100.000.000		
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi BRIDA									3.600.396.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		3.600.396.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.600.396.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA	%	100		3.600.396.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						211.080.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		211.080.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					211.080.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12		211.080.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						78.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		78.500.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					78.500.000		
						Jumlah bulan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12		78.500.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		160.000.000		
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						jumlah unit Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Unit					
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					160.000.000		
						jumlah bulan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12		160.000.000		
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah orang ASN yang melaksanakan Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0				
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah orang ASN yang melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						751.066.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		751.066.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		25.000.000		
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					130.600.000		
						jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12		130.600.000		
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	50.000.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bulan	12	5.000.000		
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						jumlah bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	50.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				370.466.000		
						jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	370.466.000		
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	20.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					769.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	769.000.000		
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				260.000.000		
						jumlah paket pengadaan Mebel	Paket	1	260.000.000		
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				509.000.000		
						jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	15	509.000.000		
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit				
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					975.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	975.000.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	7.500.000		
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				325.800.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	325.800.000		
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	50.000.000		
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				591.700.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	591.700.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					655.750.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	655.750.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dikenai Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	0				
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				187.000.000			
						jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikenai Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	10		187.000.000		
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					20.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		20.000.000		
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	0				
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					35.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12		35.000.000		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					312.500.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12		312.500.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan					
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					101.250.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12		101.250.000		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										37.802.479.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									450.000.000		
						Nilai SAKIP	Nilai	82		450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							450.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		450.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						450.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2		450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					300.000.000		
						Jumlah dokumen Renja PD; Renja Perubahan; RKA; RKAP; DPA; DPPA	Dokumen	1		300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah dokumen LKjIP; Laporan pengendalian, evaluasi triwulanan, Laporan Kinerja.	Dokumen	1		150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									37.352.479.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85		37.352.479.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						37.352.479.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	37.352.479.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.587.260.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	29.587.260.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.835.380.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	28.835.380.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				461.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	461.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				30.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					203.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Laporan	1	203.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				145.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				58.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	4	58.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					580.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				209.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	209.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	60	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				211.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	211.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60.000.000			
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30		60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.617.270.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		1.617.270.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					120.700.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12		120.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					150.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					40.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					84.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		84.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					589.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		589.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					143.570.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		143.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						656.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2		656.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					36.000.000		
						Jumlah paket pengadaan meubelair	Paket	4		36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	3		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya					475.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	11		475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				45.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.839.649.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2.839.649.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				56.430.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	56.430.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.196.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.196.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.387.219.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Bulan	12	1.387.219.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.869.300.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	1.869.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				525.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				340.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud		Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				525.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.300.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	99.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas									12.309.800.000		
					Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		%	90			
	Mewujudkan Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah								12.309.800.000		
					Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor		%	90	900.000.000		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						900.000.000		
					Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor		%	90	900.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					300.000.000		
					Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		%	90	300.000.000		
		5.01.03.1.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				150.000.000		
					Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup pemerintahan yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD		Dokumen	1	150.000.000		
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				150.000.000		
					Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup pembangunan manusia yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD		Dokumen	1	150.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	90		300.000.000		
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup perekonomian yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1		150.000.000		
		5.01.03.1.02.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup SDA yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1		150.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						300.000.000		
						Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	90		300.000.000		
		5.01.03.1.03.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup infrastruktur yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1		150.000.000		
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup kewilayahan yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1		150.000.000		
						Persentase Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	90		11.409.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							5.400.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan	%	90		5.400.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						3.700.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	Dokumen	3		3.700.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.06			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi					3.700.000.000		
						Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Dokumen	2		3.100.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Dokumen	1		600.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						625.000.000		
						Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	1		625.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.01.02.1.02.01			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				475.000.000		
						Jumlah laporan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan yang disusun	Laporan	1	475.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.04			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				150.000.000		
						Jumlah buku profil pembangunan daerah yang disusun	Buku	1	150.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.075.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	Dokumen	1	1.075.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				825.000.000		
						Jumlah laporan money pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	1	825.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.04			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dokumen perencanaannya	Kabupaten/Kota	35	250.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi : JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						6.009.800.000		
						Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	1.500.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan	Dokumen	1	500.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RRPD)				350.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup infrast pembangunan	Laporan	1	350.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup infrastruktur pembangunan	Laporan	1	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	475.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)				350.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pengembangan wilayah , pertanahan & permukiman	Laporan	1	350.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				125.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pengembangan wilayah , pertanahan & permukiman	Laporan	1	125.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH	Dokumen	1		525.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					325.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup SDA & LH	Laporan	1		325.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					200.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup SDA & LH	Laporan	1		200.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
						Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90		2.709.800.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						2.709.800.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial	Dokumen	1		734.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					50.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup Kesos	Laporan	1		50.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					684.000.000		
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup kesos	Laporan	1		684.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	Dokumen	1		1.300.800.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					75.000.000		
						Jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pembermasdes	Laporan	1		75.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					1.225.800.000		
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pembermasdes	Dokumen	1		1.225.800.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual	Dokumen	1		675.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					75.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup PMS	Laporan	1		75.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup PMS	Laporan	1	600.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	1.800.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.800.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan	Dokumen	1	600.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				400.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup eknaker	Laporan	1	400.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				200.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup eknaker	Laporan	1	200.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi	Dokumen	1	700.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				400.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup keuangan kerjasama & investasi	Laporan	1	400.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup keuangan kerjasama & investasi	Laporan	1	300.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan	Dokumen	1	500.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				325.000.000		
						Jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pertanian & kelautan	Laporan	1	325.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				175.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pertanian & Kelautan	Laporan	1	175.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
JUMLAH									62.752.675.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah									40.801.764.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	4.05		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Pajak Daerah								21.964.380.000		
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	3.58	21.964.380.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						21.964.380.000		
						Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	12	1.481.176.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.481.176.000		
						jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani	Unit	509718	1.481.176.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.10			Penagihan Pajak Daerah				1.481.176.000		
						Jumlah Dokumen pelaporan Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	Dokumen	4	1.481.176.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	9.482.439.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.482.439.000		
						Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah	Dokumen	2	596.011.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				596.011.000		
						Jumlah Jenis Potensi pendapatan yang Dikaji	Dokumen	1	596.011.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pemetaan PAD	Dokumen	3	558.828.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				558.828.000		
						Jumlah Lokasi Pemetaan PAD di UPPD	Dokumen	1	558.828.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Unit	21	8.327.600.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				8.327.600.000		
						Jumlah Lokasi Penerapan Aplikasi yang Dikembangkan di UPPD	Unit	37	8.327.600.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	1.540.000.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.540.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	515.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.12			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				515.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB	Dokumen	1	50.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah lokasi evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB di UPPD	Lokasi	37	465.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	514.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				514.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain lain	Dokumen	1	50.000.000		SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah lokasi evaluasi pendapatan Retribusi dan pendapatan lain di UPPD	Lokasi	37	464.000.000		SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	511.000.000		SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				511.000.000			
						Jumlah lokasi Evaluasi Sumber Daya di UPPD	Lokasi	37	511.000.000		SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	7.35	1.416.350.000		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.416.350.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB	Ribu Rupiah	3720814201	1.416.350.000		SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.416.350.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan PKB	Dokumen	4	1.416.350.000		SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	7.65	61.690.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					61.690.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	64658532	61.690.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				61.690.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	61.690.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	6.69	12.250.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.250.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	141840981	12.250.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12.250.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	12.250.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	6.53	9.000.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.000.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	70737165	9.000.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.000.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	9.000.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	11.18	4.500.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	57407780	4.500.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	4.500.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	5.74	11.100.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.100.000			
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	96337055	11.100.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.100.000			
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	11.100.000		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	6.91	8.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.060.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	122003058	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.060.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	5.05	20.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.600.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	141495437	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	7.59	5.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.625.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	145799563.99	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.625.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	3.45	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	114450310	5.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	3.98	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	134535548	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9.65	18.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.625.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	108365016	18.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				18.625.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	18.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	6.1	51.056.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.056.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	79877987	51.056.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				51.056.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	51.056.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	%	9.13	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	102979378	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	9.07	4.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.800.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	138919028	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	5.33	9.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.540.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	124042408	9.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.540.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	9.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6.72	32.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	108818783	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	%	5.41		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	150072377		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	5.25	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	80309088	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	7.15	5.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.600.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	99848736	5.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	5.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8.61	8.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.550.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	70530691	8.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.550.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	8.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	6.17	23.690.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					23.690.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	55283647	23.690.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				23.690.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	23.690.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	6.66	18.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.750.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	62830234	18.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				18.750.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	18.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	9.31	13.825.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.825.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	120715356	13.825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				13.825.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	13.825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	%	7.01		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	104606572		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8.39	14.490.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.490.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	122858455	14.490.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.490.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	14.490.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	6.32	9.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.225.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	119297991	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.225.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	4.41	2.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.700.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	53579973	2.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.700.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	2.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8.82	30.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.650.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	62827021	30.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	30.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	7.3		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	63135395		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4		SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	%	3.61	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	23727437	15.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	15.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	9.36	16.710.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.710.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	45432027	16.710.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				16.710.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	16.710.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	6.28	13.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	36204085	13.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				13.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	13.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	8.37	22.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	196659743	22.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				22.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	22.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	9.49	2.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	168736932	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	11.24	7.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	159355276	7.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	7.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	10.26	32.560.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.560.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	134002662	32.560.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.560.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	32.560.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	8.09	11.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.250.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	38536456	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	-6.73	44.900.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					44.900.000		
						Realisasi Penerimaan Pajak Rokok	Ribu Rupiah	2643508832	44.900.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				44.900.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Rokok	Dokumen	4	44.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	14.33	1.019.983.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.019.983.000		
						Realisasi Penerimaan PAP	Ribu Rupiah	19714000	1.019.983.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				1.019.983.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PAP	Dokumen	4	1.019.983.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	2.03	87.693.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					87.693.000		
						Realisasi Penerimaan PBBKB	Ribu Rupiah	2200000000	87.693.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				87.693.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PBBKB	Dokumen	4	87.693.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	7.08	1.444.195.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.444.195.000		
						Realisasi Penerimaan PKB	Ribu Rupiah	5912354487	1.444.195.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1.444.195.000		
						Jumlah dokumen rencana penepatan PKB dan BBNKB	Dokumen	2	1.444.195.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	9.92	82.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					82.125.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	106822239	82.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				82.125.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	82.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	8.02	179.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					179.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	248657992	179.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				179.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	179.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	11.44	129.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					129.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	104999859	129.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				129.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	129.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	6.27	132.160.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					132.160.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	95882596	132.160.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				132.160.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	132.160.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	6.91	67.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					67.500.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	166190217	67.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				67.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	67.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	11.42	123.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					123.900.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	171713565	123.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				123.900.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	123.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	8.21	98.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					98.900.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	240856850	98.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				98.900.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	98.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	10.35	206.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					206.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	180591512	206.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				206.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	206.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	8.35	80.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					80.900.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	168903777	80.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				80.900.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	80.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	10.07	136.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					136.500.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	187717663	136.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				136.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	136.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	5.01	111.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					111.650.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	185489494	111.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				111.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	111.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	7.68	117.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					117.650.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	138319427	117.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				117.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	117.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	8	163.385.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					163.385.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	1157486617	163.385.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				163.385.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	163.385.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	5.69	155.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					155.150.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	231076343	155.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				155.150.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	155.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	4.95	86.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					86.950.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	180073587	86.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				86.950.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	86.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6.03	98.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					98.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	167498057	98.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				98.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	98.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	6.23	126.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					126.600.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	226168730	126.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				126.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	126.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10.73	87.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					87.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	114955550	87.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				87.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	87.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	10.09	144.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					144.650.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	156347156	144.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				144.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	144.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	9.43	134.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					134.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	109660149	134.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				134.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	134.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	5.69	103.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					103.800.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	91458179	103.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				103.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	103.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	%	8.09	204.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					204.400.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	85726962	204.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				204.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	204.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	7.76	146.425.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					146.425.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	187976190	146.425.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				146.425.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	146.425.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	%	6.18	175.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.250.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	182944978	175.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	175.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5.04	123.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					123.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	198317447	123.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				123.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	123.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	10.99	85.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					85.450.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	179519286	85.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				85.450.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	85.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	5.14	98.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					98.200.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	93852530	98.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				98.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	98.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5.83	99.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					99.350.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	127347326	99.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				99.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	99.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	7.43	68.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					68.150.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	97397574	68.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				68.150.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	68.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	3.16	201.960.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					201.960.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	45381758	201.960.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				201.960.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	201.960.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	7.2	121.899.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					121.899.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	66042249	121.899.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				121.899.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	121.899.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	%	5.68	181.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					181.600.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	61750981	181.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				181.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	181.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	4.3	128.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					128.250.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	329698843	128.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				128.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	128.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	4.97	238.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					238.100.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	274744501	238.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				238.100.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	238.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	5.34	202.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					202.400.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	247651113	202.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				202.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	202.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	4.16	163.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					163.600.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	243864993	163.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				163.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	163.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	8.21	133.694.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					133.694.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	62268197	133.694.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				133.694.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	133.694.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yg Sah								18.837.384.000		
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yg sah	%	6.79	18.837.384.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						18.837.384.000		
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	12	340.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					340.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	11527	340.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				340.800.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	340.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	12	548.731.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					548.731.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	23918	548.731.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				548.731.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	548.731.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	12	359.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					359.700.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	11702	359.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				359.700.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	359.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	12	430.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					430.950.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	9706	430.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				430.950.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Biora	Dokumen	1	430.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	12	422.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					422.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	13823	422.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				422.300.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	422.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	12	682.824.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					682.824.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	22270	682.824.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				682.824.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	682.824.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	%	12	580.229.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					580.229.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	24554	580.229.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				580.229.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	580.229.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	12	474.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					474.600.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	17378	474.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				474.600.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	474.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	12	601.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					601.650.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	17764	601.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				601.650.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	601.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	12	543.825.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					543.825.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	19208	543.825.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				543.825.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	543.825.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	%	12	454.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					454.200.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	13299	454.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				454.200.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	454.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	12	444.325.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					444.325.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	14216	444.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				444.325.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	444.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	12	451.557.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					451.557.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	15645	451.557.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				451.557.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	451.557.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	12	566.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					566.600.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	20268	566.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				566.600.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	566.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	12	403.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					403.850.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	12243	403.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				403.850.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	403.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	12	459.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					459.350.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	12616	459.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				459.350.000			
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4		459.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	12		564.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						564.600.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	16366		564.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					564.600.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4		564.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12		434.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						434.650.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	13497		434.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					434.650.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4		434.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	12		580.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						580.750.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	18592		580.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					580.750.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4		580.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	12		486.735.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						486.735.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	12624		486.735.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					486.735.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4		486.735.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	%	12		274.558.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						274.558.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	7664		274.558.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					274.558.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4		274.558.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	12		300.380.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						300.380.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	7755		300.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				300.380.000			
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4		300.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	12		488.386.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						488.386.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	16029		488.386.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					488.386.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4		488.386.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	12		512.978.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						512.978.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	15246		512.978.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					512.978.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		512.978.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	12		445.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						445.100.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	14523		445.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					445.100.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4		445.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	12		642.708.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						642.708.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	24579		642.708.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					642.708.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4		642.708.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	%	12		291.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						291.200.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	7431		291.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					291.200.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4		291.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	12		456.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						456.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	11198		456.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				456.300.000			
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4		456.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	%	12		273.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						273.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	8018		273.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					273.300.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4		273.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	12		310.436.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						310.436.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	2623		310.436.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					310.436.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Dokumen	4		310.436.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	12		224.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						224.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	5792		224.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					224.800.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4		224.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	12		166.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						166.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	3863		166.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					166.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4		166.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	12		501.920.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						501.920.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	Unit	18621		501.920.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					501.920.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4		501.920.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	12		449.529.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						449.529.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	14604		449.529.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					449.529.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4		449.529.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	12	317.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					317.700.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	13075	317.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				317.700.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	317.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	12	334.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					334.100.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	14515	334.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				334.100.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	334.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	12	295.036.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					295.036.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	5966	295.036.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				295.036.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	295.036.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	13.08	636.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					636.000		
						Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan	Ribu Rupiah	629914196	636.000		
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				636.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	Dokumen	4	636.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	4.32	571.017.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					571.017.000		
						Realisasi penerimaan pendapatan lain lain	Ribu Rupiah	1767473162	571.017.000		
		5.02.04.1.01.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				571.017.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain	Dokumen	1	571.017.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	3.5	6.525.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.525.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	2794375	6.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.525.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	6.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	%	10.92	22.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.250.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	837375	22.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				22.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4		22.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	49.42		38.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						38.100.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	527000		38.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					38.100.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4		38.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	16.7		3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	109000		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	16.26		8.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						8.200.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	192375		8.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					8.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4		8.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	16.32		1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.800.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	253000		1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4		1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	17.58		3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	4575000		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	16.47		7.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						7.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	263000		7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					7.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4		7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	12.04		3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	1061375		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	13.04		1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	13000		1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4		1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	16.22		5.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						5.650.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	485000		5.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					5.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4		5.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	3.32		5.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						5.250.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	790375		5.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					5.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4		5.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	19.61		16.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						16.350.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	61000		16.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					16.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4		16.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	%	16.22		4.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.650.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	644000		4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					4.650.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4		4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	-9.09		3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	1000		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	16.36		8.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						8.550.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	838000		8.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					8.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	8.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	16.1	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	93000	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	76.74	7.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.800.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	509000	7.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	7.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	16.53	7.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	251000	7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	7.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	16.35	19.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.400.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	395000	19.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				19.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	19.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	%	16.49	2.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.800.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	130000	2.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	2.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	%	16.36	15.165.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.165.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	101000	15.165.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.165.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	15.165.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	%	7.88	6.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.300.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	1402375	6.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4		6.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	21.95		2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.250.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	5000		2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					2.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	16.4		5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						5.400.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	413000		5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4		5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	16.19		3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	366000		3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4		3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	%	16.37		22.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						22.350.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	283000		22.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					22.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4		22.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5.41		4.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.200.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	374375		4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					4.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4		4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13.99		25.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						25.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	666375		25.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4		25.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	15.97		10.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						10.200.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	122000		10.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					10.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Magelang	Dokumen	4		10.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	25		3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	60000		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	16.38		1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	721000		1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4		1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	16.16		9.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						9.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	312000		9.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					9.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4		9.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	%	16.91			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	65000			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Tegal	%				Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	0			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Tegal	Dokumen	4			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	12.5		1.504.594.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.504.594.000		
						Realisasi penerimaan retribusi Daerah	Ribu Rupiah	134887633		1.504.594.000		
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.504.594.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah	Dokumen	4		1.504.594.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	2.2		3.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.300.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	83100		3.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.300.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4		3.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0.67	9.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.450.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	180251	9.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				9.450.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	9.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	7.36	22.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	70918	22.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				22.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	22.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	%	5.15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	103530		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	-4.84	10.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	90750	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	2.47	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	124500	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	5.01	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	126350	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	%	1.95		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	84301		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	5.74	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	145788	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	12.74	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	243049	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	%	5.05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	80025		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	%	3.21		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	111600		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	10.22	1.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.050.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	82355	1.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.050.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	1.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	0.52	2.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.100.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	164038	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.100.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	%	5.04	6.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.060.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	108329	6.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.060.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	%	26.54	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	195922	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	3.47	8.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.250.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	111182	8.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				8.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	8.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10.85	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	71100	1.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	1.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	5.02	2.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	114956	2.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	%	5.75	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	73577	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	%	2.45	7.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	67000	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	6.04	4.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.350.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	85770	4.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	4.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	-0.87	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	135777	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	%	4.58		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	67315		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	6.85	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	110846	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	%	7.34	9.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.300.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	78926	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				9.300.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	%	26.28		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	86640		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	%	1.06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	136436		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	%	2.03	11.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	105300	11.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	11.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	%	3.52			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	60500			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	6.87	8.880.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.880.000			
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	65340		8.880.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					8.880.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4		8.880.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	2.52	7.200.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000			
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	69320		7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					7.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4		7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	%	10.26	3.600.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000			
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	364305		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4		3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	%	-5.55			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	213760			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	%	-2.73			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	277976			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4			SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	%	5.94	207.000.000		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					207.000.000			
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	178768		207.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					207.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4		207.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	%	-48.69	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	134490	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									274.064.023.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	95		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								1.121.736.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	1.121.736.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.121.736.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Nilai	90	1.121.736.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.121.736.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun	Dokumen	4	1.121.736.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				421.516.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	2	421.516.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				700.220.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	700.220.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								272.942.287.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	272.942.287.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						272.942.287.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.274.352.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Magelang	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Magelang	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						389.417.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1		389.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Magelang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					21.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		21.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					19.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					4.800.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					97.757.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Magelang	Unit	1		97.757.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					55.640.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Magelang	Bulan	12		55.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					185.570.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		185.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Magelang	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						614.010.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1		614.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					145.010.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12		145.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					467.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		467.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.925.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1		220.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23.075.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Magelang	Bulan	12		23.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					91.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Magelang	Bulan	12		91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Magelang	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Magelang	Bulan	12		29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Magelang	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					55.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Magelang	Unit	1		55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					11.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		11.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.634.306.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						46.710.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4		46.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4.710.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1		4.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						293.488.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4		293.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					41.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.600.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					2.400.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					76.078.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		76.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					27.310.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1		27.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					136.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1		136.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					952.028.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	952.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.080.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	1.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	231.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				719.048.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	719.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.080.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	322.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				153.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	153.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	84.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	9.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.462.518.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.640.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	50.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.640.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.718.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	273.718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.490.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	6.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	29.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.300.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	12.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.609.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	6.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				84.375.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	1	84.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				31.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	31.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.044.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	103.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					812.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	812.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				615.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	615.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					317.360.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	317.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	30.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.760.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	87.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.539.424.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	72.100.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	42.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	30.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						*Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	6.700.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	6.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					308.424.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	308.424.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	6.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	24.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.204.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	12.204.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	9.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				88.170.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	88.170.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				26.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	26.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	140.600.000		
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	1.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					856.200.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	856.200.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	220.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				631.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	631.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.000.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	296.000.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	17.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	90.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	39.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				89.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	89.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	37.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.528.649.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.350.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	53.350.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	43.350.000		
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	4	10.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					443.299.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	443.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.330.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	25.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				17.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	17.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				111.019.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	111.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				25.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	25.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan				
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					671.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1		671.040.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		5.000.000		
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		125.000.000		
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	0				
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					541.040.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		541.040.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360.960.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1		360.960.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		30.000.000		
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					112.960.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		112.960.000		
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	0				
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					72.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		72.000.000		
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		6.000.000		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		100.000.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		36.000.000		
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.563.676.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.580.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	1	52.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.580.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	10.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					347.596.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	1	347.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	46.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.550.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	24.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.800.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				110.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.396.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	120.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					820.100.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1	820.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	667.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					343.400.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1	343.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	131.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	40.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.154.442.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					316.032.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I	Laporan	4	316.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.102.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	18.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						pengamaan barang milik daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				110.023.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	110.023.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.200.000		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	20.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139.607.000		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	139.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang I	Laporan	0				
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Pengadaan Mebel UPPD Kota Semarang I	Bulan	12				
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12				
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12				
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12				
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.567.900.000			
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	4		1.567.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000.000		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					346.300.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		346.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					315.000.000		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					900.600.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		900.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222.510.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	4		222.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					95.110.000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		95.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					2.500.000		
						Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.300.000		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	38.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.600.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	54.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.988.126.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	69.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					311.699.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	311.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	18.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				107.369.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	107.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				16.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	16.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	137.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.284.267.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	1.284.267.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				232.001.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	232.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.026.766.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	1.026.766.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					312.960.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4		312.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					112.460.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		112.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					78.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		2.214.284.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	1		50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						291.940.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	1		291.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.959.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	32.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.405.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	31.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				750.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				107.001.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	107.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.675.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	27.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	77.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.524.745.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang"	Laporan	1	1.524.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.820.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	4.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				372.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	372.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.127.925.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	1.127.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.099.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang"	Laporan	1	347.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.744.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	26.744.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		131.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					64.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		64.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					3.975.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		3.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.570.833.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.680.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1		52.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.680.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	4		10.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						350.781.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1		350.781.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				56.424.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	56.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.550.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	11.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				78.624.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	78.624.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				36.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156.383.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	156.383.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					884.232.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	884.232.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.810.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	8.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	151.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				724.222.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		724.222.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						283.140.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1		283.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					21.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		21.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					97.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		97.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					2.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					89.790.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		89.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					28.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		28.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.660.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						331.194.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		331.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		18.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					33.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		33.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					8.250.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					86.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					37.265.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		37.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					140.479.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		140.479.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Batang	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Batang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Batang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Batang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					887.700.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	887.700.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	2.400.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	186.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				699.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	699.300.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					394.650.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	394.650.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	70.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.900.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	124.900.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	48.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.750.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	85.750.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	40.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.400.402.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga	Laporan	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					401.852.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga	Laporan	1	401.852.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	6.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	71.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.052.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	33.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				31.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	31.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	145.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Salatiga	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					559.350.000			
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1	559.350.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	3.600.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	139.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				416.550.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	416.550.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.200.000			
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1	397.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	29.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	77.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	10.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	60.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				18.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	18.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				140.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	140.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	54.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.793.386.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	4	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					331.942.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	331.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	35.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.080.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	40.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				85.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	85.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.560.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	51.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.002.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	106.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.019.339.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	1.019.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				808.339.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	808.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.105.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	364.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				28.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	28.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.455.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	131.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.848.227.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.390.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	76.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				34.390.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	4	34.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					350.893.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	350.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.390.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	23.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.190.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	60.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	29.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				110.363.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1	110.363.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	85.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.069.744.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1		1.069.744.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.875.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		2.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					173.520.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		173.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					893.349.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		893.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						339.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1		339.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					114.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		114.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					38.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		38.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					1.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					104.600.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1		104.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					45.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		45.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12		6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.396.245.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Rembang	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					371.148.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	371.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.560.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	6.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.030.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	34.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				77.562.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	77.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				30.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	30.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				207.396.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	207.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4			SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Rembang	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Rembang	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Rembang	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					628.700.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	628.700.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	3.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	151.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	20.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				454.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	454.200.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					344.397.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	344.397.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	23.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.497.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	144.497.000		SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	48.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.680.833.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.976.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	77.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; PEMALANG --> PEMALANG --> KELURAHAN MULYO HARJO
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.976.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	35.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					313.032.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	313.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	21.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				98.208.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	98.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.074.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	143.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					883.625.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	883.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	184.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.425.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	696.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					396.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	396.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	40.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				153.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	153.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.642.827.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					336.114.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	336.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.004.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	4.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.505.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	35.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.633.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	11.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.920.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				88.042.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	88.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				25.575.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	25.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165.435.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	165.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Jepara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					949.843.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	949.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				215.259.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	215.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				732.184.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	732.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					304.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4		304.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		20.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					134.170.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		134.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					54.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		54.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					45.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					42.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		42.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.585.259.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.680.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4		52.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.680.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4		10.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					349.699.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4		349.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					19.320.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		19.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					103.980.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		103.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					38.140.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		38.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					168.459.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		168.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					902.480.000			
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4		902.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					243.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		243.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					657.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		657.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280.400.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4		280.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					92.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		92.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					56.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.029.496.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	45.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					379.466.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	379.466.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				68.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	68.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	29.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				100.491.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	100.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	37.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				129.025.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	129.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.197.850.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III"	Laporan	1	1.197.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					351.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		351.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					826.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		826.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						406.780.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III"	Laporan	1		406.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					25.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		25.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					109.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		109.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					93.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		93.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					55.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		55.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		2.191.563.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					315.012.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	315.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.250.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				74.530.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Unit	12	74.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	32.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.582.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	148.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Brebes	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Brebes	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Brebes	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.460.866.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1		1.460.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					356.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		356.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.101.866.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		1.101.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						363.685.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1		363.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					22.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		22.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					120.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					755.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					87.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		87.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			80.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Brebes	Unit	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.611.335.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				42.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			42.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.802.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	1	358.802.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.500.000			
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.300.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	25.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.000.000			
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				120.792.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	120.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				35.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	35.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.060.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	135.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					884.350.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1	884.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				221.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	221.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				660.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	660.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.183.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1	326.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.025.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	30.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				81.275.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	81.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				114.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.883.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	42.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.702.776.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Tegal	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				357.476.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	357.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Tegal	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Tegal	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				25.220.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Bulan	12	25.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.256.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	148.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Tegal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kota Tegal	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Tegal	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.052.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.052.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				279.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	279.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				767.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	767.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					226.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	226.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Tegal	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Tegal	Bulan	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Tegal	Bulan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Tegal	Bulan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Tegal	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.773.137.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.380.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	58.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16.380.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	16.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					336.911.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	336.911.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.200.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					11.330.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		11.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					99.995.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Unit	1		99.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					140.886.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		140.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.040.316.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4		1.040.316.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					145.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					888.116.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		888.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327.530.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4		327.530.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					17.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		17.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					99.630.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		99.630.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	5.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	42.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	120.000.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	25.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.604.204.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					348.804.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	348.804.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				67.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	67.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				88.326.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	88.326.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	33.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.748.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	122.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					818.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	818.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	166.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				647.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	647.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					376.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	376.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	129.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pekalongan		Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pekalongan		Bulan	12	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pekalongan		Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pekalongan		Unit	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.500.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pekalongan		Bulan	12	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pekalongan		Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		%	95	1.634.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Laporan	1	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal		Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Tegal		Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Tegal		Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					322.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Laporan	1	322.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Tegal		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Tegal		Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		29.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					80.700.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1		80.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.840.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		15.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					167.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		167.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						857.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		857.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					146.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		146.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					706.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		706.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						388.250.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		388.250.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					43.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		43.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					156.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		156.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					51.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	51.050.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	29.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	7.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.522.570.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	49.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; PURBALINGGA --> KALIMANAH --> KELURAHAN KALIKABONG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					331.481.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	331.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	4.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	38.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				97.166.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	97.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				35.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	35.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	128.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.865.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	1.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					780.349.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	780.349.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	5.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	195.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	6.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				573.949.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	573.949.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.740.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	346.740.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	26.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				121.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	121.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	64.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	3.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.640.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	22.640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	7.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.742.466.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					367.616.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	367.616.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.340.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	38.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				94.726.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	94.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				43.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	122.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan				
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kota Semarang II	Laporan	12			
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Semarang II	Bulan	12			
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kota Semarang II	Bulan	12			
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12				
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.005.900.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1		1.005.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					346.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		346.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					21.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					635.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		635.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						320.150.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1		320.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					95.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		95.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					57.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		57.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		30.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.523.492.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						72.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4		72.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					30.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4		30.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						337.505.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4		337.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.270.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		5.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.340.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		43.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.600.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		15.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					9.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					83.490.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		83.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					21.075.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		21.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157.230.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	157.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					794.336.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	794.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	134.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				653.436.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	653.436.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					313.551.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	313.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.001.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		135.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		35.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					90.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12		4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95		1.549.940.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.840.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		52.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.840.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4		10.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						285.149.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		285.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					11.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					98.914.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Unit	1		98.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					26.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					102.585.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		102.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Pekalongan	Bulan	0		1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						874.547.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		874.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					204.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					667.047.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		667.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						327.404.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1		327.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					24.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					126.494.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12		126.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.710.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	68.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.044.108.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					352.288.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	352.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.604.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	41.604.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.850.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	11.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				129.502.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	129.502.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.844.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	39.844.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				107.488.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	107.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.173.271.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	1.173.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	208.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				960.571.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	960.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					441.549.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	441.549.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				207.699.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	207.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	48.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	49.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					209.421.691.000	SEKRETARIAT	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	162.364.690.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				161.353.960.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	161.353.960.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				753.430.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	753.430.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				257.300.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	4	257.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					883.455.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Laporan	4	883.455.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				883.455.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	883.455.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					266.250.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	266.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				186.250.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	186.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	10	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.966.923.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	4	16.966.923.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.026.200.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	2.026.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.147.720.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.147.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				96.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	897.003.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	6.006.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0	3.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	25	2.506.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	14.425.943.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	85.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	2.517.035.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	9.225.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.598.173.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan BARang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	8.508.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.991.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		1.991.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.195.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		2.195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.612.350.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang direhab	Unit	1		1.612.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.445.030.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		2.445.030.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95		1.598.441.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah"	Laporan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						350.699.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	4		350.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		43.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					21.700.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		21.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					6.740.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		6.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					85.389.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		85.389.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					31.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					154.670.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		154.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						902.077.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	4		902.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					206.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					693.077.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		693.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303.665.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	4		303.665.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	23.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.190.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	138.190.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan				
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	54.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.600.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	60.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.125.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	19.125.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	7.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95	1.664.509.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					347.197.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	347.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.610.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	32.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.750.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	11.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				86.351.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	86.351.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				29.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	29.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				178.386.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	178.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					964.752.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	964.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.999.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				798.753.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	798.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.200.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	309.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	134.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	39.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				93.350.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	93.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	29.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.380.068.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.020.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	45.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.020.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	4	3.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					313.086.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	313.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.954.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.204.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				115.178.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	115.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	120.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.624.462.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	1.624.462.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					273.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		273.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.348.162.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		1.348.162.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						387.500.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4		387.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					136.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		136.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					76.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					7.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		7.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					80.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					33.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		33.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95		1.482.309.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Sragen	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					396.229.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	396.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.506.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	38.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				99.560.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	99.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.625.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	53.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				173.638.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	173.638.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					752.220.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	752.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	167.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				581.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	581.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.860.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	291.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	85.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	36.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.460.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.644.589.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	52.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.790.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12		10.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						306.485.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4		306.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.570.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		8.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					42.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.020.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		18.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					9.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material					94.538.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		94.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu					30.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					103.657.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		103.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						939.914.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4		939.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					174.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					672.514.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		672.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						345.400.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4		345.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					44.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	84.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel			6.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			83.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	83.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			7.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			80.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.174.882.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				54.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			42.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				339.457.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	339.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	17.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				110.632.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	110.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.825.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	28.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	120.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.370.925.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	1.370.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				268.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	268.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.099.325.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	1.099.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.500.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	410.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.600.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		125.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.800.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		104.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.000.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1		95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95		1.707.828.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4		52.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.700.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1		10.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kota Surakarta	Laporan				SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						314.614.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4		314.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.350.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	1.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.950.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.300.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				123.516.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	123.516.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				37.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	37.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.398.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	122.398.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.059.994.000		
						Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta	Bulan	4	1.059.994.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.725.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				265.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	265.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				792.469.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	792.469.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.520.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	280.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	88.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	52.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.520.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	47.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									314.865.787.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									36.477.093.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								3.343.842.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	80	3.343.842.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.343.842.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	80	3.138.362.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					300.000.000		
						Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit			Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit			Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu					49.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	49.950.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.295.185.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2.295.185.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					722.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	722.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.571.985.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12		1.571.985.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						543.177.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1		543.177.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		30.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					202.842.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		202.842.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan				Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					180.335.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		180.335.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dokumen	100		205.480.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						205.480.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	10		205.480.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					124.800.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5		124.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.680.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1		80.680.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah									33.133.251.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		33.133.251.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							33.133.251.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100		33.133.251.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.233.942.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	4		28.233.942.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.091.241.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		24.091.241.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4.072.701.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12		4.072.701.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	0			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30.000.000			
						Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Dokumen	1		30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1		10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000			
						Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan Keuangan yang disusun	Dokumen	1		15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	18		15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit Pakaian Dinas yang diadakan	Unit				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				100.000.000			
						Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	2		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/seminar	Orang	20		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.000.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				150.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000			
						Jumlah unit Penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				150.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				150.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
						Jumlah bulan tercukupinya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				299.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12		299.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550.500.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		550.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000			
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar							
						Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar	Unit	1			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel							
						Jumlah Unit Pengadaan Meubelair	Unit				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				650.000.000			
						Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					840.200.000			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		840.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000			
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				394.400.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12		394.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				310.800.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12		310.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.259.109.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1.259.109.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					908.309.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		908.309.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					213.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		213.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					137.800.000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	4		137.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah										5.010.819.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah	%	72.5			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah									5.010.819.000		
						Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72.5		5.010.819.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							5.010.819.000		
						Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	72.5		5.010.819.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah						5.010.819.000		
						Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit	62		33.099.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					33.099.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah pada aset pengelola yang termanfaatkan	Unit	1	33.099.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	42	1.093.148.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.06			Inventarisasi Barang Milik Daerah				1.018.148.000		
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Provisi Jawa Tengah	Dokumen	41	1.018.148.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.12			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	75.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	41	900.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.03			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				700.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	41	700.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.08			Penilaian Barang Milik Daerah				200.000.000		
						Jumlah Dokumen hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	2	200.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	550.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.05			Penatausahaan Barang Milik Daerah				350.000.000		
						Jumlah Updating system Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Jenis	41	350.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.11			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				200.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	OPD	41	200.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit	233	2.434.572.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.04			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				219.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	219.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.07			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.698.870.000		
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang label kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Unit	15	165.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang pagar kepemilikan	Unit	3	192.500.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang patok	Unit	15	84.975.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah tersertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sertifikat	180	1.256.395.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.09			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	41	100.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.03.1.01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				416.702.000		
					Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1		101.822.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1		49.880.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1		265.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik									9.092.324.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan								9.092.324.228.000		
					Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100		9.092.324.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						9.092.324.228.000		
					Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	100		9.075.887.538.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					9.075.887.538.000		
					Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	1		9.075.887.538.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.07			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						
					Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	Dokumen	1			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.762.453.750.000		
					Jumlah dokumen alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Dokumen	1		2.762.453.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.09			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				23.100.000.000		
					Jumlah dokumen pengelolaan dana darurat dan mendesak	Dokumen	1		23.100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.10			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				6.290.333.788.000		
					Jumlah dokumen dana bagi hasil Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Dokumen	1		6.290.333.788.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100		529.520.000	SEKRETARIAT	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					529.520.000		
					Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105		529.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1.02.02			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				121.086.000		
					Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD induk Kabupaten/Kota	Dokumen	35		121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.02.03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				121.086.000		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Perubahan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.04			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				121.086.000		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	Dokumen	35	121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.05			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				103.039.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten/Kota	35	103.039.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.08			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				14.466.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.09			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				14.466.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.10			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				14.466.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.12			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				19.825.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1		14.950.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1		4.875.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100		9.432.773.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						9.432.773.000		
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaedah perundangan	OPD	12		3.189.473.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0			SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					990.200.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	15		990.200.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					1.496.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	15		1.496.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					703.273.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	15		703.273.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.13			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang mendapatkan pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	15	2.321.925.000		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0			SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintah	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			428.125.000				
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	12	428.125.000		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.596.600.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	12		1.596.600.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					297.200.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	12		297.200.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	14		3.921.375.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0			SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					3.491.375.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	14		3.491.375.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					160.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	14		160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					270.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	14		270.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100		4.066.376.000	Bidang Akuntansi	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					4.066.376.000		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1		617.324.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.08			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					617.324.000		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1		617.324.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3		205.388.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					33.934.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	17		33.934.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					171.454.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3		171.454.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	12		604.163.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				136.200.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	12	136.200.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				45.750.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	12	45.750.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				171.913.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	12	171.913.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				22.500.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	12	22.500.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				227.800.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	12	227.800.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	17	756.704.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36.484.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	17	36.484.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				230.370.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	OPD	17	230.370.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

					Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				208.200.000		
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	17		208.200.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				281.650.000		
					Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	17		281.650.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	15		1.667.368.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				61.500.000		
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	15		61.500.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				137.000.000		
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	15		137.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.249.400.000		
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	15		1.249.400.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60.209.000		
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	15		60.209.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				159.259.000		
					Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	15		159.259.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	3		113.095.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.07			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				113.095.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	3	113.095.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	102.334.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA		
		5.02.02.1.04.12			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				102.334.000			
						Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	102.334.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
						Persentase realisasi serapan APBD	%	95	2.408.021.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.258.021.000			
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD	19	699.096.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
		5.02.02.1.03.06			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				650.006.000			
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	OPD	35	650.006.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		5.02.02.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
						Jumlah Dokumen Analisis Pembiayaan Pemerintah Daerah	Dokumen	0			SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Kebijakan Analisis Kas Pemerintah Daerah	Dokumen	0			SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				49.090.000			
						Jumlah Dokumen Kebijakan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	49.090.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD	22	782.752.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA		
		5.02.02.1.03.03			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				612.212.000			
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi penerbitan Dokumen Anggaran Kas dan SPD	OPD	0	612.212.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		5.02.02.1.03.09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				170.540.000			
						Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait pada Perangkat Daerah	Dokumen	0	170.540.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		5.02.02.1.03.11			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	24			SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	OPD	41	776.173.000		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.01			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				776.173.000			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Daerah	Dokumen	41	776.173.000		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.04			Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	0			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.05			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Pemerintah Daerah	Dokumen	0			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah	Dokumen	12			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					150.000.000			
						Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD	41	150.000.000		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.01			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah							
						Jumlah Dokumen Analisis Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.02			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				150.000.000			
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	150.000.000		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.03			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi							
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									9.133.812.140.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah									66.317.358.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	89		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								500.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76	500.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						500.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	500.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				291.040.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	291.040.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				208.960.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	208.960.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								65.817.358.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	89	65.817.358.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						65.817.358.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	65.717.358.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.398.688.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	17	58.398.688.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				56.867.038.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	56.867.038.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.471.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.471.650.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	Laporan	17	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					160.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	200			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300.000.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	30		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.615.280.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		2.615.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					527.280.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12		527.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					250.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					300.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					18.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						780.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		780.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					500.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	4		500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6		250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.850.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1.850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12		60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					750.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12		750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12		900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.613.390.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		1.613.390.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel					20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					886.100.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2		886.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					357.290.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		357.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		100.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam Manajemen ASN										17.176.315.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Nilai Sistem Merit	Nilai	340			Badan Kepegawaian Daerah	
	Distribusi penempatan PNS dalam jabatan									6.889.640.000		
						Persentase distribusi penempatan PNS dalam jabatan	%	100		6.889.640.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							6.889.640.000		
						Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kerjanya	%	100		2.088.770.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Mutasi dan Promosi ASN						941.654.000		
						Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	%	100		941.654.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.03.02.1.02.03			Pengelolaan Promosi ASN				941.654.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Orang	1	925.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	Orang	160	16.654.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					540.916.000		
						Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	%	100	540.916.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.03.02.1.03.13			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				70.000.000		
						Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	Orang	2000	70.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				470.916.000		
						Jumlah PAK yang ditetapkan	Lembar	500	11.435.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	250	30.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Sertifikat	1850	429.481.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					606.200.000		
						Persentase ASN yang dinilai PKSP	%	100	606.200.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				606.200.000		
						Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	Orang	940	425.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	Orang	200	6.200.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Orang	600	175.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	3.781.030.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					329.470.000		
						Persentase usulan formasi ASN	%	100	329.470.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				329.470.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	Dokumen	1	282.080.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	Dokumen	1	47.390.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					3.451.560.000		
						Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	%	100	3.451.560.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.04			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				3.451.560.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Orang	1	60.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Orang	1	94.035.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	Orang	300	280.381.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	Orang	800	138.629.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	Orang	50	120.214.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Orang	13	2.758.301.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	1.019.840.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					1.019.840.000		
						Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	%	100	459.840.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				459.840.000		
						Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	Orang	2000	250.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Dokumen	2	45.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Dokumen	1	164.840.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	%	100	560.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				560.000.000		
						Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	Orang	250	180.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	50	200.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	280	180.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi								10.286.675.000		
						Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	10.286.675.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						10.286.675.000		
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	7.318.576.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					6.642.846.000		
						Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	%	90	6.242.846.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6.242.846.000		
						Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	3000	56.880.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	135	18.120.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Orang	150	145.846.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Kegiatan	1	6.022.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	400.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				400.000.000		
						Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Sertifikat	2300	250.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Kegiatan	5	150.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Mutasi dan Promosi ASN					675.730.000		
						Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	498.930.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				498.930.000		
						Jumlah fasilitasi Izin Cuti	Orang	400	13.180.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karis/Karsu	Orang	400	18.540.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karpeg	Orang	300	15.910.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penerbitan SPTKG	Orang	20	1.260.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	Sertifikat	10000	431.200.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	Orang	750	18.840.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	%	75	176.800.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN				176.800.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49	50.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Orang	200	89.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Dokumen	0		SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Test Mutasi PNS	Orang	100	37.800.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	1.780.895.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					500.000.000		
						Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	%	100	500.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.08			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				500.000.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Orang	150	310.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Orang	900	190.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1.280.895.000		
						Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	%	100	641.750.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
		5.03.02.1.04.07			Pembinaan Disiplin ASN				233.900.000		
						Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Dokumen	1	5.400.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Orang	80	111.000.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	120	117.500.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.08			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				407.850.000		
						Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	Kasus	30	70.850.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	Berkas	70	67.000.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	Kasus	60	270.000.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	%	100	639.145.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				504.170.000		
						Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Orang	50	74.398.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Dokumen	2	209.772.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Orang	50	220.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				134.975.000		
						Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Orang	100	62.110.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Berkas	2000	72.865.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	1.187.204.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.187.204.000		
						Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	%	100	348.870.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.11			Pengelolaan Data Kepegawaian				348.870.000		
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Dokumen	352500	145.194.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomafolder)	Buah	1800	152.090.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	Kegiatan	1	51.586.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	838.334.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				838.334.000		
						Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Buah	1	46.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	Kali	5	350.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	Kegiatan	1	232.380.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	Buku	60	6.600.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Kegiatan	1	70.334.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Kegiatan	6	133.020.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									83.493.673.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									53.930.283.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	81		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								457.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	457.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						457.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	457.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					457.000.000		
						jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	31	457.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				177.639.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	177.639.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				279.361.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	21	279.361.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								53.473.283.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	81.5	53.473.283.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.473.283.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	53.473.283.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.296.568.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	6	37.296.568.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				31.887.544.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	31.887.544.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.068.718.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	5.068.718.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				69.876.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	69.876.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				71.699.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah	Dokumen	1	71.699.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				73.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
								2023					
								Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1		73.100.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					125.631.000			
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1		125.631.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					200.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						118.174.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Dokumen	1		118.174.000	SUB BAGIAN KEUANGAN		
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					118.174.000			
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	1		118.174.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						416.925.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1		416.925.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Unit Pakaian Dinas yang diadakan	Unit	275				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					48.100.000			
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		48.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					368.825.000			
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	27		368.825.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.899.844.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1		2.899.844.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					145.077.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12		145.077.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.117.710.000			
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	95		957.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	6028		160.210.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					374.165.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		374.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					234.850.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	Bulan	12		234.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					80.938.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		80.938.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu				70.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	70.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				252.220.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	252.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	8.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				579.879.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	4	579.879.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.192.900.000		
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1.192.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				804.400.000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	Unit	9	804.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan aset tetap	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				373.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	19	373.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.676.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1	8.676.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12	4.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.143.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	2.143.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.529.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	6.529.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.672.072.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1		2.672.072.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					150.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12		150.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	Bulan	12		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.612.220.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	44		1.612.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					884.252.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12		884.252.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan										24.768.613.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	99.29			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kompetensi ASN									24.086.613.000		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	30		24.086.613.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							24.086.613.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3.5		692.650.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis						196.962.000		
						Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Dokumen	3		196.962.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.02			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					157.814.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1		7.814.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	25		150.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.01.04			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					39.148.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	12		8.409.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angkatan	22	30.739.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					495.688.000		
						Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	Dokumen	2	250.508.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.04			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				250.508.000		
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	113.419.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	55.439.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	81.650.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Dokumen	3	245.180.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.06			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				42.736.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	6.736.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	5	36.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.02.08			Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				202.444.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	16	69.339.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angkatan	100	133.105.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	5.874.195.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					5.874.195.000		
						Jumlah Peserta Latsar CPNS	Orang	1384	5.874.195.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5.874.195.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	1384	5.874.195.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	3.154.902.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					3.154.902.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1620	3.154.902.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3.154.902.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	820	933.726.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	340	1.205.186.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	460	1.015.990.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	11.128.847.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					11.128.847.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	1050	11.128.847.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				11.128.847.000		
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	240	3.672.417.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	240	3.115.070.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	180	3.839.100.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	Orang	40	89.760.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah	Orang	350	412.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	3.102.130.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					3.102.130.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	2650	3.102.130.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	
		5.04.02.1.01.03			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				3.102.130.000		
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	830	1.168.800.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	740	989.030.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	1080	944.300.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	82	133.889.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					44.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Dokumen	3	44.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				44.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1		6.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	OPD	36		38.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						89.389.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Dokumen	3		89.389.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional					89.389.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1		35.294.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	OPD	36		54.095.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
	Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN									682.000.000		
						Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36.26		682.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							682.000.000		
						Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	93.17		682.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						682.000.000		
						Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	Dokumen	1		682.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.02			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi					50.000.000		
						Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	3		43.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	Jenis	2		7.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.02.03			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota					632.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	150		632.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
JUMLAH										78.698.896.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta serta Tata Kelola Organisasi Badan Penghubung									20.263.782.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung								75.000.000		
						Nilai SAKIP Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Nilai	75	75.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						75.000.000		
						Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD	%	100	75.000.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				51.198.000		
						Jumlah dokumen perencanaan PD yg disusun	Dokumen	2	51.198.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.802.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	23.802.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								16.999.586.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	85	16.999.586.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.999.586.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	16.999.586.000	Badan Penghubung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.829.362.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	8.829.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.758.842.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	8.758.842.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				35.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	35.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.820.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	4.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7.320.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	7.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22.980.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	22.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					191.580.000			
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					191.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						157.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		157.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					35.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	10		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					122.400.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	64		122.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.194.981.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		2.194.981.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.941.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		50.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					156.503.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	1		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	1		71.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					207.872.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		207.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					18.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu					825.465.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		825.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					15.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1		15.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.424.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		20.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel					20.424.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		20.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.040.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	4.040.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
									35.000.000			
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	35.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
									739.000.000			
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	739.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
									116.000.000			
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	116.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
									3.150.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	3.150.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.565.839.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.565.839.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				550.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	550.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				33.550.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	12	33.550.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				347.523.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	347.523.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				78.386.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	78.386.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				556.380.000			
						Jumlah Unit Gedung Yang Dipelihara / Direhab	Unit	4	556.380.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								3.189.196.000			
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	3.189.196.000			
									3.189.196.000			
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	3.189.196.000		Badan Penghubung	
					Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				3.189.196.000			
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	797.901.000		SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.03			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				797.901.000			
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Promosi Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	388.666.000		SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	409.235.000		SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII	%	100	33.825.000		SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.03			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				33.825.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII	Kali	1	33.825.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	2.357.470.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.01				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			2.357.470.000		
						Jumlah Paguyuban yang difasilitasi	Kelompok	35	44.470.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Pemudik lebaran Gratis Masyarakat Perantau Asal Jawa Tengah di Jakarta	Orang	4618	2.313.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
JUMLAH									20.263.782.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik									9.084.663.000		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3			
						Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.19			
	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola								6.396.969.000		
						Level pada tiga elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	3	6.396.969.000		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.396.969.000		
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	1.524.400.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					792.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	54	792.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.04			Reviu Laporan Keuangan				792.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	54	792.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					732.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan	Laporan	12	732.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.02.02			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				732.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	10	732.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Monitoring Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	2		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	1.329.300.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.329.300.000		
						Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan	Laporan	24	1.329.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.02			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.329.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan	Laporan	24	1.329.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	1.470.914.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.470.914.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	22	1.470.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.470.914.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	22	1.470.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	85	1.451.870.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.451.870.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	79	1.451.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				450.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	47	450.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	0		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.03			Reviu Laporan Kinerja				46.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	25	46.250.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.05			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				955.620.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis di Kab/Kota yang dihasilkan	Laporan	8	955.620.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	620.485.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					620.485.000		
						Jumlah Dokumen IHPS	Dokumen	2	620.485.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.07			Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				620.485.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan	Laporan	85	620.485.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
	Meningkatnya Skor pada 3 (Tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP								2.687.694.000		
						Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3.19	2.687.694.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.687.694.000		
						Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	86	313.580.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					313.580.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi RB	OPD	41	313.580.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				313.580.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD	41	313.580.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	0		INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi							
						Jumlah OPD yang dievaluasi RB	OPD	0		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
						Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD	0		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	0		INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli	Laporan	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Dokumen pemetaan kegiatan saber pungli	Dokumen	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	90		390.060.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi						390.060.000		
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	4		67.280.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					67.280.000		
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	4		67.280.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli	Laporan	1		322.780.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					322.780.000		
						Jumlah Dokumen pemetaan kegiatan saber pungli	Dokumen	1		322.780.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100		826.388.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						563.764.000		
						Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	1		563.764.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.02			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					563.764.000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko	Dokumen	4		563.764.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan dan Asistensi						262.624.000		
						Jumlah Dokumen Surveillance ISO	Dokumen	1		142.624.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					142.624.000		
						Jumlah Dokumen Surveillance ISO	Dokumen	1		142.624.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	Laporan	1		120.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					120.000.000		
						Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional	Orang	2		120.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85		734.026.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi						734.026.000		
						Persentase Pelaporan LHKASN	%	100		457.394.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					457.394.000		
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKASN	OPD	41		457.394.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaporan LHKPN	%	100		276.632.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					276.632.000		
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKPN	OPD	41		276.632.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Nilai MCP korsupgah	%	0			INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi								
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Persentase Pelaporan LHKASN	%	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKASN	OPD	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaporan LHKPN	%	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKPN	OPD	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penerapan MR di OPD	%	0			INSPEKTORAT	
					Pendampingan dan Asistensi							
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	0			INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penerapan MR di OPD	%	100		423.640.000	SEKRETARIAT	
					Pendampingan dan Asistensi					423.640.000		
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	5		423.640.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					423.640.000		
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	5		423.640.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										28.249.793.000	INSPEKTORAT	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.35			INSPEKTORAT	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									105.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88		105.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							105.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100		105.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	11		105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					60.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	5		60.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6		45.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									28.144.793.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.35		28.144.793.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							28.144.793.000		
						Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		28.144.793.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.185.372.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1		21.185.372.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.185.372.000		
						Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	Bulan	14	21.185.372.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					183.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	183.700.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				183.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	183.700.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					464.307.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	3	464.307.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	150		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				116.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	116.700.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				347.607.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	250	347.607.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					606.837.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	4	606.837.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				184.755.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	184.755.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				367.082.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	367.082.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.165.728.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2.165.728.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Unit	4		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.165.728.000		
						Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	195	2.165.728.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.752.635.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	2.752.635.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				214.909.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	Bulan	12	214.909.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				784.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	784.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.722.826.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	1.722.826.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					786.214.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	786.214.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.530.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	300.530.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				316.994.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	316.994.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				168.690.000		
						Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	168.690.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									37.334.456.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	80	17.238.375.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									1.690.157.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									1.690.157.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									1.690.157.000	SEKRETARIAT	
									1.690.157.000		
									1.690.157.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
									523.129.000		
									523.129.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
									1.167.028.000		
									1.167.028.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	80	15.548.218.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									15.548.218.000		
									15.548.218.000	SEKRETARIAT	
									9.803.912.000		
									9.803.912.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
									9.578.792.000		
									9.578.792.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
									222.120.000		
									222.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
									1.500.000		
1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi									
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	X,XX,01.1.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	9.803.912.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
									9.578.792.000		
									222.120.000		
									222.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
									1.500.000		
									1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
									80.000.000		
									80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									80.000.000		
									80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	X,XX,01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									80.000.000		
									80.000.000		
									80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
									320.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1		320,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,05,02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15,000,000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15,000,000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	100		60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,05,10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230,500,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130		230,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,196,806,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1		1,196,806,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,06,01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		180,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				85,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		85,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,08				Fasilitasi Kunjungan Tamu				55,650,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		55,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				426,156,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12		426,156,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,06,11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						236,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		236,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X,XX,01,1,07,01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan		Unit	0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,05			Pengadaan Mebel				50.000,000			
					Jumlah paket pengadaan meubelair		Paket	1	50.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				151.000,000			
					Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin		Paket	1	151.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,07,10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000,000			
					Jumlah paket Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya		Paket	1	35.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.303.000,000			
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	1	3.303.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,08,01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000,000			
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	7.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD		Bulan	12	350.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,08,04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.946.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor		Bulan	12	2.946.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					608.000,000			
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	1	608.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X,XX,01,1,09,01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		Bulan	12	225.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,05			Pemeliharaan Mebel				3.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	3.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	110.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000,000			
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Unit	1	200.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X,XX,01,1,09,10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000,000			
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Bulan	12	70.000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik									158.806.549.000			
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,25				
Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik									125.106.417.000			
						Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,15				
									125,106,417,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8,01,04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						106,751,642,000		
						Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,11	106,751,642,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					106,751,642,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	91,5	2,475,030,000		
		8,01,04,1,01,03			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2,475,030,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Orang	500	147,430,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Orang	4000	2,327,600,000		
						Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	104,276,612,000		
		8,01,04,1,01,01			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				44,976,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun	Dokumen	1	44,976,000		OPD Provinsi
		8,01,04,1,01,04			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				364,136,000		
						Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	Laporan	7	236,136,000		
						Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	Laporan	6	128,000,000		
		8,01,04,1,01,05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				103,867,500,000		
						Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	Laporan	35	103,867,500,000		OPD Provinsi
		8,01,05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						3,382,655,000		
						Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,39	3,382,655,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					3,382,655,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	91,5	2,728,425,000		
		8,01,05,1,01,03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Ponghayat Kepercayaan di Daerah				2,728,425,000		

					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	Orang	560		359,260,000		
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	Orang	500		237,815,000		
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	Orang	3000		2,131,350,000		
					Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100		654,230,000		
		8,01,05,1,01,01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				51,515,000		
					Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	1		51,515,000		
		8,01,05,1,01,02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				113,905,000		
					Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	Laporan	1		113,905,000		
		8,01,05,1,01,04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				295,870,000		
					Jumlah laporan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	Laporan	1		55,570,000		
					Jumlah Laporan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	Laporan	1		240,300,000		
		8,01,05,1,01,05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				192,940,000		
					Jumlah laporan fasilitas/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	Laporan	1		192,940,000		
		8,01,06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						14,972,120,000		
					Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,9		14,972,120,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					14,972,120,000		
					Jumlah laporan fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan)	Laporan	1		11,245,250,000		
		8,01,06,1,01,01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kotabagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				38,020,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	Laporan	1		38.020,000		
		8.01.06.1.01.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				386.940,000		
						Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP (laporan)	Laporan	1		266.000,000		
						Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	Laporan	1		120.940,000		
		8.01.06.1.01.05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				9.310.290,000		
						Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	Laporan	1		64.500,000		
						Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	Laporan	1		9.245.790,000		
		8.01.06.1.01.06				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.510.000,000		
						Jumlah Laporan Fasilitas Forkopimda (laporan)	Laporan	1		1.510.000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)	%	85		2.538.190,000		
		8.01.06.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.538.190,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	Orang	3000		2.127.600,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	Orang	380		410.590,000		
						Persentase penanganan konflik sosial (%)	%	100		1.188.680,000		
		8.01.06.1.01.02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				648.000,000		
						Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	Laporan	60		648.000,000		
		8.01.06.1.01.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				540.680,000		
						Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	Laporan	1		193.190,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	Laporan	3		347.490,000		
	Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik									33.700.132.000		
						Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,35		33.700.132.000		
		8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							3.328.050.000		
						Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,4		3.328.050.000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						3.328.050.000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	%	90		2.871.480,000		
		8.01.02.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					2.735.750.000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	Orang	100		70.990.000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	Orang	3350		2.664.760.000		
		8.01.02.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					135.730.000		
						Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	Laporan	1		101.800.000		
						Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	Laporan	1		33.930.000		
						Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)	%	85		456.570.000		
		8.01.02.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					38.115.000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	Laporan	1		38.115,000		
		8.01.02.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					216.355.000		
						Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	Orang	400		216.355,000		
		8.01.02.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					9.750.000		

					Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks nاپiter dan masyarakat rentan (laporan)	Laporan	1		9.750.000		
		8.01.02.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				192.350.000		
					"Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)"	Laporan	1		192.350.000		
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						30.372.082.000		
					Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,3		30.372.082.000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					30.372.082.000		
					Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	Laporan	1		26.265.515.000		
		8.01.03.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				46.810.000		
					Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	Laporan	1		46.810.000		
		8.01.03.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				421.745.000		
					Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1		421.745.000		
		8.01.03.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				25.796.960.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2023				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	Laporan	1		139,790,000		
						Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan)	Laporan	1		25,857,170,000		
						Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	%	90,5		366,470,000		
		8,01.03.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				366,470,000		
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang)	Orang	160		95,680,000		
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang)	Orang	320		189,400,000		
						Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	160		81,390,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	%	90,5		2,700,545,000		
		8,01.03.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2,700,545,000		
						Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	Orang	150		152,060,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	3640		2,548,485,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	%	90,5		1,039,552,000		
		8,01.03.1.01.02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				197,640,000		
						Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1		197,640,000		
		8,01.03.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				615,385,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	Orang	385		339,585,000		
						Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	Kabupaten/Kota	240		275,800,000		
		8,01.03.1.01.05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta				226,527,000		

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
					Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1		226.527.000		
					JUMLAH				176.044.924.000		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO



Ditandatangani secara elektronik oleh: